BSI BANK SYARIAH INDONESIA

EKSPANSI DAN AKSELERASI BISNIS UNTUK PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

LAPORAN TAHUNAN 2023 **PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk**

Sanggahan

Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") memuat pernyataan operasional, keuangan, proyeksi dan rencana, penerapan strategi dan kebijakan, serta tujuan BSI, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual yang secara material berbeda dari yang diperkirakan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan prediksi kondisi yang akan datang di lingkungan bisnis di mana Bank menjalankan kegiatan usaha. BSI tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

EKSPANSI DAN **AKSELERASI BISNIS** UNTUK **PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN**

Tahun 2023 memberikan catatan penting bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). Bertepatan dengan 17 Agustus 2023, Bank berhasil meningkatkan status *representative office* di Dubai, Uni Emirat Arab, menjadi *full branch*. Perubahan ini akan sangat mendukung ekspansi BSI dalam memaksimalkan potensi pasar global. Kebijakan strategis ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Bank untuk menjadi **"Top 10 Global Islamic Bank"**.

Ekspansi Bank tak berhenti melalui pemantapan jaringan operasional di luar negeri maupun penyaluran pembiayaan. Inisiatif akselerasi juga terus dilakukan melalui pengembangan layanan digital agar dapat memberikan layanan yang maksimal, aman, dan nyaman kepada nasabah, sekaligus memperluas akses pasar. Bank terus memastikan pengamanan serta kerahasiaan data dari akses digital tersebut melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko di bidang teknologi informasi.

Seiring dengan kegiatan ekspansi dan akselerasi tersebut, BSI telah menyusun prosedur *Business Continuity Management* (BCM) dan penguatan manajemen organisasi. BSI berharap kebijakan strategis serta pencapaian pada tahun 2023 dapat mendukung penciptaan pertumbuhan kinerja Bank.

Beragam inisiatif dan inovasi yang dikembangkan tersebut membuat kinerja BSI terus tumbuh secara konsisten, seimbang, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan kontribusi positif untuk turut serta mendorong perekonomian nasional.

Pada saat bersamaan, BSI sebagai bank syariah terbesar terus mengembangkan dan mendampingi UMKM agar naik kelas. Bank juga tak berhenti memperkuat "Islamic Ecosystem", sehingga menjadi modal bagi BSI untuk bersaing di kancah global.

Kesinambungan Tema

2019

Berinovasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Pada tahun 2019, BRIsyariah yang telah mencapai usia ke-11 tahun tak pernah henti bermuhasabah demi kemajuan dan berkembang bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan yang berkelanjutan senantiasa menjadi goal BRIsyariah dalam beraktivitas dan menapaki bisnis ke depan. Di balik pertumbuhan yang berkelanjutan tersebut tentu ada banyak sekali elemen bisnis yang semuanya saling berkaitan dan bersinergi baik dalam hal operasional, kepatuhan, maupun segmen yang menjadi fokus bisnis BRIsyariah.

Inovasi dalam hal ini sangat berperan besar dan berlaku universal di tiap lini struktur organisasi BRIsyariah. Inovasi dalam hal operasional, misalnya. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, BRIsyariah berkomitmen memperkaya dan melengkapi fitur-fitur *electronic banking* (*e-banking*) dengan terus melakukan inovasi yang dilandasi pengalaman dan atau kebutuhan nasabah. Di tahun 2019 BRIsyariah meluncurkan i-Kurma, Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani. i-Kurma, yang merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro diluncurkan di milad BRIsyariah ke-11. i-Kurma akan mempercepat proses pencairan pembiayaan mikro.

Tak hanya fitur, BRIsyariah juga selalu berupaya menghadirkan produk dan layanan baru yang dapat menggugah nasabah akan Solusi Keuangan yang Amanah. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, aktivitas yang dilakukan BRIsyariah senafas dengan yang diinginkan Pemerintah dan Otoritas Keuangan terkait, yakni adanya peningkatan inklusi keuangan dan merata di seluruh khalayak.

2020

Menyebarkan Layanan Untuk UMKM di pelosok Negeri

BRIsyariah berkomitmen untuk terus memberikan layanan perbankan syariah yang amanah, melalui pengembangan teknologi dan inovasi digital guna kemudahan bagi para nasabah, utamanya untuk mencapai aspirasi dan visi misi menjadi bank ritel melalui digitalisasi, sebagai satu kesatuan dalam integrasi inklusi finansial Grup BRI yang dapat diandalkan.

Di tengah pandemi COVID-19, BRIsyariah melakukan sejumlah langkah agar pertumbuhan bisnis Bank tetap sehat. Yang utama dilakukan adalah optimalisasi layanan perbankan digital sebagai langkah adaptive operations, selektif dalam menyalurkan pembiayaan serta melakukan restrukturisasi sebagai pre-emptive strategies for sustainable financing portfolio.

Selain itu, Bank juga meningkatkan dana murah yang sehat serta buffer likuiditas sebagai penerapan healthy liquidity management. Hasilnya di tahun 2020, selain kenaikan laba, BRIsyariah juga tumbuh di sisi aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga.

2021

Energi Baru untuk Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang lahir dari merger 3 (tiga) bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) baru berusia 1 (satu) tahun. Kelahirannya pada 1 Februari 2021 langsung diresmikan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara.

Di usia yang masih belia, BSI telah menorehkan pencapaian yang menakjubkan. Rata-rata kinerja keuangan tumbuh tinggi. Integrasi kegiatan operasional dari bank *legacy* pun berjalan lancar. Bahkan BSI telah resmi membuka *representative office* di Dubai, yang merupakan pusat keuangan dunia.

Semua itu berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seluruh Insan BSI serta dukungan para pemangku kepentingan, sehingga Bank mampu memberikan manfaat besar. Atas dasar inilah, kami semua meneguhkan tekad, mengobarkan semangat, untuk membesarkan Bank Syariah Indonesia menjadi lebih kuat agar mampu menjadi Energi Baru Untuk Indonesia.

2022

Kolaborasi untuk Akselerasi Pertumbuhan

Tahun 2022 merupakan tahun penuh pertama operasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")dapat dilakukan secara komprehensif dan integratif, setelah ditetapkannya "Operational Day 1" pada tanggal 1 November 2021. Sepanjang tahun tersebut, BSI konsisten membangun sinergi antara kekuatan-kekuatan tiga bank syariah besar menjadi satu, baik dari sisi permodalan, teknologi informasi, infrastruktur layanan maupun ragam produk dan jasa. BSI juga bergerak cepat menggalang kolaborasi dengan berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Langkah-langkah sinergi dan kolaborasi tersebut terbukti mampu mendorong kinerja BSI ke tingkat yang memuaskan, sebagai ujung tombak perbankan syariah dalam lanskap perbankan nasional.

2023

Ekspansi dan Akselerasi Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Tahun 2023 memberikan catatan penting bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). Bertepatan dengan 17 Agustus 2023, Bank berhasil meningkatkan status *representative office* di Dubai, Uni Emirat Arab, menjadi *full branch*. Perubahan ini akan sangat mendukung ekspansi BSI dalam memaksimalkan potensi pasar global. Kebijakan strategis ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Bank untuk menjadi "Top 10 Global Islamic Bank".

Ekspansi Bank tak berhenti melalui pemantapan jaringan operasional di luar negeri maupun penyaluran pembiayaan. Inisiatif akselerasi juga terus dilakukan melalui pengembangan layanan digital agar dapat memberikan layanan yang maksimal, aman, dan nyaman kepada nasabah, sekaligus memperluas akses pasar. Bank terus memastikan pengamanan serta kerahasiaan data dari akses digital tersebut melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko di bidang teknologi informasi.

Seiring dengan kegiatan ekspansi dan akselerasi tersebut, BSI telah menyusun prosedur *Business Continuity Management* (BCM) dan penguatan manajemen organisasi. BSI berharap kebijakan strategis serta pencapaian pada tahun 2023 dapat mendukung penciptaan pertumbuhan kinerja Bank.

Beragam inisiatif dan inovasi yang dikembangkan tersebut membuat kinerja BSI terus tumbuh secara konsisten, seimbang, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan kontribusi positif untuk turut serta mendorong perekonomian nasional.

Pada saat bersamaan, BSI sebagai bank syariah terbesar terus mengembangkan dan mendampingi UMKM agar naik kelas. Bank juga tak berhenti memperkuat "Islamic Ecosystem", sehingga menjadi modal bagi BSI untuk bersaing di kancah global.

Daftar Isi

2 Kesinambungan Tema

11 Ikhtisar Utama

12 Ikhtisar Keuangan
16 Ikhtisar Saham
18 Aksi Korporasi
18 Informasi Penghentian Saham Sementara
19 Penerbitan Obligasi, Sukuk, atau Lainnya
20 Penghargaan dan Sertifikasi
26 Peristiwa Penting 2023

35 Laporan Manajemen

36 Laporan Dewan Komisaris
44 Dewan Komisaris
46 Laporan Direksi
56 Direksi
58 Laporan Dewan Pengawas Syariah
62 Dewan Pengawas Syariah
64 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi atas Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk

67 Profil Perusahaan

68 Identitas Perusahaan
70 Sekilas Perusahaan
72 Jejak Langkah
74 Visi Misi
75 Budaya/Nilai-Nilai Perusahaan
76 Bidang Usaha
78 Produk dan Layanan
87 Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi
100 Struktur Organisasi
102 Daftar Keanggotaan Asosiasi
103 Profil Dewan Komisaris
113 Profil Dewan Pengawas Syariah
117 Profil Direksi
127 Informasi Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dan Alasannya
128 Profil Pejabat SEVP
131 Profil Pejabat Eksekutif
136 Demografi Karyawan
138 Komposisi Pemegang Saham
143 Pemegang Saham Utama dan Pengendali
143 Struktur Korporasi
144 Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi
144 Kronologi Pencatatan Saham
145 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
145 Kantor Akuntan Publik
146 Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal
148 *Website* Perusahaan

151 Analisis dan Pembahasan Manajemen

152 Tinjauan Ekonomi dan Industri
156 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
168 Tinjauan Kinerja Keuangan

209 Tinjauan Pendukung Bisnis

210 Sumber Daya Manusia
222 Teknologi Informasi
234 Penerapan Sistem Manajemen Risiko

295 Tata Kelola Perusahaan

296 Tata Kelola Perusahaan
301 Struktur Tata Kelola
302 Rapat Umum Pemegang Saham
321 Dewan Komisaris
331 Komisaris Independen
355 Dewan Pengawas Syariah
367 Direksi
399 Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
402 Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris
432 Organ dan Komite di Bawah Direksi
449 Internal Audit
456 Sistem Pengendalian Internal
458 Manajemen Risiko
458 Akuntan Publik
460 Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorsime (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
474 Fungsi Kepatuhan
477 Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik
478 Perkara Penting
480 Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait
483 Hubungan Investor
484 Akses Informasi dan Data Perusahaan
496 Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Antikorupsi
500 Kode Etik
503 Pengelolaan *Whistleblowing System*
506 Tata Kelola Terintegrasi
509 Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya
509 Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang kepada Karyawan dan/atau Manajemen
510 *Buyback* Saham dan *Buyback* Obligasi
510 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
510 Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan
511 Penilaian Penerapan GCG
518 Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
524 Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*
525 Keterbukaan dalam Praktik *Bad Governance*
526 Pernyataan Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Tata Kelola yang Baik

529 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

530 Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

533 Laporan Keuangan

Lampiran

695 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah Indonesia dan Unit Usaha Syariah
701 Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik

Kualitas Aset Membaik

Pada tahun 2023, tidak hanya jumlah aset yang naik, tapi kualitasnya juga terus membaik dan didukung dengan permodalan yang semakin kuat, seperti ditunjukan melalui rasio NPF & CAR.

Rp353,62 Triliun

Total aset yang dibukukan oleh BSI pada tahun 2023 meningkat 15,67% atau Rp47,90 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp305,73 triliun sehingga menjadi Rp353,62 triliun.

Rp38,74 Triliun

Ekuitas BSI meningkat 15,62% atau Rp5,23 triliun, dari Rp33,51 triliun di tahun 2022 menjadi Rp38,74 triliun di tahun 2023.

21,04 %

Daya tahan BSI makin kuat, seperti ditunjukkan melalui rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Rasio*/CAR) yang mencapai 21,04% pada tahun 2023, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 20,29%.

2,08 %

Kualitas aset BSI terus membaik, antara lain ditunjukkan melalui *Non Performing Financing* (NPF) *gross* yang pada tahun 2023 sebesar 2,08%, turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,42%.

0,55 %

Pencapaian NPF neto BSI pada tahun 2023 lebih baik, yakni sebesar 0,55% turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,57%.

Kinerja Semakin Solid

Pada tahun 2023, kinerja BSI makin solid dengan pertumbuhan laba, maupun indikator kinerja lainnya. Beberapa di antaranya adalah:

Rp5,70 Triliun

BSI membukukan laba bersih tahun 2023 sebesar Rp5,70 triliun, lebih tinggi 33,88% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,26 triliun atau 110,72% dari Rencana Bisnis Bank.

194,35 %

Rasio *Cash Coverage* BSI pada tahun 2023 mencapai 194,35%, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 189,56%.

71,27 %

Rasio BOPO BSI pada tahun 2023 lebih baik, yakni sebesar 71,27%, turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 75,88%.

49,86 %

Rasio CIR BSI pada tahun 2023 lebih baik, yakni sebesar 49,86%, turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 51,01%.

Rp22,25 Triliun

Total pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib yang berhasil diperoleh oleh Bank Syariah Indonesia di tahun 2023 mencapai Rp22,25 triliun, meningkat 13,40% atau Rp2,63 triliun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp19,62 triliun.

Rp4,2 Triliun

Fee based income tahun 2023 tumbuh 13,60%, sehingga menjadi Rp4,2 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp3,7 triliun.

Apresiasi

Sejumlah penghargaan dari para pemangku kepentingan internasional dan nasional, antara lain:

01	Best Islamic Bank in Indonesia	Penghargaan dari Euromoney dalam Euromoney Islamic Finance Awards 2023.
02	Best Islamic Finance Bank	Penghargaan dari Alpha Southeast Asia dalam Alpha Southeast Asia Islamic Finance Awards 2023.
03	The Indonesia Customer Experience of The Year	Penghargaan dari Asian Business Review dalam Asian Experience Awards 2023.
04	Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik	Penghargaan dari Bank Indonesia dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2023.
05	Bank Teraktif dan Terinovatif dalam Sosialisasi Program Penjamin Simpanan – Kelompok KBMI 3	Penghargaan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam LPS Banking Award 2023.

Kinerja Operasional Semakin Mumpuni

Cabang Penuh di Dubai

Pada 17 Agustus 2023, BSI berhasil meningkatkan status *representative office* di Dubai, Uni Emirat Arab, menjadi *full branch*. Perubahan ini akan sangat mendukung ekspansi BSI dalam memaksimalkan potensi pasar global. Kebijakan strategis ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Bank untuk menjadi "Top 10 Global Islamic Bank".

91,50
(Sangat Terpercaya)

Struktur Tata Kelola (30,27)
Proses Tata Kelola (30,02)
Hasil Tata Kelola (31,21)

Penilaian penerapan GCG tahun 2023 dari pihak eksternal, yakni Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

2
(Baik)

Hasil penilaian penerapan GCG secara mandiri (*self-assessment*) untuk semester I dan II tahun 2023.

01

IKHTISAR UTAMA

Ikhtisar Keuangan

Posisi Keuangan

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022*)	2021
Kas	5.255.841	4.951.469	4.119.903
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	32.440.778	31.778.458	20.563.580
Giro dan Penempatan pada Bank Lain-Neto	2.303.728	2.475.917	1.841.551
Investasi pada Surat Berharga-Neto	71.169.020	57.841.271	67.579.070
Tagihan Akseptasi	426.916	476.589	159.880
Piutang Murabahah	136.503.096	124.873.356	101.685.560
Piutang *Istishna*	30	132	359
Piutang Sewa *Ijarah*	218.400	13.278	101.570
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian Piutang	(4.361.368)	(4.184.787)	(3.450.506)
Jumlah Piutang-Neto	**132.360.158**	**120.701.979**	**98.336.983**
Pinjaman Qardh- Neto	10.489.164	8.867.013	9.081.400
Pembiayaan *Mudharabah*-Neto	1.831.652	1.001.957	1.592.314
Pembiayaan *Musyarakah*-Neto	83.756.501	66.450.946	53.903.123
Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah* - Neto	2.190.107	1.484.573	901.565
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto	5.352.843	5.396.010	3.871.257
Aset tidak berwujud - Neto	1.128.334	258.688	184.696
Aset Pajak Tangguhan	1.665.694	1.675.103	1.445.324
Aset Lain-lain-Neto	3.253.388	2.367.465	1.708.435
JUMLAH ASET	**353.624.124**	**305.727.438**	**265.289.081**
Liabilitas Segera	1.316.067	1.009.502	608.554
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	255.932	192.775	158.478
Giro *Wadiah*	20.847.524	21.797.852	21.090.695
Tabungan *Wadiah*	47.026.374	44.214.405	36.157.195
Jumlah Simpanan *Wadiah*	**67.873.898**	**66.012.257**	**57.247.890**
Simpanan dari Bank Lain	1.761.301	2.218.697	115.938
Liabilitas kepada Bank Indonesia	11.900.055	-	-
Kewajiban Akseptasi	431.228	481.403	161.495
Utang Pajak	539.042	667.485	504.078
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	667.264	689.018	836.491
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	32.017	28.873	17.194
Liabilitas Lain-lain	2.446.107	2.355.781	2.236.358
JUMLAH LIABILITAS	**87.222.911**	**73.655.791**	**61.886.476**

*) Direklasifikasikan

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022*)	2021
Giro *Mudharabah*	32.417.260	22.754.968	13.318.627
Tabungan *Mudharabah*	78.280.185	72.897.352	65.102.491
Deposito *Mudharabah*	115.984.789	100.760.342	98.592.553
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi	200.000	1.375.000	1.375.000
Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan	3.608	-	-
Pembiayaan yang Diterima	776.250	778.375	-
JUMLAH DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**227.662.092**	**198.566.037**	**178.388.671**
Modal disetor	23.064.630	23.064.630	20.564.654
Tambahan Modal Disetor	(3.929.100)	(3.929.100)	(6.366.776)
Ekuitas *Merging Entities*	-	-	-
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	444.530	444.530	444.530
Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja Pasti	241.462	268.904	140.271
(Kerugian)/Keuntungan Surat Berharga - bersih	6.154	(55.477)	22.263
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	2.236.713	1.384.677	779.036
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	16.674.732	12.327.446	9.429.956
• Tahun lalu	10.970.989	8.067.264	6.468.781
• Tahun berjalan	5.703.743	4.260.182	2.961.175
JUMLAH EKUITAS	**38.739.121**	**33.505.610**	**25.013.934**
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER, DAN EKUITAS	**353.624.124**	**305.727.438**	**265.289.081**

*) Direklasifikasikan

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*	**22.251.743**	**19.622.865**	**17.808.432**
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer	(5.993.168)	(4.032.169)	(4.378.807)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	**16.258.575**	**15.590.696**	**13.429.625**
Pendapatan Usaha Lainnya	4.204.466	3.701.111	3.012.246
Beban Usaha	(10.249.204)	(9.895.336)	(8.782.773)
Beban CKPN Aset Produktif dan Non Produktif - Neto	(2.622.479)	(3.748.797)	(3.551.249)
Laba Usaha	**7.591.358**	**5.647.674**	**4.107.849**
Pendapatan (Beban) Non Operasional- Neto	(2.156)	8.534	(45.641)

IKHTISAR KEUANGAN

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak	7.589.202	5.656.208	4.062.208
Zakat	(189.730)	(141.405)	(101.684)
Beban Pajak Penghasilan	(1.695.729)	(1.254.621)	(932.319)
Laba Bersih	**5.703.743**	**4.260.182**	**3.028.205**
- Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk	5.703.743	4.260.182	3.028.205
- Diatribusikan ke Kepentingan Non Pengendali	-	-	-
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	34.189	50.893	189.591
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	5.737.932	4.311.075	3.217.796
- Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk	5.737.932	4.311.075	3.217.796
- Diatribusikan ke Kepentingan Non Pengendali	-	-	-
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	123,65	102,54	73,69
Laba per Saham Dilusian (dalam Rupiah penuh)	123,65	102,54	73,66

Arus Kas

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Operasi	2.041.035	1.885.530	16.696.794
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Investasi	(11.404.359)	5.994.708	(16.591.024)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan	10.162.997	4.798.909	(77.929)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	799.673	12.679.147	27.841
Kas & Setara Kas Awal Tahun	39.221.419	26.542.272	26.514.431
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	40.021.092	39.221.419	26.542.272

Rasio Keuangan

%

Uraian	2023	2022	2021
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,04	20,29	22,09
Non Performing Financing (NPF) *gross*	2,08	2,42	2,93
Non Performing Financing (NPF) *net*	0,55	0,57	0,87
Return On Assets (ROA)	2,35	1,98	1,61
Return On Equity (ROE)	16,88	16,84	13,71
Net Imbalan (NI)	5,82	6,31	6,04
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	71,27	75,88	80,46
Cost to Income Ratio (CIR)	49,86	51,01	52,57
Financing to Deposit Ratio (FDR)	81,73	79,37	73,39
Persentase Pelampauan BMPD	0,00	0,00	0,51
GWM Rupiah	6,76	8,30	5,05
GWM Valas	1,13	1,18	1,03
Posisi Devisa Neto	2,47	0,57	0,27

Ikhtisar Saham

Informasi Harga Saham

Tahun	Harga Per Saham (Rp)				Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham)	Volume Transaksi (Lembar Saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2023							
Triwulan I	1.650	1.700	1.650	1.680	46.129.260.138	3.133.128.500	77,49
Triwulan II	1.670	1.690	1.655	1.690	46.129.260.138	1.778.645.300	77,96
Triwulan III	1.620	1.630	1.605	1.625	46.129.260.138	1.448.638.700	74,96
Triwulan IV	1.740	1.745	1.710	1.740	46.129.260.138	1.169.014.400	80,26
2022							
Triwulan I	1.620	1.625	1.605	1.605	41.129.307.343	1.190.638.400	66,01
Triwulan II	1.350	1.355	1.340	1.340	41.129.307.343	560.250.900	55,11
Triwulan III	1.495	1.500	1.400	1.470	41.129.307.343	1.289.347.000	60,46
Triwulan IV	1.295	1.310	1.270	1.290	46.129.260.138	980.433.400	59,51
2021							
Triwulan I	2.350	2.350	2.210	2.290	41.031.208.943	10.061.997.400	93,96
Triwulan II	2.180	2.370	2.150	2.300	41.128.868.743	3.808.326.000	94,60
Triwulan III	2.050	2.080	2.010	2.040	41.128.868.743	4.356.091.600	83,90
Triwulan IV	1.790	1.805	1.780	1.780	41.129.307.343	1.880.546.500	73,21

Harga Penutupan

(Rp/lembar)

	2023	2022	2021
Triwulan I	1.680	1.605	2.290
Triwulan II	1.690	1.340	2.300
Triwulan III	1.625	1.470	2.040
Triwulan IV	1.740	1.290	1.780

Volume Perdagangan

(Lembar)

	2023	2022	2021
Triwulan I	3.133.128.500	1.190.638.400	10.061.997.400
Triwulan II	1.778.645.300	560.250.900	3.808.326.000
Triwulan III	1.448.638.700	1.289.347.000	4.356.091.600
Triwulan IV	1.169.014.400	980.433.400	1.880.546.500

Kinerja Saham

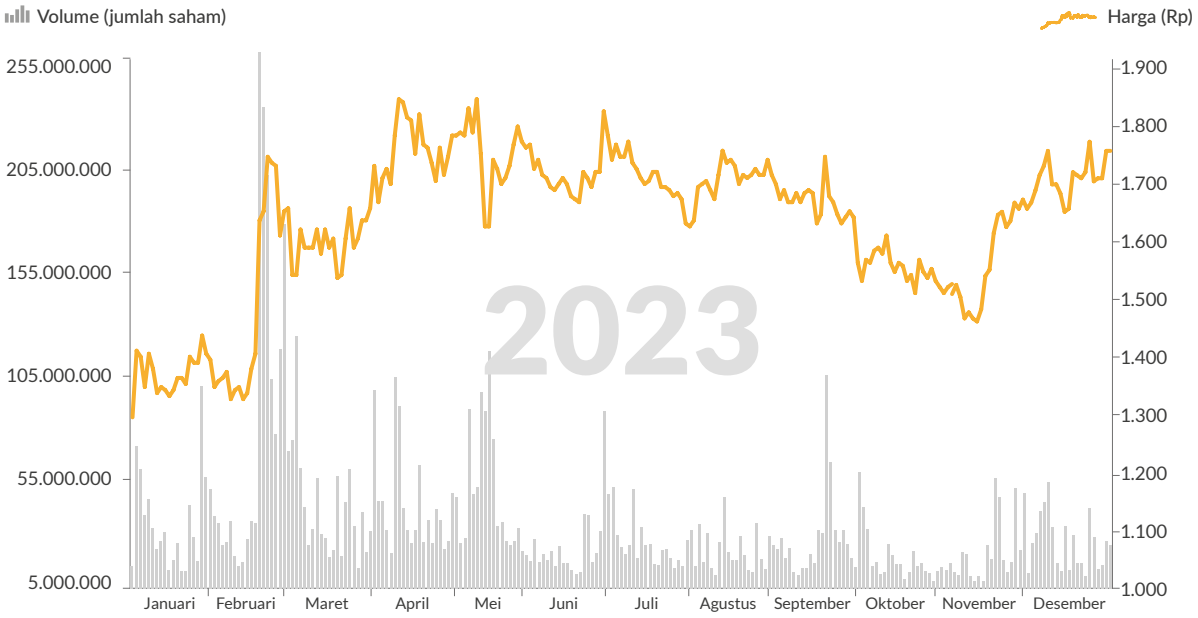

Aksi Korporasi

Sebagai tindak lanjut salah satu putusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI pada tanggal 22 Mei 2023 yaitu persetujuan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham dengan realisasi sebagai berikut :

Tanggal Pelaksanaan	Dividen Per Saham	Jumlah Saham		Harga Saham	
		Sebelum Dividen	Setelah Dividen	Sebelum Dividen	Setelah Dividen
30 Mei - 6 Juni 2023	Rp9,23	46.129.260.138	46.129.260.138	1.765	1.710

Informasi Penghentian Saham Sementara

Sepanjang tahun 2023, saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak mengalami atau mendapat penghentian perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Penerbitan Obligasi, Sukuk, atau Lainnya

Tahun Penerbitan	Nama Sukuk	Nilai Sukuk	Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat dan Lembaga Pemeringkat		Bursa
					2023	2022	
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi 1 Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h. PT Bank BRIsyariah Tbk)	Rp1 Triliun	9,5%	16 November 2023	A+ (idn) (PT Fitch Ratings indonesia)	A+ (PT Fitch Ratings Indonesia	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h. PT Bank Syariah Mandiri)	Rp375 Miliar	10%	22 Desember 2023	idAA (sy) (PEFINDO)	AA (PEFINDO)	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
2023	Sukuk Mudharabah Muqayadah Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI tbk Tahun 2023 Tahap I	Rp3,7 Miliar	0,55%	26 Desember 2035	-	-	-
2023	Sukuk Mudharabah Subordinasi Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2023	Rp200 Miliar	7,90%	15 Desember 2028	idAA (sy) (PEFINDO)	-	-

Penghargaan dan Sertifikasi

PENGHARGAAN

Sepanjang tahun 2023, Bank Syariah Indonesia telah meraih 140 penghargaan dari berbagai lembaga, pada level nasional maupun internasional, antara lain adalah sebagai berikut:

28 Februari — 01

Rekor Indonesia

Diselenggarakan oleh
Museum Rekor Dunia Indonesia

Predikat
Proses Merger Bank Syariah Tercepat di Indonesia

31 Mei — 02

Bisnis Indonesia Award 2023

Diselenggarakan oleh
Bisnis Indonesia

Kategori
Bank Syariah

31 Mei — 03

Indonesia Customer Service Quality Award 2023

Diselenggarakan oleh
SWA

Predikat
Excellent

20 Juni — 04

20th Infobank-MRI Banking Service Excellence Award 2023

Diselenggarakan oleh
Infobank

Predikat
The 1st Best in Service Excellence

23 Juni — 05

Euromoney Islamic Finance Awards 2023

Diselenggarakan oleh
Euromoney

Predikat
Best Islamic Bank in Indonesia

22 Agustus — 06

Alpha Southeast Asia Islamic Finance Awards 2023

Diselenggarakan oleh
Alpha Southeast Asia

Predikat
- Best Islamic Finance Bank
- Best Islamic Finance Retail Bank

24 Agustus 07

Bisnis Indonesia Finance Award 2023

Diselenggarakan oleh
Bisnis Indonesia

Predikat
The Most Outstanding Bank Syariah

25 Agustus 08

28th Infobank Award 2023

Diselenggarakan oleh
Infobank

Predikat
The Best Financial Performance Bank in 2022 (KBMI 3) Asset > Rp200 Trillion

25 Agustus 09

28th Infobank Award 2023

Diselenggarakan oleh
Infobank

Predikat
Excellent Financial Performance Bank in 2022

30 Agustus 10

Merdeka Award 2023

Diselenggarakan oleh
Merdeka.com

Predikat
Inovasi untuk Negeri

31 Agustus 11

Indonesia Award 2023

Diselenggarakan oleh
iNews

Predikat
Special Recognition of Outstanding Initiative atas inisiatif Program Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia)

7 September 12

13th Institutional Investor Corporate Awards 2023

Diselenggarakan oleh
Alpha South East Asia

Predikat
Most Organised Investor Relations

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

7 September 13

13th Institutional Investor Corporate Awards 2023

Diselenggarakan oleh
Alpha South East Asia

Predikat
Best Senior Management IR Support

7 September 14

13th Institutional Investor Corporate Awards 2023

Diselenggarakan oleh
Alpha South East Asia

Predikat
Most Consistent Dividend Policy

7 September 15

13th Institutional Investor Corporate Awards 2023

Diselenggarakan oleh
Alpha South East Asia

Predikat
Best Strategic CSR

14 September 16

Global Islamic Award 2023

Diselenggarakan oleh
GIFA

Predikat
Market Leadership Award (Islamic Banking) 2023

21 September 17

Detik Awards 2023

Diselenggarakan oleh
Detik.com

Predikat
Bank Pertumbuhan Laba Tertinggi

27 September 18

Infobank Sharia Award 2023

Diselenggarakan oleh
Infobank

Predikat
Excellent Financial Performance Islamic Commercial Bank in 2022 (kinerja tahunan 2022)

27 September 19

Infobank Sharia Award 2023

Diselenggarakan oleh
Infobank

Predikat
The Best of The Best Islamic Commercial Bank in 2022 (peraih indeks tertinggi di kelas bank umum syariah)

5 Oktober 20

Asian Experience Awards 2023

Diselenggarakan oleh
Asian Business Review

Predikat
The Indonesia Customer Experience of the Year

30 Oktober 21

Road to CNBC Indonesia Awards 2023

Diselenggarakan oleh
CNBC Indonesia

Predikat
Most Innovative Ziswaf Fundraising in Mobile Banking

28 November 22

Islamic Retail Banking Awards 2023

Diselenggarakan oleh
Cambridge

Predikat
The Strongest Islamic Retail Bank in Indonesia 2023

28 November 23

Islamic Retail Banking Awards 2023

Diselenggarakan oleh
Cambridge

Predikat
IRBA Exellence Award fo Priority Banking in Indonesia 2023

29 November 24

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023

Diselenggarakan oleh
Bank Indonesia

Predikat
Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

30 November 25

Anugerah Syariah Republika 2023

Diselenggarakan oleh
Republika

Predikat
Bank Syariah Terbaik

30 November 26

Anugerah Syariah Republika 2023

Diselenggarakan oleh
Republika

Predikat
Tabungan Syariah Terbaik

6 Desember 27

LPS Banking Award 2023

Diselenggarakan oleh
LPS

Kategori
Bank Teraktif dan Terinovatif dalam Sosialisasi Program Penjamin Simpanan - Kelompok KBMI 3

13 Desember 28

CNBC Award 2023

Diselenggarakan oleh
CNBC Indonesia

Predikat
The Extraordinary Sharia Banking Company on GCG

12 Desember 29

Anugerah CSR IDX Channel 2023

Diselenggarakan oleh
IDX Channel

Kategori
Economic Development Initiatives

20 Desember 30

CGPI Awards 2023

Diselenggarakan oleh
SWA & IICG

Predikat
Most Trusted Companies

SERTIFIKASI

Sertifikat	Tanggal Perolehan	Sertifikasi	Pemberi/Lembaga Sertifikasi	Masa Berlaku
	18 Mei 2021	ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu	British Standards Institution	2023
	20 Mei 2021	ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi	British Standards Institution	2023
	17 Desember 2021	ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)	Tuvnord	2024
	22 Desember 2022	ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan	Chesna Certification	2025

Peristiwa Penting 2023

12 Januari
Apresiasi Nasabah Gadai Emas dan Cicil Emas, BSI Berikan Hadiah Program Hujan Emas

19 Januari
Dorong Islamic Ecosystem, Program Talenta Wirausaha BSI 2023 Diperluas Hingga Pesantren

20 Januari
BSI Bersinergi dengan TNI AL Perkuat Inklusi Keuangan Syariah

1 Februari
Dua Tahun BSI, Laba Tumbuh Impresif 40,68% Capai Rp4,26 Triliun Sepanjang Tahun 2022

9 Februari
Dukung Ketahanan Pangan, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Luncurkan Kartu Tani Digital dan KUR BSI di Aceh

15 Februari
Global Islamic Finance Summit 2023, Komitmen Kuat BSI Dorong Kemajuan Ekonomi Syariah di Indonesia

23 Februari
Menyambut Milad BSI ke-2, BSI gelar BSI Charity Concert 2023 Usung Tema Perjalanan Mahakarya

18 Maret
BSI Resmikan Masjid di Bakauheni, Lampung. Perkuat Kontribusi Untuk Sektor Pariwisata & Religi di Wilayah Sumatera

PERISTIWA PENTING 2023

28 Maret
Perkuat Kontribusi bagi Masyarakat dan Negara, BSI Salurkan Zakat Rp173 Miliar

27 April
Pembiayaan BSI Tumbuh Lebih dari 20% pada Triwulan I 2023, Kinerja Keuangan BSI Semakin Solid

22 Mei
RUPST BSI Sepakat Perkuat Transformasi Digital dan Culture

26 Mei
BSI dan BSI Maslahat Resmikan Desa Bangun Sejahtera Indonesia Banten

13 Juni
BSI Dorong Kemajuan Sepakbola Tanah Air Lewat Dukungan Kerja sama BSI dan PSSI

16 Juni
BSI Gandeng Universitas Brawijaya, Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi

19 Juni
Pencatatan Perdana EBAS-SP di Bursa Efek, BSI : Gebrakan Baru Tumbuhkan Ekonomi Syariah

29 Juni
BSI Salurkan 7.112 Hewan Kurban Sehat & Aman Konsumsi ke Seluruh Indonesia

PERISTIWA PENTING 2023

12 Juli
BSI Gencarkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Anak Muda

13 Juli
BSI Kolaborasi Bareng Putri Ariani, Campaign #LEVELUP Dukung Anak Muda

14 Agustus
BSI Bersama Relawan Bakti BUMN Siap Tuntaskan Misi Sosial di Meunasah Asan Aceh Timur

17 Agustus
BSI & Relawan Bakti BUMN Dorong Kualitas Pendidikan Hingga Ekonomi Masyarakat Aceh

18 Agustus
Dorong Masyarakat Punya Rumah, BSI
Telah Salurkan 57 Ribu Rumah Subsidi

3 September
BSI mendapat peringkat 3 ESG
Rating Global

6 September
Wujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan,
Perbankan Syariah Perkuat
Implementasi GRC Terintegrasi

19 September
Pembiayaan Terus Tumbuh, Laba BSI
Melesat 32,41% pada Triwulan II 2023

PERISTIWA PENTING 2023

23 Oktober
Berikan Layanan Terbaik Melalui Transformasi Digital, BSI Raih Penghargaan Internasional

25 Oktober
Dorong Inklusi Pasar Modal Syariah, BSI Luncurkan 6 Produk Reksa Dana Syariah

31 Oktober
Market Share Perbankan Syariah Terus Meningkat, Laba BSI Tumbuh 31% pada Triwulan III 2023

29 November
BSI Optimalkan Kantor Cabang Dubai, Perkuat Kemitraan Strategis dengan Uni Emirat Arab

02

LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Komisaris

Melihat perkembangan kinerja BSI tahun 2023, Dewan Komisaris semakin optimistis dengan pencapaian visi untuk menjadikan BSI sebagai "Top 10 Global Islamic Bank".

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Atas berkah dan rahmat-Nya, pada tahun buku 2023 ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") mampu membukukan kinerja yang baik, walaupun kondisi eksternal yang dihadapi masih penuh tantangan. Kinerja perekonomian global mengalami perlambatan. Sementara di dalam negeri, harus berhadapan dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, kebijakan moneter untuk meredam inflasi serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah merespons perkembangan eksternal pada tahun buku tersebut dengan baik. Melalui penerapan berbagai strategi dan kebijakan strategis yang diterapkan, tentu di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kinerja BSI pun tumbuh positif.

Bahkan pada tahun 2023, Bank telah berhasil meningkatkan status *Representative Office* di Dubai menjadi *Full Branch*. Dengan demikian, aktivitas bisnis Bank untuk memaksimalkan potensi pasar global semakin terbuka.

Kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pun terus meningkat. Melihat perkembangan kinerja BSI tersebut, Dewan Komisaris semakin optimistis dengan pencapaian visi untuk menjadikan BSI sebagai "Top 10 Global Islamic Bank".

Karena itu, Dewan Komisaris sesuai dengan peran dan fungsinya, akan terus memberikan dukungan kepada Direksi dalam meningkatkan posisi BSI sebagai pemain global. Pencapaian tersebut kelak, bukan hanya menjadi inspirasi bagi industri perbankan di Tanah Air, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional.

Muliaman D. Hadad
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

PANDANGAN TERHADAP KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI

Perjalanan usaha BSI pada tahun 2023 diwarnai oleh perlambatan pemulihan ekonomi di tingkat global. Seperti disampaikan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*/IMF) dalam laporannya "*World Economic Outlook*" edisi Oktober 2023, pemulihan ekonomi global dari dampak pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina cenderung lambat. Bahkan tidak merata antarnegara. Di awal tahun 2023, sempat terjadi pertumbuhan yang tinggi, namun tidak berlangsung lama.

Memasuki kuartal-kuartal berikutnya, perekonomian global kembali melambat. Karena itu, IMF memperkirakan, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 hanya sampai 3,0%, lebih rendah dari pencapaian tahun 2022 yang sebesar 3,5%.

Perekonomian negara maju masih mengalami tekanan. Pada tahun ini, pertumbuhannya diperkirakan hanya 1,5%. Sedangkan untuk negara-negara berkembang dan *emerging*, proyeksinya sedikit melambat, yakni 4,0%, dari 4,1% pada tahun 2022.

Sementara untuk inflasi global, IMF memperkirakan bakal terus turun, dari 8,7% pada 2022 menjadi 6,9% di tahun 2023. Inflasi yang masih cenderung tinggi ini membuat bank sentral Amerika Serikat, yakni Federal Reserve (*The Fed*) merespons dengan menaikkan suku bunga acuannya hingga mencapai 5,50%, yang menurut *Bloomberg* tertinggi sejak tahun 2001.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed tersebut ikut mendorong negara-negara lain menaikkan suku bunga acuan, termasuk Indonesia. Sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan, yaitu BI 7-day (*Reverse*) Repo Rate dari 5,75% menjadi 6,00% sebagai upaya meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi di dalam negeri.

Di tengah kondisi perekonomian yang masih dinamis tersebut, daya tahan perekonomian Indonesia tampak masih kuat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05%, walaupun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,31%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian nasional, dengan kontribusi 53,18%, dan tumbuh 4,82%.

Sedangkan inflasi pada tahun 2023, menurut catatan Bank Indonesia, ada di posisi yang rendah, yakni 2,61%. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,5%.

Seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang stabil, kinerja perbankan nasional juga tumbuh positif. Asetnya menyentuh Rp11.984 triliun pada Desember 2023, tumbuh 5,91% secara tahunan (year on year/yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 3,82% (yoy) atau sebesar Rp8.611triliun dan penyaluran kredit juga meningkat 10,37% (yoy) atau sebesar 7.248 triliun di akhir tahun 2023.

Tingkat kesehatan perbankan juga tetap terjaga dengan baik. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada di level 27,65% pada Desember 2023, atau di atas ketentuan minimum BASEL III, yaitu 10%.

Kondisi yang sama terjadi pada industri perbankan syariah, yang asetnya per Desember 2023 tumbuh 11,21% (yoy), naik Rp89,9 triliun menjadi Rp892,2 triliun. Pada periode yang sama, DPK meningkat 10,49% (yoy) ke level Rp684,5 triliun. Hal ini terjadi sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah yang didukung peningkatan infrastruktur dan layanan akses digital.

Tingkat kesehatan perbankan syariah sangat baik, dengan rasio CAR sebesar 25,41% pada Desember 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri nasional. Dari sisi kualitas pembiayaan perbankan syariah juga menunjukkan kinerja positif. Tingkat rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* membaik dari 2,41% di akhir 2022 menjadi 2,17% di Desember 2023 dan lebih rendah dari industri perbankan nasional.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Terkait Pengelolaan Perusahaan

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Direksi dalam pengelolaan Bank merupakan bagian dari proses pelaksanaan fungsi di bidang pengawasan. Ketentuan pengawasan itu, seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PPOJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, terkait dengan kebijakan serta jalannya pengurusan perusahaan.

Sementara evaluasi kinerja Direksi, dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Beberapa indikator yang masuk dalam KPI tersebut, antara lain mencakup laba Bank, pembiayaan, dan inisiatif strategis. Selain itu, parameternya adalah tingkat kesehatan Bank serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris juga turut mempertimbangkan kondisi eksternal yang berkembang dalam memberikan penilaian terhadap Direksi. Seperti pada tahun 2023, dalam rangka meredam inflasi dan tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Selain itu, pergerakan ekonomi juga cenderung dinamis, sehingga memberikan tantangan pada pengelolaan Bank.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah merespons situasi eksternal dengan sangat baik, sehingga menghasilkan kinerja yang positif bagi BSI. Pencapaian tersebut tentu tak dapat dipisahkan dari penerapan strategi dan kebijakan strategis yang tepat.

Beberapa strategi yang telah diterapkan, misalnya pengelolaan pertumbuhan pembiayaan dilakukan secara sehat melalui berbagai produk dengan dukungan *mobile banking*. Selain itu, Direksi memperkuat pendanaan dengan meningkatkan akuisisi *payroll*, tabungan *wadiah*, tabungan bisnis, tabungan haji, serta peningkatan *fee based income*.

Program digitalisasi juga terus ditingkatkan, baik untuk transaksi nasabah maupun proses bisnis. Inisiatif tersebut bertujuan untuk mempercepat pencapaian *sales level agreement* (SLA) layanan nasabah dan peningkatan *fee based income* Bank.

Tak kalah pentingnya adalah strategi percepatan pertumbuhan bisnis *Islamic Ecosystem*. Hal itu mencakup ZISWAF, ekonomi masjid, rumah sakit, pesantren, pendidikan Islam, serta bisnis haji dan umrah. Hal itu dilakukan melalui pengembangan *platform* dan solusi yang inovatif serta strategi akuisisi yang efektif.

Beragam strategi yang telah direalisasikan tersebut membuahkan hasil yang sangat baik. Laba bersih Bank pada tahun 2023 tumbuh 33,88%, dari Rp4,3 triliun di tahun 2022 menjadi Rp5,7 triliun pada tahun 2023.

Total pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* yang berhasil diperoleh oleh Bank Syariah Indonesia di tahun 2023 mencapai Rp22,3 triliun, meningkat 13,40% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp19,6 triliun. Sementara *fee based income* tumbuh 12,08% (yoy), sehingga menjadi Rp4,2 triliun. Pada saat yang sama, biaya *overhead* terjaga di posisi Rp10,1 triliun, hanya tumbuh 2,40%.

Untuk penyaluran dana, total yang direalisasikan oleh Bank mencapai Rp240,3 triliun, meningkat 16,70% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp207,7 triliun. Dari sisi kualitas pun membaik, seperti ditunjukkan oleh *Non Performing Financing* (NPF) yang hanya 2,08% sementara tahun 2022 mencapai 2,42%.

Selain itu, secara umum pencapaian kinerja Bank pada tahun 2023 berada di atas target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Karena itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja yang baik tersebut.

PENGAWASAN TERHADAP PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan strategi yang dijalankan oleh Direksi atau manajemen, antara lain mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), yang antara lain mencakup kebijakan dan strategi yang diterapkan.

Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan RBB yang disampaikan kepada OJK setiap semester. Penilaian Dewan Komisaris terhadap RBB ini berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasinya, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Realisasi RBB sebagai berikut:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Bisnis berupa Penilaian Aspek Kuantitatif maupun Kualitatif terhadap realisasi rencana bisnis, termasuk penerapan prinsip syariah.
2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank secara umum, khususnya faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), tata kelola yang baik, profil risiko, terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai Upaya Perbaikan Kinerja Bank.

Merujuk pada hasil pengawasan tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah merumuskan rencana bisnis BSI dengan baik dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Begitu juga dari sisi implementasi, Direksi telah menjalankannya dengan sangat baik, dari pemantauan hingga keterlibatannya yang maksimal, mengingat BSI merupakan entitas yang baru beroperasi hampir 3 (tiga) tahun.

Lebih lanjut, proses pelaksanaan pengawasan juga dilakukan bersama komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian maupun nasihat terhadap kinerja Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank.

Oleh karenanya pada tahun 2023 ini Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah menjalankan pengurusan Bank dengan baik, sejak dari perumusan hingga implementasinya. Bahkan dalam proses tersebut, Dewan Komisaris ikut terlibat secara langsung, setidaknya dilakukan melalui rapat gabungan sepanjang tahun buku.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Penyusunan prospek usaha yang dilakukan oleh BSI mempertimbangkan kondisi eksternal yang berpotensi memengaruhi kinerja Bank, maupun situasi internal. Seluruhnya dilakukan kajian sebelum target ditetapkan, sehingga Bank dapat mengidentifikasi risiko untuk menyiapkan mitigasinya. Pertimbangan lainnya adalah asas perbankan yang sehat serta prinsip syariah.

Dewan Komisaris telah menerima dan mempelajari rancangan prospek usaha yang termuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sejak tahap awal yang disampaikan oleh Direksi. Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah mempertimbangkan berbagai ketentuan yang ada dalam penyusunan prospek bisnis Bank tahun 2024.

Dalam memberikan penilaian atas prospek usaha yang disusun Direksi, Dewan Komisaris juga mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian dan industri perbankan ke depan. Perkembangan kondisi eksternal itu, kemudian menjadi pertimbangan untuk menyusun prospek usaha, dengan juga melihat keunggulan-keunggulan yang dimiliki Bank serta tren pertumbuhan kinerja Bank.

Dewan Komisaris meyakini bahwa prospek usaha Bank pada tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023, seperti yang telah disusun Direksi. Di antara pertimbangannya, kondisi perekonomian domestik berpeluang membaik, seperti yang diyakini juga oleh pemerintah dan tertuang dalam Nota Keuangan APBN 2024, bahwa pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2%, dengan inflasi 2,8%.

Selain itu, Dewan Komisaris meyakini, strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi sangat tepat. Misalnya, percepatan pertumbuhan bisnis *Islamic Ecosystem* melalui pengembangan *platform*, solusi yang inovatif, dan akuisisi yang efektif mencakup ZISWAF, ekonomi masjid, rumah sakit, pesantren, serta bisnis haji dan umrah.

Begitu juga dengan upaya peningkatan digitalisasi pada bisnis Bank. Hal itu, antara lain dilakukan melalui peningkatan pengguna aktif *mobile banking*, *shifting* transaksi dari cabang ke digital, dan digitalisasi *business process* untuk mempercepat *Service Level Agreement* (SLA).

Mengingat pasar syariah masih berpeluang berkembang semakin besar, pangsa pasar BSI juga makin terbuka lebar. Untuk itulah, Dewan Komisaris melihat bahwa Bank memiliki potensi untuk terus berkembang lebih baik. Hal ini selaras dengan prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Salah satu aspek pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) yang dijalankan oleh BSI. Di lingkungan Bank, Dewan Komisaris menjadi bagian dalam penerapan GCG, sesuai fungsi dan peran yang dijalankan.

Menurut Dewan Komisaris, hingga tahun 2023, penerapan GCG di lingkungan BSI sudah sangat baik. Pandangan tersebut dibuktikan melalui hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) penerapan GCG yang dilakukan secara berkala setiap semesteran. Kebijakan penilaian mandiri tersebut mengacu pada Surat Edaran OJK (SEOJK) No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Untuk tahun 2023, hasil penilaian pada semester I-2023 dan semester II-2023, penerapan GCG BSI mendapatkan skor 2 atau masuk ke dalam kategori "Baik". Penetapan peringkat tersebut sesuai SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 dilakukan berdasarkan analisis atas 3 (tiga) hal: pelaksanaan prinsip GCG; kecukupan tata kelola atas struktur proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank; serta informasi terkait GCG.

Selain melaksanakan *self-assessment* untuk memenuhi ketentuan BI dan OJK yang mengharuskan Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self-assessment*) terhadap pelaksanaan GCG, BSI juga melaksanakan pengukuran kualitas penerapan GCG oleh pihak eksternal yang independen. Pada tahun 2023, penilaian dalam bentuk *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh lembaga The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dengan tema "Membangun Ketangkasan Perusahaan dalam Kerangka GCG". Hasil Penilaian CGPI menetapkan bahwa BSI mendapatkan skor sebesar 91,50 dengan predikat "Sangat Terpercaya" atau "The Most Trusted Company".

Dari sisi Tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari empat faktor penilaian yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan. Peringkat Tingkat Kesehatan BSI pada semester II tahun 2023 berada pada peringkat komposit 2 ("Sehat") yang artinya kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan semester I tahun 2023. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap semesteran pada periode Juni dan Desember.

Walaupun nilai pelaksanaannya telah baik, namun BSI terus melakukan penyempurnaan atas penerapan GCG sesuai standar internasional. Untuk itu, Bank telah mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF), yang disebut ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Pengembangan penerapan GCG oleh BSI akan mendukung peningkatan nilai perusahaan, sehingga memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham. Kepercayaan yang tinggi dengan pemangku kepentingan akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis, sehingga berpengaruh positif terhadap perkembangan BSI ke depan.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG, BSI juga telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Penerapan WBS bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan transparan, yaitu dengan menindaklanjuti pengaduan atau pengungkapan atas berbagai hal yang dapat mengakibatkan kerugian baik yang terkait keuangan maupun non keuangan, termasuk penurunan citra Bank.

WBS telah dirancang untuk memastikan setiap pelanggaran di lingkungan Bank dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengganggu proses bisnis yang sedang berlangsung. Upaya ini merupakan bagian penting dalam menjaga reputasi Bank.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA ANGGOTA DIREKSI

Proses pemberian nasihat kepada Direksi diawali dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris bersama komite di bawahnya. Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Bank yang dijalankan oleh Direksi.

Melalui forum tersebut, Dewan Komisaris telah meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Bank dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris juga telah menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat terkait hal tersebut.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat gabungan dengan Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga 3 (tiga) kali rapat gabungan bersama Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

Selain forum rapat gabungan, Dewan Komisaris juga melakukan rapat dengan anggota komite untuk membahas hasil pengawasan. Pelaksanaan rapat dengan Komite Audit telah dilakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali. Sementara rapat dengan Komite Pemantau Risiko sebanyak 12 (dua belas) kali, serta Komite Remunerasi dan Nominasi 3 (tiga) kali.

Pelaksanaan pemberian nasihat kepada Direksi juga dilakukan di luar rapat. Dewan Komisaris dapat melakukannya melalui surat-menyurat agar terdapat dokumentasi serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PENILAIAN TERHADAP KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pada tahun buku 2023, Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) komite: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Audit membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, terutama terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh internal dan eksternal auditor, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Termasuk, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Bahkan Komite Audit telah melakukan pertemuan secara berkala dengan Satuan Pengawas Internal untuk membahas rencana, realisasi, dan temuan audit. Hasil pertemuan tersebut secara periodik telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris.

Sementara Komite Pemantau Risiko secara rutin melakukan pengawasan laporan yang disajikan oleh manajemen, khususnya terkait eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank. Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, Komite Pemantau Risiko juga telah mengadakan pertemuan dengan unit terkait dan melakukan pemantauan secara langsung di lapangan

Begitu pula dengan Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah melakukan penilaian terhadap kesesuaian organisasi BSI dengan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah melakukan penjaringan dan seleksi terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk direkomendasikan kepada RUPS.

Dewan Komisaris menilai ketiga komite tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sepanjang tahun 2023. Hal itu, terutama dilihat dari kehadiran rapat serta pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2023 telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, yang disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 22 Mei 2023. RUPS Tahunan telah menetapkan pengangkatan Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan mengalihkan penugasan Adiwarman A. Karim semula sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

Selanjutnya pada RUPS Tahunan tersebut menetapkan akhir tugas Nizar Ali sebagai Komisaris, sekaligus menetapkan pengangkatan Abu Rokhmad sebagai Komisaris; terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2026, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, penetapan pengangkatan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris BSI per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Muliaman D. Hadad*)	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Suyanto	Komisaris
Masduki Baidlowi	Komisaris
Imam Budi Sardjito	Komisaris
Sutanto	Komisaris
M. Arief Rosyid Hasan**)	Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen
Mohamad Nasir	Komisaris Independen
Abu Rokhmad*)	Komisaris

*) Efektif menjabat per 21 September 2023
**) Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 6 November 2023

Bank menyampaikan terima kasih kepada Komisaris yang telah berakhir masa tugasnya, atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjadi anggota Dewan Komisaris. Kepada Komisaris baru, Bank menyampaikan selamat bergabung untuk bersama-sama memberikan dukungan bagi pencapaian usaha Bank, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

PENUTUP DAN APRESIASI

Sebagai penutup, Dewan Komisaris memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Direksi serta jajaran di bawahnya yang telah mewujudkan kinerja positif bagi BSI. Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kepada Pemegang Saham yang telah memberikan kesempatan menjadi bagian penting dalam perjalanan Bank untuk menjadi "Top 10 Global Islamic Bank".

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada nasabah yang selama ini telah memberikan kepercayaannya kepada BSI, sehingga Bank terus berkembang lebih baik. Begitu juga dengan para pemangku kepentingan lain yang telah bekerja sama, semoga ke depan hubungan yang telah terjalin dengan baik akan terpelihara sehingga menjadi ekosistem saling menguntungkan, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Kepada regulator, Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih atas bimbingannya kepada manajemen Bank, sehingga mampu mewujudkan kinerja yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga BSI ke depan, menjadi lembaga penggerak dan dapat menyebarkan nilai-nilai Islam yang memberikan rahmat serta manfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, BSI mampu menjadi inspirasi bagi semua pihak serta memberikan kontribusi yang berarti bagi negara.

Jakarta, 25 April 2024
Atas Nama Dewan Komisaris

Muliaman D. Hadad
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Dewan Komisaris

Adiwarman Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Sutanto
Komisaris

Masduki Baidlowi
Komisaris

Mohamad Nasir
Komisaris Independen

Muliaman D. Hadad
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen

Suyanto
Komisaris

Abu Rokhmad
Komisaris

Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen

Imam Budi Sardjito
Komisaris

Laporan Direksi

Melalui penerapan strategi yang tepat, BSI mampu membukukan kinerja yang positif, baik di bidang operasional maupun keuangan di tengah kondisi eksternal yang masih menantang.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") dapat mempersembahkan kinerja yang lebih baik pada tahun buku 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah.

Pada tahun tersebut, BSI mampu membukukan laba bersih Rp5,7 triliun, lebih tinggi 33,88% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,3 triliun. Aset Bank juga meningkat 15,67%, dari Rp305,7 triliun di tahun 2022 menjadi Rp353,62 triliun.

Tak kalah pentingnya, pada tahun 2023 BSI berhasil merealisasikan sejumlah peristiwa penting yang dapat mendukung pertumbuhan kinerja Bank serta mencapai visi untuk menjadi "Top 10 Global Islamic Bank". Di antaranya, status *Representative Office* Bank di Dubai telah meningkat menjadi *Full Branch* pada tanggal 17 Agustus 2023, sehingga Bank dapat memaksimalkan potensi pasar global.

Di bidang strategi permodalan, Bank berhasil menerbitkan sukuk subordinasi senilai Rp200 miliar. Aksi korporasi ini bertujuan untuk memperkuat permodalan Bank.

BSI juga telah melakukan penguatan fundamental *enablers* yang meliputi penyusunan prosedur *Business Continuity Management* (BCM) dan penguatan manajemen organisasi. Di bidang teknologi informasi, Bank meningkatkan keamanan sistem, manajemen risiko, pengembangan operasional, serta penguatan jaringan dan informasi.

Bersamaan dengan itu, Bank juga mengembangkan layanan digital yang memenuhi prinsip pengendalian transaksi elektronik dan data nasabah. Melalui inisiatif tersebut, BSI berharap dapat memberikan layanan dan kenyamanan bagi nasabah, sekaligus memperluas akses pasar.

Manajemen berharap kebijakan strategis serta pencapaian pada tahun 2023 dapat mendukung penciptaan pertumbuhan kinerja Bank yang berkelanjutan.

Hery Gunardi
Direktur Utama

LAPORAN DIREKSI

KONDISI PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Perekonomian global tahun 2023 tumbuh melambat terutama didorong oleh pemulihan ekonomi yang tidak sesuai dengan prakiraan awal, serta dampak dari tingginya suku bunga global. *Reopening* Tiongkok yang di bawah ekspektasi akibat krisis di sektor properti yang berlanjut turut mendorong perlambatan ekonomi global di tengah perekonomian AS yang membaik. *Supply disruption* terus membaik, mendorong normalisasi harga komoditas. Namun demikian, ketidakpastian yang cenderung meningkat terutama akibat berlanjutnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan adanya eskalasi tensi geopolitik Israel-Hamas pada Q3 2023 yang menahan normalisasi harga komoditas. Dengan demikian, inflasi global cenderung tetap tinggi dan berpotensi turun lebih lambat.

Inflasi yang tetap tinggi tersebut direspon oleh berbagai bank sentral dengan meningkatkan suku bunga acuannya. *The Fed* dan *European Central Bank* telah menaikkan suku bunga acuan masing-masing sebesar 100 bps dan 200 bps sepanjang tahun 2023. Kenaikan tersebut dimaksudkan untuk menurunkan tingkat inflasi ke target sebesar 2%. Kondisi ini mendorong suku bunga acuan global berada pada posisi *higher for longer*. Suku bunga yang tinggi tersebut berdampak pada menguatnya *dollar index* dan meningkatnya imbal hasil surat berharga negara maju sehingga aliran modal ke *emerging markets*, termasuk Indonesia cenderung tertahan.

Di pasar domestik, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tetap *robust* terutama didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik di tengah turunnya kinerja sektor eksternal akibat perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, pada tahun 2023 ekonomi domestik tumbuh 5,05% YoY. Inflasi domestik juga turun dengan cepat, saat ini sudah berada dalam kisaran target 3±1% sejak bulan Mei 2023. Penurunan inflasi domestik yang lebih cepat dari prakiraan, menjaga daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, suku bunga acuan, BI 7-*Day Reverse Repo Rate* hanya naik sebesar 50 bps sepanjang tahun 2023. Kenaikan tersebut terutama merespon ancaman stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai dampak rambatan ketidakpastian global dan memitigasi adanya *imported inflation*.

Secara keseluruhan tahun 2023, tren suku bunga global yang *higher for longer* mendorong *outflow* di pasar saham, di tengah pasar SBN yang mencatatkan *inflow* nonresiden yang cukup besar di awal hingga pertengahan tahun 2023. *Outflow* di pasar saham turut didorong oleh turunnya Indeks Harga Saham Gabungan secara rata-rata pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, *yield* SBN 10 tahun secara rata-rata cenderung menurun sejalan dengan risiko perekonomian domestik yang turun di tengah masih adanya kenaikan suku bunga acuan. Sejalan dengan kondisi tersebut, ditambah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, secara rata-rata nilai tukar Rupiah cenderung mengalami depresiasi pada tahun 2023.

Di industri perbankan, total aset perbankan nasional menyentuh Rp11.984 triliun pada Desember 2023, tumbuh 5,91% secara tahunan (year on year/yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) naik Rp317 triliun menjadi Rp8.611 triliun, meningkat 3,82% (yoy). Penyaluran kredit secara nasional tumbuh 10,37% (yoy) atau naik Rp681 triliun, menjadi Rp7.248 triliun. Hal ini didukung pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas yang disertai pemberian insentif oleh pemerintah dan regulator dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Tingkat kesehatan perbankan juga tetap terjaga dengan baik. Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 27,65% pada Desember 2023, atau di atas ketentuan minimum BASEL III, yaitu 10%. Rasio likuiditas yang ditunjukkan oleh rasio Likuiditas terhadap DPK (AL/DPK) tetap stabil, yakni sebesar 28,7%.

Namun, perbankan menunjukan efisiensi yang sedikit menurun secara operasional. Hal ini tercermin dari rasio Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO) sebesar 78,94% atau lebih tinggi dibandingkan posisi akhir tahun 2022 yang mencapai 78,64%. Rasio kualitas pembiayaan tetap terjaga didukung dengan insentif restrukturisasi pembiayaan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada masa pandemi COVID-19. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) tercatat sebesar 2,19% (*gross*) atau 0,71% (*net*).

Industri perbankan syariah juga mencatat pertumbuhan positif. Total aset pada Desember 2023 naik Rp89,9 triliun atau tumbuh 11,21% (yoy), menjadi Rp892,2 triliun. Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah bertambah Rp65 triliun atau tumbuh 10,49% (yoy) ke level Rp684,5 triliun pada Desember 2023. Hal ini terjadi sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah yang didukung peningkatan infrastruktur dan layanan akses digitalisasi.

Tingkat kesehatan perbankan syariah terjaga dengan baik di masa pandemi COVID-19. Rasio CAR sebesar 25,41% pada Desember 2023, lebih rendah dibandingkan industri perbankan nasional. Begitu halnya dengan rasio efisiensi perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan nasional. Rasio BOPO tercatat 78,97% pada Desember 2023, sedikit lebih tinggi dibandingkan rasio BOPO industri perbankan nasional. Sementara, kualitas pembiayaan perbankan syariah juga menunjukkan kinerja positif. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* membaik dari 2,41% di akhir tahun 2022 menjadi 2,17% di Desember 2023, lebih baik dari industri perbankan nasional.

KINERJA USAHA TAHUN 2023

Strategi dan Kebijakan Strategis 2023

Sebagai upaya untuk mendukung target usaha di tahun buku 2023 serta pencapaian jangka menengah dan panjang, BSI telah menyiapkan strategi dan kebijakan strategis, antara lain:

1. **Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Berkelanjutan**
   Bank mengelola pertumbuhan pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan dengan fokus pada produk yang memiliki kualitas baik dan *yield* optimal. Bank juga memperkuat pendanaan dengan meningkatkan akuisisi *payroll*, tabungan *wadiah*, tabungan bisnis, tabungan haji, serta peningkatan *fee based income*.
2. **Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas**
   Bank melanjutkan penataan jaringan kantor, pemerataan sebaran lokasi (*coverage)*, dan evaluasi kantor berkinerja rendah. Di sisi lain, Bank meningkatkan produktivitas melalui *redeployment* pegawai sekaligus melakukan *upskilling* dan *reskilling* kapabilitas pegawai.
3. **Peningkatan *Product Holding Rasio***
   Bank menerapkan *customer centric organization* dengan berupaya memahami *customer profile* agar dapat memberikan solusi produk dan layanan yang komprehensif. Selain itu, Bank melakukan peningkatan *product holding ratio* melalui penguatan data *analytic*, peningkatan *digital adoption*, serta intensifikasi terhadap nasabah *existing*.
4. **Digitalisasi Bisnis**
   Bank meningkatkan digitalisasi pada bisnis melalui penambahan *user* aktif *mobile banking*, *shifting* transaksi dari cabang ke *channel* elektronik dan digital, serta digitalisasi *business process*. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) layanan nasabah dan peningkatan *fee based income* Bank.
5. **Peningkatan Penetrasi *Islamic Ecosystem***
   Bank mempercepat pertumbuhan bisnis *Islamic Ecosystem* yang mencakup ZISWAF, ekonomi masjid, rumah sakit, pesantren dan pendidikan Islam, serta bisnis haji dan umrah. Hal itu dilakukan melalui pengembangan *platform* dan solusi yang inovatif serta strategi akuisisi yang efektif.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Proses Memastikan Implementasi Strategi

Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis yang tepat bagi Bank, Direksi sebagai *top manajemen* memiliki peran penting. Inisiatif tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan keberhasilan kinerja maupun pencapaian visi dan misi BSI. Rumusan strategis yang diterapkan senantiasa mengutamakan prinsip kehati-hatian, sekaligus memenuhi prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Peran Direksi dalam perumusan strategi tidak terbatas untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga jangka menengah dan panjang. Dalam penyusunan strategi, Direksi membuat kerangka rencana dan kebijakan, mengatur sumber daya organisasi, serta merumuskan kebijakan khusus agar mencapai target yang ditetapkan.

Rumusan strategi dan kebijakan strategis yang telah ditetapkan tersebut, kemudian disampaikan kepada organisasi Bank untuk dilaksanakan. Dalam implementasinya, Direksi melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan seluruh strategi dan kebijakan strategis berjalan sesuai rencana.

Dalam proses pemantauan tersebut, Direksi membuat agenda rapat berkala bersama direktorat dan grup terkait untuk mengevaluasi pencapaian target. Pertemuan reguler tersebut juga mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi serta merumuskan strategi dalam mengatasi kendala tersebut. Selain melalui mekanisme rapat, Direksi menerima laporan berkala, baik harian maupun bulanan yang turut membantu dalam memantau kondisi bisnis Bank terkini.

Pengawasan aktif Direksi dalam implementasi strategi serta pencapaian kinerja Bank juga dilakukan oleh komite-komite yang ada di bawahnya: Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, IT Steering

LAPORAN DIREKSI

Committee, Komite Bisnis, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan dan Prosedur, Komite SDM, serta BCM Steering Commiittee. Pemantauan bersama komite-komite dilakukan melalui rapat Direksi dan rapat direktur bidang.

Perbandingan Target dan Realisasi

Penerapan strategi dan kebijakan strategis sepanjang tahun 2023 telah menghasilkan kinerja Bank yang positif, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan secara umum, lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Untuk laba bersih misalnya, BSI berhasil membukukan sebesar Rp5,7 triliun, mengalami kenaikan 33,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dibandingkan target RBB, pencapaiannya 110,72%.

Pencapaian laba tersebut, terutama dikontribusikan oleh pendapatan margin bagi hasil yang mencapai Rp22,2 triliun, naik 13,04% (yoy). Kontributor lainnya, yaitu *fee based income* yang tumbuh 12,08% (yoy), sehingga menjadi Rp4,2 triliun. Pada saat yang sama, biaya *overhead* terjaga di posisi Rp10,1 triliun, hanya tumbuh 2,40% (yoy) atau 107,28% dari target RBB.

Dari sisi penyaluran dana, hingga akhir tahun buku 2023 Bank berhasil meningkatkan 15,70% dibandingkan tahun lalu, sehingga menjadi Rp240,3 triliun atau 100,55% dari target RBB. Sementara untuk penghimpunan dana, totalnya sebesar Rp293,8 triliun, tumbuh 12,35 (yoy) dan 101,19% dari target RBB.

Persentase Imbalan Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank senantiasa mengembangkan kerja sama bisnis, perbaikan proses bisnis, serta penajaman model bisnis. Selain itu, Bank juga memberikan *special pricing* pada produk pembiayaan segmen yang memiliki potensi besar tumbuh positif. Tentu dengan mempertimbangkan risiko yang terukur.

Pada tahun 2023, *yield* dari pembiayaan Bank secara *blended* sebesar 8,94%. Dari sisi kualitasnya membaik, dengan *Non Performing Financing* (NPF) yang hanya 2,08% sementara tahun 2022 mencapai 2,42%.

Seiring dengan kenaikan suku bunga acuan di tahun 2023, BSI tetap meningkatkan dana murah dengan pertumbuhan tabungan sebesar 7,08% (yoy). Bank juga tetap menjaga likuiditas agar tetap sehat dan sesuai dengan ketentuan regulator.

Dalam rangka meningkatkan DPK, Bank melakukan akuisisi *payroll* dan *Islamic Ecosystem* yang memfokuskan pada *customer targeted* serta meningkatkan akuisisi melalui *digital banking* dengan peningkatan *user* aktif (USAK) sebesar 25,89% (yoy). inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat proses transaksi pendanaan dan pembiayaan.

Komitmen terhadap UMKM

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BSI senantiasa memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Realisasinya, terutama dilakukan melalui pembiayaan pada sektor usaha tersebut, termasuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Pada tahun 2023, total penyaluran pembiayaan pada UMKM mencapai Rp45,5 triliun atau 18,97% dari total pembiayaan Bank. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp41,91 triliun, realisasi tersebut meningkat 8,49%.

Penyaluran pembiayaan terbesar dari BSI untuk UMKM diterima oleh sektor usaha kecil, yang mencapai Rp23,2 triliun. Jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp20,7 triliun, terjadi peningkatan 12,15%.

Kendala dan Tantangan

Sepanjang tahun 2023, Bank mengalami sejumlah kendala dan tantangan dalam pencapaian target, yang antara lain berupa stabilitas dan keamanan sistem teknologi informasi (TI). Padahal, kebutuhan masyarakat dan nasabah atas solusi keuangan terutama dari perbankan syariah semakin kompleks serta mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam bertransaksi. Karena itu, BSI perlu meningkatkan keamanan siber dan kapabilitas sistem *three in one* (TIO) yang memenuhi aspek *reliability*, *availability*, *scalability*, dan *security*.

Sebagai upaya mitigasi, Bank telah melakukan penguatan sistem dan keamanan TI melalui sejumlah strategi. Misalnya, melakukan identifikasi aset TI, ancaman dan kerentanan, serta deteksi insiden melalui pemantauan selama 24 jam penuh. Bank juga terus menguji keamanan siber melalui *penetration testing* oleh pihak independen.

Mitigasi juga dilakukan melalui standardisasi perangkat jaringan komunikasi data dan *software*. Kemudian, mengelola kewenangan akses sistem serta mengembangkan layanan perbankan elektronik dari segi keamanan aksesibilitas dan aspek IT *Security*. Selain itu, Bank merealisasikan pelaksanaan *System Integration Test* (SIT) dan *User Acceptance Test* (UAT) atas setiap pembuatan atau pengembangan sistem aplikasi guna meminimalisasi potensi kegagalan sistem aplikasi.

Dalam pengujian keamanan dan keandalan sistem sistem aplikasi dari potensi serangan *cyber crime*, Bank melakukan *Penetration Test (PenTest)*. Untuk memastikan sistem yang akan diimplementasikan telah memenuhi standar pengembangan TI yang memadai, baik dari aspek kecukupan infrastruktur maupun keamanan TI, serta proses bisnis dan prosedur, Bank melaksanakan *Release Control Board* (RCB).

Bank terus melakukan inovasi produk dan layanan berbasis digital yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, keamanan, human resources, *security improvement*, hingga standardisasi *end to end*. Untuk mewujudkan seluruh komitmen di bidang TI, sepanjang tahun 2023 Bank telah merealisasikan investasi sebesar Rp967 miliar.

Dari sisi likuiditas, tantangan yang dihadapi berkenaan dengan kenaikan suku bunga acuan BI yang mencapai 6% per Desember 2023. Kebijakan tersebut memengaruhi pendanaan maupun pembiayaan, sehingga berdampak pada likuiditas yang tersedia. Namun BSI tetap mampu menjaga posisi likuiditas di level optimal, dengan DPK tumbuh 12,35% (yoy) serta pembiayaan naik 15,70%.

Selain itu, terjadi penurunan kualitas aset pada beberapa debitur inti yang memengaruhi peningkatan risiko yang akan dihadapi Bank, antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko stratejik. Kendati demikian, Bank terus melakukan ekspansi melalui dana murah, yakni giro dan tabungan.

Pada saat bersamaan, Bank mengurangi dana mahal dengan tetap menjaga likuiditas Bank agar tetap sehat dan sesuai dengan ketentuan regulator. Untuk mendukung hal tersebut, BSI meningkatkan DPK melalui akuisisi *payroll*, peningkatan tabungan bisnis, tabungan wadiah dan tabungan haji, serta akusisi *Islamic Ecosystem* termasuk peningkatan transaksi *digital banking*.

Tantangan lainnya adalah yang telah hadir sejak tahun-tahun sebelumnya, yakni literasi keuangan syariah. Berdasarkan survei OJK tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia adalah 9,14% dengan indeks inklusi 12,12%, jauh di bawah literasi keuangan pada umumnya, yang memiliki indeks 49,68% dan inklusi 85,10%.

PROSPEK USAHA 2024

Pada tahun 2024, indikator makroekonomi diprediksi masih menjadi tahun yang *challenging* akibat ketegangan geopolitik, pertahanan dan ekonomi, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif.

Menanggapi tingginya ketidakpastian perekonomian global dan pelemahan nilai tukar akibat portfolio *outflow* dari nonresiden seiring dengan suku bunga yang *higher for longer*, terutama di negara maju, kebijakan moneter tetap difokuskan untuk pro stabilitas. Suku bunga acuan Bank Indonesia-7 *Days Reverse Repo Rate* (BI-7DRR) dinaikkan sebesar 25 bps pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Oktober 2023 menjadi 6,00%. Hal tersebut sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menahan dampak *imported inflation* untuk menjaga inflasi tetap berada di rentang target sasarannya. Ke depan, BI diprakirakan akan tetap menahan suku bunga acuannya pada level 6,00% hingga pertengahan tahun 2024. Kebijakan suku bunga tersebut berdampak pada likuiditas yang tersedia di sistem perbankan dan menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan bisnis industri perbankan ke depan.

Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan bagi industri perbankan. BSI terus melakukan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam bertransaksi yang diperkuat dengan kapabilitas sistem IT, standarisasi *end to end*, *security improvement*, dan *human resources*.

Dengan pencapaian yang baik di tahun 2023 pada berbagai indikator keuangan dan aksi korporasi, Bank memiliki peluang untuk terus tumbuh dengan melihat berbagai *opportunities* antara lain:

1. Preferensi Syariah yang tinggi dari masyarakat mendorong pertumbuhan yang positif, terutama pada sektor industri halal.
2. Optimalisasi potensi pengembangan Ekosistem Syariah di tingkat Global dan Nasional seiring meningkatnya halal *awareness*.
3. Positioning BSI di industri perbankan Syariah yang kuat sebagai Bank Syariah Terbesar di Indonesia dari sisi aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan.
4. Market Share Syariah di Perbankan Nasional yang masih terbuka luas.

LAPORAN DIREKSI

5. Kesempatan BSI untuk menjadi *Integrated Syariah Financial Services* sehingga dapat memberikan layanan *one stop solution* untuk seluruh kebutuhan finansial, sosial, dan spiritual nasabah.
6. Senantiasa memperkuat sinergi dengan Grup Usaha Bank Induk dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional BSI.

Berdasarkan asumsi tersebut dan adanya berbagai peluang, BSI optimis untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Bank memiliki prospek usaha yang sangat baik. Hal ini didasarkan pada kekuatan yang dimiliki, yaitu:

1. Jaringan kantor dan unit kerja yang luas dengan memiliki lebih dari 1.000 *outlet* dan 2.500 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia serta kantor cabang Luar Negeri yang terletak di Dubai.
2. Bank Syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset dengan posisi ke 6 dari Top 10 Bank Umum per Desember 2023.
3. Memiliki produk dan jasa layanan keuangan yang berbasis Syariah.
4. Memiliki *customer based* yang besar sehingga BSI berusaha menerapkan *customer centric organization* dengan memahami *customer profile* yang lebih baik sehingga dapat memberikan solusi produk dan layanan yang lebih komprehensif.
5. Kualitas *booking* pembiayaan yang baik melalui disiplin *Risk Acceptance Criteria*, perbaikan *end to end process*, diversifikasi portfolio ke arah pertumbuhan sektor yang lebih sehat, serta monitoring intensif.

Perkiraan Masa Mendatang dan Antisipasi Bank

Hingga tahun 2023, tingkat inflasi global masih tinggi, antara lain akibat belum stabilnya perkembangan harga komoditas di pasar internasional. Tekanan inflasi tersebut berpotensi menimbulkan krisis di sejumlah negara. Kondisi tersebut merupakan rangkaian dari kebijakan bank sentral yang mempertahankan suku bunga tinggi dalam rangka meredam inflasi.

Ketika ada ancaman inflasi maupun tekanan terhadap nilai tukar, Bank Indonesia diperkirakan mengantisipasinya melalui instrumen suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga acuan tentu berpotensi meningkatkan beban bagi hasil pendanaan yang mempengaruhi profitabilitas Bank. Untuk mengatasi hal tersebut, BSI akan fokus penetrasi dana murah melalui ekosistem syariah.

Kondisi ke depan yang diantisipasi oleh Bank juga menyangkut tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap keuangan syariah yang masih rendah, seperti terungkap dari hasil riset OJK tahun 2022. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami produk dan atau layanan jasa keuangan syariah. BSI berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat melalui program-program dengan berkolaborasi bersama *stakeholder* terkait.

Terakhir, pesatnya perkembangan teknologi informasi masih akan menjadi tantangan bagi industri perbankan. Untuk itu, BSI terus melakukan inovasi produk dan layanan berbasis digital dalma rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam bertransaksi.

Inovasi di bidang TI juga akan diperkuat dengan kapabilitas sistem TI, standarisasi *end to end*, *security improvement* dan *human resources*. BSI melakukan semua itu demi mewujudkan layanan dan hasil terbaik bagi para pemangku kepentingan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BSI senantiasa menyempurnakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta praktik terbaik (*best practice*) di industri, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hasil atas komitmen Bank dalam penerapan dan penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip GCG terlihat dari pencapaian kinerja Bank pada tahun 2023 dengan raihan pertumbuhan yang positif.

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi salah satu elemen penting bagi keberhasilan Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Implementasi GCG tidak hanya untuk memenuhi ketentuan dari regulator, namun juga dalam rangka mencapai target yang ditetapkan Bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Hingga tahun buku 2023, seluruh penerapan GCG di setiap aspek kegiatan usaha Bank telah berjalan dengan baik. Evaluasi efektivitas penerapan GCG juga telah dilaksanakan secara periodik (semesteran) melalui mekanisme *self-assessment* terhadap pelaksanaan

tata kelola sesuai dengan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hasil penilaian self assessment GCG pada semester 1 dan semester 2 tahun 2023 adalah "2" (Baik).

Selain itu, pada tahun 2023 BSI mengikuti program riset dan pemeringkatan "Corporate Governance Perception Index" yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Bank mendapatkan skor 91,50 - meningkat dari tahun sebelumnya- dengan predikat "Indonesia Most Trusted Company".

BSI juga melanjutkan proses penyempurnaan tata kelola sebagai wujud komitmen dan konsistensi atas penerapan GCG. Hal itu dilakukan melalui penyelarasan praktik GCG dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF), yang disebut ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

BSI bertekad untuk menjadi "Top 10 Global Islamic Bank" dan mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Upaya itu, antara lain dilakukan melalui penyempurnaan dan penerapan GCG, yang mengacu pada pedoman dan standar GCG yang berlaku secara nasional dan internasional.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Terkait dengan teknologi informasi (TI), BSI fokus untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem, khususnya pada stabilisasi sistem, standardisasi infrastruktur serta *security improvement*. Bank melakukan transformasi dengan menyiapkan teknologi terkini yang siap dikembangkan di masa depan. Digitalisasi proses terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan layanan Bank. Proses pengembangan digital diterapkan dengan metode *agile* yang dapat merespon kebutuhan pasar dengan cepat.

Perencanaan dan pengembangan TI di lingkungan BSI yang salah satunya melalui modernisasi *core banking* serta penguatan bisnis dan *digital banking* merupakan upaya untuk mendukung pencapaian strategi Bank. Pengembangan TI Bank dilakukan dengan konsep "7+ IT Stars" (*Strategic Action* dan *Programs*), yang mencakup:

1. ***Security, Risk, and Fraud***
   Menetapkan dan meningkatkan perimeter keamanan, manajemen risiko, penipuan, dan *anti money laundering* (AML) untuk melindungi nasabah dan perbankan.
2. ***Core System Modernization***
   Pelaksanaan inisiatif modernisasi *core banking* adalah untuk menyederhanakan sistemnya, meningkatkan fungsi *core*, dan memungkinkan *core banking* generasi berikutnya mendukung produk dan layanan perbankan yang kaya.
3. ***Infrastructure & Connectivity***
   Pembentukan dan peningkatan infrastruktur serta alat konektivitas, aplikasi, dan *hardware* yang menggabungkan berbagai teknologi untuk mendukung bisnis Bank.
4. ***Integrated Data Management Monitoring and Reporting***
   Pembentukan dan peningkatan *enterprise data warehouse* dan analisis *big data* untuk mengaktifkan *data-as-a-service* serta alat manajemen informasi yang digunakan karyawan dalam melakukan pemantauan dan pelaporan secara mandiri.
5. ***Organization, Corporate Support & Internal Improvements***
   Pembentukan dan peningkatan fungsi inti perusahaan untuk mendukung operasional Bank dan proses internal serta perbaikan organisasi.
6. ***Unified Platform & Customer 360***
   Satu *platform* utama untuk menampung seluruh kapabilitas alur kerja yang dibantu oleh peningkatan pusat data dan layanan nasabah terpadu (*customer relationship*) pada area *sales*, *marketing*, dan *campaign management* untuk meningkatkan *engagement* pada nasabah.
7. ***Digital Expansion & Open Banking***
   Peningkatan dan perluasan jaringan distribusi digital, *sales*, layanan *omni-channel* termasuk dengan peningkatan kapabilitas integrasi dengan berbagai metode dan strategi untuk memungkinkan *open banking* dengan konektivitas tanpa batas dan aman secara internal dan eksternal
8. ***Environment, Social & Governance* (ESG)**
   Pelaksanaan strategi berkelanjutan Bank dalam melakukan pengembangan (investasi) yang memberikan nilai tambah di aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola serta dapat menjadi pelopor (*agent of change*) ekonomi syariah di Indonesia.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bank telah menetapkan "Human Capital Roadmap" untuk mendukung transformasi organisasi dan sumber daya manusia (SDM) BSI yang inovatif serta proaktif dalam menjawab tantangan serta perubahan di masa yang akan datang. Fokus strategi *human capital* pada tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas pegawai, perbaikan proses bisnis, penyelarasan kinerja dengan reward, akselerasi pengembangan kapabilitas pegawai, serta penguatan integrasi budaya *risk*

LAPORAN DIREKSI

awareness perusahaan. Fokus tersebut bertujuan untuk memperkuat kebijakan fundamental *human capital*.

Beberapa program yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung implementasi fokus strategi *human capital*, antara lain penyelenggaraan program *Middle Manager Development Program* (MMDP), *Senior Manager Development Program* (SMDP), Program Beasiswa S2 bagi pegawai *talent* BSI tahun 2023, pemutakhiran *Human Capital Information System* (HCIS) serta pelaksanaan *Culture Summit*.

Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen akan kesejahteraan pegawai, manajemen melakukan *annual increment*, melanjutkan pemberian token bonus di tengah tahun, memberikan apresiasi umroh serta meluncurkan produk Fasilitas Pembiayaan Pegawai (FPP) gelombang 2 (dua). Kebijakan FPP ini untuk memberikan kemudahan pegawai dalam memenuhi kebutuhan akan rumah dan kendaraan.

Pengembangan organisasi di bidang SDM dilakukan selaras dengan "Corporate Plan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2022-2032" dengan aspirasi BSI menjadi "Top 10 Global Islamic Bank". Dalam mencapai aspirasi tersebut, Bank secara berkesinambungan melakukan *review* terhadap organisasi untuk mendukung *key metric* BSI, antara lain peningkatan *customer base*, profitabilitas, dan *volume asset* bank pada tahun 2023 melalui penyesuaian struktur organisasi yang berfokus pada:

1. Penguatan BSI dengan struktur organisasi yang *lean* dan efektivitas proses bisnis yang dapat mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan Bank terhadap nasabah.
2. Pengembangan pada segmen dan produk unggulan, sehingga dapat berkontribusi secara langsung terhadap *financial indicator*.
3. Penguatan BSI *performance culture* melalui peningkatan *Product Holding Ratio* (PHR) dengan pendekatan *customer centric organization*.
4. Pengembangan bisnis digital dengan menyediakan fitur-fitur islami, modernisasi *mobile banking* dan *digital banking* sebagai *business driver*.
5. Pengembangan *Islamic Ecosystem Solution*, *Wholesale Business*, *Transaction*, *Overseas Branch* Dubai, dan alternatif *channel* jaringan melalui layanan *branchless banking* (laku pandai).
6. Penguatan 3 (*three*) *line of defense* unit kerja TI dalam memperkuat IT *Governance*, kapabilitas TI, dan fungsi *business continuity management* (BCM), *risk*, *compliance*, *anti-fraud* untuk memperkuat pelaksanaan GCG.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, pada tahun 2023, Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) komite di bawahnya, atau disebut juga Komite Eksekutif: Risk Management Committee, IT Steering Committee, Policy & Procedure Committee, Business Committee, Human Capital Committee, BCM Committee, dan Asset & Liability Committee (ALCO).

Selama tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Rekomendasi yang dihasilkan dari komite-komite telah menjadi pertimbangan penting bagi Direksi dalam mengambil keputusan strategis, sehingga mampu menghasilkan kinerja Bank yang positif.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2023 telah terjadi perubahan komposisi Direksi, yang disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 22 Mei 2023. RUPS memberhentikan dengan hormat Achmad Syafii sebagai Direktur Information Technology dan Tiwul Widyastuti sebagai Direktur Risk Management serta mengangkat Saladin D. Effendi sebagai Direktur Information Technology dan Grandhis Helmi Harumansyah sebagai Direktur Risk Management.

Keputusan tersebut berlaku mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023. Masa jabatan 2 (dua) direktur baru BSI tersebut akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya atau tahun 2026. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Perubahan tersebut merupakan usulan Pemegang Saham Pengendali Utama (PSPU) yang disampaikan kepada RUPS dalam surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor CMB/433/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selanjutnya, RUPS Tahunan memutuskan, sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah RUPST Nomor 45 tanggal 22 Mei 2023, dan dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.25 tanggal 20 Juni 2023, yang keduanya dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Dengan demikian, komposisi Direksi hingga akhir tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Hery Gunardi	Direktur Utama
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama
Ngatari	Direktur Retail Banking
Saladin D. Effendi*)	Direktur Information Technology
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital
Grandhis Helmi Harumansyah*)	Direktur Risk Management
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking

*) Efektif menjabat per 21 September 2023

Manajemen menyampaikan terima kasih kepada anggota Direksi yang tidak lagi menjabat atas kontribusinya selama bergabung dengan BSI. Kepada anggota Direksi yang baru, manajemen mengucapkan selamat bergabung untuk sama-sama mewujudkan cita-cita Bank, sekaligus memberikan kontribusi kepada negara.

PENUTUP DAN APRESIASI

Pencapaian kinerja BSI yang sangat baik pada tahun 2023 tentu tak dapat dipisahkan dari peran karyawan, dukungan Dewan Komisaris, bimbingan para pemegang saham dan regulator. Oleh karena itu, Direksi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran penting yang diberikan para pemangku kepentingan tersebut.

Direksi berharap kerja sama yang telah terjalin selama ini, termasuk dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem bank, tetap terjaga dengan baik dan terus meningkat. Semoga semua ikhtisar tersebut dapat mendukung pencapaian kinerja Bank untuk tumbuh secara berkesinambungan.

Semoga BSI terus berkembang sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan, termasuk pada negara.

Jakarta, 25 April 2024
Atas Nama Direksi

Hery Gunardi
Direktur Utama

Direksi

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance & Strategy

Anton Sukarna
Direktur Sales & Distribution

Tribuana Tunggadewi
Direktur Compliance & Human Capital

Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Risk Management

Saladin D. Effendi
Direktur Information Technology

Hery Gunardi
Direktur Utama

Zaidan Novari
Direktur Wholesale Transaction Banking

Ngatari
Direktur Retail Banking

Bob Tyasika Ananta
Wakil Direktur Utama

Moh. Adib
Direktur Treasury & International Banking

Laporan Dewan Pengawas Syariah

BSI sebagai bank umum yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah telah berhasil mencapai kinerja yang sangat baik, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang operasional dan produk Bank.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") menyampaikan syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT, semoga *taufiq* dan *hidayah*-Nya senantiasa tercurah bagi kita semua. Tidak lupa, salawat serta salam disampaikan bagi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional Bank harus sejalan dengan prinsip syariah. DPS juga memastikan implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional telah dilaksanakan di Bank.

Penyampaian laporan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas DPS, sekaligus keterbukaan informasi Bank. Hal ini selaras dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), mengingat DPS diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

DPS senantiasa bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam menjalan tugas dan fungsinya. Mekanisme yang tersebut dalam rangka memastikan pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah.

Untuk itu, Dewan Pengawas Syariah akan terus berupaya mendorong dan mengawasi manajemen dalam mengimplementasikan aspek syariah di seluruh kegiatan bisnis Bank agar dapat memberikan layanan terbaik dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kami mengharapkan segala masukan yang dapat membangun sehingga Bank Syariah Indonesia dapat menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada tahun buku 2023, DPS berpandangan bahwa BSI sebagai bank umum yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, telah berhasil mencapai kinerja yang sangat baik. Khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang operasional dan produk Bank. Pencapaian tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari komitmen serta penerapan strategi dan kebijakan strategis yang tepat, termasuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Karena itu, DPS memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja yang sangat baik di tahun 2023. DPS berharap agar BSI terus menjadi barometer perbankan syariah di Tanah Air.

Hasanudin
Ketua Dewan Pengawas Syariah

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

FOKUS TAHUN 2023

Untuk tahun buku 2023, fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah, antara lain mencakup:

1. Update concern DPS secara berkala (triwulan) pada setiap pelaksanaan Rapat Gabungan (dihadiri Dewan Komisaris, Direksi, DPS).
2. Literasi dan Pelatihan Syariah untuk Tim Audit/ RBC Frontliner & Marketing Jaringan oleh DPS, KS & SCOM
3. Pembuatan Modul Digital
4. Sertifikasi Fiqh Muamalah Untuk semua Level Jabatan (Semua level AM).
5. Pembuatan *tools assessment* Kepatuhan Syariah:
   a. Sharia Checklist
   b. Sharia Audit
   untuk pembiayaan (semua Skema Akad Pembiayaan) dan dana.
6. Melakukan Aktivitas Uji Petik di setiap kantor Area & Regional
7. Melakukan Sharia Combined Assurance secara tematik (Segmen Mikro, SME, Konsumer) Bersama Sharia Compliance & Internal Audit

PELAKSAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap kegiatan operasional BSI. Hal itu dilakukan melalui uji petik terhadap sekitar 55 kantor cabang, dengan cara mengambil sampel dokumen pembiayaan maupun pendanaan, yang terdiri dari:

A. Dokumen Pembiayaan

1. Surat permohonan nasabah;
2. NAP/NAR;
3. Putusan Komite Pembiayaan (PKP);
4. SP3 yang sudah ditanda tangani oleh para pihak;
5. Akad pembiayaan dan addendum akad beserta lampiran (seperti dokumen pembelian barang dll);
6. Deklarasi Bagi hasil (khusus untuk pembiayaan Musyarakah/mudharabah)

B. Jenis – jenis Akad Pembiayaan

1. Murabahah
2. Ijarah
3. Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik
4. Muysrakah/ Mudharabah
5. Musyarakah Mutanaqishshah
6. Rahn
7. Qardh
8. Wakalah

C. Dokumen Pendanaan pada masing-masing Kantor Cabang, sebagai berikut:

1. Tabungan:
   a) 3 (tiga) sampel berbasis Akad Mudharabah
   b) 3 (tiga) sampel berbasis akad Wadiah
2. Giro:
   a) 2 (dua) sampel berbasis Akad Mudharabah
   b) 2 (dua) sampel berbasis Akad Wadiah
3. Deposito: 3 (tiga) sampel

PERUBAHAN KOMPOSISI

Pada tahun buku 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia. Berikut adalah komposisi DPS BSI per 31 Desember 2023.

Hasanudin	Ketua
Mohamad Hidayat	Anggota
Oni Sahroni	Anggota
Didin Hafidhuddin	Anggota

APRESIASI

Dewan Pengawas Syariah mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin dengan baik antara Dewan Pengawas Syariah dengan organisasi BSI, khususnya para pengurus. Semoga yang telah terealisasi selama ini dapat terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah, seiring dengan semakin berkembangnya bisnis BSI.

DPS juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada manajemen BSI yang telah berhasil melalui tahun buku 2023 dengan kinerja Bank yang sangat baik. Perkembangan yang terjadi pada tahun buku ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi BSI untuk melayani dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara.

Semoga manajemen selalu memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya, termasuk dalam mengejar target kinerja.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 25 April 2024

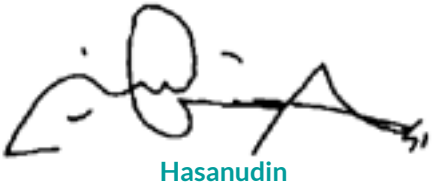

Hasanudin
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah

Dari kiri ke kanan:

1. **Dr. H. Oni Sahroni, MA**
   Anggota Dewan
   Pengawas Syariah

2. **Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc**
   Anggota Dewan
   Pengawas Syariah

3. **Dr. K.H Hasanudin, M.Ag**
   Ketua Dewan
   Pengawas Syariah

4. **Dr. H. Mohamad Hidayat**
   Anggota Dewan
   Pengawas Syariah

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi atas Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 April 2024

DEWAN KOMISARIS

Muliaman D. Hadad
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Adiwarman Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen

Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen

Suyanto
Komisaris

Masduki Baidlowi
Komisaris

Mohamad Nasir
Komisaris Independen

Imam Budi Sarjito
Komisaris

Sutanto
Komisaris

Abu Rokhmad
Komisaris

DIREKSI

Hery Gunardi
Direktur Utama

Bob Tyasika Ananta
Wakil Direktur Utama

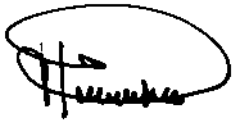

Ngatari
Direktur Retail Banking

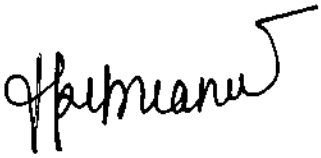

Tribuana Tunggadewi
Direktur Compliance & Human Capital

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance & Strategy

Anton Sukarna
Direktur Sales & Distribution

Saladin D. Effendi
Direktur Information Technology

Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Risk Management

Zaidan Novari
Direktur Wholesale Transaction Banking

Moh. Adib
Direktur Treasury & International Banking

BSI

03

PROFIL PERUSAHAAN

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Dasar Hukum Pendirian
- Berita Negara RI No.43 – 28 Mei 1971-Tambahan No. 242
- Berita Negara RI No. 85 - 23 Oktober 2009 - Tambahan No. 26142
- Berita Negara RI No. 96 - 1 Desember 2009 Tambahan No. 27908

Bidang Usaha
Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Izin Usaha
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009

Modal Dasar
Rp40.000.000.000.000

Informasi Perubahan Nama
Efektif berubah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada 1 Februari 2021 dari sebelumnya bernama PT Bank BRIsyariah Tbk karena adanya penggabungan usaha dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Rp23.064.630.069.000

Kode Saham
BRIS

Bursa Efek
Saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018

Call Center
14040
1500789
(khusus melayani nasabah perusahaan dan institusi)

Jumlah Karyawan
17.909 karyawan

Media Sosial
Facebook : Bank Syariah Indonesia
Instagram : @banksyariahindonesia
@lifewithbsi
@BSIMobile
Youtube : Bank Syariah Indonesia
Twitter : @bankbsi_id
@bsihelp

Akses terhadap Perusahaan
Alamat Kantor Pusat:
Gedung The Tower,
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930

Telepon
(62-21) 30405999

Website dan E-mail
https://www.bankbsi.co.id/
contactus@bankbsi.co.id

Faksimili
(62-21) 30421888

Sekilas Perusahaan

BSI telah berhasil meningkatkan status *Representative Office* di Dubai, Uni Emirat Arab, menjadi *Full Branch*

Kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk (("Bank Syariah Indonesia", "BSI", "Bank") yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H merupakan catatan sejarah baru bagi industri perbankan di Indonesia. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 51,47%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23,24%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15,38%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini merupakan ikhtiar menyatukan kelebihan dari 3 (tiga) bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong agar dapat bersaing di tingkat global.

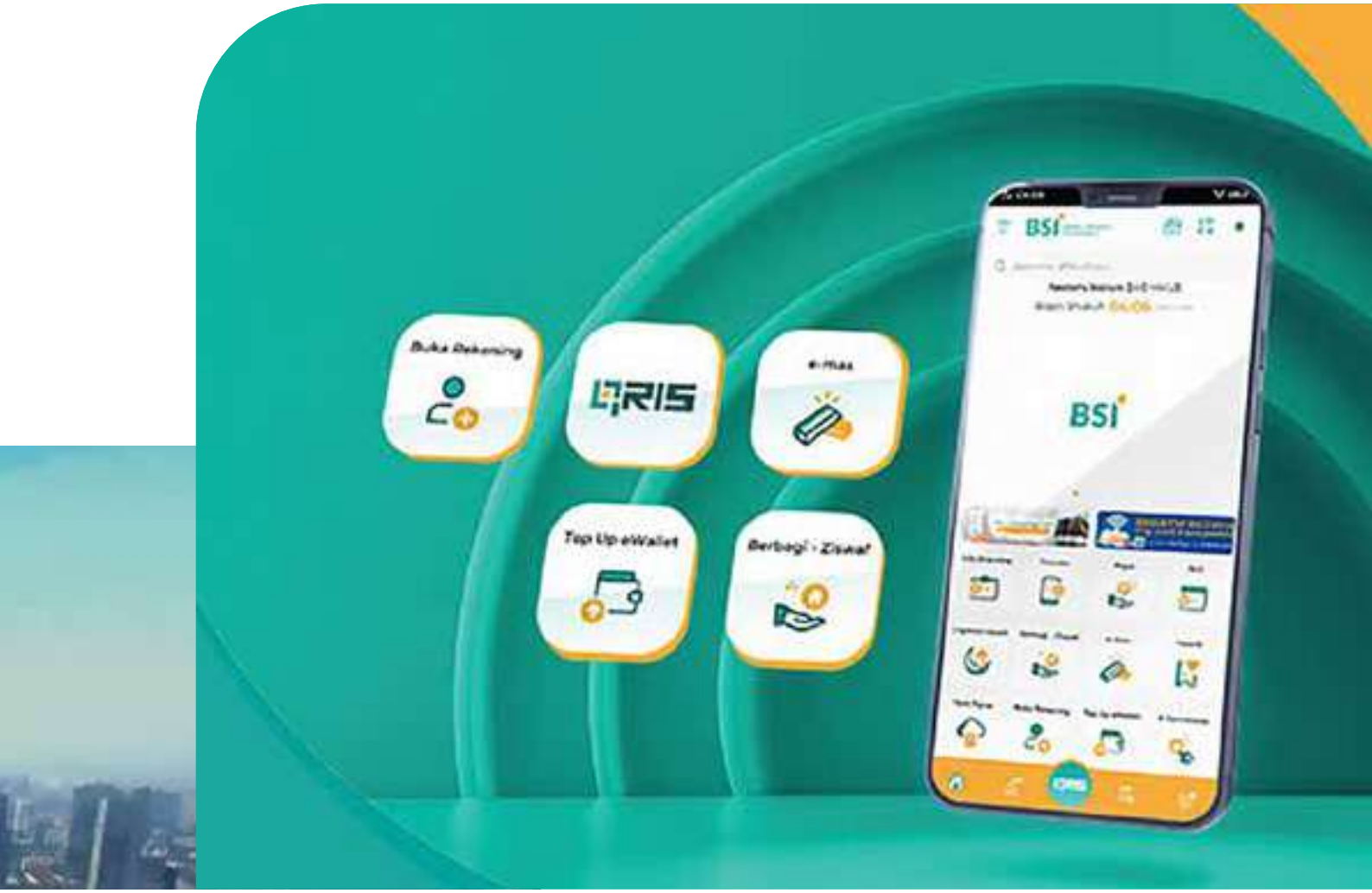

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

Jejak Langkah

2007

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Jasa Arta.

2008

- Bank Indonesia mengeluarkan izin usaha melalui suratnya No.10/67/ Kep.GBI/ DpG/2008.
- Pada 16 Oktober 2008 PT Bank BRIsyariah secara resmi beroperasi dengan mengubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
- Pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan unit usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRIsyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

2009

Grand launching BRIsyariah oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil pada 1 Juli 2009.

2010

- Peluncuran 7 nilai budaya kerja BRIsyariah: PASTI OKE, yaitu Profesional, Antusias, Penghargaan SDM, Tawakal, Integritas, Orientasi bisnis dan Kepuasan pelanggan.
- *Live Core Banking System* SyIAR (*Syariah Integrated & Automated Realtime*) yang dilengkapi dengan aplikasi *electronic Financing Originating System* (efoS) dan *Management Information System* (MIS).

2019

- Pada milad ke-11, BRIsyariah mengembangkan inovasi teknologi untuk internal *business process* guna mempercepat layanan kepada nasabah, yaitu Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani (i-Kurma). i-Kurma merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro.
- Dimulainya implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang dilakukan oleh BRI dan BRIsyariah.

2020

BRIsyariah melakukan pengembangan i-Kurma Gen 2 untuk semakin meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. i-Kurma Gen 2 ini merupakan pengembangan dari produk sebelumnya untuk mempercepat proses permohonan pencairan pembiayaan mikro.

2021

Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bergabung dengan BRIsyariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H.

2022

BSI mampu menyelesaikan proses *right issue* pertama melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Proses ini tercatat *over subscribe* (kelebihan permintaan) sebanyak 1,4 kali dan menghasilkan tambahan modal sekitar Rp5 triliun.

2023

BSI resmi mendapatkan lisensi penuh untuk beroperasi di Dubai, Uni Emirat Arab.

2011

Implementasi layanan syariah Bank BRIsyariah di 18 kantor cabang BRI.

2012

- BRIsyariah mengukuhkan diri sebagai bank syariah pertama di dunia yang memiliki layanan *mobile banking* di 4 (empat) *market online*, yaitu *Blackberry App World, Google Play, Apple Store* dan *Nokia Store*.
- Peluncuran Tabungan Impian BRIsyariah.

2013

- BRIsyariah mengembangkan program *Sharia Officer Development Program* (SODP) untuk menciptakan bankir-bankir yang memiliki kompetensi besar dalam perbankan syariah serta kesamaan pemahaman terhadap bisnis BRIsyariah.
- *Rebranding* Tabungan BRIsyariah iB menjadi Tabungan Faedah BRIsyariah iB.
- BRIsyariah disetujui oleh Bank Indonesia sebagai bank devisa.

2014

- Peluncuran *internet banking* BRIsyariah.
- Implementasi aplikasi penunjang pembiayaan elektronik (Appel) untuk mendukung proses penyaluran pembiayaan secara cepat dan akurat.

2015

- BRIsyariah ditunjuk oleh OJK sebagai Indonesia *First Movers on Sustainable Banking*.
- BRIsyariah sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang meluncurkan laku pandai Syariah BRISSMART.
- BRIsyariah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta lelang Surat Berharga Syariah negara (SBSN).

2016

BRIsyariah menerbitkan Sukuk Mudharabah Subordinasi I BRIsyariah tahun 2016 untuk memperkuat permodalan.

2017

- Bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah.
- Bekerja sama dalam penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk ASN dan swasta untuk pembiayaan KPR FLPP pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp950 miliar.
- Ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan.

2018

BRIsyariah *go public* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia, melakukan penawaran saham perdana (*initial public offering*) sebesar 2.623.350.600 kepada investor domestik maupun asing, dengan nilai nominal Rp500 per saham.

Visi
Misi

Visi

TOP 10
GLOBAL ISLAMIC BANK

Misi

Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Pada tahun buku 2023, manajemen tidak melakukan *review* terhadap Visi dan Misi BSI, karena menilai masih relevan dengan perkembangan Bank.

Budaya/Nilai-Nilai Perusahaan

Bank Syariah Indonesia didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang saat ini menjadi pemegang saham mayoritas Bank. Sejalan dengan hal itu, BSI menjadikan "AKHLAK" sebagai nilai perusahaan, selaras dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 yang mewajibkan setiap BUMN mengimplementasikan nilai-nilai utama (*core values*) tersebut sebagai dasar pembentukan karakter SDM.

AKHLAK

Amanah
Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan

Kompeten
Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Harmonis
Kami saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal
Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Adaptif
Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Kolaboratif
Kami membangun kerja sama yang sinergis

Bidang Usaha

Sesuai Anggaran Dasar

A. Kegiatan usaha utama

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan - barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau - sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
9. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain :
   i. Wakalah
   ii. Hawalah
   iii. Kafalah
   iv. Rahn
10. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip - syariah
11. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan - oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia
12. Menerima pembayaran dari tagihan - atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk - kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah
14. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
15. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah
16. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah
17. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah
18. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah
19. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah
20. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan utama:

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik
7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang
8. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sesuai Dijalankan pada Tahun Buku

Kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku 2023 telah sejalan dengan yang berada di Anggaran Dasar Bank.

Produk dan Layanan

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, Bank Syariah Indonesia menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan profil masing-masing nasabah. Produk dan layanan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu individu, perusahaan, *digital banking* dan kartu.

Individu

BISNIS	
Bank Guarantee Under Counter Guarantee	Instrumen penjaminan perbankan yang diterbitkan atas dasar permintaan dan kontra jaminan (*counter guarantee*) yang diterima baik dari bank ataupun non bank.
BSI Bank Garansi	Bank garansi yang dikhususkan kepada vendor/kontraktor dari PT PLN (PLN) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN.
BSI Cash Management	Saluran distribusi elektronik berupa layanan *internet banking* bagi nasabah perusahaan atau institusi untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dalam rangka pengelolaan keuangan dan *monitoring* arus kas dengan aman, cepat dan mudah.
BSI Deposito Ekspor SDA	Bersama membangun negeri dengan devisa ekspor.
BSI Giro Ekspor SDA	Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah atau properti berhadiah porsi haji.
BSI Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan tiering.
BSI Giro Pemerintah	Dana berkah untuk negeri.
BSI Pembiayaan Investasi	Fasilitas Pembiayaan Jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Giro Vostro	Layanan pembukaan rekening giro dalam berbagai mata uang atas nama lembaga keuangan (*financial institutions*) Bank dan bukan Bank, koresponden domestik maupun internasional pada BSI.
Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank	Jasa penagihan piutang atau tagihan jangka pendek *under* LC/SKBDN yang dimiliki oleh *Nominated Bank* kepada BSI yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (*issuing Bank*) sesuai prinsip syariah. BSI dapat memberikan dana talangan kepada *Nominated Bank* berdasarkan berita akseptasi dari *Issuing Bank* ke *Nominated Bank*.
Pembiayaan Yang Diterima (PYD)	Pinjaman atau pembiayaan yang diterima Bank Syariah Indonesia dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Bank Syariah Indonesia memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga yang merujuk pada pada *underlying* aset PYD yang disepakati.
SIF (Supply Infrastructure Financing) BPJS Kesehatan	Layanan pembiayaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): Klinik Utama, Klinik Pratama, Dokter Praktik Perorangan, dan Praktik Dokter Gigi.
EMAS	
BSI Cicil Emas	Pembelian emas dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau dengan harga emas kemudian.
BSI Gadai Emas	Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.
HAJI DAN UMROH	
BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).
BSI Tabungan Haji Muda Indonesia	Tabungan dalam bentuk Rupiah atau USD untuk perencanaan Ibadah Haji dan Umrah bagi anak.

INVESTASI	
Bancassurance	Kerja sama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
BSI Deposito Valas	Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
BSI Reksa Dana Syariah	Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.
Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)	Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf seri SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakaf dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Deposito Rupiah	Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
Referral Retail Brokerage	Merupakan layanan *referral* produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerja sama dengan perusahaan sekuritas.
SBSN Ritel	• SBSN Ritel, terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan • Sukuk Negara Ritel adalah sukuk negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. • Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.
PEMBIAYAAN	
Bilateral Financing	Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/*financing* dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.
BSI Cash Collateral	Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan.
BSI Distributor Financing	Pembiayaan modal kerja dengan skema *value chain* adalah pembiayaan *post financing* (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu *invoice* atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan *supplier* khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan *bouwheer*, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran *invoice* dari *bouwheer*.
BSI Griya Hasanah	Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut: 1. Pembelian rumah baru/ rumah *second* /ruko/rukan/apartemen 2. Pembelian kavling siap bangun 3. Pembangunan/renovasi rumah 4. Ambil alih pembiayaan dari bank lain (*take over*) 5. *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah
BSI Griya Mabrur	Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji.
BSI Griya Simuda	Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.
BSI Griya Take Over	Layanan *take over* dari KPR Bank lain.
BSI KPR Sejahtera	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.
BSI KUR Kecil	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp50 juta s.d Rp500 juta.
BSI KUR Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp10 juta s.d Rp50 juta.
BSI KUR Super Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon s.d Rp10 juta.

PRODUK DAN LAYANAN

BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)	Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad murabahah/ musyarakah mutanaqishah/ ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.
BSI Mitraguna Berkah	Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai *payroll* di BSI.
BSI Multiguna Hasanah	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk: • Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/ *furniture* rumah, dll. • Pembelian manfaat jasa seperti *wedding organizer* untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa *travel agent*, dll. • Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki *underlying asset*.
BSI OTO	Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.
BSI Pensiun Berkah	Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, di antaranya sebagai berikut: 1. Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN. 2. Pensiunan BUMN/BUMD. 3. Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.
BSI Umrah	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umrah melalui Bank yang telah bekerja sama dengan *travel agent* sesuai dengan prinsip syariah.
Mitraguna Online	Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.
PRIORITAS	
BSI Prioritas	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia kepada nasabah perorangan terpilih.
BSI Private	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia yang dibuat kepada nasabah perorangan yang memiliki saldo akumulatif minimal sebesar Rp5 miliar.
Safe Deposite Box (SDB)	Merupakan suatu wadah harta atau surat berharga, yang ditempatkan pada suatu ruang khazanah yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan kenyamanan penggunanya.
TABUNGAN	
BSI Tabungan Bisnis	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah dalam mata uang rupiah yang yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur *free* biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui teller dan internet banking.
BSI Tabungan Easy Mudharabah	Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.
BSI Tabungan Easy Wadiah	Tabungan dalam mata uang upiah berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.
BSI Tabungan Efek Syariah	Tabungan efek syariah dengan akad mudharabah muthlaqah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di pasar modal.

BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas *E-Channel* apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).
BSI Tabungan Junior	Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
BSI Tabungan Mahasiswa	Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota perusahaan/lembaga/assosiasi/organisasi profesi yang bekerja sama dengan Bank.
BSI Tabungan Payroll	Produk turunan dari tabungan wadiah/mudharabah reguler yang dikhususkan untuk nasabah *payroll* dan nasabah migran.
BSI Tabungan Pendidikan	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebit dan mendapat perlindungan asuransi.
BSI Tabungan Pensiun	Tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga pengelola pensiun yang telah bekerja sama dengan bank.
BSI Tabungan Prima	Produk tabungan yang diperuntukan bagi segmen nasabah *high networth individuals* berakad mudharabah dan wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan.
BSI Tabungan Rencana	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebit dan gratis perlindungan asuransi.
BSI Tabungan Simpanan Pelajar	Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dlam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
BSI Tabungan Smart	*Basic saving account* dengan akad wadiah yad dhamanah merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BSI Tabungan Valas	Tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah dalam mata uang dolar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.
BSI TabunganKu	Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BSI Tapenas Kolektif	Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
TRANSAKSI	
BSI Giro Rupiah	Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah.
BSI Giro Valas	Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang valas.

PRODUK DAN LAYANAN

Perusahaan

CASH MANAGEMENT	
CMS	Layanan transaksi meliputi transfer kepada rekanan atau pihak ketiga di bank BSI maupun bank lain (*online*, SKN, RTGS), transfer kepada pegawai (*payroll*), pembayaran kewajiban pajak, pembayaran dan pembelian produk pertamina, pembayaran tagihan utiltas serta tagihan lainnya.
OPBS (SO/DO) Pertamina	BSI Pembayaran Pertamina adalah layanan pembayaran dan penerimaan atas produk Pertamina. Bersama dengan Pertamina, BSI hadir dengan layanan *host to host* untuk memudahkan mitra/pelanggan Pertamina dalam melakukan pemesanan dan atau pembayaran produk Pertamina melalui BSI Cash Management System dan Cabang BSI.
TRESURI	
Transaksi Sukuk	Melayani kebutuhan transaksi surat berharga syariah (sukuk): • Sukuk Negara • Sukuk Korporat
Deposito On Call (DOC)	Produk simpanan dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu minimal 1 (satu) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kalender, dengan tingkat imbal hasil yang mengacu kepada penempatan harian di Bank Indonesia. Akad yang digunakan mudharabah mutlaqah.
BSI Lindung Nilai Syariah	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi penjualan/pembelian valuta asing yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. Akad yang digunakan aqd' al-tahaww al-basith dan al sharf.
Transaksi Valuta Asing - Devisa Umum/Telegraphic Transfer	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi pembelian/penjualan valuta asing sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan tenor waktu tertentu. Transaksi *today* untuk penyerahan pada hari yang sama, transaksi *tomorrow* (Tom) untuk penyerahan setelah satu hari kerja dan transaksi spot untuk penyerahan setelah dua hari kerja. Mata uang yang ditransaksikan adalah USD, SAR, EUR, SGD, JPY, AUD, HKD, CHF, CAD, CNY dan GBP.
Transaksi Valuta Asing - Uang Kertas Asing (*Banknotes*)	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi uang kertas asing (*banknotes*) baik untuk penarikan dan setoran maupun jual beli terhadap rupiah, dengan akad al sharf.
SERVICE	
Wali Amanat	Mewakili pemegang sukuk, serta dapat bertindak selaku agen pemantau, agen jaminan, dan agen *escrow* terkait dengan transaksi di pasar modal syariah. • Wali Amanat Memantau kewajiban emiten sesuai perjanjian perwaliamanatan penerbitan sukuk. • Agency Memantau kewajiban para pihak terkait layanan agen pemantau, agen jaminan, agen *escrow* pasar modal.
Kustodian	Tata kelola sesuai prinsip syariah dengan sistem kustodian yang modern dan terpercaya. **Core Custody** • *Safekeeping* Konsep dari penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi. • *Transaction Handling Service* Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian. • *Corporate Action* Fungsi kustodian sebagai *corporate action* antara lain yaitu jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain *(corporate action)* serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya *(proxy)*. • *Sub Registry (Government Bond)* Layanan pembukuan, pencatatan dan pengadministrasian untuk transaksi obligasi pemerintah baik perusahaan maupun individu, baik secara langsung dengan nasabah dan/atau melalui *selling agent* lain. • *Income Collection* Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak-hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian. • *Portofolio Accounting* Jasa atas pembukuan atau pencatatan portofolio aset milik nasabah.

	Fund Services And Unit Link • *Fund Accounting* Pembukuan transaksi efek atau surat berharga dalam suatu portofolio dan melaporkannya ke nasabah. • *Fund Administration* Pencatatan atas kepemilikan unit penyertaan nasabah reksa dana dan atau unit link dan melaporkannya kepada investor dari pada produk tersebut. • *Safekeeping* Konsep penyimpanan efek adalah penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi. • *Transaction Handling Service* Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian. • *Income Collection* Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian. • *Reporting / Tax* Hasil akhir atau jasa pelaporan yang dilakukan Bank Kustodian atas aset Reksa Dana yang dikirim kepada manager investasi dan/atau *unit holder*.
Pembiayaan Investasi	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Penyelesaian Wesel Ekspor	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah (Eksportir) dalam rangka membantu pengurusan dokumen, penagihan piutang, serta membantu pemenuhan modal kerja nasabah. Termasuk penyelesaian wesel ekspor *single bank*, *documentary*, *non documentary*, dan *open account* baik dilakukan secara *collection* (*services*) maupun negosiasi/ diskonto (*financing*).
LC Issuance/SKDBN	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Buyer Financing	Fasilitas dimana Bank memenuhi kewajiban/utang *Buyer* kepada *Seller* berdasarkan dokumen kontrak jual beli/tagihan/*invoice* yang telak diaksep *Buyer*.
Distributor Financing	Fasilitas dimana Bank memenuhi kewajiban/utang Distributor kepada *Principal* berdasarkan dokumen kontrak jual beli/tagihan/*invoice*.
Supplier Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia dimana pihak yang berpiutang (*supplier*) mewakilkan kepada Bank untuk melakukan penagihan piutang. Bank kemudian melakukan penagihan piutang kepada pihak yang berutang (*buyer*), atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
Bank Garansi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi).
PEMBIAYAAN	
Investasi Terikat Syariah Mandiri	Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh BSI sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudharabah muqayyadah.
Pembiayaan Investasi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Refinancing	Fasilitas pembiayaan untuk mendapatkan dana *fresh money* atas aset/objek eksisting calon nasabah untuk kebutuhan: • Akuisisi aset • *Take over* • Kebutuhan investasi lainnya
Multifinance	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan kepada multifinance dengan pola *channeling* atau *executing*.
Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa Pembiayaan Jangka Pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja *seasonal*.

PRODUK DAN LAYANAN

Agency, Sindikasi dan Clubdeal	Seiring berkembangnya usaha nasabah, sering kali diperlukan lebih dari satu bank dan/atau lembaga keuangan syariah untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan keuangan nasabah yang besar. Dengan tenaga profesional kami di bidang sindikasi syariah, nasabah akan mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas pembiayaan syariah dalam jumlah besar dan marjin/sewa/bagi hasil yang kompetitif tanpa harus berhubungan dengan banyak bank dan/atau lembaga keuangan syariah lain tetapi cukup dengan Bank Syariah Indonesia yang sekaligus akan membantu nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diterima.
Pembiayaan Modal Kerja	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
SIMPANAN	
Giro SBSN	Simpanan *non saving account* yang dikelola dengan akad mudharabah diperuntukkan kepada institusi yang memerlukan imbal hasil maksimal.
Deposito DHE SDA	Simpanan *saving account* yang bersumber dari dana DHE SDA milik nasabah di Bank atau bank lain.
Giro DHE SDA	Simpanan *non saving account* yang dikelola dengan akad mudharabah dan wadiah diperuntukkan kepada eksportir dalam rangka kegiatan perdagangan ekspor DHE SDA.
Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan tiering.

Digital Banking

BSI Mobile	Solusi untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi, beribadah dan berbagi melalui beragam fitur dalam satu aplikasi. BSI Mobile menemani nasabah 24 jam dan membuat segalanya menjadi lebih seimbang secara finansial, spiritual dan sosial.
Buka Rekening Online	Layanan pembukaan rekening online melalui BSI Mobile adalah solusi untuk nasabah yang ingin membuka rekening dengan mudah tanpa harus datang ke cabang.
Solusi Emas	Layanan kepemilikan emas melalui BSI Mobile dengan pembelian emas mulai dari Rp50.000. Nasabah bisa beli, jual, transfer, serta tarik fisik emas dan gadai emas online dengan mudah dan aman tanpa perlu datang ke cabang.
BSI QRIS	Layanan transaksi dengan scan kode QR *Code* yang menggunakan QR *Code* Indonesia Standard (QRIS) Bank Indonesia
BSI Cardless Withdrawal	Solusi praktis bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang tunai tanpa kartu. Melalui BSI Mobile, tarik tunai tanpa kartu bisa dilakukan di seluruh ATM Bank Syariah Indonesia, Indomaret dan Alfamart.
BSI Debit Card	BSI Kartu Debit merupakan kartu ATM dari Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM dan EDC di jaringan GPN dan International (Visa).
BSI Debit OTP	BSI Debit OTP merupakan layanan transaksi berbasis kartu debit yang menggunakan kode OTP sebagai PIN dalam setiap penggunaan transaksinya.
BSI ATM CRM	BSI ATM CRM (*Cash Recycle Machine*) atau ATM Setor Tarik merupakan jenis ATM untuk melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank serta transaksi pembayaran atau pembelian bagi semua Nasabah Bank Syariah Indonesia.
BSI Aisyah	Aisyah adalah Asisten Interaktif Bank Syariah Indonesia yang akan membantu memberikan informasi produk, layanan, dan promo terbaru dari Bank Syariah Indonesia.
BSI Net	Transaksi bisnis kini lebih mudah melalui layanan BSI Net kapan pun dan di mana pun. Berbagai kemudahan bertransaksi seperti melakukan transfer secara massal dan monitoring transaksi bisa anda lakukan di BSI Net.
BSI JadiBerkah.id	Jadiberkah.id adalah *platform crowdfunding* untuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Berbagai pilihan program ziswaf dapat anda temukan di platform Jadiberkah.id.
BSI Merchant Business	EDC Bank Syariah Indonesia merupakan layanan yang disediakan Bank Syariah Indonesia kepada nasabah yang memiliki usaha untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran kartu ATM Debit kepada pelanggannya.

BSI API Platform	BSI API Platform adalah sebuah portal yang menyediakan layanan *open banking* untuk memudahkan proses integrasi antara layanan Bank Syariah Indonesia dengan aplikasi nasabah.
BSI Smart Agent	BSI Smart Agent merupakan Layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) BSI untuk menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dengan didukung sarana teknologi informasi.
BSI Payment Point	Layanan transaksi Payment Point di Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan oleh nasabah di setiap outlet Bank Syariah Indonesia atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debit rekening maupun tunai (*cash*).
Deposito Mobile	Mudahnya investasi dengan deposito di BSI Mobile, kapanpun dan dimanapun, tanpa perlu datang ke cabang.
Griya Hasanah Online Top Up Melalui BSI Mobile	Pembiayaan BSI Griya Hasanah *Online Top Up* merupakan Pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia dalam bentuk penambahan pembiayaan dari pembiayaan eksisting Bank Syariah Indonesia untuk tujuan konsumtif nasabah. Pembiayaan Griya Hasanah *Online Top Up* menggunakan akad *refinancing* syariah dengan skema al-bai' dalam rangka musyarakah mutanaqishah (MMQ).

Kartu

KARTU PEMBIAYAAN	
BSI Hasanah Card Classic	BSI Hasanah Card Classic merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. BSI Hasanah Card Classic dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah Card Classic Rp4 juta hingga Rp6 juta.
BSI Hasanah Card Gold	BSI Hasanah Card Gold merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. BSI Hasanah Card Gold dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah Card Gold Rp8 juta hingga Rp30 juta.
BSI Hasanah Card Platinum	BSI Hasanah Card Platinum merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. BSI Hasanah Card Platinum dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah Card Platinum Rp40 juta hingga Rp 900 juta.

PRODUK DAN LAYANAN

KARTU DEBIT	
BSI Debit GPN	BSI Debit GPN, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
BSI Debit OTP	Kartu ATM debit dimana sistem PIN menggunakan One Time Password (OTP) yang diregister melalui mobile banking.
BSI Debit Visa	BSI Debit Visa merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Visa Worldwide yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh dunia (Internasional).
Kartu BSI Debit Sabi	BSI Debit SaBi, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik tabungan anak yang terafiliasi dengan orang tua. Kartu BSI Debit SaBi mendukung edukasi literasi keuangan bagi anak dengan limitasi khusus untuk menjaga keamanan anak dalam bertransaksi.
Kartu Debit BSI SimPel	BSI Debit SimPel, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik Tabungan Sim panan Pelajar. Kartu BSI Debit SimPel memiliki limit khusus agar para pelajar dapat bertransaksi dengan aman dan mudah. Kartu dapat dipergunakan oleh pelajar di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
Kartu Haji BSI Visa	Kartu Haji BSI Visa merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia yang diperuntukkan khusus bagi nasabah Tabungan Haji Indonesia untuk memberikan kemudahan bertransaksi saat nasabah melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi

Jaringan bisnis dan wilayah operasi BSI didukung oleh kantor wilayah hingga kantor fungsional operasi, yang pada tahun 2023 rinciannya dijelaskan di bawah ini.

No.	Jenis Kantor	2023	2022	2021
1	Kantor Wilayah	10	10	10
2	Kantor Cabang (KC)	153	153	272
3	Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN)	1	0	0
4	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	886	959	985
5	KCP Mobile (dhi: MKK)	60	60	0
6	Kantor Fungsional (KF)	91	96	34
7	Kantor Kas (KK)	0	0	74
8	Payment Point (PP)	0	0	179
9	Konter Layanan Priority	20	16	11
10	Layanan Gadai	765	734	530
11	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	2.571	2.548	2.618

Keterangan:
- PP tahun 2022 Reformat menjadi KFO (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)
- KK tahun 2022 Reformat menjadi KCP (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)

JARINGAN BISNIS
DAN WILAYAH OPERASI

1.039

Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BSI di banyak provinsi sejalan dengan visi BSI untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

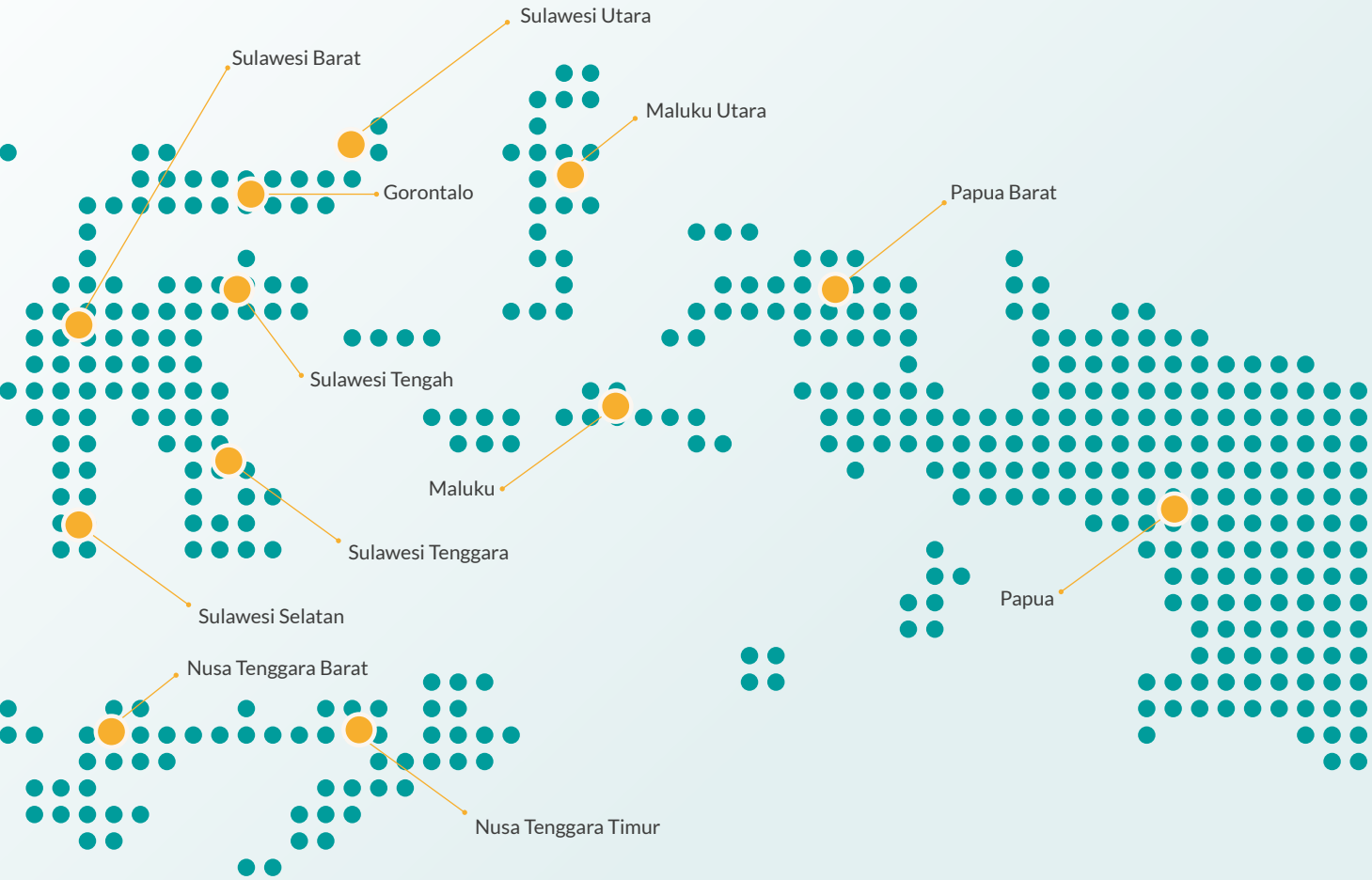

JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI

KANTOR CABANG

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp.	Faks.
1	KC Banda Aceh Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 6, Kel. Kp. Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	(0655) 7551109, 7551558	(0651) 33945
2	KC Banda Aceh Ahmad Dahlan	Jl. Ahmad Dahlan No. 111, Kel. Merduati, Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh	0651 - 32313, 32314, 32301	0651 - 32317
3	KC Banda Aceh T. Panglima Nyak Makam	Jl. T. Panglima Nyak Makam No. 100 A - 100 D, Kel. Desa Doy, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	(0651) 22900 (hunting), 7410714, 32929, 33869,	31190
4	KC Sigli 2	Jalan Merdeka No.6, Kel. Blok Bengkel, Kec. Kota Sigli Kab. Pidie	(0653) 22450	21306
5	KC Sigli 1	Jl. Prof. A Majid Ibrahim No. 6, Kel. Blang Asan, Kec. Kota Sigli Kab. Pidie	-	-
6	KC Lhokseumawe 1	Jl. Muhammad Malikul Zahir No.135C, Kel. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	(0645) 631146, 631147, 631148	(0645) 41555
7	KC Bireuen Simpang IV	JL. Medan - Banda Aceh, Simpang IV, Kel. Bireuen Meunasah Capa, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen	(0644) 21126, 22044	22040
8	KC Kuala Simpang	Jl. Tengku Panglima Polem No. 23 - 24, Kel. Kuala Simpang, Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang	(0641) 333366	333367
9	KC Langsa Darussalam	Jl. Darussalam No.1, Kel. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota Kota Langsa	(0641) 21033	21170
10	KC Lhokseumawe Merdeka 3	Jl. Merdeka No.1, Kel. Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	(0645) 41906	21306
11	KC Takengon	Jl. Yos Sudarso No.164, Takengon, Kel. Kuteni Reje, Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah	(0643) 21294	21119
12	KC Meulaboh Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol, Kel. Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat	(0655) 7551961	7551010
13	KC Simeulue	Pertokoan Suak Tungkul Kavling 1 No. 5/6, Jl. Tgk. Diujung Sinabang, Kel. Amiria Bahagia, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue	(0650) 21547	(0650) 21556
14	KC Blangpidie	Jl. Persada No. 99A, Kel. Keudee Siblah, Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya	(0659) 91008, 91127	91070
15	KC Kutacane	Jl. Iskandar Muda No.14, Kel. Perapat Hilir, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara	(0629) 21031	21170
16	KC Tapaktuan	Jl. Nyak Adam Kamil No. 42, Kel. Hulu, Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan	(0656) 21456	21088

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp.	Faks.
17	KC Batam Windsor Central	Komplek Windsor Central Blok A No. 3-4, Jl. Pembangunan, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja Kota Batam	(0778) 431331	(0778) 432727
18	KC Tanjung Pinang	Jl. Basuki Rahmat No. 1-3, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang	(0771) 313788	(0771) 313995
19	KC Medan A Yani	Jl. Jenderal Achmad Yani No. 100, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat Kota Medan	(061) 4153866, 4151466	(061) 4511867
20	KC Lubuk Pakam	Jl. Dr. Sutomo No.12A-12B, Kel. Lubuk Pakam I - II, Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang	(061) 7952555	(061) 7950419
21	KC Medan S Parman	Jl. S. Parman No. 250 E/8, Kel. Petisah Hulu , Kec. Medan Baru Kota Medan	(061) 455 6870/451 5683	451 5671
22	KC Medan Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 7, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan	(061) 4550755	(061) 4550766, 4537627
23	KC Binjai	Jl. Sukarno Hatta No. 22-23, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur Kota Binjai	(061) 8826396	(061) 8826138
24	KC Pekanbaru Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 450, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru	(0761) 849191, 849192, 849193, 849194	(0761) 849190, 31668
25	KC Dumai	Jl. Jenderal Sudirman No. 162, Kel. Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur Kota Dumai	(0765) 33555	(0765) 32379
26	KC Pekanbaru Harapan Raya	Jl. Haji Imam Munandar No. 8, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru	(0761) 862222	(0761) 849799
27	KC Duri	Jl. Hangtuah, Kel. Batang Dui, Kec. Mandau Kab. Bengkalis	(0765) 598990	(0765) 598993
28	KC Pematangsiantar Perintis	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar	(0622) 435858, 435857, 435861	(0622) 435848
29	KC Rantau Prapat	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 4, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu	(0624) 24880, 24205, 25186	(0624) 24653
30	KC Padangsidempuan	Jl. Sudirman No. 130 A, Kel. Wek I, Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan	(0634) 28200	(0634) 28103
31	KC Sibolga	Jl. Sutoyo Siswomiharjo No. 22, Kel. Huta Tonga Tonga, Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga	(0631) 24555	(0631) 26722
32	KC Bandar Lampung Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 189, Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung	(0721) 258952, 258960	(0721) 263588
33	KC Bandar Jaya	Komp. Pertokoan Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3, Jl. Proklamator Raya, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah	(0725) 529825, 529826	(0725) 529831

JARINGAN BISNIS
DAN WILAYAH OPERASI

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp.	Faks.
34	KC Metro A Yani	Jalan Ahmad Yani No. 9, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat Kota Metro	(0725) 7851606	(0725) 7851605
35	KC Bengkulu S Parman 1	Jl. S. Parman No. 15, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	(0736) 342007	(0736) 346707
36	KC Bengkulu Adam Malik	Jl. Adam Malik RT/RW 023/08, Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu	(0736) 276 88 / 209 38	264 48
37	KC Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No. 12 RT 05, Kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau	0733-7329623 / 14 / 16 / 082881131705 /82881131704	-
38	KC Jambi Gatot Subroto	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 127 A-B, Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi Kota Jambi	(0741) 27730, 27726	(0741) 27733
39	KC Jambi Pattimura	Jl. Kapt. Pattimura No. 29-30 RT 21, Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru Kota Jambi	0741 - 7552571, 7552572, 7552573	0741 - 7552574
40	KC Padang Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol No.17, Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan Kota Padang	(0751) 21113, 20765	(0751) 24768
41	KC Bukittinggi Sudirman 1	Jl. Jenderal Sudirman No. 73, Kel. Kayu Ramang, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	(0752) 627633	(0752) 627637
42	KC Padang Belakang Olo	Jl. Belakang Olo No. 45, Kel. Kamp Jao, Kec. Padang Barat Kota Padang	0751 - 841818, 841819	(0751) 841808
43	KC Palembang Demang	Jl. Demang Lebar Daun No. 2311, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang	(0711) 421919	(0711) 419952
44	KC Pangkal Pinang	Jl. Masjid Jamik No. 123, Kel. Masjid Jamik, Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang	(0717) 432229	(0717) 431445
45	KC Prabumulih Sudirman	JL. Jend. Sudirman No. 7-8 RT 01/10, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	(0713) 322888	(0713) 322565
46	KC Palembang Sudirman	Jl. Jendral Sudirman KM 3,5, Kel. 20 Ilir, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang	(0711) 315999, 310751	(0711) 310752
47	KC Baturaja Rahman Hamidi	Jl. Let. R Hamidi No. 30 A-B RT 03 RW 01 , Kel. Kemalaraja , Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu	(0735) 324888/0735 323333/0735 325522/0735 325554	(0735) 324888
48	KC Bekasi Summarecon	Komplek Ruko Summarecon Bekasi, Rukan Sapphire Commercial Blok SF 11 12, Jl. Bulevar Selatan, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi	(021) 8853990, 8856368, 8840355, 8853991, 88855418	(021) 8856406

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp.	Faks.
49	KC Bekasi Cikarang	Ruko Cikarang Central City, Blok G No. 1-2, Kel. Ciantra, Kec. Cikarang Selatn Kab. Bekasi	(021) 89902076, 89902077	(021) 89906765
50	KC Jakarta Kebon Jeruk 1	Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 54 D (Jl. Raya Kelapa Dua No. 1) RT. 004 RW. 003, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk Wil. Kota Jakarta Barat	(021) 53662464, 53662465, 53662467	(021) 53662472
51	KC Tangerang Ciledug	Jl. HOS Cokroaminoto No. 69, Kel. Sudimara Jaya, Kec. Ciledug Kota Tangerang	(021) 73458147, 73458148, 73458149	(021) 73458150
52	KC Jakarta Kelapa Gading 1	Komplek Graha Bulevar Blok KGC No. A-02 dan A-03, Jl. Boulevard Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Wil. Kota Jakarta Utara	(021) 29375262, 29375261	(021) 29375197, 29375198
53	KC Jakarta Tanjung Priok 1	Jl. Enggano No. 42B - 42, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Wil. Kota Jakarta Utara	(021) 43906060, 43906055	(021) 43906058, 43906059
54	KC Jakarta Pemuda	Komplek Graha Mas Pemuda, Blok AB1 dan AB2 Jl. Pemuda, Rawamangun, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung Wil. Kota Jakarta Timur	021 - 47882680 / 81 / 82 / 83	021 - 47882684 / 85
55	KC Jakarta Pondok Kelapa	Ruko Komplek Billy & Moon Blok E No. 5A-5B, Jl. Raya Kalimalang, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit Wil. Kota Jakarta Timur	(021) 86903501	(021) 86903502
56	KC Jakarta Jatinegara	Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No. 8-9, Jl. Matraman Raya No. 148, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman Wil. Kota Jakarta Timur	(021) 85904866	(021) 85905634
57	KC Jakarta Thamrin	Jl. M. H. Thamrin No. 5, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng Wil. Kota Jakarta Pusat	(021) 2300509, 39839000	(021) 39832939
58	KC Jakarta Bendungan Hilir	Jl. Bendungan Hilir Raya No. 84 A - B, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Wil. Kota Jakarta Pusat	021 - 57851054 - 56	021 - 57851038
59	KC Jakarta The Tower	Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27 Kav.12, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi Wil. Kota Jakarta Selatan	-	-
60	KC Tangerang Hasyim Ashari	Jl. KH. Hasyim Ashari 8 A-C, Kel. Buaran Indah, Kec. Cipondoh Kota Tangerang	(021) 55781230, 55781231, 55781232	(021) 55781233
61	KC Cilegon Tirtayasa 1	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 115 A, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang Kota Cilegon	(0254) 399444, 375648	(0254) 375645
62	KC Serang	Jl. Ahmad Yani No. 175 C-D, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang Kota Serang	(0254) 222984, 210191	(0254) 222985
63	KC Bogor Pajajaran Sukasari	Jl. Pajajaran No. 8, Kel. Baranang Siang, Kec. Bogor Timur Kota Bogor	(0251) 8350562, 8350563, 8350564	(0251) 8350565

JARINGAN BISNIS
DAN WILAYAH OPERASI

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp.	Faks.
64	KC Bogor Cibinong	Ruko Graha Cibinong Blok D No. 2, Jl. Raya Bogor KM 43, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong Kab. Bogor	(021) 87915703, 87915704	(021) 87919008
65	KC Bogor Pajajaran Bantarjati	Jl. Pajajaran Raya No. 63, Kel. Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara Kota Bogor	0251 - 8337306, 8337620,8337828	(0251) 8384968
66	KC Depok Margonda 2	Jl. Margonda Raya No. 209, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji Kota Depok	021 - 77210117 (hunting)	021 - 77210027
67	KC Depok Margonda 1	Ruko Depok Mas Blok A1-2, Jl. Margonda Raya No. 42, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok	(021) 7765231, 7765251, 7765289, 77213804	(021) 77202905, 77203598
68	KC Jakarta Cibubur Citra Gran	Ruko Citra Gran Blok R-2 No. 8-9, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi	(021) 84300107, 84300108, 8449778	(021) 84590918
69	KC Jakarta Fatmawati 2	Jl. RS Fatmawati No. 12, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru Wil. Kota Jakarta Selatan	021-7696807/7696808/ 75902925/ 75902930/ 75902934	021-75902899/ 75902983
70	KC Jakarta Hasanudin	Jl. S. Hasanudin No. 57, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 2701515, 2701505	(021) 7220362
71	KC Jakarta Mayestik	Jl. Kyai Maja Blok D/1 Persil No. 6-6A, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 7202451, 7202728, 7202509, 7394952	(021) 7220822
72	KC Jakarta Pondok Indah	Komplek Ruko Pondok Indah Plaza 1 Kav. II, Blok UA No. 6, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 7662029, 7662030	(021) 7662028, 7665391
73	KC Tangerang Ciputat	Jl. Ir. H. Juanda No. 111, RT 006/001, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	(021) 7425267	(021) 7423018
74	KC Jakarta Saharjo	Jalan Saharjo No.204A RT. 04/05, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 8308768, 8292824, 8357309	(021) 8308769, 8357310
75	KC Jakarta Kalibata	Jl. Raya Pasar Minggu No. 75, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 7940323, 7940341, 7940353	(021) 7940420
76	KC Tangerang Bintaro	Bintaro Trade Center, Jl. Jend. Sudirman Blok A1 No. 7 - 8, Bintaro Sektor 7, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	(021) 7450120, 7453301, 7450296, 7450297	(021) 7450116
77	KC Tangerang BSD ITC	Jl. Pahlawan Seribu ITC BSD No. 21-23A, Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	021 - 53153155, 53153144-46	021 - 53161611
78	KC Bandung Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 24, Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan Kota Bandung	(022) 84469443	(022) 4200011

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp.	Faks.
79	KC Garut	Jl. Ciledug No. 148-149, Kel. Kota Kulon , Kec. Garut Kota Kab. Garut	(0262) 243689, 243692	(0262) 233137
80	KC Bandung Asia Afrika	Jalan Asia Afrika No. 174 RT 009 RW 004, Kel. Paledang, Kec. Lengkong Kota Bandung	022 - 7314546, 7323142, 7323143	022 - 7323141
81	KC Bandung Suniaraja	Jl. Suniaraja No.82, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung Kota Bandung	(022) 423 2584, 423 1185, 423 6614, 423 2585, 423 2586, 423 2587 423 86 / 423 89	-
82	KC Sukabumi A Yani	Jl. A.Yani no. 29, Kel. Gunung Parang, Kec. Cikole Kota Sukabumi	0266 - 6247300	0266 - 6247400
83	KC Karawang	Jl. Panatayuda I No 68, Kel. Karawang Kulon, Kec. Karawang Barat Kab. Karawang	0267 - 8490449 (hunting), 0828-17096715 / 16 / 17 / 18 / 29 / 30 / 31 / 32	(0267) 401505
84	KC Bandung Ahmad Yani	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 252, Kel. Kacapiring, Kec. Batunuggal Kota Bandung	(022) 7202688, 7231090, 82819030694	(022) 7271334
85	KC Purwakarta RE Martadinata	Jl. R.E Martadinata No. 5, RT 25 RW 05, Kel. Nagri Tengah, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	(0264) 231760	(0264) 231761
86	KC Cimahi	Jl. Jend. Amir Machmud No. 118, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi	(022) 6632228	(022) 6632212
87	KC Cianjur Siliwangi	Jl. Siliwangi No. 6, Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur Kab. Cianjur	(0263) 284648	(0263) 284677
88	KC Cirebon Dr Cipto	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 79, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi Kota Cirebon	(0231) 202760, 202092, 202093, 200423	(0231) 202067
89	KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 74-78, Kel. Empangsari, Kec. Tawang Kota Tasikmalaya	(0265) 312995, 312999	(0265) 311199
90	KC Purwokerto Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 433, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas	(0281) 641108, 641685	(0281) 625955
91	KC Cilacap A Yani	Jl. A. Yani No. 97, Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap	(0282) 531015, 531038	(0282) 535870
92	KC Semarang A Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No.152, Kel. Karang Kidul, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	024 - 8313247, 8315027	024 - 8313217
93	KC Semarang Pandanaran	Jl. Pandanaran No. 90, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	(024) 3568891, 3568894	(024) 3568890
94	KC Kudus A Yani 1	Ruko Ahmad Yani No. 9, Jl. Ahmad Yani, Kel. Gondang Manis, Kec. Kota Kudus Kab. Kudus	(0291) 439272	(0291) 439274
95	KC Pati Sudirman	Jl. P. Sudirman No. 207, Plaza Pati Blok A1-A2, Kel. Pati Lor , Kec. Pati Kab. Pati	(0295) 386699	(0295) 387799
96	KC Salatiga	Jl. Diponegoro Ruko Salatiga Square No. 77-A6 dan 77-A7, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo Kota Salatiga	(0298) 328558, 328885	(0298) 314407

JARINGAN BISNIS
DAN WILAYAH OPERASI

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp.	Faks.
97	KC Tegal KH Mansyur	Jl. KH. Mansyur No.4, Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur Kota Tegal	(0283) 325300, 325301	(0283) 351460
98	KC Kendal Soetta	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 325, Kel. Bugangin, Kec. Kendal Kab. Kendal	(0294) 388173, 388175	(0294) 388172
99	KC Pekalongan Pemuda	Masjid Syuhada, Jl.Pemuda No.52-54, Kel. Panjangwetan, Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan	0285 - 434918, 434919	0285 - 434920
100	KC Solo Slamet Riyadi 1	Jl. Slamet Riyadi No. 388, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan Kota Surakarta	(0271) 710820	(0271) 742085, 742086
101	KC Solo Slamet Riyadi 2	Jl. Slamet Riyadi No. 318, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan Kota Surakarta	0271 - 742555, 725222	0271 - 736718
102	KC Yogyakarta Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 42, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	(0274) 555022	(0274) 555021
103	KC Mataram Hasanudin	Jl. Hasanudin No. 40, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara Kota Mataram	(0370) 644888, 622300, 622700	(0370) 634999
104	KC Kupang	Jl. Mohammad Hatta No.56, Kel. Fontein, Kec. Oebobo Kota Kupang	(0380) 834100, 823466, 828617	(0380) 826150
105	KC Bima Soetta 2	Jl. Soekarno Hatta No. 329 RT.01 RW.01, Kel. Paruga, Kec. Rasanae Barat Kota Bima	(0374) 444 03/ 444 04	444 86
106	KC Denpasar	Jl. Raya Puputan No.114, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar	(0361) 432595	(0361) 434045
107	KC Jember Sudirman	Jl. P. B. Sudirman No. 41-43, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang Kab. Jember	(0331) 411522	(0331) 411525
108	KC Banyuwangi Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rakhmat No. 30, Kel. Singotrunan, Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi	(0333) 418624, 418625, 418626, 418627	(0333) 418628
109	KC Kediri Hassanudin	Ruko Hassanuddin Bussines Center Jl. Hasanuddin No. 21 , Kel. Dandangan, Kec. Kota Kota Kediri	(0354) 672 114-5	672 685
110	KC Madiun Agus Salim	JL. Agus Salim No. 120, Kel. Pandean, Kec. Taman Kota Madiun	(0351) 454000	(0351) 458300
111	KC Blitar	Jl. Cokroaminoto No. 10 RT.01 RW. 02, Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar	(0342) 816999	(0342) 816777
112	KC Malang Suprapto	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 48, Kel. Rampalcelaket, Kec. Klojen Kota Malang	0341 - 359129, 359130	0341 - 359128
113	KC Pasuruan Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No.77, Kel. Purworejo, Kec. Purworejo Kota Pasuruan	(0343) 418 955	418 956

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp.	Faks.
114	KC Surabaya Darmo	Jl. Raya Darmo No. 15, Kel. Tegalsari, Kec. Keputran Kota Surabaya	(031) 5674848, 5679842,	(031) 5679841
115	KC Sidoarjo Jenggolo	Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3, Jl. Jenggolo No. 9, Kel. Celep, Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo	(031) 8946449, 8947231,8921033, 8922129	(031) 8957429
116	KC Surabaya Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rachmat No. 17-19, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya	031-99254882, 031-99254883, 031-99254885, 031-99254887	031 - 7385678
117	KC Surabaya Dharmawangsa	Jl. Dharmawangsa No. 115 A, Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya	031 - 5045082, 5045085, 5030222	031 - 5037222
118	KC Pamekasan	Jl. KH. Agus Salim No. 3A, Kel. Barurambat Kota, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan	(0324) 331223, 331224, 331225	(0324) 331218
119	KC Gresik Kartini	JL. RA. Kartini No. 180, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas Kab. Gresik	(031) 3972053	(031) 3972065, 3979791
120	KC Bojonegoro	Jl. Panglima Sudirman No. 99A, Kel. Klangon, Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro	(0353) 892124, 892125	(0353) 892123
121	KC Surabaya Jemur Handayani	Jl. Jemur Handayani No. 3, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo Kota Surabaya	(031) 8411230, 8411250	(031) 8411260
122	KC Jombang	Ruko Cempaka Mas Blok A/9, Jl. Soekarno-Hatta No. 1, Kel. Desa Kepuh Kembeng, Kec. Peterongan Kab. Jombang	(0321) 855527, 855528	(0321) 855526
123	KC Balikpapan Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 330, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan	(0542) 413382, 414630	(0542) 412109
124	KC Samarinda Antasari	Jl. Antasari No. 33 RT 02, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda	(0541) 7271271, 7271272, 7271273, 7271274	(0541) 7271276, 7271277, 7271278
125	KC Kutai Kartanegara	Jl. KH. Akhmad Muksin RT. 01, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara	(0541) 665362, 665365	(0541) 665017
126	KC Bontang	Jl. MT. Haryono No. 53, Kel. Gn. Elai, Kec. Bontang Utara Kota Bontang	(0548) 20007	(0548) 25005
127	KC Tarakan	Jl. Yos Sudarso No. 64, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan	(0551) 35050	(0551) 35051
128	KC Banjarmasin Lambung Mangkurat	Jl. Lambung Mangkurat No. 16, Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	(0511) 3366408, 3366409	(0511) 3366426
129	KC Martapura	Jl. A. Yani No. 20 Km. 37,4, Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura Kab. Banjar	(0511) 4722713, 4722755	(0511) 4722714
130	KC Pangkalan Bun	Jl. Sukma Arianingrat No. 14, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat	(0532) 25624, 25625	(0532) 25636
131	KC Tanjung	Jl. Ir. Pangeran Haji Muhammad Noor No. 12, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong	(0526) 2024484	(0526) 2024494

JARINGAN BISNIS
DAN WILAYAH OPERASI

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp.	Faks.
132	KC Sampit	Jl. M. T. Haryono No. 6, Kel. Mentawa Baru Hulu , Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur	(0531) 24222	(0531) 24400
133	KC Palangkaraya Diponegoro	Jl. Diponegoro No.10, Kel. Langkai, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya	0536 - 3224862, 3224863, 3224864	0536 - 3224870
134	KC Banjarbaru	Jl. A.Yani Km 35,5 , Kel. Kelurahan Komet, Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru	0511 - 4774939, 0511 -6749031	0511 - 4774939
135	KC Pontianak Abdurrachman	Jl. Sultan Abdurrachman No. 23, Kel. Pontianak, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak	(0561) 745004	(0561) 744774
136	KC Ketapang	Jl. R. Soeprapto No. 88, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang	(0534) 34600	(0534) 34395
137	KC Sambas	Jl. Gusti Hamzah No. 41, Kel. Desa Durian, Kec. Sambas Kab. Sambas	(0562) 391900	(0562) 392200
138	KC Singkawang	Jl. Alianyang No. 16 C-D, Kel. Melayu, Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang	(0562) 639866	(0562) 639865
139	KC Makassar 1	Jl. Dr. Ratulangi No.79, Kel. Labuang Baji, Kec. Mamajang Kota Makassar	(0411) 833070	(0411) 833069
140	KC Mamuju	Jl. Urip Sumoharjo No. 44, Kel. Karema, Kec. Mamuju Kab. Mamuju	(0426) 22651, 2703380	(0426) 21922
141	KC Bone	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 48, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone	(0481) 28774	(0481) 28775
142	KC Makassar 2	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140, Kel. Mario, Kec. Mariso Kota Makassar	0411 - 8914670, 8914610, 8914130	0411 - 8914275
143	KC Palopo	Jl. Andi Jemma No.150, Kel. Tompotikka, Kec. Wara Kota Palopo	(0471) 327432, (0471) 327225, (0471) 327360	-
144	KC Parepare	JL. Lahalede No.15, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare	(0421) 22456, 26534, 24624	-
145	KC Jayapura	Komplek Perniagaan Kelapa Dua - Entrop Jl. Raya Kelapa Dua No. 1-2, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura	(0967) 550965, 550966	(0967) 550968

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp.	Faks.
146	KC Ternate Jatiland	Ruko Jatiland Business Center No. 19-20, Kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate	(0921) 3127220	(0921) 3127336
147	KC Sorong	Jl. Ahmad Yani No. 21, Kel. Malawei, Kec. Sorong Kota Kota Sorong	(0951) 323366	(0951) 323360
148	KC Ambon	Jl. Pala No. 2, Kel. Uritetu, Kec. Sirimau Kota Ambon	(0911) 344572, 344337	(0911) 344582
149	KC Manado Mantos	Jl. Tendean (Boulevard) Ruko Mantos No.11-12, Kel. Sario Utara, Kec. Sario Kota Manado	(0431) 876 166	888 1502
150	KC Palu Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 77, Kel. Ujuna, Kec. Palu Barat Kota Palu	(0451) 426222	(0451) 452108
151	KC Gorontalo	Jl. Ahmad Yani No. 127, Kel. Heledulaa Selatan, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo	(0435) 828666	(0435) 830056
152	KC Luwuk	Jl. Urip Sumoharjo No. 18C dan 18D, Kel. Karaton, Kec. Luwuk Kab. Banggai	(0461) 21214, 22779, 8118671544	(0461) 325456
153	KC Kendari A Silondae 1	Jl. Abdullah Silondae No. 137, Kel. Korumba , Kec. Mandonga Kota Kendari	(0401) 3128822, 3128245, 3128897	(0401) 3127478

Struktur Organisasi

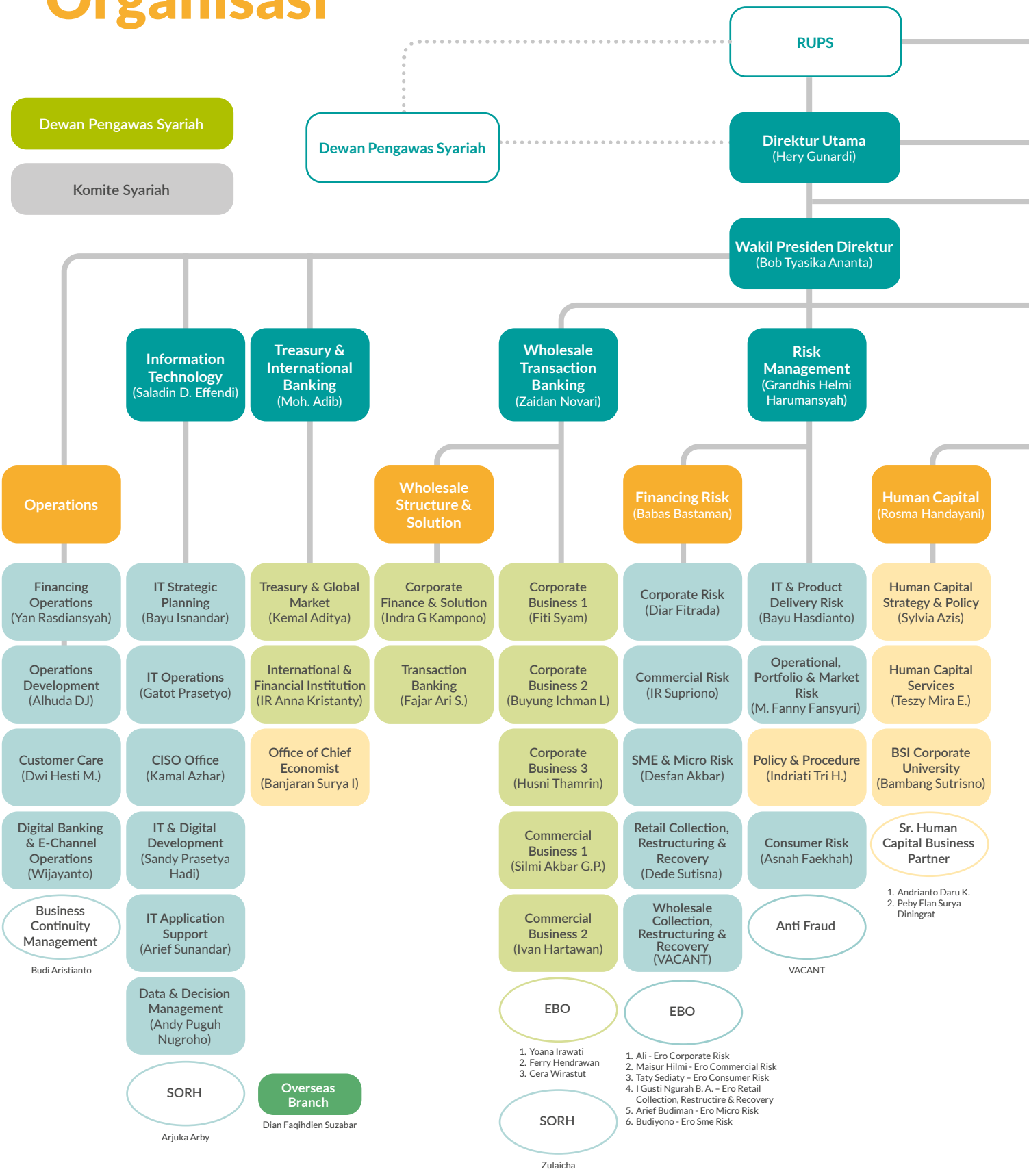

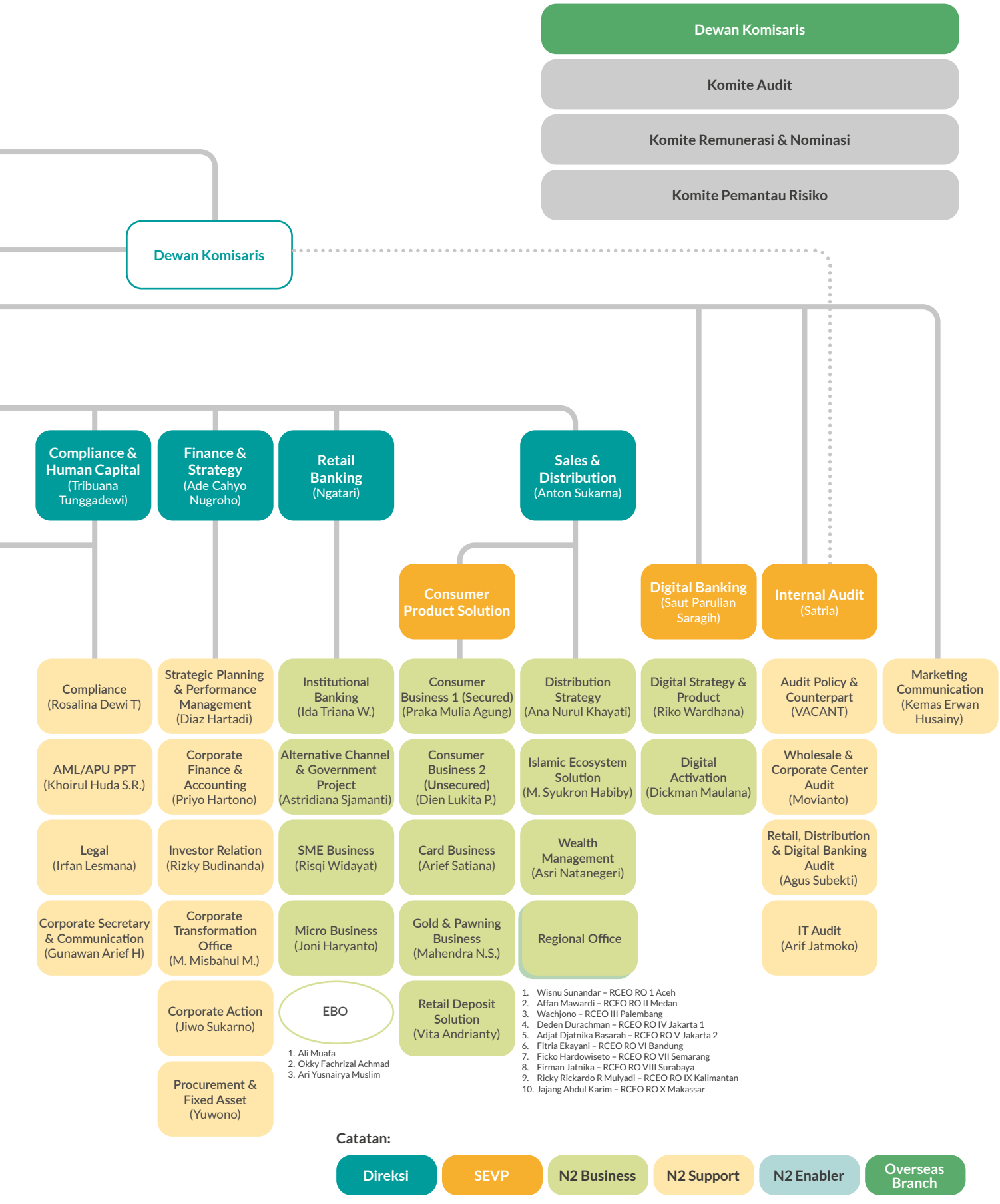
Dewan Komisaris
Komite Audit
Komite Remunerasi & Nominasi
Komite Pemantau Risiko
Dewan Komisaris
Compliance & Human Capital (Tribuana Tunggadewi)
Finance & Strategy (Ade Cahyo Nugroho)
Retail Banking (Ngatari)
Sales & Distribution (Anton Sukarna)
Consumer Product Solution
Digital Banking (Saut Parulian Saragih)
Internal Audit (Satria)
Compliance (Rosalina Dewi T)
AML/APU PPT (Khoirul Huda S.R.)
Legal (Irfan Lesmana)
Corporate Secretary & Communication (Gunawan Arief H)
Strategic Planning & Performance Management (Diaz Hartadi)
Corporate Finance & Accounting (Priyo Hartono)
Investor Relation (Rizky Budinanda)
Corporate Transformation Office (M. Misbahul M.)
Corporate Action (Jiwo Sukarno)
Procurement & Fixed Asset (Yuwono)
Institutional Banking (Ida Triana W.)
Alternative Channel & Government Project (Astridiana Sjamanti)
SME Business (Risqi Widayat)
Micro Business (Joni Haryanto)
EBO
1. Ali Muafa
2. Okky Fachrizal Achmad
3. Ari Yusnairya Muslim
Consumer Business 1 (Secured) (Praka Mulia Agung)
Consumer Business 2 (Unsecured) (Dien Lukita P.)
Card Business (Arief Satiana)
Gold & Pawning Business (Mahendra N.S.)
Retail Deposit Solution (Vita Andrianty)
Distribution Strategy (Ana Nurul Khayati)
Islamic Ecosystem Solution (M. Syukron Habiby)
Wealth Management (Asri Natanegeri)
Regional Office
1. Wisnu Sunandar – RCEO RO 1 Aceh
2. Affan Mawardi – RCEO RO II Medan
3. Wachjono – RCEO III Palembang
4. Deden Durachman – RCEO RO IV Jakarta 1
5. Adjat Djatnika Basarah – RCEO RO V Jakarta 2
6. Fitria Ekayani – RCEO RO VI Bandung
7. Ficko Hardowiseto – RCEO RO VII Semarang
8. Firman Jatnika – RCEO RO VIII Surabaya
9. Ricky Rickardo R Mulyadi – RCEO RO IX Kalimantan
10. Jajang Abdul Karim – RCEO RO X Makassar
Digital Strategy & Product (Riko Wardhana)
Digital Activation (Dickman Maulana)
Audit Policy & Counterpart (VACANT)
Wholesale & Corporate Center Audit (Movianto)
Retail, Distribution & Digital Banking Audit (Agus Subekti)
IT Audit (Arif Jatmoko)
Marketing Communication (Kemas Erwan Husainy)
Catatan:
Direksi
SEVP
N2 Business
N2 Support
N2 Enabler
Overseas Branch

Daftar Keanggotaan Asosiasi

No.	Asosiasi	Posisi
1	Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas)	Anggota
2	Pekumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)	Anggota
3	Islamic Financial Services Board (IFSB)	Anggota
4	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Anggota
5	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Wakil Bendahara
6	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota
7	Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)	Anggota
8	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota
9	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Anggota
10	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Anggota
11	Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)	Anggota
12	Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD)	Anggota
13	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK IJK)	Anggota

Profil
Dewan Komisaris

Muliaman D. Hadad

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 63 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen melalui RUPST tanggal 22 Mei 2023 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 September 2023.
Riwayat Pendidikan	• Doctor of Philosophy, Monash University, Melbourne (1996) • Master of Public Administration, Harvard University, Massachusetts (1990) • Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan Universitas Indonesia, Universitas Indonesia (1984)
Rangkap Jabatan	• Anggota Komite Audit di PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk **Perusahaan Terbuka Lainnya :** Komisaris Independen PT Astra Internasional Tbk (2023-sekarang) **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Komisaris Independen PT Astra International Tbk • Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro • Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein (2018-2023) • Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017) • Alternate Member Islamic Financial Stability Board (IFSB) (2007-2012) • Deputi Gubernur Bank Indonesia (2006-2012) • Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (2010-2012) • Anggota *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) & *Financial Stability Board* (FSB) (2006-2017) • Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia (2005-2006) • Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia (2003-2005)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

PROFIL
DEWAN KOMISARIS

Adiwarman Azwar Karim

Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 60 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen melalui RUPSLB 24 Agustus 2021 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 31 Januari 2022. Menerima pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen melalui RUPST tanggal 22 Mei 2023.
Riwayat Pendidikan	• Master Bidang Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi, Boston University, United State of America (1992) • Master Bidang Administrasi Bisnis, European University, Belgium (1990) • Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1989) • Insinyur Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1986)
Rangkap Jabatan	• Anggota Komite Audit di PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2023) • Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (2021-2025) • Dewan Penasihat Muslim Excellent Centre Unilever Indonesia (2020-2022) • Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (2020-2022) • Founder KARIM Consulting Indonesia (2013-2022)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal keuangan maupun keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Suyanto

Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 61 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Ekonomi-Manajemen Strategi, Universitas Trisakti (2020) • Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta, Univeristas Pertahanan (2011) • Sarjana Bidang Studi Pembangunan, Universitas Balikpapan (1994)
Rangkap Jabatan	Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** Staf Khusus Kepala BIN (2020-sekarang)
Pengalaman Kerja	• Staf Khusus Kepala BIN di Badan Intelijen Negara • Komisaris Independen, PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • Agen Madya pada Staf Ahli, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Intelijen Negara (2019-2020) • Staf Ahli Kepala BIN Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup (2019) • Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi I Badan Intelijen Negara (2018)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

PROFIL
DEWAN KOMISARIS

Masduki Baidlowi

Komisaris

Warga Negara	: Indonesia
Domisili	: Jawa Barat
Usia	: 65 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Bidang Pendidikan, Sekolah Tinggi Tarbiyah Taruna, Surabaya (2004) • Sarjana Muda Sastra Arab, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya (1983) • Studi Islam Klasik, Pondok Pesantren Salafiyah Sidogiri Pasuruan (1972-1979)
Rangkap Jabatan	Ketua Komite Remunerasi & Nominasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** • Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi (2019-sekarang) • Ketua Harian MUI Bidang Pusat (2014-sekarang) • Ketua Yayasan MMD Initiative (*Justice & Democracy*) (2000-sekarang)
Pengalaman Kerja	• Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi sekaligus Juru Bicara Wakil Presiden • Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • Anggota DPR RI Anggota Komisi IV bidang Pertanian dan Kelautan (2007-2009) • Anggota Komisi I Bidang Politik Luar Negeri (2007) • Anggota DPR RI Pimpinan Komisi X bidang Pendidikan (2004-2007)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Imam Budi Sarjito

Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 64 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doctor Economy Claremont Graduate School USA (1995) • Master Economy University Of Illinois USA (1991) • Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro (1982)
Rangkap Jabatan	Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Komisaris PT Bank BNI Syariah (2018-2021) • Direktur Kepatuhan dan Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018) • Komisaris PT Bank BNI Syariah (2012-2015) • Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015) • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2005-2011)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

PROFIL
DEWAN KOMISARIS

Sutanto

Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 60 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	Sarjana Bidang Administrasi, Universitas Diponegoro (1989)
Rangkap Jabatan	Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Komisaris PT Bank BRIsyariah Tbk (2019-2021) • Kepala Audit Intern, Audit Intern Wilayah Bandung, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019) • Inspektur, Kantor Inspeksi Semarang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018) • Inspektur, Kantor Inspeksi Banda Aceh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016) • Wakil Inspektur Bidang Audit KP, KCK, UKLN & PA Audit Intern Kantor Pusat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Abu Rokhmad

Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jawa Tengah
Usia : 47 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPST tanggal 22 Mei 2023 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 September 2023.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro (2010) • Magister Agama, Universitas Muhammadiyah Malang (2001) • Sarjana Syari'ah/Hukum Perdata Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya (1999)
Rangkap Jabatan	Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** Staf Ahli Hukum dan HAM Kementerian Agama Republik Indonesia (2021-sekarang)
Pengalaman Kerja	• Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM (2021-sekarang) • Plt. Rektor UIN Sumatera Utara Medan (2022-2023) • Plt. Kepala Badan Litbang & Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia (2021-2022) • Wakil Dekan Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan & Keuangan FISIP UIN Walisongo (2016-2019)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

PROFIL
DEWAN KOMISARIS

M. Arief Rosyid Hasan*)

Komisaris Independen

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 37 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (2020) • Magister Bidang Kebijakan Kesehatan, Universitas Indonesia (2014) • Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin (2010)
Rangkap Jabatan	• Ketua Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Ketua Komite Audit di PT Bank Syariah Indonesia Tbk **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** • Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah • Ketua Komite Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah • Wakil Sekretaris Jenderal BPP HIPMI (2020-sekarang)
Pengalaman Kerja	• Komisaris Independen, PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 (2020) • Kelompok Kerja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI (2019) • Komisaris, Merial Health (2018) • Chairman/Co-founder MilenialFest (2020)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

*) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Komaruddin Hidayat

Komisaris Independen

Warga Negara	: Indonesia
Domisili	: Jawa Barat
Usia	: 70 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Filsafat, Middle East Technical University Ankara Turki (1990) • Magister Filsafat, Middle East Technical University Ankara Turki (1986) • Sarjana Ushuluddin, IAIN Jakarta (1981)
Rangkap Jabatan	• Ketua Komite Remunerasi & Nominasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Anggota Komite Audit di PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta (2015 - sekarang)
Pengalaman Kerja	• Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (2019-2023) • Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah (2019-2021) • Komisaris Independen PT Bank BRIsyariah Tbk (2015-2019) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri (201-2015) • Rektor UIN Syarif Hidayatullah (2010-2014)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

PROFIL
DEWAN KOMISARIS

Mohamad Nasir

Komisaris Independen

Warga Negara	: Indonesia
Domisili	: Semarang
Usia	: 63 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen melalui RUPST 27 Mei 2022 dan efektif menjabat pada 6 Januari 2023.
Riwayat Pendidikan	• Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting, University of Science Malaysia (2004) • Magister Sains (M.Si) in Accounting, Universitas Gadjah Mada (1994) • Sarjana Akuntansi (Drs), Universitas Diponegoro (1988)
Rangkap Jabatan	• Ketua Komite Audit di PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi (2019-sekarang)
Pengalaman Kerja	• Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi (2019-sekarang) • Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022) • Menteri Komenristekdikti (2014-2019) • Rektor Universitas Diponegoro (2014) • Dekan Universitas Diponegoro (2010-2014)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Profil
Dewan Pengawas Syariah

Hasanudin

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang, Jawa Barat
Usia : 62 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Selanjutnya, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Syariah UIN Syarif Hidayatullah (2008) • Magister Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah (1997) • Sarjana Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah (1989)
Rangkap Jabatan	**Perusahaan Terbuka Lainnya :** Anggota Dewan Pengawas Syariah UUS PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-sekarang) **Institusi Lainnya:** • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services (2014-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management (2015-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2018-sekarang) • Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Pengalaman Kerja	• Ketua Badan Pelaksana Harian, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2020-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2018-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Trimegah Asset Management (2015-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Toyota Astra Finance Services (2014-sekarang) • Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS), Ikatan Ahli Akuntan Indonesia (2012-2016) • Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah, PT Bank BNI Syariah (2010-2021) • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002- sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

PROFIL
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Mohamad Hidayat

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Timur
Usia : 56 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah melalui RUPS LB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Selanjutnya, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Islamic Economic and Finance, Universitas Trisakti (2014) • Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum: Institute of Business Law and Legal Management (2004) • Magister Bussiness Administration IPWI Jakarta (1999) • Sarjana Syariah IAIN / UIN Syarief Hidayatullah Jakarta (1992)
Rangkap Jabatan	**Perusahaan Terbuka Lainnya :** Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (2005-sekarang) **Institusi Lainnya:** • Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life Syariah (2005-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Manulife Indonesia (2010-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia (2010-sekarang)
Pengalaman Kerja	• Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (2020-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia (2020-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021) • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (2018-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life Syariah (2017-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Oni Sahroni

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Depok
Usia : 48 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doktor bidang Fiqh Muqaran, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2009) • Magister bidang Fiqh Muqaran, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2005) • Sarjana bidang Syariah Islamiyah, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2000)
Rangkap Jabatan	**Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** Ketua Dewan Pengawas Syariah LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) (2016-sekarang)
Pengalaman Kerja	• Anggota Dewan Pengawas Syariah, PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • Anggota Dewan Pengawas Syariah, Maybank Islamic Berhard Syariah (2018-2020) • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2017-2020) • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners (2016-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2012-2020)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

PROFIL
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Didin Hafidhuddin

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Bogor
Usia : 71 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Ilmu Agama/Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah (2001) • Diploma Bidang Bahasa Arab Universitas Madinah Saudi Arabia (1994) • Magister Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor (1987) • Sarjana Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1978)
Rangkap Jabatan	**Perusahaan Terbuka Lainnya :** Ketua DPS PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk (2010-sekarang) **Institusi Lainnya:** • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah (2014-sekarang) • Ketua DPS PT PNM Invest Management (2010-sekarang) • Ketua DPS BPRS Amanah Ummah Bogor (1992-sekarang)
Pengalaman Kerja	• Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah (2014-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2010-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Bank BRIsyariah Tbk (2010-2020) • Direktur Pasca Sarjana, Universitas Ibnu Khaldun Bogor (2009-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah, BPRS Amanah Ummah Bogor (1992-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Profil Direksi

Hery Gunardi

Direktur Utama

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 61 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran (2021) • Master Finance and Accounting University of Oregon USA (1991) • Sarjana Administrasi Niaga Universitas 17 Agustus (1987)
Rangkap Jabatan	• Ketua Komite Bisnis • Ketua Komite Sumber Daya Manusia • Ketua Komite Aset & Liabilitas • Anggota Komite IT • Anggota Komite Policy & Procedure **Perusahaan Terbuka Lainnya:** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN (2020-2021) • Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020) • Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2020) • Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019) • Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2019) • Direktur Distributions PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2018) • Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016) • Direktur Micro & Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015) • Presiden Komisaris PT.AXA Mandiri Financial Services (2013-2015) • Direktur Micro & Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2015)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

PROFIL DIREKSI

Bob Tyasika Ananta

Wakil Direktur Utama

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 60 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 22 September 2022.
Riwayat Pendidikan	• Magister Business Administration, University of Oregon USA bidang Finance (1989) • Sarjana Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (1986)
Rangkap Jabatan	• Ketua Komite Crisis Management • Wakil Ketua Komite IT • Wakil Ketua Komite Bisnis • Wakil Ketua Komite Sumber Daya Manusia • Wakil Ketua Komite Aset & Liabilitas • Anggota Komite Policy & Procedure **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Direktur Human Capital & Kepatuhan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020-2022) • Direktur Treasury & International, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019-2020) • Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019) • Direktur Perencanaan & Operasional, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018) • Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Ngatari

Direktur Retail Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 58 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Wakil Direktur Utama 1 melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021. Menerima pengalihan tugas menjadi Direktur Retail Banking melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022.
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ilmu Pertanian, Bidang Studi Pertanian/Pengolahan Hasil Pertanian, Universitas Brawijaya (1990)
Rangkap Jabatan	• Anggota Komite Manajemen Risiko • Anggota Komite Bisnis • Anggota Komite Aset dan Liabilitas **Perusahaan Terbuka Lainnya:** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Wakil Direktur Utama I, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2022) • Direktur Utama, PT Bank BRIsyariah Tbk (2019-2021) • Pemimpin Wilayah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung (2018-2019) • Pemimpin Wilayah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 1 (2017-2018) • Pemimpin Wilayah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar (2016-2017)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

PROFIL DIREKSI

Anton Sukarna

Direktur Sales & Distribution

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Depok
Usia : 53 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Sales & Distribution melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah, Institut Pertanian Bogor (2023) • Sarjana Sosial Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (1994)
Rangkap Jabatan	• Anggota Komite Manajemen Risiko • Anggota Komite Bisnis • Anggota Komite Sumber Daya Manusia • Anggota Komite Aset dan Liabilitas • Anggota Komite Crisis Management **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Direktur Distribution & Sales, PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • SEVP Distribution & Sales, PT Bank Syariah Mandiri (2019) • Regional Head-Region III/Jakarta, PT Bank Syariah Mandiri (2018-2019) • Regional Head-Region VII/Indonesia Timur, PT Bank Syariah Mandiri (2016-2018) • Group Head Commercial Banking Group, PT Bank Syariah Mandiri (2012-2016)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Ade Cahyo Nugroho

Direktur Finance & Strategy

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 45 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Finance & Strategy melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Master in Business Administration, Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherland (2011) • Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2003)
Rangkap Jabatan	• Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko • Anggota Komite IT • Anggota Komite Policy & Procedure • Anggota Komite Sumber Daya Manusia • Angoota Komite Aset & Liabilitas • Anggota Komite Crisis Management **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Direktur Finance, Strategy & Treasury, PT Bank Syariah Mandiri (2018-2021) • Direktur Finance & Strategy, PT Bank Syariah Mandiri (2017-2018) • Senior Executive Vice President (SEVP) Finance & Strategy, PT Bank Syariah Mandiri (2016-2017) • Direktur Finance & Strategy, PT Mandiri Tunas Finance (2015-2016) • Senior Executive Vice President (SEVP)/Deputy Director, PT Mandiri Tunas Finance (2014-2015)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

PROFIL DIREKSI

Tribuana Tunggadewi

Direktur Compliance & Human Capital

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 56 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Compliance & Human Capital melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Magister Hukum Bisnis, Universitas Indonesia (2002) • Spesialis Kenotariatan, Universitas Airlangga (1993) • Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1990)
Rangkap Jabatan	• Wakil Ketua Komite Policy & Procedure • Wakil Ketua Komite Sumber Daya Manusia • Anggota Komite Manajemen Risiko • Anggota Komite IT • Anggota Komite Bisnis • Anggota Komite Aset & Liabilitas • Anggota Komite Crisis Management **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Direktur Kepatuhan & Risiko, PT Bank BNI Syariah (2017-2021) • Senior Executive Vice President (SEVP) Risiko & Komunikasi, PT Bank BNI Syariah (2017) • Senior Executive Vice President (SEVP) Risk & Compliance, PT Bank BNI Syariah (2015-2017) • Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011–2015) • Vice President (VP) Wakil Pemimpin 2 Divisi Bidang GCG dan Biro Direksi Corporate Secretary, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009–2011)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Zaidan Novari

Direktur Wholesale Transaction Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang Selatan
Usia : 56 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022 dan mendapat keputusan efektif dari OJK tanggal 31 Januari 2023.
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen Keuangan, Universitas Gadjah Mada (1999) • Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, Universitas Sriwijaya (1991)
Rangkap Jabatan	• Anggota Komite Manajemen Risiko • Anggota Komite Bisnis • Anggota Komite Aset & Liabilitas **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Senior Vice President Commercial Banking 3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2022) • Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2017) • Senior Account Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2012)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

PROFIL DIREKSI

Moh. Adib

Direktur Treasury & International Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang Selatan
Usia : 58 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Treasury & International Banking melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 22 September 2022.
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen Agrobisnis, Universitas Padjajaran (2000) • Sarjana Ilmu Agronomi, Institut Pertanian Bogor (1989)
Rangkap Jabatan	• Wakil Ketua Komite Aset & Liabilitas • Anggota Komite Manajemen Risiko **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Direktur PT BRI Danareksa Sekuritas (2021-2022) • Senior Executive Vice President (SEVP) Retail Capital Market PT BRI Danareksa Sekuritas (2019-2021) • Kepala Divisi Bisnis Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019) • Wakil Kepala Divisi Bisnis Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018) • Kepala Bagian Credit Line Management Divisi Bisnis Internasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2015)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Saladin D. Effendi

Direktur Information Technology

Warga Negara	: Indonesia
Domisili	: Jakarta Selatan
Usia	: 49 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Direktur Information Technology Informasi melalui RUPST tanggal 22 Mei 2023 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 September 2023.
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, Swinburne University of Technology Melbourne Australia (1994-1999)
Rangkap Jabatan	• Wakil Ketua Komite IT • Wakil Ketua Komite Crisis Management • Anggota Komite Manajemen Risiko • Anggota Komite Policy & Procedure **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Group Head Chief Information Security Officer, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2023) • Head of IT Division, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2014-2018) • Head of Information Technology, Senior Vice President (SVP), HSBC Indonesia (2006-2014) • Head of Competence (HoC), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003-2006) • Information Technology Consultant, PT Astra Graphia Information Technology (2000-2003)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

PROFIL DIREKSI

Grandhis Helmi Harumansyah

Direktur Risk Management

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jawa Barat
Usia : 42 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Direktur Risk Management melalui RUPST tanggal 22 Mei 2023 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 September 2023.
Riwayat Pendidikan	• Magister Business Administration-Strategic Management, Washington University St. Louis (2013) • Sarjana Teknik Industri, Universitas Indonesia (2003)
Rangkap Jabatan	• Ketua Komite Manajemen Risiko • Ketua Komite Policy & Procedure • Anggota Komite IT • Anggota Komite Bisnis • Anggota Komite Sumber Daya Manusia • Anggota Komite Aset & Liabilitas • Anggota Komie Crisis Management **Perusahaan Terbuka Lainnya :** - **Institusi Lainnya:** -
Pengalaman Kerja	• Group Head Commercial Risk 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-2023) • Head of Business Development PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore (BMSG) (2016-2019) • Departement Head Sector Sea Port & Transportation, Corporate Banking II & IV Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015–2016) • Departement Head Sector Energy, Corporate Banking V Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Informasi Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dan Alasannya

Pada tahun 2023 telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 22 Mei 2023. Melalui RUPST tersebut, Bank Syariah Indonesia memberhentikan dengan hormat:

1. Achmad Syafii sebagai Direktur Information Technology;
2. Tiwul Widyastuti sebagai Direktur Risk Management; dan
3. Nizar Ali sebagai Komisaris.

Keputusan tersebut berlaku mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan selanjutnya adalah, mengangkat:

1. Saladin D. Effendi sebagai Direktur Information Technology;
2. Grandhis sebagai Direktur Risk Management;
3. Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; dan
4. Abu Rokhmad sebagai Komisaris.

Keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2026. Namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Selain itu, RUPST mengalihkan penugasan Adiwarman Azwar Karim yang semula sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen seperti ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2021, menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

Profil Pejabat SEVP

Babas Bastaman

Senior Executive Vice President Internal (SEVP) Financing Risk

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Bekasi
Usia : 56 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 2021/64315-SK/HC-BSI 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Magister Profesional Industri Kecil Menengah Institut Pertanian Bogor (2009)
- Sarjana Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1992)

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Pengalaman Kerja
- SEVP Bisnis SME dan Komersial PT Bank BNI Syariah (2020-2021)
- Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019-2020)
- Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah dan Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017–2019)
- Pemimpin Divisi Kredit Komersial PT Bank BNI Syariah (2016)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Rosma Handayani*)

Senior Executive Vice President Internal (SEVP) Human Capital

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 54 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 2021/64312-SK/HC-BSI 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- S2 Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada (2005)
- S1 Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (1993)

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Pengalaman Kerja
- SEVP Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021)
- Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2020)
- Direktur Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020)
- SEVP Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2018-2019)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

*) Efektif tidak menjabat per tanggal 5 Maret 2024

Wawan Setiawan

Senior Executive Vice President Internal (SEVP) Consumer Banking

Warga Negara	: Indonesia
Domisili	: Tangerang Selatan
Usia	: 54 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 2021/64317-SK/HC-BSI 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- S2 Jurusan Manajemen PPM School of Management
- S1 Teknik Sipil Universitas Indonesia (1997)

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Pengalaman Kerja
- SEVP Retail Banking PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021)
- Senior Vice President, Micro Banking Group Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019)
- Vice President, Regional Retail Head Kantor Wilayah Sumatera II, Palembang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
- Vice President, Deputy Regional Manager Kantor Wilayah Jateng – DIY, Semarang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

PROFIL
PEJABAT SEVP

Saut Parulian Saragih

Senior Executive Vice President Internal (SEVP) Digital Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Depok
Usia : 49 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 01/244-KUA/DIR 6 Agustus 2021

Riwayat Pendidikan
- S2 Jurusan Bisnis Administrasi dari London Business School (2008)
- S1 Jurusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1996)

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Pengalaman Kerja
- Executive Vice President - Head of Strategy, Investor Relations and Partnerships Bank CIMB Niaga (2020-2021)
- Executive Vice President - Head of Strategy Bank CIMB Niaga (2019-2020)
- Direktur - Strategy and Business Development OVO PT Visionet International (2017-2019)
- Head of Business Development Sampoerna AGRO (2014-2017)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Satria

Senior Executive Vice President Internal (SEVP) Internal Audit

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 56 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor : 03/153-KEP/DIR tanggal 28 April 2023

Riwayat Pendidikan
- Magister Management, Universitas Bandar Lampung (2008)
- Sarjana Ekonomi, Universitas Bandar Lampung (1990)

Pengalaman Kerja
- Ketua Dewan Pengawas (2019-sekarang)
- Chief Retail Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2021-2023)
- Group Head / Senior Vice President Cash & Trade Operations Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019)
- Regional CEO Sulawesi Maluku (8 Provinsi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
- Regional CEO Sumatera II (6 Provinsi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2015)

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 (No. 64131 1210 0 0015875 2023) (2023)
- Certified Internal Audit Executive (Nomor: SERT CIAE-070/K/04/2022) (2022)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Profil
Pejabat Eksekutif

No.	Nama	Posisi Jabatan	Awal Bergabung	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir
1	Firman Jatnika	Regional CEO	01/11/1999	Jakarta	26/02/1970	Master Degree
2	Gunawan Arief Hartoyo	Corporate Secretary & Communication Group Head	27/12/1999	Sukoharjo	26/03/1971	Master Degree
3	Ana Nurul Khayati	Distribution Strategy Group Head	13/01/2000	Madiun	26/03/1972	Master Degree
4	Yoana Irawati	Executive Business Officer	13/03/2000	Padang	25/01/1977	Master Degree
5	Alhuda Dj	Operations Development Group Head	15/05/2000	Bukittinggi	16/05/1972	Bachelor Degress
6	Deden Durachman	Regional CEO	02/06/2000	Bandung	17/09/1972	Bachelor Degress
7	Zulaicha	Senior Operational Risk Head Wholesale	02/06/2000	Magetan	01/05/1976	Bachelor Degress
8	Kemas Erwan Husainy	Marketing Communication Group Head	21/02/2001	Palembang	29/10/1975	Master Degree
9	Dien Lukita Purnamasari	Consumer Business 2 (Unsecured) Group Head	21/03/2001	Jayapura	10/05/1974	Master Degree
10	Ari Yusnairy Muslim	Executive Business Officer	01/07/2002	Palembang	15/09/1978	Bachelor Degress
11	Mahendra Nusanto S	Gold & Pawning Business Group Head	15/07/2002	Serang	07/07/1971	Bachelor Degress
12	Fiti Syam	Corporate Business 1 Group Head	03/09/2002	Jakarta	16/09/1976	Master Degree
13	Yuwono	Procurement & Fixed Asset Group Head	04/03/2003	Cianjur	05/07/1980	Bachelor Degress
14	Ricky Rikardo Mulyadi	Regional CEO	23/06/2003	Subang	02/05/1970	Master Degree
15	Khoirul Huda S Riyadi	AML/APU-PPT Group Head	01/09/2003	Jakarta	06/10/1975	Master Degree
16	Wisnu Sunandar	Regional CEO	01/09/2003	Jakarta	01/10/1978	Master Degree
17	Fitria Ekayani	Regional CEO	01/09/2003	Bogor	09/02/1980	Master Degree
18	Vita Andrianty	Retail Deposit Solution Group Head	01/09/2003	Tangerang	18/08/1981	Bachelor Degress
19	Peby Elan Surya Diningrat	Senior Human Capital Business Partner 2 Head	09/02/2004	Jakarta	29/02/1980	Master Degree
20	Yasrul	Senior Operational Risk Head Distribution	04/05/2004	Koto Baru	14/04/1978	Master Degree

PROFIL
PEJABAT EKSEKUTIF

No.	Nama	Posisi Jabatan	Awal Bergabung	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir
21	Ficko Hardowiseto	Regional CEO	16/03/2005	Bandung	03/10/1978	Bachelor Degress
22	Maisur Hilmi	Executive Risk & Recovery Officer	01/12/2005	Bukittinggi	02/05/1978	Bachelor Degress
23	Jajang Abdul Karim	Regional CEO	01/12/2005	Bogor	21/11/1982	Bachelor Degress
24	Wijayanto	Digital Banking & E-Channel Operations Group Head	15/12/2008	Bantul	03/10/1970	Master Degree
25	Rosalina Dewi T	Compliance Group Head	01/12/2008	Jakarta	23/07/1979	Master Degree
26	Affan Mawardi	Regional CEO	01/10/2009	Bogor	20/08/1980	Master Degree
27	Risqi Widayat	SME Business Group Head	01/04/2010	Jakarta	19/08/1981	Bachelor Degress
28	Andrianto Daru Kurniawan	Senior Human Capital Business Partner 1 Head	30/01/1995	Surakarta	31/03/1970	Master Degree
29	Ali Muafa	Executive Business Officer	25/04/1995	Jombang	02/07/1969	Bachelor Degress
30	Adjat Djatnika Basarah	Regional CEO	05/06/1995	Bandung	12/04/1971	Master Degree
31	Bambang Sutrisno	BSI Corporate University Group Head	15/11/1995	Blora	17/05/1970	Master Degree
32	Ida Triana Widowati	Institutional Banking Group Head	22/04/1998	Magelang	10/05/1970	Bachelor Degress
33	Budiyono	Executive Risk & Recovery Officer	15/12/2010	Banyumas	04/04/1983	Bachelor Degress
34	Diar Fitrada	Corporate Risk Group Head	15/12/2010	Sumedang	07/06/1986	Bachelor Degress
35	Budi Aristianto	Senior Business Continuity Management Head	01/07/2011	Bandung	17/12/1971	Diploma 3
36	Taty Sediaty	Executive Risk & Recovery Officer	15/09/2011	Kuningan	12/02/1971	Bachelor Degress
37	Indriati Tri Handayani	Policy & Procedure Group Head	04/08/2014	Jakarta	03/05/1972	Master Degree
38	Arief Budiman	Executive Risk & Recovery Officer	01/05/2015	Jakarta	16/05/1971	Bachelor Degress
39	Okky Fachrizal Achmad	Executive Business Officer	01/06/2015	Surabaya	24/10/1968	Bachelor Degress
40	Priyo Hartono	Corporate Finance & Accounting Group Head	08/06/2015	Kediri	16/11/1977	Bachelor Degress
41	Sylvia Azis	Human Capital Strategy & Policy Group Head	01/08/2015	Bandung	06/12/1978	Bachelor Degress
42	Wachjono	Regional CEO	15/03/2016	Tanjung Pandan	20/05/1969	Bachelor Degress

No.	Nama	Posisi Jabatan	Awal Bergabung	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir
43	Muhammad Syukron Habiby	Islamic Ecosystem Solution Group Head	15/05/2016	Blora	16/04/1978	Master Degree
44	Irfan Lesmana	Legal Group Head	15/07/2016	Jakarta	24/02/1971	Bachelor Degress
45	Astridiana Sjamanti	Alternative Channel & Government Project Group Head	01/09/2017	Jakarta	14/02/1970	Bachelor Degress
46	Ferry Hendrawan	Executive Business Officer	25/09/2017	Bontang	22/05/1978	Bachelor Degress
47	Ir Supriono	Commercial Risk Group Head	12/02/2018	Magetan	27/07/1969	Master Degree
48	Bayu Isnandar	IT Strategic Planning Group Head	15/04/2018	Jakarta	09/07/1985	Master Degree
49	Ivan Hartawan	Commercial Business 2 Group Head	01/07/2018	Jakarta	07/12/1968	Bachelor Degress
50	Cera Wirastuti	Executive Business Officer	01/07/2018	Surabaya	12/11/1969	Master Degree
51	Ali	Executive Risk & Recovery Officer	08/10/2018	Banyuwangi	15/11/1978	Master Degree
52	M. Misbahul Munir	Corporate Transformation Office Group Head	01/12/2018	Semarang	06/05/1971	Master Degree

PROFIL
PEJABAT EKSEKUTIF

No.	Nama	Posisi Jabatan	Awal Bergabung	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir
53	Praka Mulia Agung	Consumer Business 1 (Secured) Group Head	01/03/2019	Surabaya	02/12/1978	Master Degree
54	Movianto	Internal Audit 1 Group Head	25/03/2019	Semarang	19/06/1971	Master Degree
55	Ir Anna Kristanty	International & Financial Institution Group Head	11/11/2019	Jakarta	14/10/1974	Master Degree
56	I Gusti Ngurah Bramantya Ardana	Executive Risk & Recovery Officer	01/02/2020	Surabaya	13/04/1977	Bachelor Degress
57	Agus Subekti	Internal Audit 2 Group Head	02/07/2020	Banyumas	19/11/1971	Master Degree
58	Banjaran Surya Indrastomo	Chief Economist	01/03/2021	Bogor	19/07/1990	Doctor
59	Arief Satiana	Card Business Group Head	01/03/2022	Jakarta	22/07/1972	Master Degree
60	Fajar Ari Setiawan	Transaction Banking Group Head	01/03/2022	Tulungagung	18/05/1977	Bachelor Degress
61	Dede Sutisna	Retail Collection, Restructuring & Recovery Group Head	01/03/2022	Majalengka	28/10/1975	Bachelor Degress
62	Desfan Akbar	SME & Micro Risk Group Head	01/03/2022	Langsa	18/12/1981	Master Degree
63	Teszy Mira Eka Kusuma	Human Capital Services Group Head	01/03/2022	Jakarta	07/08/1979	Master Degree
64	Indra G Kampono	Corporate Finance & Solution Group Head	01/03/2022	Jakarta	10/10/1970	Master Degree
65	Joni Haryanto	Micro Business Group Head	07/04/2022	Jakarta	04/06/1970	Bachelor Degress
66	Rizky Budinanda	Investor Relation Group Head	20/04/2022	Cirebon	29/12/1977	Master Degree
67	Kamal Azhar	Chief Information Security Officer	28/04/2022	Bogor	23/11/1983	Master Degree
68	Asri Natanegeri	Wealth Management Group Head	17/06/2022	Surabaya	02/03/1984	Bachelor Degress
69	Gatot Prasetyo	IT Operations Group Head	01/08/2022	Purbalingga	23/03/1975	Bachelor Degress
70	Husni Thamrin	Corporate Business 3 Group Head	01/11/2022	Kuningan	28/10/1966	Master Degree
71	Kemal Aditya	Treasury & Global Market Group Head	02/01/2023	Banjarmasin	04/08/1978	Master Degree
72	Silmi Akbar Ghania Permana	Commercial Business 1 Group Head	01/05/2023	Bandung	27/06/1980	Bachelor Degress
73	Riko Wardhana	Digital Strategy & Product Group Head	01/07/2018	Jakarta	30/10/1973	Master Degree
74	Arief Sunandar	IT Application Support Group Head	15/10/2019	Jakarta	08/04/1973	Bachelor Degress

No.	Nama	Posisi Jabatan	Awal Bergabung	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir
75	Yan Rasdiansyah	Financing Operations Group Head	07/01/2019	Palembang	13/01/1976	Master Degree
76	Moch Fanny Fansyuri	Operational, Portfolio & Market Risk Group Head	01/06/1991	Bandung	14/04/1967	Bachelor Degress
77	Jiwo Sukarno	Corporate Action Group Head	01/07/2023	Semarang	31/08/1981	Master Degree
78	Arif Jatmoko	IT Audit Group Head	01/08/2023	Belitung	30/06/1974	Master Degree
79	Arjuka	Senior Operational Risk Head IT	01/08/2023	Pangkal Pinang	04/05/1980	Bachelor Degress
80	Bayu Hasdianto	IT & Product Delivery Risk Group Head	01/08/2023	Medan	08/08/1985	Master Degree
81	Diaz Hartadi	Strategic Planning & Performance Management Group Head	01/10/2023	Banyumas	26/09/1979	Bachelor Degress
82	Sandy Prasetya Hadi	IT & Digital Development Group Head	11/09/2023	Jakarta	17/03/1981	Bachelor Degress
83	Asnah Faekhah	Consumer Risk Group Head	01/03/2023	Lampung Tengah	26/02/1969	Master Degree
84	Dwi Hesti Mulyaningrum	Customer Care Group Head	01/07/2023	Boyolali	15/05/1974	Bachelor Degress
85	Andy Puguh Nugroho	Data & Decision Management Group Head	19/09/2023	Cilacap	13/02/1981	Master Degree
86	Dickman Maulana	Digital Activation Group Head	05/10/2023	Surabaya	09/02/1974	Bachelor Degress
87	Buyung Ichman Lukman	Corporate Business 2 Group Head	06/04/2017	Yogyakarta	21/07/1967	Master Degree

Demografi Karyawan

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Status Pegawai	2023		2022	
	Total	%	Total	%
Pegawai Tetap	17.245	69,33	17.636	66,24
Pegawai Kontrak	664	2,67	945	3,55
Alih Daya	6.966	28,00	8.045	30,21
Grand Total	**24.875**	**100,00**	**26.626**	**100,00**

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN*)

Pendidikan Pegawai	2023		2022	
	Total	%	Total	%
SMU	36	0,20	57	0,31
Diploma	1.720	9,60	1.898	10,21
S1	15.200	84,87	15.715	84,58
S2	943	5,27	900	4,84
S3	10	0,06	11	0,06
Grand Total	**17.909**	**100,00**	**18.581**	**100,00**

*) Tidak termasuk alih daya

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIA*)

Usia Pegawai	2023		2022	
	Total	%	Total	%
18-25 Tahun	430	2,40	808	4,35
26-35 Tahun	8.890	49,64	9.988	53,75
36-45 Tahun	7.126	39,79	6.441	34,66
Di atas 45 Tahun	1.463	8,17	1.344	7,23
Grand Total	**17.909**	**100,00**	**18.581**	**100,00**

*) Tidak termasuk alih daya

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN*)

Level Jabatan	Posisi Jabatan	2023		2022	
		Total	%	Total	%
N2	Group Head, Regional Head, Project Manager	96	0,54	88	0,47
N3	Dean, Area Manager, Dept Head, Manager	455	2,54	429	2,31
N4	Manager, Team Leader & Branch Manager, Sec, Head	2.240	12,51	2.218	11,94
N5	Relationship Officer, Branch Manager (Cash Outlet Manager), Officer, ODP	5.827	32,54	6.088	32,76
N6	Staf/Pelaksana/Pegawai Dasar	9.291	51,88	9.758	52,52
Grand Total		**17.909**	**100,00**	**18.581**	**100,00**

*) Tidak termasuk alih daya

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN GENDER*)

Gender Pegawai	2023		2022	
	Total	%	Total	%
Pria	10.542	58,86	11.008	59,24
Wanita	7.367	41,14	7.573	40,76
Grand Total	**17.909**	**100,00**	**18.581**	**100.00**

*) Tidak termasuk alih daya

Komposisi Pemegang Saham

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	
MODAL DASAR	**80.000.000.000**	**40.000.000.000.000**	
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,38
Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,91
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR	**46.129.260.138**	**23.064.630.069.000**	**100**
SAHAM DALAM PORTEPEL	**33.870.739.862**	**16.935.369.931.000**	

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,38
Total	**41.553.600.509**	**90,09**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN STATUS KEPEMILIKAN

Kepemilikan Saham Berdasarkan Klasifikasi

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase kepemilikan (%)
Nasional			
Negara Republik Indonesia	1	1	0,00000
Perseroan terbatas	118	30.910.674.403	67,00882
Dana Pensiun	69	451.440.898	0,97864
Yayasan	18	228.851.792	0,49610
Reksa dana	178	511.308.218	1,10842
Asuransi	138	519.968.700	1,12719
Koperasi	6	93.400	0,00020
Perorangan Indonesia	136.392	1.366.502.439	2,96233
Bank	3	10.725.230.507	23,25038
Sub Total	**136.923**	**44.714.070.357**	**96,924502**

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase kepemilikan (%)
Asing			
Badan Usaha Asing	129	1.413.389.949	3,06397
Perorangan Asing	98	1.799.831	0,00390
Sub Total	**227**	**1.415.189.780**	**3,06787**
TOTAL	**137.150**	**46.129.260.137**	**100,00%**

20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

No.	Nama Investor	Jumlah Saham	Persentase
1	SISM Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,465%
2	PT BNI (Persero) Tbk-Divisi PPA	10.720.230.418	23,240%
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Subsidiary Management Division	7.092.761.655	15,376%
4	DPLK Bank Rakyat Indonesia - Saham Syariah	332.502.200	0,721%
5	PT Prudential Life Assurance - RVDF	289.794.661	0,628%
6	Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	222.212.342	0,482%
7	Citibank New York S/A Government Of Norway - 15	177.799.995	0,385%
8	JPMCB NA Re-Emerging Markets Growth Fund Inc	164.597.500	0,357%
9	JPMCB Na Re-Emerging Markets Equity Fund	150.182.500	0,326%
10	State Street Bank-Smallcap World Fund Inc	109.635.200	0,238%
11	Bbh Luxembourg S/A Fidelity FD SICAV-FID FDS ASEAN FD	85.800.200	0,186%
12	JPMCB NA RE-JPMorgan ASEAN FunD	63.815.600	0,138%
13	Reksa Dana Ashmore Saham Sejahtera Nusantara	57.937.221	0,126%
14	JPMSE LUX RE UCITS CLT RE-JPMorgan Funds	56.909.100	0,123%
15	JPMSE LUX RE UCITS CLT RE-Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	55.274.100	0,120%
16	BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK Frontiers Inv Trust Plc-2039846679	54.925.300	0,119%
17	Dana Pensiun BRI - Swakelola	50.664.700	0,110%
18	BNYM RE BNYMLB RE Employees ProvidentFD BOARD-2039927326	48.553.900	0,105%
19	Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	48.040.500	0,104%
20	PT Prudential Sharia Life Assurance - SEF III	46.932.903	0,102%

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Secara Langsung

Per 1 Januari 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Direksi				
1	Hery Gunardi	Direktur Utama	0	0
2	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	0	0
3	Ngatari	Direktur Retail Banking	16.823.500	0,036
4	Achmad Syafii	Direktur Information Technology	0	0

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
5	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	0	0
6	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	0	0
7	Tribuana Tunggadewi	Direktur Sales & Distribution	0	0
8	Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	0	0
9	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	0	0
10	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	9.500	0
Dewan Komisaris				
1	Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	0	0
2	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0
3	M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	0	0
4	Suyanto	Komisaris	0	0
5	Masduki Baidlowi	Komisaris	0	0
6	Imam Budi Sarjito	Komisaris	0	0
7	Sutanto	Komisaris	1.687.400	0,003
8	Mohamad Nasir*)	Komisaris Independen	0	0
9	Nizar Ali*)	Komisaris	0	0

*) Penetapan pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*

Per 31 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Direksi				
1	Hery Gunardi	Direktur Utama	2.210.600	0,005
2	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	548.400	0,001
3	Ngatari	Direktur Retail Banking	18.621.200	0,04
4	Saladin D. Effendi	Direktur Information Technology	0	0
5	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	1.726.600	0,004
6	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	1.726.600	0,004
7	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	1.726.600	0,004
8	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	0	0
9	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	517.900	0,001
10	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	527.400	0,001

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Dewan Komisaris				
1	Muliaman Hadad*)	Komisaris Utama/Komisaris Independen	0	0
2	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	0	0
3	Suyanto	Komisaris	822.700	0,002
4	Masduki Baidlowi	Komisaris	822.700	0,002
5	Imam Budi Sarjito	Komisaris	822.700	0,002
6	Sutanto	Komisaris	1.010.100	0,002
7	M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	0	0
8	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0
9	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	0	0
10	Abu Rokhmad*)	Komisaris	0	0

*) Efektif menjabat per 21 September 2023

Secara Tidak Langsung

1 Januari 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Direksi				
1	Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil
2	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil
3	Ngatari	Direktur Retail Banking	Nihil	Nihil
4	Saladin D. Effendi	Direktur Teknologi Informasi	Nihil	Nihil
5	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Keuangan & Strategi	Nihil	Nihil
6	Anton Sukarna	Direktur Penjualan & Distribusi	Nihil	Nihil
7	Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan & SDM	Nihil	Nihil
8	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Manajemen Risiko	Nihil	Nihil
9	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Nihil	Nihil
10	Moh Adib	Direktur Treasury & International Banking	Nihil	Nihil
Dewan Komisaris				
1	Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Nihil	Nihil
2	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
3	M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
4	Suyanto	Komisaris	Nihil	Nihil
5	Masduki Baidlowi	Komisaris	Nihil	Nihil
6	Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	Nihil
7	Sutanto	Komisaris	Nihil	Nihil
8	Mohamad Nasir*)	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
9	Nizar Ali*)	Komisaris	Nihil	Nihil

*) Penetapan pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

31 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Direksi				
1	Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil
2	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil
3	Ngatari	Direktur Retail Banking	Nihil	Nihil
4	Saladin D. Effendi	Direktur Information Technology	Nihil	Nihil
5	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Nihil	Nihil
6	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Nihil	Nihil
7	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Nihil	Nihil
8	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Nihil	Nihil
9	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Nihil	Nihil
10	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Nihil	Nihil
Dewan Komisaris				
1	Muliaman D. Hadad	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Nihil	Nihil
2	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Nihil	Nihil
3	Suyanto	Komisaris	Nihil	Nihil
4	Masduki Baidlowi	Komisaris	Nihil	Nihil
5	Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	Nihil
6	Sutanto	Komisaris	Nihil	Nihil
7	Abu Rokhmad	Komisaris	Nihil	Nihil
8	M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
9	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
10	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Nihil	Nihil

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Hassanudin	Ketua	0	0
Mohamad Hidayat	Anggota	0	0
Oni Sahroni	Anggota	0	0
Didin Hafidhuddin	Anggota	0	0

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

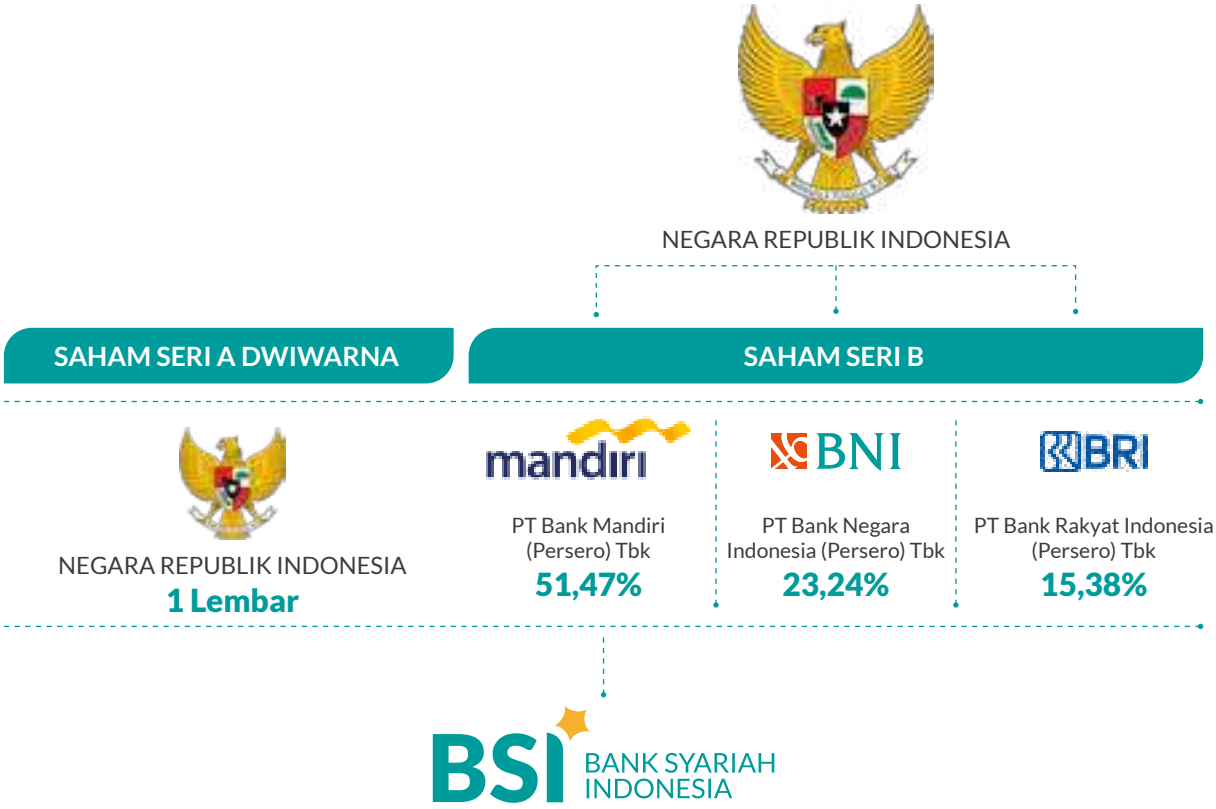

Perseroan memiliki 2 (dua) klasifikasi saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna sejumlah 1 (satu) lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (dhi. diwakili oleh Kementerian BUMN) dan Saham Seri B yang merupakan saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Berdasarkan komposisi saham di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan pemegang saham Seri B terbanyak, sehingga menjadikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Utama (PSU) dan keuangan BSI terkonsolidasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Struktur Korporasi

Bank Syariah Indonesia tidak memiliki perusahaan anak sehingga informasi mengenai struktur korporasi tidak dapat disajikan.

Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi

Bank Syariah Indonesia tidak memiliki entitas anak dan perusahaan asosiasi sehingga rincian mengenai hal tersebut tidak dapat disajikan.

Kronologi Pencatatan Saham

Tahun	Aksi Korporasi	Jumlah Saham Baru	Jumlah Saham Beredar	Nilai Nominal	Tanggal Efektif	Bursa Efek
2018	Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.958.000.000	3.958.000.000	500	1 Januari 2018	
2018	Berdasarkan RUPS tanggal 2 Maret 2018, telah dilakukan penambahan modal berupa: • Setoran tambahan modal sebesar Rp1 triliun. • Kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp567.381.449. Tambahan modal menyebabkan adanya penambahan saham induk sebesar Rp1.567.381.449	3.134.762.898	7.092.762.898	500	2 Maret 2018	
2018	Penawaran Umum Perdana Saham	2.623.350.600	9.716.113.498	500	9 Mei 2018	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
2020	Exercise saham MESOP	184.395.200	9.900.508.698	534	2 November - 8 Desember 2020	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
2021	Merger BRIS, BSM, dan BNIS	31.130.700.245	41.031.208.943	500	1 Februari 2021	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
2021	Exercise saham MESOP	97.659.800	41.128.868.743	500	10 Mei - 18 Juni 2021	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
2021	Exercise saham MESOP	438.600	41.129.307.343	500	1 November - 9 Desember 2021	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
2022	*Right Issue*	4.999.952.795	46.129.260.138	500	19 - 23 Desember 2022	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Tahun Penerbitan	Nama Sukuk	Nilai Sukuk	Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat dan Lembaga Pemeringkat		Bursa
					2023	2022	
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi 1 Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h. PT Bank BRIsyariah Tbk)	Rp1 Triliun	9,5%	16 November 2023	A+ (idn) (PT Fitch Ratings indonesia)	A+ (PT Fitch Ratings Indonesia	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h. PT Bank Syariah Mandiri)	Rp375 Miliar	10%	22 Desember 2023	idAA (sy) (PEFINDO)	AA (PEFINDO)	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
2023	Sukuk Mudharabah Muqayadah Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI tbk Tahun 2023 Tahap I	Rp3,7 Miliar	0,55%	26 Desember 2035	-	-	-
2023	Sukuk Mudharabah Subordinasi Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2023	Rp200 Miliar	7,90%	15 Desember 2028	idAA (sy) (PEFINDO)	-	-

Kantor Akuntan Publik

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TANUDIREJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN

Gedung WTC 3,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
No Telp: (021) 50992901/31192901
Faks: (021) 52905555/52905050
Website: www.pwc.com

Periode Penugasan	: Tahun 2023
Jasa yang diberikan	: Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023
Biaya	: Rp5.600.000.000
Jasa Non Audit yang Diberikan	: Tidak ada
Biaya	: Tidak ada

Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal

INSTITUSI PASAR MODAL

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Indonesia

Telp. : (021) 5150515
Faks. : (021) 5254153
Website : www.idx.co.id
Jasa yang Diberikan : Jasa Pencatatan Tahunan

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lt.5
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia
No. Telp. : (021)5152855
Faks : (021)52991199
Website : www.ksei.co.id
Jasa yang Diberikan : Pengelolaan Administrasi Efek (Saham dan Sukuk)

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120
Telp. : (021)3508077
Faks. : (021)3508078
Website : www.datindo.com
Jasa yang Diberikan : Jasa Administrasi Saham

NOTARIS

Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
Jl. Suryo No 54,
Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Telp. : (021)-29236060
Faks. : (021)-29236070

LEMBAGA PEMERINGKAT PERUSAHAAN

PT Fitch Ratings Indonesia
Prudential Tower Lantai 20,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910
Telp. : (021) 57957755
Faks. : (021) 57957750
Website: www.fitchratings.co.id

Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Panin Tower - Senayan City, Lantai 17,
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270
Indonesia
Telp. : (021) 72782380
Faks. : (021) 72782370
Website: www.pefindo.com
Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan

WALI AMANAT

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Gedung Grha BNI,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220
Telp. : (021) 2511946
Faks. : (021) 2511214

KONSULTAN HUKUM

Dewan Syam & Partners Law Firm
Gedung Permata Kuningan Lantai 6,
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp. : (021) 39838679
Jasa yang Diberikan:
Pada tahun 2023, Bank tidak memiliki perjanjian atau kontrak bersifat tetap yang mengacu pada periode penugasan tertentu/ berkala (*retainer*) dalam rangka penggunaan/pemakaian jasa Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar modal.

SSF Law Firm & Partners
Gedung Arva Lantai 3,
Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 3905930

Suhendra & Partners
Up. Yandi Suhendra
Taman Dutamas,
Jl. Kusuma 1 Blok B1/18 Kelurahan Wijaya Kusuma,
Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat 11460
Telp. : 081901133888

James Purba & Partners
Up. James Purba
Wisma Nugraha Santosa, Lantai 8, Suite 807,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav, 7-8 Jakarta 10220
Telp. : (021) 570 3844

Assegaf Hamzah & Partners
Capital Place Level 36 & 37,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18,
Jakarta Selatan - 12710
Telp. : (021) 25557800

Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP Law Firm)
Pacific Century Place Level 35, Sudirman
Central Bussiness District Lot 10,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53,
Jakarta Selatan - 12190
Telp. : (021) 29608888

Website Perusahaan

Informasi yang termuat dalam *website* PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, di antaranya ialah mengenai:

1. Informasi Umum Mengenai Emiten atau Perusahaan Publik
2. Informasi bagi pemodal atau investor
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penyediaan informasi tersebut juga sebagai implementasi prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs www.bankbsi.co.id.

Informasi	Link
INFORMASI UMUM	www.bankbsi.co.id
Nama, alamat dan kontak kantor pusat/ perwakilan	www.bankbsi.co.id
Riwayat singkat perusahaan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami
Struktur organisasi	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami
Struktur kepemilikan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/struktur-kepemilikan
Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, dan ventura bersama	PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak memiliki perusahaan anak
Struktur Grup	PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak memiliki perusahaan anak
Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Sekretaris Perusahaan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/direksi-dewan?corporateType=Dewan%20Direksi
Nama dan alamat: Akuntan publik, pemeringkat efek, wali amanat, biro administrasi efek, dokumen Anggaran Dasar	https://www.bankbsi.co.id/company-information/profil-penunjang

Informasi	Link
INFORMASI BAGI INVESTOR	https://ir.bankbsi.co.id/
Prospektus penawaran umum	https://ir.bankbsi.co.id/misc/Prospektus/Prospektus-Hijrah.pdf
Laporan Tahunan (5 tahun)	https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html
Laporan Keuangan	https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	https://ir.bankbsi.co.id/general_meeting.html
Ikhtisar Saham	https://ir.bankbsi.co.id/stock_chart_interactive.html
Informasi Obligasi	https://ir.bankbsi.co.id/bond_info.html
Informasi Dividen	https://ir.bankbsi.co.id/dividend.html
Informasi Aksi Korporasi	https://ir.bankbsi.co.id/corporate_action.html
Informasi Fakta Material	https://ir.bankbsi.co.id/regulatory_filings.html
INFORMASI TATA KELOLA PERUSAHAAN	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola
Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/nominasi&remunerasi https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/audit
Pengangkatan/Pemberhentian atau kekosongan Sekretaris Perusahaan serta informasi pendukungnya	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/sekretaris_perusahaan
Piagam Unit Audit Internal	https://ir.bankbsi.co.id/misc/Piagam-Audit-Intern.pdf
Isi Kode Etik	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kode_etik
Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/audit
Uraian Prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi;	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/nominasi&remunerasi
Kebijakan Manajemen Risiko	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kebijakan_management_resiko
Kebijakan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/whistle_blowing_system
Kebijakan Anti Korupsi	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kebijakan_anti_fraud
INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Lingkungan Hidup	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Tanggung Jawab Produk dan/atau Layanan serta Informasi Pendukungnya	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr

04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Ekonomi dan Industri

Peningkatan kinerja BSI pada tahun 2023, terutama dari sisi laba yang tumbuh 33,88%, ditopang oleh pencapaian yang signifikan dari seluruh segmen usaha.

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Pemulihan perekonomian global 2023 terus berlangsung meski tidak secepat prakiraan awal sejalan dengan tingkat suku bunga yang *higher for longer* serta ketidakpastian yang meningkat akibat ketegangan geopolitik. Pemulihan ekonomi global terus berjalan sejak awal tahun 2023 sejalan dengan dilonggarkannya mobilitas seiring berakhirnya pandemi COVID-19. Perekonomian Amerika Serikat (AS) terus mengalami perbaikan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa domestik sehingga turut mendorong pemulihan ekonomi global. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak sebesar prakiraan awal didorong berlanjutnya krisis di sektor propertinya, meski dalam tren yang membaik.

Supply chain disruption terus berkurang meski sanksi terhadap Rusia dilanjutkan. Perbaikan *supply chain* mendorong normalisasi harga komoditas meski tertahan oleh peningkatan ketidakpastian global akibat konflik Rusia-Ukraina yang terus berlanjut dan eskalasi konflik Israel-Hamas di akhir Q3 2023. Selain itu, penurunan harga minyak juga tertahan akibat pemangkasan produksi minyak oleh OPEC pada Maret 2023 yang diprakirakan terus akan berlanjut dengan pemangkasan sukarela hingga 2024.

Selain itu, El Nino yang terjadi sejak pertengahan tahun 2023 turut memengaruhi hasil panen yang berdampak pada terjadinya peningkatan harga pangan global. Peningkatan harga pangan global juga diperparah oleh larangan ekspor beras hingga akhir 2023 oleh India, sebagai negara penghasil beras terbesar.

Kondisi tersebut berdampak pada potensi melambatnya penurunan inflasi global yang juga diiringi oleh kondisi pasar tenaga kerja di AS dan Eropa yang masih relatif ketat. Dengan kondisi tersebut, bank sentral global merespon dengan menaikkan suku bunga acuannya sehingga suku bunga acuan global bertahan di level yang tinggi. Kenaikan suku bunga acuan, terutama di negara maju, diantaranya AS dan Eropa, diharapkan dapat menurunkan tingkat inflasi ke target bank sentral meski di sisi lain berdampak pada tertahannya pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, inflasi di negara berkembang termasuk Indonesia turun lebih cepat, sehingga kenaikan suku bunga acuan pada 2023 tidak seagresif negara maju. Hal tersebut berdampak pada menyempitnya *interest rate spread*. Selain itu, kondisi tingkat suku bunga acuan di negara maju diprakirakan akan bertahan lama, yang diikuti pula oleh kenaikan *yield* obligasi pemerintah negara maju, khususnya AS (*US Treasury*). Kondisi tersebut mendorong pembalikan arus modal dari *emerging markets* ke negara maju, sehingga mendorong penguatan *Dollar Index*.

Di sisi lain, stabilitas sistem keuangan global, terutama AS, juga sempat menjadi perhatian publik selama 2023. Kolapsnya *Sillicon Valley Bank* (SVB) dan isu plafon utang AS berdampak pada turunnya *rating* surat utang AS meski risiko gagal bayar utang AS berhasil dihindari. Selain itu, deklarasi kebangkrutan *Evergrande*, perusahaan properti di Tiongkok, juga turut menjadi perhatian bagi stabilitas keuangan global. Namun demikian, Pemerintah negara terkait merespon kondisi tersebut dengan baik sehingga tidak berdampak krisis.

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Perekonomian domestik tetep tumbuh kuat, serta berdaya tahan *(resilient)* terhadap penurunan perekonomian global. Tertahannya pemulihan ekonomi global berdampak pada menurunnya kinerja sektor eksternal di tengah permintaan domestik yang masih solid seiring terus membaiknya mobilitas pasca pandemi COVID-19. Pemerintah mengubah status pandemi menjadi endemi yang berlaku mulai awal tahun 2023 sehingga mendorong pemulihan perekonomian domestik lebih lanjut. Pertumbuhan ekonomi turut didorong oleh keyakinan konsumen yang terjaga tinggi sepanjang tahun dan sektor jasa juga tumbuh, seiring dengan mobilitas yang meningkat dan berbagai *event* internasional yang diselenggarakan, seperti ASEAN *Summit dan Piala Dunia* U-17. Sehingga secara keseluruhan tahun 2023, ekonomi domestik tumbuh 5,05% YoY.

Pertumbuhan ekonomi domestik juga turut ditopang oleh terjaganya daya beli dan stabilitas harga, yang tercermin dari tingkat inflasi yang terus turun dan sudah berada dalam rentang kisaran target 3±1% pada Mei 2023. Inflasi yang rendah juga dipicu oleh berakhirnya *base effect* dari kenaikan BBM nonsubsidi tahun 2022, di tengah risiko kenaikan harga akibat El Nino dan *imported inflation*.

Dengan perkembangan inflasi tersebut, suku bunga acuan Bank Indonesia BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) hanya naik sebesar 50 bps sepanjang 2023, menjadi 6,00%. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga inflasi terkendali di rentang kisaran target. Hal tersebut selaras dengan upaya meminimalisir dampak *imported inflation* dan menjaga stabilitas eksternal akibat pelemahan nilai tukar Rupiah.

Secara keseluruhan 2023, nonresiden masih mencatatkan *inflow* di pasar SBN di tengah *outflow* di pasar saham. Namun demikian, baik di pasar saham maupun SBN, kecenderungan *outflow* mulai konsisten terjadi sejak Agustus 2023 meski di akhir tahun terdapat *inflow* di pasar saham sejalan dengan naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pembalikan aliran modal tersebut mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah, yang diperparah dengan adanya peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

Likuiditas perekonomian domestik secara makro dinilai masih memadai. Secara rata-rata, uang beredar masih tumbuh positif. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) juga terjaga tinggi. Likuiditas yang memadai juga turut didukung oleh net ekspansi Pemerintah melalui APBN mulai akhir Q3 2023 hingga akhir tahun, di tengah penyerapan likuiditas melalui lelang surat berharga yang memberikan efek kontraksi pada likuiditas.

Dengan perkembangan tersebut, berbagai kebijakan ditempuh oleh otoritas terkait untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah terus dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi. Selain itu, sejumlah kebijakan seperti penerbitan Peraturan Pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), dan penerbitan instrumen baru seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) juga turut diluncurkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Selain itu, reformasi struktural seperti program hilirisasi juga terus digalakkan oleh pemerintah untuk memperkuat fundamental perekonomian domestik dan mendorong perekonomian domestik tetap berdaya tahan. Pertumbuhan ekonomi juga terus didorong dengan berbagai kebijakan, antara lain melalui penguatan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan, dan pelonggaran rasio *Loan/Financing to Value* yang berpotensi turut mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan. Selain itu, pada September 2023 juga dimulai bursa karbon di Indonesia, mendorong kebijakan Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan.

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL DAN SYARIAH

Kinerja industri perbankan sepanjang tahun 2023 menunjukkan resiliensi, ditandai dengan bejalannya fungsi intermediasi yang tetap baik dan risiko kredit yang terkendali di masa pasca pandemi COVID-19. Total Aset perbankan menyentuh Rp11.984 triliun pada Desember 2023, atau tumbuh 5,91% YoY. Sementara itu, total Dana Pihak Ketiga (DPK) naik Rp317 triliun, atau tumbuh 3,82% YoY sejalan dengan preferensi masyarakat yang menyimpan asetnya pada produk perbankan akibat ketidakpastian kondisi pandemi di Indonesia. Penyaluran kredit tetap tumbuh, tercermin dari kenaikan penyaluran kredit nasional sebesar Rp681 triliun atau tumbuh 10,37% YoY. Kembali meningkatnya penyaluran kredit tersebut didukung pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas yang disertai pemberian insentif oleh pemerintah dan regulator lain seperti Bank Indonesia dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, tingkat kesehatan perbankan tetap terjaga sejalan dengan efisiensi dalam mendukung keberlanjutan bisnis di masa pandemi. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada di level 27,6% pada Desember 2023, atau di atas ketentuan minimum BASEL III yaitu 10%. Di sisi lain, rasio likuiditas (AL/DPK) tetap stabil, yakni sebesar 28,7%. Sementara itu, rasio efisiensi perbankan tetap baik tercermin dari rasio Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO) sebesar 79,94% (<80%), namun lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan posisi akhir tahun 2022 yang mencapai 78,64%. Rasio kualitas pembiayaan tetap terjaga didukung dengan insentif restrukturisasi pembiayaan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada masa pandemi Covid-19. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) tercatat sebesar 2,2% (*gross*) atau 0,7% (*net*).

Kinerja industri perbankan yang positif sepanjang tahun 2023, tidak lepas dari dukungan perkembangan industri perbankan syariah nasional. Merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRISyariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada Februari 2021 menjadi salah satu pendorong kinerja industri perbankan Syariah. Konsolidasi ketiga bank syariah anak usaha BUMN tersebut menghasilkan bank syariah yang masuk ke jajaran 10 besar bank nasional. Merger tersebut juga mengubah *landscape* industri perbankan syariah, di mana BSI menguasai 39,6% pangsa pasar perbankan syariah nasional dengan aset sebesar Rp353,62 triliun sampai dengan Desember 2023.

Total Aset perbankan syariah mencapai Rp892,2 triliun pada Desember 2023, atau tumbuh 11,21% YoY. Penghimpunan dana juga mencatat kinerja positif. DPK perbankan syariah naik Rp65 triliun ke level Rp684,5 triliun pada Desember 2023, atau tumbuh 10,49% YoY sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah didukung peningkatan infrastruktur dan layanan akses digitalisasi. Pangsa pasar DPK perbankan syariah terhadap DPK perbankan nasional tercatat menyentuh level 7,9%. Sementara dari sisi pembiayaan, penyaluran pembiayaan naik Rp77 triliun dan menyentuh level Rp568,4 triliun pada Desember 2023, atau tumbuh 15,72% YoY. Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional tercatat sebesar 8,1%.

Tingkat kesehatan perbankan syariah terjaga dengan baik di masa pandemi COVID-19. Rasio CAR tercatat sebesar 25,41% pada Desember 2023. Rasio (BO/PO) tercatat sebesar 78,97% pada Desember 2023, sedikit lebih rendah dibandingkan rasio BOPO industri perbankan nasional. Sementara itu, kualitas pembiayaan perbankan syariah juga menunjukkan kinerja yang positif. Tingkat rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* membaik dari 2,41% di akhir 2022 menjadi 2,17% di Desember 2023 atau lebih baik dibandingkan industri perbankan nasional.

Selain itu, dukungan pemerintah melalui himbauan Kementerian BUMN serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* juga berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis perbankan Syariah di tahun 2023.

ANALISIS POSISI BANK SYARIAH INDONESIA DALAM INDUSTRI PERBANKAN

Berikut rincian perbandingan pertumbuhan kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terhadap industri perbankan syariah dan perbankan nasional per Desember 2023:

(dalam %)

Indikator	Bank Syariah Indonesia	Perbankan Syariah	Perbankan Nasional
Aset	15,67	11,21	5,91
Pembiayaan	15,70	15,72	10,37
Dana Pihak Ketiga	12,35	10,49	3,82
Ekuitas	15,62	8,66	9,17
Laba Bersih	33,88	7,94	19,63

Sumber: SPI dan SPS - Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Desember 2023

Pertumbuhan aset BSI mencapai 15,67%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 11,21%. Di sisi lain, pertumbuhan pembiayaan BSI mencapai 15,70%, di atas pertumbuhan perbankan syariah dan nasional masing-masing sebesar 15,72% dan 10,37%.

Demikian halnya dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Kinerja BSI mencapai 12,35%, di atas pertumbuhan perbankan syariah sebesar 10,49% dan pertumbuhan perbankan nasional sebesar 3,82%. Pertumbuhan laba bersih BSI mencapai 33,88%, lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah sebesar 7,94%, dan perbankan nasional sebesar 19,63%.

Pertumbuhan Kinerja Perbankan Nasional, Perbankan Syariah, dan Bank Syariah Indonesia

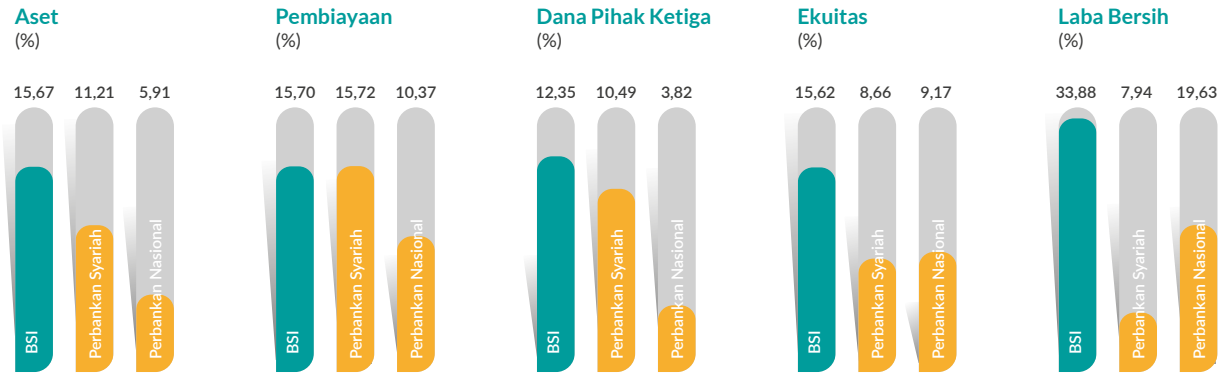

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Kinerja laba setelah zakat dan pajak sektor konsumer yang mencapai Rp2,59 triliun, merupakan yang terbesar di antara lini bisnis lainnya.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk membagi segmen operasi ke dalam beberapa segmen, yaitu Wholesale Banking, Hubungan Kelembagaan, Ritel, dan Treasury Banking & Kantor Pusat. Penjelasan kinerja masing-masing segmen tersebut dijelaskan secara rinci di bawah ini.

WHOLESALE BANKING

Segmen usaha *wholesale* BSI melayani badan usaha seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya, lembaga negara, *multinational company*, serta bank dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk modal *ventura non linkage*). Termasuk dalam segmen ini adalah pembiayaan sindikasi, perusahaan terbuka, pemerintah daerah, rumah sakit, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta surat berharga.

Produk dan jasa atau layanan yang disediakan di segmen ini diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Produk	Layanan
Pembiayaan Investasi	Pembiayaan untuk tujuan investasi tempat usaha, modal usaha atau sarana produksi lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
Pembiayaan Modal Kerja	Pembiayaan untuk keperluan modal kerja usaha dengan skema sesuai prinsip syariah.
Pembiayaan *Supply Chain*	Pembiayaan yang diberikan kepada Mitra Usaha (*supplier/buyer*/kontraktor) dari nasabah-nasabah utama BSI.
Pembiayaan Trade	Pembiayaan yang diberikan untuk keperluan Ekspor/Impor baik melalui penerbitan LC dan jaminan (Garansi Bank/SBLC).
Kustodi	Layanan penitipan efek, transaksi dan pengadministrasian berbagai efek syariah di pasar modal.
Wali Amanat	Wali Amanat adalah Layanan untuk mewakili kepentingan pemegang sukuk dalam suatu penerbitan sukuk di pasar modal syariah.

STRATEGI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Bank Syariah Indonesia telah menerapkan sejumlah strategi untuk menopang kinerja *wholesale banking*. Di antaranya adalah:

1. Memperkuat kolaborasi Wholesale-Retail sebagai *entry gate* untuk menggarap potensi bisnis dari perusahaan atau instansi yang menjadi nasabah *wholesale*, seperti potensi *payroll business*, pembiayaan pegawai, *pawning*, dan produk pendanaan.
2. Meningkatkan *customer base* dan *deepening relationship* dengan nasabah melalui pengembangan kapabilitas *transactional banking* dan perluasan *value chain*.
3. Melakukan penyederhanaan dan percepatan proses pembiayaan secara keseluruhan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
4. Meningkatkan kolaborasi dengan segenap unit bisnis untuk memasarkan produk BSI dan penerapan *Customer Profitability Analysis* (CPA).
5. Meningkatkan peran sindikasi baik sebagai *arranger*, *agent* ataupun *participant* (fungsi keagenan pada Lembaga Keuangan Syariah).

KINERJA TAHUN 2023

Portofolio

Pada tahun 2023 penyaluran pembiayaan dari segmen *wholesale* mencapai Rp 67,51 triliun, meningkat 18,06% atau Rp10,33 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp57,18 triliun. Kualitas pembiayaan wholesale mengalami perbaikan yang ditandai dengan penurunan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dari 3,68% di tahun 2022 menjadi 2,84% di tahun 2023.

Dana Pihak Ketiga (DPK) segmen *wholesale* juga mengalami peningkatan sebesar Rp14,60 triliun yaitu dari Rp14,74 triliun di tahun 2022 menjadi Rp29,34 triliun di tahun 2023.

Profitabilitas

Dari sisi profitabilitas, laba setelah zakat dan pajak yang dibukukan oleh segmen *wholesale* mencapai Rp956 miliar, naik Rp455,66 miliar dibandingkan posisi tahun 2022 sebesar Rp500,34 miliar. Peningkatan perolehan laba terutama dari perbaikan kualitas pembiayaan yang berdampak pada penghematan beban CKPN sebesar Rp438,27 miliar dan juga peningkatan pendapatan usaha lainnya sebesar Rp201,69 miliar.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Kinerja Segmen *Wholesale Banking*

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total Pembiayaan	67.511.016	57.184.185	10.326.831	18,06
NPF (%)	2,84	3,68	-	(0,84)
Total DPK	29.344.706	14.740.954	14.603.752	99,07
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*)	1.548.491	1.519.665	28.826	1,90
Pendapatan Usaha Lainnya	462.241	260.548	201.693	77,41
Beban Usaha	(288.578)	(202.283)	(86.295)	42,66
Beban CKPN	(469.760)	(908.036)	438.274	(48,27)
Laba setelah Zakat dan Pajak	956.000	500.338	455.662	91,07

*) Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Segmen usaha Hubungan Kelembagaan saat ini difokuskan untuk pengelolaan dana nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah Kementerian Negara/Lembaga, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Rumah Sakit dan Swasta Bonafide.

Produk dan layanan yang disediakan oleh segmen usaha Hubungan Kelembagaan hingga akhir tahun buku 2023, dijabarkan melalui tabel berikut.

Produk	Uraian
Giro, Deposito dan Tabungan Institusi	Produk dana pihak ketiga yang dapat membantu nasabah dalam melakukan transaksi *financial* perusahaan.
Giro Pemerintah	Giro untuk memenuhi kebutuhan kementerian negara/Lembaga negara/Satuan Kerja.
Cash Management System (CMS)	Layanan *Cash Management System* yang terdiri atas *Account Payable Management*, *Account Receivable Management*, *Account Liquidity Management* dan *Account Administration and Information*, dimana Nasabah pengguna dapat melakukan sendiri akses secara langsung atas rekening Nasabah dan melakukan transaksi perbankan sesuai fitur BSI *Cash Management* yang tersedia melalui jaringan internet.
BSI e-Health	Aplikasi kesehatan milik vendor SIMRS yang mengkombinasikan solusi sistem rumah sakit dengan transaksi *cashless* di Rumah Sakit/ Klinik dalam satu *platform*.
BSI Pembayaran Institusi (BPI)	Sistem pembayaran BSI untuk nasabah institusi dalam menerima pembayaran dari konsumen/ pelanggan/pasien melalui channel Bank.

STRATEGI TAHUN 2023

1. Strategi penghimpunan dana tahun 2023 masih mengutamakan pertumbuhan DPK organik dengan komposisi yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*) melalui pertumbuhan dana murah (CASA).
2. Fokus utama pada 2023 yaitu menurunkan *Cost of Fund* melalui ekspansi pada dana murah yakni giro dan tabungan dan mengurangi dana mahal dengan tetap menjaga likuiditas Bank agar tetap sehat sesuai ketentuan regulator.
3. Meningkatkan dana nasabah institusi eksisting, mengurangi risiko konsentrasi nasabah dan mengurangi porsi dari dana mahal atau Deposito yang dilakukan secara bertahap, baik pada nasabah Institusi regular maupun nasabah baru sehingga akan menurunkan beban bagi hasil.
4. Melakukan sinergi bisnis dengan induk melalui pemanfaatan *customer base*, *join-marketing*, pengembangan dan peningkatan *value chain* dengan BUMN.
5. Menambah sumber-sumber dana baru berperan sebagai pintu masuk produk BSI kepada perusahaan Kementerian Negara/Lembaga, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Rumah Sakit dan Swasta Bonafide dengan sektor terpilih.

KINERJA TAHUN 2023

Portofolio

Pada tahun 2023 total dana yang berhasil dihimpun oleh segmen hubungan kelembagaan mencapai Rp79,77 triliun. Perolehan tersebut mengalami peningkatan 3,10% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp77,37 triliun.

Profitabilitas

Pada tahun 2023 laba setelah zakat dan pajak yang dibukukan oleh segmen hubungan kelembagaan sebesar Rp187,21 miliar. Perolehan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi tahun 2022 yang sebesar Rp331,96 miliar. Penurunan terutama dari meningkatnya *cost of fund* di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Kinerja Segmen Hubungan Kelembagaan

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total DPK	79.770.650	77.370.904	2.399.746	3,10
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*)	329.935	498.031	(168.096)	(33,75)
Beban Usaha	(84.689)	(67.091)	(17.598)	26,23
Laba setelah Zakat dan Pajak	187.206	331.959	(144.753)	(43,61)

*) Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

SEGMEN RITEL

Kegiatan usaha pada segmen ritel mencakup layanan bisnis untuk: *Small Medium Enterprise* (SME), Mikro dan Konsumer. Segmen operasi ini merupakan yang dominan dari sisi penyaluran pembiayaan.

STRATEGI TAHUN 2023

Secara umum, strategi pada segmen operasi ritel yang diterapkan oleh BSI mencakup:

1. Peningkatan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Optimalisasi pembiayaan Linkage ke Sektor Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT, KSPPS, dan Koperasi Syariah.
3. Mengembangkan kerangka ekosistem bisnis retail dengan model bisnis kemitraan dengan perusahaan mitra yang berfungsi sebagai avalis dan *off taker*.
4. Membina dan mengedukasi nasabah UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha serta mengelola bisnis yang berkesinambungan sehingga nasabah UMKM bisa naik kelas.
5. Membuka kerja sama dengan instansi pemerintah dan LAZNAS berfungsi untuk *incubator* nasabah-nasabah retail/UMKM baru.
6. Penyaluran pembiayaan secara digital melalui *e-commerce* dan *platform digital*.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

A. *SMALL MEDIUM ENTERPRISE* (SME)

Segmen SME melayani pembiayaan untuk tujuan produktif kepada perorangan, perseroan perorangan, badan usaha swasta baik yang berbentuk badan hukum mapupun non badan hukum, perguruan tinggi dan pendidikan dasar menengah, rumah sakit dan klinik, koperasi, serta pembiayaan pola *linkage* melalui inti plasma, BPRS, LKM/LKMS dan Lembaga Keuangan lainnya. Hingga berakhirnya tahun buku 2023, produk dan layanan yang diberikan oleh segmen usaha ini diuraikan dalam tabel berikut.

Produk	Uraian
Produk Umum	
Investasi	Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk pemenuhan kebutuhan investasi nasabah atau calon nasabah, baik investasi tempat usaha, kendaraan usaha atau alat-alat kebutuhan usaha. Termasuk investasi untuk pembangunan tempat usaha dan pembangunan kebun.
Modal Kerja	Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja nasabah atau calon nasabah, baik modal kerja usaha, modal kerja berbentuk pembiayaan rekening koran atau modal kerja berdasarkan kontrak. Termasuk modal kerja kepada lembaga keuangan seperti koperasi dan LKM/LKMS.
Refinancing	Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank berdasarkan prinsip syariah berupa pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. Nasabah menjual bagian miliknya (*hishah* milik nasabah) atas aset obyek MMQ kepada Bank, sehingga obyek MMQ menjadi harta bersama Bank dan nasabah.
Produk Khusus	
BSI Mitra Edu	Fasilitas Pembiayaan yang diberikan untuk pembangunan atau renovasi gedung sekolah/kampus, *refinancing asset* gedung sekolah/kampus, pembelian lahan, serta pembelian *fixed asset* lain diantaranya pembelian peralatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar atau pembelian kendaraan operasional.
BSI Mitra Alkes	Fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan investasi alat kesehatan baru bagi nasabah atau calon nasabah dari kalangan pelaku usaha sektor jasa kesehatan.
BSI Beragun Tunai	Fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah atau calon nasabah terhadap pembiayaan dengan agunan bersifat tunai.
BSI Beragun Emas	Fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan produktif maupun konsumtif nasabah atau calon nasabah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank dalam jangka waktu tertentu.
BSI Investasi Terikat	Fasilitas pembiayaan dengan penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh Bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*.
BSI Mitra SPBU	Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pengusaha SPBU baik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja (pembelian BBM) maupun kebutuhan investasi (Pembelian SPBU baru, Pembangunan SPBU baru, maupun untuk Renovasi dan penggantian Peralatan SPBU).
BSI Mitra Developer	Fasilitas pembiayaan modal kerja pembangunan konstruksi perumahan bagi pengembang untuk memenuhi kebutuhan rumah *ready stock* dan belum memiliki fasilitas rumah *indent*.
BSI Mitra Plasma Sawit	Fasilitas Pembiayaan dengan Pola Kemitraan kepada Koperasi yang bermitra dengan perusahaan inti (*Single Management*) dengan tujuan untuk *project financing* pembangunan kebun (baik kebun baru maupun kebun *replanting*/peremajaan) atau pembiayaan pengalihan utang Koperasi dari Perusahaan Inti dan/atau Bank lain.
BSI Mitra Kopkar	Penyaluran pembiayaan kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) atau Koperasi Pegawai dengan tujuan pembiayaan koperasi kepada para anggota (PKPA) yang penyalurannya melalui Koperasi dari suatu instansi atau perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya secara kolektif.

Produk	Uraian
BSI Mitra *Linkage*	Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada BPRS dan LKM/LKMS yang bertindak sebagai agen/ wali untuk disalurkan kembali kepada anggota BPRS dan LKM/LKMS dengan pola *channeling* maupun *executing*.
BSI Mitra SBSN	Fasilitas pembiayaan Modal Kerja yang diberikan kepada Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pengerjaan proyek yang infrastruktur yang didanai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
BSI Talangan Pelunasan BPIH Khusus	Fasilitas pembiayaan untuk pengalihan pembayaran pelunasan biaya Haji Khusus dari Travel Haji Khusus dengan komposisi minimal jamaah 70% jamaah wajib setoran awal di BSI.

Strategi Tahun 2023

1. Akuisisi Kebun Bisnis Baru (Ekosistem Sawit, Ekosistem Vendor BSI, Ekosistem *Corporate*, Ekosistem Travel, Ekosistem Klinik & Rumah Sakit, dan Hiswana Migas).
2. Akuisisi *New Group* Sawit
3. *Product* Program berbasis *Champion* Kewilayahan.
4. Optimalisasi Engine SME.
5. *Business Gathering* (Pengusaha Klinik, Alkes, Sekolah, Vendor, Kontraktor, Travel, Hiswana Migas, dll).

Kinerja Tahun 2023

PORTOFOLIO

Total pembiayaan untuk sektor SME pada tahun 2023 sebesar Rp19,34 triliun meningkat 2,33% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp18,90 triliun. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) mengalami perbaikan, dari 4,57 % di tahun 2022 menjadi 4,08% di tahun 2023. Dana Pihak Ketiga SME juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp5,39 triliun di tahun 2022 menjadi Rp5,84 triliun di tahun 2023 atau meningkat sebesar 8,44%.

PROFITABILITAS

Laba setelah zakat dan pajak untuk sektor SME pada tahun 2023 mencapai Rp421,60 miliar. Dibandingkan posisi tahun 2022, perolehan laba mengalami peningkatan sebesar Rp343,97 miliar. Peningkatan terutama dari penghematan beban CKPN dan perolehan *recovery* atas pembiayaan yang sudah di hapus buku.

Kinerja Sektor SME

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total Pembiayaan	19.345.720	18.904.947	440.773	2,33
NPF (%)	4,08	4,57	-	(0,49)
Total DPK	5.844.913	5.389.831	455.082	8,44
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*)	893.407	905.068	(11.661)	(1,29)
Pendapatan Usaha Lainnya	486.262	58.555	427.707	730,43
Beban Usaha	(406.136)	(336.414)	(69.722)	20,73
Beban CKPN	(421.220)	(526.431)	105.211	(19,99)
Laba setelah Zakat dan Pajak	421.601	77.631	343.970	443,08

*) Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

B. MIKRO

Layanan pada sektor mikro BSI hadir untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk di dalamnya penyaluran pembiayaan bersubsidi guna mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat. Kemudian, produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah.

Per 31 Desember 2023, produk-produk dan layanan yang ditawarkan oleh segmen usaha Mikro dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Produk	Uraian
BSI Usaha Mikro	Pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada nasabah individu atau badan usaha atau kelompok yang memiliki usaha produktif dengan atau tanpa agunan dengan margin komersial (tanpa subsidi).
KUR	Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Program Subsidi Margin dari Pemerintah).
KUR Super mikro	Penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah sampai dengan Rp10 juta.
KUR Mikro	Penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah di atas Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.
KUR Kecil	Penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah di atas Rp100 juta dan paling banyak Rp500 juta.
KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Penyaluran KUR yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia.

Strategi Tahun 2023

1. **Peningkatan Bisnis & Revitalisasi Produk**
   a. Optimalisasi penyaluran program Pemerintah
   b. Revitalisasi produk BSI Usaha Mikro
   c. *Kick off* Produk KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI)
   d. Memperluas *acquisition channel* dengan optimalisasi website SalamDigital
   e. Peningkatan jumlah nasabah dan Dana Pihak Ketiga (DPK)
2. **Sistem & Bisnis Proses**
   a. Penyempurnaan digitalisasi administrasi pembiayaan mikro
   b. Pengembangan otomasi klaim penjaminan dan *Host to Host* restrukturisasi
   c. Penyempurnaan *Host to Host* Klaim Penjaminan
   d. Pengembangan *monitoring pipeline* pada i-Kurma (*originating system*) sampai dengan tingkat Regional
3. **Perbaikan Kualitas Pembiayaan**
   a. Penegasan pengelolaan rekening nasabah lancar dan non-lancar
   b. Pengawalan disiplin klaim penjaminan yang berkelanjutan
   c. Implementasi *Micro Financing Control Officer* (MFCO) yang bertugas melakukan *Post Booking Review*
   d. Pembentukan *Squad* penagihan pembiayaan kolektabilitas 2 di tingkat Area
4. **Peningkatan Kualitas SDM**
   Peningkatan dan pemerataan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan, terkait produk, analisa, dan komoditas khusus.

Kinerja Tahun 2023

PORTOFOLIO

Pembiayaan sektor mikro mengalami kenaikan 22,26% atau sebesar Rp4,17 triliun, yaitu dari Rp18,74 triliun di tahun 2022 menjadi Rp 22,91 triliun di tahun 2023. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) mengalami perbaikan, dari 2,84% di tahun 2022 menjadi 2,13% di tahun 2023.

PROFITABILITAS

Dari sisi profitabilitas, laba setelah zakat dan pajak yang dibukukan oleh sektor mikro pada tahun 2023 sebesar Rp 58,75 miliar. Peningkatan beban CKPN di tahun 2023 berdampak pada perolehan laba tahun 2023 yang lebih rendah dibandingkan dengan posisi tahun 2022 sebesar Rp112,06 miliar. Peningkatan beban CKPN disebabkan oleh kenaikan tarif CKPN mikro dan peningkatan jumlah pembiayaan yang dihapusbuku.

Kinerja Sektor Mikro

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total Pembiayaan	22.912.195	18.740.411	4.171.784	22,26
NPF (%)	2,13	2,84	-	(0,71)
Total DPK	3.033.938	1.506.242	1.527.696	101,42
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*)	1.277.435	1.091.279	186.156	17,06
Pendapatan Usaha Lainnya	94.227	7.247	86.981	1200,26
Beban Usaha	(684.856)	(572.157)	(112.700)	19,70
Beban CKPN	(609.842)	(380.900)	(228.941)	60,11
Laba setelah Zakat dan Pajak	58.750	112.057	(53.307)	(47,57)

*) Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

C. KONSUMER

Sektor usaha konsumer fokus pada tujuan konsumtif/multiguna antara lain melayani produk griya, multiguna, kendaraan, pensiunan, kartu pembiayaan, cicil emas dan gadai emas, pembiayaan program pemerintah.

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, produk dan layanan yang diberikan oleh segmen usaha konsumer seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Produk	Uraian
BSI Griya	Fasilitas pembiayaan untuk tujuan pembelian rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor, maupun pembangunan rumah dengan kondisi rumah baru, rumah *second*, atau kavling siap bangun.
BSI Oto	Fasilitas pembiayaan untuk tujuan pemilikan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.
BSI KPR Sejahtera	Fasilitas pembiayaan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan dukungan FLPP dan disalurkan kepada MBR dalam rangka pemilikan rumah sejahtera susun.
BSI Mitraguna Berkah	Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada ASN dan pegawai tetap perusahaan/Lembaga negara/Yayasan/ badan usaha lainnya baik dilakukan dalam pengajuan massal maupun perorangan.
BSI Pensiun/Pra Pensiun Berkah	Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan melalui BSI sebagai kantor bayar, atau pun pegawai ASN yang akan memasuki masa pensiun.

Strategi Tahun 2023

1. Fokus target nasabah pada pegawai PNS/ASN, BUMN terpilih, RS terpilih, Swasta terpilih, pensiun Taspen, dan pensiun Asabri melalui penguatan data *analytic* serta *pipeline management* dalam meningkatkan *penetration rate*.
2. Memperluas *channel* pemasaran konsumer melalui *platform digital*, *developer*, maupun mitra pihak ketiga.
3. Mempercepat proses bisnis dan meningkatkan *customer solution* untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
4. Memperkuat kolaborasi dengan *wholesale* untuk menggarap pegawai dari perusahaan atau instansi.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Kinerja Tahun 2023

PORTOFOLIO

Total pembiayaan di sektor konsumer pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp17,67 triliun. Pada tahun 2022 total pembiayaan konsumer sebesar Rp112,88 triliun dan di tahun 2023 total pembiayaan mencapai Rp130,55 triliun. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di tahun 2023 relatif terjaga di angka 1,37%.

PROFITABILITAS

Pada tahun 2023 laba setelah zakat dan pajak sektor konsumer mencapai Rp2,59 triliun, meningkat Rp 476,18 miliar dibandingkan posisi tahun 2022 yang sebesar Rp2,11 triliun. Peningkatan laba terutama dari meningkatnya pendapatan pengolaan dana bersih dan penerimaan recovery atas pembiayaan yang telah di hapus buku.

Kinerja Sektor Konsumer

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total Pembiayaan	130.547.113	112.875.313	17.671.799	15,66
NPF (%)	1,37	1,35	-	0,02
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*)	5.993.761	5.437.836	555.925	10,22
Pendapatan Usaha Lainnya	813.435	325.219	488.216	150,12
Beban Usaha	(2.291.600)	(1.815.069)	(476.531)	26,25
Beban CKPN	(1.124.379)	(1.205.641)	81.262	(6,74)
Laba setelah Zakat dan Pajak	2.588.644	2.112.467	476.177	22,54

*) Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

D. DANA RITEL

Fokus layanan untuk sektor dana ritel dibagi menjadi 2 (dua): *payroll* dan *non payroll*. *Payroll* melayani pembayaran gaji karyawan Kementerian atau ASN, BUMN, rumah sakit, dan swasta yang ditargetkan. Sedangkan *non payroll* melayani jenis nasabah seperti himpunan pengusaha, komunitas, klinik dan koperasi.

Produk dan layanan yang disediakan pada sektor dana ritel mencakup deposit & *payroll solution*, yang hingga akhir tahun buku 2023 diuraikan sebagai berikut:

Produk	Uraian
BSI Tabungan *Easy Wadiah*	Tabungan Rupiah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, menggunakan skema titipan tanpa bagi hasil.
BSI Tabungan *Easy Mudharabah*	Tabungan berakad *Mudharabah Muthlaqah* yaitu "Nasabah sebagai pemilik dana memberikan keleluasaan kepada Bank sebagai pengelola Dana untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha sesuai syariah dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil".
BSI Tabungan Bisnis	Tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat memberikan kemudahan transaksi nasabah segmen wiraswasta.
BSI Tabungan *Payroll*	BSI Tabungan *Payroll* merupakan tabungan yang dikhususkan untuk Nasabah *Payroll* dengan 4 (empat) variasi biaya pengelolaan rekening yang berbeda berdasarkan PKS BSI dengan institusi.
BSI Tabungan Valas	Tabungan dalam mata uang dolar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.

Produk	Uraian
BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan dalam bentuk Rupiah atau USD untuk perencanaan ibadah haji dan umrah.
BSI Tabungan Haji Muda Indonesia	Tabungan dalam bentuk rupiah atau dolar AS untuk perencanaan ibadah haji dan umrah bagi anak (kurang dari 17 tahun).
BSI Giro Rupiah & Valas	Sarana penyimpanan dana untuk kemudahan transaksi berakad *Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah*.
BSI Deposito	Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

Strategi Tahun 2023

1. Melakukan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga dalam penyaluran *payroll* pegawai;
2. Melakukan kerja sama dengan BUMN dan *group* dalam penyaluran *payroll* pegawai;
3. Melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit dan Dokter dalam penyaluran *payroll* pegawai;
4. Memberikan produk khusus bagi pengusaha yakni BSI Tabungan Bisnis dengan keunggulan gratis biaya transaksi BI Fast 50 kali per bulan melalui BSI Mobile;
5. Menggarap segmen pebisnis di sektor kuliner dan klinik dengan memberikan layanan QRIS;
6. Bekerja sama dengan himpunan pengusaha dan asosiasi dalam rangka menggarap bisnis berbasis ekosistem.

Kinerja Tahun 2023

PORTOFOLIO

Pada tahun 2023 total Dana Pihak Ketika (DPK) yang berhasil dihimpun oleh sektor dana ritel mencapai Rp176,69 triliun. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan 8,03% atau sebesar Rp13,13 triliun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp163,56 triliun.

PROFITABILITAS

Dari sisi profitabilitas, laba tahun berjalan sektor dana ritel tercatat sebesar Rp1,80 triliun. Pendapatan pengelolaan dana bersih mengalami peningkatan sebesar Rp676,92 miliar dari Rp3,51 triliun di tahun 2022 menjadi Rp4,18 triliun di tahun 2023. Beban usaha juga mengalami peningkatan sebesar Rp229,94 miliar dari Rp1,88 triliun di tahun 2022 menjadi Rp2,11 triliun di tahun 2023.

Kinerja Sektor Dana Ritel

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total DPK	176.695.052	163.560.686	13.134.366	8,03
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*)	4.184.692	3.507.775	676.917	19,30
Pendapatan Usaha Lainnya	285.960	295.702	(9.742)	(3,29)
Beban Usaha	(2.113.176)	(1.883.238)	(229.938)	12,21
Laba setelah Zakat dan Pajak	1.799.550	1.479.187	320.364	21,66

*) Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

SEGMEN *TREASURY BANKING* & KANTOR PUSAT

Segmen *Treasury Banking* & Kantor Pusat melayani produk-produk di luar pembiayaan, produk simpanan dan non simpanan. Segmen *Treasury* terkait dengan kegiatan *treasury* Bank termasuk transaksi valuta asing, *money market*, *fixed income*, dan pasar modal.

Sementara Segmen Kantor Pusat terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa *service* secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya.

Sepanjang tahun 2023, Bank memiliki produk dan layanan dalam segmen usaha Lainnya yang mencakup:

Produk	Uraian
Transaksi Valuta Asing	1. Devisa Umum (DU)/Telegraphic Transfer (TT) Akad yang digunakan *Al Sharf* Bank Syariah Indonesia melayani transaksi pembelian/penjualan valuta asing sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan tenor waktu tertentu. Transaksi *Today* untuk penyerahan pada hari yang sama, transaksi *Tomorrow*/Tom untuk penyerahan setelah satu hari kerja dan transaksi Spot untuk penyerahan setelah dua hari kerja. 2. BSI Lindung Nilai Syariah Sederhana & Kompleks Akad yang digunakan *aqd' al-Tahaww al-basith*, *Aqd al - Tahawwuth al-Murakkab* Bank Syariah Indonesia melayani transaksi penjualan/pembelian valuta asing yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. 3. Uang Kertas Asing Akad yang digunakan *Al Sharf* Bank Syariah Indonesia melayani transaksi uang kertas asing (*bank notes*) baik penarikan dan setoran maupun jual beli terhadap rupiah.
Transaksi Surat Berharga Syariah	Transaksi Surat Berharga Syariah (Sukuk) Melayani kebutuhan investasi berbasis intrumen syariah untuk nasabah institusi dan individu. Instrumen syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Berharga Syariah Korporasi. Jenis SBSN yang bisa diakses oleh Nasabah yaitu Sukuk Ritel (SR), *Project Based* Sukuk (PBS), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan SBSN Denominasi USD (INDOIS). Investasi dapat dilakukan oleh Nasabah melalui Pasar Perdana dan Pasar Sekunder.
Transaksi Pasar Uang Syariah	1. BSI *Deposito on Call* (DOC) Akad yang digunakan *Mudharabah Mutlaqah* DOC merupakan produk simpanan dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu minimal 1 (satu) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kalender, dengan tingkat imbal hasil yang mengacu kepada penempatan harian di Bank Indonesia. 2. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (Sertifikat IMA) 3. Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) 4. REPO Syariah 5. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) 6. Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) 7. Reksa Dana Syariah

Strategi Tahun 2023

Pada tahun 2023, strategi yang diterapkan untuk Segmen *Treasury* & Kantor Pusat, antara lain:

1. Menciptakan produk alternatif yang baru agar Bank dapat menjadi "Market Maker" SiPA, Ritelisasi SUKUK, DOC (Rupiah dan Valas), dan SiKA.
2. Pengembangan alternatif penghimpunan dana Institusi melalui akad *Wakalah Bi Al- Istitsmar*.
3. Pembenahan struktur organisasi.
4. Membangun kompetensi sumber daya manusia berbasis kebutuhan industri.
5. Inisiatif peningkatan imbal hasil (*revamping* RDPUS *underlying*, dan RDPT).
6. Program peningkatan *return* investasi bank dengan produk alternatif (RDT).
7. Ritelisasi transaksi INDOIS untuk nasabah individu.

Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, pendapatan pengelolaan dana bersih segmen *treasury banking* & kantor pusat sebesar Rp1,86 triliun. Pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2,05 triliun. Pendapatan usaha lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp2,06 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2,75 triliun. Dari sisi beban, beban usaha dan beban ckpn tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp638,92 miliar dan Rp730,51 miliar.

Kinerja Segmen Treasury Banking dan Kantor Pusat

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*)	1.861.513	2.046.055	(184.542)	(9,02)
Pendapatan Usaha Lainnya	2.062.340	2.753.840	(691.500)	(25,11)
Beban Usaha	(4.380.169)	(5.019.085)	638.916	(12,73)
Beban CKPN	2.721	(727.789)	730.510	(100,37)
Laba setelah Zakat dan Pajak	(477.351)	(938.445)	461.094	(49,13)

*) Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

Tinjauan Kinerja Keuangan

BSI berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp5,70 triliun, lebih tinggi Rp1,44 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank Syariah Indonesia", "BSI", "Bank") yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

KINERJA ASET

Pada tahun 2023 total aset yang dibukukan oleh BSI mencapai Rp353,62 triliun, meningkat 15,67% atau Rp47,90 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp305,73 triliun. Peningkatan aset tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan pembiayaan-neto sebesar Rp32,12 triliun dan peningkatan investasi pada surat berharga-neto sebesar Rp13,33 triliun.

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Kas	5.255.841	4.951.469	4.119.903
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	32.440.778	31.778.458	20.563.580
Giro dan Penempatan pada Bank Lain-Neto	2.303.728	2.475.917	1.841.551
Investasi pada Surat Berharga-Neto	71.169.020	57.841.271	67.579.070
Tagihan Akseptasi-Neto	426.916	476.589	159.880
Piutang-Neto	132.360.158	120.701.979	98.336.983
Pinjaman Qardh- Neto	10.489.164	8.867.013	9.081.400
Pembiayaan *Mudharabah*-Neto	1.831.652	1.001.957	1.592.314
Pembiayaan *Musyarakah*-Neto	83.756.501	66.450.946	53.903.123
Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah* - Neto	2.190.107	1.484.573	901.565
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto	5.352.843	5.396.010	3.871.257
Aset tidak berwujud - Neto	1.128.334	258.688	184.696
Aset Pajak Tangguhan	1.665.694	1.675.103	1.445.324
Aset Lain-lain-Neto	3.253.388	2.367.465	1.708.435
JUMLAH ASET	**353.624.124**	**305.727.438**	**265.289.081**

Kas

Jumlah kas Bank pada tahun 2023 sebesar Rp5,25 triliun, meningkat 6,15% atau Rp304,37 miliar dibandingkan dengan posisi tahun 2022. Komposisi Kas dalam mata uang rupiah pada tahun 2023 sebesar Rp4,91 triliun, sementara dalam valuta asing sebesar Rp343,41 miliar.

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Pada tahun 2023 giro dan penempatan pada Bank Indonesia tercatat sebesar Rp32,44 triliun. Dibandingkan dengan posisi tahun 2022 terdapat kenaikan 2,08% atau Rp662,32 miliar. Adapun penempatan pada BI di tahun 2023 terdiri dari Giro Wadiah pada BI sebesar Rp17,09 triliun, Fasilitas Simpanan BI syariah (FASBIS) Rp4,50 triliun dan Term Deposit Valas Rp10,85 triliun.

Giro dan Penempatan pada Bank Lain-Neto

Giro dan penempatan pada bank lain bersih pada tahun 2023 sebesar Rp2,3 triliun, menurun Rp172 miliar dari posisi tahun 2022 sebesar Rp2,48 triliun. Penurunan terutama dari penempatan SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank) sebesar Rp690 miliar dan SIPA (Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank) sebesar Rp684 miliar, namun penempatan pada Giro Bank Lain meningkat sebesar Rp1,20 triliun.

Investasi pada Surat Berharga-Neto

Nilai investasi surat berharga-neto yang diperoleh Bank pada tahun 2023 mencapai Rp71,17 triliun, naik 23,04% atau Rp13,33 triliun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp57,84 triliun. Peningkatan tersebut terutama dari investasi pada Sukuk Bank Indonesia (SukBI).

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Tagihan Akseptasi-Neto

Tagihan akseptasi-neto yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp426,92 miliar, yang terdiri dari tagihan akseptasi SKBDN Usance Impor sebesar Rp344,94 miliar dan tagihan akseptasi SKBDN Usance Ekspor sebesar Rp81,97 miliar. Secara *year on year* (yoy), tagihan akseptasi-neto turun 10,42% atau Rp49,67 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp476,59 miliar.

Piutang-Neto

Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 mencatatkan nilai piutang-neto sebesar Rp132,36 triliun, meningkat 9,66% atau Rp11,66 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat senilai Rp120,70 triliun. Sektor ekonomi yang mengalami peningkatan terbesar yaitu sektor konsumer sebesar Rp8,11 triliun dan sektor pertanian sebesar Rp1,72 triliun.

Pinjaman *Qardh*-Neto

Pinjaman *qardh*-neto tercatat mengalami kenaikan 18,29% atau Rp1,62 triliun, dari Rp8,87 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp10,49 triliun di tahun 2023. Sektor konsumer dan industri menjadi sektor ekonomi dengan peningkatan terbesar yaitu masing-masing sebesar Rp1,17 triliun dan Rp402,57 miliar.

Pembiayaan *Mudharabah*-Neto

Pada tahun 2023 Pembiayaan *mudharabah*-neto sebesar Rp1,83 triliun, naik 82,81% atau Rp829,70 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp1 triliun. Peningkatan terutama dari sektor perantara keuangan yang meningkat sebesar Rp783 miliar.

Pembiayaan *Musyarakah*-Neto

Pembiayaan *musyarakah*-neto pada tahun 2023 mencapai Rp83,76 triliun, meningkat 26,04% atau Rp17,31 triliun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp66,45 triliun. Peningkatan didominasi dari sektor ekonomi konsumer dengan peningkatan sebesar Rp8,76 triliun, sektor pengangkutan Rp2,89 triliun, dan sektor konstruksi Rp2,60 triliun.

Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*-Neto

Aset yang diperoleh untuk *ijarah*-neto pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 2,19 triliun, naik 47,52% atau Rp705,53 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp1,48 triliun. Peningkatan terutama dari sektor konstruksi yang tumbuh sebesar Rp915 miliar.

Aset Tetap dan Aset Hak Guna-Neto

Pada tahun 2023, total aset tetap dan aset hak guna-neto Bank tercatat sebesar Rp5,35 triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, aset tetap dan aset hak guna neto mengalami penurunan sebesar 0,80% atau Rp43,17 miliar. Penurunan terutama dari Aset Hak Guna-Neto sebesar Rp77,45 miliar, namun di sisi lain terdapat peningkatan di Aset Tetap-Neto sebesar Rp34,28 miliar.

Aset Tidak Berwujud-Neto

Aset tidak berwujud-neto mengalami peningkatan yaitu dari Rp 258,69 miliar di tahun 2022 menjadi Rp 1,13 triliun di tahun 2023. Standardisasi piranti lunak komputer selama tahun 2023 menjadi faktor utama peningkatan aset tidak berwujud-neto.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan tercatat Rp1,67 triliun di tahun 2023 atau turun sebesar Rp 9,41 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan nilai liabilitas sewa dan kewajiban imbalan kerja menjadi faktor penurunan nilai aset pajak tangguhan.

Aset Lain-lain-Neto

Total aset lain-lain-neto di tahun 2023 tercatat sebesar Rp3,25 triliun, meningkat Rp885,92 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp2,37 triliun. Peningkatan aset lain-lain-neto terutama pada peningkatan biaya dibayar dimuka sebesar Rp453,53 miliar dan tagihan kepada pihak ketiga sebesar Rp192,86 miliar.

LIABILITAS

Total liabilitas yang dicatat oleh Bank Syariah Indonesia pada akhir periode 2023 yaitu sebesar Rp87,22 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu meningkat sebesar Rp13,57 triliun. Faktor utama peningkatan liabilitas Bank di tahun 2023 yaitu adanya Liabilitas kepada Bank Indonesia sebesar Rp11,90 triliun, selain itu simpanan wadiah mengalami peningkatan sebesar Rp1,86 triliun dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama.

Rincian Liabilitas

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Liabilitas Segera	1.316.067	1.009.502	608.554
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	255.932	192.775	158.478
Simpanan Wadiah	67.873.898	66.012.257	57.247.890
Simpanan dari Bank Lain	1.761.301	2.218.697	115.938
Liabilitas kepada Bank Indonesia	11.900.055	-	-
Kewajiban Akseptasi	431.228	481.403	161.495
Utang Pajak	539.042	667.485	504.078
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	667.264	689.018	836.491
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	32.017	28.873	17.194
Liabilitas Lain-lain	2.446.107	2.355.781	2.236.358
JUMLAH LIABILITAS	**87.222.911**	**73.655.791**	**61.886.476**

Liabilitas Segera

Pada tahun 2023 posisi liabilitas segera sebesar Rp1,32 triliun, mengalami peningkatan Rp306,57 miliar dari tahun 2022 yang sebesar Rp1,01 triliun. Komponen liabilitas segera yang mengalami peningkatan antara lain kewajiban transaksi ATM sebesar Rp137,76 miliar, kewajiban *online channel* Rp120,48 miliar dan zakat Bank Rp48,33 miliar.

Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

Jumlah bagi hasil yang belum dibagikan posisi tahun 2023 sebesar Rp255,93 miliar. Dibandingkan dengan posisi tahun 2022, nilai tersebut mengalami peningkatan 32,76% atau sebesar Rp63,16 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan tumbuhnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank dan peningkatan Deposito Mudharabah di tahun 2023.

Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah yang diperoleh Bank pada tahun 2023 mencapai Rp67,87 triliun, meningkat 2,82% atau Rp1,86 triliun dari tahun 2022 yang sebesar Rp66,01 triliun. Peningkatan didorong oleh pertumbuhan Tabungan Wadiah sebesar Rp2,81 triliun, sementara itu untuk Giro Wadiah mengalami penurunan sebesar Rp950,33 miliar.

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan pada Bank lain pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp1,76 triliun, turun 20,62% atau Rp457,40 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp2,22 triliun. Penurunan terutama dari Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) sebesar Rp446,82 miliar.

Kewajiban Akseptasi

Posisi kewajiban akseptasi pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp431,23 miliar, yang terdiri dari kewajiban akseptasi SKBDN Usance Impor sebesar Rp348,43 miliar dan kewajiban akseptasi SKBDN Usance Ekspor sebesar Rp82,80 miliar. Secara *year on year* (yoy), kewajiban akseptasi turun 10,42% atau Rp50,17 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp481,40 miliar.

Utang Pajak

Pada tahun 2023 utang pajak tercatat sebesar Rp 539,04 miliar, turun Rp128,44 miliar dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp667,48 miliar. Penurunan terutama dari Utang Pajak Penghasilan pasal 29 sebesar Rp176,62 miliar. Di sisi lain terdapat peningkatan utang pajak pasal 4 ayat 2 dan pasal 21 masing-masing sebesar Rp23,38 miliar dan Rp12,64 miliar.

Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja

Posisi estimasi liabilitas imbalan kerja pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp21,76 miliar atau 3,16% dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2023 posisi estimasi liabilitas imbalan kerja sebesar Rp667,26 miliar sedangkan pada tahun 2022 posisi estimasi liabilitas imbalan kerja sebesar Rp689,02 miliar.

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tahun 2023 sebesar Rp32,02 miliar, naik 10,89% atau Rp3,15 miliar dari posisi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp28,87 miliar. Penyisihan penghapusan piutang LC meningkat Rp1,84 miliar dan penyisihan penghapusan Garansi yang diberikan juga meningkat sebesar Rp1,31 miliar.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Liabilitas Lain-lain

Jumlah liabilitas lain-lain pada tahun 2023 sebesar Rp2,45 triliun, meningkat 3,83% atau Rp90,33 miliar dibandingkan dengan liabilitas lain-lain pada tahun 2022 yang sebesar Rp2,36 triliun. Peningkatan terutama dari pendapatan diterima di muka sebesar Rp184,05 miliar. Di sisi lain terdapat penurunan pada kewajiban kepada vendor sebesar Rp86,53 miliar.

DANA *SYIRKAH* TEMPORER

Dana *syirkah* temporer Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp227,66 triliun. Perolehan tersebut mengalami peningkatan 14,65% atau Rp29,10 triliun dari pencapaian tahun 2022 yang sebesar Rp198,57 triliun. Peningkatan didorong oleh pertumbuhan dana syirkah temporer bukan Bank sebesar Rp30,42 triliun secara *year on year* (yoy).

Rincian Dana *Syirkah* Temporer

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Giro *Mudharabah*	32.353.865	22.723.088	13.281.319
Tabungan *Mudharabah*	77.700.070	72.269.706	64.538.367
Deposito *Mudharabah*	115.848.096	100.485.930	98.183.782
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer Bukan Bank	225.902.031	195.478.724	176.003.468
Dana *Syirkah* Temporer Bank	780.203	933.938	1.010.203
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi	200.000	1.375.000	1.375.000
Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan	3.608	-	-
Pembiayaan yang Diterima	776.250	778.375	-
JUMLAH DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**227.662.092**	**198.566.037**	**178.388.671**

Giro *Mudharabah*

Posisi giro *mudharabah* pada tahun 2023 mencapai Rp32,35 triliun, meningkat 42,38% atau Rp9,63 triliun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp22,72 triliun. Peningkatan terutama dari giro *mudharabah* dalam mata uang valuta asing.

Tabungan *Mudharabah*

Posisi tabungan *mudharabah* pada tahun 2023 mencapai Rp77,70 triliun, meningkat 7,51% atau Rp5,43 triliun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp72,27 triliun. Peningkatan terutama dari tabungan *mudharabah* dalam mata uang rupiah.

Deposito *Mudharabah*

Posisi deposito *mudharabah* pada tahun 2023 mencapai Rp115,85 triliun, meningkat 15,29% atau Rp15,36 triliun dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp100,49 triliun. Peningkatan terutama dari deposito *mudharabah* dalam mata uang rupiah.

Dana *Syirkah* Temporer Bank

Pada tahun 2023 jumlah dana *syirkah* temporer bank tercatat sebesar Rp780,20 miliar, turun 16,46% atau sebesar Rp153,74 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp933,94 miliar. Penurunan didominasi oleh deposito bank sebesar Rp137,72 miliar.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi

Pada tahun 2023 terdapat sukuk *mudharabah* subordiansi yang jatuh tempo sebesar Rp1,38 triliun. Pada tanggal 15 Desember 2023, Bank BSI kembali menerbitkan sukuk *mudharabah* subordinasi sebesar Rp200 miliar dengan jangka waktu 5 tahun.

EKUITAS

Ekuitas Bank Syariah Indonesia meningkat 15,62% atau Rp5,23 triliun, dari Rp33,51 triliun di tahun 2022 menjadi Rp38,74 triliun di tahun 2023. Peningkatan laba tahun lalu dan tahun berjalan menjadi pendorong utama atas peningkatan ekuitas Bank Syariah Indonesia.

Rincian Ekuitas

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Modal disetor	23.064.630	23.064.630	20.564.654
Tambahan Modal Disetor	(3.929.100)	(3.929.100)	(6.366.776)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	444.530	444.530	444.530
Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja Pasti	241.462	268.904	140.271
Keuntungan/(kerugian) Surat Berharga - bersih	6.154	(55.477)	22.263
Saldo Laba			
· Telah ditentukan penggunaannya	2.236.713	1.384.677	779.036
· Belum ditentukan penggunaannya	16.674.732	12.327.446	9.429.956
JUMLAH EKUITAS	**38.739.121**	**33.505.610**	**25.013.934**

KINERJA LABA-RUGI

Bank Syariah Indonesia berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp5,70 triliun pada tahun 2023. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan 33,88% atau Rp1,44 triliun dibandingkan dengan laba bersih tahun 2022 yang sebesar Rp4,26 triliun.

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*	22.251.743	19.622.865	17.808.432
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer	(5.993.168)	(4.032.169)	(4.378.807)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	**16.258.575**	**15.590.696**	**13.429.625**
Pendapatan Usaha Lainnya	4.204.466	3.701.111	3.012.246
Beban Usaha	(10.249.204)	(9.895.336)	(8.782.773)
Beban CKPN Aset Produktif dan Non Produktif - Neto	(2.622.479)	(3.748.797)	(3.551.249)
Laba Usaha	**7.591.358**	**5.647.674**	**4.107.849**
Pendapatan Non-Usaha - Neto	(2.156)	8.534	(45.641)
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak	7.589.202	5.656.208	4.062.208
Zakat	(189.730)	(141.405)	(101.684)
Beban Pajak	(1.695.729)	(1.254.621)	(932.319)
Laba Bersih	**5.703.743**	**4.260.182**	**3.028.205**
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	34.189	50.893	189.591
Jumlah Laba Komprehensif	**5.737.932**	**4.311.075**	**3.217.796**
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	123,65	102.54	73.66

Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* yang berhasil diperoleh Bank pada tahun 2023 mencapai Rp22,25 triliun, meningkat 13,40% atau Rp2,63 triliun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp19,62 triliun. Pertumbuhan bisnis dan kualitas pembiayaan yang terjaga menjadi pendorong peningkatan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib di tahun 2023.

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Pada tahun 2023 hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer mengalami kenaikan 48,63% atau Rp1,96 triliun dari Rp4,03 triliun di tahun 2022 menjadi Rp5,99 triliun di tahun 2023. Peningkatan didominasi oleh bagi hasil atas deposito dan giro *mudharabah* masing-masing sebesar Rp1,27 triliun dan Rp423,82 miliar hal ini seiring dengan

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

pertumbuhan *outstanding* deposito dan giro *mudharabah* yang meningkat masing-masing sebesar Rp15,36 triliun dan Rp9,63 triliun. Selain itu Bank juga mendapat fasilitas PASBI dan SIMA yang berkontribusi dalam peningkatan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer sebesar Rp292,71 miliar di tahun 2023.

Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya pada tahun 2023 mencapai Rp4,20 triliun, meningkat 13,60% atau Rp503,36 miliar dibandingkan pendapatan usaha lainnya yang diperoleh di tahun 2022 sebesar Rp3,70 triliun. Peningkatan tersebut antara lain dari peningkatan pendapatan atas pelepasan surat berharga sebesar Rp114,19 miliar, pendapatan rahn sebesar Rp88,82 miliar, pendapatan jasa ekspor impor sebesar Rp 62,15 miliar, dan penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan sebesar Rp77,68 miliar.

Beban Usaha

Beban usaha Bank pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp10,25 triliun, meningkat 3.58% atau Rp353,87 miliar dari beban usaha di tahun 2022 yang sebesar Rp9,90 triliun. Beban promosi dan beban penyusutan atas aktiva tetap menjadi komponen yang memiliki peningkatan terbesar yaitu masing-masing sebesar Rp135,88 miliar dan Rp176,57 miliar.

ARUS KAS

Posisi kas dan setara kas pada akhir tahun buku 2023 sebesar Rp40,02 triliun, meningkat 2,04% atau Rp799,67 miliar dibandingkan tahun buku 2022 yang sebesar Rp39,22 triliun. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan dan operasi bernilai positif yaitu masing-masing sebesar Rp10,16 triliun dan Rp2,04 triliun. Sementara itu untuk arus kas aktivitas investasi bernilai negatif sebesar Rp11,40 triliun.

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2.041.035	1.885.530	16.696.794
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(11.404.359)	5.994.708	(16.591.024)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	10.162.997	4.798.909	(77.929)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	799.673	12.679.147	27.841
Kas & Setara Kas Awal Tahun	39.221.419	26.542.272	26.514.431
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	40.021.092	39.221.419	26.542.272

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun buku 2023 tercatat sebesar Rp2,04 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp155,50 miliar dibandingkan perolehan tahun buku 2022 yang sebesar Rp1,89 triliun. Peningkatan terutama dari meningkatnya pendapatan penyaluran dana dan pendapatan usaha lainnya yang diperoleh Bank di tahun 2023.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2023 sebesar minus Rp11,40 triliun. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi pada tahun 2023 didominasi oleh investasi pada penempatan surat berharga. Sementara itu pada tahun 2022 Bank banyak melakukan aktivitas penjualan/pelepasan surat berharga sehingga nilai arus kas pada tahun 2022 bernilai positif.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp10,16 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp5,36 triliun dibandingkan periode tahun buku 2022 yang sebesar Rp4,80 triliun. Perolehan kas terutama dari aktivitas pendanaan baru yaitu PASBI sebesar Rp11,90 triliun. Sementara itu disisi lain terdapat sukuk *mudharabah* subordinasi yang jatuh tempo sebesar Rp1,38 triliun.

ANALISIS KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN

Analisis Kualitas Aset Produktif

Jumlah aset produktif Bank pada tahun 2023 tercatat mencapai Rp316,95 triliun, meningkat 17,03% atau Rp46,12 triliun dari jumlah aset produktif tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp270,83 triliun. Peningkatan tersebut sebagian besar diperoleh dari pertumbuhan penyaluran atas piutang dan pembiayaan yang tumbuh sebesar Rp32,58 triliun. Selain itu surat berharga yang dimiliki juga mengalami peningkatan sebesar Rp12,08 triliun.

Kualitas aset produktif di tahun 2023 semakin membaik dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini tercermin dari rasio NPF *Gross* yang mengalami perbaikan/penurunan, yaitu dari 2,42% di tahun 2022 menjadi 2,08% di tahun 2023.

Analisis Rasio Keuangan

Secara umum rasio keuangan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 mengindikasikan kinerja yang baik. Rincian perbandingan rasio keuangan tahun 2023, 2022, dan 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Perkembangan Rasio Keuangan Utama

%

Uraian	2023	2022	2021
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,04	20,29	22,09
Non Performing Financing (NPF) *gross*	2,08	2,42	2,93
Non Performing Financing (NPF) *net*	0,55	0,57	0,87
Return On Assets (ROA)	2,35	1,98	1,61
Return On Equity (ROE)	16,88	16,84	13,71
Net Imbalan (NI)	5,82	6,31	6,04
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	71,27	75,88	80,46
Cost to Income Ratio (CIR)	49,86	51,01	52,57
Financing to Deposit Ratio (FDR)	81,73	79,37	73,39
Persentase Pelampauan BMPD	0,00	0,00	0,51*)
GWM Rupiah	6,76	8,30	5,05
GWM Valas	1,13	1,18	1,03
Posisi Devisa Neto	2,47	0,57	0,27

*) Pelampauan terjadi pada 31 Desember 2021 karena pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dimana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI") yang merupakan salah satu pemegang saham BSI, ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Induk dari Holding tersebut dan mengakibatkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) yang merupakan Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi Pihak Terkait BSI.

INFORMASI KINERJA KEUANGAN LAINNYA

Distribusi Bagi Hasil

Berikut adalah laporan distribusi bagi hasil BSI dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Laporan Distribusi Bagi Hasil

(Rp Juta)

Jenis Penghimpunan Dana	2023		2022	
	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan
	A	B	A	B
Liabilitas Kepada Bank Lain	389.564	2.930	505.342	3.923
Giro *Mudharabah*	30.295.642	227.875	21.156.445	164.251
Tabungan *Mudharabah*	72.646.672	546.426	67.774.706	526.180

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

(Rp Juta)

Jenis Penghimpunan Dana	2023		2022	
	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan
	A	B	A	B
Deposito *Mudharabah*	104.125.452	783.200	95.227.878	739.316
Surat Berharga yang diterbitkan	200.000	1.504	1.375.000	25.046
Pembiayaan yang Diterima	776.250	5.839	778.375	6.043
Total	**208.433.580**	**1.567.774**	**186.817.746**	**1.464.759**

(Rp Juta)

Jenis Penyaluran Dana	2023		2022	
	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan
	A	B	A	B
Penempatan pada Bank Lain	349.737	-	197.851	37
Surat Berharga yang dimiliki	47.197.896	246.704	58.176.123	232.171
Piutang *Murabahah*	127.477.713	1.049.102	117.533.174	1.021.453
Piutang *Istishna*	32	8	145	136
Piutang *Multijasa*	207.950	1.975	-	-
Pembiayaan Gadai	-	-	-	-
Pembiayaan *Mudharabah*	1.770.933	6.591	1.100.513	8.360
Pembiayaan *Musyarakah*	81.363.476	530.526	69.055.621	425.908
Pembiayaan Sewa	2.260.540	14.527	1.396.011	12.138
Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
Total	**260.628.277**	**1.849.433**	**247.459.438**	**1.700.203**

Sumber dan Penyaluran Zakat

Total penerimaan zakat pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 21,62% atau Rp45,78 miliar. Pada tahun 2023 total penerimaan zakat mencapai Rp257,50 miliar dan pada tahun 2022 sebesar Rp211,72 miliar. Peningkatan perolehan laba Bank berdampak pada peningkatan zakat internal bank sebesar Rp48,33 miliar.

Dana zakat yang berhasil disalurkan Bank juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp170,77 miliar di tahun 2022 menjadi Rp205,88 miliar di tahun 2023.

Perkembangan Sumber dan Penyaluran Zakat

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Sumber Dana Zakat			
Internal bank	189.730	141.405	101.684
Eksternal bank	67.772	70.317	57.218
Total penerimaan zakat	**257.502**	**211.722**	**158.902**
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan ke lembaga lain	(205.881)	(170.771)	(127.611)
Kenaikan dana zakat	51.621	40.951	31.291
Saldo awal dana zakat	**145.153**	**104.202**	**72.911**
Saldo akhir dana zakat	**196.774**	**145.153**	**104.202**

Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Total penerimaan dana kebajikan pada tahun 2023 sebesar Rp83,59 miliar yang bersumber dari infak dan sedekah, denda dan penerimaan non-halal. Penerimaan dana kebajikan pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022, terutama dari penurunan penerimaan infak dan sedekah sebesar Rp9,91 miliar.

Penggunaan dana kebajikan pada tahun 2023 direalisasikan dalam bentuk sumbangan sebesar Rp80,74 miliar. Dengan demikian saldo akhir dana kebajikan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp9,91 miliar.

Perkembangan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Saldo awal dana kebajikan	**7.048**	**25.977**	**12.900**
Sumber dana kebajikan			
Infak dan sedekah	63.947	73.857	50.280
Denda	17.915	12.877	14.329
Penerimaan non halal	1.733	3.168	7.898
Lainnya	-	-	99
Total Penerimaan	**83.595**	**89.902**	**72.606**
Penggunaan dana kebajikan			
Dana kebajikan produktif	-	-	-
Sumbangan	(80.736)	(108.831)	(59.529)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	-
Total Penggunaan	**(80.736)**	**(108.831)**	**(59.529)**
(Penurunan)/kenaikan dana kebajikan	2.859	(18.929)	13.077
Saldo akhir dana kebajikan	**9.907**	**7.048**	**25.977**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek dari sisi internal dapat diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Dari sudut pandang eksternal Pefindo dan Fitch telah menetapkan peringkat bagi Bank Syariah Indonesia untuk penerbitan sukuk *mudharabah* subordinasi.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pembiayaan, likuiditas aset, kewajiban dengan pihak ketiga, dan komitmen pembiayaan kepada debitur. Kecukupan likuiditas Bank dapat dilihat dari Rasio Pembiayaan terhadap Pendanaan (*Financing to Deposit Ratio*/FDR). Pada tahun 2023 FDR Bank sebesar 81,73%, mengalami peningkatan 2,36% jika dibandingkan dengan posisi tahun 2022 yang sebesar 79,37%.

Perkembangan Likuiditas Bank

Rasio	2023	2022	2021
Financing to Deposit Ratio (FDR)	81,73%	79,37%	73,39%

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Bank mengukur solvabilitas melalui rasio kecukupan permodalan (*Capital Adequacy Ratio*/CAR). Bank memastikan kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Pada tahun 2023, Rasio CAR mencapai 21,04%, meningkat 0,75% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 20,29%. Rasio ini menunjukkan solvabilitas Bank baik karena telah melebihi minimal *requirement* rasio CAR dari Regulator sehingga mampu mengantisipasi seluruh risiko baik risiko kredit, risiko pasar maupun risiko operasional.

Perkembangan Solvabilitas Bank

Rasio	2023	2022	2021
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,04%	20,29%	22,09%

Kemampuan Membayar Utang dari Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin dari peringkat dari efek yang diterbitkan Bank Syariah Indonesia, yaitu sukuk *subordinated mudharabah*. Efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan efek.

Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efek nya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut. Sukuk *subordinated mudharabah* yang diterbitkan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, Bank Syariah Indonesia menggunakan Fitch Ratings Indonesia (Fitch) dan Pefindo sebagai lembaga pemeringkat.

Perkembangan Kemampuan Membayar Utang dari Efek-efek yang Diterbitkan

Keterangan	Peringkat		Pemeringkat	
	2023	2022	2023	2022
Sukuk Subordinated Mudharabah BRIS 2016	A+ (idn)	A+	PT Fitch Ratings Indonesia	PT Fitch Ratings Indonesia
Sukuk Subordinated Mudharabah BSM 2016	idAA (sy)	AA	PEFINDO	PEFINDO
Sukuk Mudharabah Subordinasi BSI Tahun 2023	idAA (sy)	-	PEFINDO	-

Rentabilitas Bank

Rentabilitas Bank Syariah Indonesia diukur melalui rasio-rasio berikut:

Perkembangan Rasio Rentabilitas Bank

Rasio	2023	2022	2021
Return on Assets (ROA)	2,35%	1,98%	1,61%
Return on Equity (ROE)	16,88%	16,84%	13,71%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	71,27%	75,88%	80,46%

Pada tahun 2023, rasio rentabilitas Bank Syariah Indonesia secara umum lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Rasio *return on asset* sebesar 2,35%, naik 0,37% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,98%. Rasio *return on equity* mengalami peningkatan 0,04%, dari 16,84% di tahun 2022 menjadi 16,88% di tahun 2023. Rasio BOPO membaik 4,61 %, dari 75,88% di tahun 2022 menjadi 71,27% di tahun 2023.

Perkembangan Tingkat Kolektibilitas

Perhitungan rasio pembiayaan bermasalah Bank pada tahun 2023 dan 2022 mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rasio Non Performing Financing (NPF)

Rasio	2023	2022	2021
NPF-Gross	2,08%	2,42%	2,93%
NPF-Net	0,55%	0,57%	0,87%

Rasio pembiayaan bermasalah Bank secara *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tahun 2023 sebesar 2,08%, mengalami perbaikan 0,34% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 2,42%. Sedangkan rasio pembiayaan bermasalah secara *net* turun 0,02%, dari 0,57% pada tahun 2022 menjadi 0,55% di tahun 2023.

Tingkat kolektibilitas pembiayaan dapat dilihat dari kelancaran pembayaran pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan yang telah disalurkan beserta klasifikasi kolektibilitasnya tercermin melalui tabel berikut ini.

Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan berdasarkan Mata Uang Tahun 2023

(Rp Juta)

Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Piutang Murabahah	131.312.555	2.168.075	845.358	679.468	1.415.388	136.420.844
Piutang Istishna	29	-	-	-	1	30
Piutang Qardh	9.012.625	42.477	5.655	8.962	278.640	9.348.359
Pembiayaan Mudharabah	1.816.788	33.101	-	-	31.244	1.881.133
Pembiayaan Musyarakah	82.013.990	2.673.552	293.642	172.823	887.486	86.041.493
Ijarah	2.361.882	12.282	5.010	5.477	23.855	2.408.507
Valas						
Piutang Murabahah	82.252	-	-	-	-	82.252
Piutang Istishna	-	-	-	-	-	-
Piutang Qardh	1.958.722	-	-	-	-	1.958.722
Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Musyarakah	1.840.910	-	333.794	-	-	2.174.704

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

(Rp Juta)

Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Ijarah	-	-	-	-	-	-
Total Pembiayaan	230.399.752	4.929.487	1.483.459	866.731	2.636.614	240.316.044
CKPN	3.927.279	2.088.204	706.101	438.182	2.528.697	9.688.462
Pembiayaan Bersih	226.472.473	2.841.284	777.359	428.549	107.917	230.627.582

Tingkat Kolektibilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang Tahun 2022

(Rp Juta)

Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Piutang Murabahah	119.929.638	1.998.740	826.383	536.273	1.458.670	124.749.704
Piutang Istishna	129	3	-	-	-	132
Piutang Qardh	7.686.668	61.296	13.450	26.367	269.866	8.057.647
Pembiayaan Mudharabah	1.011.721	10.208	685	1.363	17.420	1.041.397
Pembiayaan Musyarakah	66.067.971	996.149	493.174	128.723	795.146	68.481.163
Ijarah	1.413.813	15.196	7.357	3.769	57.716	1.497.851
Valas						
Piutang Murabahah	-	123.652	-	-	-	123.652
Piutang Istishna	-	-	-	-	-	-
Piutang Qardh	1.643.962	-	-	-	-	1.643.962
Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Musyarakah	1.720.815	-	388.533	-	-	2.109.348
Ijarah	-	-	-	-	-	-
Total Pembiayaan	199.474.717	3.205.244	1.729.582	696.495	2.598.818	207.704.856
CKPN	4.361.431	1.000.834	1.034.974	336.701	2.464.448	9.198.387
Pembiayaan Bersih	195.113.286	2.204.410	694.608	359.794	134.369	198.506.469

Pertumbuhan Kolektibilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

(Rp Juta)

Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Piutang Murabahah	11.382.916	169.335	18.975	143.195	(43.282)	11.671.140
Piutang Istishna	(101)	(3)	-	-	1	(102)
Piutang Qardh	1.325.957	(18.819)	(7.795)	(17.405)	8.774	1.290.712
Pembiayaan Mudharabah	805.068	22.893	(685)	(1.363)	13.824	839.736
Pembiayaan Musyarakah	15.946.020	1.677.403	(199.533)	44.099	92.340	17.560.329
Ijarah	948.069	(2.914)	(2.347)	1.708	(33.861)	910.656
Valas						
Piutang Murabahah	82.252	(123.652)	-	-	-	(41.400)
Piutang Istishna	-	-	-	-	-	-
Piutang Qardh	314.760	-	-	-	-	314.760
Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Musyarakah	120.095	-	(54.739)	-	-	65.357
Ijarah	-	-	-	-	-	-
Total Pembiayaan	30.925.035	1.724.243	(246.122)	170.236	37.796	32.611.188
CKPN	(434.152)	1.087.370	(328.873)	101.481	64.249	490.075
Pembiayaan Bersih	31.359.187	636.873	82.751	68.755	(26.453)	32.121.113

PERMODALAN

Kebijakan dan Alasan Pemilihan Kebijakan

Pengelolaan permodalan yang dilakukan BSI bertujuan untuk melindungi kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan demikian, Bank dapat tetap memberikan imbal hasil yang baik bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Dalam menghitung kecukupan modal, Bank Syariah Indonesia mengacu kepada ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Pada tahun 2023, rasio kecukupan modal dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar mencapai 21,04%, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 20,29%. Rasio tersebut masih di atas rasio kecukupan modal minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank yang sebesar 9,99%.

Struktur Modal

Total modal Bank Syariah Indonesia yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap mengalami peningkatan sebesar 15,12% atau Rp 5,01 triliun dari Rp33,11 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp38,12 triliun di tahun 2023. Peningkatan tersebut seiring dengan perolehan laba bersih di tahun 2023 yang mencapai Rp5,70 triliun.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Perkembangan Struktur Modal

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

	Uraian	2023	2022
I	Komponen Modal		
	A. Modal Inti (*Tier* 1)	36.095.427	31.232.293
	1.1 Modal disetor	22.923.383	22.923.383
	1.2 Cadangan Tambahan Modal:	15.503.653	10.242.699
	1.2.1 Faktor Penambah	22.814.244	17.608.767
	Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yg diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6.154	-
	Saldo surplus revaluasi aset tetap	444.530	444.530
	Agio saham biasa	3.381.491	3.381.491
	Cadangan Umum	2.236.713	1.384.677
	Laba ditahan awal tahun setelah pajak	10.970.989	8.067.264
	Laba tahun berjalan setelah pajak (100%)	5.703.743	4.260.182
	Opsi saham yg diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	70.623	70.623
	1.2.2 Faktor Pengurang -/-	7.310.591	7.366.068
	Pendapatan Komprehensif lainnya: potensi kerugian	-	55.477
	Cadangan Tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)	7.310.591	7.310.591
	1.3 Faktor Pengurang Modal Inti Utama -/-	2.331.609	1.933.789
	B. Modal Pelengkap (*Tier* 2)	2.019.801	1.877.656
	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan	200.000	252.083
	Agio/Disagio	-	-
	Cadangan umum PPA atas aset produktif yg wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	1.819.801	1.625.573
	Cadangan tujuan	-	-
II	Jumlah Modal Inti, Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan	38.115.228	33.109.949
III	Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	145.078.091	129.730.824
IV	Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional	1.640.536	306.184
V	Aset Tertimbang Menurut Risiko Pasar	34.400.820	33.120.795
VI	Jumlah Risiko - Aset Tertimbang	181.119.447	163.157.803
VII	Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit	26,27%	25,52%
VIII	Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit dan Operasional	25,98%	20,33%
IX	Rasio Kecukupan Modal Minimum	21,04%	20,29%

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sampai dengan akhir tahun 2023, BSI tidak memiliki ikatan yang material terkait investasi barang modal.

INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2023, realisasi investasi barang modal Bank mencapai Rp1,65 triliun. Realisasi tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp2,04 triliun. Ditahun 2023 pengadaan investasi barang modal tanah dan bangunan mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar Rp723,76 miliar dan Rp323,45 miliar. Sementara itu untuk investasi barang modal berupa aset dalam penyelesaian meningkat sebesar Rp592,52 miliar.

Tujuan Investasi

Untuk mendukung dan menunjang aktivitas operasional kegiatan Bank secara menyeluruh.

Realisasi Investasi Barang Modal

(Rp Juta)

Jenis Investasi	2023	2022
Tanah	909	724.673
Bangunan	4.096	327.544
Instalasi	22.110	22.062
Kendaraan Bermotor	501	5.304
Investasi Kantor	65.728	115.772
Prangakat Lunak	276.241	144.715
Renovasi atas Aset Sewa	13.023	27.861
Aset dalam Penyelesaian	1.266.390	673.866
Total	**1.648.998**	**2.041.797**

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTANSI

Bank Syariah Indonesia tidak memiliki informasi dan fakta material setelah tanggal laporan akuntan yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank dan risiko usaha di masa yang akan datang.

PROSPEK USAHA

Kondisi Ekonomi Secara Umum

Di tahun 2024, perekonomian global diprakirakan akan sedikit melambat karena tingginya suku bunga acuan bank sentral global yang masih akan berlanjut. Meskipun inflasi semakin terkendali, terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai, antara lain adanya potensi volatilitas harga komoditas seiring dengan masih tingginya kemungkinan eskalasi tensi geopolitik global, risiko *climate change*, dan gangguan cuaca El Nino hingga paruh awal 2024, yang dapat berdampak pada perlambatan penurunan inflasi. Kemudian, terdapat dampak fiskal dari tingginya suku bunga yang berpotensi meningkatkan beban bunga utang negara. Tingkat ketidakpastian perekonomian global diprediksi masih akan berlanjut seiring pelaksanaan US election, dengan ekspektasi kebijakan moneter akan mulai dilonggarkan di paruh kedua 2024.

Menghadapi ketidakpastian global, perekonomian nasional diprediksi masih akan melanjutkan pertumbuhan positif di range 5-6% seperti yang terjadi selama 2023 lalu. Daya tahan Perekonomian masih akan berlanjut. Tingkat konsumsi diperkirakan masih tumbuh kuat di tengah ketatnya kebijakan moneter global dan domestik. Di saat yang sama, terdapat perubahan yang perlu dipertimbangkan yaitu risiko perubahan iklim, perubahan perilaku konsumen, dan digitalisasi. Perbankan nasional diperkirakan akan tetap mencetak pertumbuhan positif meskipun berpotensi mengalami perlambatan pertumbuhan akibat keterbatasan likuiditas. Dinamika politik yaitu pemilihan presiden diprediksi akan berpengaruh terhadap pelambatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan perbankan, khususnya disebabkan adanya masa transisi periode pemerintahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Strategi BSI 2023-2025

Sebagai upaya untuk mendukung target usaha di tahun buku 2023 serta pencapaian jangka menengah dan panjang, BSI telah menyiapkan strategi dan kebijakan strategis, antara lain:

1. Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Berkelanjutan
   Sebagai lembaga *intermediary*, Bank mengelola pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan fokus pada produk yang memiliki kualitas baik dan *yield* optimal. Bank juga memperkuat pendanaan dengan meningkatkan akuisisi *payroll*, tabungan wadiah, tabungan bisnis, tabungan haji, serta peningkatan *fee based income*.
2. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas
   Dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, Bank melanjutkan penataan jaringan kantor, pemerataan sebaran lokasi *(coverage)*, dan evaluasi kantor berkinerja rendah. Di sisi lain, Bank meningkatkan produktivitas melalui *redeployment* pegawai sekaligus melakukan *upskilling* dan *reskilling* kapabilitas pegawai.
3. Peningkatan Product Holding Ratio
   Bank berupaya memahami *customer profile* agar dapat memberikan solusi produk dan layanan yang komprehensif melalui penguatan *data analytic*, peningkatan *digital adoption*, serta intensifikasi terhadap nasabah eksisting sehingga *Product Holding Ratio* meningkat.
4. Digitalisasi Bisnis
   Bank meningkatkan digitalisasi pada bisnis melalui penambahan user aktif *mobile banking*, *shifting* transaksi dari cabang ke *channel* elektronik dan digital, serta digitalisasi *business process*. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) layanan nasabah dan peningkatan *fee based income* Bank.
5. Peningkatan Penetrasi Islamic Ecosystem
   Untuk mengembangkan bisnis, Bank melakukan percepatan pertumbuhan Islamic Ecosystem yang mencakup ZISWAF, ekonomi masjid, rumah sakit, pesantren dan pendidikan Islam, serta bisnis haji dan umrah melalui pengembangan platform dan solusi yang inovatif serta strategi akuisi yang efektif.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI 1 (SATU) TAHUN MENDATANG

Target dan Realisasi

Secara keseluruhan, kinerja Bank melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Total aset BSI pada Desember 2023 sebesar Rp353,62 triliun, atau sebesar 105,15% dari target sebesar Rp336,32 triliun.

Kemudian, realisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) Desember 2023 sebesar Rp293.78 triliun atau mencapai 101,19% dari target yang yang ditentukan sebesar Rp290,33 triliun. Begitu juga dengan pencapaian pembiayaan yang terealisasi 100,55% atau sebesar Rp240,32 triliun terhadap target Desember 2023 yang sebesar Rp239,01 triliun.

BSI membukukan laba bersih pada Desember 2023 sebesar Rp5,70 triliun, atau 110,72% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp5,15 triliun.

Untuk Modal, BSI menargetkan pada Desember 2023 sebesar Rp38,36 triliun. Adapun realisasinya sebesar Rp38,74 triliun atau 100,99% dari target.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Target Desember 2023	Realisasi Desember 2023	Pencapaian (%)
Total Aset	336.318.248	353.624.125	105,15%
Dana Pihak Ketiga	290.333.436	293.775.930	101,19%
Pembiayaan	239.008.683	240.316.044	100,55%
Laba Bersih	5.151.419	5.703.743	110,72%
Modal	38.361.792	38.739.121	100,98%

Proyeksi Tahun Buku 2024

Mengacu pada realisasi kinerja tahun 2023 serta mempertimbangkan kondisi yang akan berkembang pada tahun 2024, Bank memproyeksikan target usaha seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Proyeksi 2024 dan Realisasi 2023

Uraian	Proyeksi 2024	Realisasi Desember 2023
NIM	5,30%-5,80%	5,82%
NPF *Gross*	< 2%	2,08%
Cash Coverage	195%-198%	194,35%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	~20%	21,04%

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Di tahun ketiga pasca merger dari tiga bank syariah terbesar di Tanah Air, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank BRIsyariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) menajamkan kehadirannya untuk menjadi bank syariah pilihan utama masyarakat Indonesia berdampingan dengan bank umum lainnya. Kehadiran Bank Syariah Indonesia yang mudah ditemui masyarakat baik melalui kantor cabang, pelaksanaan *event offline* dan *online*, maupun melalui materi promosi dan iklan, membuat BSI semakin dikenal masyarakat. Selain itu aplikasi digital yang dimiliki BSI memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi dan menggunakan layanan perbankan.

Di tahun 2023 Bank Syariah Indonesia melanjutkan pemantapan *awareness* terhadap produk dan layanannya dengan tetap melakukan sejumlah strategi pemasaran dengan objektif sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi literasi perbankan syariah
2. Meningkatkan *awareness* terhadap produk BSI
3. Meningkatkan ketertarikan terhadap produk BSI
4. Meningkatkan konversi produk yang mendukung pertumbuhan bisnis BSI

Fokus strategi di tahun 2023 juga tetap dilaksanakan sebagai bentuk keberlanjutan dari strategi tahun sebelumnya, yaitu melalui 5 pilar berikut:

1. *Mapping Customer*
   Mapping Customer dibagi menjadi dua yaitu Target Bisnis dan Target Audiens.
   - Target Bisnis merupakan segmen nasabah yang diharapkan bisa menghasilkan *contribution* margin lebih tinggi seperti: ASN, Pegawai BUMN, Pensiunan, Ekosistem Rumah Sakit, Pelaku UMKM, dan Professional.
   - Target audiens merupakan kelompok masyarakat yang menjadi target utama komunikasi, di antaranya *Millennial*. Berdasarkan Sensus Penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020, penduduk Indonesia yang berusia 24 – 39 tahun (generasi *millennial*) berjumlah kurang lebih 68,9 Juta orang. Sementara menurut data dari Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2021, penduduk yang berusia 10 – 24 tahun (generasi Z) sebanyak 69 juta jiwa. Hal ini menjadikan generasi *millennial* sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan. *Mapping customer* diatas diperlukan dalam perencanaan dan pelaksaaan strategi konten dan *channel* komunikasi yang tepat.
2. *Mapping Product Champion*
   Bank Syariah Indonesia melakukan strategi pemasaran dengan membuat *House of Strategy*, yaitu penguatan *brand* & pertumbuhan bisnis melalui dua pilar strategi yaitu *Product Heroes* & *Socialization*. Pemilihan *product heroes* menyesuaikan dengan target pertumbuhan bisnis. Di tahun ketiga, Bank Syariah Indonesia memiliki target untuk peningkatan *Fee Based Income* (FBI) dan juga peningkatan pembiayaan Syariah. Berikut adalah 7 *Product Heroes* yang menjadi bagian fokus strategi pemasaran di tahun 2023:
   - BSI Tabungan Bisnis
   - BSI *Mobile*
   - BSI Griya
   - BSI Oto
   - BSI Gadai & Cicil Emas
   - BSI Mitraguna

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

3. *Integrated Marketing Communications*
   Integrated Marketing Communications (IMC) dilakukan berdasarkan strategi *mapping customer* dan *mapping product champion*. Aktivitas *campaign 'hero product'* dilakukan sesuai dengan target audiens maupun target bisnis yang sudah ditetapkan. Pendekatan IMC dilakukan melalui aktivitas promosi terintegrasi seperti Hujan Rezeki dan Tabungan Bisnis. Sebagai contoh, untuk produk Hujan Rezeki dan Tabungan Bisnis dengan target audiens *millennials*, dilakukan serangkaian aktivitas promosi mulai dari *Above The Line* (ATL) melalui media televisi, koran/ majalah, cinema/ bioskop, videotron/OOH, kemudian *Below The Line* (BTL) melalui *offline event (open booth* di Mall dan *Sponsorship Event*) dan *online event (webinar, IG Live)*, serta didukung kegiatan *digital marketing* (*digital ads*, kerjasama dengan KOL dan *Publisher*).

   Selain itu, untuk produk BSI Mitraguna Berkah, yang memiliki target bisnis yang lebih spesifik yaitu masyarakat Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap), dalam hal ini terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN, maupun Pegawai Swasta, aktivitas promosinya lebih bersifat *direct marketing*. Aktivitas promosi yang dilakukan diantaranya dengan kunjungan langsung ke nasabah ataupun ke satuan kerja (satker) instansi terkait, pelaksanaan *event mini expo*, *placement* iklan di media OOH yaitu TV Lift dengan target instansi atau webinar dengan mengambil tema yang bermanfaat bagi pegawai.
4. Literasi Keuangan dan Perbankan Syariah
   Selain meningkatkan *awareness* dan *interest* terhadap produk BSI, salah satu tujuan pemasaran adalah ikut meningkatkan literasi keuangan dan perbankan syariah. Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan perbankan syariah dilakukan diantaranya melalui seminar dan webinar di ratusan perusahaan dan instansi yang telah bekerjasama dengan BSI. Selain itu kegiatan dilakukan juga kegiatan literasi di kampus, sekolah dan pesantren.

   Bank Syariah Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF) dan *Festival Syariah* (Fesyar).
5. *Event & Sponsorship*
   Dalam rangka memaksimalkan akuisisi nasabah baru, Bank Syariah Indonesia melaksanakan serangkaian *event* yang terbagi dalam beberapa kategori:
   a) *Signature Event*
      Merupakan *event* besar yang dilaksanakan selain untuk meningkatkan *awareness* Bank Syariah Indonesia secara luas, juga untuk akuisisi nasabah baru melalui berbagai *event* besar. Contoh *signature event* yang dilaksanakan BSI di tahun 2023 adalah BSI Umroh Travel *Fair*, Halal *Fair*, *Life With* BSI (LWB) Expo (Medan, Solo), Awarding Talenta Wirausaha BSI, Aceh Muslimpreneur, Gema Ramadhan, dan FIFA Matchday.
   b) *Medium Event*
      Merupakan *event* kategori menengah yang dilaksanakan di lebih banyak tempat untuk memperbesar akuisisi nasabah baru. Contoh *medium event* adalah: Market *Outlook* nasabah Prioritas, Trade Expo Indonesia, MUF Auto Fest, ISEF, dan Roadshow Hujan Rezeki di sejumlah kota,
   c) *Mini Event*
      Merupakan *event* kategori kecil yang dilakukan di instansi-instansi yang telah bekerjasama dengan BSI. Contoh *event* ini adalah HUT Mandiri, Bulan Inklusi Keuangan, INACRAFT, dan Launching Hujan Rejeki Mobile.
   d) *Sponsorship*
      Sejumlah *event* yang dilaksanakan oleh pihak eksternal turut disponsori oleh BSI. *Event* yang disponsori oleh BSI adalah kegiatan menarik minat pengunjung dan secara muatan acara bersesuaian dengan prinsip syariah. *Event* yang disponsori oleh BSI diantaranya: *Islamic Book Fair* (IBF), Garuda Umroh Travel *Fair*, Saudia Umrah Travel *Fair*, dan Jakarta Muslim *Fashion Week*.

Pangsa Pasar

Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah, secara khusus menghadapi persaingan dengan seluruh bank yang ada di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar, baik perbankan syariah maupun konvensional. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan aset, pembiayaan, dan DPK.

Tabel Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan Perbankan Syariah

(Rp Miliar, kecuali dinyatakan lain)

Pangsa Pasar Perbankan Syariah	Uraian	2023	2022	Pertumbuhan
Aset	Bank Syariah Indonesia	353.624	305.727	15,67%
	Perbankan Syariah	892.163	802.256	11,21%
	Pangsa Pasar	**39,64%**	**38,11%**	
Pembiayaan	Bank Syariah Indonesia	240.316	207.705	15,70%
	Perbankan Syariah	585.461	505.938	15,72%
	Pangsa Pasar	**41,05%**	**41,05%**	
Pendanaan/DPK	Bank Syariah Indonesia	293.776	261.491	12,35%
	Perbankan Syariah	684.519	619.509	6,91%
	Pangsa Pasar	**42,92%**	**42,21%**	10,49%

Sumber: SPI dan SPS - Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Desember 2023

Berdasarkan aset, pangsa pasar Bank Syariah Indonesia Desember 2023 mencapai 39,64%, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 38,11%. Total aset Bank Syariah Indonesia berhasil tumbuh sebesar Rp47,90 triliun.

Dari sisi pembiayaan, pangsa pasar Bank Syariah Indonesia di Desember 2023 mencapai 41,05%, tetap dibandingkan tahun 2022. Sedangkan pangsa pasar DPK pada Desember 2023 mencapai 42,92% naik dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 42,21%.

Pangsa pasar yang besar merupakan hasil dari penerapan strategi yang efektif yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, khususnya setelah merger.

Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan Industri Perbankan Syariah Desember 2023

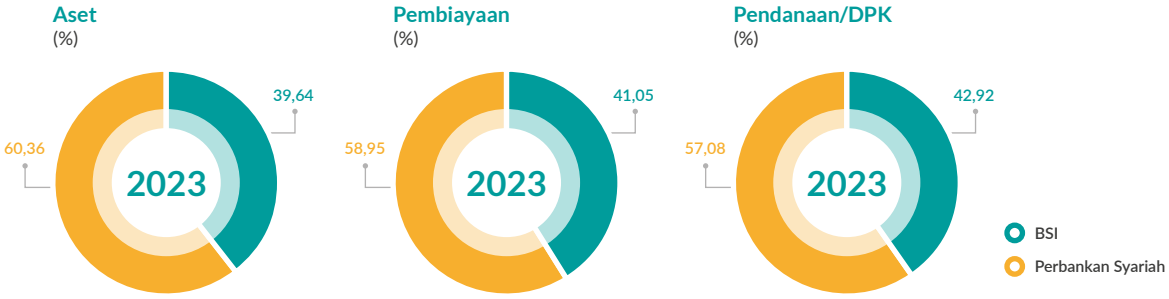

Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan Industri Perbankan Syariah Desember 2022

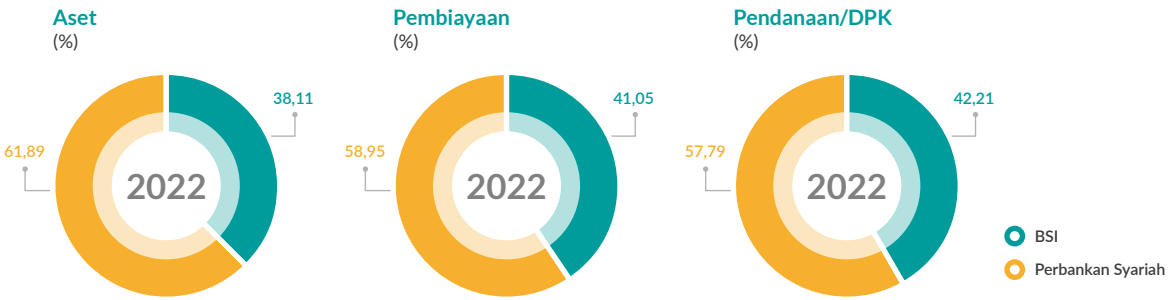

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Tabel Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan Perbankan Nasional

(Rp Miliar, kecuali dinyatakan lain)

Pangsa Pasar Perbankan Nasional	Uraian	2023	2022	Pertumbuhan
Aset	Bank Syariah Indonesia	353.624	305.727	15,67%
	Industri Perbankan	11.983.999	11.315.780	5,91%
	Pangsa Pasar	**2,95%**	**2,70%**	
Pembiayaan	Bank Syariah Indonesia	240.316	207.705	15,70%
	Industri Perbankan	7.248.059	6.567.307	10,37%
	Pangsa Pasar	**3,32%**	**3,16%**	
Pendanaan/DPK	Bank Syariah Indonesia	293.776	261.491	12,35%
	Industri Perbankan	8.611.108	8.293.980	3,82%
	Pangsa Pasar	**3,41%**	**3,15%**	

Sumber: SPI dan SPS - Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Desember 2023

Di tengah ketatnya persaingan di industri perbankan, Bank Syariah Indonesia juga menghadapi persaingan dengan seluruh perbankan nasional di Indonesia. Berdasarkan jumlah aset, pembiayaan, dan jumlah DPK, pangsa pasar pada Desember 2023 masing-masing sebesar 2,95%, 3,32% dan 3,41%. Pangsa pasar tersebut meningkat dari periode sebelumnya. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Bank Syariah Indonesia dalam menjaga kinerja operasional.

Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional Desember 2023

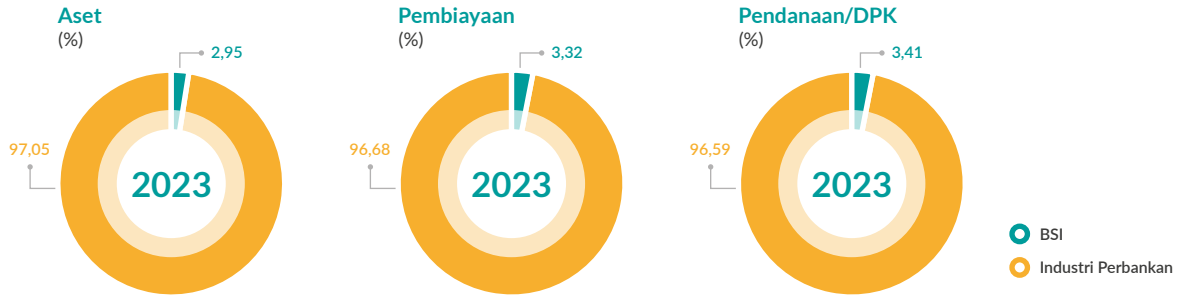

Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional Desember 2022

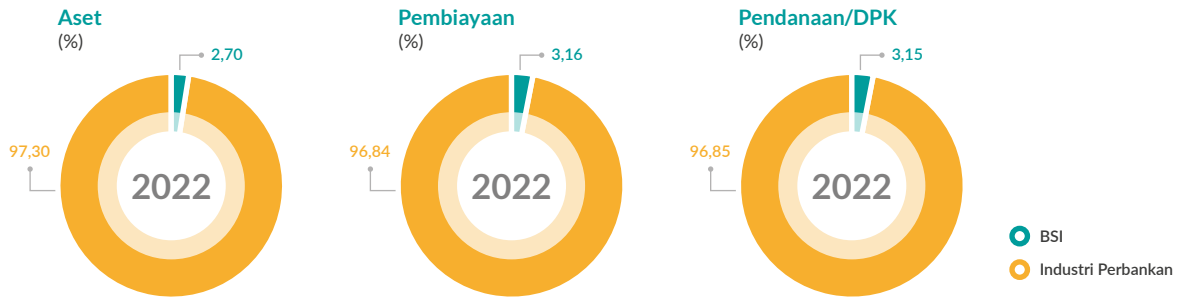

Grafik Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional
(%)

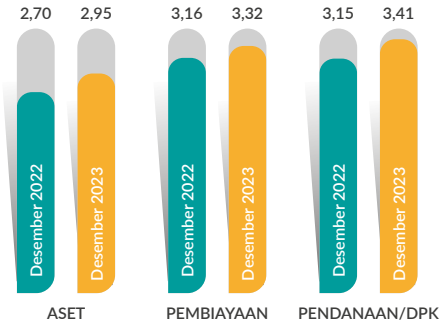

Grafik Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah
(%)

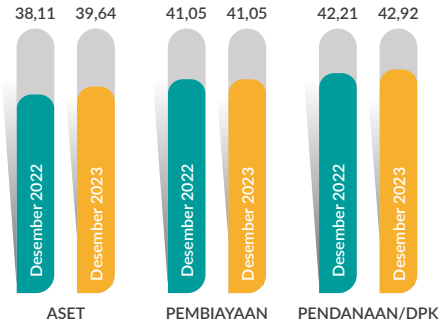

DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Bank Syariah Indonesia dapat mengumumkan dividen setiap tahun (dalam Rupiah) apabila memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih bank yang ditentukan oleh RUPS dan setelah dikurangi pemotongan pajak perusahaan, harus dialokasikan sebagai dana cadangan wajib sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai minimal 20% dari jumlah modal disetor bank, walaupun tidak terdapat jangka waktu yang ditentukan untuk pencapaian tingkat dana cadangan wajib tersebut.

Sisa bagian dari laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen final kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Bank juga dapat membagikan dividen khusus secara *ad-hoc* berdasarkan persetujuan dalam RUPS.

Dividen yang Dibagikan

Realisasi Pembayaran Dividen

Keterangan	Tahun Buku 2022	Tahun Buku 2021
Tanggal Pengumuman	24 Mei 2023	31 Mei 2022
Tanggal Pembayaran	23 Juni 2023	30 Juni 2022
Laba (Rp)	4.260.181.677.875	3.028.204.859.899
Dividen (Rp)	426.018.167.788	757.051.214.975
Dividen per saham (Rp)	9,23531	18,40661
Payout Ratio	10%	25%

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

Kebijakan Pengelolaan dan Pembayaran Pajak

Bank Syariah Indonesia sebagai berkomitmen untuk mengelola dan melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BSI berpandangan bahwa pembayaran pajak tersebut merupakan bagian dari kontribusi Bank terhadap negara melalui dukungan terhadap perekonomian nasional.

Tabel berikut menyajikan rincian setoran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai satu wujud kontribusi kepada Negara:

Tabel Kepatuhan Pembayaran Pajak

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022
PPh Pasal 4 ayat 2	774.238	575.467
PPh Pasal 21	515.311	456.816
PPh Pasal 22	9.517	5.048
PPh Pasal 23	39.346	28.821
PPh Pasal 25	1.622.277	1.228.568
PPh Pasal 26	14.724	6.128
PPh Pasal 29	55.843	291.570
PPN	30.068	18.654
Jumlah	**3.061.324**	**2.611.072**

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Employee Stock Option Program (ESOP) adalah program pemberian saham Bank kepada pegawai terpilih sebagai salah satu bentuk apresiasi serta program retensi kepada pegawai.

Sementara untuk tahun 2023, tidak terdapat realisasi dari program ESOP/MSOP.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Penyampaian laporan penggunaan dana hasil penawaran umum yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia mengacu pada Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Sesuai mandat regulasi tersebut, BSI telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 14 Juli 2023 bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dengan memberikan Hak Memasan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tahun 2022 telah selesai pada tahun 2023.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Data		Realisasi Penggunaan Data		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Penyaluran Pembiayaan	Total	Penyaluran Pembiayaan	Total	
Penawaran Umum dengan memberikan HMETD (PMHMETD I)	5 Desember 2022	4.999.952.795.000	62.300.000.000	4.937.652.795.000	4.937.652.795.000	4.937.652.795.000	4.937.652.795.000	4.937.652.795.000	0

INFORMASI MATERIAL TERKAIT DENGAN INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

Investasi

Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) memiliki investasi pada surat berharga yg mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Rincian penjelasannya disampaikan di bawah ini.

Periode Transaksi	Tahun 2023
Pihak yang Bertransaksi	Bank Syariah Indonesia dengan penerbit surat berharga, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia.
Sifat Hubungan	Tidak ada hubungan afiliasi.

Nilai Investasi pada Surat Berharga

(Rp Juta)

Uraian	2023		2022	
	Nilai Nominal	Nilai Tercatat	Nilai Nominal	Nilai Tercatat
Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	1.835.552	1.847.602	909.966	921.324
Sukuk Bank Indonesia	1.724.704	1.724.704	-	-
Surat Perbendaharaan Negara Syariah ("SPNS")	895.000	878.000	-	-
Reksa dana	400.000	405.089	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	27.301	31.787	-	-
Total	**4.882.557**	**4.887.182**	**909.966**	**921.324**
Mata Uang Asing				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	6.728	6.702	-	-
Total Nilai Wajar melalui Laba Rugi	**4.889.285**	**4.893.884**	**909.966**	**921.324**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

(Rp Juta)

Uraian	2023		2022	
	Nilai Nominal	Nilai Tercatat	Nilai Nominal	Nilai Tercatat
Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	7.119.539	7.087.426	3.173.558	3.051.045
Sukuk Bank Indonesia	20.693.578	20.744.693	-	-
Reksa dana	1.200.000	1.219.721	-	-
Sukuk korporasi	120.000	120.890	-	-
Total	**29.133.117**	**29.172.730**	**3.173.558**	**3.051.045**
Mata Uang Asing				
Sukuk Bank Indonesia	1.539.700	1.544.442	-	-
Total Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	**30.672.817**	**30.717.172**	**3.173.558**	**3.051.045**
Biaya Perolehan Diamortisasi				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	33.952.697	34.092.672	43.362.582	43.717.378
Sukuk Bank Indonesia	-	-	8.602.984	8.602.984
Sukuk korporasi	947.800	947.800	902.800	902.800
Wesel Ekspor	200.858	200.858	160.571	160.571
Total	**35.101.355**	**35.241.330**	**53.028.937**	**53.383.733**
Mata Uang Asing				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	443.434	449.140	483.371	495.803
Total Biaya Perolehan Diamortisasi	**35.544.789**	**35.690.470**	**53.512.308**	**53.879.536**
TOTAL INVESTASI PADA SURAT BERHARGA		**71.301.526**		**57.851.905**
Cadangan kerugian penurunan Nilai		(132.506)		(10.634)
Bersih		**71.169.020**		**57.841.271**

Ekspansi
Selama tahun 2023 BSI tidak melakukan kegiatan ekspansi.

Akuisisi
Selama tahun 2023 BSI tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Divestasi
Selama tahun 2023 BSI tidak melakukan kegiatan divestasi.

Restrukturisasi
Selama tahun 2023 BSI tidak melakukan kegiatan restrukturisasi.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Transaksi material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset; pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan; dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu (POJK No. 17/POJK.04/2020).

Transaksi Afiliasi

Berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 pasal 1, afiliasi didefinisikan sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Transaksi afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. Sampai dengan akhir tahun 2023, Bank Syariah Indonesia tidak memiliki transaksi yang memenuhi kategori transaksi dengan pihak terafiliasi.

Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud (POJK No. 42/POJK.04/2020). Sampai dengan akhir tahun 2023, Bank Syariah Indonesia tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

a. Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
b. Perusahaan asosiasi;
c. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
d. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam butir c di atas;
e. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;
f. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Nama dan sifat hubungan berelasi disajikan sebagai berikut.

Tabel Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham pengendali
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
PT BNI Life Insurance	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
PT Mandiri Sekuritas	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
BPJS Kesehatan	Entitas dan lembaga pemerintah
BPJS Ketenagakerjaan	Entitas dan lembaga pemerintah
DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum BULOG	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum DAMRI	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Jasa Tirta II	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum LPPNPI	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Perhutani	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Perumnas	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Peruri	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Produksi Film Negara	Entitas dan lembaga pemerintah
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Adhi Commuter Properti Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Adhi Jalintim Riau	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Adhi Persada Beton	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Adhi Persada Gedung	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Adhi Persada Properti	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Aero Globe Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Aerofood Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Agro Medika Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Agro Sinergi Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Amarta Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Aneka Tambang Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura Hotel	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura I (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Angkasa Pura II (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura Kargo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura Logistik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura Solusi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura Solusi Integra	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura Supports	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Antam Resourcindo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT ASABRI (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Asei Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi BRI Life	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jiwa IFG	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jiwa Taspen	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bahana Artha Ventura	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bahana TCW Investment Management	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bakti Timah Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Barata Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Baturaja Multi Usaha	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Berdikari	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Berdikari Logistik Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Berkah Industri Mesin Angkat	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Berkah Muti Cargo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Berlian Manyar Sejahtera	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bina Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bintang Tirta Pratama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bio Farma (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT BNI Asset Management	Entitas dan lembaga pemerintah
PT BNI Sekuritas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Brantas Abipraya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT BRI Asuransi Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT BRI Danareksa Sekuritas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bukit Asam Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bukit Asam Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bukit Prima Bahari	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bumi Sawindo Permai	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Celebes Railway Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Citilink Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Citra Lautan Teduh	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Cut Meutia Medika Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Danareksa (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Danareksa Investment Management	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Dayamitra Telekomunikasi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Elnusa Petrofin	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Elnusa Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Emas Antam Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Energi Agro Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Energy Management Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Equiport Inti Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Finnet Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Fintek Karya Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Graha Investama Bersama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Graha Niaga Tata Utama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Graha Sarana Duta	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Griyaton Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Hakaaston	Entitas dan lembaga pemerintah
PT HK Realtindo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Hutama Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indofarma Global Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indonesia Comnets Plus	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indonesia Power	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indopelita Aircraft Services	Entitas dan lembaga pemerintah

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Indra Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Industri Kereta Api (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Inhutani IV	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Inka Multi Solusi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Inka Multi Solusi Service	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Inka Multi Solusi Trading	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Inti Konten Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Istaka Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jalintim Adhi Abipraya	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jaminan Kredit Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jamsostek (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasa Prima Logistik Bulog	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasa Raharja	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Gempol Pasuruan	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Pandaan Malang	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Tollroad Operator	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Transjawa Tol	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasaraharja Putera	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jembatan Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasa Tirta Energi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT KA Pariwisata	Entitas dan lembaga pemerintah
PT KA Properti Manajemen	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kalimantan Jawa Gas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kaltim Daya Mandiri	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kaltim Industrial Estate	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kawasan Industri Gresik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT KBN Graha Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kereta Commuter Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kilang Pertamina Balikpapan	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kimia Farma Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kimia Farma Apotek	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kimia Farma Diagnostik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kimia Farma Trading & Distribution	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kodja Terramarin	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Bandar Samudera	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Daya Listrik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Jasa Logistik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau National Resources	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Pipe Industries	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Sarana Infrastruktur	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Sarana Properti	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Tirta Industri	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Wajatama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Laras Astra Kartika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mandiri AXA General Insurance	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mandiri Capital Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mandiri Manajemen Investasi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mandiri Tunas Finance	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mandiri Utama Finance	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mega Eltra	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mitra Rakata	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mitra Transaksi Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mitra Utama Madani	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Multi Sentana Baja	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Multi Terminal Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nusa Karya Arindo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nusantara Medika Utama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nusantara Regas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nusantara Sebelas Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nusantara Terminal Service	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nusantara Turbin Dan Propulsi	Entitas dan lembaga pemerintah

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT PAL Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PAL Marine Service	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Patra Badak Arun Solusi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Patra Drilling Contractor	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Patra Logistik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Patra Nusa Data	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Patra Trading	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pegadaian	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelabuhan Bukit Prima	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelabuhan Tanjung Priok	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelindo Daya Sejahtera	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelindo Husada Citra	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelindo Marine Service	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelindo Multi Terminal	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelindo Properti Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelindo Terminal Petikemas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelita Air Service	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pemalang Batang Tol Road	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pembangunan PP Tirta Riau	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pengerukan Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perikanan Nusantara (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara I	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara IV	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara V	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara VI	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara VII	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara VIII	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara X	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara XII	Entitas dan lembaga pemerintah

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Perkebunan Nusantara XIII	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara XIV	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Permata Graha Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perta Arun Gas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertagas Niaga	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Bina Medika IHC	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Drilling Services Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina EP	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina EP Cepu	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Gas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Hulu Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Hulu Mahakam	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina International Shipping	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Lubricants	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Marine Solution	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Power Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Retail	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Trans Kontinental	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertani (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Peruri Digital Security	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Peruri Properti	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pesonna Indonesia Jaya	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pesonna Optima Jasa	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Peteka Karya Tirta	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Petrosida Gresik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Phapros Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PIM Prima Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pindad (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pindad Enjiniring Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pindad International Logistic	Entitas dan lembaga pemerintah

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Pindad Medika Utama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PNM Investment Management	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PNM Venture Capital	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PNM Ventura Syariah	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pos Logistik Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PP (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PP Presisi Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PP Properti Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PP Semarang Demak	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PP Urban	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pratama Mitra Sejati	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Prima Armada Raya	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Prima Husada Cipta Medan	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Prima Indonesia Logistik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Prima Medica Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Prima Multi Terminal	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pupuk Iskandar Muda	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pupuk Kalimantan Timur	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pupuk Kujang Cikampek	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pupuk Sriwidjaja	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rajawali Citramass	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rajawali Nusindo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rancang Semesta	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Reasuransi Syariah Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rekaindo Global Jasa	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Reska Multi Usaha	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Riset Perkebunan Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rolas Nusantara Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rumah Sakit Pelabuhan	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rumah Sakit Pelni	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sahung Brantas Energi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Saka Energi Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sang Hyang Seri (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sarana Bandar Nasional	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sarana Kaltim Ventura	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Semen Indonesia Beton	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Semen Padang (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sigma Cipta Caraka	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sigma Cipta Utama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sinergi Gula Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sinergi Mitra Investama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sinkona Indonesia Lestari	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Solusi Bangun Beton	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sri Pamela Medika Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sucofindo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sucofindo Episi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Swadharma Sarana Informatika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Taspen (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Taspen Abadi Sentosa	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telekomunikasi Selular	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telemedia Dinamika Sarana	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telkom Akses	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telkom Satelit Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telkomsel Ekosistem Digital	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telkomsel Mitra Inovasi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Terminal Petikemas Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Terminal Petikemas Surabaya	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Terminal Teluk Lamong	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Timah Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Tirta Tangsel Mandiri	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Tugu Pratama Interindo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT United Tractors Semen Gresik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Varia Usaha Bahari	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Varia Usaha Beton	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Varia Usaha Dharma Segara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Varia Usaha Lintas Segara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Waskita Karya Infrastruktur	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Widya Tirta Selaras	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Bitumen	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Komponen Beton	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Realty	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Entitas dan lembaga pemerintah

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Sifat dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi entitas pemerintah antara lain adalah giro pada bank lain, liabilitas segera, simpanan dari bank lain, investasi pada surat berharga, surat berharga subordinasi yang diterbitkan, penempatan pada bank lain, simpanan nasabah, surat berharga, serta piutang dan pembiayaan.

Rincian realisasi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi Pihak Berelasi

Uraian	2023	2022
Aset	73.571.244	72.799.804
Persentase terhadap jumlah aset	20,80%	23,81%
Liabilitas	3.416.331	3.250.467
Persentase terhadap jumlah Liabilitas	3,92%	4,41%
Dana *Syirkah* Temporer	46.154.530	32.564.853
Persentase terhadap jumlah Dana *Syirkah* Temporer	20,27%	16,40%

Kebijakan Penelaahan dan Persetujuan Transaksi

BSI telah memiliki kebijakan di bidang penelaahan dan persetujuan transaksi dengan pihak berelasi/afiliasi, yang antara lain merujuk pada Peraturan OJK Nomor 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum serta perubahannya, yakni POJK Nomor 38 /POJK.03/2019.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan: (1) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana. (2) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank. (3) Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari pihak terkait.

Uraian di bawah ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan penelaahan terhadap transaksi dengan pihak afiliasi/berelasi yang menjadi acuan dalam persetujuannya.

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2023 dilakukan secara wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal dan sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Bank Syariah Indonesia dan bebas dari konflik kepentingan.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Mekanisme *Review* atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Bank Syariah Indonesia memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Selain itu, transaksi material juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara Independen. Selama tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pernyataan Direksi bahwa Transaksi telah Memenuhi Prosedur Memadai dan Sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum

Dalam melakukan transaksi, khususnya dengan pihak berelasi, Bank telah memiliki prosedur sesuai dengan yang ditentukan oleh regulator. Dalam prosedur tersebut, Direksi menjadi bagian dari organisasi yang melakukan *review* terhadap rencana, realisasi dan evaluasi terhadap transaksi Bank. Dengan pertimbangan tersebut, Direksi memandang bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah melalui prosedur yang memadai dan selaras dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk Memastikan Transaksi Dilakukan Sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum, yang antara lain Dilakukan dengan Memenuhi Prinsip Transaksi yang Wajar (*Arms-Lenght Principle*)

Salah satu tugas penting Komite Audit adalah melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan sistem pengendalian intern (*internal control system*), termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain itu, Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank untuk publik atau pemangku kepentingan lain serta menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, transaksi dengan pihak berelasi menjadi bagian dari telaah dan pantauan Komite Audit.

Sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, Komite Audit menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank. Karena itu, peran Komite Audit dan Dewan Komisaris menjadi bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Bank sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Rujukan di Laporan Keuangan

Pembahasan terkait dengan transaksi berelasi juga disampaikan dalam Laporan Keuangan yang terdapat di lampiran Laporan Tahunan ini pada halaman 113.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2023, Bank Syariah Indonesia menghadapi sejumlah perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Bank, yang dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No.	Ketentuan	Dampak terhadap Bank
1.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum	1. Penerapan atas kewajiban Bank dalam memantau dan memastikan bahwa SDM BSI mengikuti program pengembangan kualitas SDM melalui Sertifikasi Manajemen Risiko serta menjaga keberlakuan dari Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dimiliki. 2. Mengadministrasikan serta melakukan pemeliharaan data masa berlaku Sertifikasi Manajemen Risiko setiap SDM di BSI.
2.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum	Pengaturan terkait pelaksanaan penguatan ketahanan dan keamanan siber Bank dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi. Bank diwajibkan untuk melakukan: a. Penilaian risiko inheren terkait keamanan siber b. Penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber c. Penerapan proses ketahanan siber bagi Bank d. Penilaian tingkat maturitas keamanan siber e. Pengujian keamanan siber f. Memiliki unit atau fungsi yang menangani ketahanan dan keamanan siber g. Pelaporan insiden siber dan notifikasi awal insiden siber
3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat	1. Kewajiban Bank dalam menyusun dan melaporkan kepada OJK terkait: (i) Laporan Rencana, (ii) Laporan Realisasi, (iii) Penyesuaian Laporan, dan (iv) Perubahan Laporan terkait Literasi dan Inklusi Keuangan sebagai bagian dari Rencana Bisnis dan Laporan Rencana Bisnis yang disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik milik OJK. 2. Bank wajib menetapkan fungsi atau unit untuk pelaksanaan peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta mekanisme pelaporan kepada Direksi dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan POJK ini.
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan	1. Penyesuaian ketentuan dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dalam seluruh kegiatan bisnis Bank. 2. Bank wajib menyampaikan *Individual Risk Assesment* kepada OJK secara periodik serta pengaturan terkait persyaratan dan tata cara kerja sama PJK dengan Pihak Ketia dalam rangka verifikasi tatap muka (*face to face*) dan tidak tatap muka (*non-face to face*) melalui sarana elektronik. 3. Penyempurnaan ketentuan fungsi manajemen kepatuhan dan pelaksanaan audit internal secara independen, serta kewajiban Bank melakukan *pre-employee screening*. 4. Penegasan pengaturan mengenai Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) yang mencakup pengaturan mitigasi risiko terhadap penghindaran sanksi (*sanction evasion*), menegakan tindak lanjut dan pemblokiran serta merta terhadap DTTOT dan DPPSPM dilakukan dengan *freezing without delay* dan tanpa pemberitahuan sebelumnya (*without prior notice*). 5. Penyesuaian nominal sanksi denda terhadap pelanggaran APU, PPT, dan PPPSPM selain pelaporam, yaitu paling banyak per tahun 5 Miliar Rupiah bagi orang perseorangan; dan/atau paling banyak 1% (satu persen) dari total laba bersih tahunan batas 100 Miliar Rupiah per tahun bagi PJK.
5.	Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	Penerapan pengaturan atas pelaksanaan kewajiban Bank terkait pelaporan data dan/atau informasi penerbitan dan/atau transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing kepada BI melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh BI.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

No.	Ketentuan	Dampak terhadap Bank
6.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia	1. Pengaturan mengenai kewajiban Bank dalam melakukan seluruh kegiatan bisnis Bank untuk menerapkan kesetaraan akses kepada setiap Konsumen dengan menjunjung prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran. Serta pengaturan atas larangan penggunaan klausula baku dalam tiap perjanjian dengan Konsumen. 2. Kewajiban Bank atas penyampaian laporan terkait Pelindungan Konsumen kepada BI yang mencakup: a. Laporan Rencana Pelaksanaan Edukasi; b. Laporan Pelaksanaan Edukasi; c. Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen; dan d. Laporan lainnya terkait Pelindungan Konsumen
7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan	Bank diwajibkan untuk menghitung dan membayar besaran Premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) kepada LPS sesuai kombinasi kelompok Bank dengan berpedoman ketentuan Peraturan Pemerintahan ini.
8.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	1. Ketentuan terkait pembatasan penggunaan jasa audit oleh Bank (rotasi) AP bagi Bank yang dibatasi maksimal 7 (tujuh) tahun kumulatif dengan periode jeda sesuai jenis peran AP dalam perikatan, yaitu 5 (lima) tahun, 3 (tiga) tahun, atau 2 (dua) tahun. 2. Penyesuaian ketentuan terhadap kewajiban Bank atas Penyampaian laporan Penunjukan AP dan/atau KAP dan laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP.
9.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)	1. Kewajiban Bank dalam menyusun dan menyampaikan Laporan secara berkala kepada Bank Indonesia terkait pemberian pembiayaan Ultra Mikro (UMi). 2. Penyusunan dan penyampaian laporan pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dengan mengacu pada ketentuan BI mengenai RPIM.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023:

1. Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan.
2. Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar.
3. Amandemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

05

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

Sumber Daya Manusia

Bank memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank.

Pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank"), didasari atas pandangan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan andal sangat penting, karena dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencapaian visi dan misi Bank. Terlebih lagi, Bank menargetkan "Menjadi Top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 (lima) tahun". Untuk mencapai target itu, SDM yang unggul menjadi salah satu keniscayaan yang harus dikelola dengan baik, sehingga pengelolaannya menjadi sangat penting.

Karena itulah, Bank memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM melalui strategi yang komprehensif. Bank juga melakukan evaluasi dan *monitoring* kinerja pegawai untuk memperoleh talenta (*talent pool*) yang berkualitas. Selain itu, Bank senantiasa berupaya menciptakan *work life balance* dan suasana kerja yang kondusif, sehingga pegawai dapat memberikan kinerja terbaiknya.

ORGANISASI *HUMAN CAPITAL*

Pengelolaan SDM di lingkungan Bank dilaksanakan oleh Direktorat *Human Capital*, yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab strategis untuk memimpin, mengarahkan perumusan, pemutakhiran strategi serta kebijakan pengelolaan SDM di Bank. Direktur juga memimpin, mengarahkan penyusunan *business plan* serta *action plan* Direktorat untuk jangka pendek, menengah maupun panjang agar sejalan dengan strategi dan rencana korporasi BSI.

Direktorat *Human Capital* memiliki tanggung jawab operasional meliputi:

1. Memimpin serta melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang di bidang *human capital* sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan sistem perekrutan, penempatan, mutasi dan pengembangan pegawai untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara komprehensif.
3. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan melakukan evaluasi atas kebijakan hubungan kerja yang produktif antara Bank dengan pegawai, termasuk pegawai secara individu serta hubungan antarpegawai (*employee relations*) dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
4. Menyusun dan memastikan pelaksanaan fungsi operasional unit kerja yang efektif dan responsif, serta pengembangan sistem informasi *human capital* yang mutakhir, terintegrasi dan mudah digunakan oleh seluruh unit kerja.
5. Menyusun, mengoordinasikan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan *incentive system*, *benefits* dan *compensation* sesuai dengan *reward philosophy*, strategi serta kemampuan Bank.
6. Mengarahkan, mengoordinasikan, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan *corporate culture*, sehingga senantiasa dapat mendukung pencapaian tujuan Bank.
7. Memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan unit kerja bidang *human capital* yang berada di bawah supervisinya.
8. Memonitor pelaksanaan kepatuhan dan pengawasan melekat pada unit kerja di bawah supervisinya.

9. Menjaga citra Bank serta turut membina hubungan baik dengan regulator dan *stakeholder* lain.

Dengan tugas dan tanggung jawab di atas, manajemen *human capital* BSI memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas usulan:
   a. Pengembangan organisasi;
   b. Transaksi kepegawaian;
   c. Alokasi Biaya Tenaga Kerja (BTK) dan anggaran lain terkait biaya pegawai; dan
   d. Peraturan Perusahaan.
2. Anggota Direksi menjadi permanent member untuk:
   a. Komite *Human Capital*;
   b. Komite Manajemen Risiko; dan
   c. Komite lainnya yang berada di bawah koordinasi Direksi yang dibentuk kemudian sesuai dengan kebutuhan Bank.
3. Memberikan persetujuan penggunaan biaya pelatihan dan pengembangan pegawai, biaya pengadaan barang dan jasa, penetapan beban kerugian operasional, pengelolaan aset Bank, serta biaya-biaya penunjang aktivitas di Direktorat *Human Capital* sesuai kebijakan dan prosedur Bank yang berlaku.
4. Mewakili Direksi dalam berhubungan dengan organisasi di luar Bank dalam lingkup tugas bidang Direktorat *Human Capital* dan di luar ruang lingkup tugasnya berdasarkan penugasan dari Direksi.
5. Memberikan penilaian atas kinerja grup/unit kerja/pegawai yang berada di bawah koordinasinya serta mengarahkan kebijakan SDM termasuk promosi jabatan, rekrutmen, dan rotasi/mutasi di lingkungan Direktorat *Human Capital* sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berlaku.
6. Mengajukan permohonan persetujuan atas usulan yang terkait dengan pengelolaan aktivitas Direktorat *Human Capital* yang memerlukan keputusan Rapat Direksi atau Komite Bank yang berwenang sesuai kebijakan dan prosedur Bank.
7. Menetapkan dan/atau merekomendasikan kewenangan kepada pegawai yang berada di bawah koordinasi Direktorat *Human Capital* atau ruang lingkup fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sedangkan fungsi-fungsi di bawah Direktorat *Human Capital* mencakup:

a. *Human Capital Strategy & Policy*
   Mengelola strategi dan kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai visi misi perusahaan. Aktifitas utama meliputi: *organization development*, *talent development*, *talent acquisition*, dan *reward management*.
b. *Human Capital Services*
   Mengelola kegiatan operasional dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas utama meliputi: pengelolaan *payroll*, hubungan industrial, pengelolaan TAD, dan *human capital information system*.
c. *Human Capital Business Partner*
   Mengelola implementasi strategi, kebijakan, dan program terkait pengelolaan SDM agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan.
d. BSI Syariah University
   Mengelola berbagai layanan pembelajaran untuk pengembangan kompetensi pegawai dan program-program internalisasi budaya untuk mencapai visi, misi dan sasaran strategis perusahaan.

FOKUS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2023

Pengembangan organisasi selaras dengan *Corporate Plan* PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2022-2032 dengan aspirasi BSI menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Untuk mencapai aspirasi tersebut, BSI secara berkesinambungan melakukan *review* terhadap organisasi untuk mendukung *key metric* BSI, antara lain peningkatan *customer base*, profitabilitas, dan *volume asset* bank pada tahun 2023 melalui penyesuaian struktur organisasi yang berfokus pada:

a. Penguatan BSI dengan struktur organisasi yang *lean* dan efektivitas proses bisnis yang dapat mempercepat dan optimalisasi pelayanan bank terhadap nasabah.
b. Pengembangan pada segmen dan produk unggulan sehingga dapat berkontribusi secara langsung terhadap *financial indicator*.
c. Penguatan BSI performance culture melalui peningkatan *Product Holding Ratio* (PHR) dengan pendekatan *customer centric organization*.
d. Pengembangan bisnis digital dengan menyediakan fitur-fitur islami, modernisasi *mobile banking*, dan *digital banking* sebagai *business driver*.
e. Pengembangan *Islamic Ecosystem Solution*, *Wholesale Business*, *Transaction*, *Overseas Branch* Dubai, dan *alternative channel* jaringan melalui layanan *branchless banking* (laku pandai).
f. Penguatan *three line of defence* untuk unit kerja IT mencakup IT *Governance*, kapabilitas IT, dan fungsi BCM, *risk*, *compliance*, *anti fraud* dalam mendukung pelaksanaan *good corporate governance*.

PEMENUHAN PEGAWAI

Sistem rekrutmen sebagai upaya memenuhi kebutuhan pegawai yang andal merupakan salah satu proses yang sangat penting meliputi identifikasi kebutuhan, penentuan kualifikasi, pencarian kandidat, dan upaya menarik minat talenta terbaik di industri. Perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan bersamaan dengan rencana strategis tahunan.

Untuk mengisi kebutuhan tersebut, dilakukan melalui sumber internal maupun eksternal, dengan tetap mengutamakan sumber internal. Proses yang dilakukan dalam kegiatan rekrutmen mencakup:

1. **Seleksi Reguler**
   Jalur pemenuhan pegawai melalui kandidat dari:
   a. *Fresh graduate*; atau
   b. Memiliki pengalaman kerja maksimal 2 (dua) tahun untuk menempati jabatan pelaksana/staf di kantor pusat, regional *office* serta unit kerja di bawah koordinasinya.
2. ***Profesional Hire***
   Jalur pemenuhan pegawai melalui kandidat dengan pengalaman kerja di bidang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Seleksi *professional hire* untuk menempati level jabatan *officer/manager/middle manager/senior manager* disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
3. **Seleksi *Officer Development Program* (ODP)**
   Jalur pemenuhan pegawai kelompok jabatan officer dari kandidat eksternal dengan pendidikan minimal Strata Satu (S1) untuk dikembangkan menjadi pemimpin Bank di masa depan. Pada 2023 BSI telah merekrut sebanyak 199 orang melalui program ODP *General*, IT & Digital, dan *Wholesale*.

PENGEMBANGAN KARIER

Sebagai bagian dari perwujudan visi menjadi "Top 10 Bank Syariah Global", salah satu misi BSI adalah menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Upaya tersebut, antara lain direalisasikan melalui komitmen dalam pengembangan karier talenta terbaik di Bank.

BSI telah melakukan penyelarasan mekanisme dalam penerapan *talent development* dengan tujuan melahirkan program pengembangan yang tepat dari setiap jenjang jabatan di Bank. Selain itu, BSI juga melakukan *talent identification* sebagai upaya menyaring pegawai berpotensi untuk disiapkan sebagai *successor* yang dapat menempati posisi-posisi kunci.

Pengembangan karier pegawai dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan kelompok jabatan, mulai dari kelompok jabatan pelaksana sampai dengan kelompok jabatan *senior manager*. Pelaksanaannya melalui 2 (dua) jenjang yaitu pengembangan karier jalur pelaksana dan jalur pimpinan.

Pengembangan karier pegawai pelaksana untuk menjadi pegawai pimpinan dilakukan melalui proses seleksi *Staff Development Program* (SDP). Pengembangan karier pegawai pimpinan dilakukan melalui mutasi/rotasi/promosi atau penugasan pegawai (*project assignment*), seperti penugasan ke Kementerian BUMN atau ke induk perusahaan.

Dalam rangka mendukung transformasi digital, Bank membuat *talent management system* yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan data talenta serta sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, pada tahap awal, Divisi *Human Capital* Bank telah membuat kebijakan penempatan dan penugasan pegawai, yang salah satunya diatur mengenai panel kepegawaian yang mengatur terkait kewenangan proses kepegawaian.

BUDAYA PERUSAHAAN

Sebagai bagian dari konglomerasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam konteks *corporate culture*, BSI berkomitmen untuk menerapkan Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini menjadi panduan dalam proses transformasi Sumber Daya Insani bagi Bank Syariah Indonesia agar dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten sehingga dapat melahirkan perilaku keseharian dan budaya kerja BSU yang selarasa dengan *core values* yang telah ditetapkan.

Dengan mengadopsi *core values* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), BSI berharap tercipta kultur yang mampu mengakselerasi kinerja Bank menjadi lebih baik (*performance based culture*). Di tengah tantangan yang berat dan di usia yang masih sangat muda, kinerja BSI terus baik dan kepercayaan masyarakat meningkat.

Mengacu kepada *Culture Roadmap* BSI, setelah 2 (dua) tahun pertama pasca merger, Bank fokus melakukan proses integrasi, penyelarasan, dan internalisasi budaya. Pada tahun 2023, BSI melakukan upaya penguatan transformasi budaya (*culture strengthening*).

Penguatan tersebut dilakukan dengan melibatkan *leader* pada semua program sebagai proses transformasi budaya, menambah jumlah *Change Agent* (CA) dengan melakukan *refreshment* dan pembekalan kepada para CA serta *monitoring* implementasinya di seluruh unit kerja. Selain *leaders* struktural, program-program budaya juga melibatkan pengurus, seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam program-program budaya, baik yang bersifat rutin, maupun untuk direktorat maupun regional.

SUMBER DAYA MANUSIA

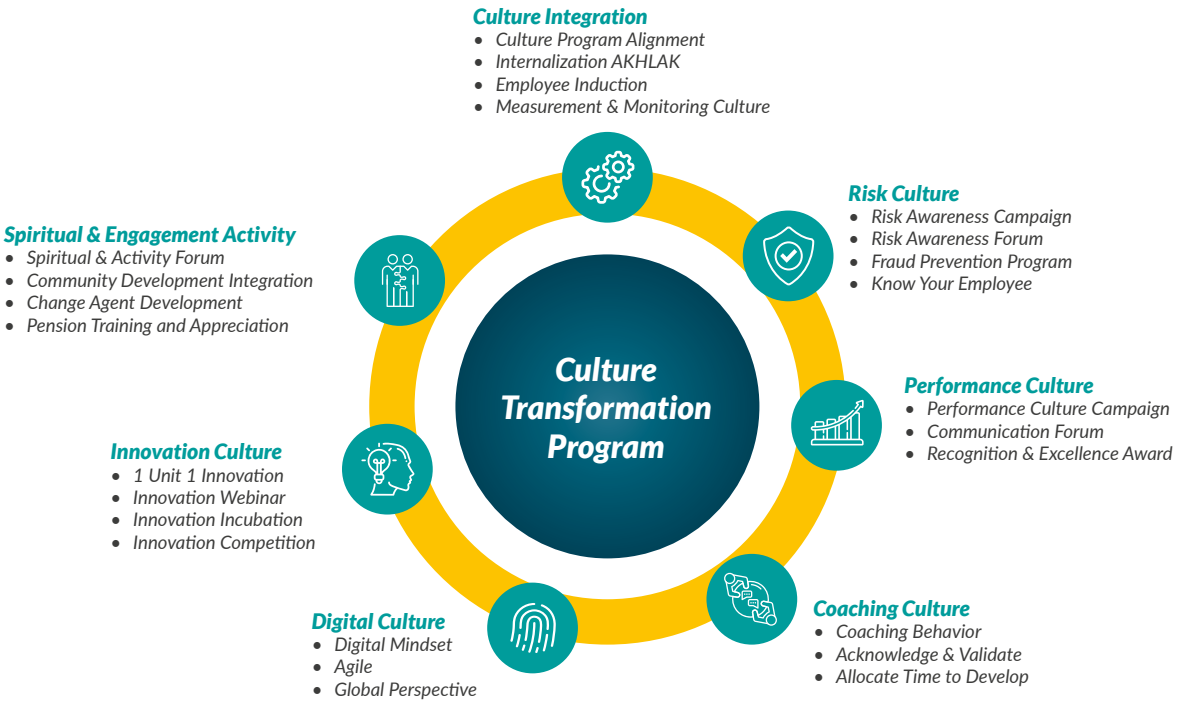

Ikhtiar yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan tersebut berdampak pada terjadinya peningkatan persepsi internal pegawai terhadap implementasi AKHLAK di BSI. Hasil pengukuran internal terhadap peranan *leaders* sebagai *role model* implementasi AKHLAK berada di nilai rata-rata 4.00 (predikat sesuai). *Change Agent* sebagai motor penggerak perubahan di level unit kerja juga terus ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Pada Desember 2023, jumlah *Change Agent* yang telah dididik mencapai 2.206 CA (1 *outlet* 2 CA).

BSI juga berupaya untuk terus menghidupkan budaya inovasi menjadi poin penting dalam mendukung Bank agar terus berkembang dan mencapai visinya menjadi "Top 10 Global Islamic Bank". Budaya inovasi di BSI telah rutin dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2022, program inovasi berfokus agar pegawai mampu menyampaikan ide inovasi sebanyak-banyaknya untuk BSI (kuantitas). Selanjutnya di tahun 2023, BSI menaikkan kualitas inovasi melalui simplifikasi proses pengumpulan proposal inovasi dengan menggunakan *website* serta penggunaan AI dalam proses *screening* proposal inovasi.

Keuntungan penggunaan *website*, secara otomatis kualitas proposal inovasi dapat ditingkatkan. Akurasi penilaian juga menjadi lebih baik, serta waktu penyelesaian seleksi semakin cepat. Di tahun 2023, BSI telah melakukan inkubasi 5 (lima) ide untuk dapat diimplementasikan yang terkait dengan penguatan dan peningkatan *costumer based*, *profitability*, *volume*, dan *quality*.

SISTEM IMBALAN

Pengelolaan sistem imbalan merupakan salah satu strategi Bank dalam memberikan imbalan pegawai, baik berupa finansial maupun *nonfinancial* yang kompetitif, namun tetap sesuai dengan kemampuan Bank. Pemberian *reward* di lingkungan Bank dilakukan dengan mengedepankan prinsip *competitiveness* dan *fairness* berbasis kinerja dan risiko dengan mempertimbangkan pelaksanaan *best practice* di industri perbankan.

Untuk dapat mempertahankan posisi kompetitif di pasar, secara reguler, Bank berpartisipasi dalam Survei Gaji Tahunan (*Annual Salary Survey*) di industri perbankan di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan lembaga survei yang independen dan kompeten.

Tujuan pemberian *reward* adalah untuk mempertahankan posisi kompetitif di pasar, *retention* dan memotivasi pegawai, terutama pegawai talenta. Hal tersebut merupakan upaya menarik talenta terbaik di industri yang dibutuhkan Bank untuk mencapai tujuan bisnis dan menjaga kesinambungan usaha.

Salah satu *reward* dalam bentuk finansial yang diberikan BSI kepada pegawai adalah bonus tahunan yang ditetapkan berdasarkan kinerja Bank, unit kerja, dan pegawai. Bank juga melakukan penyesuaian gaji tahunan yang berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku, Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan pelaksanaan cuti tahunan, dan tunjangan cuti besar yang diberikan setiap periode masa kerja 3 (tiga) tahunan.

Untuk terus dapat memotivasi pegawai dalam mencapai target bisnis, Bank juga dapat memberikan program insentif khusus. *Reward* tersebut mempertimbangkan nominal yang kompetitif serta menjaga internal *equity* dan risiko.

Reward yang bersifat *nonfinancial* diberikan seperti distribusi program *Employee Stock Allocation* (ESA). BSI juga memberikan fasilitas bantuan, yaitu beasiswa bagi anak pegawai yang meninggal dunia serta bantuan untuk pegawai yang mengalami musibah bencana alam dan kerusuhan.

Apresiasi lain yang berbentuk *nonfinancial* juga diberikan kepada unit kerja dan individu berdasarkan inovasi terbaik yang berdampak kepada kinerja Bank. Termasuk di dalamnya, pencapaian khusus unit atau individu yang memberikan dampak signifikan terhadap bisnis, kinerja maupun reputasi BSI. Apresiasi tersebut diberikan pada acara "BSI Excellence Award" sebagai bentuk apresiasi tertinggi dari Bank.

Selain *reward* finansial dan *nonfinancial*, Bank juga memberikan benefit lain kepada pegawai, yaitu berupa fasilitas kesehatan, hari cuti, pembiayaan pegawai, dan fasilitas lainnya sesuai lokasi kerja dan jabatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa asuransi kesehatan dengan cakupan yang luas dan benefit yang terus ditingkatkan hingga kebutuhan layanan khusus, termasuk penyakit kritis dan tindakan yang memerlukan alat canggih.

KESEJAHTERAAN

BSI memiliki beberapa program kesejahteraan sebagai bagian dari komitmen Bank terhadap penciptaan SDM yang berkualitas dan produktif, sehingga mampu memberikan kinerja terbaiknya, di antaranya:

1. **Kesehatan**

   Kesehatan pegawai merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dinilai memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja pegawai sebagai individu maupun perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, Bank senantiasa berupaya menunjang kualitas kesehatan seluruh pegawai dengan memberikan fasilitas *general medical check up* dan fasilitas jaminan kesehatan serta dengan mengikutsertakan pegawai dalam program BPJS Kesehatan."

   Dalam masa pandemi, pegawai mendapatkan pembaruan informasi untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dari pakar kesehatan melalui forum "Taujih Pekanan Ber-AKHLAK", sehingga pegawai dapat lebih termotivasi dalam menjaga kesehatannya masing-masing. Selain terhadap pegawai, Bank juga memberikan fasilitas kesehatan kepada keluarga pegawai.

   Di samping itu, Bank Syariah Indonesia juga memiliki BSI Club, yang salah satu kegiatannya adalah olah raga yang diselenggarakan secara berkala. BSI Club juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan pegawai sekaligus media bagi pegawai untuk dapat bertukar pikiran guna meningkatkan kinerja Bank.

2. **Promosi**

   Salah satu bentuk pengembangan karier pegawai adalah melalui mekanisme promosi. Bank mengklasifikasikan proses promosi menjadi sebagai berikut:

   a. Promosi Jabatan

      Promosi jabatan adalah proses penempatan pegawai dari kelompok jabatan yang lebih rendah ke kelompok jabatan yang lebih tinggi. Peningkatan jalur karier dimulai ketika pegawai memenuhi kualifikasi jabatan sesuai dengan persyaratan posisi jabatan yang dituju.

   b. Promosi *Grade*

      Promosi *grade* adalah proses penyesuaian *grade* ke *grade* yang lebih tinggi. Bank dapat mempertimbangkan memberikan promosi *grade* kepada pegawai yang memenuhi parameter yang telah ditetapkan dan sesuai kemampuan Bank.

SUMBER DAYA MANUSIA

3. **Pelatihan Pensiun**
   Bank telah menyusun kebijakan atas program pelatihan atau pembekalan untuk pegawai yang akan memasuki masa purnabakti agar pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan kriteria peserta dan waktu yang jelas dan lebih terencana. Pelaksanaan pelatihan tersebut diikuti pula oleh pasangan pegawai.

PENILAIAN KINERJA

BSI menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai yang dilakukan secara transparan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui pencapaian kinerja pegawai.
2. Mengembangkan budaya kerja perusahaan yang positif dan berorientasi kepada pencapaian kinerja.
3. Meningkatkan *engagement* pegawai.

Proses pengelolaan kinerja dilakukan secara berkesinambungan dengan memastikan adanya keselarasan, yaitu dari penetapan *corporate goals* diturunkan menjadi target dan sasaran unit kerja hingga level individu. Dengan demikian, keselarasan strategi dari korporat ke individu terjaga serta ada keterkaitan antara kinerja individu terhadap kinerja Bank.

Siklus pengelolaan kinerja secara tahunan dimulai dari perencanaan kinerja (*performance planning*) untuk menyusun KPI (*key performance indicator*) pegawai, dilanjutkan dengan evaluasi yang dilakukan pada pertengahan tahun (*mid year review*) untuk melihat progres pencapaian KPI pegawai di periode tersebut. Selanjutnya, diakhiri dengan evaluasi akhir tahun (*performance evaluation*) untuk menilai kinerja pegawai sejak awal hingga akhir tahun periode.

Dalam proses pengelolaan kinerja pegawai, Bank mengutamakan terciptanya komunikasi 2 (dua) arah antara pegawai dan manajer agar tercipta hubungan yang harmonis dengan pemberian saran perbaikan/ umpan balik yang dapat diberikan oleh manajer untuk peningkatan kinerja pegawai. Seluruh proses pengelolaan kinerja dilakukan secara *online* melalui sistem kepegawaian (Sistem Informasi Pegawai/SIP), sehingga pegawai dapat dengan mudah mengakses maupun menyimpan seluruh informasi tentang kinerja pegawai. Umpan balik pada penilaian kinerja akhir tahun akan dijadikan rencana pengembangan pegawai di tahun berikutnya.

REMUNERASI

Dalam pengelolaan remunerasi pegawai, Bank menerapkan prinsip 3P yaitu:

1. *Pay for Performance*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya.
2. *Pay for Position*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya.
3. *Pay for Person*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya.

BSI senantiasa menaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan dan berada di atas standar upah minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank. Bank senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

TINGKAT *TURNOVER* PEGAWAI

Pada tahun 2023, jumlah pegawai yang tidak bekerja lagi di Bank sebanyak 688 orang atau 3,77% dari total *average* pegawai yang berjumlah 18.221 orang. Di antara penyebabnya karena pensiun, meninggal dunia, dan mengundurkan diri. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Alasan	2023	2022
Pensiun	61	61
Meninggal Dunia	21	26
Mengundurkan Diri	606	762
Jumlah	**688**	**849**

PELATIHAN & PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Biaya Pengembangan SDM

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, BSI telah merealisasikan anggaran pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp90,6 miliar. Untuk tahun 2024, Bank mengalokasikan biaya sebanyak Rp135 miliar.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Program Pelatihan
1.118 Program

Peserta Pelatihan
521.036 Peserta

Program Beasiswa S2
21 Peserta

Program Beasiswa S2 (BSI Scholarship Program)

Sebagai salah satu bentuk pengembangan pegawai dan *talent retention*, Bank memiliki program Beasiswa S2 bagi pegawai top *talent* Bank yang terpilih. Bagi pegawai top *talent* yang terpilih mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal pascasarjana baik di dalam dan di luar negeri di perguruan tinggi terbaik di dunia.

Pada tahun 2023, terdapat 16 pegawai yang sedang menjalankan studi beasiswa S2 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri (Top 5 Perguruan Tinggi di Indonesia) maupun di perguruan tinggi terbaik di luar negeri (Top 50 di dunia). Adapun bidang studi yang ditekuni mencakup bidang Business International, Business Administration, Management, Information Technology, dan Digital Marketing.

Selain beasiswa S2 dari Bank, BSI turut mendukung pegawai berprestasi dengan memberikan beasiswa *sponsorship*. Sepanjang tahun 2023 terdapat 5 pegawai berprestasi penerima beasiswa *sponsorship* dari BSI yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi terbaik di dalam dan di luar negeri.

Rincian pengembangan kompetensi disampaikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Level Jabatan	Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Penyelenggara
1	Senior Manager	206	*Certification* & *Socialization*	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/ peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		1.085	*Change* & *Culture Development*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		572	*General* & *Leadership*	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		17	Teknikal *Skill - Operations*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen *Marketing and Sales*, *Services*, *Branch Operation*, *Wholesale and Transaction Banking*, dan *Banking Operation*	BSI Corporate University
		237	Teknikal *Skill - Retail Banking*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Small Medium Enterprise*, *Pawning*, *Consumer*, dan Mikro	BSI Corporate University

SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Level Jabatan	Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Penyelenggara
		134	Teknikal *Skill - Support*	Untuk mengembangan kompetensi segmen *Finance and Accounting*, *Procurement*, *Fixed Asset*, *Change Management Office*, IT, *Wholesale and Retail Risk*, *Risk Management* (*Enterprise*), Audit, *Compliance* dan *Legal* serta bidang Teknologi Informasi dan *Support*	BSI Corporate University
		118	Teknikal *Skill - Wholesale Banking*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Wholesale Banking* (*corporate* dan *commercial*), *Government*, *Special Asset Management*, *Treasury*, dan *International Banking*	BSI Corporate University
	Total	**2.369**			
2	Middle Manager	664	*Certification* & *Socialization*	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/ peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		6.920	*Change* & *Culture Development*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		1.898	*General* & *Leadership*	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		340	Teknikal *Skill - Operations*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen *Marketing and Sales*, *Services*, *Branch Operation*, *Wholesale and Transaction Banking*, dan *Banking Operation*	BSI Corporate University
		1.814	Teknikal *Skill - Retail Banking*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Small Medium Enterprise*, *Pawning*, *Consumer*, dan Mikro	BSI Corporate University
		1.234	Teknikal *Skill - Support*	Untuk mengembangan kompetensi segmen *Finance and Accounting*, *Procurement*, *Fixed Asset*, *Change Management Office*, IT, *Wholesale and Retail Risk*, *Risk Management* (*Enterprise*), Audit, *Compliance* dan *Legal* serta bidang Teknologi Informasi dan *Support*	BSI Corporate University
		511	Teknikal *Skill - Wholesale Banking*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Wholesale Banking* (*corporate* dan *commercial*), *Government*, *Special Asset Management*, *Treasury*, dan *International Banking*	BSI Corporate University
	Total	**13.381**			

No.	Level Jabatan	Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Penyelenggara
3	Manager	2.670	*Certification & Socialization*	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/ peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		42.243	*Change & Culture Development*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		4.694	*General & Leadership*	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		2.171	Teknikal *Skill - Operations*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen *Marketing and Sales*, *Services*, *Branch Operation*, *Wholesale and Transaction Banking*, dan *Banking Operation*	BSI Corporate University
		12.388	Teknikal *Skill - Retail Banking*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Small Medium Enterprise*, *Pawning*, *Consumer*, dan Mikro	BSI Corporate University
		5.896	Teknikal *Skill - Support*	Untuk mengembangan kompetensi segmen *Finance and Accounting*, *Procurement*, *Fixed Asset*, *Change Management Office*, IT, *Wholesale and Retail Risk*, *Risk Management* (*Enterprise*), Audit, *Compliance* dan *Legal* serta bidang Teknologi Informasi dan *Support*	BSI Corporate University
		1.695	Teknikal *Skill - Wholesale Banking*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Wholesale Banking* (*corporate* dan *commercial*), *Government*, *Special Asset Management*, *Treasury*, dan *International Banking*	BSI Corporate University
	Total	**71.757**			
4	Officer	4.424	*Certification & Socialization*	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/ peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		116.160	*Change & Culture Development*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		1.776	*General & Leadership*	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		5.046	Teknikal *Skill - Operations*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen *Marketing and Sales*, *Services*, *Branch Operation*, *Wholesale and Transaction Banking*, dan *Banking Operation*	BSI Corporate University
		33.219	Teknikal *Skill - Retail Banking*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Small Medium Enterprise*, *Pawning*, *Consumer*, dan Mikro	BSI Corporate University

SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Level Jabatan	Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Penyelenggara
		14.716	Teknikal *Skill - Support*	Untuk mengembangan kompetensi segmen *Finance and Accounting*, *Procurement*, *Fixed Asset*, *Change Management Office*, IT, *Wholesale and Retail Risk*, *Risk Management* (*Enterprise*), Audit, *Compliance* dan *Legal* serta bidang Teknologi Informasi dan *Support*	BSI Corporate University
		3.083	Teknikal *Skill - Wholesale Banking*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Wholesale Banking* (*corporate* dan *commercial*), *Government*, *Special Asset Management*, *Treasury*, dan *International Banking*	BSI Corporate University
	Total	**178.424**			
5	Staff	2.946	*Certification* & *Socialization*	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/ peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		183.339	*Change* & *Culture Development*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		2.139	*General* & *Leadership*	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		4.455	Teknikal *Skill - Operations*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen *Marketing and Sales*, *Services*, *Branch Operation*, *Wholesale and Transaction Banking*, dan *Banking Operation*	BSI Corporate University
		43.016	Teknikal *Skill - Retail Banking*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Small Medium Enterprise*, *Pawning*, *Consumer*, dan Mikro	BSI Corporate University
		16.433	Teknikal *Skill - Support*	Untuk mengembangan kompetensi segmen *Finance and Accounting*, *Procurement*, *Fixed Asset*, *Change Management Office*, IT, *Wholesale and Retail Risk*, *Risk Management* (*Enterprise*), Audit, *Compliance* dan *Legal* serta bidang Teknologi Informasi dan *Support*	BSI Corporate University
		2.777	Teknikal *Skill - Wholesale Banking*	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Wholesale Banking* (*corporate* dan *commercial*), *Government*, *Special Asset Management*, *Treasury*, dan *International Banking*	BSI Corporate University
	Total	**255.105**			
	Grand Total	**521.036**			

DEMOGRAFI KARYAWAN

Rincian demografi karyawan disampaikan pada "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dalam rangka menjadikan BSI sebagai tempat kerja yang nyaman bagi pegawainya, Bank telah menyusun aturan mengenai Keluh Kesah melalui Pasal 55 Peraturan Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023-2025. Peraturan ini menjadi pedoman penyampaian dan penyelesaian permasalahan keluh kesah dan/atau perselisihan hubungan industrial dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Hal tersebut sejalan dengan semangat BSI terkait penanganan keluh kesah. Setiap pegawai memiliki hak untuk menyampaikan yang berkaitan dengan hubungan industrial selama memenuhi persyaratan kepada atasan langsungnya. Setiap keluh kesah yang disampaikan, diupayakan dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Mekanisme penyampaian dan penyelesaian Keluh Kesah adalah sebagai berikut:

Tahapan
Mekanisme Penyelesaian
Setuju atau Tidak
Tahap 1
Mengisi Formulir Keluh Kesah
Pertemuan dengan Atasan Langsung
Tahap 2
Mengisi Formulir Keluh Kesah Tahap 2
Pertemuan dengan atasan dari atasan langsung
Tahap 3 (Perundingan Bipartit)
Mengisi Formulir Keluh Kesah Tahap 3
Pendampingan Serikat Pekerja (apabila diperlukan)
Pertemuan dengan kepala unit kerja atau regional head sepengetahuan unit pengelola sumber daya manusia
Tahap 4
Bilamana persoalan tersebut belum juga dapat diselesaikan secara internal (bipartit), maka upaya penyelesaian dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Disnaker s.d PHI
Selesai

PERENCANAAN PENGELOLAAN SDM TAHUN 2024

Pada tahun 2024, fokus pengelolaan SDM selain pada peningkatan produktivitas SDM juga pada pengembangan *global banking capabilities* untuk mendukung visi Bank menjadi *top 10 global Islamic bank*. Terdapat berbagai *improvement* dan inovasi pada aspek *human capital* untuk meningkatkan *engagement* pegawai seperti pengembangan sistem HC (HC *Information system*), pengembangan program-program *talent*, penyusunan *rewards program* yang inovatif serta program-program penguatan budaya kerja.

Teknologi Informasi

Pengelolaan TI di lingkungan BSI fokus untuk memastikan keandalan dan keamanan, khususnya pada stabilisasi sistem, standardisasi infrastruktur dan *security improvement*.

Bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank"), Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu penggerak bisnis Bank. Terutama, dalam penyediaan teknologi dan infrastruktur yang modern untuk mendukung terobosan bisnis sesuai kebutuhan pasar. Teknologi yang cepat, tepat, dan andal dihadirkan untuk mendukung BSI mencapai visi menjadi "Top 10 Bank Syariah Global" berdasarkan kapitalisasi pasar pada tahun 2025.

Pengelolaan TI di lingkungan Bank fokus untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem BSI, khususnya pada stabilisasi sistem, standardisasi infrastruktur dan *security improvement* ke depan. Bank melakukan transformasi dengan menyiapkan teknologi terkini yang siap untuk pengembangan di masa depan.

Bank melakukan digitalisasi proses untuk meningkatkan layanan melalui jaringan kantor. Pada proses pengembangan digital, dilakukan pengembangan dengan metode *agile* yang dapat merespons kebutuhan pasar dengan cepat.

PROFIL KEPALA TI

Organisasi pengelolaan TI dipimpin oleh Direktur Teknologi Informasi Saladin D. Effendi. Profil lengkapnya disajikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

ORGANISASI PENGELOLA

Organisasi pengelolaan TI di lingkungan BSI berada di bawah Direktorat IT, yang didukung oleh struktur di bawahnya: IT Strategic Planning Group (ISG), IT Operation Group (IOG), IT & Digital Development Group (IDG), Chief Information Security Office Group (CSO), IT Application Support Group (ASP), Data & Decision Managament Group (DDM), serta Senior Operational Risk Head (SORH)/Decentralized Compliance and Operational Risk (DCOR) IT.

IOG menjalankan tugas operasional TI, sementara aktivitas perencanaan strategi dilakukan oleh ISG. Untuk pengembangan TI dilakukan oleh IDG, pengujian atas aplikasi dilakukan ASP, pengamanan informasi TI dijalankan oleh CSO, sedangkan struktur data sistem/ aplikasi yang akan dikembangkan di lakukan oleh DDM.

Implementasi operasional TI yang dimulai dari penetapan strategi, perencanaan, pengembangan dan penanganan masalah, menjadi tanggung jawab dari unit kerja ISG, IDG, IOG, CSO, dan DDM, sedangkan fungsi *compliance assurance* dan *operational risk* IT terdapat pada SORH berkoordinasi dengan DCOR IT.

Rincian pembagian peran dan tanggung jawab organisasi TI diurai dalam tabel berikut.

Unit Kerja	Peran dan Tanggung Jawab
IT Strategic Planning Group	1. Memastikan perencanaan, Arsitektur IT dan pelaksanaan proyek inisiatif strategis TI yang sesuai dengan rencana Bank. 2. Memastikan terhadap pelaksanaan *project* sesuai dengan *scope*, *timeline* dan *budget* yang tersedia. 3. Memastikan terlaksana tata kelola IT yang baik 4. Perencanaan *Capacity Planning* Infrastruktur TI
IT Operation Group	1. Memastikan ketersediaan infrastruktur TI dan kelangsungan operasional. 2. Melaksanakan *business continuity management - disaster recovery plan.* 3. Menjaga ketersediaan jaringan untuk mengelola operasional.
IT Digital & Development Group	1. Memastikan pelaksanaan aktivitas pengembangan TI sesuai dengan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis bank serta sesuai ketentuan Bank. 2. Memastikan pelaksanaan pengembangan IT mencakup mengelola spesifikasi fungsional dan teknis, mendefinisikan dan merancang solusi, mengelola *developers*, mengelola *development* dan unit *testing*, menyediakan *support* untuk *application deployment/releases* sesuai dengan kebijakan dan prosedur IT 3. Memastikan pelaksanaan perencanaan (*design*), pengembangan (*development*), *system integration test* dan perbaikan/penyempurnaan *platform*.
Chief Information Security Officer Group	1. Bertanggung jawab terhadap keamanan informasi TI, termasuk di dalamnya berperan dalam proses perencanaan dan pengembangan TI dari sisi keamanan informasi. 2. Menangani insiden keamanan informasi (proteksi, *response*, dan *recovery cyber security*).

TEKNOLOGI INFORMASI

Unit Kerja	Peran dan Tanggung Jawab
IT Application Support Group	1. IT Release Management, melakukan proses RCB 2. IT Testing, menyiapkan *draft test script* uji coba SIT 3. IT Quality Assurance (IT QA), menyiapkan Berita Acara UAT dan hasil UAT 4. IT Performance & Automation Test, melakukan koordinasi dengan pihak ketiga pelaksanaan *stress test* dan melaksanakan *automation test*, serta mendokumentasikan hasil uji coba ke dalam SIT *Report* 5. IT Environment Test, melakukan koordinasi dengan IT Operation dalam menyiapkan *environment testing* dan *Staging*/PTR 6. IT Application Service, melakukan *root cause analyst* dan perbaikan pengembangan sistem *end to end* atas insiden dan problem yang terjadi.
Data & Decision Management Group	1. Memberikan *review* dan rekomendasi terkait struktur data sistem/aplikasi yang akan dikembangkan. 2. Memastikan sistem/aplikasi yang dikembangkan memiliki validasi yang memadai, dan sesuai dengan kebutuhan pelaporan kepada regulator yang berlaku.
Senior Operational Risk Head (SORH)/Decentralized Compliance and Operational Risk (DCOR) IT	1. Memberikan *review* dan *business process* unit kerja dibawah koordinasinya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku mengacu pada ketentuan internal bank maupun eksternal. 2. Memberikan *risk opinion* atas isu/permasalahan kegitan operasional. 3. Memastikan pelaksanaan *control testing* (CT) pada setiap unit kerja. 4. Memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan. 5. Mengkoordinir, memastikan dan memonitor unit kerja kelolaan dalam menindaklanjuti temuan/permintaan audit serta memberikan *advice* atas penyelesaian/tindaklanjut temuan audit oleh unit kerja kelolaan/terkait. 6. Membantu kelancaran proses audit internal dan eksternal (termasuk: BI, OJK, BPK, KAP, dll.) bersama dengan Unit kerja Internat Audit

ROADMAP DI BIDANG TI

Perencanaan dan pengembangan TI, dalam hal ini teknologi dan infrastruktur, dilaksanakan sesuai dengan visi Bank untuk mendukung strategi BSI 2024, yang salah satunya terkait dengan modernisasi *core banking*, serta penguatan bisnis dan *digital banking*. Dalam mendukung strategi tersebut, BSI dengan menerapkan dan mengimplementasikan yang tercantum pada 7+ IT Stars (*Strategic Action* dan *Programs*) di antaranya:

1. *Security, Risk and Fraud*
   Menetapkan dan meningkatkan perimeter keamanan, manajemen risiko, penipuan & AML untuk melindungi transaksi dan proses nasabah dan perbankan.
2. *Core System Modernization*
   Pelaksanaan inisiatif modernisasi *core banking* untuk menyederhanakan sistem *core banking*, meningkatkan fungsi *core*, dan memungkinkan *core banking* generasi berikutnya mendukung produk dan layanan perbankan yang kaya.
3. *Infrastructure & Connectivity*
   Pembentukan dan peningkatan infrastruktur dan alat konektivitas, aplikasi dan *hardware* yang menggabungkan berbagai teknologi untuk mendukung bisnis bank.
4. *Integrated Data Management Monitoring and Reporting*
   Pembentukan dan peningkatan *enterprise data warehouse* dan big data analisis untuk mengaktifkan *data-as-a-service* serta alat manajemen informasi yang digunakan karyawan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan secara mandiri.
5. *Organization, Corporate Support & Internal Improvements*
   Pembentukan dan peningkatan fungsi inti perusahaan untuk mendukung operasional Bank dan proses internal serta perbaikan organisasi.
6. *Unified Platform & Customer* 360
   Penggunaan satu *platform* utama untuk menampung seluruh kapabilitas alur kerja yang dibantu oleh peningkatan pusat data dan layanan nasabah terpadu (*customer relationship*) pada area *sales*, *marketing*, dan *campaign management* untuk meningkatkan *engagement* pada nasabah.
7. *Digital Expansion & Open Banking*
   Peningkatan, dan perluasan jaringan distribusi digital, *sales*, layanan *omni-channel* termasuk dengan peningkatan kapabilitas integrasi dengan berbagai metode dan strategi untuk memungkinkan *open banking* dengan konektivitas tanpa batas dan aman secara internal dan eksternal.

8. *Environment, Social & Governance (ESG)*
   Pelaksanaan strategi berkelanjutan perusahaan dalam melakukan pengembangan (investasi) yang memberikan nilai tambah di aspek lingkungan, sosial, *governance* (tata kelola perusahaan) serta dapat menjadi pelopor (*agent of change*) ekonomi syariah di Indonesia.

TATA KELOLA DI BIDANG TI

Proses pengembangan TI dan *software* menggunakan metode *hybrid*, yaitu menggunakan *agile* dan *waterfall*. Metode *agile* untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan *time to market*, seperti *mobile banking*, *internet banking* dan API. Metode ini dijalankan dengan menggunakan pembagian *sprint* dengan target di setiap *sprint*.

Framework yang digunakan dalam *agile methodology* di BSI adalah SCRUM. Bank melakukan pembagian fase yang pengembangannya dimulai dari *requirement*, *design*, *development*, *testing*, *Release Control Board* (RCB), *deployment* ke *environment production*, hingga *Post Implementation Review* (PIR).

Mekanisme Identifikasi Disrupsi (Gangguan)

Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi disrupsi atau gangguan. Hal itu diatur dalam ketentuan umum terkait Business Continuity Management (BCM) dan secara khusus dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Business Continuity Plan (BCP).

Jika terjadi gangguan pada TI, Bank mengatasinya berdasarkan tahapan identifikasi kejadian *disaster* agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai hasil identifikasi dan kewenangan struktur organisasi *Crisis Management Team* (CMT).

Strategi Keamanan Sistem Siber (*Cyber Security*)

BSI menerapkan semua kebijakan dan standar prosedur TI di Bank, sekaligus memastikan setiap informasi yang dimiliki oleh unit kerja pengguna TI mendapatkan perlindungan yang baik terhadap semua gangguan yang dapat menyebabkan kerugian akibat bocornya data atau informasi penting. Bank memastikan pengawasan keamanan yang memadai dalam setiap pengembangan atau modifikasi sistem TI dan memastikan ketahanan dan keamanan siber Bank secara independen terhadap fungsi pengelolaan operasional TI.

Penerapan prinsip dasar keamanan siber di BSI, antara lain mencakup:
1. Informasi adalah aset
2. Kesesuaian dengan risiko
3. Kepatuhan terhadap peraturan
4. Pemberian persetujuan
5. Beradaptasi dan terukur
6. Sistem aman secara desain
7. Pertahanan yang berlapis
8. Pemisahan tugas dan pembatasan akses
9. Akuntabilitas
10. Audit
11. Perbaikan berkesinambungan

TEKNOLOGI INFORMASI

Kriteria dalam pengendalian keamanan siber yang digunakan adalah:
1. Kerahasiaan (*Confidentiality*)
2. Keutuhan (*Integrity*)
3. Ketersediaan (*Availability*)

Selain itu, BSI telah membentuk unit kerja *Chief Security Officer Office Group* (CSO) yang mengelola keamanan siber dengan kapabilitas sebagai berikut:
1. *Security Project* & QA
2. *Application Identity Management*
3. *Network Access* & *Data Protection*
4. IT *Security Services*
5. IT *Security Operations*
6. *Security Operation Center*

BSI juga melakukan penerapan *multi layer defense* berdasarkan pengamanan sistem, pengamanan perimeter, pengamanan aplikasi, yang diantaranya mencakup:
1. Pengamanan Sistem pada R1 (*Server*) dan R3 (*Endpoint*) *Application Identity Management*
2. Pengamanan Perimeter pada Internet, *Leased Line*, VPN *Site to Site*, dan Intranet
3. Pengamanan Aplikasi Web App & Mobile App, Bank Apps, dan email

Selain itu, dari sisi mitigasi awal, BSI telah menerapkan aktivitas *Security Operation Center* serta aktivitas *Threat Intelligence*. Tujuannya adalah untuk pencegahan serangan siber.

Strategi/Proses Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery*)

Pada prinsipnya, kebutuhan Bank saat terjadi kondisi krisis adalah menciptakan bisnis kembali ke kondisi normal. Proses pemulihan bencana (*disaster recovery*) merupakan integrasi antara *Emergency Respon* (ER), *Business Continuity* (BC), dan *Data Recovery* (DR).

Bank telah memiliki prosedur penanganan krisis, di antaranya meliputi kegiatan identifikasi gangguan, proses deklarasi krisis, hingga aktivasi kegiatan pemulihan. Alur prosedur *Crisis Management Plan* adalah sebagai berikut:

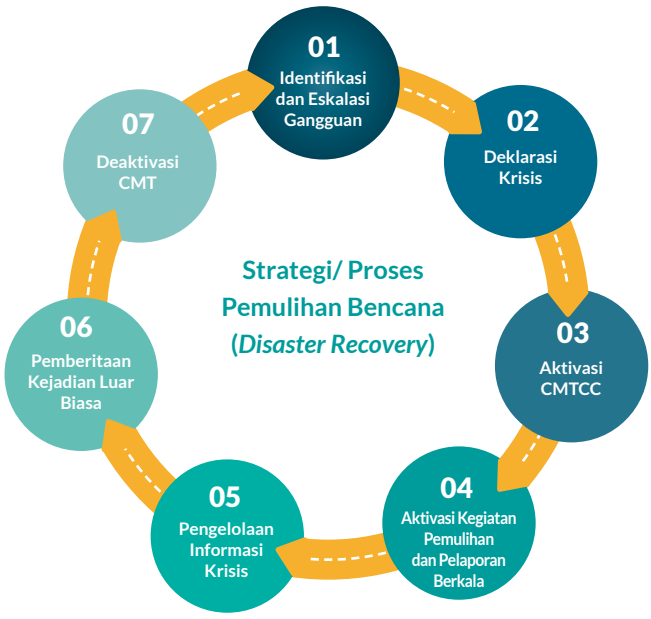
Strategi/ Proses Pemulihan Bencana (Disaster Recovery)
01 Identifikasi dan Eskalasi Gangguan
02 Deklarasi Krisis
03 Aktivasi CMTCC
04 Aktivasi Kegiatan Pemulihan dan Pelaporan Berkala
05 Pengelolaan Informasi Krisis
06 Pemberitaan Kejadian Luar Biasa
07 Deaktivasi CMT

Penjelasan detail terkait prosedur penanganan krisis sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Eskalasi Gangguan
   a. Pegawai pihak terdampak mendeteksi adanya gangguan Kejadian Luar Biasa dan melakukan upaya perbaikan.
   b. Pegawai/pihak terdampak selanjutnya membuat laporan dan melakukan eskalasi kepada koordinator tim terkait.
   c. Koordinator Tim CM, ER, BC, DR melakukan evaluasi dan analisa dari laporan Kejadian Luar Biasa. Dalam melakukan evaluasi dan analisa, Koordinator Tim terkait dapat berkonsultasi dengan BCM *Command Center*
   d. Jika berpotensi menjadi krisis, maka Koordinator Tim terkait melakukan eskalasi kepada Ketua CMT.
2. Deklarasi Krisis
   a. Ketua CMT mendapat laporan analisa gangguan Kejadian Luar Biasa yang berpotensi menjadi krisis
   b. Verifikasi terhadap laporan gangguan yang berpotensi menjadi krisis tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi. Dalam melakukan verifikasi, Ketua CMT setempat dapat melakukan konsultasi kepada CMT/Ketua CMT level di atasnya.
   c. Jika gangguan tersebut tidak dapat ditangani dan berpotensi menjadi krisis, maka Ketua CMT akan melakukan "Deklarasi Krisis" jika dibutuhkan Tindakan.
3. Aktivasi *Crisis Management Team Crisis Center* (CMTCC)
   a. CM *Service* selaku penyelenggara, mengaktifkan CMTCC Virtual atau Fisik setelah mendapatkan instruksi dari Ketua CMT.
   b. CMT dapat melakukan koordinasi di CMTCC Virtual atau jika diperlukan bertemu maka dilakukan pada CMTCC Fisik.
   c. Jika CMTCC Fisik Utama bisa digunakan, maka CMT akan berkumpul di ruangan CMTCC. Namun apabila CMTCC Fisik Utama tidak bisa digunakan, maka CMTCC Fisik Alternatif perlu diaktifkan.
4. Aktivasi Kegiatan Pemulihan dan Pelaporan Berkala
   a. Ketua CMT memimpin, mengoordinasikan, dan menginstrusikan Kegiatan Pemulihan.
   b. Koordinator Tim Komunikasi Internal & Eksternal, Koordinator Tim CM, ER, BC, DR menjalankan rencana komunikasi, pemulihan serta melaporkan perkembangannya kepada CM/ER/BC/DR *Services*, Wakil Ketua CMT, dan Ketua CMT.
   c. CM/ER/BC/DR Services bertugas untuk memandu dan memberikan saran dalam kegiatan pemulihan kepada Koordinator Tim Komunikasi, Koordinator Tim CM, Koordinator Tim ER, Koordinator Tim BC, dan Koordinator Tim DR.
   d. Setelah mendapatkan laporan perkembangan, CMT turut serta memberikan saran dalam kegiatan pemulihan.
5. Mekanisme Pengelolaan Informasi Krisis
   a. Pihak terkait menyampaikan adanya artikel negatif di media yang berisiko terhadap reputasi Bank dan dampak yang besar.
   b. Unit kerja yang terkait dengan substansi atau hal yang ada dalam artikel negatif tersebut menyusun kronologis.
   c. Dalam hal diperlukan maka unit *reviewer* dapat memberikan *review* atas substansi dari artikel negatif maupun kronologis tersebut.
   d. Artikel negatif, kronologis, dan *review* tersebut kemudian dikaji dan dianalisa oleh Koordinator Tim Komunikasi Internal dan/atau Eksternal.
   e. Koordinator Tim Komunikasi Internal dan/atau Eksternal lalu mengeluarkan usulan Strategi dan Taktik Pengelolaan informasi dan meminta persetujuan Ketua CMT.
   f. Setelah mendapatkan persetujuan, Ketua CMT memastikan pelaksanaan Strategi dan Taktik. Kemudian Koordinator Tim Komunikasi Internal dan/atau Eksternal bersama dengan Pihak Terkait melakukan eksekusinya.
   g. Koordinator Tim Komunikasi Internal dan/atau Eksternal melakukan eksekusi dan terus melakukan *monitoring* dan pelaporan.
6. Pemberitaan Kejadian Luar Biasa/Komunikasi Krisis
   a. Ketua CMT Kantor Pusat melakukan diskusi dan memerintahkan pembuatan Pemberitaan Kejadian Luar Biasa.
   b. Koordinator Tim Komunikasi Eksternal Kantor Pusat lalu mengumpulkan informasi terkait kebutuhan komunikasi eksternal dari Pihak Terkait.
   c. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, Tim Komunikasi Eksternal Kantor Pusat menyusun draf siaran pers, kemudian meminta persetujuan kepada Ketua CMT Kantor Pusat.
   d. Setelah draf siaran pers disetujui, Koordinator Tim Komunikasi Eksternal Kantor Pusat akan mempertimbangkan untuk menyelenggarakan Konferensi *Press* atau melakukan siaran pers.
   e. Jika melakukan konferensi pers, maka Juru Bicara Bank yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menyampaikan dan menanggapi pesan dari pihak eksternal.

TEKNOLOGI INFORMASI

7. Deaktivasi *Crisis Management Team* (CMT)
   a. Tim Komunikasi Eksternal, Koordinator Tim CM, Koordinator Tim ER, Koordinator Tim BC, Koordinator Tim DR menyelesaikan kegiatan komunikasi dan pemulihan pada lokasi yang terdampak.
   b. Ketua CMT melakukan evaluasi pasca krisis dan terus mengkomunikasikannya kepada CMT.
   c. Setelah krisis dianggap berakhir, maka pada level Region/Area/Cabang/KLN, Ketua CMT setempat mendeklarasikan berakhirnya krisis dan operasional kembali *as usual*.
   d. Pada level Kantor Pusat, Ketua CMT Kantor Pusat mendeklarasikan berakhirnya krisis lalu melanjutkan serah terima pengawasan *business as usual* kepada *Head of* BCM.

Sistem Pelaporan kepada Direksi

Berkenaan dengan pelaporan kepada Direksi terkait dengan dinamika di bidang TI, Bank telah memiliki prosedur, seperti tergambar di bawah ini.

Tim 1 s.d. 5
Pra Crisis (Insiden IT)

- Menerima Laporan Insiden IT
- Melakukan Deteksi Problem
- Tindak lanjut penanganan insiden
- Update ke DIR IT, DIR RISK, SOR1 IT dan BCM
- Penonaktifan Layanan (sesuai kewenangan)
- Mempersiapkan *Holding Statement & Pelaporan*
- Mempersiapkan *Switch Over*
- SteerCo BCM
- **Deklarasi krisis & Pengaktifan CMT**
- Keputusan *switch over*

Ketua CMT dan Head of BCM

- Setelah menerima *update* dari GH IOG/CSO, Ketua CMT dan/atau Head of BCM akan melakukan analisa singkat
- Dengan pertimbangan Analisa, makan dideklarasi/ diaktifkan ***Crisis Management Team* (CMT)**

Ketua CMT dan Head of BCM

Melakukan koordinasi dengan anggota CMT di Command Center

Anggota CMT

1. IOG
2. HCP
3. HCS
4. CSO
5. BCM
6. DSG
7. CSG
8. CFA
9. PFA
10. SPM
11. ASP
12. Unit *Support*

Alur Proses Eskalasi *Crisis* Insiden IT

Crisis Insiden IT untuk Aplikasi Kritikal

Ketua CMT dan Head of BCM

Anggota CMT

Ketua CMT dan Head of BCM:
Melaporkan kepada *Management* dan sebagai *Lead Crisis* Insiden IT

IOG / CSO / ASP:
- Penyelesaian *Fixing / Switch Over*
- Membuat Laporan secara tertulis ke Regulator terkait insiden TI:
  IOG -> Insiden *Non Cyber*
  CSO -> Insiden *Cyber*
  sesuai ketentuan:
  - Maks. 5 HK OJK setelah insiden terjadi (sesuai POJK 11 tahun 2022)
  - Maks. 3 HK ke BI terkait sistem pembayaran (OPG / TGM / DBO) setelah insiden terjadi (sesuai PBI 23/6/PBI/2021)

SOR1 IT: Supervisi pada penyelesaian & Verifikasi Pelaporan

ISG: Koordinator PMO

CSG: *Courtesy & Press Release*

CCG: Penanganan keluhan nasabah melalui *contact center* dan media

HCP & HCS: Komunikasi Internal & Deployment Pegawai

SPM & CFA: Keuangan

DSG: Koordinator Jaringan (Region, Area dan Cabang)

CPG: *Support Compliance*

Ketua CMT dan Head of BCM

GH IOG/CSO SOR1 IT

IOG/CSO:
Melaporkan ke Ketua dan Wakil Ketua CMT bahwa layanan sudah kembali normal

SOR1 IT:
Melakukan evaluasi kegiatan sesuai alur proses eskalasi

BoD

Ketua CMT dan Head of BCM

Anggota CMT

Ketua CMT dan Head of BCM:
Menonaktifkan CMT dan menyusun laporan insiden

CSG & CCG: Melakukan publikasi bahwa layanan telah kembali normal

SME*): *Research* RCA
SOR1 IT: Supervisi *Research* RCA

*) *Subject Matric Expert* (SME) adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam bidang pekerjaan sesuai bidangnya

BUSINESS AS USUAL DAN PRESS RELEASE

TEKNOLOGI INFORMASI

Alur Proses Eskalasi Insiden IT

Insiden TI untuk Aplikasi Kritikal

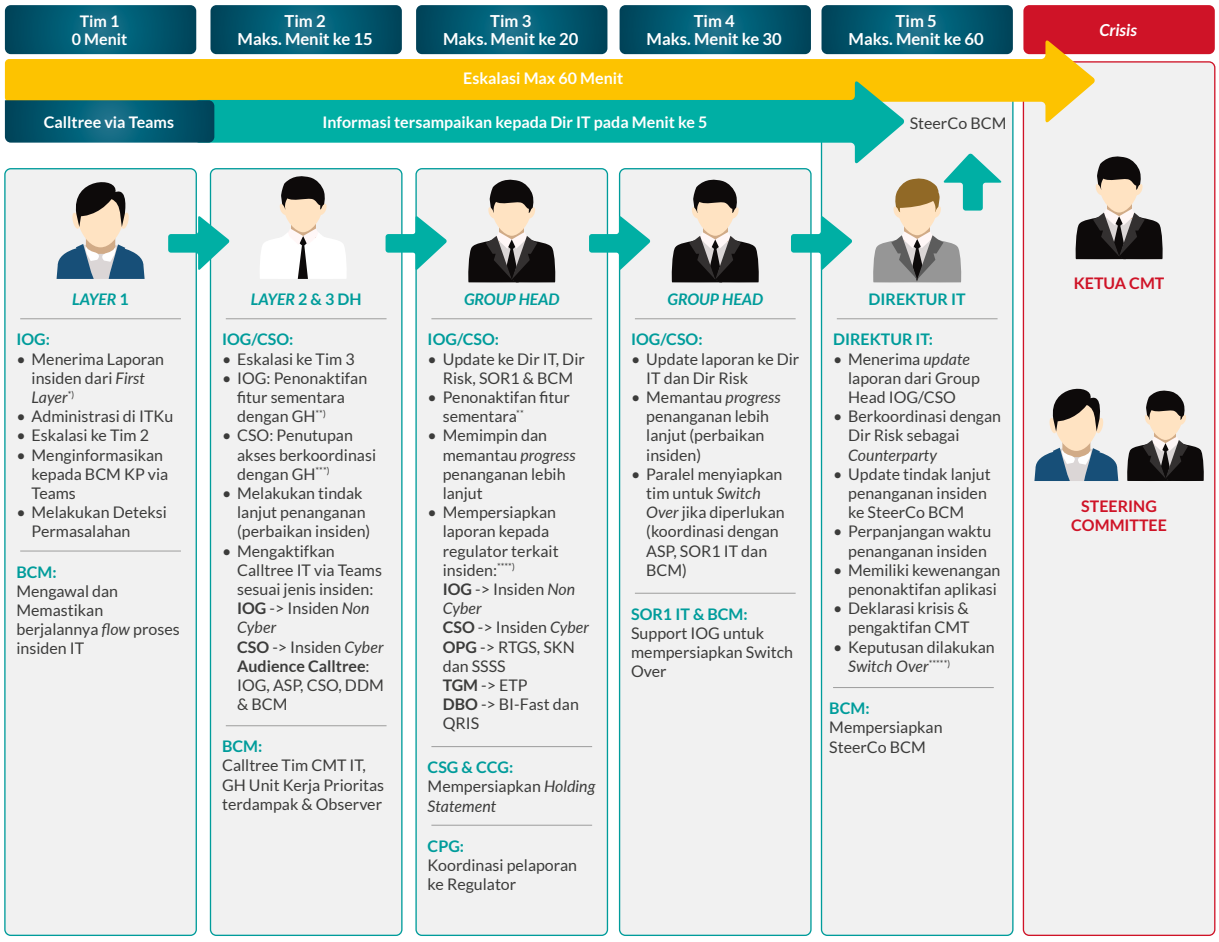
Tim 1
0 Menit
Tim 2
Maks. Menit ke 15
Tim 3
Maks. Menit ke 20
Tim 4
Maks. Menit ke 30
Tim 5
Maks. Menit ke 60
Crisis
Eskalasi Max 60 Menit
Calltree via Teams
Informasi tersampaikan kepada Dir IT pada Menit ke 5
SteerCo BCM
LAYER 1
LAYER 2 & 3 DH
GROUP HEAD
GROUP HEAD
DIREKTUR IT
KETUA CMT
STEERING COMMITTEE
IOG:
• Menerima Laporan insiden dari First Layer*)
• Administrasi di ITKu
• Eskalasi ke Tim 2
• Menginformasikan kepada BCM KP via Teams
• Melakukan Deteksi Permasalahan
BCM:
Mengawal dan Memastikan berjalannya flow proses insiden IT
IOG/CSO:
• Eskalasi ke Tim 3
• IOG: Penonaktifan fitur sementara dengan GH**)
• CSO: Penutupan akses berkoordinasi dengan GH***)
• Melakukan tindak lanjut penanganan (perbaikan insiden)
• Mengaktifkan Calltree IT via Teams sesuai jenis insiden:
IOG -> Insiden Non Cyber
CSO -> Insiden Cyber
Audience Calltree: IOG, ASP, CSO, DDM & BCM
BCM:
Calltree Tim CMT IT, GH Unit Kerja Prioritas terdampak & Observer
IOG/CSO:
• Update ke Dir IT, Dir Risk, SOR1 & BCM
• Penonaktifan fitur sementara**
• Memimpin dan memantau progress penanganan lebih lanjut
• Mempersiapkan laporan kepada regulator terkait insiden:****)
IOG -> Insiden Non Cyber
CSO -> Insiden Cyber
OPG -> RTGS, SKN dan SSSS
TGM -> ETP
DBO -> BI-Fast dan QRIS
CSG & CCG:
Mempersiapkan Holding Statement
CPG:
Koordinasi pelaporan ke Regulator
IOG/CSO:
• Update laporan ke Dir IT dan Dir Risk
• Memantau progress penanganan lebih lanjut (perbaikan insiden)
• Paralel menyiapkan tim untuk Switch Over jika diperlukan (koordinasi dengan ASP, SOR1 IT dan BCM)
SOR1 IT & BCM:
Support IOG untuk mempersiapkan Switch Over
DIREKTUR IT:
• Menerima update laporan dari Group Head IOG/CSO
• Berkoordinasi dengan Dir Risk sebagai Counterparty
• Update tindak lanjut penanganan insiden ke SteerCo BCM
• Perpanjangan waktu penanganan insiden
• Memiliki kewenangan penonaktifan aplikasi
• Deklarasi krisis & pengaktifan CMT
• Keputusan dilakukan Switch Over*****)
BCM:
Mempersiapkan SteerCo BCM

*) *Command Center* BCM dan IT, OPG, CCG, DBO, CSO, Unit Pengguna IT
**) IOG memiliki kewenangan penonaktifan sementara fitur/layanan (Tim 2 untuk Fitur Eksternal, Tim 3 untuk fitur Internal), dan IOG menginformasikan kepada unit kerja terdampak
***) CSO memiliki kewenangan penutupan akses koneksi dengan pihak ke-3
****) Laporan Notifikasi Awal Insiden ke Regulator OJK yaitu max 24 jam setelah insiden diketahui sesuai POJK 11 tahun 2022 dan Notifikasi awal ke BI terkait sistem pembayaran (OPG/TGM/DBO) max 1 jam setelah insiden sesuai PBI 23 Tahun 2021. IOG/CSO membuat laporan ke Regulator secara tertulis terkait insidentil TI sesuai ketentuan 5 HK ke OJK dan/atau max 3 HK ke BIO terkait sistem pembayaran (OPG/TGM/DBO) setelah insiden terjadi
*****) Dalam hal diputuskan Switch Over oleh Dir IT sebagai solusi penanganan insiden, maka GH IOG melakukan *Switch Over* maksimal menit ke 30
SOR1 IT - DCOR Ops : Mengevaluasi Kegiatan

INVESTASI DI BIDANG TI

Pada Tahun 2023, BSI telah melakukan investasi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp968 miliar yang diperuntukkan bagi pemenuhan kapabilitas *digital banking, enterprise & surrounding application, digitalisasi & office automation*, peningkatan fitur pada aplikasi *existing* serta belanja infrastruktur TI dan perangkat *security* dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas TI.

Pengembangan dan Inovasi TI Tahun 2023

Pengembangan TI dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun, yang diselaraskan dengan visi dan misi Bank. Berikut adalah daftar pengembangan dan inovasi yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2023.

No.	Uraian	Tujuan/Manfaat	Status
1	*Agent Banking* – BSI *Smart*	Pengembangan layanan *agent banking* (BSI *Smart Agent*) menggunakan EDC, *Mobile Banking* dan *Web* sebagai solusi *alternative channel*	*Live*
2	*Enhancement Branch Delivery System* – EXA	Pengembangan *features*/ layanan *Branch Delivery System* untuk mewujudkan *single branch delivery system* dan *offloading features* layanan cabang di *Core Banking*	*Live*
3	BSI *Collection System*	Implementasi New BSI *Collection System* & Integrasi dengan beberapa sistem *surrounding*	*Live*
4	*New Cash Management System*	Layanan *internet banking* berbasis *web* bagi nasabah perusahaan atau institusi yang memberikan akses secara langsung atas rekeningnya di Bank dalam rangka pengelolaan keuangan baik secara finansial maupun non-finansial	*Live*
5	BSI *Thru Account*	Pengembangan *Phase* 2.2 atas *Project* BSI *Thru Account* berupa penambahan *Channel* ATM *Off Us* dan EDC serta penambahan layanan *Payment* & *Purchase* pada *All Channel* yang tersedia	*Live*
6	*Audit Management System* (AMS)	Pengembangan AMS, pengembangan sistem yang memiliki fungsi mengintegrasikan *work flow* aktivitas audit, Investigasi Audit dan QA Audit, dimana AMS dapat membuat kegiatan audit menjadi lebih cepat, efisien dan efektif	*Live*
7	EA *Tools Architecture*	EA *Tools* untuk *Digital Enterprise Architecture* (DEA) BSI dan *Tools Project Management*	*Live*
8	Penambahan Infrastruktur *Network The Tower*	Penambahan infrastruktur *Network The Tower*	*Live*
9	Penambahan *Rackmount* DC & DRC	Penambahan kapasitas & *hardware rackmount* untuk DC Rempoa & DRC Sigma	*Live*
10	*Renewal License Corebanking*	Pengembangan terhadap *existing corebanking* untuk mendukung kapabilitas bisnis & operasional yang semakin baik	*Live*

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibutuhkan untuk meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* pegawai serta penyelarasan strategi TI dalam mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan IT Strategy di BSI. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan juga dalam rangka membentuk personel yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, loyalitas kerja.

Peningkatan personel TI tersebut dilakukan dengan melakukan *training* sertifikasi, BSMR, webinar dan taujih. Berikut adalah daftar pengembangan yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2023.

No.	Nama Pelatihan
1	Pelatihan IT Architecture (TOGAF)
2	Pelatihan COBIT
3	Pelatihan Project Management Professional – PMP
4	Pelatihan AGILE SCRUM FOUNDATION
5	Pelatihan PRINCE2 AGILE FOUNDATION
6	Pelatihan ITIL 4.0 Foundation Certified
7	Pelatihan ITIL Specialist Create, Deliver and Support Certified
8	Pelatihan Certified Ethical Hacker
9	Pelatihan Devops - Docker Jenkins Gitlab
10	Pelatihan Software Engineering : 1. Design Pattern and Application Architecture 2. Tools Development (redis, kafka, activeMQ)

TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Nama Pelatihan
11	Pelatihan Certified Associate in Project Management (CAPM)
12	Pelatihan Professional in Business Analysis
13	Pelatihan AWS Certified Solution Architect Assoicate
14	Pelatihan Docker
15	Pelatihan ISTQB Agile Tester
16	Pelatihan PHYTON DATA SCIENCE
17	Pelatihan Devops - Docker Jenkins Gitlab
18	Pelatihan Platform Strategy for Business with Google Cloud Foundation
19	Pelatihan Auditor ISO 9001 : 2015
20	Pelatihan CCNP Enarsi
21	Pelatihan Red Hat Certified System Administrator
22	Pelatihan Linux system administrator based on RHCSA 7
23	Pelatihan Analyzing Data with SQL Server Reporting Services
24	Pelatihan Maria DB Administration
25	Pelatihan EXIN Privacy & Data Protection Foundation
26	Pelatihan Certified International Specialist Data Modelling (CISDM) PASAS using Python
27	Pelatihan BABOK V3.0
28	Pelatihan Bussiness Intelegence Course
29	Pelatihan Machine Learning Specialization (72 *Hours*)
30	Training and Certified Entry Certificate in Business Analysis (ECBA)

STRATEGI PENGEMBANGAN TI 2024

Dalam rangka mendukung pengembangan TI secara berkesinambungan, Unit Kerja Teknologi Informasi telah menyiapkan dan melaksanakan beberapa strategi, yang antara lain mencakup:

No.	Uraian	Tujuan/Manfaat
1	*Enhancement Revamp* BSI *Mobile*	Pengembangan dan perluasan revamp BSI Mobile yang lebih baik dan modern. Termasuk pengembangan berbagai fitur, untuk memudahkan *user friendly* dalam menggunakan aplikasi.
2	*Enhancement Retail Bond System*	Pengembangan sistem pengelolaan proses bisnis untuk transaksi surat berharga yang *seamless* dan otomatis. Didukung pengembangan lanjutan Sistem Kustodi untuk mendukung transaksi surat berharga yang dicatat oleh bank.
3	*Enhancement Big Data & Data Analytics*	Pengembangan dan perluasan kapabilitas teknologi *Big Data & Data Analytics* dengan memanfaatkan data untuk *analytic & decision making* sebagai data master serta pendukung layanan sesuai kebutuhan nasabah secara otomatis.
4	*Enhancement Master Data Management*	Pengembangan sistem IT untuk dapat meningkatkan kapabilitas untuk memiliki satu tampilan data nasabah (*Master Data*) yang valid dan konsisten di semua sistem dan aplikasi, untuk menghindari duplikasi dan inkonsistensi data nasabah.
5	*Enhancement* Baas	Pengembangan sistem QRIS dan API Open Banking - Standar Nasional API pembayaran Bank Indonesia (SNAP BI) sesuai *blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 untuk memperluas jangkauan layanan bank melalui kerjasama dengan berbagai *partner*.

No.	Uraian	Tujuan/Manfaat
6	*Enhancement Digital Channel*	Pengembangan *digital channel*, pengembangan sistem /Aplikasi pada *internet banking*, *merchant app* dan ATM untuk mengakomodir kebutuhan bisnis dengan menerapkan *technology stack* terbaru, yang dikemas dengan UI yang *user friendly*.
7	*Enhancement Transactional Banking Platform*	Pengembangan *Single portal transactional banking* yang terintegrasi dengan fokus untuk mengakomodir kebutuhan *wholesale*, pada aplikasi *new cash management system*, *new trade finance*, dan *digital value chain*.
8	*Enhancement Wealth Management System*	Pengembangan dan perluasan untuk pelayanan keuangan dan investasi nasabah.
9	*Enhancement Fraud Detection System*	Pengembangan sistem/aplikasi IT untuk mengakomodir kebutuhan *risk*, sebagai aplikasi untuk penguatan mendeteksi anomali transaksi baik transaksi perpindahan dana maupun transaksi pembiayaan dan *Enterprise Risk Management System* sebagai sistem *risk management* yang menyeluruh dengan modul *risk* yang lengkap di dalamnya.
10	*Enhancement Financing Process Fine Tuning*	Pengembangan kebutuhan pembiayaan dengan melakukan *Fine Tuning* pada *Financing Process* terutama pada modul griya dengan pengembangan aplikasi *Originating System* dan aplikasi pendukung lainnya, termasuk implementasi lanjutan *decision engine* dan *document management system*.
11	*Enhancement Modernisasi Corebanking*	Pengembangan sistem IT mencakup *upgrade core banking* eksisting ke versi terbaru (temenos) untuk peningkatan kapabilitas teknologi yang mendukung stabilitas operasional perbankan.
12	Pengembangan Stabilitas dan ketersediaan layanan IT	Pengembangan lanjutan terkait stabilitas dan ketersediaan layanan TI dari sisi aplikasi, *data server* dan *storage*, diantaranya ialah: Penambahan dan peremajaan *storage server* untuk *critical dan non critical application*, SD WAN, *Secure Backup Management*, *Secure workload* dan perangkat *network* cabang, DC dan DRC.
13	*Enhancement Secret key Management & Security Certificate Management*	Implementasi *Secret key management* dan *security certificate management* untuk mengamankan data/informasi sensitif yang akan disimpan dalam bentuk *hash* di dalam aplikasi.
14	*Enhancement Evergreen Threat Intelligance*	Peningkatan kemampuan *Threat Intelligence* menjadi lebih baik, untuk mendeteksi dan mempelajari ancaman baru sesuai dengan *threat* dari *threat landscape*.
15	Pengembangan Kapabilitas Manajemen *Security Certificate*	Peningkatan kapabilitas Manajemen *Security Certificate* dengan melakukan implementasi infrastruktur *Public Key Infrastructure* untuk penggunaan internal yang dapat digunakan untuk pengamanan komunikasi antar *server* internal dan sertifikat pengguna (*user*).
16	Pengembangan *Security* pada data, jaringan & *endpoint*	Pengembangan *security* terkait dengan penguatan perimeter keamanan *security* pada data, jaringan dan *endpoint*, diantaranya ialah: *Data Loss Prevention*, *Secure Access Service Edge* (SASE), *Extended Detection* and *Response* (XDR), *Network Access Control*, *Anti-Advanced Persistent Threat* (APT), *Next Gen Packet Broker*, *Multi Factor Authentification* dan *Hardening Tools*
17	*Enhancement Middleware system & Enterprise Service Bus*	Pengembangan sistem/aplikasi, untuk peningkatan sistem integrasi, seperti *middleware* dan *Enterprise Service Bus*, yang berfungsi sebagai sistem layanan orkestrasi *core banking* dan aplikasi *surrounding*.
18	Pengembangan management lisensi dan ketersedian Perangkat keras	Pengembangan *management* lisensi dan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menunjang kapabilitas dan kapasitas TI.
19	Pengembangan *Shared Service* Pembiayaan Mitraguna *Online*	Pengembangan *Shared Service* pembiayaan mitraguna dengan bank induk, untuk mendukung *flow* proses pembiayaan mitraguna.

Penerapan Sistem Manajemen Risiko

BSI senantiasa menerapkan budaya sadar risiko di lingkungan Bank agar dapat meminimalkan dampak risiko yang berpotensi menciptakan kerugian terhadap usaha Bank.

Seiring dengan dinamika eksternal serta produk dan jasa PT Bank Syariah Indonesia ("BSI", "Bank") terus berkembang, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting. Bukan hanya sebagai wujud komitmen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sikap kehati-hatian manajemen dalam pengelolaan Bank. Dengan harapan, kinerja BSI akan terus tumbuh secara berkelanjutan dengan dukungan penerapan manajemen risiko yang memadai.

Melalui penerapan manajemen risiko yang tepat, diharapkan dapat melindungi Bank secara individu maupun entitas afiliasinya dari dampak perubahan di lingkungan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Bank.

Sesuai dengan regulasi, manajemen risiko Bank merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. BSI senantiasa melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kerangka manajemen risiko serta melakukan sosialisasi di lingkungan organisasi agar tercipta budaya risiko yang baik di lingkungan Bank.

LANDASAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam menerapkan manajemen risiko, BSI mengacu pada ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
5. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.
6. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah.
7. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
9. POJK No.11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

10. POJK No.57/POJK/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
12. SEOJK No.21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
13. SEOJK No.12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Pendekatan Standar untuk IRRBB Bagi Bank Umum.
14. SEOJK No.6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan ATMR untuk Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
16. Peraturan Bank Indonesia No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bank Umum
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

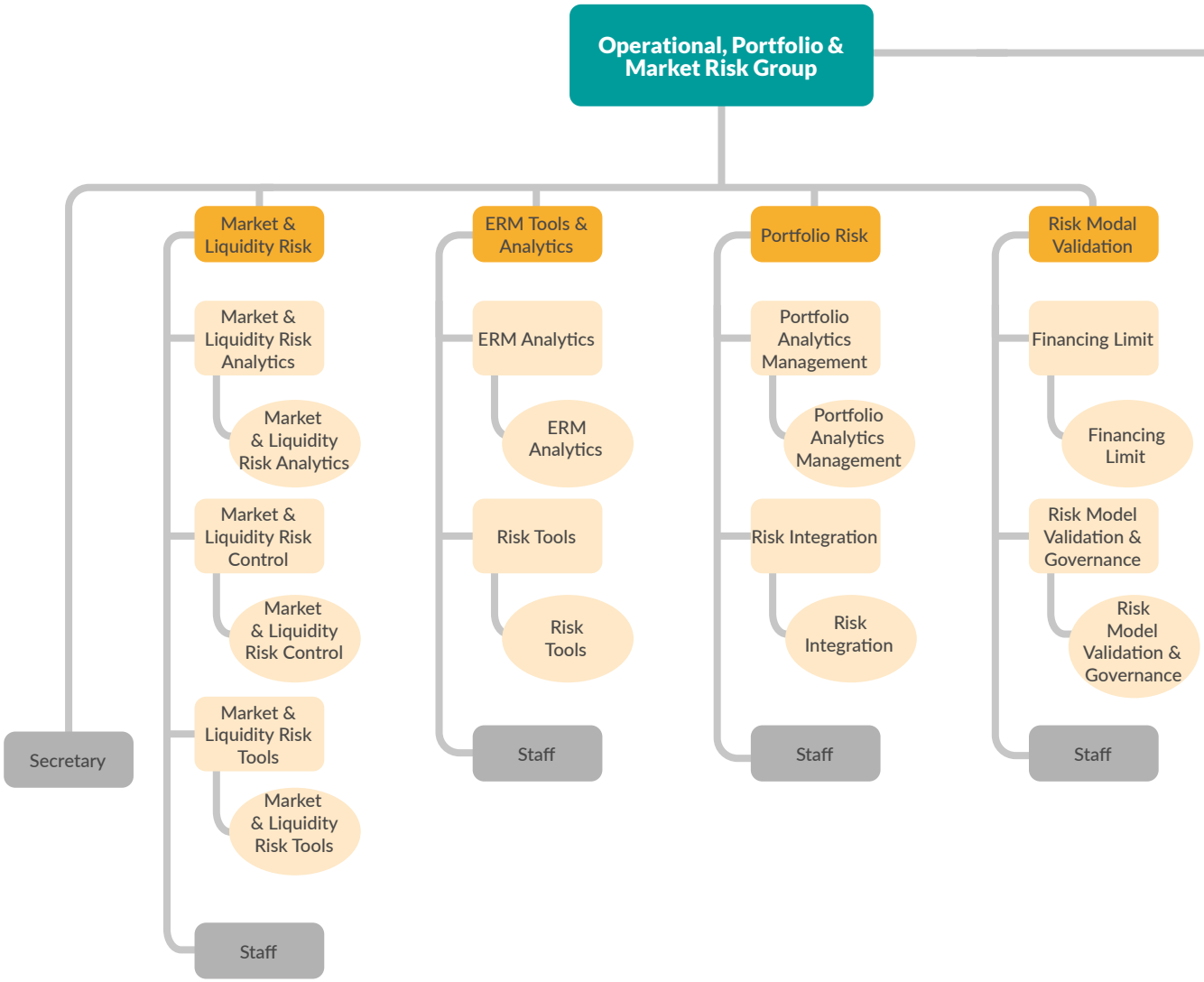

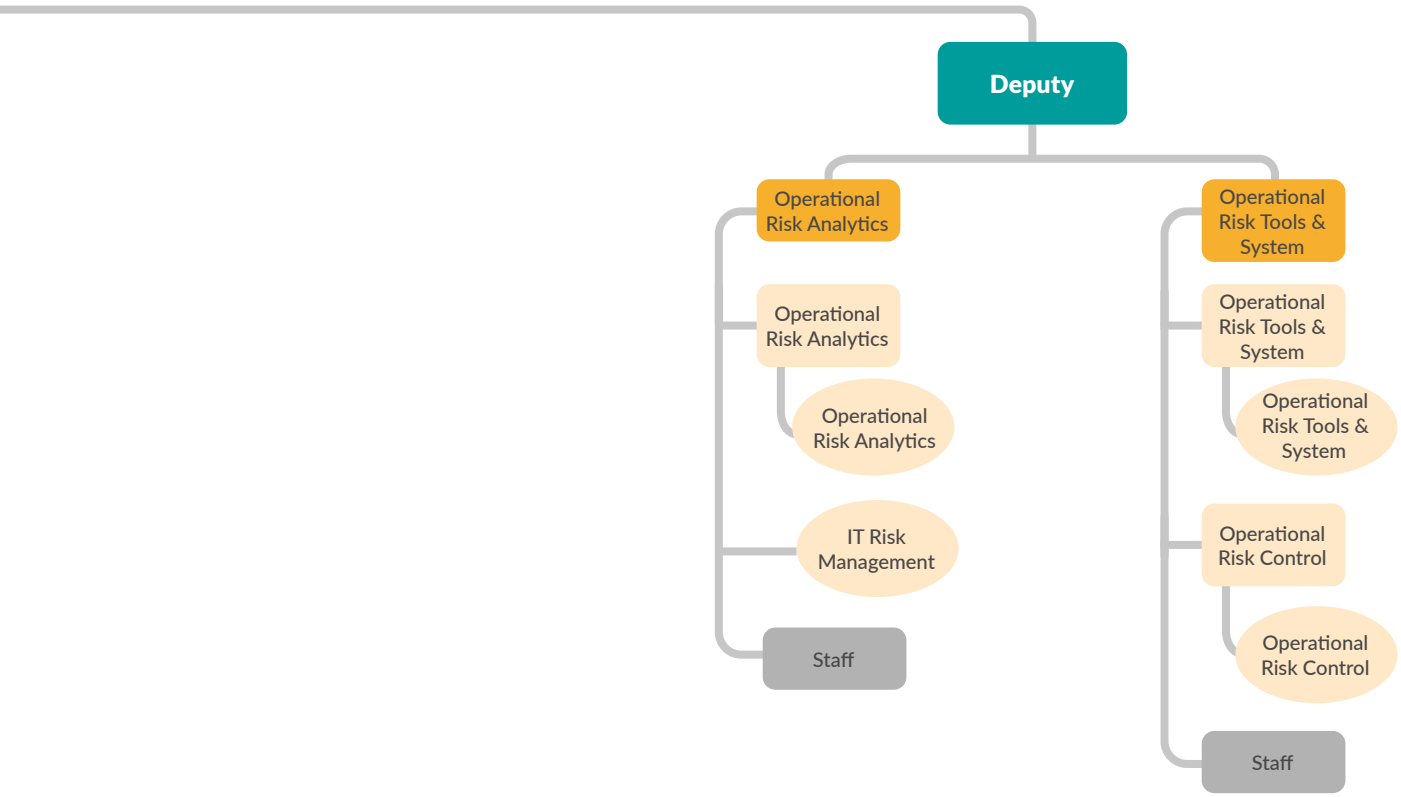

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

M. Fanny Fansyuri
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 56 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 14 April 1967
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. No. 02/203-KEP/DIR tanggal 21 Juni 2022
Riwayat Pendidikan	Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran 1991
Riwayat Pekerjaan	• *Portfolio Risk & Risk Integration* PT Bank Syariah Indonesia Tbk • *Enterprise Risk Management Group Head* PT Bank Syariah Mandiri • *Strategic and Performance Management Group Head* PT Bank Syariah Mandiri
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut sesuai Standar Prosedur Operasional *Human Capital* PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Rincian tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan dan mengembangkan manajemen risiko sesuai dengan regulasi dan *risk appetite* Bank.
b. Membuat, memutakhirkan dan mensosialisasikan Kebijakan Manajemen Risiko dan ketentuan pelaksanaannya sesuai regulasi dan *best practices* manajemen risiko dan sosialisasi kebijakan tersebut.
c. Memastikan ketersediaan kajian risiko atas produk & aktivitas baru bank.
d. Melakukan pengukuran, pemantauan risiko, ketersediaan limit risiko dalam penerapan manajemen risiko serta pengembangan program *risk culture* dan *risk awareness*.
e. Membuat dan mengembangkan model, metodologi, analisa, serta validasi pengukuran risiko sesuai dengan *best practices* dan regulasi yang berlaku serta kajian efektivitas implementasi *risk management tools*.
f. Melakukan *stress* testing terhadap portofolio pembiayaan dan menyediakan rencana kontinjen yang menjadi acuan kondisi krisis.
g. Mengusulkan, mengkaji, memantau, dan melaporkan serta memutakhirkan *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*.
h. Mengimplementasikan dan mengembangkan manajemen portofolio (*portfolio guideline*).
i. Mengimplementasikan dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank.
j. Membuat, mengkaji, dan melaporkan profil risiko, Tingkat Kesehatan Bank dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
k. Mengusulkan, mengkaji, memantau, dan melaporkan serta memutakhirkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.
l. Menyediakan materi dan tindak lanjut keputusan Komite Manajemen Risiko.

KOMPOSISI SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko disampaikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Group Head	1 Orang
2	Deputy	1 Orang
3	Department Head	6 Orang
4	Manager	12 Orang
5	Senior Officer	1 Orang
6	Officer	20 Orang
7	Staff	4 Orang
	Total	**45 Orang**

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

BSI terus mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Bank agar optimal dalam mendukung implementasi manajemen risiko. Upaya peningkatan kualitas tersebut, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko yang sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	Jabatan	Jumlah	Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi
1	Group Head	1 orang	Manajemen Risiko level 4	BNSP
2	Deputy	1 orang	Manajemen Risiko level 4	BNSP
3	Dept Head	6 orang	Manajemen Risiko level 3	BNSP
4	Manager	12 orang	• Manajemen Risiko level 3 (3 orang) • Manajemen Risiko level 2 (9 orang)	BNSP
5	Senior Officer	1 orang	Manajemen Risiko level 2	BNSP
6	Officer	20 orang	• Manajemen Risiko level 3 (5 orang) • Manajemen Risiko level 2 (3 orang) • Manajemen Risiko level 1 (12 orang)	BNSP

RISK GOVERNANCE STRUCTURE

BSI Risk Governance Structure merupakan kerangka manejemen risiko yang mencakup 3 (tiga) bagian utama: *Risk Oversight*; *Risk Policy & Strategy*; dan *Risk Identification Measurement, Mitigation and Control*. Unit Kerja Audit sebagai pendukung ketiga bagian utama tersebut dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya (*Independent Assurance*).

Terkait dengan penerapan manajemen risiko, Bank telah merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), satuan kerja operasional (*risk-taking unit*), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan satuan kerja pendukung lainnya. Satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (SKAI) dan SKMR independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional Bank.

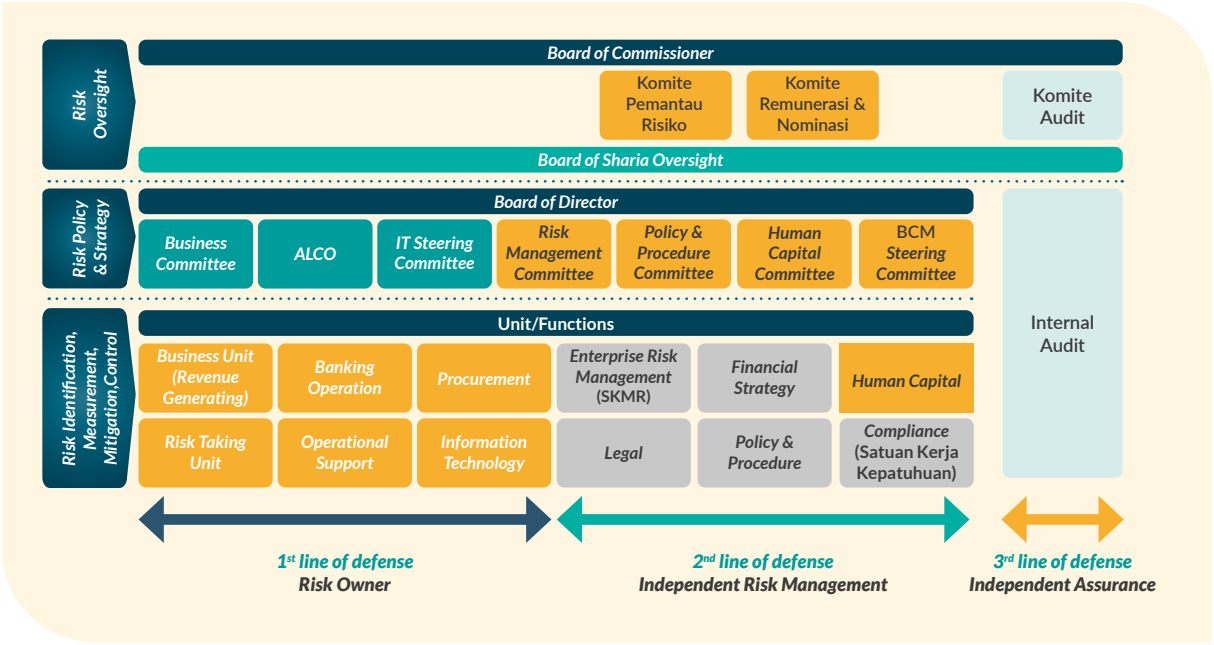

PILAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BSI menerapkan manajemen risiko yang mencakup 4 (empat) pilar seperti tergambar di bawah ini.

STRONG RISK MANAGEMENT
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
Kebijakan & strategi manajemen risiko
Risk Appetite & Risk Tolerance
Risk Culture
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
Metodologi dan prosedur manajemen risiko
Risk Limit
Organization
Kecukupan Proses Manajemen Risiko & Sistem Informasi Manajemen Risiko
Risk identification, measurement & monitoring
Reporting & MIS
Risk Analytics
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
Efektivitas pengendalian internal atas operasional bisnis dan manajemen risiko
Kaji ulang penerapan manajemen risiko
Mencakup 10 Risiko yang dihadapi Bank Umum Syariah

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di BSI senantiasa memastikan memiliki dan melaksanakan unsur-unsur penting yang terdapat pada penilaian kecukupan penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. **Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.**
   Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BSI.

   Peran pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan secara periodik melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit, serta rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Komisaris dengan jajaran Direksi dan eksekutif Bank (Rapat Komisaris dan Direksi).

   Peran pengawasan aktif oleh Direksi dilakukan secara intensif melalui Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, IT *Steering Committee*, Komite Bisnis, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan dan Prosedur, Komite SDM, BCM *Steering Committee*, serta rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Direksi (Rapat Dewan Direksi dan Rapat Direktur Bidang).

   Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui rapat Dewan Pengawas Syariah secara periodik dengan seluruh jajaran eksekutif Bank dan selalu menjalin komunikasi yang konstruktif dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
2. **Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit**
   Berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSI memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan manajemen risiko.

   Struktur Kebijakan dan Prosedur di BSI secara *leveling*, meliputi:
   a. Kebijakan
   b. Standar Prosedur (Bisnis dan Operasional)
   c. Manual Produk
   d. Petunjuk Teknis Operasional

   BSI memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih spesifik setiap bidangnya, antara lain di bidang Operasional dan Jasa, bidang Pembiayaan dan Treasury. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, mengatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

   BSI memastikan seluruh kegiatan yang memiliki eksposur risiko memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur sebagai acuan segenap unit kerja dalam melakukan kegiatan operasional sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, termasuk penetapan limit risiko untuk melindungi Bank dari risiko yang berlebihan (*excessive*) dan melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Seluruh kebijakan dan prosedur di BSI merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasional dan bisnis BSI.

   Pengkajian dan pengkinian kebijakan, prosedur dan kerangka manajemen risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan BSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2023 beberapa kebijakan yang dimutakhirkan antara lain:
   a. Kebijakan Manajemen Risiko
   b. Kebijakan Tata Kelola
   c. Kebijakan Operasional

   Dalam upaya pengendalian risiko yang berasal dari internal dan eksternal, BSI menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan limit risiko. RAS digunakan sebagai panduan untuk menerima, memantau, mempertahankan diri, atau memaksimalkan diri dari risiko atas peluang-peluang bisnis yang ada. Dengan demikian, Bank dapat menjalankan bisnis secara dinamis sehingga dapat melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat risiko yang *manageable*.
3. **Kecukupan Proses Manajemen Risiko & Sistem Informasi Manajemen Risiko**
   BSI menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta tersedianya sistem informasi yang memadai. Bank mengelola seluruh jenis risiko yang terkait dengan operasional bisnis Bank sesuai ketentuan regulator yaitu risiko kredit, risiko operasional,

risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategik, risiko imbal hasil dan risiko investasi secara menyeluruh dan terintegrasi.

a. Identifikasi Risiko
   - Pelaksanaan identifikasi, pengukuran & pemantauan risiko (profil risiko bulanan dan triwulanan).
   - Pelaksanaan *Risk Assessment* atas Produk & Aktivitas Baru.
   - Pelaksanaan identifikasi atas risiko pada penerapan manajemen risiko teknologi informasi.
   - Pelaksanaan identifikasi atas penerapan *Business Continuity Management*.

b. Pengukuran Risiko
   - Penggunaan *risk tools* dalam pengukuran risiko antara lain *scoring*, *financing risk rating*, *Value at Risk*, *Liquidity Gap* dan *Repricing Gap*.
   - Pengembangan model/metodologi *portfolio guideline*.
   - Pengukuran dan penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
   - Pelaksanaan *stress test* risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas
   - Pengembangan metode dan penerapan *Climate Risk Stress Test* (CRST).
   - Pengukuran *risk premium*.
   - Pengembangan model *stress test* hingga *level product*.
   - Pengembangan metodologi *portfolio guideline* segmen SME hingga level wilayah.
   - Pemutakhiran parameter pada penilaian profil risiko dan tingkat kesehatan bank.

c. Pemantauan Risiko
   - Pemantauan utilisasi limit risiko.
   - *Review* atau pembuatan laporan risiko.
   - Implementasi *Risk Management Consolidation* dengan Bank Mandiri.
   - Evaluasi kewenangan memutus pembiayaan.

d. Pengendalian Risiko
   - Integrasi *policy & risk tools* ke dalam *financing origination*, *customer on boarding*, dan *collection system*.
   - Pembentukan *marketing asset & tracking asset* jaminan.
   - Penetapan limit risiko.
   - Pengembangan *advance and expert competencies*.
   - Peningkatan fungsi pengendalian/*risk control* yang diterapkan (sistem, organisasi, pengujian *control*).
   - Penerapan program *Risk Awareness*.
   - Peningkatan kompetensi SDM (*Risk Based Competencies*).
   - Penerapan *Business Continuity Management* (BCM).
   - Validasi *scoring* model.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko
   - Pengembangan & Implementasi *Risk Management System*.
   - E-Booklet *Wholesale* Berbasis Digital.

4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam menjaga efektivitas dan efisiensi operasional, keakuratan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, BSI berupaya untuk melakukan pengendalian internal berupa tindakan pencegahan (*preventive action*), deteksi dini (*early detection*), maupun tindakan perbaikan (*corrective action*) melalui pengawasan melekat yang menerapkan prinsip pengawasan ganda (*dual control*), pembagian tugas "*check and balances*" (*segregation of duties*), dan jejak audit (*audit trail*). Kualitas sistem pengendalian internal secara periodik dikaji oleh SKAI.

Bank menerapkan kebijakan *Three Lines Model* dalam pengelolaan risiko sebagai berikut:

a. Unit Bisnis/Operasional sebagai *risk owner* merupakan *first line roles* yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko unit kerjanya.
b. Unit *Risk Management* berperan sebagai *second line roles* yang menjalankan fungsi *oversight*.
c. Unit Internal Audit sebagai *third line roles* yang menjalankan fungsi *independent assurance*.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

BSI melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan dan memperkuat pengelolaan sistem manajemen risiko Bank.

Evaluasi tersebut meliputi penyesuaian strategi, kebijakan manajemen risiko, kualitas penerapan manajemen risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, kecukupan proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penilaian Profil Risiko BSI secara individu maupun terintegrasi sepanjang tahun 2023 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang di hadapi BSI dapat di Kelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh BSI dengan baik dan memadai.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

BSI senantiasa berupaya untuk mengelola risiko secara dinamis sejalan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah berjalan dengan baik.

Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan upaya penguatan pengelolaan risiko antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
   a. Meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung aktivitas Bank melalui internal maupun *eksternal training* serta melakukan magang di perusahaan induk.
   b. Meningkatkan *risk awareness* pegawai antara lain melalui *e-learning* dan *refreshment* ketentuan.
   c. Meningkatkan *legal awareness* bagi seluruh jajaran Bank.
2. *Tools* dan Metodologi
   Memperkuat *internal control* melalui implementasi *control testing* atas *end to end business process*.
3. *System*
   Meningkatkan pengamanan IT *system* operasional.

Untuk tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris/ Komite Audit menilai bahwa kecukupan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan di BSI sudah memadai. Ke depan, ruang pengembangan terhadap penerapan manajemen risiko terus terbuka seiring dengan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, dinamika industri, serta internal BSI.

BUDAYA RISIKO

Dalam mewujudkan visi BSI menjadi "Top 10 Global Islamic Bank" BSI senantiasa menerapkan budaya sadar risiko. Inisiatif tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengendalian intern, termasuk sistem pengendalian risiko untuk memastikan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh di semua lini bisnis/operasional. Penerapan budaya risiko bertujuan untuk mengelola risiko agar mampu mengelola risiko sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian yang muncul dari setiap lini bisnis/operasional.

Bank Syariah Indonesia senantiasa berupaya untuk membangun budaya risiko yang kuat bagi seluruh lini bisnis/operasional Bank, antara lain melalui:

1. Sosialisasi *Risk Awareness* untuk meningkatkan *awareness* pegawai agar senantiasa mengelola risiko masing-masing, melalui *Podcast Risk Management* & pembuatan Infografis atas eksposur risiko signifikan.
2. Penerapan nilai *Core Value* AKHLAK di lingkungan kerja BSI yang meliputi Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, melalui program rutin mingguan yang disampaikan oleh Jajaran Top Manajemen secara langsung kepada seluruh pegawai.

Bank mengikutsertakan pejabat-pejabat pada level tertentu dalam Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR). Sampai dengan Desember 2023, jumlah pegawai yang telah memperoleh Sertifikat Manajemen Risiko adalah:

Sertifikasi	s.d. Desember 2023
Tingkat 1	3.445
Tingkat 2	5.212
Tingkat 3	1.593
Tingkat 4	344
Tingkat 5	170
Total	**10.764**

Kesadaran Risiko di setiap lini usaha BSI memegang peranan yang penting karena akan mempengaruhi efektivitas implementasi manajemen risiko dan pada akhirnya pencapaian kinerja perusahaan secara berkelanjutan. BSI akan terus mengevaluasi dan meningkatkan giat budaya sadar risiko dengan menggunakan berbagai metode dan media sehingga menghasilkan tingkat efektivitas yang lebih baik.

EKSPOSUR PERMODALAN DAN PENGUNGKAPAN RISIKO PERMODALAN

BSI memastikan posisi permodalan pada tingkat yang memadai guna mendukung pengembangan usaha Bank. Kecukupan modal BSI dihitung dengan menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR). BSI memiliki tingkat permodalan yang memadai dengan rasio CAR pada 31 Desember 2023 sebesar 21,04%, nilai tersebut berada di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko (termasuk tambahan penyangga (*buffer*) sebesar 2,5% dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebesar 1%). BSI telah membentuk *buffer* sesuai dengan pemenuhan ketentuan PBI tentang kewajiban pemenuhan *Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer dan Capital Surcharge* sebagai bank sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa BSI memiliki kemampuan permodalan yang cukup untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnis/operasionalnya.

BSI secara berkala melakukan *review* atas Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang mempengaruhi permodalan.

Profil Risiko Utama dan Pengelolaan

1. Risiko Kredit dan Risiko Investasi

BSI mengelola risiko kredit dan investasi secara menyeluruh, sejak pembiayaan dan investasi diberikan sampai dengan pembiayaan berakhir.

a. Organisasi

BSI memiliki perangkat organisasi manajemen risiko kredit dan investasi untuk menjaga aktivitas pembiayaan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank menetapkan 3 pilar organisasi dalam proses pembiayaan. Pilar pertama adalah unit bisnis yang melakukan inisiasi bisnis. Pilar kedua adalah unit *risk assessment* yang melakukan analisa risiko pembiayaan. Pilar ketiga adalah *unit financing operation* yang menjaga proses pencairan pembiayaan dilakukan secara independen. Bank menetapkan unit *recovery* yang berfungsi menangani pembiayaan bermasalah. Unit tersebut independen terhadap unit bisnis dan unit *risk assessment* yang memberikan pembiayaan.

b. Kebijakan, Prosedur dan Limit

BSI membuat kebijakan dan prosedur pembiayaan untuk mendukung pengelolaan pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud terdiri atas Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis *Portfolio Guideline*, Manual Produk dan Petunjuk Teknis Operasional untuk masing-masing segmen pembiayaan.

Bank menetapkan limit *inhouse* BMPD, *credit line*, kewenangan memutus pembiayaan, portofolio sektor industri dan limit portofolio investasi surat berharga. Pada level transaksional, Bank menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan termasuk investasi surat berharga.

c. Proses Pengelolaan Risiko

BSI melakukan pengelolaan risiko kredit melalui:

1) Arah ekspansi pembiayaan mengacu pada *Portfolio Guideline*, yang mencakup:
   a) *Industry Class*
      Pengelolaan risiko pembiayaan Bank diawali dengan menetapkan klasifikasi sektor industri yang akan menjadi target *market*. Bank membagi klasifikasi industri (*industry class*) ke dalam empat kelompok, yaitu menarik, netral, selektif, dan waspada. Bank menetapkan *industry class* untuk 101 sektor industri. Pembiayaan diarahkan pada sektor/bidang usaha dengan klasifikasi menarik dan netral.
   b) *Industry Limit*
      Dalam rangka mengelola risiko konsentrasi dari *portfolio* pembiayaan, Bank menetapkan limit *portfolio* pembiayaan untuk masing-masing industri. Limit sektor industri tersebut ditetapkan berdasarkan pada kriteria *industry class* masing-masing sektor.
   c) *Industry Acceptance Criteria*
      Bank menetapkan *Industry Acceptance Criteria* sebagai salah satu proses dalam menentukan *targeted customer* pada suatu sektor industri serta untuk menyaring calon nasabah. *Industry Acceptance Criteria* merupakan kriteria seleksi awal nasabah yang dirumuskan berdasarkan *critical factor* dari masing-masing sektor industri yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
2) Penetapan metode *acquisition* dan pengukuran risiko nasabah melalui *originating system*, *Risk Acceptance Criteria*, *scoring* pembiayaan ritel dan *financing risk rating* pembiayaan SME lebih dari Rp1,5 miliar dan pembiayaan *wholesale*.

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

3) *Early warning system* dengan menggunakan *watchlist tools* yang dapat memberikan indikasi/deteksi secara dini kondisi nasabah sehingga Bank dapat menetapkan *account strategy* yang antara lain mencakup aktivitas *collection*, *recovery* maupun restrukturisasi. Termasuk di dalam *early warning system* adalah *portfolio alert* yang bertujuan untuk memonitor kinerja portofolio pembiayaan dan kesesuaian terhadap limit risiko yang ditetapkan baik oleh internal Bank maupun regulator.
4) Bank mengembangkan *Rescue tools* sebagai alat bantu dalam memantau upaya yang dilakukan oleh Bank terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.
5) Pelaksanaan *stress test* terhadap kondisi ekstrem tetapi mungkin terjadi (*plausible*) baik secara berkala maupun insidentil yang bertujuan untuk mengantisipasi kondisi terburuk apabila terjadi perubahan kondisi eksternal seperti makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja pembiayaan Bank.
6) Penetapan jangka waktu pembiayaan dengan mempertimbangkan jenis pembiayaan, imbal hasil, likuiditas dan potensi risiko.
7) Kajian/Evaluasi kecukupan limit risiko.
8) Penetapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pembiayaan.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

BSI memiliki Sistem Informasi Manajemen yang menyediakan data pengelolaan risiko kredit. Bank melaporkan eksposur risiko kredit secara rutin baik untuk pihak internal maupun eksternal.

2. Risiko Pasar

BSI terekspose Risiko pasar dari aktivitas *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga, pasar uang, dan forex (*foreign exchange*) serta produk emas karena terdapat persediaan emas. Pengelolaan risiko pasar bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif pergerakan variabel pasar terhadap portofolio Bank.

a. Organisasi

BSI menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi antara *front office*, *middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan forex.

Unit bisnis atau unit *treasury* menjalankan fungsi *front office* sebagai pelaksana transaksi *treasury*. *Front office* berfungsi sebagai *first line of defence* yang melakukan transaksi.

Unit manajemen risiko menjalankan fungsi *second line of defence*, yang melakukan fungsi *review* limit risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan eksposur risiko pasar.

Unit kerja operasional yang menjalankan fungsi *back office* dengan melakukan *settlement* dan pembukuan transaksi.

b. Kebijakan, Prosedur dan Limit

BSI menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury and International Banking*, PTO *Asset and Liability*, PTO *Market Liquidity Risk Tools* serta ketentuan pengelolaan risiko pasar lainnya sebagai pedoman penerapan manajemen risiko pasar.

Bank menetapkan limit risiko mencakup:

Surat Berharga	a. *Value at Risk* b. *Open Position* c. *Stop Loss* d. *Cut Loss* e. *Holding Period* f. *Unrealized Loss* Surat Berharga AFS g. Tenor Periode h. Transaksi Sukuk
Nilai Tukar	a. *Value at Risk* b. *Open Position* c. *Stop Loss* d. PDN e. Transaksi Forex
Emas	*Stock* Emas

c. Proses Manajemen Risiko

1) Risiko *Benchmark* Suku Bunga
BSI mengelola Risiko *Benchmark* Suku Bunga melalui:
   a. Identifikasi risiko pada produk dan aktivitas bank melalui analisa risiko dan memberikan rekomendasi kepada unit bisnis dan manajemen. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui adanya risiko *benchmark* suku bunga dan sumber risiko agar risiko dapat dikendalikan dan dimitigasi.
   b. Pengukuran risiko menggunakan metode Standard dan metode internal yaitu *Value at Risk* (VaR). VaR menggambarkan potensi kerugian maksimum akibat pergerakan *yield* surat berharga dalam kondisi pasar yang normal.

      Bank melakukan *stress test* untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika kondisi krisis.

      Bank melakukan 8 (delapan) kali *stress test* risiko pasar sepanjang tahun 2023, untuk menilai kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi.
   c. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan. Pemantauan eksposur risiko dilakukan pada *treasury system* bank.
   d. Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit *trading* surat berharga. Apabila terdapat *unrealized loss* akibat penurunan harga pasar surat berharga, Bank dapat melakukan penjualan atau *cut loss* sesuai mekanisme yang ditetapkan, untuk menghindari kerugian lebih besar. Penetapan harga pasar surat berharga *trading* secara harian menggunakan harga pasar dari sumber yang independen.

2) Risiko Nilai Tukar
Mengelola Risiko Nilai Tukar melalui :
   a. Identifikasi risiko pada produk dan aktivitas bank. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui adanya risiko nilai tukar dan sumber risiko agar risiko dapat dikendalikan dan dimitigasi.
   b. Pengukuran risiko menggunakan tools *Value at Risk* (VaR). Bank menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai limit yang telah ditetapkan. PDN Keseluruhan per 31 Desember 2023 sebesar 2,47% atau masih dalam batas limit internal bank maksimal 8%.

      Bank melakukan *stress test* untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika kondisi krisis.

      Bank melakukan 8 (delapan) kali *stress test* risiko pasar sepanjang tahun 2023, untuk menilai kemampuan bank dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi.
   c. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan. Pemantauan eksposur risiko dilakukan menggunakan *treasury system* bank.
   d. Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit dan *squaring* posisi valas.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko
BSI memiliki *Treasury core system* yang dapat menyediakan data untuk pengukuran risiko pasar. Bank melaporkan eksposur manajemen risiko pasar secara rutin kepada pihak internal maupun eksternal.

e. Pengelolaan Portofolio Trading Book dan Banking Book serta Metodologi Valuasi
Pengelolaan portofolio *trading book* dilakukan sesuai limit yang telah ditetapkan dan batasan regulasi. Bank melakukan *mark to market* atas surat berharga *trading* secara harian menggunakan harga pasar dari sumber yang independen antara lain Penilai Harga Efek Indonesia, Bloomberg atau Reuters.

Risiko pasar *banking book* adalah risiko penurunan profitabilitas dan nilai ekonomis modal karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil pasar dan nilai tukar. Pengelolaan risiko pasar *banking book* dilakukan melalui *review* price *asset* dan *liabilities* sehingga mendapatkan imbal hasil yang maksimal.

3. Risiko Likuiditas
BSI mengelola risiko likuiditas untuk menjaga kecukupan atau ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban Bank. Bank terekspose Risiko Likuiditas dari aktivitas fungsional pembiayaan, *treasury* dan investasi, serta pendanaan dan penerbitan surat

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

berharga. Risiko Likuiditas dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:

1) Risiko Likuiditas Pendanaan yang merupakan risiko yang timbul dikarenakan Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas, dapat disebabkan oleh:
   a) Ketidakmampuan Bank untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
   b) Ketidakmampuan Bank menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
2) Risiko Likuiditas Pasar merupakan risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan *close out* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar.
   a. Organisasi
      BSI melakukan pemisahan fungsi antara unit tresuri sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit *operation* sebagai *back office*.
   b. Kebijakan, Prosedur dan Limit
      BSI menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury* dan *International Banking*, PTO *Asset and Liability* dan PTO *Market and Liquidity Risk Tools*. BSI telah menetapkan limit/indikator likuiditas.

a. Giro Wajib Minimum (GWM)
b. *Safety Level*
c. Deposan Inti
d. *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
e. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)
f. Aset Likuid terhadap *Non Core Deposit*
g. Aset Likuid terhadap DPK

   c. Proses Pengelolaan Risiko
      BSI dalam mengelola likuiditas :
      1) Melakukan identifikasi risiko likuiditas pada produk dan aktivitas bank
      2) Melakukan penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas
      3) Melakukan pengukuran rasio-rasio likuiditas, proyeksi *cashflow*, *liquidity gap*, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
      4) Memelihara akses ke pasar uang antar Bank Syariah
      5) Melakukan *stress test* risiko likuiditas secara berkala. Bank melakukan 8 (delapan) *stress test* risiko likuiditas sepanjang tahun 2023, untuk menilai kecukupan likuiditas dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi, termasuk dalam rangka penyusunan *Recovery Plan*.
      6) Menetapkan limit-limit risiko likuiditas sesuai kondisi internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
      7) Memantau rasio likuiditas secara rutin
      8) Menetapkan Indikator Peringatan Dini dan Rencana Pendanaan Darurat atau *Liquidity Contigency Plan* (LCP) antara lain melalui penggunaan instrumen *money market*, penjualan surat berharga, peningkatan nisbah imbal hasil dana dan penggunaan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia.
      9) Memonitor pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar USD/IDR, *yield*, surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas dan informasi pasar terkini.
   d. Sistem Informasi Manajemen Risiko
      BSI memiliki *Management Information System* yang menyediakan data dan informasi untuk pengukuran risiko likuiditas. BSI menyampaikan laporan eksposur risiko likuiditas secara berkala, baik kepada pihak internal maupun eksternal.
   e. Mekanisme Pengukuran dan *Stress Test* serta Pengendalian Risiko Likuiditas
      BSI melakukan pengukuran kecukupan likuiditas melalui proyeksi *cashflow*, *liquidity gap*, dan perhitungan *core dana*. Di samping itu bank melakukan penilaian profil risiko likuiditas dan pengukuran rasio-rasio likuiditas antara lain mencakup *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), rasio deposan terbesar, rasio aset likuid terhadap *non*

core deposit (AL NCD), rasio aset likuid terhadap DPK (AL DPK).

Untuk mengukur kecukupan likuiditas saat terjadi kondisi krisis sesuai skenario yaitu kejadian eksternal yang ekstrim tetapi mungkin terjadi, Bank melakukan *stress test* likuiditas secara berkala dan menetapkan *contingency plan*.

f. Rasio Kecukupan Likuiditas
BSI memiliki kecukupan likuiditas yang memadai. Cadangan likuiditas Rupiah per 31 Desember 2023 mencapai Rp30,20 triliun atau di atas *safety level* minimal Rp7,65 triliun. Cadangan likuiditas valas per 31 Desember 2023 USD903,48 juta atau di atas *safety level* minimal USD59,69 juta.

Rasio kecukupan likuiditas atau LCR per 31 Desember 2023 mencapai 147,87% atau di atas regulasi minimal 100%. Rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR per 31 Desember 2023 mencapai 132,71% atau di atas regulasi minimal 100%.

4. Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk meminimalisasi eksposur risiko yang disebabkan faktor kesalahan manusia, ketidakcukupan prosedur internal, kegagalan sistem dan kejadian eksternal. Bank memiliki *framework* pengelolaan risiko operasional sebagaimana dijelaskan di bawah.

BSI mengelola risiko operasional di seluruh organisasi pada semua lini bisnis Bank, baik di *firstline unit*, *secondline unit*, maupun *thirdline unit*. Bank menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*) melalui pemisahan fungsi *maker*, *checker*, *approver*/otorisator, dan mekanisme *dual control* dalam setiap transaksi

BSI memiliki *framework* pengelolaan risiko operasional sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Organisasi

BSI memiliki fungsi pengelola manajemen risiko operasional yang terpisah dari satuan kerja operasional. Di samping itu, Bank memiliki organ pengawasan yang bertugas untuk memastikan penerapan kepatuhan dan manajemen risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Jaringan:

1) *Senior Operational Risk* (SOR)
   a) SORH merupakan organ independen yang menjalankan fungsi *operational risk*, kepatuhan dan *audit support* dengan mensupervisi langsung *Head of Decentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR).
   b) SOR terdiri dari 3 sesuai ruang lingkup pengawasan meliputi:
      (1) SOR-1 disupervisi langsung (*reporting line*) oleh Direktur Information Technology
      (2) SOR-2 disupervisi langsung (*reporting line*) oleh Direktur Wholesale Transaction Banking
      (3) SOR-3 disupervisi langsung (*reporting line*) oleh Direktur Sales & Distribution dengan lingkup kelolaan setiap SORH mengelola beberapa Direktorat.
   c) SOR memiliki fungsi koordinasi (*dotted line*) kepada Direktur Risk Management dan Direktur Compliance & Human Capital. Selain organisasi di atas, Bank juga memiliki organ/fungsi yang melakukan pengelolaan risiko operasional secara spesifik di bidang pencegahan *fraud* dan risiko TI.
2) *Decentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR)
   a) DCOR merupakan organ independen yang ditempatkan di setiap Direktorat Kantor Pusat untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan *operational risk* (*review/examination*, *compliance assurance services*, *operational risk*) dengan ruang lingkup Direktorat dan Unit Kerja di bawah Direktorat.
   b) DCOR bertanggung jawab kepada *Senior Operational Risk Head* (SORH), memiliki fungsi koordinasi (*dotted line*) kepada *Operational*, *Portfolio & Market Risk Group* (OPR) dan *Compliance Group* (CPG).
3) *Regional Business Control* (RBC)
   a) RBC merupakan organ pengawasan yang ditempatkan di Kantor Jaringan untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan risiko operasional dan internal *control* (*prevention*, *transaction control*, *immediately post transaction control*, pemeriksaan khusus) di Kantor Wilayah, Area, dan Cabang.
   b) RBC bertanggung jawab kepada *Regional CEO*, memiliki fungsi

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

koordinasi (*dotted line*) kepada *Senior Operational Risk* (SOR) di *Sales & Distribution Directorate*.

b. Kebijakan, Prosedur dan Limit

BSI memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang menjadi acuan dalam penerapan manajemen risiko operasional di seluruh unit kerja, meliputi:

1) Kebijakan Manajemen Risiko Operasional;
2) Standar Prosedur Pengendalian Manajemen Risiko Operasional;
3) Petunjuk Teknis Operasional mengenai *Operational Risk Management Tools;*
4) Petunjuk Teknis Operasional Talangan dan Pembebanan Insiden Risiko Operasional (IRO);
5) Petunjuk Teknis Operasional *Decentralized Compliance and Operational Risk* (DCOR).

BSI mengevaluasi Kebijakan, Standar Prosedur Manajemen Risiko Operasional dan Petunjuk Teknis Operasional secara berkala minimal satu tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank.

BSI menetapkan limit transaksi operasional dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian tanpa menghambat kelancaran aktivitas operasional Bank. Bank mengevaluasi limit risiko operasional secara berkala, meliputi:

1) Limit Transaksi Operasional Kantor Pusat, Region, Area dan *Branch;*
2) Limit Transaksi *Electronic Channel* (*Internet Banking*, ATM, dan *Mobile Banking*);
3) Limit *Procurement;*
4) Limit Kustodian;
5) Limit *Bulk Transaction*.

c. Business Continuity Management

BSI menerapkan *Business Continuity Management* (BCM) untuk menjamin keberlangsungan operasional Bank pada saat terjadi *disaster*. Dalam rangka penguatan penerapan BCM, pada tahun 2023 Bank melakukan:

1) Pemutakhiran Standar Prosedur BCM
2) Pemutakhiran *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Risk Assessment* (RA), pembuatan *safety briefing* penanganan bencana
3) Pelaksanaan uji coba *Emergency Response Plan* untuk bencana kebakaran
4) Pelaksanaan uji coba *Business Continuity Plan* (BCP) Kantor Pusat melalui *Business Recovery Center* (BRC) Fatmawati
5) Pelaksanaan uji coba *Call Tree* dan *Table Top*, baik di Kantor Pusat maupun Jaringan
6) Pelaksanaan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) Aplikasi Kritikal BSI secara Periodik
7) Sosialiasasi BCM kepada Unit Kerja baik Kantor Pusat maupun Jaringan
8) Sertifikasi ISO 22301 BCM
9) Penguatan dan pengembangan organisasi *Business Continuity Management* (BCM) dengan membentuk *Crisis Management Team* (CMT) IT.

d. Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan digitalisasi, BSI mengembangkan produk dan layanan berbasis digital dengan memperhatikan identifikasi dan mitigasi risiko.

BSI menerapkan manajemen risiko teknologi informasi melalui:

1) Penguatan Manajemen Organisasi
   a) Bank memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Streering Committee*).
   b) Penetapan rencana strategis IT yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
   c) Bank memiliki *group* CISO (*Chief Information Security Officer*) untuk memastikan keamanan penerapan teknologi informasi Bank, termasuk *Digital Banking*.
   d) Pembentukan unit kerja IT & *Product Delivery Risk* untuk memastikan pelaksanaan *risk assessment* dalam aktivitas pengembangan dan pengadaan IT mulai perencanaan hingga monitoring pasca *live*.
   e) Bank memiliki unit kerja khusus Internal Audit IT untuk memperkuat peran pengawasan dalam melaksanakan operasional IT.
   f) Pembentukan Security Operation Center yang memantau keamanan siber bank 24/7.
   g) Pembentukan *Security Incident Response Team* sebagai bentuk penanganan terhadap indikasi serangan siber

h) Pembentukan *Senior Operational Risk* yang fokus menjalankan fungsi *operational Risk*, kepatuhan, dan audit support bidang TI dan langsung disupervisi oleh Direktur Information Technology.

2) Peningkatan Keamanan Siber IT melalui:
   a) Identifikasi aset teknologi informasi, ancaman dan kerentanan, serta deteksi insiden melalui pemantauan selama 24 jam penuh.
   b) Menguji keamanan siber melalui *penetration testing* oleh pihak independen.
   c) Standardisasi perangkat jaringan komunikasi data dan *software*, pengelolaan kewenangan akses sistem, pengembangan layanan perbankan elektronik dari segi keamanan aksesibilitas dan aspek IT *Security*.
   d) Pelaksanaan *System Integration Test* (SIT), *User Acceptance Test* (UAT) atas setiap pembuatan atau pengembangan sistem aplikasi untuk meminimalisasi potensi kegagalan sistem aplikasi.
   e) Pelaksanaan *Penetration Test* (PenTest) untuk menguji keamanan dan kehandalan sistem aplikasi dari potensi serangan *cyber crime*.
   f) Pelaksanaan *Release Control Board* (RCB) untuk memastikan sistem yang akan diimplementasikan telah memenuhi standar pengembangan IT yang memadai baik dari aspek kecukupan infrastruktur IT, keamanan IT, proses bisnis maupun prosedur.
3) Penguatan Keamanan Jaringan & Informasi melalui:
   a) Pemenuhan aspek pengamanan jaringan komunikasi, baik *access* langsung maupun *remote*
   b) Menguji kehandalan pengamanan perangkat keras (a.l *back up power*, AC, SDM, pengamanan server, pengamanan *end-point*) dan perangkat lunak (a.l pengamanan aplikasi, *password*, enkripsi)
4) Melakukan Pengembangan & Operasional TI melalui:
   a) Pengamanan operasional TI yang minimal mencakup pengelolaan DC, kapasitas perangkat, konfigurasi perangkat, *change management*, pengelolaan *source code* dan pertukaran informasi.
   b) Melaksanakan *risk assessment* dalam aktivitas pengembangan dan pengadaan IT mulai perencanaan hingga *monitoring* pasca *live*.
5) Kerjasama IT dengan memenuhi kriteria jaminan pengamanan dan kerahasiaan data pada kerjasama IT dengan pihak ketiga. saat kondisi normal dan kondisi insiden.
6) Menjalankan layanan digital yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan transaksi elektronik dan data nasabah seperti kerahasiaan data nasabah, keakuratan data dan transaksi oleh nasabah yang berhak.

e. *Tools* Pengelolaan Risiko

BSI menerapkan *Operational Risk Management Tools*, yaitu:

1) *Risk & Control Self Assessment* (RCSA)
   RCSA merupakan *tools* untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi risiko operasional. RCSA dilakukan secara mandiri oleh unit kerja dan di-*review* oleh SORH/RBC.
   Bank menerapkan RCSA secara *end to end process* sehingga potensi risiko operasional dapat diidentifikasi secara menyeluruh dan dapat dilakukan mitigasi secara dini untuk meminimalisasi potensi risiko operasional. RCSA dilakukan secara berkala setiap bulan.
2) *Key Risk Indicator* (KRI)
   KRI merupakan *tools* untuk mengidentifikasi secara dini indikator-indikator yang dapat meningkatkan eksposur risiko operasional dengan menetapkan *treshold* tertentu. Pemantauan KRI dilakukan oleh unit kerja setiap bulan.
3) *Loss Event Database* (LED)
   LED merupakan *tools* untuk mencatat kejadian kerugian operasional yang dialami oleh Bank. Pencatatan dilakukan secara langsung pada saat terjadi insiden dan dilaporkan setiap bulan.
4) *Control Testing* (CT)
   CT merupakan *tools* untuk menguji kecukupan kontrol operasional, dan menetapkan langkah perbaikan kontrol secara berkelanjutan. Bank telah menerapkan CT dalam proses bisnis pembiayaan gadai, pembiayaan mikro, operasional cabang, pembiayaan konsumer kendaraan, pembiayaan komersial, dan pembiayaan korporasi. CT dilakukan oleh RBC dan DCOR melalui *onsite review* di unit kerja dan cabang secara berkala.

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Selain *tools* di atas, Bank menggunakan metodologi lain seperti *Risk Maturity Level* (RML). RML merupakan suatu pendekatan/model pengukuran penerapan manajemen risiko di suatu organisasi. Dengan demikian Bank dapat mengetahui tingkat maturitas penerapan manajemen risiko. Informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan *mapping* dan menyusun strategi manajemen risiko yang efektif, guna mendukung pencapaian target Bank.

f. Sistem Informasi Manajemen Risiko

BSI melaporkan hasil penerapan manajemen risiko operasional setiap bulan, baik untuk pelaporan internal maupun eksternal kepada entitas utama dan kepada regulator.

1) Profil Risiko Operasional
2) *Operational Risk Loss Control Metrics*
3) *Operational Risk Loss Incident*
4) Laporan Penerapan *Operational Risk tools* unit Kerja meliputi:
   a. Laporan Profil Risiko Operasional Unit Kerja Kantor Pusat
   b. Laporan Profil Risiko Operasional *Region Office*

5. Risiko Lainnya

BSI mengelola risiko lainnya yang mencakup risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko imbal hasil.

a. Organisasi

BSI memisahkan unit kerja yang berperan mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko stratejik dengan satuan kerja operasional lainnya.

b. Kebijakan, Prosedur dan Limit

BSI memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur Manajemen Risiko untuk mendukung pengelolaan risiko lainnya, antara lain Standar Prosedur Pengendalian Hukum, Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan, Standar Prosedur Prosedur Pengendalian *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Standar Prosedur Operasional Perlindungan dan Pengaduan Nasabah, Standar Prosedur Operasional *Corporate Secretary*, Standar Prosedur Operasional Rencana Korporasi (*Corporate Plan*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan Standar Prosedur Operasional *Performance Management*.

c. Proses Pengelolaan Risiko Lainnya

BSI mengelola risiko-risiko lainnya melalui:

1) Penanganan dan pemantauan eksposur risiko hukum, baik perkara pidana maupun non pidana. Pengendalian risiko hukum dilakukan antara lain dengan membentuk cadangan kerugian untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tuntutan hukum. Apabila diperlukan, Bank menggunakan jasa *external lawyer* dalam membantu penanganan kasus-kasus hukum yang mengandung tuntutan ganti rugi
2) Penyelesaian pengaduan nasabah melalui *Complaint Handling Management* dan pengukuran risiko reputasi melalui *Publicity Effectiveness Level* (PEL), serta pemantauan terhadap pemberitaan-pemberitaan di media
3) Evaluasi kinerja dan efektivitas strategi melalui *performance review* secara berkala dan berjenjang
4) Penerapan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK)
5) Pelaksanaan fungsi *internal sharia advisory* untuk mengkaji dan menganalisas kesesuaian produk/aktivitas Bank dengan prinsip Syariah
6) *Review* imbal hasil pendanaan

PROFIL RISIKO

BSI melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional BSI dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai kondisi risiko usaha dan potensi kerugian yang dihadapi BSI di masa yang akan datang dalam periode tertentu.

Peringkat komposit profil risiko Bank per 31 Desember 2023 adalah 2 (dua) dengan predikat risiko inheren adalah *Low to Moderate* dan predikat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *Satisfactory*.

No.	Risiko	*Inherent Risk*	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	*Net Risk*
1.	Risiko Kredit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
2.	Risiko Pasar	*Low*	*Satisfactory*	1
3.	Risiko Likuiditas	*Low*	*Satisfactory*	1
4.	Risiko Operasional	*Moderate*	*Fair*	3
5.	Risiko Hukum	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
6.	Risiko Reputasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
7.	Risiko Stratejik	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
8.	Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
9.	Risiko Investasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
10.	Risiko Imbal Hasil	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Peringkat Komposit		*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2

RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

Rencana Aksi (*Recovery Plan*) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan (*financial stress*) yang mungkin terjadi di Bank Sistemik. *Recovery Plan* menjadi kerangka kerja dan panduan bagi Bank untuk mencegah atau menangani permasalahan finansial yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. Penyusunan *Recovery Plan* merupakan pemenuhan atas Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Sebagai Bank Sistemik, BSI telah menyiapkan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang termasuk di dalamnya Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*.

Recovery Plan antara lain berisi analisis lini usaha Bank dan skenario analisis atas kondisi krisis (*reverse stress testing*) yang dapat terjadi pada Bank baik secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock*. *Recovery Plan* BSI telah mendapat persetujuan pemegang saham pada tanggal 22 Mei 2023. BSI telah memiliki instrument utang berkarakteristik modal yaitu sukuk subordinasi dan telah memenuhi Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik Pasal 24, di mana bank sistemik wajib memiliki surat utang berkarakteristik modal.

Rencana Pengembangan Manajemen Risiko

Pengembangan manajemen risiko diselaraskan dengan perkembangan bisnis Bank, kondisi internal dan eksternal termasuk adanya regulasi baru. Rencana pengembangan dan penguatan *risk tools* dan metodologi yang akan dilakukan pada tahun 2024, antara lain:

1. Pengembangan model CKPN dan *Climate Risk Stress Test* (CRST)
2. Implementasi *Enterprise Risk Management System* (ERMS)
3. Pengembangan *Fraud Detection System* (FDS) pada sisi aplikasi dan transaksi

KONSOLIDASI DAN INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO DENGAN PERUSAHAAN INDUK

BSI melakukan konsolidasi penerapan manajemen risiko dengan perusahaan induk yang menjadi entitas utama dalam rangka menyinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara perusahaan anak dan perusahaan induk (Bank Mandiri). Konsolidasi dan integrasi ditujukan untuk penguatan pengelolaan risiko secara internal dan memenuhi ketentuan regulator.

Konsolidasi dan integrasi penerapan manajemen risiko tersebut mencakup konsolidasi, antara lain:

1) Sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen risiko.
2) Sinkronisasi arsitektur kebijakan dan prosedur operasional BSI.
3) *Tools* dan metodologi manajemen risiko.

Secara berkala BSI bersama perusahaan induk menyelenggarakan *Integrated Risk Management Forum*, forum konsultasi/*sharing*, serta diskusi lainnya sesuai kebutuhan.

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2023

A. Risiko Kredit

1. Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah

No.	Kategori Portofolio				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	103.170.615	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	14.711.814	1.290.564	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional				
4	Tagihan kepada Bank	97.588	2.400.808	415.155	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	6.442.227	4.477.530	28.070.674	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	18.620.732	1.828.532	9.882.078	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	21.605.361	4.494.116	23.503.094	
9	Tagihan kepada Korporasi	15.089.414	18.980.559	27.202.635	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	459.934	141.636	557.261	
11	Aset Lainnya	2.086.523	8.567.744	1.764.624	
	TOTAL	64.401.779	158.773.354	92.686.085	

No.	Kategori Portofolio				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	90.953.140	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	12.465.506	1.898.090	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	5.128	2.864.369	120.328	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	5.286.530	3.196.642	17.873.213	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	2.308	-	200	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	17.007.913	1.331.050	9.193.654	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	16.093.738	4.084.928	25.382.689	
9	Tagihan kepada Korporasi	10.955.582	16.940.903	22.601.160	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	370.788	119.896	589.980	
11	Aset Lainnya	116.855	9.223.547	2.239.776	
	TOTAL	49.838.842	141.179.981	79.899.090	

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah:
1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di Neraca, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposure yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank, sesuai laporan manajemen. Pembagian wilayah ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. Bank harus mengungkapkan dalam laporan, rincian tagihan bersih dari masing-masing wilayah.
4. Penentuan wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek dari debitur.

(Rp Juta)

31 Desember 2023						
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						
	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	-	-	-	-	-	103.170.615
	-	-	-	-	-	16.002.378
						-
	74	10.149	-	-	-	2.923.774
	2.000.868	1.591.560	876.038	19.408	-	43.478.305
	-	6.923	-	-	-	6.923
	3.433.883	6.027.850	2.182.877	314.674	-	42.290.626
	3.426.968	3.721.270	2.470.361	217.045	-	59.438.215
	12.568.702	1.362.881	668.397	266.108	-	76.138.696
	72.004	53.223	51.359	1.752	-	1.337.169
	410.373	301.462	102.245	15.413	-	13.248.384
	21.912.872	13.075.318	6.351.277	834.400	-	358.035.085

(Rp Juta)

31 Desember 2022						
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						
	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	-	-	-	-	-	90.953.140
	-	-	1.500.532	-	-	15.864.128
	-	-	-	-	-	-
	1	12.709	-	-	-	3.002.535
	1.966.067	1.607.183	723.219	19.571	-	30.672.425
	-	3.991	-	-	-	6.499
	3.439.850	5.887.307	1.861.709	306.733	-	39.028.216
	2.506.943	3.499.266	2.233.253	159.188	-	53.960.005
	11.208.760	1.758.202	650.711	72.380	-	64.187.698
	82.825	64.864	64.153	615	-	1.293.121
	25.922	49.825	9.516	2.112	-	11.667.553
	19.230.368	12.883.347	7.043.093	560.599	-	310.635.320

2. Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan kepada Bank
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel
9	Tagihan kepada Korporasi
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11	Aset Lainnya
	TOTAL

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan kepada Bank
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel
9	Tagihan kepada Korporasi
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11	Aset Lainnya
	TOTAL

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak:
1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di Neraca, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposure yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Pemetaan ke dalam skala waktu dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos Neraca, TRA dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang memiliki jatuh tempo kontraktual. Untuk pos Neraca, TRA dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (*non maturity items*) dimasukkan ke dalam kolom non-kontraktual.

(Rp Juta)

	31 Desember 2023					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
	< 1 Tahun	> 1 Tahun s.d. 3 Tahun	> 3 Tahun s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun	Non Kontraktual	Total
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	72.061.730	17.904.457	7.139.766	6.064.662	-	103.170.615
	8.372.624	804.801	1.292.528	5.532.425	-	16.002.378
	-	-	-	-	-	-
	2.632.715	166.911	67.548	56.600	-	2.923.774
	136.432	1.386.355	2.933.022	39.022.496	-	43.478.305
	2.838	4.085	-	-	-	6.923
	158.990	2.189.121	4.484.488	35.458.027	-	42.290.626
	7.334.172	15.409.195	16.411.344	20.283.504	-	59.438.215
	13.391.282	10.826.924	12.062.625	39.857.865	-	76.138.696
	126.385	360.813	241.519	608.452	-	1.337.169
	-	-	-	-	13.248.384	13.248.384
	104.217.168	49.052.662	44.632.840	146.884.031	13.248.384	358.035.085

(Rp Juta)

	31 Desember 2022					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
	< 1 Tahun	> 1 Tahun s.d. 3 Tahun	> 3 Tahun s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun	Non Kontraktual	Total
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	52.519.757	23.226.901	9.462.773	5.743.709	-	90.953.140
	7.481.218	1.454.649	2.220.611	4.707.650	-	15.864.128
	-	-	-	-	-	-
	2.824.387	87.964	72.561	17.623	-	3.002.535
	212.825	1.487.646	2.543.589	26.428.365	-	30.672.425
	2.508	3.991	-	-	-	6.499
	182.125	1.857.428	4.047.923	32.940.740	-	39.028.216
	6.692.864	11.962.829	12.733.026	22.571.286	-	53.960.005
	12.423.008	9.880.291	10.035.966	31.848.433	-	64.187.698
	245.003	239.145	316.768	492.205	-	1.293.121
	3.469.975	-	-	-	8.197.578	11.667.553
	86.053.670	50.200.844	41.433.217	124.750.011	8.197.578	310.635.320

3. Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	1.626.317	-	
5	Listrik, Gas, dan Air	-	2.494.067	-	
6	Konstruksi	-	7.721.197	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	4.396	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	33.962	-	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	2.041.457	-	
10	Perantara Keuangan	1.477.500	1.914.403	-	
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	4.773	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	
20	Lainnya	101.693.115	161.806	-	
	TOTAL	**103.170.615**	**16.002.378**	-	

(Rp Juta)

31 Desember 2023								
Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi								
	Tagihan kepada Bank	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	-	6.887	3.982.793	12.905.205	52.783	-
	-	-	-	36.565	509.077	159.083	22.032	-
	-	-	-	524	12.959	2.381.173	371	-
	-	-	-	-	1.989.441	6.645.375	108.231	-
	-	-	-	278	22.155	1.912.413	79.225	-
	-	-	2.838	-	251.498	10.127.445	16.147	-
	-	-	-	40.385	11.031.920	5.626.602	228.937	-
	-	-	-	-	2.116.903	552.189	17.931	-
	-	-	-	-	476.943	5.767.581	8.902	-
	2.923.774	-	-	-	8.653	2.203.147	25	-
	-	-	4.085	46	750.292	3.063.358	16.510	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	875	217.044	4.256.304	12.876	-
	-	-	-	87	512.887	6.275.028	12.155	-
	-	-	-	32.982	2.806.221	383.267	28.213	-
	-	-	-	1.999	56.984	90.673	4.817	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	43.478.305	-	42.169.998	34.457.183	9.176.638	728.014	-
	-	-	-	-	235.262	4.613.215	-	13.248.384
	2.923.774	43.478.305	6.923	42.290.626	59.438.215	76.138.696	1.337.169	13.248.384

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	208.603	-	
2	Perikanan	-	242	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	1.500.000	-	
4	Industri Pengolahan	-	1.596.933	-	
5	Listrik, Gas, dan Air	-	2.224.244	-	
6	Konstruksi	-	6.648.450	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	253.488	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	38.362	-	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	2.069.437	-	
10	Perantara Keuangan	1.492.500	1.063.029	-	
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	532	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	
20	Lainnya	89.460.640	260.808	-	
	TOTAL	90.953.140	15.864.128	-	

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi:
1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di Neraca, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposure yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK), dengan tambahan sektor lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan bersih yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.

(Rp Juta)

31 Desember 2022								
Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi								
	Tagihan kepada Bank	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai / Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	-	3.838	2.826.050	10.125.328	58.056	-
	-	-	-	52.864	454.338	331.942	19.786	-
	-	-	-	565	10.093	2.255.440	6.129	-
	-	-	-	40	1.335.835	6.233.294	146.312	-
	-	-	-	460	15.345	1.391.209	73.562	-
	-	-	5.779	-	235.439	8.918.436	78.570	-
	-	-	-	57.857	10.811.000	5.528.926	239.747	-
	-	-	-	-	1.448.890	648.812	16.054	-
	-	-	-	-	373.887	3.012.716	8.990	-
	160.487	-	-	-	11.832	2.319.757	57	-
	-	-	720	53	623.126	3.313.954	29.565	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.070	174.160	3.693.266	8.391	-
	-	-	-	122	386.957	4.705.248	2.063	-
	-	-	-	49.720	1.950.202	415.152	30.316	-
	-	-	-	3.571	77.866	97.394	2.450	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	30.672.425	-	38.858.056	32.919.727	8.683.001	573.073	-
	2.842.048	-	-	-	305.258	2.513.823	-	11.667.553
	3.002.535	30.672.425	6.499	39.028.216	53.960.005	64.187.698	1.293.121	11.667.553

4. Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah

No.	Kategori Portofolio	Sumatera	Jakarta	Jawa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tagihan	65.761.040	161.621.708	95.903.476	
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)	-	-		
	a. Belum jatuh tempo	730.707	701.541	961.823	
	b. Telah jatuh tempo	459.934	3.436	695.461	
3	CKPN - Individual	105.827	-	1.109.150	
4	CKPN - Kolektif	1.605.132	175.726	5.861.667	
5	Tagihan yang dihapus buku	809.630	351.360	801.714	

No.	Kategori Portofolio	Sumatera	Jakarta	Jawa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tagihan	50.831.615	144.226.483	82.395.742	
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)	-	-	-	
	a. Belum jatuh tempo	3.432.328	6.589.669	6.949.396	
	b. Telah jatuh tempo	370.788	119.896	589.980	
3	CKPN - Individual	100.361	222.383	1.056.270	
4	CKPN - Kolektif	1.439.318	2.271.654	3.062.889	
5	Tagihan yang dihapus buku	90.712	1.808.168	228.415	

(Rp Juta)

31 Desember 2023						
Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah						
	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	22.212.087	13.393.190	6.469.668	842.747		366.203.916
	-	-	-	-	-	-
	170.913	214.912	61.046	6.533		2.847.475
	72.004	53.223	51.359	1.752		1.337.169
	45.428	10.855	-	-	-	1.271.260
	429.867	355.063	169.014	10.313	-	8.606.782
	174.710	152.899	107.817	947		2.399.077

(Rp Juta)

31 Desember 2022						
Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah						
	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	19.457.966	13.181.319	7.120.165	562.596	-	317.775.886
	-	-	-	-	-	-
	1.202.996	783.283	760.121	20.841	-	19.738.634
	82.825	64.864	64.153	615	-	1.293.121
	73.808	10.541	-	-	-	1.463.363
	443.618	404.227	167.191	6.023	-	7.794.920
	19.549	32.530	23.062	215	-	2.202.651

5. Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi
(1)	(2)
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas, dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan Besar dan Eceran
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
10	Perantara Keuangan
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
19	Bukan Lapangan Usaha
20	Lainnya
	TOTAL

(Rp Juta)

31 Desember 2023					
Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi					
Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.131.131	133.442	52.783	119.383	454.505	165.014
769.618	19.492	22.032	-	54.915	70.195
2.416.126	2.764	371	-	25.569	14.190
11.833.328	60.305	108.231	1.012.820	559.615	118.677
4.769.409	653	79.225	4.194	304.908	638
19.943.956	562.411	16.147	13.593	2.638.405	108.223
17.638.778	385.962	228.937	31.008	890.958	626.022
2.762.902	41.774	17.931	9.843	104.130	38.748
8.364.049	40.055	8.902	18.810	271.665	32.293
6.009.903	32.524	25	2.594	111.278	3.686
3.913.493	26.436	16.510	7.139	103.448	81.199
-	-	-	-	-	-
4.526.632	6.526	12.876	14.797	68.162	35.848
6.911.573	9.345	12.155	4.789	94.183	5.063
3.321.171	45.009	28.213	-	145.941	76.339
161.075	1.628	4.817	-	8.907	6.519
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
131.922.983	1.479.149	728.014	32.290	2.580.613	1.001.814
123.807.789	-	-	-	189.580	14.609
366.203.916	**2.847.475**	**1.337.169**	**1.271.260**	**8.606.782**	**2.399.077**

No.	Sektor Ekonomi
(1)	(2)
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas, dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan Besar dan Eceran
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
10	Perantara Keuangan
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
19	Bukan Lapangan Usaha
20	Lainnya
	TOTAL

6. Rincian Mutasi CKPN

No.	Keterangan
(1)	(2)
1	Saldo awal CKPN
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode tahun berjalan (Net)
	2.a Pembentukan CKPN pada periode tahun berjalan
	2.b Pemulihan CKPN pada periode tahun berjalan
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode tahun berjalan
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode tahun berjalan
	SALDO AKHIR CKPN

(Rp Juta)

31 Desember 2022					
Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi					
Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.402.466	1.234.255	58.056	100.382	466.223	114.741
920.432	220.887	19.786	-	68.532	100.168
3.795.318	123.134	6.129	2.359	59.545	12.509
10.891.618	405.927	146.312	1.101.047	536.312	187.707
4.035.107	57.001	73.562	4.744	366.158	10.089
16.519.583	3.289.765	78.570	10.759	2.047.215	99.476
17.146.301	2.411.690	239.747	56.629	891.573	676.794
2.195.828	557.685	16.054	12.302	84.946	36.192
5.613.319	2.681.692	8.990	85.559	369.656	14.385
5.304.479	85.501	57	5.737	106.025	7.232
4.098.095	743.489	29.565	21.399	160.382	35.774
-	-	-	-	-	-
3.914.185	760.767	8.391	29.750	63.172	8.197
5.183.481	453.920	2.063	7.323	68.467	10.355
2.526.658	376.081	30.316	-	132.764	81.739
188.846	63.176	2.450	-	11.186	12.572
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
112.841.924	6.273.664	573.073	25.373	2.302.868	11.468
109.198.246	-	-	-	59.896	783.253
317.775.886	19.738.634	1.293.121	1.463.363	7.794.920	2.202.651

(Rp Juta)

31 Desember 2023		31 Desember 2022	
Rincian Mutasi CKPN		Rincian Mutasi CKPN	
CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	CKPN - Individual	CKPN - Kolektif
(3)	(4)	(5)	(6)
1.463.363	7.794.920	1.199.929	6.329.966
-	-	-	-
(65.303)	2.715.512	462.617	3.227.061
28.124	583.657	13.717	350.261
(154.924)	(2.481.020)	(212.900)	(2.171.123)
-	(6.287)	-	58.755
1.271.260	8.606.782	1.463.363	7.794.920

7. Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

No.	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Fitch Rating Internasional	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Moody's Investor Service	AAA	AA1 s.d AA3	A1 s.d A3	BAA1 s.d BAA3	
		Fitch Rating Indonesia	AAA (IDN)	AA+(IDN) s.d AA-(IDN)	A+(IDN) s.d A-(IDN)	BBB+(IDN) s.d BBB-(IDN)	
		Pemeringkat Efek Indonesia	IDAAA	IDAA+ s.d IDAA-	IDA+ s.d IDA-	IDBBB+ s.d IDBBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Tagihan kepada Pemerintah		1.477.500	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		3.408.470	7.521.154	2.397.641	900.831	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan kepada Bank		640.134	41.695	42.956	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal						
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial						
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		1.812.597	985.431	7.689.512	989.450	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	TOTAL		7.338.701	8.548.280	10.130.109	1.890.281	

(Rp Juta)

31 Desember 2023									
Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat									
				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	BA1 s.d BA3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(IDN) s.d BB-(IDN)	B+(IDN) s.d B-(IDN)	Kurang dari B-(IDN)	F1+(IDN) s.d F1(IDN)	F2(IDN)	F3(IDN)	Kurang dari F3(IDN)		
	ID BB+ s.d IDBB-	ID B+ s.d IDB-	Kurang dari IDB-	IDA1	IDA2	IDA3 s.d IDA4	Kurang dari IDA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	101.693.115	103.170.615
	-	-	-	-	-	-	-	1.774.282	16.002.378
	-	-	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-	-	2.198.989	2.923.774
	-	-	-	-	-	-	-	64.661.706	76.138.696
	-	-	-	-	-	-	-	170.328.092	198.235.463

No.	Kategori Portofolio						
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Fitch Rating Internasional	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Moody's Investor Service	AAA	AA1 s.d AA3	A1 s.d A3	BAA1 s.d BAA3	
		Fitch Rating Indonesia	AAA (IDN)	AA+(IDN) s.d AA-(IDN)	A+(IDN) s.d A-(IDN)	BBB+(IDN) s.d BBB-(IDN)	
		Pemeringkat Efek Indonesia	IDAAA	IDAA+ s.d IDAA-	IDA+ s.d IDA-	IDBBB+ s.d IDBBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Tagihan kepada Pemerintah		1.492.500	-	-	49.064.882	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		4.621.033	5.599.317	2.531.527	3.008.410	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank		596.492	48.628	35.794	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal						
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial						
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		412.599	-	4.425.911	2.261.561	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	TOTAL		7.122.624	5.647.945	6.993.232	54.334.853	

(Rp Juta)

31 Desember 2022									
Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat									
				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	BA1 s.d BA3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(IDN) s.d BB-(IDN)	B+(IDN) s.d B-(IDN)	Kurang dari B-(IDN)	F1+(IDN) s.d F1(IDN)	F2(IDN)	F3(IDN)	Kurang dari F3(IDN)		
	ID BB+ s.d IDBB-	ID B+ s.d IDB-	Kurang dari IDB-	IDA1	IDA2	IDA3 s.d IDA4	Kurang dari IDA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	40.395.758	90.953.140
	-	-	-	-	-	-	-	103.841	15.864.128
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	2.321.621	3.002.535
	-	-	-	-	-	-	-	57.087.627	64.187.698
	-	-	-	-	-	-	-	99.908.847	174.007.501

8. Risiko Kredit Pihak Lawan

a. Transaksi Linding Nilai Syariah *Over the Counter*

No.	Variabel yang Mendasari	Nilai Nosional			
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	*Sharia compliant profit rate swap*	-	-	-	
2	*Sharia compliant foreign currency swap*	-	-	-	
3	Lainnya	-	-	-	
	TOTAL	-	-	-	

No.	Variabel yang Mendasari	Nilai Nosional			
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	*Sharia compliant profit rate swap*	-	-	-	
2	*Sharia compliant foreign currency swap*	-	-	-	
3	Lainnya	-	-	-	
	TOTAL	-	-	-	

(Rp Juta)

31 Desember 2023					
Transaksi Lindung Nilai Syariah OTC					
	Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

(Rp Juta)

31 Desember 2022					
Transaksi Lindung Nilai Syariah OTC					
	Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

b. Transaksi *Repo*

(Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Transaksi *Repo*			
		Nilai Wajar SSB *Repo*	Kewajiban *Repo*	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

(Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			
		Transaksi *Repo*			
		Nilai Wajar SSB *Repo*	Kewajiban *Repo*	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

c. Transaksi *Reverse Repo*

(Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Reverse Repo			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

(Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			
		Reverse Repo			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

9. Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023									
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit									ATMR
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**										
1	Tagihan kepada Pemerintah	103.170.615	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.095.788	9.048.574	-	-	4.597.916	-	-	260.099		4.498.821
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	67.191	2.599.896	-	-	198.327	-	-	-		619.143
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	45	7.563.174	9.854.950	26.060.136	-	-	-	-		13.097.420
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	6.923	-		6.923
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	508	-	-	-	42.290.118	-	-	-		21.145.059
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	7.345.096	12.987.280	-	-	-	-	-	-		31.273.502
9	Tagihan kepada Korporasi	5.034.024	2.830.393	-	-	7.561.997	-	58.856.675	-		63.203.752
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.242	126.138	-	-	-	-	1.205.353	-		1.230.581
11	Aset Lainnya	5.255.841	-	-	-	-	-	7.992.543	-		7.992.543
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	122.971.350	35.155.455	9.854.950	26.060.136	54.648.358	-	68.061.494	260.099		143.067.744

(Rp Juta)

	Beban Modal	31 Desember 2022									ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	-	90.953.140	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	359.906	507.167	9.927.460	-	-	5.429.502	-	-	-		4.700.243	376.019
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	49.531	28.081	2.723.273	-	-	211.700	-	-	-		650.505	52.040
	1.047.794	619	7.269.526	7.985.262	15.417.018	-	-	-	-		8.846.177	707.694
	554	-	-	-	-	-	-	6.499	-		6.499	520
	1.691.605	970	-	-	-	39.027.246	-	-	-		19.513.623	1.561.090
	2.501.880	6.023.228	10.858.090	-	-	-	36.203.575	-	-		29.324.299	2.345.944
	5.056.300	3.257.942	445.298	-	-	4.260.278	-	54.689.556	-		56.908.755	4.552.700
	98.446	2.971	85.091	-	-	-	-	1.205.058	-		1.222.076	97.766
	639.403	-	-	-	-	-	-	6.716.084	-		6.716.084	537.287
	11.445.419	100.774.118	31.308.738	7.985.262	15.417.018	48.928.726	36.203.575	62.617.197	-		127.888.261	10.231.060

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023									ATMR
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit									
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	**Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi**										
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	-	48.196	-	-	10.164	-	-	-		14.721
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	871.110	-	-		653.333
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	69.104	-	1.760.564	-		1.834.023
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	3.437	-		3.437
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	-	48.196	-	-	79.268	871.110	1.764.001	-		2.505.514

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023									ATMR
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit									
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**										
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	-	-	-	-	-	-	-	-		-

(Rp Juta)

	Beban Modal	31 Desember 2022									ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	1.178	-	39.481	-	-	-	-	-	-		7.896	632
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	52.267	4.227	-	-	-	-	870.886	-	-		653.165	52.253
	146.722	1.612	-	-	-	72.982	-	1.460.030	-		1.496.521	119.722
	275	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	200.442	5.839	39.481	-	-	72.982	870.886	1.460.030	-		2.157.582	172.607

(Rp Juta)

	Beban Modal	31 Desember 2022									ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

10. Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih dan Teknik MRK			
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan		
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**				
1	Tagihan kepada Pemerintah	103.170.615	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	16.002.378	2.095.788	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	2.865.414	67.191	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	43.478.305	45	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	6.923	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	42.290.626	508	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	58.567.105	7.345.096	-	12.987.280
9	Tagihan kepada Korporasi	74.283.089	5.034.024	-	32.365
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.333.732	2.242	-	126.138
11	Aset Lainnya	13.248.384	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**355.246.571**	**14.544.894**	**-**	**13.145.783**
B	**Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi**				
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	58.359	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	871.110	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	1.855.607	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.437	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	**2.788.513**	**-**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**				
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL (A+B+C)	**-**	**-**	**-**	**-**

(Rp Juta)

			31 Desember 2022					
			Tagihan Bersih Dan Teknik MRK					
	Lainnya	Bagian yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
				Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
		103.170.615	90.953.140	-	-	-		90953140
		13.906.590	15.864.128	507.167	-	-		15.356.961
		-	-	-	-	-		-
		2.798.223	2.963.054	28.081	-	-		2.934.973
		43.478.260	30.672.425	619	-	-		30.671.806
		6.923	6.499	-	-	-		6.499
		42.290.118	39.028.216	970	-	-		39.027.246
		38.234.729	53.084.893	6.023.228	-	-		47.061.665
		69.216.700	62.653.073	3.257.942	-	-		59.395.131
		1.205.352	1.293.121	2971	-	-		1.290.150
		13.248.384	11.667.553	6716084	-	-		4.951.469
		327.555.894	308.186.102	16.537.062	-	-		291.649.040
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		58.359	39.481	-	-	-		39.481
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		871.110	875.112	4.227	-	-		870.885
		1.855.607	1.534.625	1.612	-	-		1.533.013
		3.437	-	-	-	-		-
		2.788.513	2.449.218	5.839	-	-		2.443.379
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	310.635.320	16.542.901	-	-		294.092.419

11. Transaksi Sekuritisasi Aset

No.	Eksposur Sekuritisasi
(1)	(2)
1	Bank bertindak sebagai kreditur awal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
2	Bank bertindak sebagai penyedia kredit pendukung:
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
3	Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
4	Bank bertindak sebagai penyedia jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
5	Bank bertindak sebagai bank kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
6	Bank bertindak sebagai pemodal
	a. *Senior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
	b. *Junior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)

No.	Eksposur Sekuritisasi
(1)	(2)
1	Bank bertindak sebagai kreditur awal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
2	Bank bertindak sebagai penyedia kredit pendukung:
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
3	Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
4	Bank bertindak sebagai penyedia jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
5	Bank bertindak sebagai bank kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
6	Bank bertindak sebagai pemodal
	a. *Senior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
	b. *Junior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)

(Rp Juta)

31 Desember 2023					
Transaksi Sekuritisasi Aset					
Nilai Aset yang Disekuritisasi	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-			-		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-					
-					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		-

(Rp Juta)

31 Desember 2022					
Transaksi Sekuritisasi Aset					
Nilai Aset yang Disekuritisasi	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-			-		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-					
-					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		-

12. Transaksi Sekuritisasi Aset dalam Hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Awal

No.	*Underlying Asset*
(1)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan kepada Bank
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9	Tagihan kepada Korporasi
10	Aset Lainnya
	TOTAL

13. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

a. Laporan Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan kepada Bank
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9	Tagihan kepada Korporasi
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11	Aset Lainnya
	TOTAL

(Rp Juta)

31 Desember 2023		31 Desember 2022	
Transaksi Sekuritisasi Aset Kreditur Awal		Transaksi Sekuritisasi Aset Kreditur Awal	
Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/Kerugian Penjualan	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/Kerugian Penjualan
(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

(Rp Juta)

31 Desember 2023			31 Desember 2022		
Eksposur Aset Neraca			Eksposur Aset Neraca		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
103.170.615	-	-	90.953.140	-	-
16.002.378	4.982.402	4.498.822	15.864.128	4.865.959	4.700.243
	-	-	-	-	-
2.865.414	652.738	619.143	2.963.054	664.545	650.505
43.478.305	13.097.429	13.097.419	30.672.425	8.846.312	8.846.177
6.923	6.923	6.923	6.499	6.499	6.499
42.290.626	21.145.313	21.145.059	39.028.216	19.514.108	19.513.623
58.567.105	43.925.329	31.273.502	53.084.893	39.813.670	29.324.299
74.283.089	68.213.669	63.203.753	62.653.073	60.142.855	56.908.755
1.333.732	1.333.732	1.230.580	1.293.121	1.293.121	1.222.076
13.248.384	-	7.992.543	11.667.553	-	6.716.084
355.246.571	153.357.535	143.067.744	308.186.102	135.147.069	127.888.261

b. Laporan Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontinjensi di Laporan Komitmen dan Kontinjensi

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan kepada Bank
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9	Tagihan kepada Korporasi
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
	TOTAL

c. Laporan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan kepada Bank
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan kepada Korporasi
	TOTAL

(Rp Juta)

31 Desember 2023			31 Desember 2022		
Eksposur Komitmen dan Kontinjensi			Eksposur Komitmen dan Kontinjensi		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
58.359	14.721	14.721	39.481	7.896	7.896
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
871.110	653.332	653.332	875.112	656.334	653.165
1.855.607	1.834.024	1.834.024	1.534.625	1.498.134	1.496.521
3.437	3.437	3.437	-	-	-
2.788.513	2.505.514	2.505.514	2.449.218	2.162.364	2.157.582

(Rp Juta)

31 Desember 2023			31 Desember 2022		
Eksposure Risiko Kredit CCR			Eksposure Risiko Kredit CCR		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

d. Laporan Eksposure yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Penyelesaian (*Settlement Risk*)

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	*Delivery versus payment*
	a. Beban modal 8% (5-15 hari)
	b. Beban modal 50% (16-30 hari)
	c. Beban modal 75% (31-45 hari)
	d. Beban modal 100% (lebih dari 45 hari)
2	*Non-delivery versus payment*
	TOTAL

e. Laporan Eksposur Sekuritisasi

(Rp Juta)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Eksposur Sekuritisasi		Eksposur Sekuritisasi	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode External Rating Base Approach (ERBA)		-		-
2	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode Standardized Approach (SA)		10.831		-
3	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-		-	
	TOTAL	-	10.831	-	-

f. Laporan Total Pengukuran Risiko Kredit

(Rp Juta)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	145.584.089	130.045.842
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

(Rp Juta)

31 Desember 2023			31 Desember 2022		
Eksposur Risiko Kredit *Settlement Risk*			Eksposur Risiko Kredit *Settlement Risk*		
Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-		-	-		-
-		-	-		-
-		-	-		-
-		-	-		-
-		-	-		-
-	-		-	-	
-	-	-	-	-	-

B. Risiko Pasar

(Rp Juta)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Bank		Bank	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko *Benchmark* Suku Bunga	55.893	698.668	9.386	117.330
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	55.893	698.668	9.386	117.330
2	Risiko Nilai Tukar	75.350	941.868	15.108	188.854
3	Risiko Ekuitas[1)]				
4	Risiko Komoditas [1)]				
	TOTAL	131.243	1.640.536	24.494	306.184

Keterangan:
1) Untuk BUS yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

C. Risiko Likuiditas

1. Laporan Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah

No.	Pos-Pos	Saldo	31 Desember 2023		
			Jatuh Tempo*)		
			≤ 1 Bulan	> 1 Bulan s.d. 3 Bulan	> 3 Bulan s.d. 6 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**LAPORAN POSISI KEUANGAN**				
	A. Aset	**334.340.403**	**51.972.465**	**10.786.045**	**10.761.461**
	1. Kas	4.912.435	4.912.435	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	21.401.613	21.401.613	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	389.257	389.257	-	-
	4. Surat berharga yang dimiliki	69.551.241	16.408.444	3.337.886	4.793.369
	5. Piutang:				
	a. Piutang murabahah (*gross*)	135.797.448	208.608	244.549	568.277
	b. Piutang *salam*	-	-	-	-
	c. Piutang *istishna'*	30	-	-	23
	d. Piutang *qardh*	9.348.359	2.126.689	3.818.415	282.165
	6. Pembiayaan bagi hasil:				
	a. Pembiayaan *mudharabah*	1.881.133	17.923	3.506	144.598
	b. Pembiayaan musyarakah	86.041.493	3.897.471	3.380.288	4.967.961
	7. Pembiayaan sewa	2.408.507	1.138	1.401	5.068
	8. Aset lainnya	2.608.887	2.608.887	-	-
	B. Liabilitas	**295.403.060**	**256.228.652**	**23.418.538**	**8.649.819**
	1. Dana pihak ketiga				
	a. Giro wadiah	19.293.355	19.293.355	-	-
	b. Deposito *mudharabah*	112.830.232	74.028.280	23.330.092	8.578.629
	c. Tabungan wadiah	45.718.046	45.718.046	-	-
	d. Tabungan *mudharabah*	77.099.281	77.099.281	-	-
	e. Lainnya	19.541.100	19.541.100	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	11.900.055	11.900.055	-	-
	3. Liabilitas kepada bank lain	1.086.510	1.039.714	32.951	5.433
	4. Surat berharga yang diterbitkan	1.708.608	1.505.000	-	-
	5. Pembiayaan yang diterima	776.250	776.250	-	-
	6. Liabilitas lainnya	5.449.623	5.327.571	55.495	65.757
II	**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI**				
	1. Kewajiban komitmen	2.257.318	841.972	132.487	2.424
	2. Kewajiban kontinjensi	1.801.424	381.664	144.211	239.254
	Selisih (A-B)	**38.937.343**	**-204.256.187**	**-12.632.493**	**2.135.447**

(Rp Juta)

		Saldo	31 Desember 2022				
			Jatuh Tempo*)				
> 6 Bulan S.d. 12 Bulan	>12 Bulan		≤ 1 Bulan	> 1 Bulan s.d. 3 Bulan	> 3 Bulan s.d. 6 Bulan	> 6 Bulan s.d. 12 Bulan	>12 Bulan
(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.925.479	**214.956.637**	**296.808.742**	**47.854.469**	**5.310.696**	**10.761.461**	**17.925.480**	**214.956.637**
-	-	4.809.426	4.809.426	-	-	-	-
-	-	27.898.748	27.898.748	-	-	-	-
-	-	343.271	343.271	-	-	-	-
7.029.156	36.552.247	58.980.104	9.708.169	897.163	4.793.369	7.029.156	36.552.247
2.048.387	121.058.572	124.161.198	234.210	251.752	568.277	2.048.387	121.058.572
-	-	-	-	-	-	-	-
63	43	132	3	-	23	63	43
5.838.768	1.887.634	8.057.646	47.247	1.832	282.165	5.838.768	1.887.634
41.270	744.568	1.041.397	9.878	101.083	144.598	41.270	744.568
2.952.763	53.242.303	68.481.163	3.260.912	4.057.224	4.967.961	2.952.763	53.242.303
15.072	1.471.270	1.497.851	4.799	1.642	5.068	15.072	1.471.270
-	-	1.537.806	1.537.806	-	-	-	-
5.216.132	**787**	**263.585.683**	**245.870.040**	**8.111.977**	**4.386.747**	**5.216.132**	**787**
-	-	20.844.301	20.844.301	-	-	-	-
5.179.930	787	98.032.769	80.520.114	8.025.549	4.306.389	5.179.930	787
-	-	42.816.735	42.816.735	-	-	-	-
-	-	71.720.085	71.720.085	-	-	-	-
-	-	20.574.970	20.574.970	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
36.202	-	1.203.252	1.130.894	28.087	8.069	36.202	-
-	-	3.450.000	3.450.000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.943.571	4.812.941	58.341	72.289	-	-
		3.104.487	**420.998**	**198.716**	**561.154**	**308.603**	**1.615.016**
377.327	(810.859)	1.213.621	51.128	21.721	-	-	1.140.772
308.603	474.244	1.890.866	369.870	176.995	561.154	308.603	474.244
12.709.347	**214.955.850**	33.223.059	-198.015.571	-2.801.281	6.374.714	12.709.348	214.955.850

2. Laporan Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing

No.	Pos-Pos	Saldo	31 Desember 2023			
			Jatuh Tempo*)			
			≤ 1 Bulan	> 1 Bulan s.d. 3 Bulan	> 3 Bulan s.d. 6 Bulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I	**LAPORAN POSISI KEUANGAN**					
	A. Aset	**19.283.721**	**14.555.894**	**1.190.819**	**912.124**	
	1. Kas	343.406	343.406	-	-	
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	11.039.165	10.654.240	384.925	-	
	3. Penempatan pada bank lain	1.685.216	1.685.216	-	-	
	4. Surat berharga yang dimiliki	2.000.285	1.081.177	463.265	-	
	5. Piutang:					
	a. Piutang murabahah (*gross*)	82.223	-	-	-	
	b. Piutang *salam*	-	-	-	-	
	c. Piutang *istishna'*	-	-	-	-	
	d. Piutang *qardh*	1.958.722	791.855	342.629	801.266	
	6. Pembiayaan bagi hasil:					
	a. Pembiayaan *mudharabah*	-	-	-	-	
	b. Pembiayaan musyarakah	2.174.704	-	-	110.858	
	7. Pembiayaan sewa	-	-	-	-	
	8. Aset lainnya	-	-	-	-	
	B. Liabilitas	**19.481.943**	**18.745.347**	**262.572**	**67.538**	
	1. Dana pihak ketiga					
	a. Giro wadiah	1.554.169	1.554.169	-	-	
	b. Deposito *mudharabah*	3.017.864	2.281.268	262.572	67.538	
	c. Tabungan wadiah	1.308.328	1.308.328	-	-	
	d. Tabungan *mudharabah*	600.789	600.789	-	-	
	e. Lainnya	12.812.765	12.812.765	-	-	
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	
	3. Liabilitas kepada bank lain	45	45	-	-	
	4. Surat berharga yang diterbitkan	123.176	123.176	-	-	
	5. Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	
	6. Liabilitas lainnya	64.807	64.807	-	-	
II	**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI**					
	1. Kewajiban komitmen	2.008	2.008	-	-	
	2. Kewajiban kontinjensi	1.036.413	100.769	46.191	15.495	
	Selisih (A-B)	**-198.222**	**-4.189.453**	**928.247**	**844.586**	

(Rp Juta)

			Saldo	31 Desember 2022				
				Jatuh Tempo[*)]				
	> 6 Bulan S.d. 12 Bulan	>12 Bulan		≤ 1 Bulan	> 1 Bulan s.d. 3 Bulan	> 3 Bulan s.d. 6 Bulan	> 6 Bulan s.d. 12 Bulan	>12 Bulan
	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	310.276	**2.314.608**	**8.918.696**	**3.845.436**	**1.028.614**	**236.187**	**1.418.455**	**2.390.004**
	-	-	142.043	142.043	-	-	-	-
	-	-	3.879.710	3.179.172	700.538	-	-	-
	-	-	524.221	524.221	-	-	-	-
	157.284	298.559	495.802	-	35.135	-	-	460.667
	-	82.223	123.609	-	-	-	-	123.609
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	22.972	-	1.643.963	-	-	225.508	1.418.455	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	130.020	1.933.826	2.109.348	-	292.941	10.679	-	1.805.728
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	406.486	**-**	**8.636.144**	**7.080.834**	**393.768**	**280.478**	**881.064**	**-**
	-	-	953.551	953.551	-	-	-	-
	406.486	-	2.453.161	1.988.721	294.650	67.101	102.689	-
	-	-	1.397.670	1.397.670	-	-	-	-
	-	-	549.621	549.621	-	-	-	-
	-	-	2.148.118	2.148.118	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	36	36	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	778.375	-	-	-	778.375	-
	-	-	355.612	43.117	99.118	213.377	-	-
	-	-	109.382	-	104.614	4.768	-	-
	117.987	755.971	817.922	57.811	8.599	5.774	103.805	641.933
	-96.210	2.314.608	282.552	-3.235.398	634.846	-44.291	537.391	2.390.004

D. Risiko Operasional

No.	Pendekatan yang Digunakan
(1)	(2)
1	Pendekatan indikator standar
	TOTAL

(Rp Juta)

31 Desember 2023			31 Desember 2022		
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.347.104	2.752.066	34.400.820	17.664.424	2.649.664	33.120.795
18.347.104	2.752.066	34.400.820	17.664.424	2.649.664	33.120.795

06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan BSI tak hanya mengacu pada ketentuan regulasi, tetapi juga berpedoman pada standar terbaik di tingkat nasional maupun internasional.

PENERAPAN GCG

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank Syariah Indonesia", "BSI", "Bank", "Perseroan", "Perusahaan") senantiasa berupaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik di industri. BSI meyakini, penerapan GCG menciptakan keselarasan antara tujuan Bank dengan tujuan para pemangku kepentingan terjalin dengan baik.

Situasi tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif, sehingga Bank mampu mencapai tujuan usaha yang ditargetkan secara berkesinambungan. Untuk itu, implementasi GCG harus dilakukan secara terarah dan terencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen Bank.

KOMITMEN TATA KELOLA

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, menjadikan BSI sebagai motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Amanah besar tersebut, dijalankan BSI dengan penuh rasa tanggungjawab yang tergambar dari setiap pencapaian BSI sejak merger hingga saat ini. Semua pencapaian BSI tersebut, tidak lepas dari komitmen Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan seluruh insan BSI untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat serta patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi BSI, prinsip-prinsip GCG termasuk prinsip-prinsip syariah merupakan selaput yang mengikat dan mengatur seluruh tindak laku BSI sebagai bank dan perusahaan terbuka, serta prinsip yang harus dijaga dan diimplementasikan oleh seluruh insan BSI dalam mencapai tujuan Bank sesuai dengan Visi dan Misi BSI.

BSI memiliki komitmen untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan di lingkungan Bank. Di tahun 2023, BSI secara bertahap berupaya untuk terus meningkatkan penerapan GCG agar terciptanya nilai keberlanjutan agar terus dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan syariah di nasional maupun secara global.

A. Dasar dan Pedoman Penerapan GCG

Sebagai bank syariah, landasan utama pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan BSI adalah Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip syariah tersebut dijalankan BSI dengan tata kelola perusahaan yang baik, yang tunduk dan berpedoman pada berbagai ketentuan serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur BSI sebagai perseroan terbatas, bank dan/atau perusahaan terbuka, sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK").
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.

4. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
5. Peraturan Bank Indonesia ("PBI") dan Surat Edaran Bank Indonesia ("SEBI") yang terkait dengan penerapan tata kelola, antara lain :
   a. PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah dicabut dengan POJK No.2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
   b. SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut perubahannya;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran OJK ("SEOJK") khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola, antara lain :
   a. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan ;
   b. POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
   c. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
   d. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
   e. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
   f. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut perubahannya;
   g. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
   h. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
   i. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;

TATA KELOLA PERUSAHAAN

j. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
k. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya;
l. POJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
m. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
n. POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan publikasi Laporan Bank ;
o. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum;
p. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ;
q. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
r. POJK No. 16/POJK.03/*2022* Tahun *2022* tentang Bank Umum Syariah;
s. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
t. POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
u. POJK No.2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
v. SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
w. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS;
x. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
y. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
z. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
aa. SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
bb. POJK dan SEOJK terkait lainnya.

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("PERMEN BUMN") yang mengatur mengenai anak perusahaan BUMN, seperti PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
8. Pedoman implementasi GCG lainnya, antara lain :
   a. Anggaran Dasar BSI;
   b. Pedoman Tata Kelola Teritegrasi Bank Mandiri dengan Perusahaan Anak;
   c. Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri;
   d. Peraturan Internal Perseroan termasuk kebijakan-kebijakan Perseroan seperti kebijakan GCG, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan kebijakan lainnya;
   e. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
   f. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
   g. Principles for Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.
   h. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

B. Prinsip-Prinsip Penerapan GCG

BSI senantiasa berupaya mernerapkan 5 (lima) prinsip-prinsip GCG bagi bank umum syariah, yaitu :

1. Keterbukaan
   a. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
   b. Memiliki Kebijakan Perusahaan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
   c. Menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan rahasia jabatan.

2. Akuntabilitas
   a. Sasaran usaha dan strategi dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.
   b. Tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.
   c. Masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
   d. *Check and balance system* dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan.
   e. Kinerja berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi serta *reward and punishment system*.
3. Pertanggungjawaban
   Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank wajib bertanggung jawab dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Independensi
   a. Bersikap independen.
   b. Menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
   c. Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran
   a. Memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
   b. Memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank.
   c. Memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Kelima prinsip-prinsip GCG tersebut diterapkan oleh BSI dengan berpegang teguh pada perilaku teladan yang dimiliki oleh Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* dalam bermuamalah, yaitu kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*).

TATA KELOLA PERUSAHAAN

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

2021	Kesadaran implementasi GCG sudah dimulai sejak dilaksanakannya merger menjadi BSI. BSI mengambil *best practice* dari masing-masing bank *legacy* untuk kemudian disempurnakan dan diimplementasikan di BSI. BSI juga telah melakukan penyempurnaan implementasi GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: • Pembentukan Komite-komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris, yaitu - Komite Audit - Komite Pemantau Risiko - Komite Remunerasi dan Nominasi • Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). • Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik. • Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material. • Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Selain itu BSI juga turut berkomitmen terhadap anti gratifikasi yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran pengurus diikuti oleh seluruh pegawai. BSI juga telah memperoleh ISO 37301 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dalam rangka menilai kualitas penerapan tata kelola, BSI ikut serta dalam program riset dan pemeringkatan pelaksanaan tata kelola yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh pihak independen. Dalam program CGPI 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 dengan tema: "Membangun Ketahanan dalam Kerangka Good Corporate Governance", BSI berhasil meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 88,89.
2022	• Melaksanakan *Right Issue* untuk memperkuat struktur permodalan BSI • Menjadi Bank Syariah pertama yang memperoleh sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan. • Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, BSI melakukan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF), yang disebut ASEAN *Corporate Governance* (CG) *Scorecard*. • BSI kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 90 pada penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)
2023	• Mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan • BSI kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 91,50 pada penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) • Melaksanakan 4 (empat) kali sosialisasi penguatan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi

Struktur Tata Kelola

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur *Good Corporate Governance*

"BSI menggunakan *Three Lines Model* dalam membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang efektif untuk memungkinkan pencapaian tujuan, dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat."

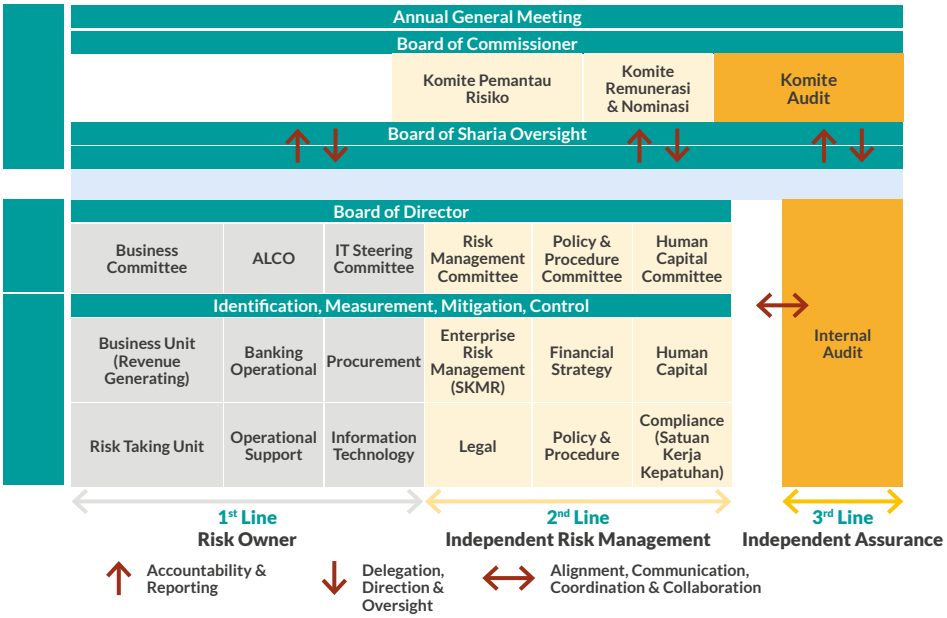

Struktur GCG BSI secara garis besar terbagi atas organ utama dan organ pendukung, yang didukung oleh kebijakan dan prosedur. Lebih rinci, struktur organisasi tata kelola Bank mencakup:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Dewan Pengawas Syariah;
4. Direksi;
5. Komite di bawah Koordinasi Dewan Komisaris;
6. Komite di bawah Koordinasi Direksi; dan
7. Komite Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ BSI yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BSI.

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai organ tertinggi dalam struktur tata kelola Bank, RUPS merupakan forum bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing Pemegang saham terkait dengan hal strategis ataupun pengelolaan Perseroan.

Terdapat 2 (dua) pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia , yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB"). RUPS Tahunan merupakan RUPS yang secara mandatory wajib diselenggarakan oleh Direksi setiap tahunnya, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Tahun Buku Bank ditutup/ berakhir. Sedangkan RUPSLB merupakan RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Bank. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang terdiri dari :

a. Saham Seri A Dwiwarna, merupakan saham khusus yang hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
b. Saham Seri B, merupakan saham biasa yang dapat dimilki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Komposisi Pemegang Saham

Per 31 Desember 2023, komposisi Pemegang Saham BSI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	
MODAL DASAR	**80.000.000.000**	**40.000.000.000.000**	
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,38
Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,91
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR	**46.129.260.138**	**23.064.630.069.000**	**100**
SAHAM DALAM PORTEPEL	**33.870.739.862**	**16.935.369.931.000**	

Hak Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham Secara Umum

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama yaitu setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham BSI baik pemegang saham Seri A Dwiwarna maupun pemegang saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Pemegang Saham terkait RUPS :
   a) Meminta penyelenggaran RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   b) Mengusulkan mata acara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   c) Menyetujui dalam RUPS antara lain terkait :
      i. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank,
      ii. menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Bank dengan memperhatikan syarat kuorum keputusan,
      iii. menyetujui laporan tahunan atas kinerja Direksi, dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Bank;
      iv. menyetujui pemberian remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank;
      v. menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Bank termasuk pembagian dividen.
   d) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
   e) Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
   f) Mendapatkan penjelasan prosedur voting sebelum RUPS dimulai.
   g) Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan mata araca RUPS pada setiap pembahasan mata acara RUPS.
2. Hak lainnya :
   a) Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b) Pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar
   c) Kesempatan untuk turut serta dalam penambahan modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   d) Menerima informasi Perusahaan yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk disampaikan dan/atau diumumkan kepada publik.
   e) Mendapatkan perlakuan yang sama dari BSI.
   f) Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa yang khusus dan hanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut :
   a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
   b) Perubahan permodalan;
   c) Penggabungan, peleburan, pemisahan; dan
   d) Pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.
2. Hak untuk menetapkan pedoman strategis Perseroan secara organik maupun non-organik.
3. Mengusulkan mata acara RUPS dan mata acara RUPS.
4. Meminta dan mengakses data Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar BSI, pelaksanaan hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna diatas dapat dikuasakan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak, kecuali pelaksanaan hak istimewa untuk angka 1.c) dan 1.d) , dan dilakukan menurut ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pemegang Saham Utama

Sesuai dengan komposisi pemegang saham BSI, mayoritas saham BSI dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) dengan kepemilikan Saham Seri B sebesar 51,47% per 31 Desember 2023. Dengan kepemilikan tersebut, Bank Mandiri menjadi Pemegang Saham Utama dan Induk Perusahaan BSI.

Sebagai anak perusahaan Bank Mandiri, BSI terikat dan tunduk dalam Piagam Korporasi tentang Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri berikut pedoman turunannya yang mengatur seluruh aspek-aspek pengelolaan Anggota Konglomerasi Keuangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Pengendali

Melihat pada sejarah pendirian BSI yang merupakan hasil merger dari 3 (tiga) bank syariah milik Bank BUMN, dan dengan masuknya Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, OJK telah menetapkan Pemegang Saham Pengendali ("PSP") BSI adalah :

1. Negara Republik Indonesia (dhi. Diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN), selaku pemegang 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna;
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku pemegang saham Seri B dengan jumlah kepemilikan sebesar 51,47% ;
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham Seri B dengan jumlah kepemilikan sebesar 23,24%; dan
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham Seri B dengan jumlah kepemilikan sebesar 15,38%.

TATA CARA PELAKSANAAN RUPS

Pelaksanaan RUPS, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar Perseroan. Regulasi tersebut mengungkapkan, RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil.

Sesuai dengan regulasi tersebut, tata cara atau proses penyelenggaraan RUPS mencakup:

a. Pemberitahuan
   Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
b. Pengumuman
   Direksi menyampaikan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS, melalui situs web BSI, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY KSEI.

   Penyampaian pengumuman sedikitnya memuat:
   1. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   2. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
   3. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
   4. Tanggal pemanggilan RUPS; dan
   5. Informasi penyelenggaraan RUPS karena adanya permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris (dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
c. Pemanggilan
   Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham dilakukan BSI paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS, melalui situs web BSI, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY KSEI.

   Pemanggilan sedikitnya memuat:
   1. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
   2. Waktu penyelenggaraan RUPS;
   3. Tempat penyelenggaraan RUPS;
   4. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   5. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
   6. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
   7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
d. Penyelenggaraan RUPS
   1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia, yaitu :
      a) Tempat kedudukan Perseroan;
      b) Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
      c) Ibukota Provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
      d) Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
   2. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila Komisaris Utama berhalang, maka RUPS

dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

3. Dalam pelaksanaan RUPS, Bank telah menunjuk Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek yang akan melakukan verifikasi data pemegang saham serta melakukan perhitungan suara, dan Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Notaris Pasar Modal selaku pihak yang mencatat jalannya RUPS.
4. Pada saat pelaksanaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir, dan pokok-pokok Tata Tertib RUPS wajib dibacakan sebelum RUPS dimulai .
5. RUPS dapat dimulai apabila terpenuhinya syarat Kuorum Kehadiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Dalam pelaksanaan RUPS, setiap pemegang saham yang hadir dengan hak suara sah berhak menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya yang relevan dengan mata acara dalam RUPS sesuai dengan tata tertib RUPS.
7. Keputusan RUPS diambil sesuai dengan Kuorum Keputusan untuk setiap mata acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, yang dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara dan perhitungan suara secara elektronik (e-Voting).
8. Mekanisme e-Voting dilakukan secara tertutup. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik ("*e-Voting*") di tempat RUPST ("*e-Voting at the Meeting Venue*") dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet dan lainlain)atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan oleh Bank, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiaannya. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses *e-Voting* eASY.KSEI. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme *e-Proxy*, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses *e-Voting at the Meeting Venue*.
9. Pengungkapan tata cara *e-Voting* telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang diumumkan/diunggah dalam situsweb Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPST.
10. Hal-hal lain terkait dengan tata cara pelaksanaan RUPS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, serta Tata Tertib RUPS.

e. Ringkasan Risalah RUPS dan Risalah RUPS

1. Ringkasan Risalah RUPS disampaikan ke publik paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
2. Informasi yang disampaikan dalam Ringkasan Risalah RUPS sedikitnya memuat:
   a) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
   b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
   c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
   d) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
   e) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
   f) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
   g) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
   h) Keputusan RUPS; dan
   i) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
3. Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023 & REALISASINYA

Pada tahun 2023, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 22 Mei 2023.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

22 Mei 2023.

Tahapan Pelaksanaan

Proses	Tanggal Realisasi	Keterangan
Pemberitahuan	5 April 2023	Disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 03/609-3/DIR-CSG tanggal 5 April 2023 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pengumuman	13 April 2023	• Pengumuman RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI. • Bukti pengumuman disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK melalui surat nomor 03/374-3/CSG tanggal 13 April 2023 perihal Pengumuman dan Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pemanggilan	28 April 2023	• Pemanggilan RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI. • Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek melalui surat nomor 03/437-3/CSG tanggal 02 Mei 2023 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS.
Tanggal Pelaksanaan	22 Mei 2023	-
Ringkasan Risalah	31 Mei 2023	Ringkasan risalah RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI pada 24 Mei 2022 melalui surat nomor 03/473-3/CSG tanggal 24 Mei 2023 perihal Penyampaian Laporan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (Surat ke Departemen Perbankan Syariah (DPBS) OJK No. 03/890-3/DIR-CSG tanggal 26 Mei 2023 perihal Informasi Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2022).
Akta Risalah	22 Mei 2023	Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor 45 tanggal 22 Mei 2023.
Penyampaian Risalah	16 Juni 2023	Penyampaian Risalah RUPST disampaikan kepada OJK dalam bentuk surat No. 03/558-3/CSG tanggal 16 Juni 2023 perihal Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2022. (Surat ke DPBS OJK No. 03/975-3/DIR-CSG tanggal 16 Juni 2023 perihal Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2022).

Mata Acara/Agenda

Mata Acara/Agenda yang dibahas dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.

4. Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Tahun 2022.
6. Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Daftar Peserta RUPS

Pada RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023, peserta yang hadir adalah:

Direksi

Hery Gunardi	Direktur Utama
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama
Ngatari	Direktur Retail Banking
Achmad Syafii	Direktur Information Technology
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking

Dewan Komisaris

Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen
Mohamad Nasir	Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen
Suyanto	Komisaris
Masduki Baidlowi	Komisaris
Imam Budi Sarjito	Komisaris
Sutanto	Komisaris
Nizar Ali*	Komisaris

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

Dewan Pengawas Syariah

Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag	Ketua
Dr.K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH.	Anggota
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 43.786.045.295 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 94,9203266% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Kelima tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan pelaporan.

Kesempatan Menyampaikan Pertanyaan atau Pendapat

Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat terkait mata acara rapat.

Mata Acara Rapat Pertama	:	Terdapat 1 pendapat
Mata Acara Rapat Kedua	:	Terdapat 1 pendapat

Pada mata acara rapat ketiga sampai dengan ketujuh tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat.

Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui sistem eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda, Keputusan, dan Realisasinya

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.	a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sesuai Laporan Nomor 00026/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. b. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka RUPS memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut.	Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju*)
43.674.736.431 suara atau 99,7457892% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	56.022.255 suara atau 0,1279455% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	55.286.609 suara atau 0,1262654% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	43.730.758.686 suara atau 99,8737346% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Pertanyaan/Pendapat : *In relation to the recent event of cyber attack, risk management should be significantly improved. Management should ensure that no such attack will ever happen again.*

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

2.	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	a. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp4.260.181.677.875,- (empat triliun dua ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah), sebagai berikut: 1. Sejumlah 20,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp852.036.335.575,- (delapan ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan. 2. Sejumlah 10,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sekurang-kurangnya Rp426.018.167.788,- (empat ratus dua puluh enam miliar delapan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen. 3. Sejumlah 70,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp2.982.127.174.512,- (dua triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.	Telah direalisasikan

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju*)
43.730.252.213 suara atau 99,8725779% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	33.357 suara atau 0,0000762% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	43.786.011.938 suara atau 99,9999238% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Pertanyaan/Pendapat : Penggunaan laba bersih perseroan untuk pengadaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang legal maupun jaringan secara desentralisasi dan paling terpenting adalah keamanan data perseroan setidaknya itu aman dari serangan perentas atau pihak yang tidak penting.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham.

Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju*)
43.730.285.561 suara atau 99,8726541% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	9 suara atau 0,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	43.786.045.286 suara atau 100,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

4. Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali Seri B terbanyak dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:
1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus atas kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.
3. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023.

Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju*)
43.337.078.325 suara atau 98,9746346% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	55.765.961 suara atau 0,1273601% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	393.201.009 suara atau 0,8980053% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	43.392.844.286 suara atau 99,1019947% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
5.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Tahun 2022.	Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.	-
6.	Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.	Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.	Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju*)
43.730.251.914 suara atau 99,8725773% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	33.656 suara atau 0,0000769% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	43.789.011.639 suara atau 99,9999231% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

7.	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.	a. Memberhentikan dengan hormat: 1) Sdr. Achmad Syafii sebagai Direktur *Information Technology*; 2) Sdri. Tiwul Widyastuti sebagai Direktur *Risk Management*; 3) Sdr. Nizar Ali sebagai Komisaris; terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga & pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. b. Mengalihkan penugasan Sdr. Adiwarman Azwar Karim semula sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2021, menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. c. Mengangkat: 1) Sdr. Saladin D. Effendi sebagai Direktur *Information Technology*; 2) Sdr. Grandhis sebagai Direktur *Risk Management*; 3) Sdr. Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; 4) Sdr. Abu Rokhmad sebagai Komisaris; terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2026, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatuan (*fit and proper test*). d. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya. Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:	Telah direalisasikan

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
		Dewan Komisaris	
		Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Muliaman D. Hadad*)
		Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim
		Komisaris	Suyanto
		Komisaris	Masduki Baidlowi
		Komisaris	Imam Budi Sarjito
		Komisaris	Sutanto
		Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan
		Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat
		Komisaris Independen	Mohamad Nasir
		Komisaris	Abu Rokhmad*)
		Direksi	
		Direktur Utama	Hery Gunardi
		Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta
		Direktur Retail Banking	Ngatari
		Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho
		Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna
		Direktur Compliance & Human Capital	Tribuana Tunggadewi
		Direktur Wholesale Transaction Banking	Zaidan Novari
		Direktur Treasury & International Banking	Moh. Adib
		Direktur Information Technology	Saladin D. Effendi*)
		Direktur Risk Management	Grandhis Helmi Harumansyah*)

*) Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju*)
42.235.569.738 suara atau 96,4589733% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	58.265.601 suara atau 0,1330689% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	1.492.209.956 suara atau 3,4079578% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	42.293.835.339 suara atau 96,5920422% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PELAKSANAAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA & REALISASINYA

Pada tahun 2022, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 pada 27 Mei 2022 dan RUPSLB pada 23 September 2022. Berikut adalah rincian penyelenggaraannya.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

27 Mei 2022.

Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Jose Dima, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan penghitungan dan validasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui sistem eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Agenda, Keputusan, dan Realisasi

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge)* terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021.	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC Global Network), dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00014/2.1025/Au.1/07/0222-1/1/I/2022 Tanggal 19 Januari 2022. 2. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 4. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada: a. Bapak Mulya Siregar yang menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021; b. Bapak Eko Suwardi sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021; c. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris dari ketiga bank legacy yaitu PT Bank BRIsyariah,Tbk ("BRIS"), PT Bank Syariah Mandiri ("BSM"), dan PT Bank BNI Syariah ("BNIS") untuk masa kerja sebelum efektifnya penggabungan, terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.	Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.105.821.260 suara atau 99,9994303% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	148.200 suara atau 0,0003790% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	74.600 suara atau 0,0001908% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
2.	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp3.028.204.859.899,- (Tiga triliun dua puluh delapan miliar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), sebagai berikut: a. Sejumlah 20% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp605.640.971.980,- (Enam ratus lima miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah), disisihkan sebagai Cadangan Wajib Perseroan. b. Sejumlah 25% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp757.051.214.975,- (Tujuh ratus lima puluh tujuh miliar lima puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai Dividen. c. Sejumlah 55% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp1.665.512.672.944,- (Satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar lima ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah), ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.094.560.060 suara atau 99,9706337% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	148.200 suara atau 0,0003790% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	11.335.800 suara atau 0,0289873% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Mohon digunakan untuk ekspansi seluruhnya dan tidak dibagikan sebagai dividen

Tanggapan : Terima kasih kepada Tuan HISAR JOEL MUNTE, secara prinsip untuk ekspansi perusahaan telah diperhitungkan, ini dapat terpenuhi termasuk dari pengalokasian laba ditahan yang diusulkan, dan sebagai informasi tambahan, 2 (dua) tahun terakhir ini, saham BSI atau BRI Syariah tidak membagikan dividen dan ini momentum yang baik dimana kinerja bank sudah semakin baik dan stabil" sehingga diusulkan mulai dibagikan dividen.

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
3.	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan biaya/honorariumnya.	1. Menetapkan Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham.	Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.087.755.490 suara atau 99,9532334% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	113.800 suara atau 0,0002910% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	18.174.770 suara atau 0,0464756% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
4.	Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan: 1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus atas kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022. 3. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022.	Telah direalisasikan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.095.847.276 suara atau 99,9739253% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	209.100 suara atau 0,0005347% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	9.987.684 suara atau 0,0255400% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
5.	Persetujuan perubahan susunan pengurus dan/atau Pengawas BSI.	1. Memberhentikan dengan hormat: a. Sdr. Abdullah Firman Wibowo sebagai Wakil Direktur Utama 2 Perseroan b. Sdr. Kusman Yandi sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking Perseroan, dan c. Sdr. Kokok Alun Akbar sebagai Direktur Retail Banking Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bangun S. Kusmuljono sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan. 3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: a. Semula Wakil Direktur Utama 1 dan Wakil Direktur Utama 2 menjadi Wakil Direktur Utama. b. Menambah 1 nomenklatur jabatan anggota Direksi yakni Direktur Treasury & International Banking. 4. Mengalihkan penugasan Sdr. Ngatari semula sebagai Wakil Direktur Utama 1, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, menjadi Direktur Retail Banking dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. 5. Mengangkat : a. Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. b. Sdr. Zaidan Novari sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking Perseroan, dan c. Sdr. Moh. Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). 6. Mengangkat : a. Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan b. Sdr. Nizar Ali sebagai Komisaris Perseroan, terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).	Telah direalisasikan

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi

7. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Muhammad Zainul Majdi
Komisaris	Suyanto
Komisaris	Masduki Baidlowi
Komisaris	Imam Budi Sarjito
Komisaris	Sutanto
Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	Mohamad Nasir
Komisaris	Nizar Ali*)

Direksi

Direktur Utama	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta*)
Direktur Retail Banking	Ngatari
Direktur Information Technology	Achmad Syafii
Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	Tribuana Tunggadewi
Direktur Risk Management	Tiwul Widyastuti
Direktur Wholesale Transaction Banking	Zaidan Novari*)
Direktur Treasury & International Banking	Moh. Adib*)

*) Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
38.926.690.610 suara atau 99,5413664% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	251.700 suara atau 0,0006436% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	179.101.750 suara atau 0,4579899 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
6.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan: a. penerapan klasifikasi saham pada Perseroan menjadi Saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan Saham Seri B yang merupakan saham biasa atas nama; b. reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Perseroan menjadi 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi Saham Seri B, dengan detail sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat. (Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat (7) huruf i, Pasal 4 ayat (10), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) butir (a) (b) (c) (d) (e), Pasal 5 ayat (4) menjadi ayat (5), Pasal 10 ayat (8), Pasal 11 ayat (4) butir (a) (b), Pasal 14 ayat (8) butir (b), Pasal 16 ayat (2) butir (b) (c) (e) (f), Pasal 22 , ayat (2) butir (b)). 2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda 6 RUPS Tahunan Perseroan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.	Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
38.928.377.924 suara atau 99,5456811% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	245.500 suara atau 0,0006278% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	177.420.636 suara atau 0,4536911% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

RUPS Luar Biasa

23 September 2022

Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Jose Dima, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui sistem eASY KSEI yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
1.	Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Perseroan.	1. Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (Enam miliar) saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (Lima ratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD I. 3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk: a. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal. b. Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. 4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk : a. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK. b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan. c. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I. d. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris. e. Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris. f. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD. g. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.	Telah direalisasikan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
		h. Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I. i. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD I. j. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada. k. Menitipkan saham Perseroan dalam Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI. l. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. m. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris. n. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, Direksi Perseroan berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapa pun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.108.382.820 suara atau 99,9998466% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	41.000 suara atau 0,0001048% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	19.000 suara atau 0,0000486% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nanti dimasukkan saham Dwi Warna?

Tanggapan : Saham seri A Dwiwarna sudah masuk dalam susunan pemegang saham BSI yang telah diputuskan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 27 Mei lalu, termasuk dampaknya terhadap perubahan Anggaran Dasar jadi memang sudah masuk sebelum RUPS yang sekarang, sudah masuk pada RUPS Tahunan.

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
2.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	1. Menyetujui perubahan, penghapusan dan penyesuaian atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: a. Pasal 14 ayat (18); (tentang penyelenggaraan RUPS untuk Perseroan yang belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan) b. Pasal 18 ayat (19) huruf e, f, g, i, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (19) pasal ini; (tentang pemberhentian anggota Direksi) c. Pasal 18 ayat (20) huruf a dan b, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (20) pasal ini; (tentang pengunduran diri anggota Direksi) d. Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 10); (tentang jangka waktu laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan) e. Pasal 19 ayat (18) huruf e dan f, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini; (tentang persetujuan dari RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan *buyback* atas saham Perseroan) i. Pasal 21 ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (31), ayat (32) huruf a dan huruf b, dan penyesuaian urutan ayat pada pasal ini; (tentang pemberhentian, pengunduran diri, serta lowongnya seluruh anggota Dewan Komisaris) f. Pasal 21 ayat (39) huruf b dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini dan urutan ayat pada pasal ini; (tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris) g. Pasal 24 ayat (16), dan ayat (16) huruf a; (tentang pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah) h. Pasal 26 ayat (5) dan ayat (8). (tentang jangka waktu laporan tahunan yang telah ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada dan disetujui oleh RUPS Tahunan) 2. Menyetujui untuk menyatakan kembali perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan agenda ini, termasuk untuk: a. menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam satu atau lebih Akta Notaris; dan b. mengajukan permohonan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.108.374.420 suara atau 99,9998251% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	67.800 suara atau 0,0001734% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	600 suara atau 0,0000015% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
3.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan RUPSLB terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya. Terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:	Telah direalisasikan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	*Vacant*
Komisaris	Suyanto
Komisaris	Masduki Baidlowi
Komisaris	Imam Budi Sarjito
Komisaris	Sutanto
Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	Mohamad Nasir
Komisaris	Nizar Ali*)

Direksi

Direktur Utama	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	Ngatari
Direktur Information Technology	Achmad Syafii
Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	Tribuana Tunggadewi
Direktur Risk Management	Tiwul Widyastuti
Direktur Wholesale Transaction Banking	Zaidan Novari*)
Direktur Treasury & International Banking	Moh. Adib

*) Berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.088.575.720 suara atau 99,9492000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	19.866.700 suara atau 0,0507990% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	400 suara atau 0,0000010% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk memastikan Bank Syariah Indonesia menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dewan Komisaris BSI terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Perbandingan jumlah Komisaris dan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank merujuk pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("PERMEN BUMN") yang mengatur mengenai anak perusahaan BUMN, seperti PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Bank; dan
5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atas pengangkatan masing-masing Anggota Dewan Komisaris.

Sebelum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS wajib terlebih dahulu mengikuti proses *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, agar dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA (*BOARD CHARTER*) DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabanya, Dewan Komisaris merujuk pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tersebut mengikat setiap anggota Dewan Komisaris, agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan profesional.

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman tersebut telah dimutakhirkan secara berkala. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nomor: KEP.KOM/001/2021.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris dengan cakupan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Struktur Dewan Komisaris
3. Tugas Dewan Komisaris
4. Kewajiban Dewan Komisaris
5. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Informasi Kerahasiaan Bank dan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
7. Komite-komite dan Lembaga penunjang lainnya
8. Jenis dan Kuorum Rapat
9. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
10. Pimpinan Rapat
11. Bahan Rapat
12. Keputusan Rapat
13. Risalah Rapat
14. Penyelenggaraan Rapat
15. Sekretaris Dewan Komisaris

DEWAN KOMISARIS

16. Pembidangan Tugas Rutin
17. Waktu Kerja Komisaris
18. Penandatanganan Dokumen
19. Perjalanan Dinas
20. Pendidikan Berkelanjutan
21. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
22. Perubahan
23. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas:
    a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
    b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani rencana jangka panjang Perusahaan dan rencana kerja Perseroan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
    c. Memberikan pendapat dan saran mengenai rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;
    d. Memberikan persetujuan atas rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;
    e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
    f. Melaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham pengendali apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
    g. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
    h. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
    i. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
    j. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam rencana kerja Perseroan;
    k. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
    l. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
    m. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
    n. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
    o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham pengendali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    p. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a, maka Dewan Komisaris juga bertugas:
    a. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank;
    b. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
    c. Melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan sumber daya insani. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;
    d. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit;
    e. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan Business Plan dan penjabarannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
    f. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*);
    g. Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang

perlu ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;

h. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko;
i. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/ persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. Menyampaikan laporan pengawasan kepada otoritas dan Pemegang Saham;
k. Melakukan pengawasan atas mutu pelayanan bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen
l. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *fraud*;
m. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang di dalamnya termasuk program Komite-komite penunjang Dewan Komisaris.

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris wajib:
   a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
   b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

Komisaris Utama memiliki peran dan tanggungjawab, antara lain:

1. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPST atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
2. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
4. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.

HAK DAN WEWENANG

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris berwenang untuk:

a. Melihat dan memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain seperti surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
h. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
i. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
k. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak -bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
l. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Intern.

KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan dibawah ini wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, yaitu:

a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
b. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
c. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak

DEWAN KOMISARIS

dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor perbankan;

d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;

e. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
   1) Piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian pembiayaan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
   2) Selisih antara nilai piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;
   3) Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS;

f. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build*, *Operate* dan *Transfer*/BOT), Bangun Guna Milik (*Build*, *Operate* and *Owned*/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan yang material bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern;

h. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan;

i. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

j. Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya yang melampaui pembatasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, susunan Dewan Komisaris BSI adalah:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Muliaman D. Hadad	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Akta Risalah RUPST No. 45 tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023	2023-2026
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Akta Risalah RUPSLB No. 38 tanggal 24 Agustus 2021	7 Februari 2022	2022-2025
Suyanto	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Masduki Baidlowi	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2022
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Sutanto	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Abu Rokhmad	Komisaris	Akta Risalah RUPST No.45 tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023	2023-2026
M. Arief Rosyid Hasan*)	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPST No.155 tanggal 27 Mei 2022	6 Januari 2023	2023-2025

*) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PEMBIDANGAN TUGAS

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muliaman D. Hadad*)	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Pemantau Risiko
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Pemantau Risiko
Suyanto	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Masduki Baidlowi	Komisaris	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Sutanto	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Abu Rokhmad*)	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
M. Arief Rosyid Hasan**)	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko
		Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Pemantau Risiko
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Pemantau Risiko

*) Efektif menjabat per 21 September 2023
**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri Sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris Independen dan non Independen diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dimaksud terkait dengan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan otoritas lain yang terkait (jika ada), serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
3. Masa jabatan Komisaris Independen dan Non Independen sebanyak 2 (dua) periode berturut-turut, atau maksimum 6 (enam) tahun.
4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank;
   b. Pengunduran dirinya telah efektif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku;

DEWAN KOMISARIS

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
d. Meninggal dunia;
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
f. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

5. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya
7. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS BARU

Mengingat latar belakang anggota Dewan Komisaris beragam, BSI selalu mengadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru. Melalui program tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Bank Syariah Indonesia secara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:

1. Pengenalan Korporasi terkait *Corporate Strategy*, dan visi misi
2. Pelatihan Perbankan Syariah
3. Pelatihan Manajemen Risiko
4. Pelatihan GCG Perusahaan Terbuka

Untuk tahun 2023, program orientasi Dewan Komisaris BSI telah dilaksanakan untuk anggota Direksi baru, yakni Muliaman D. Hadad dan Abu Rokhmad pada tanggal 9-16 Juni 2023.

MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN/ATAU PENGGANTIAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan dalam proses dan pemilihan Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian

Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya termasuk dari Bank Indonesia.

Sebagai Anak Perusahaan BUMN, selain peraturan diatas BSI juga tunduk pada PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar BSI dan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi.

Dalam proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan Pemegang Saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon anggota Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali telah tersedia pada saat pemanggilan atau selambatnya pada saat pelaksanaan RUPS..

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Syariah Indonesia, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris hasil penyelenggaraan RUPS.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DEWAN KOMISARIS

BSI memiliki kebijakan yang mengizinkan pemberian pinjaman bagi Dewan Komisaris yang dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Dewan Komisaris akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Dana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Konsumer tanggal 30 November 2023 dan kebijakan internal terkait lainnya.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Kriteria hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

DEWAN KOMISARIS

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan:			Hubungan Keluarga dengan:		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Muliaman D. Hadad*)	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	X	X	X	X	X	X
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	X	X	X	X	X	X
Suyanto	Komisaris	X	X	√	X	X	X
Masduki Baidlowi	Komisaris	X	X	√	X	X	X
Imam Budi Sarjito	Komisaris	X	X	X	X	X	X
Sutanto	Komisaris	X	X	X	X	X	X
Abu Rokhmad*)	Komisaris	X	X	√	X	X	X
M. Arief Rosyid Hasan**)	Komisaris Independen	X	X	X	X	X	X
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	X	X	X	X	X	X
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	X	X	√	X	X	X

*) Efektif menjabat per tanggal 21 September 2023
**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Bank atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Dewan Komisaris atau Direksi.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan rangkap jabatan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Muliaman D. Hadad*)	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT Astra Internasional Tbk
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Nihil	Nihil

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Suyanto	Komisaris	Staf Khusus Kepala	Badan Intelijen Negara Republik Indonesia
Masduki Baidlowi	Komisaris	1. Staf Khusus Bidang Komunikasi 2. Ketua Harian 3. Ketua Yayasan	1. Sekretariat Wakil Presiden 2. MUI Bidang Pusat 3. MMD Initiative (*Justice & Democracy*)
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	Nihil
Sutanto	Komisaris	Nihil	Nihil
Abu Rokhmad*)	Komisaris	Staf Ahli Bidang Hukum & HAM	Kementerian Agama Republik Indonesia
M. Arief Rosyid Hasan**)	Komisaris Independen	1. Wakil Kepala 2. Ketua Komite 3. Wakil Sekretaris Jenderal	1. Badan Ekonomi Syariah 2. Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah 3. BPP HIPMI
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi	Sekretariat Wakil Presiden

*) Efektif menjabat per 21 September 2023
**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri Sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) adalah kondisi di mana anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya, dengan ruang lingkup bahwa Jajaran Bank :

a. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
b. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/ atau reputasi
c. Dilarang menyalahgunakan *corporate identity Bank*. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank

Bank memiliki kebijakan pengelolaan benturan kepentingan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik (*code of conduct*) yang isinya memuat :

a. Identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra grup;
b. Larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan
c. Kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN PERUBAHANNYA

Kebijakan Pelaporan

Sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham BSI wajib disampaikan oleh Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan kepada regulator paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas Perusahaan.

Pada tahun 2023, telah terjadi perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris di BSI. Seluruh perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rangkaian perubahan kepemilikan saham tersebut diuraikan melalui tabel di bawah ini.

DEWAN KOMISARIS

Per 1 Januari 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	0	0
2	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0
3	M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	0	0
4	Suyanto	Komisaris	0	0
5	Masduki Baidlowi	Komisaris	0	0
6	Imam Budi Sarjito	Komisaris	0	0
7	Sutanto	Komisaris	1.687.400	0,003
8	Mohamad Nasir*)	Komisaris Independen	0	0
9	Nizar Ali*)	Komisaris	0	0

*) Penetapan pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*

Per 31 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Muliaman Hadad*)	Komisaris Utama/Komisaris Independen	0	0
2	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	0	0
3	Suyanto	Komisaris	822.700	0,002
4	Masduki Baidlowi	Komisaris	822.700	0,002
5	Imam Budi Sarjito	Komisaris	822.700	0,002
6	Sutanto	Komisaris	1.010.100	0,002
7	M. Arief Rosyid Hasan**)	Komisaris Independen	0	0
8	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0
9	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	0	0
10	Abu Rokhmad*)	Komisaris	0	0

*) Efektif menjabat per 21 September 2023
**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali. Selain itu tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Mengacu pada pasal 53 ayat 4 POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Pada tanggal 06 November 2023 terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri yaitu M. Arief Rosyid Hasan selaku Komisaris Independen dan telah dilaporkan ke OJK melalui Surat BSI No. 03/1706-3/DIR-CSG, tanggal 16 November 2023 perihal Informasi Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris. Pengunduran diri tersebut berakibat komposisi Komisaris Independen menjadi dibawah 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Atas kondisi tersebut BSI akan mengukuhkan pengunduran diri yang bersangkutan termasuk rencana pengangkatan penggantinya pada RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar BSI, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

KRITERIA INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan Bank adalah sebagai berikut:

Kriteria	Muliaman D. Hadad*)	Adiwarman Azwar Karim	M. Arief Rosyid Hasan**)	Komaruddin Hidayat	Mohamad Nasir
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab unt uk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria	Muliaman D. Hadad*)	Adiwarman Azwar Karim	M. Arief Rosyid Hasan**)	Komaruddin Hidayat	Mohamad Nasir
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

*) Efektif menjabat per 21 September 2023
**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi aspek independensi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat

Sesuai dengan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk, kebijakan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disebut dalam ayat 1 huruf a adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Komisaris, dengan catatan risalah rapat ditandatangani oleh seluruh Komisaris yang hadir dalam rapat dan yang menerima kuasa.
3. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
4. Kuasa tertulis Komisaris yang tidak hadir kepada Komisaris lainnya diperhitungkan sebagai kehadiran
5. Seorang Komisaris hanya boleh menerima kuasa dari 1 (satu) orang Komisaris lainnya.
6. Ketidakhadiran secara fisik Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disebut dalam ayat 1 sebanyak maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dalam setahun, kecuali telah terdapat kesepakatan sebelumnya mengenai peran dan keterlibatannya dalam fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk khusus oleh Komisaris Utama untuk maksud tersebut dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka rapat dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk oleh para Komisaris lainnya.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat dari para peserta yang hadir. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*).

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Rincian tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023, baik rapat internal maupun rapat gabungan serta kehadiran pada RUPS disampaikan melalui tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Gabungan dengan Direksi			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Muliaman D. Hadad*)	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	19	19	100	9	9	100	-	-	-
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	25	25	100	14	14	100	1	1	100
Suyanto	Komisaris	25	24	96	14	13	91	1	1	100
Masduki Baidlowi	Komisaris	25	22	88	14	12	86	1	1	100
Imam Budi Sarjito	Komisaris	25	25	100	14	14	100	1	1	100
Sutanto	Komisaris	25	24	96	14	14	100	1	1	100
Abu Rokhmad*)	Komisaris	19	18	95	9	7	77	-	-	-
M. Arief Rosyid Hasan**)	Komisaris Independen	23	23	100	12	12	100	1	1	100
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	25	25	100	14	14	100	1	1	100
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	25	25	100	14	14	100	1	1	100

*) Efektif menjabat per 21 September 2023
**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda
1	12 Januari 2023	Perubahan Komite Penunjang Dewan Komisaris
2	19 Januari 2023	Evaluasi Kinerja 31 Desember 2022
3	23 Februari 2023	Evaluasi Kinerja BSI Januari 2023
4	30 Maret 2023	Evaluasi Kinerja BSI Februari 2023
5	27 April 2023	Evaluasi Kinerja BSI Maret 2023
6	15 Mei 2023	Penambahan Fungsi Supervisi Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
7	25 Mei 2023	Evaluasi Kinerja BSI April 2023
8	8 Juni 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Paska Insiden IT Risk Management Directorate
9	8 Juni 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Paska Insiden IT Finance & Strategy Directorate
10	8 Juni 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Paska Insiden IT IT Directorate
11	5 Juni 2023	Company Overview
12	15 Juni 2023	Update Kinerja Directorate & Action Plan Pasca Insisden IT Compliance & Human Capital Directorate
13	15 Juni 2023	Update Kinerja Directorate & Action Plan Pasca Insisden IT Retail Banking Directorate

KOMISARIS INDEPENDEN

No.	Tanggal	Agenda
14	15 Juni 2023	Update Kinerja Directorate & Action Plan Pasca Insisden IT Vice President Directorate
15	22 Juni 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Paska Insiden IT-Wholesale Transaction Banking Directorate
16	22 Juni 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Paska Insiden IT-Treasury Int. Banking Directorate
17	22 Juni 2023	Evaluasi Kinerja BSI Mei 2023
18	6 Juli 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Pasca Insiden IT-Sales & Distribution Directorate.
19	6 Juli 2023	Perubahan Susunan Anggota Komite Penunjang Dekom
20	27 Juli 2023	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Juni 2023
21	24 Agustus 2023	Evaluasi Kinerja BSI Juli 2023
22	21 September 2023	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Agustus 2023
23	30 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja BSI September 2023
24	30 November 2023	Evaluasi Kinerja BSI Oktober 2023
25	22 Desember 2023	Evaluasi Kinerja BSI bulan November 2023

TATA CARA DAN FREKUENSI PEMBERIAN ARAHAN/NASIHAT DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Pemberian arahan/nasihat serta rekomendasi oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara langsung dalam rapat, maupun secara tidak langsung melalui surat tertulis.

Rapat dimaksud terdiri dari :

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, dan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Rapat Dewan Komisaris, yang terdiri atas:
   a. Rapat Dewan Komisaris yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
   b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.
   c. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Hal-hal yang memerlukan rekomendasi dari Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Komite yang terbagi atas :

1. Rapat Komite Audit,
2. Rapat Komite Pemantau Risiko, dan
3. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

Seluruh hasil Rapat Komite diatas, disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat tertulis.

Pemberian arahan/nasihat serta rekomendasi oleh Dewan Komisaris kepada Direksi juga dapat dilakukan melalui surat atau nota disposisi ke Direksi. Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan pemberian arahan kepada Direksi baik triwulan maupun tahunan atas Laporan Kepatuhan dan hasil *assessment* GCG. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris juga dapat secara rutin melakukan kunjungan ke cabang-cabang Bank.

Rekapitulasi Arahan/Nasihat dan Rekomendasi Dewan Komisaris

No.	Tema	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
1.	Kinerja	Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja per 31 Desember 2023 yang tumbuh baik, dindikasikan dengan a.l aset sebesar Rp353,63T melebihi target Rp336,32T & posisi Desember 2022 (Rp305,73T) dengan pertumbuhan 15,67% YoY (±2x pertumbuhan aset perbankan nasional); Laba bersih seb. Rp5,703 T (tumbuh 33,83% secara YoY (110,68% dari target); Pembiayaan mencapai Rp240,32 T, tumbuh 15,70% secara YoY (100,55% dari target); NPF Gross pada posisi terbaik tahun ini 2,08% (lebih kecil daripada Des'22: 2,42% ataupun target Des'23: 2,30%); serta BOPO sebesar 71,67%, turun dibanding posisi Des'22 seb. 75,88%. Namun demikian terdapat *room for improvement* yang perlu mendapat perhatian di tahun 2024.
2.	DPK	DPK mencapai Rp293,78T (melebihi dari target sebesar 101,19%), tumbuh sebesar 12,35% YoY yang didorong oleh peningkatan semua komponen DPK, yakni Deposito yang tumbuh Rp15,36T YoY (menjadi Rp110,99T di Desember 2023 atau lebih dari target sebesar 104,38%) sedangkan Giro tumbuh Rp8,68T YoY atau mencapai Rp53,2T di Desember 2023 (mendekati target sebesar 98,04%) dan Tabungan tumbuh Rp8,24T YoY atau mencapai Rp124,73T di Des'23 (mendekati target sebesar 99,71%). Namun demikian terdapat room for improvement yang perlu mendapat perhatian di tahun 2024, antara lain: 1) Peningkatan tabungan dan deposito dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah kepada BSI telah pulih dan program win-back customer cukup efektif, sehingga momentum ini harus dijaga dengan continuos improvement layanan, program yang menarik dan didukung dengan stabilitas sistem IT. 2) Upaya peningkatan DPK Retail akuisisi nasabah baru agar diteruskan dengan program lain yang menarik guna menambah customer base (tumbuh 10,53% YoY), disamping mengurangi terkonsentrasinya DPK (kontribusi Top-50 deposan thd DPK naik dari 23,10% Nov'23 ke 24,19% Des'23). Bank agar merumuskan program retensi (kompensasi/apresiasi) khususnya bagi nasbah funding institusi eksisting. 3) Pertumbuhan CASA seb 10,51% YoY & capaian seb. 60,57% DPK (target 61,77%), belum dapat melampaui pertumbuhan Deposito (15,29% YoY) sehingga Bank berpotensi mengalami kenaikan CoF dan berdampak kepada daya saing (pricing). Agar dilakukan upaya untuk meningkatkan dana murah setidaknya diatas posisi Des'23 (61,57%). Pengembangan layanan transactional banking, khususnya New CMS, perlu ditingkatkan, disamping optimalisasi tabungan bisnis melalui value chain di wholesale banking.
		4) Upaya peningkatan DPK perlu didukung dengan peningkatan kapabilitasnya para sales funding (khususnya di jaringan), penguatan *customer engagement & touch*, dan program promosi yang efektif terutama menjelang even besar (Pilpres, Ramadhan & Lebaran 1445H/2024). 5) Memastikan kembali bahwa permasalahan terkait IT telah teratasi dengan baik dan dikomunikasikan secera tepat kepada nasabah, guna mendukung penetrasi layanan digital transaction antara lain BSI Mobile, EDC, BSI Smart,QRIS, CMS, Digital Financing, Net Banking, untuk meningkatkan dana murah secara sustain

KOMISARIS INDEPENDEN

No.	Tema	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
3.	Pembiayaan	Pembiayaan secara *bank-wide* mencapai Rp240,32 T (100,55% dari target), tumbuh 15,70% YoY yang dikontribusi terutama oleh pembiayaan segmen *Consumer*, Gadai dan *Card* Rp17,67 T/15,66% YoY, *Wholesale* Rp10,31T/18,03% YoY dan disusul Retail seb. Rp4,62T/12,29% YoY. Namun demikian terdapat *room for improvement* yang perlu mendapat perhatian di tahun 2024, antara lain: 1) Pembiayaan segmen *Wholesale* agar terus dijaga lebih *sustain* dan diharapkan men-*generate* produk turunan bagi bisnis segmen lain. Mengingat bahwa margin Wholesale relatif rendah, sementara *Cost of Fund* di *market* relatif tinggi yang berdampak pada *pricing* maka Bank perlu lebih berhati-hati & selektif dalam pemilihan sektor dan nasabah pembiayaan. 2) Selain itu kolaborasi *Wholesale-Retail-Consumer-Treasury* perlu dimonitor implementasinya dan diharapkan *dashboard* kolaborasi tersebut dapat disampaikan pada rapat evaluasi kinerja ke depan. 3) Dengan pertumbuhan kredit nasional 10,3% YoY (Des'23, BI) dan 9,7% YoY (Nov'23) serta tren pertumbuhan Pembiayaan BSI (15,70% YoY) yang lebih besar daripada pertumbuhan DPK BSI (12,35% YoY) maka FDR perlu dijaga terus pada kisaran optimal (82,32% RBB'23)/limit regulasi (FDR 78-92% & RIM 84%-924%) yang menyeimbangkan antara *benefits* (profitabilitas & mendapatkan insentif GWM dengan menjaga FDR di level yang sudah di tentukan) dan *costs* (dampak potensi penurunanan aset likuid, CoF mahal dst). 4) Mengoptimalkan potensi pertumbuhan pembiayaan dari pipeline yang berkualitas pada semua segmen, dengan menyasar kepada sektor atau grup nasabah yang memiliki *track record* baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pembiayaan SME yang tumbuh terbatas (2,40% YoY) perlu terus didorong melalui kolaborasi dengan *Wholesale* untuk menggarap ekosistem nasabah *Wholesale* (Sawit, BPJS Kesehatan, ekosistim pupuk, Muhammadiyah, Ekosistem Islam lainnya dst). 5) Pembiayaan berkelanjutan (*Sustainable Finance* yang merupakan bagian dari Maqosid Syariah) perlu terus ditingkatkan mengingat realisasi SF baru mencapai Rp57,7T (24% dari total Pembiayaan) dengan porsi SF-Non UMKM seb 21,14% (Rp12,2T/Rp57,7T) yang lebih kecil daripada SF-UMKM seb. 78,85% (Rp45,5T/Rp57,5T). Hal ini dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan induk (Mandiri/BRI/BNI) untuk memperoleh *pipe-line* nasabah pembiayaan yang baik, khususnya pembiayaan. 6) Pembiayaan mikro yang tumbuh cukup baik, agar terus ditingkatkan, disertai dengan penguatan *risk management* (implementasi 3 pilar) dan diikuti dengan *monitoring* dan pengawasan pasca pencairan (*Post Booking Review*) secara berkelanjutan.
4.	Kualitas Pembiayaan	1) Kol. 2 per Des'23 seb. 2,05% meningkat dibanding Des'22 seb 1,54%, yang disebabkan terutama karena *down grade*-nya nasabah *Wholesale* (1,74% Des'22 menjadi 3,75% Des'23). Peningkatan kol 2 juga terjadi di segmen *Consumer*, Gadai & *Card* (1,24% Des'22 ke 1,29% Des'23) sementara Kol. 2 Retail turun dari 2,14% Des'22 ke 1,68% Des'23. 2) NPF Gross Des'23 seb. 2,08%, menurun dibanding Des'22 (2,42%), yang disebabkan terutama karena adanya pelunasan dari nasabah *wholesale*. Namun, masih ada beberapa segmen yang NPF-nya cukup tinggi, antara lain *Corporate*-2 (4,24%), *Commercial*-2 (5,74%), SME (4,08%), Mikro Non KUR (11,16%), dan Hasanah *Card* (3,16%). Sementara, FaR *bank-wide* dapat dijaga makin kecil (9,14% Des'23), dengan FAR *Wholesale* sebesar 16,78% dan FaR Retail sebesar 6,16%.

No.	Tema	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
5.	Rasio Keuangan	Apresiasi atas pencapaian Laba Bersih per Desember 2023 sebesar Rp5,703 T, nilai tersebut telah melampaui target Rencana Bisnis Bank (RBB) sebesar Rp5,1 T, dan target dari Pemegang Saham utama (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) sebesar ±Rp5,7 T. Namun demikian terdapat *room for improvement* yang perlu mendapat perhatian di tahun 2024, antara lain: 1) Margin & Bagi Hasil Bersih tidak mencapai target (96,27%) yang disebabkan naiknya Biaya Bagi Hasil & Bonus sebagai akibat naiknya *Cost of Fund* (CoF) DPK secara YtD dari 1,62% (Des'22) ke 2,13% (Des'23) dan MtD ke 2,52% (Des'23), khususnya giro (2,0%) dan deposito (4,04%). 2) Agar diantisipasi kemungkinan naiknya CoF sebagai akibat ketatnya persaingan DPK di market. Ekspansi DPK lebih baik berfokus terutama pada segmen Retail dengan *Equivalent Rate* (ER) yang rendah, memperdalam/elaborasi layanan kepada deposan inti, mengoptimalkan PHR berbasis *Profitability Analysis*. Di sisi pendapatan, perlu dijaga pertumbuhan pembiayaan dengan *yield* yang tinggi dan kualitas terjaga. 3) FBI *Ratio* telah meningkat secara MtM (15,64% Nov'23 ke 15,80% Des'23) dengan kontributor utama *Collection* (26,2% thd FBI), *E-channel* (23,4%) & Gadai (17,7%). Pertumbuhan tersebut masih dibawah target (16,27%) ataupun angka Des'22 (15,91%), khususnya terdapat pertumbuhan YoY negatif beberapa pos FBI a.l FBI-ATM (-14,2%), FBI-*Value Chain* (-54,2%), FBI-Operasional (-7,7%), FBI lainnya (-8,1%), sehingga perlu dievaluasi untuk mencari akar permasalahannya. Bank perlu memperkuat *hygiene factor* baik melalui perluasan ATM, kehandalan IT/*Application*, dan penumbuhan FBI-*Value Chain* sbg turunan dari pertumbuhan segmen *Wholesale*. 4) BO/PO dan CIR dapat dikelola dengan baik namun memerlukan kehati-hatian mengingat rezim *higher-for-longer* dan ketidakpastian diekpektasikan masih akan berlangsung yang berpotensi menjadi *challenge* dalam pencapaian target ke depan.
6.	Fee Based Income & BSI Mobile	1) Gadai sebagai salah satu sumber FBI yang potensial perlu terus dikembangkan, antara lain dengan : a. Meningkatkan *awareness* dan menjadikan gadai sebagai *Top of Mind*, antara lain dengan implementasi strategi *head-to-head* terhadap Pegadaian; b. Meningkatkan jumlah KLG disertai dengan sarana dan prasarananya, peningkatan limit pemutusannya, peningkatan kompetensi pegawai gadai dan alternatif pemanfaatan kelebihan pegawai BSI, terutama untuk posisi juru taksirnya. 2) UREG BSI Mobile seb. 6,31 juta (tumbuh 31,41% YoY), sementara USAK seb. 2,99 juta/ ekuivalen 47,35% dari UREG (tumbuh 25,89% YoY) agar terus ditingkatkan. Penetrasi *Online on Boarding* (OOB) secara *bank-wide* yang telah mencapai 85,6% (target OOB 100% per Aug'23) harus disertai dukungan kehandalan sistem dan jaringan sehingga berimbas pada peningkatan USAK, dan UI-UX nasabah baru. 3) Jumlah merchant aktif per Des'23 mencapai 42.691 (15,6% dari total *Merchant*), sehingga perlu terus ditingkatkan termasuk mengoptimalkan transaksi QRIS dan Bank perlu memastikan pemenuhan SDM untuk kegiatan *maintenance* QRIS sehingga program KP dapat terkawal dengan baik ditengah kondisi SDM jaringan fokus pada akuisisi ataupun ekspansi bisnis.
7.	Islamic Ecosystem dan lainnya	1) Penetrasi kepada Ekosistem Islami yang telah tumbuh (total DPK ISE seb Rp28,9 T tumbuh 43,09% YtD dan total nasabah/CIF sebanyak 5,56 juta, tumbuh 24,45% YoY) agar dapat terus ditingkatkan sebagai salah satu alternatif strategi rekomposisi DPK & peningkatan *incomes* (FBI). 2) Agar dilakukan analisis mendalam dan komprehensif terhadap naiknya dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) seb. 14,29% YoY, mengingat kenaikan ini dapat mengindikasikan ketidakpatuhan yang makin tinggi thd prinsip syariah. 3) Unit kerja terkait (*Accounting*) agar secara intensif berkoordinasi dengan Komite Syariah dan DPS terkait dengan penetapan TBDSP sehingga penyajian angka kinerja semakin akurat & *value relevance* serta penyaluran/penggunaan dana tersebut dapat segara dilakukan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Rekapitulasi Pengawasan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurusan Bank yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan awal tahun, yang antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB), antara lain:
   a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2023 antara lain evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan RBB serta kinerja keuangan tahun 2022 setiap bulan;
   b. Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting rencana bisnis seperti penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas dan efisiensi;
   c. Melakukan penelaahan Revisi RBB 2023-2025
   d. Melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   e. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan RBB Tahun 2023-2025.
2. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya;
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal di BSI, antara lain dengan:
   a. Memastikan terselenggaranya system pengendalian internal di BSI telah berjalan dengan baik;
   b. Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
   c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
4. Melakukan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank per Semester dan mendukung Direksi untuk mengambil langka-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
5. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan di BSI antara lain dengan:
   a. Melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan di BSI, memastikan bahwa fungsi kepatuhan di BSI telah dilaksanakan dengan baik serta memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan;
   b. Melakukan reviu atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan Direksi secara berkala;
   c. Melakukan pemantauan terhadap implementasi Strategi *Anti Fraud*, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), serta Prinsip Mengenal Nasabah;
   d. Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip dan praktek GCG pada seluruh tingkatan dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG, reviu terhadap laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan Direksi dan pemantauan terhadap hasil *self assessment* GCG.
8. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis, pelaksanaan Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait Teknologi Informasi BSI.
9. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya berkenaan dengan fungsi strategis Sumber Daya Manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Bank;
10. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah, Kantor Cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pendidikan Berkelanjutan sesuai dengan tata tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah:

1. Rencana pendidikan berkelanjutan untuk seluruh Komisaris dan anggota Komite-komite penunjang tertuang dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris;
2. Dalam hal pendidikan berkelanjutan dilakukan di luar program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya agar disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat;
3. Komisaris dan anggota Komite Penunjang yang telah melakukan pendidikan berkelanjutan harus menyampaikan laporan hasil pendidikannya di dalam Rapat Dewan Komisaris atau di dalam rapat Komite penunjang.
4. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi/fasilitas dan protokoler selama pendidikan berkelanjutan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	**Muliaman D. Hadad** Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" *Speaker:* - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Assosiate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: “Professional Judgment and Decision Making” Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group

KOMISARIS INDEPENDEN

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
2.	**Adiwarman Azwar Karim** Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta	BSI
		Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future *Speakers:* a. Yohanes Sugihtononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" *Speaker*: - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Assosiate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
3.	**Suyanto** Komisaris	BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta	BSI
		Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future *Speakers:* a. Yohanes Sugihtononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen

KOMISARIS INDEPENDEN

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" *Speaker*: - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Assosiate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: “Professional Judgment and Decision Making” Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
4.	**Masduki Baidlowo** Komisaris	Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" *Speaker:* - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Assosiate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU

KOMISARIS INDEPENDEN

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
5.	**Imam Budi Sarjito** Komisaris	BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta	BSI
		Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future *Speakers:* a. Yohanes Sugihtononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" *Speaker:* - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Assosiate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: “Professional Judgment and Decision Making” Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group

KOMISARIS INDEPENDEN

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
6.	**Sutanto** Komisaris	Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future *Speakers:* a. Yohanes Sugihtononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" *Speaker:* - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Assosiate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent"	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
7.	**Abu Rokhmad** Komisaris	PDPS	15 Juni 2023	Jakarta	BSU
		Pemantapan Manajemen Risiko Level 1 Komisaris	24 Juni 2023		
		Ujian Manajemen Risiko Level 1 Komisaris	29 Juli 2023		
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU

KOMISARIS INDEPENDEN

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
8.	**M. Arief Rosyid Hasan** Komisaris Independen	Pelatihan TOEFL Preparation	Sabtu, 19 November 2022 s.d Selesai (15x pertemuan) Masih Berjalan	Virtual dan Offline di The Tower	BSU
		BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15 Februari 2023	Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta	BSI
		Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future *Speakers:* a. Yohanes Sugihtononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" *Speaker:* - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Assosiate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: “Professional Judgment and Decision Making” Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Virtual Zoom	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group

KOMISARIS INDEPENDEN

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
9.	**Komaruddin Hidayat** Komisaris Independen	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 "Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi"	Senin, 06 Februari 2023	Grand Ballroom Shangri-la Hotel	OJK
		BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta	BSI
		Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future *Speakers:* a. Yohanes Sugihtononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Virtual Zoom	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
10.	**Mohamad Nasir**, Komisaris Independen	Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future *Speakers:* a. Yohanes Sugihtononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU

KOMISARIS INDEPENDEN

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" *Speaker*: - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Assosiate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: “Professional Judgment and Decision Making” Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Virtual Zoom	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment*. Hasilnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui RUPS adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas serta kewajiban Dewan Komisaris.
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara *self assessment* menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 secara mandiri (*self assessment*).

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No.	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala berjalan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
2	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
3	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Komisaris bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
4	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
5	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
6	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
7	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
8	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	10%	100%
9	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* pada seluruh jenjang organisasi.	10%	100%
10	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian Hasil Reviu kepada Dewan Komisaris • Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	10%	100%

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui *Self-Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian kinerja Dewan Komisaris ini merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan UUS. Metode penilaian dilakukan secara mandiri (*self assessment*) secara periodik, yaitu setiap semester dan hasilnya dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan assessment kinerja Dewan Komisaris termasuk dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester. Dengan demikian, prosedurnya mengikuti penilaian GCG Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan

Komisaris Kriteria *self assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok: *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* ada 17 indikator sedangkan *governance outcome* mencapai 6 (enam) indikator.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan *self assessment* GCG (di dalamnya termasuk penilaian Dewan Komisaris) adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2023 adalah peringkat 2 (" **Baik**").

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) komite sebagai penunjang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite-komite tersebut adalah:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Risiko

Kriteria dan Hasil Penilaian Komite Di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 18 kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2023.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Pengusulan Remunerasi Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional Bank harus sejalan dengan prinsip syariah. DPS juga memastikan implementasi pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. DPS diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi antara lain:
   a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
   b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
   c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
   d. Melakukan reviu secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
2. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN

Pada tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah BSI berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	6 Mei 2021	2021-2024
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	6 Mei 2021	2021-2024
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Akta No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	Akta No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bagian Keempat Dewan Pengawas Syariah Paragraf 1 Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Pasal 45 (1) disebutkan "Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi."

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kebijakan

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Rekapitulasi Rangkap Jabatan

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Toyota Astra Finance Services
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Trimegah Asset Management
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT BNP Paribas Investment Partners
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT PNM Invest Management
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	BPRS Amanah Ummah Bogor
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan rapat sebanyak 31 kali. Rinciannya diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	31	31	100%
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	31	31	100%
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	31	31	100%
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	31	31	100%

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda
1	Rabu, 4 Januari 2023	1. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIKA) 2. Komoditi Murabahah Bank to Bank Financial Institution
2	Kamis, 12 Januari 2023	1. Program Cashback
3	Rabu, 25 Januari 2023	1. Produk KUR PMI dan PMI Khusus MMQ Refinancing Aset Pihak Terkait 2. Implementasi Layanan CS Digital BSI
4	Rabu, 8 Februari 2023	1. Lindung Nilai Sederhana Multi Spot Syariah
5	Jumat, 17 Februari 2023	1. Review Ujrah Pembiayaan Griya Akad MMQ 2. *Top Up* Pembiayaan Griya yang Menggunakan Skema Akad MMQ
6	Rabu, 1 Maret 2023	1. Bisnis Proses Pembukaan BSI Tabungan Efek Syariah untuk Rekening Dana Nasabah secara *Online* 2. Review Ujrah dalam Akad Berbasis Ijarah
7	Jumat, 17 Maret 2023	Pesta Hadiah
8	Rabu, 29 Maret 2023	1. Rencana Program *Joint Financing* Pembiayaan Pensiun dan Pra Pensiun dengan BPD Syariah/Lembaga Keuangan Syariah Lainnya 2. Penggunaan Akad MMQ-IMFZ untuk Penyaluran Pembiayaan Rumah *Indent*
9	Rabu, 5 April 2023	1. Instrumen Lindung Nilai Kompleks Syariah atas Nilai Tukar 2. Rencana Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Perusahaan Sekuritas
10	Rabu, 17 Mei 2023	1. Penerbitan Sukuk Berkelanjutan BSI untuk Tapera 2. Penggantian Nasabah Pembiayaan Meninggal Dunia (Novasi)
11	Rabu, 24 Mei 2023	1. Tabungan Efek RDN Syariah 2. Deposito *On Call*
12	Rabu, 7 Juni 2023	BSI *Subordinated* Sukuk Issuance 2023
13	Rabu, 21 Juni 2023	Jasa Keagenan Rekening (*Escrow Agent*) pada Skema Pembiayaan Sindikasi a.n PT Eka Mas Republik (EMR)
14	Senin, 26 Juni 2023	Tarik Tunai Saldo Dompet Elektronik melalui Jaringan ATM/CRM BSI
15	Rabu, 5 Juli 2023	Instrumen Pasar Uang Syariah melalui Skema Akad *Wakalah bi Al Istitsmar* dengan *Counterpart* Kementerian Keuangan
16	Kamis, 27 Juli 2023	1. *Update* Triwulan Hasil Pemeriksaan SKAI terkait Aspek Syariah 2. Permohonan Opini Sinergi *Shared Services* Proses Pembiayaan Mitraguna dengan BMRI
17	Rabu, 2 Agustus 2023	Kerja Sama Transaksi Partisipasi Risiko
18	Rabu, 9 Agustus 2023	1. *Pick Up Service* 2. *Shipping Guarantee* 3. Rencana Kerja Sama *Shared Service* dengan BMRI
19	Kamis, 30 Agustus 2023	1. BI-S4 Sub Registri 2. Produk *Cash Waqf Link* Deposito (CWLD) 3. Skema Salam dan Samsaroh (Penjualan dan Penerimaan Pembayaran) 4. Skema *Al-Bai'* dan *Wakalah*
20	Rabu, 13 September 2023	1. PEF (*Pre Expor Financing*) dengan Akad Salam dan *Samsaroh* (Penjualan dan Penerimaan Pembayaran) 2. Skema Ekspor Akad *Al-Bai'* dan *Wakalah* (Penjualan) 3. UPAS/UPAU *Financing* 4. *Confirming Bank*
21	Rabu, 20 September 2023	1. *Update Progress* Pelatihan Mesir 2. UPAS/UPAU *Financing*
22	Kamis, 27 September 2023	1. Penggunaan Kartu Tani Digital dengan Mekanisme Bantuan Langsung Pupuk (BLP) pada Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi Aceh 2. Sinergi dengan Bank Mandiri
23	Rabu, 4 Oktober 2023	1. Skema *Confirming Bank* 2. Skema *Joint Financing* dengan *Multifinance* Syariah
24	Rabu, 18 Oktober 2023	1. Jam Tutup Operasional Layanan Cabang selama Pelaksanaan Ibadah Salat Jumat 2. *Shared Service Safekeeping* 3. *Notional Pooling*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Tanggal	Agenda
25	Jumat, 25 Oktober 2023	1. Rapat DPS terkait Pengesahan Perjanjian Penerbitan Sukuk Mudharobah Subordinasi BSI Tahun 2023 2. Penjaminan Konvensional 3. Pemberian Reward Pada Nasabah Yang Aktif Menyalurkan ZISWAF Melalui BSI Mobile
26	Jumat, 8 November 2023	Biaya-biaya Trade Finance (Transaksi Impor)
27	Rabu, 15 November 2023	Pembahasan Penyampaian Temuan Audit Terkait Aspek Syariah Triwulan III 2023
28	Rabu, 22 November 2023	Kerjasama Shared Service Retail Consumptive Financing Mitraguna Dengan Bank Mandiri
29	Jumat, 8 Desember 2023	Diskusi Awal Murabahah Commodity Dubai
30	Rabu, 13 Desember 2023	1. BSI OTO 2. PO Financing 3. Notional Pooling
31	Rabu, 27 Desember 2023	Sustainable Sukuk Mudharabah Berkelanjutan PT BSI Tbk Tahun 2024

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan cara antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dalam bentuk:
   a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
   b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
      1) Mereviu sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
      2) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
   c. Mereviu sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
   d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.
   a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/ atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
   b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
   c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
      1) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
      2) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
   d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
   e. Melakukan reviu terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
   f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
   g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Uji Petik DPS Periode 1 Januari 2023-31 Desember 2023

No.	Tanggal	Lokasi/Kantor Cabang BSI
1	- 8-11 Januari 2023 - 8-11 Januari 2023 - 18-24 Januari 2023 - 18-24 Januari 2023	- Kudus A Yani 1 - Semarang - Jember Sudirman - Surabaya
2	- 8-11 Februari 2023 - 8-11 Februari 2023 - 13-14 Februari 2023 - 13-14 Februari 2023 - 23-24 Februari 2023 - 23-24 Februari 2023	- Pematangsiantar - Medan - Tangerang Hasyim Ashari - Jakarta 1 - Bogor - Jakarta 2
3	- 5-8 Maret 2023 - 5-8 Maret 2023 - 16-17 Maret 2023 - 16-17 Maret 2023	- Tasikmalaya - Bandung - Bandar Lampung Diponegoro - Palembang
4	- 3-6 April 2023 - 3-6 April 2023	- Bengkulu - Jambi
5	- 2-5 Mei 2023 - 2-5 Mei 2023 - 8-11 Mei 2023 - 8-11 Mei 2023 - 8-11 Mei 2023	- Purwakarta - Bandung Juanda - Pontianak Abdurrachman - Banjarmasin Lambung Mangkurat - Banjarmasin
6	- 7-8 Juni 2023 - 5-6 Juni 2023 - 14-16 Juni 2023 - 12-13 Juni 2023 - 12-14 Juni 2023 - 19- 24 Juni 2023 - 19-24 Juni 2023 - 19-24 Juni 2023	- Kediri Hasanudin - Mataram Hasanudin - Yogyakarta Kaliurang - Solo Slamet Riyadi 1 - Surabaya Dharmawangsa - Lhokseumawe - Sigli - Aceh
7	- 17-18 Juli 2023 - 20-21 Juli 2023 - 17-18 Juli 2023 - 24-26 Juli 2023 - 11-14 Juli 2023 - 11-14 Juli 2023	- Makassar - Jayapura - Makassar - Pekanbaru - Jakarta Fatmawati - Jakarta Tebet Barat
8	- 7 - 9 Agustus 2023 - 7 - 9 Agustus 2023 - 9 - 12 Agustus 2023 - 14 - 17 Agustus 2023 - 14 - 17 Agustus 2023	- Cilacap A yani - Kendal Soetta - Gorontalo - Surabaya Gresik Kartini - Malang Batu
9	- 4-6 September 2023 - 4-6 September 2023 - 15-16 September 2023 - 11-13 September 2023 - 20-23 September 2023 - 25-26 September 2023 - 25-26 September 2023	- Binjai - Medan Adam Malik - Cirebon Sisingamangaraja - Tapaktuan - Pangkalpinang - Jakarta Pemuda - Bekasi Cikarang
10	- 4-7 Oktober 2023 - 16-18 Oktober 2023	- Bukit Tinggi Sudirman 1 - Samarinda Antasari
11	- 6-8 November 2023 - 20-21 November 2023 - 28 November 2023 - 28 November 2023 - 13 – 14 November 2023	- Batam - Denpasar - Tangerang Bintaro - Tangerang Ciledug - Jakarta Bendungan Hilir
12	- 4 Desember 2023 - 6 Desember 2023 - 7-10 Desember 2023	- Jakarta Cibubur Citra Gran - Jakarta Tanjung Priok - Palangkaraya

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
1	Opini DPS terkait Transaksi Finansial Interbank dengan Skema Komoditi Murabahah dan *Wakalah Bil Istitsmar*	07/BSI/DPS/OPINI/I/2023	4 Januari 2023
2	Opini DPS terkait Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIKA)	08/BSI/DPS/OPINI/I/2023	4 Januari 2023
3	Opini DPS terkait Program *Cashback* Transaksi BSI Debit	06/BSI/DPS/OPINI/I/2023	12 Januari 2023
4	Opini DPS terkait Pengesahan *Template* Akad *Al-Qardh* Beragun Emas, Formulir Permohonan Gadai Emas dan Surat Bukti Gadai Emas	01/BSI/DPS/OPINI/I/2023	12 Januari 2023
5	Opini DPS terkait Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Talangan untuk Operasional Nasabah Mitra Plasma Sawit pada Masa Tanaman belum Menghasilkan (TBM)	02/BSI/DPS/OPINI/I/2023	18 Januari 2023
6	Opini DPS terkait Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 31 Desember 2022	03/BSI/DPS/OPINI/I/2023	18 Januari 2023
7	Opini DPS terkait Pembiayaan KUR Pekerja Migran Indonesia	04/BSI/DPS/OPINI/I/2023	25 Januari 2023
8	Opini DPS terkait Layanan Pembukaan Rekening, Ganti Kartu dan Ambil Kartu di Mesin CS Digital	05/BSI/DPS/OPINI/I/2023	25 Januari 2023
9	Opini DPS terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) BSI Hasanah KKPD GPN	09/BSI/DPS/OPINI/II/2023	10 Februari 2023
10	Opini DPS terkait Transaksi Sekuritisasi Aset (Efek Beragun Aset Syariah - Surat Partisipasi [EBAS-SP])	10/BSI/DPS/OPINI/II/2023	17 Februari 2023
11	Opini DPS terkait Top Up Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan Al-Ijarah Al-Muntahiyyah Bi Al-Tamlik (IMBT)	11/BSI/DPS/OPINI/II/2023	17 Februari 2023
12	Opini DPS terkait Pengesahan Template Manual Produk dan Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening pada Fasilitas Layanan Mesin CS Digital	12/BSI/DPS/OPINI/I/2023	25 Januari 2023
13	Opini DPS terkait *Islamic Hedging Multi Spot*	14/BSI/DPS/OPINI/II/2023	8 Februari 2023
14	Opini DPS terkait Pengesahan Template Manual Produk dan Formulir Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) BSI Hasanah KKPD	15/BSI/DPS/OPINI/II/2023	10 Februari 2023
15	Opini DPS terkait Pengesahan Simplifikasi Template Akad Mudharabah dan Musyarakah Segmen *Wholesale*	13/BSI/DPS/OPINI/III/2023	10 Maret 2023
16	Opini DPS terkait Pesta Hadiah	16/BSI/DPS/OPINI/III/2023	17 Maret 2023
17	Opini DPS terkait Joint Financing Antara BSI dengan LKS & Koperasi Syariah	17/BSI/DPS/OPINI/III/2023	29 Maret 2023
18	Opini DPS terkait Kesesuaian Syariah pada Transaksi Lindung Nilai Kompleks Syariah	18/BSI/DPS/OPINI/IV/2023	12 April 2023
19	Opini DPS terkait Kesesuaian Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah - Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah untuk Penyaluran Pembiayaan Rumah Indent	19/BSI/DPS/OPINI/IV/2023	13 April 2023
20	Opini DPS terkait Pembiayaan Kepada Perusahaan Sekuritas	20/BSI/DPS/OPINI/V/2023	15 Mei 2023
21	Opini DPS terkait Pengesahan Template Dokumentasi Akad Sharf dalam Transaksi Lindung Nilai Sederhana Syariah	21/BSI/DPS/OPINI/V/2023	17 Mei 2023

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
22	Opini DPS terkait Penerbitan Sukuk BSI Tanpa Penawaran Umum Berkelanjutan	22/BSI/DPS/OPINI/V/2023	17 Mei 2023
23	Opini DPS terkait Kesesuaian Syariah atas Usulan Pergantian Nasabah Pembiayaan yang Meninggal Dunia oleh Ahli Warisnya	23/BSI/DPS/OPINI/V/2023	17 Mei 2023
24	Opini DPS terkait Deposito *On Call* Valas	24/BSI/DPS/OPINI/V/2023	24 Mei 2023
25	Opini DPS terkait Bisnis Proses Pembukaan BSI Tabungan Efek Syariah untuk Rekening Dana Nasabah secara *Online*	30/BSI/DPS/OPINI/V/2023	24 Mei 2023
26	Opini DPS terkait Pengesahan Template Dokumen Akad/ Perjanjian Penerbitan Sukuk Mudharabah Muqayyadah Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa melalui Penawaran Umum I PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023 Tahap I	25/BSI/DPS/OPINI/VI/2023	7 Juni 2023
27	Opini DPS terkait Rencana Penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah tahun 2023	26/BSI/DPS/OPINI/VI/2023	7 Juni 2023
28	Opini DPS terkait Tarik Tunai Saldo Dompet Elektronik Mitra Bank melalui ATM BSI	28/BSI/DPS/OPINI/VI/2023	26 Juni 2023
29	Opini DPS terkait Pengesahan Template Dokumentasi Akad Murabahah Segmen *Wholesale*	31/BSI/DPS/OPINI/VII/2023	5 Juli 2023
30	Opini DPS terkait Instrumen Pasar Uang Syariah melalui Skema Akad Wakalah Bi Al Istitsmar dengan *Counterpart* Kementerian Keuangan	32/BSI/DPS/OPINI/VII/2023	5 Juli 2023
31	Opini DPS terkait Pengesahan *Template* Manual Produk BSI Superapp	27/BSI/DPS/OPINI/VII/2023	10 Juli 2023
32	Opini DPS terkait Layanan *Cash Pick Up*	33/BSI/DPS/OPINI/VIII/2023	9 Agustus 2023
33	Opini DPS terkait Pengesahan Template Dokumentasi Akad *Re-Purchase Order* (REPO) Surat Berharga Syariah	35/BSI/DPS/OPINI/VIII/2023	18 Agustus 2023
34	Opini DPS terkait Pengesahan Template Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar Surat Berharga Syariah Negara	36/BSI/DPS/OPINI/VIII/2023	21 Agustus 2023
35	Opini DPS terkait Kesesuaian Syariah terhadap Produk *Cash Waqf Link Deposit* (CWLD)	34/BSI/DPS/OPINI/VIII/2023	30 Agustus 2023
36	Opini DPS terkait Rencana Kepersertaan SUB *Registy* BI-SSSS	37/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	30 Agustus 2023
37	Opini DPS terkait *Template* Akad Qardh Dengan Jaminan Gadai (Rahn) Emas	47/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	8 September 2023
38	Opini DPS terkait Skema LC Impor Musyarakah	40/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	13 September 2023
39	Opini DPS terkait Skema LC Impor Wakalah Bil Ujroh dan Mudharabah - 13 September	41/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	13 September 2023
40	Opini DPS terkait *Pre-Export Financing* (PEF) Salam dan Wakalah (Penjualan)	42/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	13 September 2023
41	Opini DPS terkait *Shipping Guarantee*	43/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	13 September 2023
42	Opini DPS terkait Skema Ekspor Al-Bai' dan Wakalah (Penjualan)	44/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	13 September 2023
43	Opini DPS terkait Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia	38/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	15 September2023
44	Opini DPS terkait Skema UPAS/UPAU LC *Financing*	45/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	20 September 2023
45	Opini DPS terkait Kerjasama *Shared Service* antara PT. BSI Tbk, dengan PT. BMRI Tbk untuk Sistem Pembayaran RTGS, SKN, BI-FAST & SWIFT dan RSA Archer	50/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	27 September2023
46	Opini DPS terkait Kartu Tani Digital Mekanisme Bantuan Langsung Pupuk Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi Aceh	51/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	27 September 2023
47	Opini DPS terkait Skema *Joint Financing* Dengan Mitra Multifinance Syariah	46/BSI/DPS/OPINI/X/2023	4 Oktober 2023
48	Opini DPS terkait Skema *Confirming Bank*	54/BSI/DPS/OPINI/X/2023	4 Oktober 2023

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
49	Opini DPS terkait Sinergi Pemanfaatan Sementara Asset Milik Bank Mandiri Dalam Rangka Proses Penyimpanan (*Safe Keeping*) Dokumen BSI	52/BSI/DPS/OPINI/X/2023	18 Oktober 2023
50	Opini DPS terkait Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia	39/BSI/DPS/OPINI/X/2023	18 Oktober 2023
51	Opini DPS terkait Kerjasama Dengan Asuransi Penjaminan Konvensional Untuk Produk Kontta Bank Garansi	49/BSI/DPS/OPINI/X/2023	25 Oktober 2023
52	Opini DPS terkat Pengesahan Penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi	48/BSI/DPS/OPINI/X/2023	30 Oktober 2023
53	Opini DPS terkait Struktur Tarif *Trade Finance* (Transaksi Impor)	55/BSI/DPS/OPINI/XI/2023	8 November 2023
54	Opini DPS terkait Kerjasama *Shared Service* antara PT BSI Tbk, dengan PT BMRI Tbk untuk Implementasi Produk Mitraguna	53/BSI/DPS/OPINI/XI/2023	28 November 2023
55	Opini DPS terkait Pengesahan Dokumen Terkait Manual Produk, *Mock Up*, Syarat dan Ketentuan Umum Transaksi Reksa Dana Syariah Secara Elektronik	56/BSI/DPS/OPINI/XII/2023	19 Desember 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, Bank memiliki kewajiban mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan dimaksud mencakup pengembangan kompetensi di bidang teknis, di bidang nonteknis, dan di bidang kepemimpinan.

Karena itu, BSI memberikan dukungan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengikuti pengembangan kompetensi. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi atau fasilitas dan protokoler selama pendidikan berjalan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	**Hasanudin** Ketua Dewan Pengawas Syariah	BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	The Ritz Carlton, SCBD	BSI
		Workshop	8-9 Maret 2023	Denpasar Bali	OJK-DSN
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi Agenda: Diskusi terkait pelaksanaan pengelolaan sponsorship & hibah narasumber	23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS VIII bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	4 September 2023	Hotel Mercure Jakarta Batavia	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) Series III Tahun 2023	19 September 2023	Auditorium lt.6 The Tower	BSI
		Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XIX TAhun 2023	13-14 Oktober 2023	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta	DSN MUI
2.	**Mohamad Hidayat** Anggota Dewan Pengawas Syariah	BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	The Ritz Carlton, SCBD	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8-9 Maret 2023	Virtual	BSU
		Indonesia Re International Conference	5 Juli 2023	Hotel Fairmont Jakarta	Indonesia Re International
		Workshop pembekalan dan sertifikasi manajemen risiko syariah level 2	25-26 Juli 2023	Via online Zoom	Medina Consulting

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Workshop manajemen risiko	7-8 Agustus 2023	Hotel Grand Mercure Bandung	AASI
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi Agenda: Diskusi terkait pelaksanaan pengelolaan sponsorship & hibah narasumber	23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS VIII bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	4 September 2023	Hotel Mercure Jakarta Batavia	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) Series III Tahun 2023	19 September 2023	Auditorium lt.6 The Tower	BSI
		GRC Continuing Profesional Development I	2 Oktober 2023	Hotel Holiday Inn, Bandung Pasteur	GRC Management/OJK
		Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XIX TAhun 2023	13-14 Oktober 23	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta	DSN MUI
3.	**Oni Sahroni** Anggota Dewan Pengawas Syariah	BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	The Ritz Carlton, SCBD	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8-9 Maret 2023	Virtual	BSU
		Workshop Muzakarah Cendikiawan Syariah Nusantara	31 Mei-1 Juni 2023	Holiday Inn Atrium, Singapura	INCIEF University

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi Agenda: Diskusi terkait pelaksanaan pengelolaan sponsorship & hibah narasumber	23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS VIII bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	4 September 2023	Hotel Mercure Jakarta Batavia	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) Series III Tahun 2023	19 September 2023	Auditorium lt.6 The Tower	BSI
		Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XIX TAhun 2023	13-14 Oktober 23	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta	DSN MUI
4.	**Didin Hafidhuddin** Anggota Dewan Pengawas Syariah	BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15 Februari 2023	The Ritz Carlton, SCBD	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8-9 Maret 2023	Virtual	BSU

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi Agenda: Diskusi terkait pelaksanaan pengelolaan sponsorship & hibah narasumber	23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS VIII bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	4 September 2023	Hotel Mercure Jakarta Batavia	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) Series III Tahun 2023	19 September 2023	Auditorium lt.6 The Tower	BSI
		Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XIX TAhun 2023	13-14 Oktober 23	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta	DSN MUI

PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Indonesia sepanjang tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh manajemen BSI serta semua pihak terkait. Dengan demikian, DPS BSI dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat DPS, penerbitan opini DPS dan pelaksanaan pengawasan syariah (Uji Petik) DPS. Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan *Self assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK. Pemenuhan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada Departemen Perbankan Syariah OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Direksi

Selaras yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi adalah organ utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Bank Syariah Indonesia, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi dapat mewakili BSI, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Secara umum, Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pelaksanaan tugas tersebut dipertanggungjawabkan pada RUPS.

DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan seluruh anggota Direksi Bank merujuk pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("PERMEN BUMN") yang mengatur mengenai anak perusahaan BUMN, seperti PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Bank; dan
5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atas pengangkatan masing-masing Direksi.

Sebelum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, setiap anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS wajib terlebih dahulu mengikuti proses *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

TATA TERTIB KERJA (*CHARTER*) DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Tata Tertib Direksi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 01/006-KEP/DIR tanggal 1 Februari 2021 tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun isi dari Tata Tertib Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Bertindak
2. Organisasi dan Pembidangan Tugas
3. Kebijakan Umum
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Pengaturan Rapat
6. Komite
7. Senior Executive Vice President
8. Korespondensi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank Syariah Indonesia untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan BSI antara lain memimpin dan mengurus Bank termasuk memimpin tim manajemen dalam proses penyusunan dan evaluasi strategi Bank sekurang-kurangnya setiap tahun. Dalam menjalankan tugas, Direksi tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili BSI baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi memiliki hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKSI

3. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa pekerja Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain.
5. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan.
7. Tidak menagih lagi pokok, margin, ujrah, dan bagi hasil lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian bagi hasil Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank.

Untuk memenuhi persyaratan kompetensi, anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Hery Gunardi	Direktur Utama	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Akta Berita Acara RUPSLB No. 155 tanggal 27 Mei 2022	22 September 2022	2022-2025
Ngatari	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Anton Sukarna	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Tribuana Tunggadewi	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Zaidan Novari	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 155 tanggal 27 Mei 2022	26 Januari 2023	2022-2025
Moh.Adib	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 155 tanggal 27 Mei 2022	22 September 2022	2022-2025
Saladin D. Effendi	Direktur	Akta Berita Acara RUPS No.45 tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023	2023-2026
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur	Akta Berita Acara RUPS No.45 tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023	2023-2026

PEMBIDANGAN TUGAS

Pembidangan tugas masing-masing anggota Direksi diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Hery Gunardi	Direktur Utama	Digital Banking, Internal Audit, dan Marketing Communication
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Operation, IT, dan Treasury
Ngatari	Direktur	Retail banking
Anton Sukarna	Direktur	Sales & Distribution
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Finance & Strategy
Tribuana Tunggadewi	Direktur	Compliance & Human Capital
Zaidan Novari	Direktur	Wholesale Transaction Banking
Moh. Adib	Direktur	Treasury & International Banking
Saladin D. Effendi	Direktur	Information & Technology
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur	Risk Management

MASA JABATAN DIREKSI

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
2. Pengangkatan anggota Direksi akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dimaksud terkait dengan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dan otoritas lain yang terkait (jika ada), serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
3. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
   a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank;
   b. Pengunduran dirinya telah efektif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku;
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
   d. Meninggal dunia;
   e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
   f. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
4. Anggota Direksi yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan masa jabatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturut-turut, atau maksimum 6 (enam) tahun sejak pengangkatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

KRITERIA DIREKSI

Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan:

1. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
3. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

DIREKSI

i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Direksi yang telah diangkat dalam RUPS wajib mengikuti program orientasi yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*. Program orientasi dilakukan dengan menyampaikan materi-materi terkait Bank, yang antara lain mencakup:

- Pengenalan Visi dan Misi Bank
- *Corporate Plan*
- Rencana Bisnis Bank
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
- Pengenalan Perbankan Syariah
- Manajemen Risiko
- Tata Kelola Perusahaan
- Pengenalan Budaya Bank

Untuk tahun 2023, program orientasi Direksi BSI telah dilaksanakan untuk anggota Direksi baru, yakni Saladin D. Effendi dan Grandhis Helmi Harumansyah pada tanggal 26 Mei 2023 sampai 8 Juni 2023.

MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN/ATAU PENGGANTIAN, ANGGOTA DIREKSI

Kebijakan dalam proses dan pemilihan Direksi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya termasuk dari Bank Indonesia.

Sebagai Anak Perusahaan BUMN, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian serta penggantian Direksi BSI juga tunduk pada PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar BSI dan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi.

Dalam proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau Direksi dilakukan melalui usulan Pemegang Saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam RUPS, informasi tentang profil calon anggota Direksi yang baru maupun yang diangkat kembali telah tersedia pada saat pemanggilan atau selambatnya pada saat pelaksanaan RUPS.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.

2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi hasil penyelenggaraan RUPS.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DIREKSI

BSI memiliki kebijakan yang mengizinkan pemberian pinjaman bagi Direksi yang dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Dana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Konsumer tanggal 30 November 2023, dan kebijakan internal terkait lainnya.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Kriteria hubungan afiliasi anggota Direksi meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan:			Hubungan Keluarga dengan:		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham Pengendali	Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham Pengendali
Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ngatari	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Anton Sukarna	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tribuana Tunggadewi	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Zaidan Novari	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Moh. Adib	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Saladin D. Effendi	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

DIREKSI

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Kebijakan

Kebijakan rangkap jabatan Direksi telah diatur dalam Anggaran Dasar BSI Pasal 18 Angka 23 serta Pedoman Direksi. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali:

1. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba; dan/atau
3. Perangkapan jabatan Direksi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Selama tahun 2023 tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada suatu Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil
Ngatari	Direktur	Nihil	Nihil
Anton Sukarna	Direktur	Nihil	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Nihil	Nihil
Tribuana Tunggadewi	Direktur	Nihil	Nihil
Zaidan Novari	Direktur	Nihil	Nihil
Moh. Adib	Direktur	Nihil	Nihil
Saladin D. Effendi	Direktur	Nihil	Nihil
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur	Nihil	Nihil

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Bank bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank dalam menjalankan tugas tersebut.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN PERUBAHANNYA

Kebijakan Pelaporan

Sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham BSI wajib disampaikan oleh Anggota Direksi yang bersangkutan kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan kepada regulator paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas Perusahaan.

Pada tahun 2023, telah terjadi perubahan kepemilikan saham Direksi di BSI. Seluruh perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rangkaian perubahan kepemilikan saham tersebut diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Per 1 Januari 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hery Gunardi	Direktur Utama	0	0
2	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	0	0
3	Ngatari	Direktur Retail Banking	16.823.500	0,036
4	Achmad Syafii	Direktur Information Technology	0	0
5	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	0	0
6	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	0	0
7	Tribuana Tunggadewi	Direktur Sales & Distribution	0	0
8	Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	0	0
9	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	0	0
10	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	9.500	0

Per 31 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hery Gunardi	Direktur Utama	2.210.600	0,005
2	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	548.400	0,001
3	Ngatari	Direktur Retail Banking	18.621.200	0,04
4	Saladin D. Effendi	Direktur Information Technology	0	0
5	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	1.726.600	0,004
6	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	1.726.600	0,004
7	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	1.726.600	0,004
8	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	0	0
9	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	517.900	0,001
10	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	527.400	0,001

RAPAT DIREKSI

Kebijakan

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 01/006-KEP/DIR tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, rapat Direksi merupakan forum untuk membahas, mengoordinasikan dan menyelesaikan agenda-agenda Bank Direksi menyusun jadwal rapat Direksi maupun rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris (rapat Direksi bersama Dewan Komisaris) untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan atau setiap waktu bilamana diperlukan oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh peserta lainnya sesuai kebutuhan Bank.

DIREKSI

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Rapat Internal Direksi			Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Hery Gunardi	Direktur Utama	39	37	94	14	9	65	1	1	100
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	39	34	87	14	8	57	1	1	100
Ngatari	Direktur	39	38	97	14	11	78	1	1	100
Anton Sukarna	Direktur	39	34	87	14	8	57	1	1	100
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	39	34	87	14	12	86	1	1	100
Tribuana Tunggadewi	Direktur	39	33	84	14	10	71	1	1	100
Zaidan Novari	Direktur	39	35	89	14	10	71	1	1	100
Mohammad Adib	Direktur	39	36	92	14	9	64	1	1	100
Saladin D. Effendi**)	Direktur	26	24	92	9	6	67	1	1	100
Grandhis Helmi Harumansyah**)	Direktur	26	24	92	9	6	67	1	1	100
Achmad Syafii*)	Direktur	13	13	100	6	4	67	1	1	100
Tiwul Widyastuti*)	Direktur	13	13	100	6	4	67	1	1	100

*) Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan hasil RUPST Tahun Buku 2022
**) Efektif menjabat per 21 September 2023

Agenda Rapat Internal Direksi

Rincian agenda dan keputusan/rekomendasi rapat internal Direksi disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
3 Januari 2023	A. *Update New Cash Management* B. Laporan Keamanan Siber BSI (Periode Oktober-Desember 2022)	1. Menyetujui *Value Proposition* GTS yang diusulkan. 2. SPO dan PTO terkait keamanan siber agar segera dilengkapi dan terus dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan siber.
10 Januari 2023	A. *Clearance Meeting* PWC B. Penyampaian Rencana Workshop IT & Business Strategy Alignment 2023	1. Secara prinsip Direksi menerima paparan hasil audit Laporan Keuangan BSI per 31 Desember 2022 yang disampaikan KAP PwC, dan meminta unit kerja CFA dan unit kerja terkait untuk menindaklanjuti sesuai dengan temuan audit KAP PwC. 2. Unit IT agar mempelajari inisiatif strategis dari seluruh Direktorat untuk bisa diselaraskan dengan rencana kerja dari unit IT sebagai bagian dari Business Strategy Alignment 2023.

Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
18 Januari 2023	A. BSI Excellence Award 2022 B. Usulan Rangkaian Acara Milad Ke-2 BSI C. *Productivity Enhancement* D. Update Strategi Treasury 2023 E. Update Persiapan *Full License* Cabang Dubai	1. Daftar pemenang dari BSI Excellence Award (BEA) 2022 agar disampaikan dalam rapat Direksi berikut untuk penilaian dari Direksi. 2. Tanggal Milad BSI 1 Februari 2023 agar menjadi *highlight* rangkaian Milad BSI yang harus dihadiri seluruh pengurus BSI. 3. Pastikan jumlah *outlet* cabang yang rugi atau tidak untung untuk terus dikurangi. 4. Pertimbangkan untuk KPI tidak hanya menggunakan DPK namun juga Funds Under Management (FUM). 5. Pastikan saat *grand launching* DIFC BSI sudah beroperasional penuh.
31 Januari 2023	Usulan Proyek Kerjasama Optimaliasi *Build Operate and Transfer* Aset di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta	*Timeline* penandatanganan kontrak kerja sama BOT agar bisa dilakukan lebih cepat per Februari 2023, jalankan proses BOT secara paralel.
14 Februari 2023	A. Laporan Kinerja Januari 2023 B. Update *Service Excellence* dan Hasil Survei Konsultan Service C. IT & *Business Strategy Alignment*	1. Target KPI tahun 2023 agar segera ditetapkan dan disampaikan ke Direksi untuk dibahas dalam forum. 2. Perlunya *up scaling* program pelatihan tentang *selling* kepada *frontliners* karena jumlah nasabah yang datang ke cabang berkurang. 3. Pengerjaan proyek IT agar dibuat prioritas, dengan yang segmennya lebih besar agar diutamakan.
28 Februari 2023	*Update* Materi RBB Penyesuaian 2023-2025	Materi presentasi RBB agar dipersingkat dan berfokus pada proyeksi keuangan BSI 2023 dan materi pegangan dari masing-masing Direktur Bidang.
7 Maret 2023	A. *Update Shifting Transactions* B. *Update Online Onboarding* C. *Update Employee Gathering* D. *Update* Proyeksi Kinerja 31 Maret 2023	1. Terkait *shifting* transaksi agar target kapasitas transaksi ditingkatkan setelah pergeseran dari transaksi *offline* menjadi transaksi *online*. 2. Pastikan program *Onboarding* dijalankan sesuai usulan *timeline*. 3. Agar BSU segera melakukan perbaikan acara *Employee Gathering* berkoordinasi dengan unit CSG mengingat tanggal acara sudah dekat. 4. Pembiayaan yang turun terutama yang Kol 2 untuk segera ditagihkan sebelum akhir Maret sehingga bisa memperbaiki laporan kinerja triwulan.
15 Maret 2023	A. Penyelesaian Kasus KCP Surabaya Diponegoro B. BSI SuperApp *New Branding* C. *Update* Hasil Pemeriksaan Dari BPKP dan Audit Internal Atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) D. *Burning Issue* IT	1. Strategi mitigasi agar disusun untuk mencegah terjadi kasus *fraud* yang berulang. 2. Menyetujui Pengembalian agunan tambahan kepada nasabah setelah hasil kajian internal BSI disetujui oleh BPKP dan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. 3. IOG dan Unit Kerja Consumer agar masuk rapat Direksi membahas kembali *burning issue* IT terkait Aplikasi WISE.
28 Maret 2023	A. *Update* Dampak Kolapsnya Bank Di US dan Eropa Kepada Perbankan dan Perekonomian Indonesia B. *Update* KPI Kantor Pusat & Jaringan dan Laporan Kinerja 26 Maret 2023 & Prognosis 31 Maret 2023	1. *Monitoring* terus kondisi perbankan dan perekonomian untuk memantau perkembangan kondisi ke depan. 2. Rapat Direksi menyetujui usulan KPI Jaringan 2023 menyesuaikan dengan arahan yang disampaikan.

DIREKSI

Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
4 April 2023	A. Segmentasi Dana Pihak Ketiga B. *Update Burning Issue* IT Infrastucture & Security C. *Update* Program Talenta Wirausaha BSI 2023	1. Nasabah individu perusahaan yang telah memiliki pembiayaan maka dipindah ke unit pembiayaan. Nasabah yang belum mendapatkan pembiayaan maka tidak dilakukan perubahan pengelolaan. 2. Strategi Inisiatif IT agar lebih fokus pada hal-hal krusial dan dapat menyelesaikan masalah IT yang lebih utama seperti modernisasi *Core Banking*. 3. Program Talenta Wirausaha agar direviu kembali, baik struktur organisasi, SPO, susunan acara, vendor acara, wewenang serta *do-and-don't* dsb. Untuk kemudian *update* teknis acara ke depannya dilaporkan langsung ke Direktur Utama.
11 April 2023	A. *Segment & Product Profitability Update* dan Laporan Kinerja Maret 2023 B. BSI Subordinated Sukuk Issuance 2023	1. Laporan profitabilitas berikutnya agar dimasukkan data biaya bersama data profitabilitas sebagai pembanding sehingga bisa dilihat *Cost to Profit* masing-masing segmen. 2. Menyetujui Izin prinsip penerbitan Sukuk Subordinasi BSI sebanyak-banyaknya Rp200 Miliar.
2 Mei 2023	A. Persetujuan atas Penyelesaian Kasus KCP Surabaya Diponegoro B. Update Hasil Pemeriksaan Investigasi *Close Of Business* (COB)	1. Rapat direksi secara prinsip menyetujui usulan terkait Penyelesaian Kasus KCP Surabaya Diponegoro. 2. Koordinasikan dengan vendor Temenos untuk mencari apa yang menjadi root cause dari keterlambatan COB dan segera ditetapkan solusinya agar tidak terjadi kembali.
16 Mei 2023	Kerjasama Penyaluran KPR Tapera Syariah & Penerbitan Sukuk Tanpa Penawaran Umum	Persetujuan secara prinsip Penerbitan Sukuk Tanpa Penawaran Umum dalam aktivitas BSI sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah.
23 Mei 2023	Usulan *Alternate* Direksi dan Direktur Supervisi	Rapat Direksi menyetujui Usulan *Alternate* Direksi dan Direktur Supervisi.
30 Mei 2023	A. Struktur Organisasi BSI B. Penetapan Direktur Pengelola Pemangku Kepentingan/*Stakeholders Management*	1. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui Usulan Struktur Organisasi BSI yang disampaikan dan untuk segera diproses dan diinfokan ke internal BSI. 2. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui usulan *stakeholders management* agar detailnya didiskusikan bersama Direktur CHC dan disampaikan ke Direktur terkait untuk finalisasi.
1 Juni 2023	Rencana Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur IT	Rapat Direksi secara prinsip menyetujui usulan Rencana Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur IT beserta anggaran finalnya dengan memprioritaskan pada peningkatan stabilisasi sistem dan *security*.
5 Juni 2023	Kick Off PMO Penguatan Fungsi IT, Operation, dan *Human Capital*	Rapat direksi secara prinsip menyetujui *Kick Off* PMO Penguatan Fungsi IT, Operation, dan *Human Capital* untuk kemudian diluncurkan secara nasional pada hari Rabu, 7 Juni 2023.
7 Juni 2023	Update Kinerja Mei 2023 dan *Review* Rencana Bisnis Bank 2023-2025	Rapat direksi secara prinsip menyetujui usulan Update Kinerja Mei 2023 dan *review* Rencana Bisnis Bank 2023-2025 yang disesuaikan berdasarkan arahan rapat Direksi
21 Juni 2023	A. Update Kinerja 19 Juni 2023 dan Prognosis 30 Juni 2023 B. Progress *Win Back* Tabungan C. Strategi Kualitas Pembiayaan	1. Agar diperhatikan hingga akhir Juni 2023: *booking* pembiayaan, mobilisasi dana dan *collections*. 2. Optimalkan penawaran program ke nasabah di luar nasabah target *win back*. 3. Jalankan program inisiatif kualitas pembiayaan dan *recovery* di akhir bulan dengan dilaksanakan operasional terbatas Cabang pada tanggal 28 & 30 Juni 2023.

Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
27 Juni 2023	A. Konversi Sistem Kartu Hasanah B. Update 100% Online Onboarding C. Diskusi Umum Direksi	1. Terkait permintaan dari OJK untuk perizinan aplikasi *New Card Management System* (CMS) agar segera dipenuhi dengan dilakukan *Vulnerability Assessment* & *Penetration Test*. 2. Pastikan keamanan dan kelancaran sistem dari program *online onboarding*, untuk dilakukan *assessment* secara berkala.
11 Juli 2023	A. *Kick-off* Project Pembukaan Cabang Saudi B. Laporan Kinerja Juni 2023	1. Perlu dipertimbangkan opsi program alternatif lain selain pembukaan Cabang karena yang ditargetkan adalah keberadaan BSI di Saudi sehingga tidak terbatas pada pembukaan Cabang. 2. Perlunya strategi yang tidak hanya *win back customer* namun juga menarik nasabah baru.
18 Juli 2023	A. *Update* Bisnis Mikro B. Pencegahan *Fraud* Pembiayaan dan Operasional C. *Update Legal*	1. Laporan kinerja bisnis mikro agar dibuat terpisah portofolionya antara KUR dan Non-KUR. 2. Terkait strategi *action plan* pencegahan *fraud* agar dipisah strategi yang sudah dilakukan dan sedang berjalan dengan strategi baru yang akan diimplementasikan. 3. Pastikan dalam setiap kasus legal seluruh bukti dan dokumentasinya lengkap.
2 Agustus 2023	A. *Update* Bisnis SME B. *Update* Strategi Bisnis Mikro	1. Tetapkan apa yang menjadi target segmen dan RAC yang jelas dari produk SME. 2. Tetapkan aturan KUR untuk dibatasi 1 tahun dengan maksimal 2 tahun untuk kemudian dipindah ke Non-KUR, pikirkan strategi *shifting* yang bisa diterima oleh nasabah.
8 Agustus 2023	A. *Update* Pembiayaan *Wholesale* B. Inisiatif Strategi Pencegahan *Fraud* Pembiayaan dan Operasional C. *Update Progress Development Customer Relationship Management* (CRM) D. Alternate Komite di Bawah Direksi E. Usulan Penyelesaian *Case* Fasilitas Kepemilikan Kendaraan Dinas Operasional Pejabat (FKKDOP) PT Telkomsel	1. Jaga porsi pembiayaan Wholesale di 30% dan tidak melebihi 35% dari total portofolio di BSI. 2. Terkait *Flow Chart* Penanganan *Fraud* agar didiskusikan dengan Direktorat Compliance and Human Capital untuk mendapatkan masukan dan opini. 3. Program pengembangan CRM agar dijalankan dengan tetap memperhatikan *timeline* dan bahwa tujuan program ini untuk dipergunakan secara luas di internal BSI. 4. Secara prinsip Rapat Direksi menyetujui usulan Alternate Komite Di Bawah Direksi dan Alternate pengganti Direksi dan SEVP dengan penyesuaian. 5. Secara prinsip Rapat Direksi menyetujui Usulan Penyelesaian Case FKKDOP PT Telkomsel.
15 Agustus 2023	A. *Update* Laporan Kinerja Juli 2023 B. *Update* Bisnis SME	1. Terkait pertanyaan yang diajukan ke BSI pada Board Forum Mandiri di Batam, Unit SPM agar segera menyusun jawabannya bersama unit kerja terkait, diskusikan jawabannya ke Direksi terkait, Wadirut dan Dirut untuk finalisasi. 2. Fokus bisnis SME terlalu banyak pada Local Champion, ke depan agar dikembangkan strategi bisnis yang berfokus pada pengembangan *value chain*.
22 Agustus 2023	A. Radir Kinerja *Fee Based Income* dan *Update* Kinerja Agustus 2023 B. Persiapan *Corporate Plan* BSI 2023-2033	1. Target ROE hingga 20% bisa dicapai, agar dibuat rencana *action plan* untuk mencapai target tersebut terutama dari *Fee Based Income* (FBI). 2. Dalam pembahasan *Corporate Plan* 2023-2033 agar dimasukan juga Syariah *Banking Landscape* sehingga tidak melihat hanya dari sisi Perbankan secara makro namun juga fokus pada Perbankan Syariah.

DIREKSI

Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
5 September 2023	A. *Update* Persiapan Indonesia *Incorporated* B. Inisiatif Penyelesaian Open Item Uang Muka (UM) dan Tagihan Rupa-Rupa (TRR) C. *Update* Bulion Bank D. Update Project *Fine Tuning Consumer & Retail Financing* – Product Griya	1. Koordinasikan dengan pihak terkait dari Kementerian BUMN untuk final tanggal acara peresmian Indonesia *Incorporated*. 2. Secara prinsip Rapat Direksi menyetujui usulan yang disampaikan dalam Inisiatif Penyelesaian Open Item Uang Muka (UM) dan Tagihan Rupa-Rupa (TRR). 3. Produk SRIA sebagai pembuka untuk target produk BSI berikutnya yaitu *Saving*/Deposito Emas. 4. Secara prinsip Rapat Direksi menyetujui sesuai usulan yang disampaikan dalam *Update Project Fine Tuning Consumer & Retail Financing* – produk Griya.
20 September 2023	A. Laporan Kinerja Agustus 2023 dan Proyeksi September 2023 B. Usulan RBB 2024-2026	1. Pertumbuhan Dana agar terus bertumbuh dengan menjaga COF tetap rendah. 2. Strategi 2024 kedepan yang diutamakan adalah meningkatkan dana murah.
26 September 2023	A. *Update Cyber Security* B. *Update* Pengembangan Bisnis Cabang Dubai dan Progress Cabang Saudi	1. Susun kampanye terkait pengamanan produk digital di level nasabah dan karyawan. 2. Susun *pipeline* dari Dubai dan Saudi untuk peluang bisnis secara bulanan.
11 Oktober 2023	A. Laporan Kinerja September 2023 dan Usulan RBB & RKAP 2024 B. Update Perkembangan Bisnis Treasury & Financial Institutions C. *Current Update* Direktorat Risk Management	1. Target RKAP pertumbuhan dana dan pembiayaan BSI agar di set 2-3% diatas dari proyeksi industry perbankan Indonesia. 2. Unit Treasury dan Unit International Banking agar melakukan benchmark *untuk* mempelajari perkembangan bisnis yang terbaik untuk BSI. 3. Laporan *strest test* untuk terus dipantau dan dilaporkan secara berkala.
17 Oktober 2023	A. Prognosis & *Action Plan* Pencapaian Desember 2023 B. Penyampaian Materi Observasi CGPI 2022 C. Update Perkembangan Bisnis SME dan Mikro Non-Kur D. *Current Update* Direktorat Operations	1. Perlunya rumusan strategi untuk pengelolaan *Cost of Fund* (COF) dengan fokus ke Retail dan bagaimana strategi *Fee Based Income* (FBI) di Digital, Gadai dan bisnis terkait lainnya. 2. Pastikan minta arahan dan masukan ke Komisaris Utama terkait materi CGPI. 3. Booking SME masih kurang, perlu strategi meningkatkan booking atau mengurangi yang *runoff* setiap bulan. 4. Maksimalkan penggunaan layanan dari vendor yang bekerja sama dengan BSI untuk meningkatkan layanan BSI menjadi lebih baik.
24 Oktober 2023	A. Update Tabungan & Transaksi B. Update Perkembangan Bisnis Digital Banking C. Update Asset & Liabilities	1. Luncurkan program Tabungan Bisnis yang masif untuk mengejar target DPK hingga akhir tahun, manfaatkan semua program dan inisiatif yang sudah berjalan. 2. Susun strategi yang efektif untuk meningkatkan *user* aktif menargetkan nasabah dormant. 3. *Repricing* pembiayaan agar diberlakukan untuk *new booking*. Selain itu hendaknya ada *cap/ceiling* untuk komposisi *special price* pembiayan berdasarkan pendekatan segmen.
7 November 2023	A. *Update Financing Factory* B. *Update New Cash Management System* (CMS)	1. Usulan percepatan SLA Bisnis Proses melalui *Financing Factory* menjadi 2 hari kerja agar segera di jalankan sesuai rencana, *live* di November 2023. 2. Pastikan proses migrasi data nasabah CMS BSI dari yang lama ke New CMS dapat berjalan baik dan memenuhi kebutuhan nasabah.

Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
13 November 2023	A. *Update* Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2024 B. Pemberian Informasi yang Setara Kepada Pemegang Saham (*Equal Information*)	1. Agar dapat dilakukan *Carbon Tracing* pada setiap penukaran botol plastik via *Reverse Vending Machine* (RVM) sehingga diketahui nilai *Carbon Trading* di BSI. 2. Pemegang saham dalam konteks pemberian informasi dalam Sinergi Perbankan merupakan mitra kerja sama, dan bukan menerima informasi dalam posisinya sebagai pemegang saham BSI.
20 November 2023	Laporan Kinerja Oktober 2023 & Prognosis Desember 2023	Menyetujui strategi peningkatan PASBI untuk meningkatkan *Asset* BSI hingga akhir 2023.
28 November 2023	*Update Project Shared Service* Mitraguna	*Steering Committee Shared Service* agar melakukan kajian tersebut untuk membandingkan pro dan con dari proses pembiayaan Mitraguna BSI menggunakan WISE berbanding dengan bekerjasama Mitraguna dengan Bank Mandiri.
5 Desember 2023	Proyeksi Desember 2023 & Prognosis Kualitas Aset 2023	Rapat Direksi secara prinsip menyepakati untuk dijalankan Asumsi Simulasi Laba Desember 2023 dengan target *Asset* Rp340-343 triliun sesuai dengan masukan dan arahan rapat Direksi.
12 Desember 2023	A. *Update* Gadai B. *Update* ATM dan *Outlet* C. *Update Smart Agent* & EDC D. Kinerja November 2023 dan *Update* Pencapaian Volume Bisnis Per 8 Dec 2023	1. Pengajuan peningkatan limit gadai emas menjadi Rp1 Miliar ke OJK agar terus diproses, segera penuhi enam (6) *concern* yang disampaikan OJK dan ajukan permohonan kembali. 2. Alokasikan ATM lebih banyak di area *prominent*. Ke depan, persentase di area *prominent* harus lebih besar dari yang di Kantor BSI. 3. Saat ini kinerja *Smart Agent* masih rendah, perlu disusun Strategi *Smart Agent* yang lebih terkoordinasi, agar disusun laporan dan rencana strategi 2024 dengan lebih terstruktur. 4. GH SPM untuk *update* realisasi dari perkembangan DPK dan pembiayaan di Group WA Direksi.
19 Desember 2023	A. *Update* Pembagian Target 2024 B. *Update* Persiapan Operational Natal & Tahun Baru C. Usulan Penggantian Dana Nasabah Korban *Fraud* Internal di KCP Seutui (Region Aceh) D. *Update* Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) E. Permohonan Persetujuan dan Pengadaan *Upgrade License Corebanking* Sistem Temenos	1. Update Pembagian Target 2024 untuk dirapikan dengan menyusun strategi pencapaian yang lebih intuitif dalam mengejar target. 2. Selain Operasional Bank, agar diperhatikan juga *Collection* yang masih akan berjalan selama liburan hingga akhir tahun. 3. Rapat Direksi menyetujui rekomendasi penanganan dari kasus *Fraud*, namun agar dipastikan kasus tidak terekspos ke luar. 4. Fokus segmen FLPP dan Tapera BSI terdiri dari Muhammadiyah, UIN, dan JSIT, agar Fokus segmen tersebut dioptimalkan dengan mempersingkat waktu proses SLA nya. 5. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui proses Pengadaan *Upgrade* Sistem Temenos dari R10 menjadi R23 dengan catatan agar diperhatikan *Governance*, *Risk* dan *Compliance* dari pengadaan lisensi tersebut karena menyangkut pada sistem *Corebanking* BSI.

Agenda rapat Direksi bersama Dewan Komisaris disajikan pada bagian “Rapat Gabungan Dewan Komisaris” dalam Laporan Tahunan ini.

DIREKSI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Kebijakan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, Bank memiliki kewajiban mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk di dalamnya adalah Direksi. Pengembangan dimaksud mencakup pengembangan kompetensi di bidang teknis, di bidang nonteknis, dan di bidang kepemimpinan.

Karena itu, BSI memberikan dukungan kepada Direksi dalam mengikuti pengembangan kompetensi. Bagi Direksi yang melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan, selanjutnya dapat menyampaikan materi hasil pendidikannya di dalam rapat dan/atau sarana penyampaian lain. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi atau fasilitas dan protokoler selama pendidikan berjalan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

Realisasi pengembangan kompetensi Direksi sepanjang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	**Hery Gunardi** Direktur Utama	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session: "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar "Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0"	Rabu, 6 September 2023	Auditorium BSI Gd The Tower Lt. 6	Asbisindo

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Strategic Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani Agenda: Strategi Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 2023	Mandiri University Kampus Wijayakusuma-Jakarta Barat	Kementerian BUMN
2.	**Bob Tyasika Ananta** Wakil Direktur Utama	Workshop IT & Business strategy alignment actionable strategy 2023	Jumát, 20 Januari 2023	Hotel Bidakara Jakarta	BSI
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		Kegiatan Pelatihan Impolementasi APU PPT untuk Senior Management Tahun 2023	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2023 - Culture of Innovation Pembicara: Rouben Jayasinghe Digital Innovation Leader AWS Amazone Web Services	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU

DIREKSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Forum Co-Creating Future Mandirian 2023 - Business Leaders who Always Deliver and Always Ahead Pembicara: - Kartika Wirjoatmodjo, Wamen BUMN RI - Darmawan Junaidi, Dirut BMRI - Prof. Edward Buckingham, Dir Master in Business, Monash Univ Indonesia	Selasa, 29 Agustus 2023	Kampus Wijayakusuma, Mandiri University Daan Mogot, Jakarta Barat	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Strategic Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani Agenda: Strategi Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 2023	Mandiri University Kampus Wijayakusuma-Jakarta Barat	Kementerian BUMN
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III Tahun 2023 Tema: Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium The Tower Lantai 6	BSU
		Workshop Superapp Operational Readliness	Kamis, 12 Oktober 2023	Wisma Mandiri	BSI
3.	**Ngatari** Direktur	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		Pelatihan Implementasi APU PPT untuk Senior Management. Narasumber: Dr. Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK RI)	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lt 6	BSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Leader Forum Pengendalian Gratifikasi : Tingkatkan Budaya Anti korupsi dan Anti Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	The Tower Lt 6	BSI
		TELP series II Th 2023. Culture Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	Online	BSI
		Seminar Implementasi Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah Era 4.0	Rabu, 06 September 2023	The Tower Lt 6	BSI dan Asbisindo
		TELP series III 2023 - Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	The Tower Lt 6	BSI
4.	**Anton Sukarna** Direktur	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Market Outlook 2023 Managing Uncertainty in More Challenging Word	Kamis, 16 Maret 2023	The Langham Jakarta	Mandiri Investasi
		Kegiatan Pelatihan Implementasi APU PPT untuk Senior Management Tahun 2023	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lantai 6	BSU
		Pelatihan Business Ecosystem	Kamis - Jumat, 8-9 Juni 2023	Hotel Gran Melia Jakarta dan Online	BSU
		FGD Inisiatif Financial Center Mandiri Group	Kamis, 27 Juli 2023	Ruang Meeting Wing Kiri, Auditorium Lt.3 Plaza Mandiri	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Wealth Management	Senin, 7 Agustus 2023	The Tower lantai 3	BSU
		Board Forum Q2 2023	Kamis -Jumat, 10-11 Agust 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Undangan Acara Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi	Rabu 23 Agustus 2023	The Tower Lantai 6	CSG
		Program TELP Series 2 Tahun 2023	Kamis, 24 Agustus 2203	Virtual	BSU

DIREKSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi Pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	The Tower Lantai 6	APG
		Acara Gathering Rekanan BSI	Jumat, 8 September 2023	Wisma Mandiri Lantai 11	PPG
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	Selasa, 12 September 2023	Novotel Bogor	CSG
		Pelaksanaan Kegiatan TOP Executive Program (TELP) - Series 3 Tahun 2023	Selasa, 19 September 2023	Virtual	BSU
		Narasumber Seminar FESYAR 2023 Tema: Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah	Jumat, 29 September 2023	Atrium Pakuwon Mall Surabaya	Bank Indonesia
		Menjadi Pembicara Kegiatan Airlangga Iqtishoduna Sharia Festival (AISF) 2023 Tema: Optimalisasi Peran Bank Syariah Dalam Mengintegrasikan Fungsi Keuangan Komersial, Keuangan Sosial, dan Sektor Rill dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah	Sabtu, 7 Oktober 2023	Balai Pemuda Surabaya	Universitas Airlangga
		Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Jumat, 20 Oktober 2023	The Tower Lantai 6	BSI
		Board Forum Q3 2023 BMRI	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Forum Group Disucussion Komisi XI DPR RI	Senin, 4 Desember 2023	Hotel Mulia Senayan Jakarta	BSI
5.	**Ade Cahyo Nugroho** Direktur	Workshop Architecture IT and Business Strategy	19 - 20 Jan 2023	Hotel Bidakara	BSI
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		Training Strategi Finance	12-16 Juni 2023	Laussanne-Switzerland	International Institute for Management Development (IMD)
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Undangan Pelaksanaan Kegiatan Top Executive Learning Program (TELP) Series 2 tahun 2023 Narasumber: Reuben Jayasinghe - Digital Innovation Leader AWS	Jumat, 24 Agustus 2023	Virtual	BSI
		Undangan Seminar "Implememtasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	Auditorium The Tower lt. 6	BSI
		Undangan Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 2023	Kampus Wijayakusuma, Grogol Jakarta Barat	Kementerian BUMN
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	Selasa, 12 September 2023	Hotel Novotel Bogor	BSI
6.	**Tribuana Tunggadewi** Direktur	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Narasumber Sharing Session Penguatan Unit Usaha Syariah sehubungan dengan diundangkannya UU No.4/2023 tentang P2SK	Kamis, 2 Februari 2023	Hotel JW Marriot Medan	Otoritas Jasa Keuangan
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI

DIREKSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		Pelatihan Implementasi APUPPT	Kamis, 13 April 2023	Auditorium The Tower Lt.6	BSI
		Webinar "Waspada Modus Penipuan Gaya Baru"	Kamis, 3 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	Otoritas Jasa Keuangan
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Menjadi Moderator dalam Webinar FKDKP dengan Tema: "Efektivitas Digital Maturity Assessment dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	Senin, 28 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Seminar "Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	Auditorium The Tower Lt.6	BSI dan ASBISINDO
		Undangan Menghadiri Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 2023	Mandiri University Kampus Wijayakusuma	Kementerian BUMN
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III Tahun 2023 Tema: Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium The Tower Lantai 6	BSU
		Workshop Penyusunan Action Plan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Kamis, 4 Oktober 2023	Hotel Gran Melia Jakarta	BSI
		Webinar FKDKP dengan Tema: "Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional"	Selasa, 10 Oktober 2023	via Online : Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Menjadi Narasumber dalam Webinar Knowledge Sharing Forum Tema: "Penguatan Legal Officer untuk Mendukung Pertumbuhan Bisnis yang Sustain"	Rabu, 25 Oktober 2023	via Online : Zoom Webinar	BSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Knowledge Sharing Forum LGG dengan tema "Bagaimana Langkah Bank dalam Mengelola Data Pribadi dan Pembuktian Data Elektronik agar Terhindar dari Masalah Hukum?"	Senin, 13 November 2023	Hotel Pullman Jakarta	BSI
		Workshop Module II Program CHRO School KBUMN Tahun 2023	Jumat - Sabtu, 17 - 18 November 2023	Hotel Merusaka Nusa Dua Bali	Kementerian BUMN
		FGD FKDKP dengan tema "Implementasi APU PPT & PPPSPM dan Kewajiban Pelaporan"	Senin, 27 November 2023	Auditorium The Tower Lt. 6	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Risk and Governance Summit (RGS) tahun 2023 dengan tema "Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper"	Kamis, 30 November 2023	Shangri-La Ballroom Hotel Lt. 2	Otoritas Jasa Keuangan
		Seminar Merger dan Akuisisi di BUMN	Kamis, 30 November 2023	Aryanusa Ballroom Gedung Danareksa	Kementerian BUMN
		Menjadi Narasumber Pararel Session dalam Acara Seminar Nasional Dies Natalis Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga 2023 dengan tema "Membangun Sumberdaya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045"	Sabtu, 2 Desember 2023	Gedung ASEEC Tower Universitas Airlangga, Surabaya	Universitas Airlangga
		Mandiri Sustainability Forum (MSF) 2023	Kamis, 7 Desember 2023	Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Operating Model Forum (OMF) tindak lanjut O2V Survey CHRO School KBUMN	Jumat, 8 Desember 2023	BRIlian Tower Lt. 28	CHRO School KBUMN
		Workshop Rencana Pengembangan International Financial Center di Ibu Kota Nusantara	Senin, 11 Desember 2023	The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan JI. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1	Otorita IKN
7.	**Zaidan Novari** Direktur	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Workshop CBDO Innovation School Cohort 1 Tahun 2023	Jumat - Sabtu, 10 - 11 Februari 2023	The Laguna Hotel, Bali	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Chief Business Development Officer Innovation School BUMN School of Excellence	Juni 2023	Via Online : Virtual Zoom	Kementerian BUMN

DIREKSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Acara Implementasi GRC pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	The Tower Lt. 6	Asbisindo
		Pelaksanaan Kegiatan TELP - Series 3 Tahun 2023 Tema: Professional Judgment and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium Lt. 6, The Tower	BSU
		Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Jumat, 20 Okt 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	BSU
8.	**Moh. Adib** Direktur	Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Narasumber dalam kegiatan Sosialiasi Edukasi (Sos-Edu) dengan Tema EBAS - SP	Kamis, 13 April 2023	Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Indonesia Stock Exchange 1 Tower, Sudirman	SMF (Sarana Mutrigriya Finansial)
		Workshop sustainability reporting for companies - new port dgn tema "Global city and beyond"	Kamis, 3 Agustus 2023	ST Regis Hotel jakarta	JIF (Jakarta Investnent Forum)
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Leadership Forum pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	BSI
		Pelaksanaan Kegiatan Top Executive Larning Program (TELP) - Series 2 Tahun 2023 Narsum: Reuben Jayainghe - Digital Innovation Leader AWS (Amazon Web Services)	Kamis, 24 Agustus 2023	Online	BSU
		Menghadiri Acara Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0 (Kerjasama antara BSI dan Asbisindo)	Rabu, 6 Sept 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	Asbisindo & BSI
		Pelaksanaan Kegiatan TELP - Series 3 Tahun 2023 Tema: Professional Judgment and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	BSU

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
9.	**Saladin D. Effendi** Direktur	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	Sabtu, 10 Juni 2023	Online	ASBISINDO
		Kompetensi Manajemen Resiko Level 5	Senin, 12 Juni 2023	Kantor LSP KS	LSPKS
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Wealth Management	Senin, 7 Agustus 2023	The Tower lantai 3	BSU
		Undangan Acara Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi	Rabu 23 Agustus 2023	The Tower Lantai 6	BSI
		Program TELP Series 2 Tahun 2023	Kamis, 24 Agustus 2203	Virtual	BSU
		Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi Pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	The Tower Lantai 6	BSI
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	Selasa, 12 September 2023	Novotel Bogor	BSI
		Menjadi Pembicara dalam Taspen GRC Insight Forum (TGIF) Tema: Information Technology (IT) Security	Kamis, 19 Oktober 2203	Pullman Jakarta Central Park	Taspen
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Tema: Rise To The Future For A Stronger Indonesia	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Menjadi Narasumber Workshop Internal Control Officer Semester – II Tahun 2023 Bank Indonesia	Rabu, 8 November 2023	Sheraton Hotel Kuta, Bali	Bank Indonesia
		Menjadi Narasumber Sharing Session Perbanas Tema: Penanganan dan Pengamanan Insiden Siber	Jum'at, 17 November 2023	Mandiri Club	Perbanas
		Rapat Kerja Task Force Cyber Security KBUMN	Jum'at, 8 Desember 2023	Hotel Golden Tulip, Pontianak	Kementerian BUMN
		Product Meeting Temenos T24	Rabu-Kamis, 13-14 Desember 2023	Temenos India Private Limited, Chennai, India	Temenos
10.	**Grandhis Helmi Harumansyah** Direktur	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	Sabtu, 10 Juni 2023	Online	ASBISINDO
		Kompetensi Manajemen Resiko Level 5	Senin, 12 Juni 2023	Kantor LSP KS	LSPKS
		Payment Security Forum	Kamis, 3 Agustus 2023	The Residence OnFive, Grand Hyatt	VISA

DIREKSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Exexutive Learning Program (TELP) - Series 2	Kamis, 24 Agustus 2023	Online	BSU
		Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roelani	11-Sep-23	Mandiri University Kampus Wijaya Kusuma	KBUMN
		TELP series III 2023 - Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	The Tower Lt 6	BSI
		Seminar Enhancing Digitalization In The Islamic Financial Institution : Risk Prevention, Mitigation and Resolution	Kamis, 26 Oktober 2023	Balai Sidang - JCC	Bank Indonesia
		Sharing Session Board Forum Q3 2023 tema : Political and Business Outlook 2023	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University Kampus Wijaya Nawasena	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEPUTUSAN DIREKSI

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

1. Menyusun dan mengimplementasikan *Corporate Plan*.
2. Menggelar Rapat Direksi.
3. Menggelar Rapat persetujuan Komite Pembiayaan,
4. Menyalurkan pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menyusun RAKP Bisnis Perseroan Tahun 2023.
6. Menyusun RAKP *Sustainability* Perseroan Tahun Buku 2023.
7. Menggelar Rapat dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
8. Melakukan hapus buku piutang pokok yang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
9. Mewakili Bank melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis dan *support*.
10. Melaksanakan kegiatan edukasi, literasi dan inklusi dalam rangka peningkatan produk dan layanan Bank Syariah (Literasi Keuangan Syariah).
11. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan lainnya.

Adapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2023, antara lain:

1. Struktur Organisasi BSI terbaru
2. *Productivity Enhancement*
3. Strategi Treasury 2023
4. Kerjasama *Build Operate and Transfer Aset* (BOT)
5. IT & *Business Strategy Alignment*
6. Rencana Bisnis Bank (RBB)
7. BSI SuperApp *new branding*
8. Penerbitan BSI Subordinated Sukuk Issuance 2023
9. Penerbitan Sukuk Tanpa Penawaran Umum dalam aktivitas BSI sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah
10. Pembentukan *Project Management Office* Penguatan Fungsi IT, Operation, dan Human Capital
11. Project pembukaan Cabang Saudi
12. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)
13. *Upgrade* sistem Temenos

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Penilaian Berdasarkan KPI

Prosedur Penilaian

Pencapaian kinerja Direksi yang dilakukan secara mandiri atau *self assessment*, dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan Key Performance Indicator (KPI), yaitu:

1. PBV (*Price to Book Value*)
2. Laba Bersih BSI
3. Peringkat Tingkat Kesehatan Bank
4. Aset
5. Jumlah *Customer* Digital
6. Pelaksanaan Inisiatif Strategis Proses Merger
7. *Employee Productivity*

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS. Dasar penilaian kinerja mengacu kepada indikator kinerja kunci (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2023 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Hasil penilaian kinerja Direksi BSI tahun 2023 sebesar 105,38 dengan rincian sebagai berikut:

No.	KPI	Bobot (%)	Target	Keterangan	Sifat	Desember 2023			
						Real	Target	Pencapaian	Skor
1.	ROE (*Return on Equity*)	15%	15,49%	*Return on Equity* Desember 2023	Max	16,88%	15,49%	108,92%	16,34
2.	Laba Bersih BSI	20%	Rp5.151 Miliar	Laba setelah dikurangi pajak dan zakat	Max	Rp5.704 Miliar	Rp5.151 Miliar	110,72%	22,14
3.	Peringkat Tingkat Kesehatan Bank	20%	2	Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	Min	2	2	100,00%	20,00
4.	Pembiayaan	20%	Rp239.009 Miliar	Pembiayaan BSI Desember 2023	Max	Rp240.316 Miliar	Rp239.009 Miliar	100,55%	20,11
5.	Inisiatif Strategi BSI Tahun 2023	15%	189,64%	*Deliverables* sesuai dengan *timeline* 2023	Max	194,35%	189,64%	102,48%	15,37
6.	*Employee Productivity*	10%	Rp279 Juta/ Pegawai	Laba Bersih/ pegawai	Max	Rp318 Juta/ Pegawai	Rp279 Juta/ Pegawai	114,15%	11,41
Total		**100%**							**111,33**

DIREKSI

Penilaian Kinerja Direksi Melalui *Self Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian Direksi terkait dengan GCG mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Hasil penilaian disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penilaian penerapan GCG Bank.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Assessment kinerja Direksi termasuk dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester. Dengan demikian, prosedurnya mengikuti penilaian GCG Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok: *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance Structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* terdiri dari 25 indikator sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 14 indikator.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 7 (tujuh) Komite, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. IT Steering Committeee
3. Komite Policy and Procedure
4. Komite Bisnis
5. Komite Steering Crisis Management – Business Continuity Management
6. Komite Human Capital
7. Komite Asset dan Liabilities/Asset and Liability Committee (ALCO)

Prosedur Penilaian

Penilaian komite di bawah Direksi dilakukan secara mandiri atau *self assessment*. Hasil penilaian tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Direksi untuk dilakukan *review*.

Kriteria dan Hasil Penilaian

No.	Komite	Kriteria Penilaian Berdasarkan Tanggung Jawab Komite	Hasil Penilaian 2023
1	Komite Manajemen Risiko	Komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penerapan manajemen risiko secara berkala/ insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.	"Baik"
2	IT Steering Committeee	Komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT strategic plan dan IT budgeting, penetapan proyek IT strategic dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.	"Baik"

No.	Komite	Kriteria Penilaian Berdasarkan Tanggung Jawab Komite	Hasil Penilaian 2023
3	Komite Policy and Procedure	Komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merekomendasikan/ menetapkan kebijakan dan prosedur di luar kebijakan manajemen risiko dan pemutakhirannya yang akan diterbitkan. Selama tahun 2023, Komite Policy and Procedure telah melaksanakan tugasnya dengan baik.	"Baik"
4	Steering Committee Crisis Management - Business Continuity Management	Komite yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam rangka pengambilan keputusan, penetapan strategi dan kebijakan penanganan dampak bencana termasuk kondisi bencana pandemik COVID-19.	"Baik"
5	Komite Bisnis	Komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam fungsi bisnis termasuk marketing, relationship management berdasarkan target market/target customer yang telah ditetapkan dan melakukan analisa serta pemutusan.	"Baik"
6	Komite Human Capital	Komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan penerapan Kebijakan Human Capital dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.	"Baik"
7	Komite Asset dan Liabilities/ Asset and Liability Committee (ALCO)	Komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*).	"Baik"

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Muliaman D. Hadad*)	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2023-2026	63 Tahun	L	• Doctor of Philosophy • Master of Public Administration • Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan	• Duta Besar Indonesia untuk Swiss • Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan • Deputi Gubernur Bank Indonesia • Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2021-2024	60 Tahun	L	• Master of Arts in Economics and Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	• Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Veritra Sentosa Internasional • Founder, KARIM Consulting Indonesia • Founder, KARIM Business Consulting • Komisaris Independen Bank Sahabat Sampoerna
Suyanto	Komisaris	2021-2024	61 Tahun	L	• Doktor Ekonomi • Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta • Sarjana Ekonomi Pembangunan	• Staf Khusus Kepala BIN di Badan Intelijen Negara • Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri • Agen Madya, pada Staf Ahli, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Intelijen Negara • Staf Ahli Kepala BIN bidang SDA-LH • Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi I Badan Intelijen Negara

DIREKSI

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Masduki Baidlowi	Komisaris	2021-2024	65 Tahun	L	• Sarjana Tarbiyah • Sarjana Sastra Arab	• Ketua Bidang Informasi & Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden) • Komisaris PT Bank Syariah Mandiri • Anggota DPR RI anggota Komisi IV Bidang Pertanian dan Kelautan • Anggota Komisi I Bidang politik Luar Negeri • Anggota DPR RI Pimpinan Komisi X bidang Pendidikan
Imam Budi Sarjito	Komisaris	2021-2024	64 Tahun	L	• Doktor Ekonomi • Master Ekonomi • Sarjana Ekonomi	• Komisaris PT Bank BNI Syariah • Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI • Komisaris PT Bank BNI Syariah • Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI • Wakil Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI
Sutanto	Komisaris	2021-2024	60 Tahun	L	Sarjana Administrasi Niaga	• Komisaris PT Bank BRI Syariah • Kepala Audit Intern, Audit Intern Wilayah Bandung • Inspektur, Kantor Inspeksi Semarang • Inspektur, Kantor Inspeksi Banda Aceh • Wakil Inspektur, Bidang Audit KP, KCK, UKLN & PA Audit Intern Kantor Pusat
Abu Rokhmad*)	Komisaris	2023-2026	47 Tahun	L	• Doktor Ilmu Hukum • Magister Agama • Sarjana Hukum Perdata Islam	• Pengajar S2 Sosiologi Hukum UI • Pengajar S1 Ilmu Hukum, Ilmu Fiqih, Politik Hukum dan Politik Agraria dan SDA FISIP UIN ; Pengajar S2 Pendekatan Kajian Keislaman PPS UIN • Pengajar S1 Sosiologi Hukum FISIP UIN; Pengajar S2 Sosilologi Hukum PPS UIN • Pengajar S1 Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah FEBI UIN
M. Arief Rosyid Hasan**)	Komisaris Independen	2021-2024	37 Tahun	L	• Magister Kesehatan • Sarjana Kedokteran Gigi	• Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri • Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 • Kelompok Kerja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI • Komisaris Merial Health • *Chairman/Co-founder* MilenialFest
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	2021-2024	70 Tahun	L	• Post-Doctorate Research Program • Doktor Filsafat • Magister Filsafat • Sarjana Ushuluddin	• Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) • Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah • Pengawas Yayasan Pendidikan Madania • Anggota Timsel dan Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI • Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	2022-20225	63 Tahun	L	• Doctor of Philosophy in Accounting • MagisterSains in Accounting • Sarjana Accounting	• Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi • Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Menteri Kemenristekdikti • Rektor Universitas Diponegoro • Dekan Universitas Diponegoto

*) Efektif menjabat per 21 September 2023
**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Keberagaman Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag	Ketua	2021-2024	62 Tahun	L	• Doktor Syariah • Magister Syariah • Sarjana Syariah	• Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services • Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Ahli Akuntan Indonesia
Dr. K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	2021-2024	56 Tahun	L	• Doktor Islamic Economics and Finance • Magister Ilmu Hukum • Magister Bussiness Administration • Sarjana Syariah	• Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia • Ketua Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	2021-2024	48 Tahun	L	• Doktor bidang Fiqh Muqaran • Magister bidang Fiqh Muqaran • Sarjana bidang Syariah Islamiyah	• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	2021-2024	72 Tahun	L	• Doktor Ilmu Agama/Pengkajian Islam (Zakat) • Diploma Bidang Bahasa Arab • Magister Penyuluhan Pembangunan • Sarjana Syariah	• Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah • Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Ummah Bogor • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) • Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRI Syariah Tbk

DIREKSI

Keberagaman Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Hery Gunardi	Direktur Utama	2021-2024	61 Tahun	L	• Doktor Manajemen Bisnis • Master Finance and Accounting • Sarjana Administrasi Niaga	• Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri • Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN • Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Distributions PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Micro & Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Presiden Komisaris PT.AXA Mandiri Financial Services • Direktur Micro & Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	2022-2025	60 Tahun	L	• Magister Business Administration • Sarjana Akuntansi	• Direktur Human Capital & Kepatuhan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk • Direktur Treasury & Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk • Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk • Direktur Perencanaan & Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk • Direktur Operasional dan Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Ngatari	Direktur Retail Banking	2021-2024	57 Tahun	L	Sarjana Ilmu Pertanian, Bidang Studi Pertanian/ Pengolahan Hasil Pertanian	• Direktur Utama PT Bank BRIsyariah, Tbk • Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 1 • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Saladin D. Effendi	Direktur Teknologi Informasi	2023-2026	49 Tahun	L	Sarjana Bsc. Mechanical Engineering	• Group Head Ciso Office Bank Mandiri • Head of IT Division, Bank Muamalat Indonesia • Head of IT Division, HSBC
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Keuangan & Strategi	2021-2024	45 Tahun	L	• Magister Bisnis Administrasi • Sarjana Akuntansi	• Direktur Finance, Strategy & Treasury PT Bank Syariah Mandiri • Direktur Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri • SEVP Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri • Direktur Finance & Strategy PT Mandiri Tunas Finance • SEVP/Deputy Director PT Mandiri Tunas Finance
Anton Sukarna	Direktur Penjualan & Distribusi	2021-2024	52 Tahun	L	• Sarjana Teknologi Produksi Ternak • Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah	• Direktur Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri • SEVP Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri • Regional Head – Region III/Jakarta PT Bank Syariah Mandiri • Regional Head – Region VII/ Indonesia Timur PT Bank Syariah Mandiri • Group Head Commercial Banking Group PT Bank Syariah Mandiri
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan & SDM	2021-2024	56 Tahun	P	• Magister Ilmu Hukum • Spesialis Kenotariatan • Sarjana Hukum	• Direktur Kepatuhan & Risiko PT Bank BNI Syariah • Senior Executive Vice President (SEVP) Risiko & Komunikasi PT Bank BNI Syariah • Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk • Vice President (VP) Wakil Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk • VP Wakil Pemimpin 2 Divisi Bidang GCG dan Biro Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Manajemen Risiko	2023-2026	42 Tahun	L	• Magister Business Administration • Sarjana Teknik Industri	• Group Head Commercial Risk 1 Bank Mandiri 2020-Mei 2023 • Head of Business Development Bank Mandiri Singapore (BMSG) • Department Head Sector Sea Port & Transportation, Corporate Banking II & IV Group Bank Mandiri • Department Head Sector Energy, Corporate Banking V Group Bank Mandiri

DIREKSI

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	2022-2025	56 Tahun	L	• Magister Manajemen Keuangan • Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan	• Senior Vice President Commercial Banking 3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Senior Account Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Moh Adib	Direktur Treasury & International Banking	2022-2025	58 Tahun	L	• Magister Manajemen Agrobisnis • Sarjana Ilmu Agronomi	• Direktur PT BRI Danareksa Sekuritas • SEVP Retail Capital Market, PT BRI Danareksa Sekuritas • Kepala Divisi Bisnis Treasury, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk • Wakil Kepala Divisi Bisnis Treasury, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk • Kepala Bagian Credit Line Management Divisi Bisnis Internasional, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Nominasi dan Remunerasi
Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

KEBIJAKAN NOMINASI

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Syariah Indonesia menerapkan prosedur dan kebijakan yang mengacu pada:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.

PROSEDUR NOMINASI

Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru.

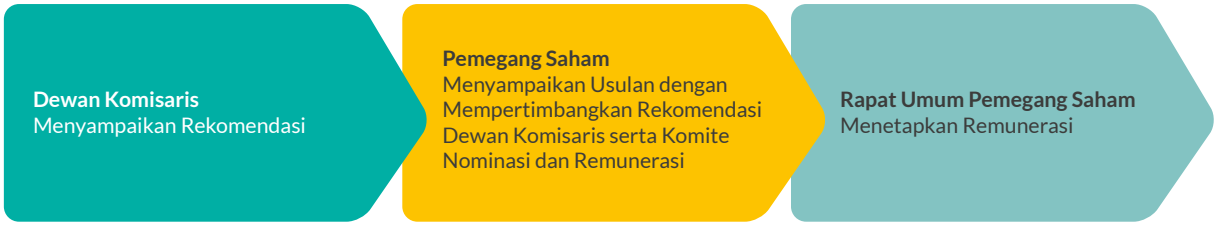
Dewan Komisaris
Menyampaikan Rekomendasi
Pemegang Saham
Menyampaikan Usulan dengan Mempertimbangkan Rekomendasi Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi
Rapat Umum Pemegang Saham
Menetapkan Remunerasi

Direksi

Pengangkatan Direksi Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Direksi yang baru.

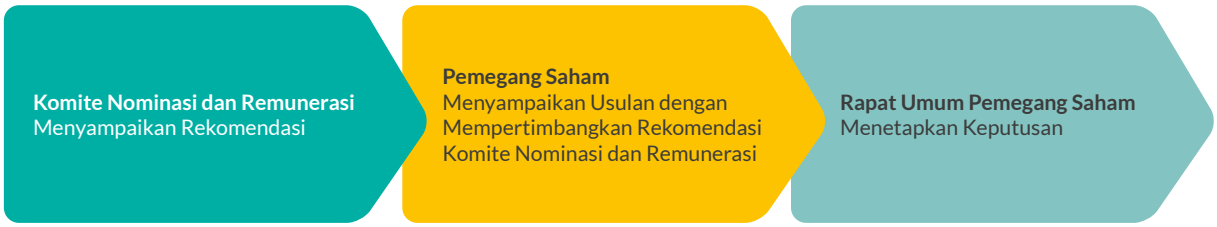

NOMINASI DAN REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris mengacu/berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PROSEDUR PENETAPAN

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi berupa gaji/honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Pengendali untuk mendapat persetujuan RUPS.

STRUKTUR REMUNERASI

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (net), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:
   - Tunjangan Hari Raya
   - Tunjangan Purna Jabatan
   - Tunjangan Perumahan dan Utilitas
   - Fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi
   - Fasilitas Kesehatan
   - Fasilitas *Club Membership* dan Anggota Perkumpulan Profesi
   - Fasilitas Biaya Komunikasi
   - Fasilitas Kantor Non Inventaris
   - Fasilitas Perjalanan Dinas
   - Fasilitas Bantuan Hukum
   - Izin Cuti
3. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Pengawas Syariah, antara lain:
   - Tunjangan Hari Raya
   - Tunjangan Purna Jabatan
   - Fasilitas Kesehatan
   - Fasilitas Perjalanan Dinas

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah Dalam penetapan *remuneration package* tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi telah memperhatikan:

1. Kinerja keuangan.
2. Pemenuhan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva.
3. Kewajaran dengan *peer group*.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

Jumlah nominal remunerasi yang diterima Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi selama tahun 2023, adalah sebagai berikut.

Rincian Remunerasi

Jenis Remunerasi	Jumlah Penerima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Nominal (Rp Juta)	Orang	Nominal (Rp Juta)	Orang	Nominal (Rp Juta)
Honorarium/Gaji	10	13.781.005.000	10	30.323.750.000	4	2.389.160.000
Tunjangan Perumahan	-	-	10	2.023.200.000	-	
Tunjangan Transportasi	10	2.592.403.500				
Tunjangan Hari Raya	10	1.031.355.000	10	2.431.850.000	4	190.040.000
Tantiem	10	25.695.500.000	10	60.496.000.000	4	3.825.000.000
Fasilitas dalam Bentuk Lainnya						
Transportasi		-			-	
Asuransi Purna Jabatan	10	1.775.472.002	10	4.415.750.496	4	504.253.780
Kesehatan	10	906.045.535	10	1.078.290.532	4	415.280.770

Kelompok Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
Di atas Rp2 miliar	-	10	-
Di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar	10	-	-
Di atas Rp500 juta-Rp1 miliar	-	-	4
Rp500 juta ke bawah	-	-	-

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Uraian	Rasio 2023
Rasio gaji karyawan tertinggi dan terendah	68,4:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,6:1
Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1,1:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	1,6:1

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas mengelola kesekretariatan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan undangan rapat kepada seluruh peserta untuk ditandatangani oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rapat;
3. Mendistribusikan bahan rapat kepada seluruh peserta rapat;
4. Mencatat dan mengadministrasikan keputusan rapat;
5. Menyimpan konsep risalah rapat;
6. Menjaga kerahasiaan keputusan rapat sampai dengan keputusan diumumkan;
7. Menyampaikan risalah rapat kepada seluruh anggota rapat dan pejabat lain yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris;
8. Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut perkembangan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat serta melaporkan tindak lanjutnya kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menjaga agar pelaksanaan tata tertib Komisaris secara teknis dapat dilakukan secara tertib;
2. Menyiapkan risalah rapat untuk disahkan dalam rapat berikutnya;
3. Menyiapkan Laporan tentang pelaksanaan keputusan rapat untuk dikaji dalam rapat berikutnya.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pembentukan Komite Audit bertujuan membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, terutama terkait dengan: informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh internal dan eksternal auditor, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada sejumlah regulasi. Komite dibentuk melalui keputusan Direksi Nomor 03/267-KEP/DIR tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 19 Oktober 2022.

Sedangkan regulasi yang menjadi acuan, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Komite Audit.
3. Peraturan perundang–undangan dan regulasi terkait lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan komite audit untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, di antaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
   1) Menentukan rencana kerja tahunan.
   2) Menentukan jadwal rapat tahunan. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite audit serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
   3) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
   4) Membuat *Self Assesment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite.

5) Menunjuk anggota Komite Audit non Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.

2. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
   1) Perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan sistem pengendalian intern (*internal control system*), termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
   2) Efektivitas kinerja internal dan eksternal auditor.
   3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   4) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
   6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan maupun pemberhentian akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
   7) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
   8) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   9) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
3. Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi komite audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, yang meliputi:
   1) Laporan Keuangan
      a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Syariah Indonesia Tbk., seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
      b) Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Bank Syariah Indonesia Tbk.
      c) Mempelajari secara mendalam laporan keuangan interim dan tahunan baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit.
      d) Mempelajari secara mendalam perubahan angka/niiai yang signifikan pada pos-pos Neraca dan Rugi/laba.
      e) Mempelajari secara mendalam pos-pos Aktiva Lain dan Pasiva Lain.
      f) Mempelajari secara mendalam laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan yang signifikan.
      g) Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
      h) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
   2) *Internal Control*

      Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern atas penerapan sistem pengendalian intern (*Internal control system*).
      a) Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. telah memiliki sistem pengendalian intern (*internal control system*) yang baku sesuai dengan praktek yang berlaku.
      b) Mempelajari secara mendalam laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. guna memastikan bahwa pengendalian intern (*internal control*) sudah dilaksanakan dengan benar.
      c) Melakukan pertemuan berkala dengan unit - unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian intern (*internal control system*) dan pelaksanaannya.
      d) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Satuan Kerja Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Ekstern.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

e) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

3) Internal Audit.
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
a) Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
b) Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan internal auditor.
c) Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
d) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit intern untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar.
e) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern guna membahas temuan-temuan audit yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.

4) *External Audit*
a) Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan eksternal auditor serta institusi pemeriksa lainnya.
b) Mempelajari nama dan atau reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diundang untuk mengikuti tender.
c) Mempelajari kemungkinan keterkaitan KAP yang akan diundang mengikuti tender, termasuk para pejabat dan staf Kantor Akuntan Publik tersebut dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang meliputi:
(1) Hubungan sebagai rekanan jasa non-audit bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
(2) Hubungan sebagai pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam jumlah material/menentukan.
(3) Hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
(4) Salah seorang pejabat dan atau auditor Kantor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
(5) Salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. adalah mantan pejabat/auditor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
d) Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik.
e) Mempelajari dan memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik sudah berjalan dengan benar sesuai dengan tata cara yang baku.
f) Mempelajari *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* yang dikirimkan kepada Kantor Akuntan Publik yang sudah ditetapkan sebagai calon eksternal auditor PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
g) Mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan Kantor Akuntan Publik yang sudah dipilih/ditunjuk, guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai dengan *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting.
h) Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
i) Melakukan komunikasi secara berkala dengan Kantor Akuntan Publik yang sedang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara lain sebagai berikut:
(1) Progres pelaksanaan pemeriksaan.
(2) Temuan-temuan penting.

(3) Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
(4) Penyesuaian-penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
(5) Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.

j) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Wewenang

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit adalah:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi.
2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di PT Bank Syariah Indonesia Tbk serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
3. Meminta laporan hasil pemeriksaan internal auditor dan eksternal auditor serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
4. Meminta internal auditor dan atau eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pemberian Rekomendasi Penunjukan Auditor Eksternal

Komite Audit BSI melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) terkait dengan jasa yang diberikan kepada Bank. Hasil telaah tersebut diserahkan sebagai rekomendasi penunjukan/pemberhentian KAP dan AP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank Syariah Indonesia telah memiliki Piagam Komite Audit yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI Nomor 01/003-SKB/Dirkom tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Isi Piagam Komite Audit, secara umum meliputi:

1. Tujuan umum dibentuknya Komite Audit
2. Kewenangan
3. Keanggotaan
4. Persyaratan Keanggotaan
5. Tugas dan Tanggung Jawab
6. Hubungan Kerja
7. Rapat
8. Pelaporan
9. Masa Tugas dan Kompensasi
10. Kerahasiaan Bank
11. Penutup

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Audit

Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/267-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang berlaku efektif per 13 Juli 2023.

Rincian komposisi dan masa jabatan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Rangkap Jabatan
Mohamad Nasir	Ketua merangkap anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Muliaman D. Hadad*)	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan**)	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
M. Zacky Thayib	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen
M. Gunawan Yasni	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen

*) Efektif menjabat per 21 September 2023
**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Profil Komite Audit

Mohamad Nasir
Ketua
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Muliaman D. Hadad
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman A. Karim
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

M. Arief Rosyid Hasan
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Komaruddin Hidayat
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

M. Zacky Thayib
Anggota

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 60 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 31 Oktober 1963
Dasar Penunjukan	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/267-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT bank Syariah Indonesia Tbk yang berlaku efektif per 13 Juli 2023.
Riwayat Pendidikan	• Magister Management dari Universitas Gajah Mada (1998) • Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjajaran (1986)
Sertifikasi	• Sertifikasi Kompetensi Auditor Level Manager (LSPP) • Sertifikasi Kepatuhan & AML Level II (LSPP) Divisi Kepatuhan • Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiner (ACFA) • Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko
Riwayat Pekerjaan	• Learning Consultant (LC) Mandiri University Group (2018-2019) • Kepala Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Wilayah 4 Jakarta Thamrin (2017-2018) • Kepala Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Wilayah 1 Medan (2015-2017) • Kepala Departemen Internal Audit Bank Mandiri (2010-2015) • Kepala Regional Internal Control (RICH) Bank Mandiri Wilayah 9 Banjarmasin (2008-2010)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Muhammad Gunawan Yasni
Anggota

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 55 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 17 September 1969
Dasar Penunjukan	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/267-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang berlaku efektif per 13 Juli 2023.
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen Bidang Keuangan dari Prasetya Mulya Graduate School (1994-1995) • Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1988-1993)
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BRISyariah Tbk (2008-2021) • Anggota Dewan Pengawas Syariah, Divisi Syariah Bank Tabungan Negara (2018-2020) • Penasihat/Ahli Syariah di Pasar Modal, Manulife Asset Management Indonesia (2015-2020) • Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) (2015-2020) • Penasihat Deutsche Bank Kustodian & Investasi Perbankan Syariah (2009-2017)
Rangkap Jabatan	• Penasihat Syariah Lembaga & Penerbitan Instrumen Keuangan Syariah • Bendahara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
Mohamad Nasir	Ketua merangkap anggota	• Doktor Filsafat • Magister Filsafat • Sarjana Usuludin	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Muliaman D. Hadad	Anggota	• Doctor of Philosophy • Master of Public Administration • Sarjana Ekonomi	Bidang pengawasan bank umum, regulasi sektor keuangan, birokrasi pemerintahan, serta manajemen dan ekonomi.
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Master of Arts in Economics and • Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Magister bidang Kebijakan Kesehatan • Kedokteran Gigi	Bidang kebijakan kesehatan dan organisasi.
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Doktor Akuntansi • Magister Akuntansi • Sarjana Akuntansi	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
M. Zacky Thayib	Anggota	• Magister Manajemen • Sarjana Ekonomi	Bidang pengawasan bank syariah.
M. Gunawan Yasni	Anggota	• Magister Manajemen • Sarjana Akuntansi	Bidang pengawasan bank syariah dan organisasi.

Sertifikasi Profesi

No	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1	Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)	2
2	Fellow in Islamic Insurance Society (FIIS)	2
3	Certified Risk Professional (CRP)	2
4	Chartered Accountant (CA)	2
5	Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	2

Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Mohamad Nasir	Muliaman D. Hadad	Adiwarman A. Karim	M. Arief Rosyid Hasan	Komaruddin Hidayat	M. Zacky Thayib	M. Gunawan Yasni
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√

Aspek Independensi	Mohamad Nasir	Muliaman D. Hadad	Adiwarman A. Karim	M. Arief Rosyid Hasan	Komaruddin Hidayat	M. Zacky Thayib	M. Gunawan Yasni
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	
		Bank Syariah Indonesia	Perusahaan/Lembaga Lain
Mohamad Nasir	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Astra Internasional Tbk
Adiwarman A. Karim	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	Komisaris Independen	• Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah • Ketua Komite Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah • Wakil Sekertaris Jendral Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Komaruddin Hidayat	Anggota	Komisaris Independen	Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
M. Zacky Thayib	Anggota	-	-
M. Gunawan Yasni	Anggota	-	Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Penasihat Syariah Lembaga & Penerbitan Instrumen Keuangan Syariah

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit menyelenggarakan 18 (delapan belas) kali rapat. Rinciannya diuraikan melalui tabel di bawah ini.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	12 Januari 2023	PwC-Clearance Meeting	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni

ORGAN DAN KOMITE
DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
2	12 Januari 2023	Laporan Realisasi Audit Triwulan IV/2022	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
3	31 Januari 2023	Laporan Publikasi Triwulan IV 2022	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. M. Zacky Thayib 4. M. Gunawan Yasni
4	9 Februari 2023	- *Update Progress* dan Perkembangan IT - *Progress* IT Stabilization (Ciawi) - Triwulan IV Tahun 2022	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
5	9 Februari 2023	Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Semester 2 2022	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
6	16 Maret 2023	Evaluasi Persiapan Operasional dan IT menjelang Ramadhan dan Lebaran 2023	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. M. Zacky Thayib 4. M. Gunawan Yasni
7	30 Maret 2023	Laporan Pengendalian Internal Hasil Pemeriksaan PWC Posisi 31 Desember 2022	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
8	13 April 2023	Laporan Publikasi Triwulan I tahun 2023	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
9	11 Mei 2023	Laporan Hasil Audit Triwulan I 2023	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
10	13 Juli 2023	Laporan Hasil Audit Triwulan II/2023	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib
11	20 Juli 2023	Laporan Realisasi RAKB Semester I Tahun 2023	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib
12	24 Agustus 2023	Perkembangan Digital & IT dalam Men*support* Ekspansi dan Operasional Bisnis BSI	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib 6. M. Gunawan Yasni
13	14 September 2023	Laporan Hasil Audit PwC atas Laporan Keuangan BSI Juni 2023 dan Permohonan Izin Rilis Publikasi Laporan Keuangan BSI Juni 2023	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib 6. M. Gunawan Yasni
14	12 Oktober 2023	Laporan Hasil Audit Triwulan III tahun 2023	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib 6. M. Gunawan Yasni
15	30 Oktober 2023	Laporan Publikasi Triwulan III / 2023	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib 6. M. Gunawan Yasni

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
16	24 November 2023	Permohonan Persetujuan RAKB 2024	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
17	30 November 2023	Kick Off Meeting Pemeriksaan Untuk Audit Laporan Keuangan BSI Posisi Desember 2023	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
18	21 Desember 2023	Update Pemeriksaan untuk Audit Laporan Keuangan BSI	**Komite Audit** **Ketua:** Mohamad Nasir **Anggota:** 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni

Frekuensi dan Tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Mohamad Nasir	Ketua	18	17	94
Muliaman D. Hadad	Anggota	9	9	100
Adiwarman A. Karim	Anggota	18	18	100
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	15	13	87
Komaruddin Hidayat	Anggota	18	17	94
M. Zacky Thayib	Anggota	18	18	100
M. Gunawan Yasni	Anggota	18	17	94

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi

Kebijakan Bank terkait dengan pengembangan kompetensi SDM, terutama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Karena itu, Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Audit untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan melalui tabel di bawah ini.

No.	Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1.	M. Zacky Thayib	Pelatihan Implementasi APU-PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2024	The Tower Lt. 6	BSU

No.	Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Implementasi Forensik Accounting dalam Mendeteksi Fraud	6 Mei 2023	Virtual Zoom	Unlock
		Sharing Session terkait "Pasar Modal" Narasumber : Ibu Etty Retno Wulandari, CA, MBA,Ph.D (Deputy Komisioner Manajemen Strategis (2013-2022)	18 September 2023	The Tower Lt. 6	BSU
		Forum Penguatan Governansi dan Integritas Pelaporan Keuangan Sektor Jasa Keuangan "Menjaga Governansi & Integritas Laporan Keuangan"	26 September 2023	The Kesultanan Ballroom, Royal Ambarrukmo Yogyakarta	BUMN
		Pembekalan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 3	15-16 Oktober 2023 Pelatihan 22 Oktober 2023 Ujian	Virtual Zoom	Muamalat Institute
		Enhancing ESG Through Best Practices in Accounting	7 Desember 2023	Virtual Zoom	OJK Institute
2.	M. Gunawan Yasni	Pelatihan Implementasi APU-PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2024	The Tower Lt. 6	BSU
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah VIII Tahun 2023 "Bidang Perbankan Syariah"	4 September 2023	Jakarta	DSN MUI
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah VIII Tahun 2023 "Bidang Pasar Modal Syariah"	5 September 2023	Jakarta	DSN MUI
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah VIII Tahun 2023 "Bidang Perasuransian Dana Pensiun dan Penjamin Syariah"	6 September 2023	Jakarta	DSN MUI
		Sharing Session terkair "Pasar Modal" Narasumber : Ibu Etty Retno Wulandari, CA, MBA,Ph.D (Deputy Komisioner Manajemen Strategis (2013-2022)	18 September 2023	The Tower Lt. 6	BSU
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah XIX Tahun 2023 "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi"	13-14 Oktober 2023	Jakarta	DSN MUI & OJK

Keterangan:
Pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi untuk anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris BSI, telah disampaikan pada bagian "Dewan Komisaris" di Bab Tata Kelola Perusahaan

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1.	Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor.
2.	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2023.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite tersebut berfungsi untuk membantu tugas Dewan Komisaris, terutama yang berkenaan dengan kebijakan remunerasi dan nominasi Bank. Kebijakan ini telah selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada sejumlah regulasi. Komite dibentuk melalui keputusan Direksi Nomor KEP:03/269-KEP/DIR tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Selain itu, pembentukannya juga mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. serta peraturan perundang–undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite wajib bertindak independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

A. Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
   1. Terkait dengan fungsi remunerasi
      a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi;
      b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah;
   2. Terkait dengan fungsi nominasi:
      a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
         I. Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
         II. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
         III. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
      b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
      c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
      d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
      e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
      f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
   3. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi.
   4. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani.
   5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

6. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
7. Memiliki *data base* dan *talent pool* calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

B. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat.

C. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam:
1. Menyelenggarakan rapat secara teratur;
2. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
3. Menghadiri rapat;
4. Memberikan kontribusi dan berperan aktif;
5. Membuat risalah rapat (sekretaris).

Wewenang

1. Meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank Syariah Indonesia telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI No. 01/001-SKB/Dirkom tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia..

Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Komposisi dan Masa Jabatan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/269-KEP/DIR tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rincian komposisi dan masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Rangkap Jabatan
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Muliaman D. Hadad*)	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan**)	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Mohamad Nasir	Anggota	2022-Selesai	Komisaris Independen
Masduki Baidlowi	Anggota	2023-Selesai	Komisaris
Sylvia Aziz	Anggota	2023-Selesai	Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group

*) Efektif menjabat per 21 September 2023
**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Komaruddin Hidayat
Ketua merangkap anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Muliaman D. Hadad
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman A. Karim
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

M. Arief Rosyid Hasan
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Mohamad Nasir
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Masduki Baidlowi
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Sylvia Aziz
Anggota

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 45 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 6 Desember 1978
Dasar Penunjukan	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.03/172-KEP/DIR tanggal 15 Mei 2023.
Riwayat Pendidikan	• Master of Science Management, University of Ilinois - Urbana Champaign • Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran
Riwayat Pekerjaan	• Bank Syariah Indonesia - Corporate Transformation Office (2021-2023) • Bank Syariah Mandiri - Corporate Transformation (2015-2021) • Bank Tabungan Negara - Change Management Office (2014-2015) • Bank Permata - Preferred Banking (2012-2013) • Bank Mandiri - Mass Banking Group (2010-2012) • Bank Mandiri - Change Management Office (2005-2010) • Bank Mandiri - Economic Financial Research (2003-2005)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	• Doktor Filsafat • Magister Filsafat • Sarjana Usuludin	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Muliaman D. Hadad	Anggota	• Doctor of Philosophy • Master of Public Administration • Sarjana Ekonomi	Bidang pengawasan bank umum, regulasi sektor keuangan, birokrasi pemerintahan, serta manajemen dan ekonomi.
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Master of Arts in Economics and • Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Magister bidang Kebijakan • Kesehatan Kedokteran Gigi	Bidang kebijakan kesehatan dan organisasi.
Mohamad Nasir	Anggota	• Doktor Akuntansi • Magister Akuntansi • Sarjana Akuntansi	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
Masduki Baidlowi	Anggota	• Sarjana Pendidikan Agama Islam • Sarjana Muda Sastra Arab	Bidang pemerintahan, politik, dan pengawasan perbankan syariah.
Sylvia Aziz	Anggota	• Master of Science Management • Sarjana Ekonomi	Bidang perbankan syariah

Keterangan:
Pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi untuk anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris BSI, telah disampaikan pada bagian "Dewan Komisaris" di Bab Tata Kelola Perusahaan.

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Komaruddin Hidayat	Muliaman D. Hadad	Adiwarman A. Karim	M. Arief Rosyid Hasan	Mohamad Nasir	Masduki Baidlowi	Sylvia Aziz
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Rangkap Jabatan Anggota Komite

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	
		Bank Syariah Indonesia	Perusahaan/Lembaga Lain
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Astra Internasional
Adiwarman A. Karim	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	Komisaris Independen	• Ketua Ekonomi Masjid PP DMI • Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN • Ketua Komite Pemuda PP MES • Ketua Dewan Pembina ISYEF • Wakil Sekjen DPP HIPMI
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi
Masduki Baidlowi	Anggota	Komisaris	• Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi • Ketua Harian MUI Bidang Pusat • Ketua Yayasan MMD Initiative (Justice & Democracy)
Sylvia Aziz	Anggota	Human Capital Strategy & Policy Group Head	-

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat, dengan agenda seperti diuraikan di bawah ini:

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	23 Februari 2023	*Management Talent Pool*	**Komite Remunerasi dan Nominasi** **Ketua**: Komaruddin Hidayat **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Mohamad Nasir 4. Masduki Baidlowi 5. Sylvia Aziz
2	24 Maret 2023	Usulan Tantiem	**Komite Remunerasi dan Nominasi** **Ketua**: Komaruddin Hidayat **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Mohamad Nasir 4. Masduki Baidlowi 5. Sylvia Aziz

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
3	25 Mei 2023	Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan	**Komite Remunerasi dan Nominasi** **Ketua**: Komaruddin Hidayat **Anggota:** 1. Mulaiam D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Mohamad Nasir 5. Masduki Baidlowi 6. Sylvia Aziz

Frekuensi dan Tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	3	3	100
Muliaman D. Hadad	Anggota	1	1	100
Adiwarman A. Karim	Anggota	3	3	100
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	3	3	100
Mohamad Nasir	Anggota	3	3	100
Masduki Baidlowi	Anggota	3	3	100
Sylvia Aziz	Anggota	3	3	100

Kebijakan Suksesi Direksi

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang akan menjadi bagian dari kebijakan GCG dari Bank serta akan menjadi pedoman Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Prinsip Dasar

1. **Persyaratan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.**
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Pencalonan dan Pengajuan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah.**
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Prosedur Seleksi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
2. Dewan Komisaris atas dasar saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan usulan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah kepada RUPS.
3. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris atau bila ada kekosongan jabatan.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi

Kebijakan Bank terkait dengan pengembangan kompetensi SDM, terutama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Karena itu, Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan melalui tabel di bawah ini.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1.	Sylvia Aziz	CASCADING CULTURE ROADMAP - SOCIALIZATION BSI ONE CULTURE	19 Maret 2021	Jakarta	ACT Consulting
		Training Right Issue Untuk Mendukung Rencana Corporate Action Capital Strategy BSI	5 Juni 2021	Jakarta	Internal Bank
		Top Executive Learning Program Series 3	1 Juli 2021	Jakarta	Internal Bank
		Esprit de Corps	14 Agustus 2021	Jakarta	Internal Bank
		Webinar Market Update Vol.2 Indonesia Market Outlook: Banking and Customer Trend in The Second Wave Crisis	18 Agustus 2021	Jakarta	Internal Bank
		LEAD BY GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BATCH 2	6 September 2021	Jakarta	Internal Bank
		Bahasa Inggris N2 dan N3	4 Oktober 2021	Jakarta	Cakap
		CIA Monthly Series 6: Harmonis - Keserasian, Saling Peduli Dan Menghargai Perbedaan	8 Oktober 2021	Jakarta	Internal Bank
		Taujih Pekanan Ber-AKHLAK: Spesial PHBI Maulid Nabi Muhammad SAW 1443H.	22 Oktober 2021	Jakarta	Internal Bank
		Taujih Pekanan Ber-AKHLAK Spesial: CEO Virtual Townhall	29 Oktober 2021	Jakarta	Internal Bank
		Merger & Acquisition Untuk Mendukung Strategi Corporate Action BSI	17 November 2021	Jakarta	PPM Manajemen
		Taujih Pekanan Ber-AKHLAK : LOYAL - Bangga Menjadi Bagian dan memiliki BSI	19 November 2021	Jakarta	Internal Bank

Keterangan:
Pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi untuk anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Komisaris BSI, telah disampaikan pada bagian "Dewan Komisaris" di Bab Tata Kelola Perusahaan

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1.	Pelaksanaan tugas nominasi
2.	Pelaksanaan tugas remunerasi
3.	Pelaksanaan rapat Komite Remuenrasi dan Nominasi

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Pemantau Risiko melalui keputusan Direksi Nomor KEP:03/268-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 13 Juli 2023. Selain itu, pembentukannya juga mengacu pada sejumlah regulasi. Di antaranya adalah:

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab

1) Ketua Komite bertugas & bertanggung jawab dalam memimpin rapat Komite dan mengusulkan materi rapat.
2) Anggota Komite bertugas & bertanggung jawab dalam:
   a) Menyelenggarakan rapat secara teratur.
   b) Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
   c) Menghadiri rapat
   d) Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat.
3) Ketua dan Anggota Komite secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan dan operasional sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
   b) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu atau sedang dibahas.
   c) Memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dalam kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   d) Mempelajari kebijakan dan peraturan-peraturan internal yang terkait manajemen risiko yang dibuat Direksi.
   e) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang baru dan segala dampak karena adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   f) Melakukan pembahasan laporan triwulanan profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   g) Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.
   h) Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi dalam rangka mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi bidang usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   i) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi yang sedang dijalankan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   j) *Monitoring* adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.

Wewenang

1) Ketua dan Anggota Komite dapat menghadiri Rapat *Risk Management Committee* sebagai undangan.
2) Ketua dan Anggota Komite dapat meminta laporan-laporan internal yang berkaitan dengan pengendalian risiko di bidang pengelolaan '*asset & liability*', pembiayaan, *treasury* dan operasional, antara lain menyangkut:
   a) *Exposure* risiko.
   b) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit-limit.
   c) Realisasi pelaksanaan pengendalian risiko dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
   d) Laporan berkala profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
3) Bekerja sama dengan Komite Audit secara umum dan secara khusus untuk meminta Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang *exposure* risikonya memburuk.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Perseroan telah memiliki piagam yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 01/002-SKB/Dirkom tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur sejumlah hal yang meliputi:
1. Latar Belakang
2. Pemantau Risiko
3. Definisi, Visi dan Misi, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Struktur Keanggotaan
5. Kerahasiaan
6. Imbal Jasa Anggota Komite
7. Rapat Komite
8. Perubahan
9. Penutup

Komposisi dan Masa Jabatan

Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/268-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 13 Juli 2023. Komposisinya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Rangkap Jabatan
M. Arief Rosyid Hasan*)	Ketua merangkap anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Muliaman D. Hadad**)	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Mohamad Nasir	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Suyanto	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Sutanto	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Imam Budi Sarjito	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Abu Rokhmad**)	Anggota	2023-Selesai	Komisaris
Saifuddin Latief	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen
Bowo Setiyono	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen

*) Efektif menjabat per 21 September 2023
**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Profil Komite Pemantau Risiko

M. Arief Rosyid Hasan
Ketua merangkap anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Muliaman D. Hadad
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman A. Karim
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Komaruddin Hidayat
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Mohamad Nasir
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Suyanto
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Sutanto
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Imam Budi Sarjito
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Abu Rokhmad
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Saifuddin Latief
Anggota

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Bekasi, Jawa Barat
Usia : 65 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Kudus, 17 Maret 1958
Dasar Penunjukan	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/268-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 13 Juli 2023.
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen dari STIE – IPWI, Jakarta (1997) • Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (1981)
Riwayat Pekerjaan	• Komisaris PT Estika Yasakelola (2015 – 2021) • Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Syariah Mandiri (2019 - 2020) • Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), (2015-2019) • Konsultan PT Primakelola Agrobisnis Agroindustri, Bogor (2014) • Department Head of Wholesale & Treasury Banking School, Learning Center Group, Directorate Compliance & Human Capital, PT Bank Mandiri (Persero), (2009-2014)
Rangkap Jabatan	• Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) • Yayasan Kesejahteraan Bumi Daya
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Bowo Setiyono
Anggota

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Yogyakarta
Usia : 48 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Purworejo, 5 November 1975
Dasar Penunjukan	KEP:03/268-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 13 Juli 2023.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Perbankan/Ekonomi dari Université de Limoges, Perancis (2015) • Magister Keuangan dari University of New South Wales (2004) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1999)
Riwayat Pekerjaan	• Komite Pemantau Risiko PT BRI Syariah Tbk (2020-2021) • Deputi Direktur MBA FEB UGM Kampus Jakarta (2016-2024) • Dosen Tetap FEB UGM, kelas *Financial Management*, *Portfolio Management*, *Risk Management*, *Bank/Financial Institution Management*, *Financial Planning*, *Credit/Loans Management* (2005-sekarang)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
M. Arief Rosyid Hasan*)	Ketua merangkap anggota	• Magister bidang Kebijakan Kesehatan • Kedokteran Gigi	Bidang pemerintahan dan perbankan.
Muliaman D. Hadad**)	Anggota	• Doctor of Philosophy • Master of Public Administration • Sarjana Ekonomi	Bidang pengawasan bank umum, regulasi sektor keuangan, birokrasi pemerintahan, serta manajemen dan ekonomi.
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Master of Arts in Economics and • Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Doktor Filsafat • Magister Filsafat • Sarjana Usuludin	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Mohamad Nasir	Anggota	• Doktor Akuntansi • Magister Akuntansi • Sarjana Akuntansi	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
Suyanto	Anggota	• Doktor Ekonomi-Manajemen Strategi • Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta • Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangungan	Bidang Intelijen
Sutanto	Anggota	Sarjana Administrasi	Bidang audit perbankan.
Imam Budi Sarjito	Anggota	• Doktor Ekonomi • Master Ekonomi • Sarjana Ekonomi	Bidang pengawasan perbankan syariah dan kepatuhan perbankan
Abu Rokhmad**)	Anggota	• Doktor Ilmu Hukum • Magister Agama • Sarjana Hukum Perdata Islam	Bidang Ilmu Hukum
Saifuddin Latief	Anggota	• Magister Manajemen • Sarjana Kehutanan	Bidang perbankan dan birokrasi
Bowo Setiyono	Anggota	• Doktor Ekonomi • Magister Keuangan • Sarjana Ekonomi	Bidang ekonomi dan pendidikan

*) Efektif menjabat per 21 September 2023
**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Sertifikasi Profesi

No	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1	Certified Risk Professional (CRP)	1
2	Certified Financial Planner (CFP)	1
3	Sertifikasi Manajemen Risiko 1, 2, dan 3	2

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	M. Arief Rosyid Hasan	Muliaman D. Hadad	Adiwarman A. Karim	Komaruddin Hidayat	Mohamad Nasir	Suyanto	Sutanto	Imam Budi Sarjito	Abu Rokhmad	Saifuddin Latief	Bowo Setiyono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Rangkap Jabatan Anggota Komite

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	
		Bank Syariah Indonesia	Perusahaan/Lembaga Lain
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	• Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah • Ketua Komite Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah • Wakil Sekretaris Jenderal BPP HIPMI
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Astra Internasional Tbk
Adiwarman A. Karim	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-
Komaruddin Hidayat	Anggota	Komisaris Independen	Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi
Suyanto	Anggota	Komisaris	Staf Khusus Kepala BIN
Sutanto	Anggota	Komisaris	-
Imam Budi Sarjito	Anggota	Komisaris	-
Abu Rokhmad	Anggota	Komisaris	Staf Ahli Bidang Hukum & HAM Kemeterian Agama Republik Indonesia
Saifuddin Latief	Anggota	-	-
Bowo Setiyono	Anggota	-	-

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat. Rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	12 Januari 2023	Laporan Progres Pemenuhan dan Pengembangan SDM Triwulan IV/2022 dan Progres Penerapan *One Culture*	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. Mohamad Nasir 4. Suyanto 5. Sutanto 6. Imam Budi Sarjito 7. Abu Rokhmad 8. Saifuddin Latief
2	9 Februari 2023	Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. Mohamad Nasir 4. Suyanto 5. Sutanto 6. Imam Budi Sarjito 7. Abu Rokhmad 8. Saifuddin Latief 9. Bowo Setiyono
3	9 Maret 2023	Laporan APU-PPT dan Progres MER (*Mutual Evaluation Review*) Tw IV/2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. Mohamad Nasir 4. Suyanto 5. Sutanto 6. Imam Budi Sarjito 7. Abu Rokhmad 8. Saifuddin Latief 9. Bowo Setiyono
4	9 Maret 2023	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan SymFK (Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan) Tw IV/2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. Mohamad Nasir 4. Suyanto 5. Sutanto 6. Imam Budi Sarjito 7. Abu Rokhmad 8. Saifuddin Latief Bowo Setiyono
5	17 Mei 2023	Rencana Penerbitan Sukuk tanpa Penawaran Umum dalam Rangka Kerjasama BSI dengan BP Tapera	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan **Anggota:** 1. Adiwarman A. Karim 2. Mohamad Nasir 3. Suyanto 4. Sutanto 5. Imam Budi Sarjito 6. Abu Rokhmad 7. Saifuddin Latief 8. Bowo Setiyono

ORGAN DAN KOMITE
DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
6	20 Juli 2023	Laporan Kepatuhan Dymk Semester I tahun 2023	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan **Anggota**: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Saifuddin Latief 9. Bowo Setiyono
7	20 Juli 2023	Laporan Realisasi APU-PPT Semester I Tahun 2023	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan **Anggota**: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Saifuddin Latief 9. Bowo Setiyono
8	27 Juli 2023	Tingkat Kesehatan Bank BSI Semester I tahun 2023	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan **Anggota**: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Abu Rokhmad 9. Saifuddin Latief 10. Bowo Setiyono

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
9	3 Agustus 2023	Rencana Penerbitan Sukuk Subordinasi	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan **Anggota**: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Abu Rokhmad 9. Saifuddin Latief 10. Bowo Setiyono
10	14 September 2023	Evaluasi Kinerja, Model Bisnis, dan Strategi Peningkatan FBI - FBI Wholesale Value Chain, Sindikasi, CMS, Trade Finance - FBI Retail : BSI Smart Agent - Consumer : Gadai emas	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan **Anggota**: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Suyanto 5. Sutanto 6. Imam Budi Sarjito 7. Abu Rokhmad 8. Saifuddin Latief 9. Bowo Setiyono
11	19 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja Marketing Communication Tahun 2023 dengan memperhitungkan *Return on Marketing Investment* (RoMI)	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan **Anggota**: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Abu Rokhmad 9. Saifuddin Latief 10. Bowo Setiyono
12	14 Desember 2023	Pengelolaan Likuiditas, Upaya Peningkatan Fee Based Treasury dan Usulan Persetujuan Penerbitan Sustainability Sukuk BSI	**Komite Pemantau Risiko** **Anggota** : 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Abu Rokhmad 9. Saifuddin Latief 10. Bowo Setiyono

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua merangkap anggota	11	11	100
Muliaman D. Hadad	Anggota	7	7	100
Adiwarman A. Karim	Anggota	12	12	100
Komaruddin Hidayat	Anggota	12	11	92
Mohamad Nasir	Anggota	12	11	100
Suyanto	Anggota	12	12	100
Sutanto	Anggota	12	11	92
Imam Budi Sarjito	Anggota	12	12	100
Abu Rokhmad	Anggota	7	5	71
Saifuddin Latief	Anggota	12	12	100
Bowo Setiyono	Anggota	12	11	92

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi

Kebijakan Bank terkait dengan pengembangan kompetensi SDM, terutama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Karena itu, Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Pemantau Risiko untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan melalui tabel di bawah ini.

No.	Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1.	Bowo Setiyono	*Kick Off Meeting* Profesi Manajemen Risiko "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan	3 Maret 2023	Virtual Zoom	IRMAPA
		Anti Money Laundry in the Digital Era: Lesson Learned from Selected Countries	06 April 2023	Virtual Zoom	OJK Institute
		Penerapan *Cloud Computing* di Industri Jasa Keuangan	8 Juni 2023	Virtual Zoom	OJK Institute
		Riskhub International Webinar "The Future of Risk Culture: Navigating the Unknown	14 Juni 2023	Virtual Zoom	IRMAPA
		ICA Indonesia Financial Crime Compliance Conference 2023	25 Juli 2023	Jakarta	International Compliance Association (ICA)
		Peluang Perdagangan Korban dalam Upaya Dekarbonasi	27 Juli 2023	Virtual Zoom	OJK Institute
		Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	10 Agustus 2023	Virtual Zoom	OJK Institute
		Leadership in Changing Atmosphere	24 Agustus 2023	Virtual Zoom	OJK Institute

No.	Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Sharing Session terkait "Pasar Modal" Narasumber : Ibu Etty Retno Wulandari, CA, MBA,Ph.D (Deputy Komisioner Manajemen Strategis (2013-2022)	18 September 2023	The Tower Lt. 6	BSU
		Pembekalan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 3	15-16 Oktober 2023 Pelatihan 22 Oktober 2023 Ujian	Virtual Zoom	Muamalat Institute
		Economic and Capital Market Outlook 2023 "Tantangan dan Kesiapan Industri - Investasi Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global 2023"	10 Oktober 2023	SCBD	CSA Community, LSP-PM, AAEI
		The United States Class 2023: International Risk Management Program for Executive	28 Oktober - 5 November 2023	New York	MBA FEB UGB X Indonesian Bankers Association (IBI)
		Recognition Current Competency Event - Implementasi Permen BUMN No.2 Tahun 2023 - Peluang dan Tantangan Ekonomi dan Bisnis Indonesia di Tahun 2024	5-6 Desember 2023	Jakarta	TAP KAPITAL Indonesia
2.	Saifuddin Latief	Pelatihan Implementasi APU-PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2024	The Tower Lt. 6	BSU
		Sharing Session terkait "Pasar Modal" Narasumber : Ibu Etty Retno Wulandari, CA, MBA,Ph.D (Deputy Komisioner Manajemen Strategis (2013-2022)	18 September 2023	The Tower Lt. 6	BSU

Keterangan:
Pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi untuk anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris BSI, telah disampaikan pada bagian "Dewan Komisaris" di Bab Tata Kelola Perusahaan

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1.	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
2.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Organ dan Komite di Bawah Direksi

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan pemegang saham, regulator serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Peran tersebut terutama bertujuan menciptakan komunikasi yang baik, serta menjaga persepsi terhadap citra BSI.

Karena itu, Bank telah membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang merupakan mandat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Mengacu pada regulasi tersebut, fungsi utamanya antara lain memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal serta menjadi penghubung Bank dengan pemangku kepentingan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Gunawan Arief Hartoyo
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang
Usia : 53 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Sukoharjo, 26 Maret 1971
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi Nomor 01/185-KEP/DIR tanggal 31 Agustus 2021.
Riwayat Pendidikan	• Magister Management dari Universitas Gadjah Mada (2018) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga (1995)
Riwayat Pekerjaan	• Group Head Corporate Secretary & Communication PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang) • Project Leader Roll Out Branch PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021) • Region Head RO VI/Jakarta 1 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021) • Region Head RO V/Jawa 2 PT Bank Syariah Mandiri (2018-2021) • Group Head Distribution Strategy PT Bank Syariah Mandiri (2016-2018)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan, sejalan dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung.

Struktur Organisasi

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur *Compliance & Human Capital*. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, organisasi Sekretaris Perusahaan terbagi ke dalam 6 (enam) bidang aktivitas, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai perusahaan terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas *Stakeholder Management*.
5. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
6. Aktivitas Pengurus Bank.

Untuk menjalankan aktivitas tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki beberapa departemen di bawahnya. Sekretaris Perusahaan tetap melakukan koordinasi dan supervisi langsung terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen.

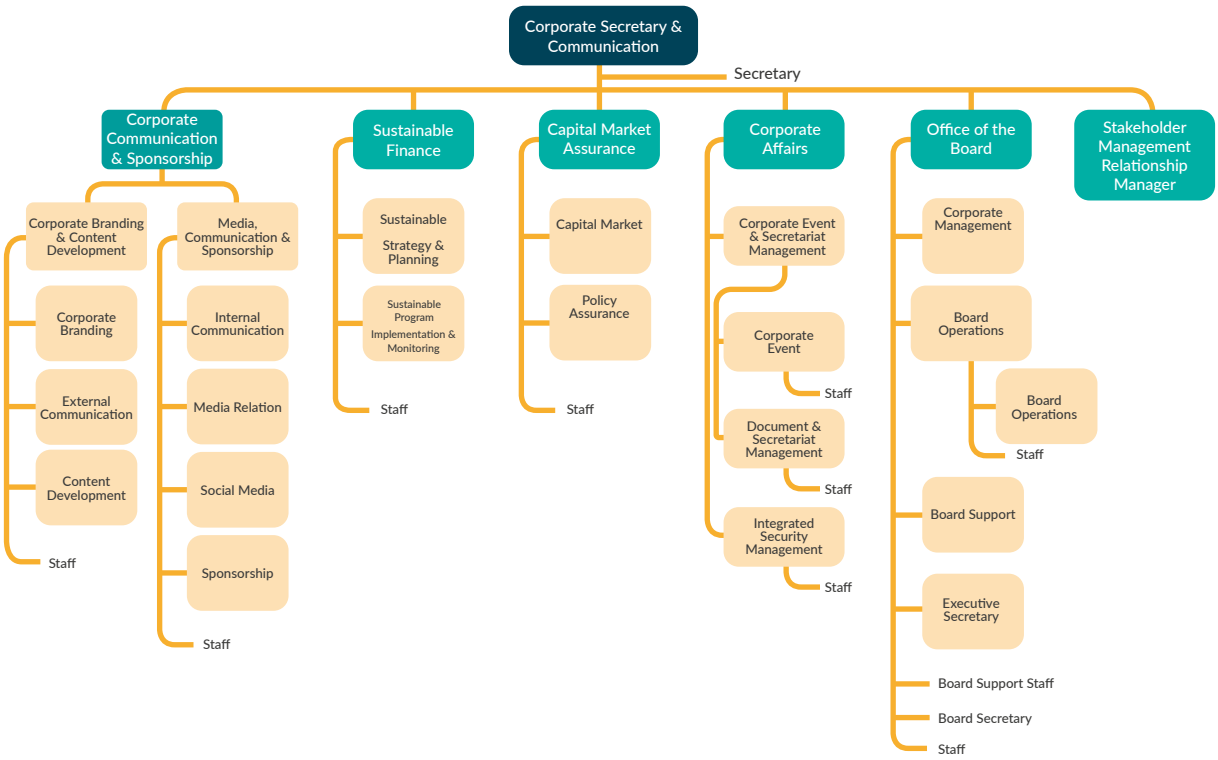

Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur *Corporate Secretary*. Tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Bank adalah:

Fungsi	Rincian Tugas
Tata Kelola Kepatuhan	1. Menjadi *host* penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Memastikan berjalannya fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan DPS serta jajaran yang mendukung di bawahnya. 3. Menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, serta peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 4. Menghadiri dan membuat risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris. 5. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk menjalankan ketentuan/undang-undang yang berlaku, antara lain tentang Perseroan, surat berharga syariah, saham perbankan syariah, pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya. 6. Mengarahkan pemuatan publikasi transparansi sesuai ketentuan regulasi perbankan dan pasar modal. a. Menyampaikan laporan-laporan kepada regulator maupun publik baik berupa laporan berkala maupun insidentil. b. Mengawal korespondensi Bank dengan cara memberikan *advice* kebahasaan/reviu terhadap dokumen korporat Bank. c. Mengelola dokumen, khususnya dokumen korporat termasuk pengelolaan pusat arsip. d. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dokumen kantor pusat, *regional office*, *area/branch office* ataupun *outlet* lainnya serta memberikan *advice* terkait pengelolaan dokumen dimaksud.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Fungsi	Rincian Tugas
Tata Kelola Komunikasi Korporat	1. Menetapkan strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan reputasi positif Bank. 2. Membuat strategi penyebaran informasi kepada *stakeholders* internal dan eksternal. Termasuk menyampaikan program dan kegiatan Bank serta mengelola manajemen isu dan krisis melalui pemberitaan. 3. Menjadi penghubung antara Bank dan pihak eksternal yang mewakili masyarakat. 4. Mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan syariah ataupun isu-isu industri syariah secara umum. 5. Mengarahkan penyusunan alat dan komunikasi media *marketing* yang efektif dan tepat sasaran. 6. Mengelola *stakeholders* dan menyelenggarakan beberapa aktivitas yang bertujuan untuk keterbukaan informasi, seperti paparan publik. 7. Menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh pemahaman publik tentang perusahaan agar tercipta citra dan reputasi positif. 8. Melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi perbankan syariah kepada masyarakat.
Corporate Branding dan Sustainable Finance	1. Menjaga dan meningkatkan citra melalui konsistensi dan standardisasi dalam implementasi *Corporate Identity* Bank. 2. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan RAKB serta Laporan Keberlanjutan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh regulator untuk membangun, memelihara dan mengembangkan citra perusahaan. 3. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh organisasi di Bank. 4. Menyusun *monitoring* dan reviu pelaksanaan program keuangan berkelanjutan untuk dilaporkan secara berkala kepada Direksi. 5. Mempublikasikan kegiatan atau aksi keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan awareness dan citra positif Bank dalam berbagai saluran komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, video, dll. 6. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan CSR agar tetap sejalan dengan program *Corporate Planning* Bank sebagai bentuk tanggung jawab sosial. 7. Melaksanakan program RAKB terkait bisnis. 8. Mengelola proses dan kinerja *corporate branding* dan RAKB yang efektif dalam memberikan kontribusi optimal terhadap persepsi positif *stakeholders* dan *shareholders* untuk peningkatan *brand equity*, serta berkontribusi terhadap peningkatan *awareness* dan bisnis Bank.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Sepanjang tahun buku 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugas, yang rinciannya berikut ini:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Menyelenggarakan dan menghadiri serta membuat risalah rapat Direksi termasuk rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyiapkan informasi daftar pemegang saham, daftar khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Menjalankan fungsi kepatuhan Bank terhadap pasar modal.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dokumentasi data legalitas Bank, antara lain akta RUPS, akta Perubahan Anggaran Dasar, akta Perubahan Susunan Pengurus, tanda domisili perusahaan, dan dokumen legalitas lainnya.
7. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada BSI atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindak lanjuti.
8. Menyelenggarakan *corporate event* dan/atau berpartisipasi dalam *event* yang dilaksanakan pihak ketiga dalam bentuk *sponsorship*.
9. Menyelenggarakan *event* dengan media.
10. Menerbitkan siaran pers.
11. Menggelar kegiatan edukasi, literasi dan inklusi keuangan syariah.
12. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2020 sesuai POJK No. 51 Tahun 2017 yang telah diserahkan kepada OJK. *Sustainable finance* terkait bisnis, yang mencakup: *product and services*, *governance*, dan *capacity building*. Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program pemerintah).

Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2023, pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Lokasi Penyelenggaraan	Penyelenggara
Gunawan Arief Hartoyo	Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023	08/03/2023	08/03/2023	*Online*	BSI Corporate University
	Pelatihan Implementasi APU PPT Senior Management	06/04/2023	06/04/2023	Jakarta	BSI Corporate University
	Sharing Session Investasi Syariah Most	17/07/2023	17/07/2023	Jakarta	Bank Mandiri
	Sharing Session Project Lunar	17/07/2023	17/07/2023	Jakarta	BSI Corporate University
	Senior Management Development Program	19/09/2022	31/08/2023	Jakarta & Singapura	IMD Business School
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	21/08/2023	21/08/2023	*Online*	Maisa Edukasi
	TELP - Series 2 Tahun 2023	24/08/2023	24/08/2023	*Online*	Amazon Web Services
	Top Executive Learning Program - Series 3	19/09/2023	19/09/2023	Jakarta	Kelley Bloomington
	Presentation to CEO (SMDP) – Kel 1,3,4,5	11/12/2023	11/12/2023	Jakarta	BSI Corporate University
	BSI Communication Day 2023	06/11/2023	06/11/2023	Jakarta	BSI Corporate University
	Personal Branding & Grooming Dir Compliance BSI	10/11/2023	10/11/2023	Jakarta	BSI Corporate University
	Webinar IT *Security Awareness*: Pengamanan *Endpoint*	23/06/2023	23/06/2023	*Online*	BSI Corporate University
	GD CSG - *Personal Branding & Communication Skill*	29/12/2023	30/12/2023	Bogor	Talkinc
	Culture Summit dan *Culture Festival* 2023	14/08/2023	31/08/2023	Jakarta	BSI Corporate University
	Assessment Talent DNA untuk Para *Leaders*	27/11/2023	31/12/2023	Jakarta	BSI Corporate University

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi pengelolaan risiko yang meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Strategi tersebut harus sejalan dengan visi, misi, strategi, *risk appetite* Bank, dan *contigency plan* Komite ini serta memutakhirkan dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil akibat perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Anggota komite adalah Direksi, SEVP, dan Kepala Unit Kerja terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi *stress* dalam pengukuran risiko dan *contigency plan*.
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang
4. Melakukan pembahasan strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk memastikan integrasinya dengan perusahaan induk.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan).
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Finance & Strategy Director
Sekretaris 1	Group Head Operational, Portfolio & Market Risk
Sekretaris 2	Group Head Commercial Risk

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. Risk Management Director 1. Finance & Strategy Director 2. WholesaleTransaction Banking Director 3. Retail Banking Director 4. Sales & Distribution Director 5. Information Technology Director 6. Treasury & International Banking Director 7. Consumer Banking SEVP 8. Operations SEVP 10. Financing Risk SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Pejabat Compliance Group
Non Permanent Voting Member	Director/SEVP Pemateri Director/SEVP terkait materi
Contributing Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri dan Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

Risk Management Director

Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director

Wakil Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Wholesale Transaction Banking Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Information Technology Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Treasury & International Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Consumer Banking SEVP
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Operations SEVP
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Financing Risk SEVP
Group Head Operational, Portfolio & Market Risk
Sekretaris 1
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Commercial Risk
Sekretaris 2
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite
Sepanjang tahun 2023 Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 11 kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Risk Management Director	Ketua	11	11	100
Finance & Strategy Director	Wakil Ketua	11	5	45
WholesaleTransaction Banking Director	*Permanent Voting Member*	11	11	100
Retail Banking Director	*Permanent Voting Member*	11	11	100
Sales & Distribution Director	*Permanent Voting Member*	11	10	91
Information Technology Director	*Permanent Voting Member*	11	8	73
Treasury & International Banking Director	*Permanent Voting Member*	11	11	100
Consumer Banking SEVP	*Permanent Voting Member*	11	6	54
Financing Risk SEVP	*Permanent Voting Member*	11	11	100

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku
Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya antara lain memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh profil risiko.

Sertifikasi Profesi
Keanggotaan Komite Manajemen Risiko tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

IT STEERING COMMITTEE

IT Streering Committee dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan rencana strategis di bidang teknologi informasi atau *information technology* (IT), penganggaran IT, penetapan proyek strategis IT dan pengamanan IT. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite ini mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab

IT Steering Committee adalah komite yang beranggotakan Direksi/SEVP bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Menetapkan rencana strategis IT (IT *Strategic Plan*) yang searah dan sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola sumber daya IT.
3. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
4. Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
5. Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT sesuai dengan rencana strategis IT, anggaran IT dan delivery project IT.
6. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi.
7. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT dan arahan investasi bidang IT.
9. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional di bidang IT.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Information Technology Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Ketua Working Group komite
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Information Technology Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management 6. Digital Banking SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director

Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Vice Pesident Director

Wakil Ketua Komite merangkap *Permanet Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Information Technology Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahun ini.

Risk Management Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahun ini.

Digital Banking SEVP
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite
Sepanjang tahun 2023 IT Steering Committee telah melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
President Director	Ketua	5	5	100
Vice President Director	Wakil Ketua	5	5	100
Information Technology Director	Wakil Ketua	5	5	100
Group Head IT Strategic Planning	Sekretaris 1	5	5	100
Group Head IT Development	Sekretaris 2	5	2	40
President Director	*Permanent Voting Member*	5	5	100
Vice President Director	*Permanent Voting Member*	5	5	100
Information Technology Director	*Permanent Voting Member*	5	5	100
Finance & Strategy Director	*Permanent Voting Member*	5	4	80
Risk Management Director	*Permanent Voting Member*	5	4	80
Digital Banking SEVP	*Permanent Voting Member*	5	3	60
Compliance & Human Capital Director	*Permanent Non Voting Member*	5	4	80
Compliance Group	*Permanent Non Voting Member*	5	1	20

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku
Selama tahun 2023, IT Steering Committee telah melaksanakan tugasnya antara lain telah mengusulkan strategi IT strategic plan, perencanaan, dan pengembangan IT serta menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis.

Sertifikasi Profesi
Keanggotaan IT Steering Committee tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

KOMITE *POLICY & PROCEDURE*
Komite Policy & Procedure beranggotakan Direksi/SEVP. Komite ini berwenang merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur, termasuk ketentuan produk dan/atau ketentuan lain yang tidak menjadi ruang lingkup komite di bawah Direksi lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab Komite Policy & Procedure adalah:
1. Membahas dan merekomendasikan penyesuaian/penyempurnaan kebijakan.
2. Menetapkan pemutakhiran prosedur Perseroan di luar kebijakan dan standar prosedur *human capital* dan kebijakan manajemen risiko, dan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Komite lain di bawah Direksi.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Compliance & Human Capital Director
Sekretaris 1	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris 2	Group Head Operational, Portfolio & Market Risk

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Information Technology Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management 6. Digital Banking SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

Risk Management Director

Ketua Komite merangkap *Permanet Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Compliance & Human Capital Director

Ketua Komite merangkap *Permanet Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Policy & Procedure

Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Operational, Portfolio & Market Risk

Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite

Selama tahun 2023, penetapan ketentuan Bank dilakukan secara sirkuler, dengan jumlah 192 ketentuan, yang terdiri dari Kebijakan 9 ketentuan, Manual Produk (MP) 55 ketentuan, Memorandum Prosedur Operasional (MPO) 18 ketentuan, Standar Prosedur (SP) 110 ketentuan.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur, termasuk ketentuan produk dan/atau ketentuan lain yang tidak menjadi ruang lingkup Komite di bawah Direksi lainnya.

Berdasarkan Standar Prosedur Pengendalian (SPP) Pembuatan Kebijakan dan Prosedur, bahwa penetapan ketentuan oleh Komite Policy & Procedure dapat dilaksanakan melalui Forum Rapat atau secara sirkuler melalui Nota Persetujuan.

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Policy & Procedure tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

KOMITE BISNIS

Komite Bisnis dibentuk untuk membantu Direksi/SEVP dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan bisnis Bank secara terintegrasi, menetapkan produk dan jasa/aktivitas andalan serta strategi dan efektivitas *marketing communication*.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Bisnis bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis Bank.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi, termasuk pengembangan produk, tarif, prosedur terkait, limit *eksposure* risiko, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis. Mekanisme pembuatan kebijakan dan prosedur terkait produk Bank mengacu pada ketentuan internal Bank.

3. Membahas dan menetapkan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank RPPB berupa RPPB Tahunan dan RPPB perubahan untuk diajukan izin kepada Regulator, serta penghentian produk Bank untuk dilaporkan Regulator.
4. Membahas dan menetapkan strategi bisnis yang menjadi fokus Perseroan, antara lain melalui *anchor client* Perseroan.
5. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja inisiatif strategi bisnis/proyek.
6. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar Unit Kerja Perseroan dan aliansi dengan perusahaan induk serta *sister company*.
7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.
8. Mengkomunikasikan dan memastikan seluruh ketetapan/keputusan Komite dilaksanakan sesuai keputusan kepada seluruh jajaran internal Perseroan yang terkait.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Vice President Director
Sekretaris 1	Group Head Corporate Finance & SolutionFungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group komite.
Sekretaris 2	Group Head Distribution Strategy

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Wholesale Transaction Banking Director/Wholesale Structure & Solution SEVP 4. Retail Banking Director 5. Sales & Distribution Director/Consumer Product Solution SEVP 6. Risk Management Director/Financing Risk SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director
Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director
Wakil Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Wholesale Transaction Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Consumer Banking SEVP
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Financing Risk SEVP
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Corporate Finance & Solution
Sekretaris 1
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Group Head Consumer Business 1

Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2023 Komite Bisnis telah melakukan rapat sebanyak 2 kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
President Director	Ketua	2	2	100
Vice President Director	Wakil Ketua	2	2	100
Group Head Corporate Finance & Solution	Sekretaris 1	2	2	100
Vice President Director	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Wholesale Transaction Banking Director	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Retail Banking Director	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Sales & Distribution Director	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Risk Management Director	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Financing Risk SEVP	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Compliance & Human Capital Director	*Permanent Non Voting Member*	2	2	100

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2023, Komite Bisnis telah melaksanakan tugasnya antara lain ada 7 komite bisnis selama tahun 2023. Dengan komposisi 2 kali dilakukan secara *meeting*, dan 5 kali dilakukan secara sirkuler.

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Bisnis tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan dan Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan visi, misi dan strategi Bank, serta penanganan kasus kepegawaian.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite SDM bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Menyusun strategi dan kebijakan *human capital* termasuk budaya perusahaan, kompensasi dan *benefit*.
2. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran.
3. Membahas/merekomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan sistem operasional pengelolaan *human capital*.
4. Menetapkan arahan strategis dan kebijakan sistem operasional pengelolaan *human capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
5. Menetapkan arah strategis pengembangan sistem informasi *human capital*.
6. Menetapkan dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan bisnis Bank.
7. Menetapkan *individual performance management* & *rewards, talent & succession management* serta *employee relations*.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *human capital* yang bersifat strategis.

STRUKTUR KEANGGOTAAN

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Compliance & Human Capital Director
Sekretaris 1	Group Head Human Capital Strategy & Policy
Sekretaris 2	Group Head Human Capital Business Partner 1 dan 2

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Compliance & Human Capital Director 4. Finance & Strategy Director 5. Sales & Distribution Director 6. Risk Management Director 7. Human Capital SEVP
Non Permanent Voting Member	Director/SEVP Pemateri Director/SEVP terkait materi
Contributing Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director
Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Compliance & Human Capital Director
Wakil Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Human Capital SEVP
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Human Capital Strategy & Policy
Sekretaris 1
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Human Capital Business Partner
Sekretaris 2
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite
Sepanjang tahun 2023 Komite Sumber Daya Manusia telah melakukan rapat sebanyak 3 kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
President Director	Ketua	3	3	100
Vice President Director	Wakil Ketua	3	3	100
Compliance & Human Capital Director	Wakil Ketua	3	3	100
Group Head Human Capital Strategy & Policy	Sekretaris 1	3	3	100
Group Head Human Capital Business Partner 1 dan 2	Sekretaris 2	3	3	100
President Director	*Permanent Voting Member*	3	3	100
Vice President Director	*Permanent Voting Member*	3	3	100
Compliance & Human Capital Director	*Permanent Voting Member*	3	3	100
Finance & Strategy Director	*Permanent Voting Member*	3	3	100
Sales & Distribution Director	*Permanent Voting Member*	3	3	100
Risk Management Director	*Permanent Voting Member*	3	3	100
Human Capital SEVP	*Permanent Voting Member*	3	3	100

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2023, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugasnya, antara lain:

1. Menetapkan kebijakan *compensation* benefit tahun 2023 yaitu:
   a. Pembaruan skala upah
   b. Pelaksanaan *Annual Salary Increment*
2. Menetapkan *individual performance management & rewards* tahun 2023 yaitu:
   a. Distribusi normal penilaian kinerja pegawai
   b. Penilaian kinerja pegawai *Senior Manager*
   c. Pemberian apresiasi (bonus) atas kinerja tahun 2023
   d. Pemberian *Long Term Incentive Reward* bagi pegawai yang memiliki kinerja dan potensi terbaik (*High Potential*)
3. Menetapkan *talent & succession management* yaitu:
   a. Kebijakan *Promotion Cycle* dan implementasinya
   b. Penilaian *Talent Classification* pegawai *Senior Manager*
   c. Penetapan dan Penugasan Pegawai *Senior Manager*

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Komite Aset dan Liabilitas atau *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Asset & Liabilities Commitee bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
2. Mengevaluasi posisi *assets* & *liabilities* Bank sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Melakukan evaluasi posisi Bank dan strategi *Assets & Liabilities* Management guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
4. Melakukan kaji ulang pricing aktiva dan pasiva untuk memastikan pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALM Bank.

5. Melakukan kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
6. Melakukan batasan *liquidity management*, *gap management*, *pricing management*, FX *management*.
7. Menetapkan metodologi *fund transfer pricing*.
8. Melakukan pembahasan bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Bank.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Vice President Director Treasury & International Banking Director
Sekretaris 1	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Ketua Working Group komite

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Treasury & International Banking Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management Director/Financing Risk SEVP 6. Wholesale Transaction Banking Director 7. Retail Banking Director 8. Sales & Distribution Director/Consumer Banking SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director
Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director
Wakil Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Treasury & International Banking Director
Wakil Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Wholesale Transaction Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Consumer Banking SEVP
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Asset & Liabilities Management
Sekretaris 1
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Strategic Planning & Performance Management
Sekretaris 2
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2023 Komite Aset dan Liabilitas telah melakukan rapat sebanyak 8 kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
President Director	Ketua	8	8	100
Vice President Director	Wakil Ketua	8	6	75
Treasury & International Banking Director	Wakil Ketua	8	6	75
Group Head Treasury & Global Market	Sekretaris 1	8	8	100
Group Head Strategic Planning & Performance Management	Sekretaris 2	8	6	75
President Director	*Permanent Voting Member*	8	8	100
Vice President Director	*Permanent Voting Member*	8	6	75
Finance & Strategy Director	*Permanent Voting Member*	8	8	100
Treasury & International Banking Director	*Permanent Voting Member*	8	6	75
Risk Management Director	*Permanent Voting Member*	8	7	88
Financing Risk SEVP	*Permanent Voting Member*	8	4	50
Wholesale & Transaction Banking Director	*Permanent Voting Member*	8	6	75
Retail Banking Director	*Permanent Voting Member*	8	8	100
Sales & Distribution Director	*Permanent Voting Member*	8	7	88
Consumer Banking SEVP	*Permanent Voting Member*	8	7	88
Compliance & Human Capital Director	*Permanent Non Voting Member*	8	4	50

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2023, Komite Aset dan Liabilitas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melalui rapat ALCO. Rapat tersebut, antara lain menetapkan keputusan terkait: strategi *pricing* pendanaan untuk giro dan deposito dalam denominasi dolar Amerika Serikat, menerapkan strategi *pricing* pembiayaan untuk segmen Pawning, Consumer dan SME, mengarahkan strategi optimalisasi net imbalan melalui pengelolaan *cost of fund* dan peningkatan *yield* pembiayaan dan tresuri, penerapan strategi manajemen likuiditas, serta penerapan strategi pengelolaan risiko likuiditas.

Keputusan lainnya adalah: penetapan strategi akselerasi pertumbuhan dana pihak ketiga , penetapan porsi bagi hasil produk deposito Wakaf BSI, penetapan strategi *funding* non DPK, penetapan porsi bagi hasil deposito mobile BSI, serta menetapkan inisiatif strategi dalam upaya mencapai likuiditas yang stabil dan net imbalan yang optimal.

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

KOMITE STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Tugas dan tanggung jawab Komite *Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management*.

1. Menetapkan strategi pencegahan, penanganan, pemulihan, strategi komunikasi untuk penanganan dampak bencana termasuk pandemik COVID-19 di Bank.
2. Membahas dan menetapkan strategi operasional Bank selama periode bencana termasuk pandemik COVID-19, antara lain aktivasi BCM, penetapan unit kerja *critical*, mekanisme kerja unit kerja (WFH/WFO), jam kerja operasional, dan hal-hal lain diperlukan dalam kondisi darurat bencana termasuk pandemi COVID-19.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja dan aliansi dengan perusahaan induk dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Bank.
4. Membahas dan menetapkan benefit dan/atau tunjangan sementara bagi pegawai terkait dengan dampak bencana termasuk pandemi COVID-19.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang terkait pencegahan dan penanganan kondisi darurat bencana termasuk COVID-19.
6. Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi operasional yang telah disetujui *Steering Commiitee*.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang memerlukan penanganan *Crisis Management Team* (CMT).

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Vice President Director
Wakil Ketua	Information Technology Director
Sekretaris 1	Fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group komite.
Permanent Voting Member	1. Vice President Director 2. Information Technology Director 3. Sales & Distribution Director/ Consumer Banking SEVP 4. Compliance & Human Capital Director/ Human Capital SEVP 5. Risk Management Director/Financing Risk SEVP 6. Finance & Strategy Director 7. Digital Banking SEVP
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi

Profil Anggota Komite

Vice President Director

Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Information Technology Director

Wakil Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Operations Development

Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head IT Operations

Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Human Capital Strategy and Policy

Sekretaris 3

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

RAPAT KOMITE

Sepanjang tahun 2023 Komite Steering Committee Crisis Management - Business Continuity Management telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Vice President Director	Ketua	2	2	100
Information Technology Director	Wakil Ketua	2	2	100
Group Head Operations Development	Sekretaris 1	2	2	100
Group Head IT Operations	Sekretaris 2	-	-	-
Group Head Human Capital Strategy and Policy	Sekretaris 3	-	-	-
Vice President Director	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Information Technology Director	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Sales & Distribution Director	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Compliance & Human Capital Director	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Risk Management Director	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Finance & Strategy Director	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Consumer Banking SEVP	*Permanent Voting Member*	-	-	-
Human Capital SEVP	*Permanent Voting Member*	2	2	100
Financing Risk SEVP	*Permanent Voting Member*	-	-	-
Digital Banking SEVP	*Permanent Voting Member*	-	-	-

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2023, Komite Steering Committee Crisis Management - Business Continuity Management telah melaksanakan tugasnya, antara lain :

1. Steering Committee Alur Proses Eskalasi Penanganan Insiden IT dan Non IT
2. Steering Committee Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Kondisi BCM dan Struktur Organisasi Kondisi Crisis Management Team

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Steering Committee Crisis Management - Business Continuity Management tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

Internal Audit

Unit Kerja Internal Audit (IA) adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang melaksanakan Fungsi Internal Audit. Tanggung jawab utama SKAI, yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Hal itu dilakukan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Internal Audit dalam organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dipimpin oleh *Senior Executive Vice President* (SEVP) Internal Audit yang membawahi 4 (empat) grup dan 1 (satu) departemen dengan spesialisasi tugas pada:

1. Wholesale & Corporate Center Group
   a. Wholesale & Treasury Banking Audit
   b. Finance, Strategy & Procurement Audit
   c. Risk, Compliance & Human Capital Audit
2. Retail, Distribution & Digital Banking Audit
   a. Retail Banking Audit
   b. Distribution, Strategy & Funding Audit
   c. Digital Transaction Banking Audit
3. IT Audit
   a. IT Strategy, Development & Governance Audit
   b. IT Operation & Infrastructure Audit
   c. IT Security Audit
4. Audit Policy & Counterpart Group (APG)
   a. Audit Policy & Development
   b. Audit Counterpart
   c. MIS & Data Analytic
   d. Quality Assurance
5. Investigation Audit Department (IVA)

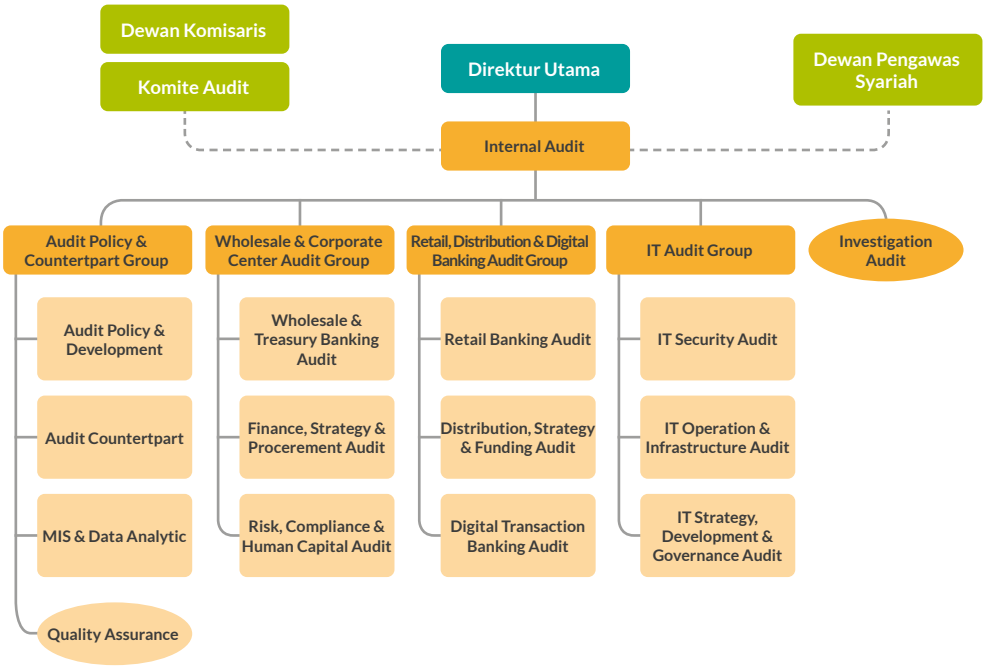

INTERNAL AUDIT

Komunikasi SKAI dengan SKAI Terintegrasi

1. SKAI PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkomunikasi dengan SKAI Terintegrasi secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
2. SKAI PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan SKAI Terintegrasi dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Terintegrasi.

Kedudukan Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Kedudukan SKAI dalam Struktur Organisasi Bank adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Induk.

Profil Kepala Internal Audit

Satria
Kepala Internal Audit

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 56 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Menggala, 25 September 1967
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor : 03/153-KEP/DIR tanggal 28 April 2023
Riwayat Pendidikan	• Magister Management, Universitas Bandar Lampung (2008) • Sarjana Ekonomi, Universitas Bandar Lampung (1990)
Riwayat Pekerjaan	• Ketua Dewan Pengawas (2019-sekarang) • Chief Retail Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2021-2023) • Group Head / Senior Vice President Cash & Trade Operations Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019) • Regional CEO Sulawesi Maluku (8 Provinsi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016) • Regional CEO Sumatera II (6 Provinsi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2015)
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 (No. 64131 1210 0 0015875 2023) (2023) • Certified Internal Audit Executive (Nomor: SERT CIAE-070/K/04/2022) (2022)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala SKAI

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, SKAI secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

Piagam Audit Internal

Bank memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern. Piagam Audit Intern merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:

1. Pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit
2. Inisiasi komunikasi
3. Pemeriksaan aktivitas PT Bank Syariah Indonesia Tbk
4. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan Manajemen.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ditinjau ulang paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun yang mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan penetapan dari Direktur Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit dan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*).
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi kegiatan SKAI dengan kegiatan Eksternal Audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya.
7. SKAI wajib melakukan komunikasi dengan regulator paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
8. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk.

Kewenangan SKAI

SKAI memiliki kewenangan yaitu:

1. Melakukan aktivitas audit intern terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pihak terafiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Mengakses seluruh data dan informasi Bank yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit, yaitu data cetak dan elektronik, catatan, karyawan, dana, aset, lokasi atau area, maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan sumber daya Bank.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan atau pelanggaran *Code of Conduct* (CoC).
6. Menetapkan jadwal, objek audit, personal, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksaan aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi.
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor.
8. Menggunakan jasa pihak ekstern atau non-Audit Intern dalam pelaksanaan audit, baik lingkup Bank maupun di luar Bank, apabila dipandang perlu.
9. Mengimplementasikan pelaksanaan aktivitas audit intern seusai Kode Etik Audit Intern.
10. Melakukan proses verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan/atau teknik audit lainnya kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit.
11. Mengikuti rapat yang bersifat strategis (dikecualikan rapat pembahasan persetujuan pembiayaan) tanpa mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
12. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari Entitas Utama bagi Konglomerasi Keuangan.

Kode Etik Internal Audit

1. **Integritas**
   Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan, dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukannya.

INTERNAL AUDIT

Aturan perilaku:
a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab;
b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesinya;
c. Tidak secara sadar/sengaja terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, atau kegiatan yang dapat merusak kredibilitas profesi audit internal atau reputasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk; dan
d. Mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.

2. **Objektivitas**
Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional pada tingkatan tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang ditinjau.

Auditor Internal melakukan penilaian secara berimbang atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

Aturan Perilaku:
a. Tidak diperkenankan berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat menghalangi penilaian Auditor Internal secara proporsional. Termasuk dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.
b. Dilarang menerima apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
c. Harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan atas kegiatan yang ditinjau.

3. **Kerahasiaan**
Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan secara hukum atau profesi.

Aturan Perilaku:
a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
b. Tidak diperkenankan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apa pun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.

4. **Kompetensi**
Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit internal.

Aturan Perilaku:
a. Hanya terlibat dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman sesuai dengan yang dimilikinya.
b. Melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
c. Senantiasa meningkatkan keahlian, serta efektivitas dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

Komposisi Pegawai

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, SKAI memiliki 108 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah
SEVP Internal Audit	1
Group Head	3
Department Head	13
Auditor	85
Staff	6
Total	**108**

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Pengembangan kompetensi auditor dilakukan melalui Program Sertifikasi Audit, baik untuk Level Nasional maupun Level Internasional. Rincian jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikasi Level Nasional dan Level Internasional sampai 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)		
Group Head	3	Level 1
	3	Level 2
	3	Level 3
	2	Level 4
	1	Level 5
Department Head	13	Level 1
	13	Level 2
	13	Level 3
	1	Level 4
Team Leader	39	Level 1
	39	Level 2
	1	Level 3
Officer	46	Level 1
	30	Level 2
Staff	1	Level 1
Certified Fraud Examiner (CFE)		
Group Head	2	CFE
Department Head	1	CFE
Certified Risk Professional (CRP)		
Group Head	1	CRP
Certified Information System Auditor (CISA)		
Group Head	1	CISA
Certified Information System Security Professional (CISSP)		
Group Head	1	CISSP
Encase Certified Examiner (EnCE)		
Group Head	1	EnCE
Computer Hacking Forensic (CHFI)		
Group Head	1	CHFI
Ceritified Qualified Internal Auditor (QIA)		
Group Head	1	QIA Level Manajerial
Control Objective for Information Technologies (COBIT) 4.2		
Group Head	1	COBIT 4.2
Information Technology Infrastructure Library (ITIL)		
Group Head	1	ITIL
Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Supervisor		
Group Head	1	Level Supervisor
Department Head	12	Level Supervisor
Team Leader	37	Level Supervisor
Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Auditor		
Group Head	1	Level Auditor
Department Head	13	Level Auditor
Team Leader	39	Level Auditor
Officer	45	Level Auditor
Staf	1	Level Auditor
Certified Internal Audit Executive (CIAE)		
Group Head	2	BPKP

INTERNAL AUDIT

Pelatihan/Pengembangan Kompetensi

Rincian pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Satuan Kerja Audit Internal, baik pimpinan maupun anggota, diuraikan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelatihan
Technical Competency	
1	Bank Mandiri Audit Course (BMAC)
2	Legal Forum
3	Workshop Digital Audit
4	Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor
5	Effective Report Writing
6	SKAI Terintegrasi IT Pengamanan Malware
7	Identifikasi titik kritis kecurangan (fraud) dalam pengadaan barang dan jasa
8	Training Menaksir emas
9	Sosialisasi ICOFR dan Data Analytics
10	Grafonomi
11	SQL
12	Budgeting
13	Agile Auditing
14	Fraud Auditing 1
15	Analytical and Auditing Skill
16	Analyzing and Imrpoving Business Process
17	Phyton
18	Cobit 2019
19	Fraud Detection & Investigation Internal Auditor
20	Risk Based Audit ESG dan Pemeriksaan Audit Kinerja
Softskill Competency	
1	Audit Surveillance ISO 37001-2016
2	Sharia Basic Audit Skill
3	*Business Marketing Intelligence*
4	*Refreshment Management Risiko*
5	Pelatihan Upgrading Assesor LSPKS
6	COSO
7	IAIB National Conference
8	Workshop Konferensi Internal Audit
9	Refreshment Management Risiko N2 dan N3
10	IIA National Conference 2023
11	National Anti Fraud Conference 2023
12	APU PPT PPSPM POJK 8 2023
13	Alignment Hasil Uji Petik DPS dengan SKAI

Rapat Unit Audit Internal

Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.03/2019, Unit Kerja Internal Audit memiliki kewenangan:

1. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
2. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Frekuensi Rapat

Rincian rapat Unit Audit Internal dengan organisasi internal BSI dalam rangka pelaksanaan tugasnya, diuraikan di bawah ini.

	Rapat dengan:				
	Direksi	Dewan Komisaris dan Komite Audit	SEVP Internal Audit	Dewan Pengawas Syariah	Auditor Eksternal
Jumlah Rapat	13	9	16	4	5

Pelaksanaan Tugas Internal Audit

1. **Pelaksanaan Audit**
   Berdasarkan *Annual Audit Plan i(AAP)* dan Strategi Audit Tahun 2023 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, rencana audit tahun 2023 ditetapkan sebanyak 27 penugasan. Sedangkan realisasinya hingga 31 Desember 2023 adalah 56 penugasan atau 207% dari target, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jenis Audit	Target AAP	Realisasi Non AAP	Realisasi AAP & Non AAP	Persentase
1	Audit Umum	27	29	56	207%
2	Audit Investigasi	-	-	42	100%
Total		**27**	**29**	**98**	-

2. **Aktivitas *Audit Support***
   Aktivitas *audit support* terdiri dari:
   a. Pelaksanaan *independent review* yaitu super App, New CMS, Google Workshop.
   b. Penyediaan 238 opini atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB).
   c. Penyediaan *data analytic* dan pemenuhan 190 kebutuhan data untuk pemeriksaan audit eksternal dan internal.

3. ***Audit Findings***
   Audit findings internal maupun audit eksternal didominasi oleh risiko operasional, yaitu kelemahan *monitoring* portofolio pembiayaan & kualitas pembiayaan, dengan penyebab proses internal dengan rincian penyebab:
   a. Kelemahan dalam perencanaan strategis.
   b. Ketidakcukupan prosedur/ketentuan.

Daftar *Monitoring* Tindak Lanjut

Bank telah menyelesaikan 6.675 atau 92% Daftar *Monitoring* Tindak Lanjut (DMTL) dari target yang telah ditetapkan. Progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Unit Kerja Internal Audit dan Eksternal Audit periode tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

No.	Auditor	Jumlah Temuan	Selesai sebelum *Exit Meeting*	Total DMTL	Selesai Desember 2023		Dalam Proses	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	Internal	3.249	1.310	1.939	1.805	93%	129	7%
2	Eksternal	3.711	2.263	1.446	1.297	90%	149	10%
Total		**6.960**	**3.573**	**3.385**	**3.102**	**92%**	**278**	**8%**

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau *fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Bank mencakup pengendalian keuangan, operasional dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis
   Untuk mencapai sasaran pertumbuhan bisnis Bank secara berkesinambungan sejalan dengan visi dan misi Bank.
2. Tujuan Kepatuhan
   Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator perbankan, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan Bank.
3. Tujuan Informasi
   Untuk menjamin ketersediaan informasi keuangan yang handal kepada manajemen secara benar, lengkap dan tepat waktu, relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tujuan Operasional
   a. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank
   b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian
5. Tujuan Budaya Risiko
   a. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.
   b. Mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif sehingga tercipta mekanisme yang melibatkan seluruh pegawai untuk mengidentifikasi dan mencegah kelemahan dan penyimpangan secara dini dengan efisien dan efektif
   c. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL (COSO-INTERNAL CONTROL FRAMEWORK)

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif pada seluruh level organisasi Bank Syariah Indonesia dalam rangka mengawal tercapainya tujuan Bank. Sistem Pengendalian Internal ini merupakan pengembangan 5 (lima) elemen pokok Sistem Pengendalian Internal yang diatur oleh Regulator berdasarkan POJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Di BSI, Sistem Pengendalian Intern diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang merujuk pada COSO Model tahun 2008 sebagaimana telah dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang terdiri atas :

1. Lingkungan pengendalian (*Internal Environment)*
2. Penetapan tujuan *(Objective Setting)*
3. Identifikasi kejadian/peristiwa *(Event Identification)*
4. Penilaian risiko (*Risk Assessment)*
5. Respon atas risiko *(Risk Response)*
6. Aktivitas pengendalian *(Control Activity)*
7. Informasi dan komunikasi (*Information & Communication)*
8. Pemantauan (*Monitoring)*

HASIL *REVIEW* SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang andal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidental terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.
Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2023, diperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern di PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara umum telah memadai. Hasil *review* tersebut telah disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan diawasi pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, BSI juga telah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, dengan cara:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik
2. Menetapkan pejabat yang ditugaskan memantau efektivitas pelaksanaan pengendalian intern
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan-laporan rutin yang diperlukan
5. Melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi dari unit kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan
6. Memberikan informasi/*feedback* yang tepat kepada pihak yang berkepentingan

Kelemahan dalam pengendalian intern baik yang diidentifikasi oleh satuan unit kerja operasional (*risk taking unit)*, Unit Kerja Internal Audit maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang andal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidentil terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di BSI telah memadai untuk menciptakan kinerja yang andal dan efisien di bidang: keuangan, operasional, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan.

AUDIT TERINTEGRASI

Rangkaian proses dalam audit terintegrasi, antara lain:

- SKAI melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk.
- Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank, dengan tetap memperhatikan perundang-undangan.

Manajemen Risiko

Pembahasan tentang manajemen risiko disampaikan pada bab tersendiri yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Akuntan Publik

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit terhadap Laporan keuangan Bank untuk tahun buku 2022 telah dilakukan oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Pihak Bank melakukan pertemuan secara rutin dengan auditor eksternal untuk membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Hal itu dilakukan agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil audit dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Auditor Eksternal memiliki fungsi untuk melakukan audit laporan keuangan Bank, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan Bank serta menguji pengendalian internal, termasuk pengujian kembali item yang sudah diuji oleh Internal Audit dan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Pertimbangan perlunya Audit Eksternal bagi sebuah Bank antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan tata kelola yang baik membutuhkan fungsi audit internal yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya kompeten, dan akses informasi yang memadai.
2. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan independen kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi Bank;
3. Praktik internal audit bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi audit internal.

Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Audit Pihak Kedua dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (Standar Auditing Indonesia). Standar tersebut mengharuskan Pihak Kedua mematuhi ketentuan etika, merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian terhadap risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pihak Pertama untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Pihak Pertama.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 3 menegaskan bahwa Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan: c. RUPS Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan

dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Sementara Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Pasal 6: Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1): Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

1. Penunjukan KAP dan AP serta penetapan biaya/honorariumnya untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
2. KAP dan/atau AP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan baik, dapat diusulkan kembali guna melakukan audit laporan keuangan tahunan tahun buku berikutnya setelah mempertimbangkan persyaratan dalam ketentuan yang berlaku. Syarat untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan evaluasi Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Kantor Akuntan Publik mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan yang masih berlaku.
   b. Kantor Akuntan Publik terdaftar pada Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Badan Pemeriksa Keuangan.
   c. Akuntan Publik yang menjadi Signing Partner terdaftar aktif pada pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
   d. Berafiliasi sebagai *member* (bukan korespondensi) dari KAP yang berskala internasional.
   e. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum yang *breast* lebih dari Rp 10 triliun
   f. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank Syariah atau unit usaha Syariah.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Tahun	KAP	Periode KAP	Nama Akuntan	Periode Akuntan	Biaya Jasa Audit (Rp)
2023	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	1 tahun penugasan	M. Jusuf Wibisana	1 tahun penugasan	5.600.000.000 (termasuk: PPN & OPE)
2022	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	1 tahun penugasan	M. Jusuf Wibisana	1 tahun penugasn	5.400.000.000 (termasuk: PPN & OPE)
2021	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	1 tahun penugasan	M. Jusuf Wibisana	1 tahun penugasn	5.100.000.000 (termasuk: PPN & OPE)

AKUNTAN PUBLIK

JASA LAIN YANG DIBERIKAN

Tidak ada jasa lain yang diberikan, kecuali laporan keuangan dan penerapan prosedur yang disepakati mengenai laporan hasil evaluasi kinerja dan audit PSA 62.

OPINI AUDIT TAHUN BUKU

Hasil audit memberikan opini "Wajar", dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit Bank Syariah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Internal Audit untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Bank Syariah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Internal Audit untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorsime (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Indonesia mencatat sejarah di bidang APU, PPT, dan PPPSPM dengan bergabung menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) ke-40 pada 27 Oktober 2023. Keanggotaan penuh di FATF ini memiliki arti penting, mengingat FATF adalah forum internasional yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam integritas dan stabilitas sistem keuangan internasional.

Keanggotaan Indonesia di FATF akan meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan di dalam negeri. Kepercayaan investor kepada Indonesia akan meningkat dengan adanya keyakinan bahwa modal yang mereka investasikan aman dan memiliki risiko rendah terhadap potensi terjadinya pencucian uang, pendanaan terorisme maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) merupakan kejahatan lintas negara, sehingga sangat berisiko bagi banyak negara termasuk Indonesia. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang berdampak terhadap perekonomian dan keuangan negara. Lembaga perbankan dengan fungsi intermediasi berpotensi dijadikan sarana pencucian uang pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi. Karena itu, pencegahannya membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

PT Bank Syariah Indonesia ("BSI", "Bank") sebagai bagian dari industri perbankan nasional dengan jaringan nasional dan global memiliki peranan penting untuk memastikan integritas transaksi keuangan atas seluruh produk dan layanan yang digunakan oleh nasabah. BSI juga membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi.

Bagi BSI, komitmen tersebut bukan sekadar upaya memenuhi peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, demi menjaga kemaslahatan manusia serta menghilangkan mudarat dengan memperhatikan nilai-nilai dasar syariah.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN

BSI senantiasa melaksanakan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sebagai upaya mitigasi terhadap risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Bank mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam implementasi APU PPT. Rinciannya adalah:

A. Ketentuan Eksternal:

1. Undang-undang RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-undang RI No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
3. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Undang-undang RI No. 3 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011, perihal Transfer Dana, berikut segala perubahannya
5. POJK No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
6. SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan
7. SEOJK No.38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, berikut segala perubahannya.
8. SEOJK No. 29/SEOJK.01/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 31/SEOJK.01/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.47/SEOJK.04/2017 tanggal 06 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal
11. Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/09/2012, perihal Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan, berikut segala perubahannya.
12. Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013, perihal Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
13. Peraturan Kepala PPATK No. PER-21/1.02/PPATK/11/2013, perihal Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
14. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014, perihal Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, berikut segala perubahannya.
15. Peraturan Kepala PPATK No. Per-02/1.02/PPATK/02/15, perihal Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut segala perubahannya.
16. Peraturan Kepala PPATK No.18 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan
17. Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*
18. Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme
19. Surat Edaran PPATK No. SE-01/1.02/PPATK/02/14, perihal Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku Dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai, berikut segala perubahannya.
20. Surat Edaran PPATK No.SE-02/1.02/PPATK/03/14, perihal Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu, berikut segala perubahannya.
21. Surat Edaran PPATK No. 1 tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah.

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

22. Surat Edaran PPATK No. 08 tahun 2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika.

B. Ketentuan Internal:

1. Kebijakan Hukum, Kepatuhan dan APU PPT PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Standar Prosedur Pengendalian Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) PT Bank Syariah Indonesia Tbk, September 2023.
3. Petunjuk Teknis Operasional *Individual Risk Assessment*, Juli 2023.
4. Petunjuk Teknis Operasional Supervisi dan Uji petik AML Officer tahun 2023.
5. Petunjuk Teknis Operasional Pemenuhan Permintaan data Keuangan Nasabah dan Perintah Pemblokiran Rekening dari Pihak Ketiga tahun 2023.
6. Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi BISA (BSI *Integrated System* of AML CFT), tahun 2021.

PENGELOLA APU PPT & PPPSPM

Pengelolaan dalam penerapan APU PPT dan PPPSPM di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") dilaksanakan oleh Unit Kerja AML/APU PPT Group (AMG). Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi secara aktif implementasi pengelolaannya.

Tugas, tanggung jawab, kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi/SEVP terkait dengan pengawasan dan penerapan program APU PPT dan PPPSPM antara lain:

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris	Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup: a. Memastikan Bank memiliki Kebijakan dan Prosedur penerapan program APU PPT & PPPSPM; b. Memberikan persetujuan atas Kebijakan dan Prosedur penerapan program APU PPT & PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi; c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT & PPPSPM; d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT & PPPSPM, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator; e. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris; f. Memberi masukan/saran kepada Direksi mengenai penerapan program APU PPT & PPPSPM.
Direksi/SEVP	Pengawasan aktif Direksi/SEVP paling kurang mencakup: a. Mengusulkan kebijakan tertulis Program APU PPT & PPPSPM kepada Dewan Komisaris; b. Memastikan penerapan Program APU PPT & PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; c. Membentuk Unit Kerja khusus yang melaksanakan Program APU PPT & PPPSPM dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU PPT & PPPSPM; d. Melakukan pengawasan atas kepatuhan Unit Kerja dalam menerapkan Program APU PPT & PPPSPM; e. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU PPT & PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank, serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT dan/atau PPSPM; dan f. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU PPT & PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. g. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU PPT & PPPSPM dalam rapat Direksi.
Direktur Kepatuhan	a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan regulator tentang APU PPT & PPPSPM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan berlaku. b. Memastikan cakupan Pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai. c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator, antara lain komitmen dalam *Action Plan*, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil Pengawasan Regulator yang terkait dengan penerapan Program APU PPT & PPPSPM. d. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM.

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
	e. Memberikan persetujuan terhadap pelaporan kepada regulator terkait: 1) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 2) Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data kepada Regulator 3) Penundaan dan penghentian sementara transaksi. 4) Penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi. 5) Penutupan hubungan usaha dengan pengembalian dana sesuai melalui instansi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 6) Penetapan petugas, pelapor dan petugas administrator dalam rangka pelaporan kepada PPATK. 7) Laporan lainnya terkait APU PPT & PPPSPM yang disampaikan oleh Direksi kepada otoritas pengawas kantor cabang luar negeri.
Unit Kerja Khusus APU PPT & PPPSPM	1. Pembentukan Unit Kerja Khusus APU PPT / (AML /APU PPT Group) Dalam rangka melaksanakan Program APU PPT & PPPSPM, Bank wajib didukung oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang menangani dan mengelola Program APU PPT & PPPSPM Bank. UKK Bank disebut dengan Satuan Kerja Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah massal, dalam hal ini berada di AML / APU PPT Group (AMG). Pembentukan tersebut memperhatikan sebagai berikut: a. Pimpinan dan staf di unit kerja APU PPT & PPPSPM Group tidak merangkap fungsi lain dan hanya dapat merangkap fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan. Pejabat dan staff tersebut dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawabnya; b. Pimpinan unit kerja APU PPT & PPPSPM ditetapkan dan diangkat oleh Direksi; c. Unit kerja yang berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung dalam struktur organisasi Bank; d. Unit kerja AML/APU PPT Group bersifat independen dari fungsi lain; e. Penanggung jawab program APU PPT & PPPSPM untuk bank Kustodi hanya dapat merangkap fungsi kepatuhan dan harus terpisah dari fungsi audit internal. Penanggung jawab program APU PPT & PPPSPM untuk bank Kustodi dapat dirangkap oleh Penanggung jawab program APU PPT & PPPSPM Bank. 2. Kepala unit kerja AML / APU PPT Grup (AMG) wajib memenuhi kriteria paling sedikit: a. Memenuhi persyaratan independensi; b. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Tidak melaksanakan tugas lain di luar Fungsi APU PPT & PPPSPM; d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Program APU PPT & PPPSPM; e. Memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; f. Mewujudkan terlaksananya Program APU PPT dan PPPSPM pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank; g. Mengelola Risiko APU PPT & PPPSPM yang dihadapi oleh Bank; h. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan PPATK dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF). 3. Tugas dan Fungsi Unit Kerja AML / APU PPT: a. Unit Kerja AML / APU PPT dipimpin oleh Kepala unit kerja APU PPT yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan terkait APU PPT dan PPPSPM. b. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Unit Kerja APU PPT 1) Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya penguatan pemahaman penerapan program APU PPT dan PPPSPM di seluruh kegiatan usaha dan jaringan Bank (baik di Indonesia maupun kantor cabang luar negeri); 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap potensi risiko APU PPT & PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan peraturan lainnya, termasuk ketentuan yang berlaku di mana kantor bank luar negeri beroperasi; 3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BSI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
	4) Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*). Penilaian risiko tersebut wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme secara Nasional (*National Risk Asessment*) dan secara sectoral (*Sectoral Risk Asessment);* 5) Menyusun, melakukan pengkinian dan mengusulkan pedoman penerapan Program APU PPT kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan; 6) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF); 8) Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur agar telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, volume transaksi Bank, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan menyusun perubahan kebijakan dan prosedur paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil review; 9) Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah; 10) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; 11) Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi; 12) Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Keluar Negeri; 13) Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU PPT & PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai bank; 14) Memastikan penerapan APU PPT & PPPSPM di antaranya terkait dengan: a) Ketersediaan sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; b) Ketersediaan mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT & PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*; c) Adanya identifikasi area dan usaha yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU PPT & PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai; d) Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU PPT dan PPPSPM: i. Telah dilaksanakan pengkinian data nasabah oleh unit kerja terkait. ii. Seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT & PPPSPM terlaksana dengan baik. 15) Menjaga kerahasiaan informasi dengan memperhatikan ketentuan *Anti Tipping Off;* 16) Melakukan pengawasan maupun tugas lain yang terkait dengan penerapan pemenuhan APU PPT & PPPSPM; 17) Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh satuan kerja; 18) Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM; 19) Mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko APU PPT & PPPSPM yang terkait dengan pengembangan produk & praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru dan penggunaan teknologi bari atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada. c. Petugas AML di Region Tugas dan Tanggung Jawab Petugas AML di Region: 1) Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah;

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
	2) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, serta melaporkan transaksi mencurigakan ke Unit Kerja AMG Kantor Pusat; 3) Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah; 4) Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang tindak pidana Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK; 5) Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU PPT & PPPSPM terhadap satuan kerja terkait; 6) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT & PPPSPM terlaksana dengan baik (antara lain memastikan kegiatan pembukaan rekening telah dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur); 7) Melakukan sosialisasi program dan penerapan APU PPT & PPPSPM di Region; 8) Memberikan masukan terkait penerapan APU PPT & PPPSPM kepada pegawai di Outlet/ Unit Kerja AMG di Kantor Pusat; Unit Kerja AMG Kantor Pusat dapat mempertimbangkan jumlah pegawai AML Team Leader dan AML Officer di masing-masing Region berdasarkan *risk- based.* Hal-hal yang mempengaruhi tingkat risiko secara regional tersebut antara lain: 1) Penggunaan produk dan jasa yang ditawarkan memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan / regulator terkait lainnya dan/atau Lembaga Pengatur dan Pengawas. 2) Jumlah nasabah berisiko tinggi yang dimiliki. 3) Volume usaha outlet. 4) Aktivitas transaksi dengan luar negeri. 5) Lokasi Outlet berada pada wilayah yang masyarakatnya dikenal sebagai *cash society*. 6) Hasil *risk assessment* yang dikeluarkan oleh otoritas, di mana kantor cabang luar negeri beroperasi. d. Petugas APU dan PPT Kustodi Tugas dan tanggung jawab Petugas APU PPT Kustodi. 1) Memantau transaksi nasabah kustodi; 2) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, serta melaporkan transaksi mencurigakan; 3) Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah; 4) Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU PPT & PPPSPM terhadap satuan kerja terkait; 5) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT & PPPSPM terlaksana dengan baik (antara lain memastikan kegiatan pembukaan rekening telah dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur) Melakukan sosialisasi program dan penerapan APU PPT & PPPSPM; e. AML Officer Kantor Cabang Luar Negeri Tugas dan Tanggung Jawab Petugas AML Officer Kantor Cabang Luar Negeri: 1) Memantau rekening dan transaksi nasabah; 2) Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya kepada otoritas negara setempat; 3) Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah; 4) Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur; 5) Menyampaikan laporan penerapan APU PPT & PPPSPM kepada APU PPT & PPPSPM Kantor Pusat minimal triwulanan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. f. Struktur Organisasi pada unit kerja AML / APU PPT Grup terdiri dari: 1) Group Head AML / APU PPT sebanyak 1 (satu) pegawai. 2) Department AML / APU PPT terdiri dari: a) Strategic Alliance Department terdiri dari: i. Dept head, Manager & Officer di KP sebanyak 7 (tujuh) pegawai. ii. AML Team Leader di Region sebanyak 3 (tiga) pegawai iii. AML Officer di Region sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai. b) Policy & Advisory Department i. Dept head, Manager & Officer di KP sebanyak 11 (sebelas) pegawai. c) Analyst & Monitoring Department i. Dept head, Team Leader & Officer sebanyak 7 (tujuh) pegawai.

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

IMPLEMENTASI APU PPT TAHUN 2023

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 tahun 2013, Peraturan OJK No. 08 tahun 2023 serta peraturan PPATK, maka telah diterapkan program APU PPT & PPPSPM melalui:

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan untuk menciptakan penerapan Program APU PPT & PPPSPM yang efektif. Manajemen selalu berkomitmen untuk merealisasikannya melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, yang antara lain dalam bentuk:

a. Pemenuhan laporan bulanan APU PPT & PPPSPM kepada Direktur *Compliance and Human Capital* (CHC).
b. Terdapat kewenangan Direktur *Compliance and Human Capital* (CHC) dalam menyetujui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilakukan secara independent.
c. Pembahasan materi APU PPT & PPPSPM dalam komite dibawah Direksi.
d. Pemenuhan Laporan secara Triwulan kepada Dewan Komisaris melalui forum Komite Pemantau Risiko.
e. *Tone From The Top* dipahami dan diintegrasikan di seluruh lini bisnis serta konsistensi dalam penerapan APU PPT & PPPSPM.
f. *Engagement Leadership* terkait urgensi penerapan APU PPT & PPPSPM dalam rangka peran Direksi dalam menunjang efektivitas penerapan APU PPT & PPPSPM.
g. Efektivitas pengawasan Dewan Komisaris dalam menjaga Kepatuhan Bank dalam menuju Era pengaturan *principle based*.

Sebagai komitmen lain dari Direksi dan Komisaris terkait APU PPT & PPPSPM, dilakukan hal-hal lain sebagai berikut:

a. BSI ikut berperan aktif sebagai bank sampling pada agenda *Mutual Evaluation Review* (MER) dalam rangka Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) pada bulan Juli 2022 dan Indonesia berhasil masuk menjadi anggota FATF ke 40 pada tanggal 27 Oktober 2023.
b. BSI bekerja sama dengan PPATK melakukan *Sharing Session* dengan tema "Peran Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dihadiri oleh Direksi, Komisaris, SEVP dan seluruh Group Head pada tanggal 13 April 2023 dengan narasumber Kepala PPATK.
c. BSI telah mendapatkan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem manajemen Kepatuhan dengan ruang lingkup APU PPT pada tahun 2022, dan telah melaksanakan proses *surveillance* (audit pengawasan) atas tersebut pada bulan November 2023, dan berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021.
d. BSI mengikuti penilaian terhadap Kepatuhan penerapan APU PPT & PPPSPM oleh PPATK dalam agenda *Financial Integrity Rating* (FIR) dan berhasil mendapatkan predikat **"Sangat Baik"**.

Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan serta Prosedur Penerapan Program APU PPT & PPPSPM yang telah disusun selalu dilakukan *review/ updating* secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait APU PPT & PPPSPM di antaranya:

a. Kebijakan Kepatuhan, Hukum dan APU PPT
b. Standard Prosedur Pengendalian (SPP) APU PPT & PPPSPM edisi bulan September 2023, yang berisi:
   1) Organisasi dan Kewenangan
   2) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bank;
   3) Penatausahaan, Proses CDD dan EDD;
   4) Pengkinian dan Pemantauan;
   5) Pemutusan, Penundaan, dan Penolakan Hubungan Usaha / Transaksi;
   6) Pengelolaan Risiko dan Penatausahaan Kebijakan dan Prosedur;
   7) Modus Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi;
   8) Cross Border Corresponden Banking;
   9) Transfer Dana;
   10) Pengendalian Internal & Sistem Informasi Manajemen;
   11) Sumber Daya Manusia dan *Know Your Employee* (KYE);
   12) Pelaporan.
c. Petunjuk Teknis Operasional *Individual Risk Assessment* (IRA) APU PPT edisi Juli 2023, terdiri dari:

1) Metodologi Penilaian;
2) Hasil *Individual Risk Assessment* (IRA) TPPU;
3) Hasil *Individual Risk Assessment* (IRA) TPPT.

d. Petunjuk Teknis Operasional Supervisi dan Uji Petik AML Officer (AMLO) edisi tahun 2023 terdiri dari:
1) Tugas dan tanggungjawa AML Officer;
2) Tata cara dan supervisi uji petik AML Officer;
3) Pelaporan AML Officer.

e. Petunjuk Teknis Operasional Pemenuhan Permintaan data Keuangan Nasabah dan Perintah Pemblokiran Rekening dari Pihak Ketiga, tahun 2023 terdiri dari:
1) Tugas, tanggung jawab dan Kewenangan;
2) Pemenuhan permintaan data;
3) Pemenuhan perintah pemblokiran.

f. PTO Aplikasi BISA
1) Tugas dan Tanggung jawab
2) Ketentuan Umum
3) Ketentuan Pelaksanaan

Selain hal tersebut diatas juga pemberian opini APU PPT & PPPSPM untuk aktivitas dan produk baru sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pengkinian Kebijakan Internal APU PPT & PPPSPM	2
2.	Kebijakan Internal APU PPT & PPPSPM	1
3.	Opini terkait APU PPT: a. Opini terhadap Produk & Aktivitas Baru b. Opini terhadap Produk dan Aktivitas *Existing*	 36 35
4.	*Review* terhadap Ketentuan *Existing*	8

Pengendalian Intern

Dalam rangka memastikan implementasi Program APU PPT & PPPSPM telah berjalan sebagaimana mestinya telah dilakukan proses pengendalian internal yang dilakukan oleh internal AMG, Audit Internal, maupun Pengawas OJK, dengan aktivitas sebagai berikut:

a. Pengendalian internal yang dilakukan oleh AMG melalui uji petik dengan cara mendatangi *outlet* (*on the spot*) maupun dengan cara *online* (*ondesk*) oleh AML Officer (AMLO) untuk melihat dokumen transaksi maupun dokumen pembukaan rekening terkait dengan pemenuhan implementasi program APU PPT & PPPSPM sesuai dengan ketentuan eksternal baik dari regulasi OJK maupun undang-undang serta ketentuan internal. Setelah proses Uji Petik, AMLO akan melakukan sosialisasi terkait implementasi program APU PPT di *outlet*/cabang.

Uji Petik yang dilakukan oleh AML Officer (AMLO) terhadap seluruh *outlet* di 10 (sepuluh) Region dengan rincian sebagai berikut:

Region	Jumlah Cabang	Pelaksanaan Uji Petik			
		Onsite	%	Online	%
Aceh	154	143	93	11	7
Medan	98	93	95	5	5
Palembang	107	92	86	15	14
Jakarta 1	126	126	100	0	0
Jakarta 2	103	103	100	0	0
Bandung	83	83	100	0	0
Semarang	105	105	100	0	0
Surabaya	153	153	100	0	0
Kalimantan	71	56	79	15	21
Makassar	86	82	95	4	5
TOTAL	**1.086**	**1.036**	**95**	**50**	**5**

Selain Uji Petik oleh AMLO juga dilakukan validasi atas hasil Uji Petik AMLO oleh AMG KP yang dilakukan secara *onsite* terhadap sampling beberapa area, dengan rincian sebagai berikut:

Region	Area	Jumlah Cabang
Aceh	Area Lhokseumawe	12
	Area Banda Aceh	11
	Area Meulaboh	10
Medan	Area Batam	12
	Area Pekanbaru	14
	Area Medan Kota	15
	Area Pematangsiantar	7
	Area Medan Raya	11
	Area Bengkulu	7
Palembang	Area Jambi	9
	Area Bandar Lampung	12
	Area Padang	13
	Area Palembang	14
Jakarta 1	Area Jakarta Kebon Jeruk	17
	Area Jakarta Kelapa Gading	16
	Area Jakarta Rawamangun	11
	Area Jakarta Thamrin	9
	Area Bekasi	13
	Area Banten	12
Jakarta 2	Area Jakarta Fatmawati	13
	Area Jakarta Pondok Indah	7

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

Region	Area	Jumlah Cabang
	Area Jakarta Saharjo	15
	Area Depok	11
	Area Bogor	13
	Area Tangerang Selatan	13
Bandung	Area Bandung Kota	8
	Area Bandung Raya	6
	Area Cirebon	13
Semarang	Area Purwokerto	10
	Area Semarang Kota	15
	Area Pekalongan	14
	Area Solo	19
	Area Yogyakarta	6
Surabaya	Area Denpasar	16
	Area Surabaya Kota	11
	Area Surabaya Raya	19
	Area Jember	11
	Area Kediri	15
	Area Malang	14
Kalimantan	Area Pontianak	11
	Area Banjarmasin	13
	Area Balikpapan	9
Makassar	Area Palu	6
	Area Makassar	13
	Area Manado	7

Proses validasi uji petik oleh AMG KP diakhiri dengan agenda sosialisasi yang disertai dengan studi kasus dan *sharing* diskusi terhadap pegawai di region dengan cara *hybrid* yaitu *offline* dan *online*.

a. Pengendalian internal juga dilakukan oleh Internal Audit sebagai *third line of defense* untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU PPT & PPPSPM, terhadap seluruh DMTL dan concern audit internal seluruhnya telah ditindaklanjuti.
b. Pengendalian internal juga dilakukan oleh eksternal regulator yaitu OJK Pengawas Perbankan Syariah maupun Join audit OJK - PPATK dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerapan program APU PPT & PPPSPM di BSI dengan beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait dengan penerapan 5 Pilar APU PPT & PPPSPM.

Sistem Informasi Manajemen

Bank senantiasa meningkatkan kualitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (RBA) seiring meningkatnya potensi risiko. Hal itu selaras dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk, dan jasa serta.

Begitu juga dengan pesatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi keuangan. Karena itu, Bank wajib memiliki sistem informasi untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah.

Saat ini, Bank telah memiliki "BSI Integrated System of AML CFT (BISA)", yaitu aplikasi perangkat lunak berbasis web milik BSI. Fungsinya adalah untuk melakukan proses *screening*, *risk rating*, *monitoring* transaksi mencurigakan dan pelaporan yang terkait penerapan program APU PPT & PPPSPM.

Di tingkat kantor cabang, petugasnya wajib memanfaatkan aplikasi tersebut dalam setiap aktivitas pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk memitigasi risiko terkait tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Berikut ini merupakan kewenangan petugas cabang dalam mengakses aplikasi BISA sebagai alat bantu penerapan program APU PPT & PPPSPM, antara lain:

a. Menu *Onboarding Customer* Individu dan Non Individu
b. Menu Pemantauan Alert
c. Menu *Link Analysis*
d. Menu Identifikasi Dokumen Kadaluarsa
e. Menu Penolakan/Pemutusan Hubungan Usaha
f. Menu *Safe Deposit Box*
g. Menu Detil Nasabah

Pada tahun 2023 telah dilakukan insisasi pengembangan system bekerja sama dengan grup-grup terkait untuk implementasi APU PPT di BSI, antara lain:

a. Pengembangan fungsi *Risk Rating* & *Screening* APU PPT aplikasi BSI Smart Agent Laku Pandai pada proses pembukaan rekening *Basic Saving Account* (BSA).
b. Inisiasi kajian pengembangan aplikasi *monitoring* implementasi APU PPT BSI.
c. Pengembangan integrasi *Risk Rating* & *Screening* pada permohonan kartu hasanah card.
d. Pengembangan integrasi *Risk Rating* & *Screening* pada proses on boarding CS digital.
e. Pengembangan integrasi on boarding pada proses Rekening Dana Nasabah (RDN) *online*.
f. Penambahan *Field* dan *Screening Beneficial Owner* (BO) & Pengurus Nasabah Non Perorangan
g. Pengembangan integrasi *Screening* pada proses pembiayaan consumer mitra guna bersama Bank Mandiri.
h. *Ongoing customer profiling* untuk *Re screening* & *Re risk rating existing Customer*.
i. *Review assurance* AML Region untuk Uji petik dan validasi *outlet*.
j. Pengembangan *Regulatory Reporting* AMG.

SDM dan Pelatihan

Upaya yang dilakukan AML/APU PPT Group (AMG) adalah meletakan fondasi pemahaman APU PPT kepada seluruh pegawai BSI. Insiatif tersebut, antara lain dilakukan melalui:

a. Penguatan APU PPT untuk *Senior Management*
   BSI bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan *sharing session* dengan tema "Peran Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" pada tanggal 13 April 2023. Kegiatan itu dihadiri oleh Direksi, Komisaris, SEVP serta seluruh Group Head dengan total peserta sebanyak 133 dan yang menjadi narasumber adalah Bapak Dr. Ivan Yustiavandana S.H, LL.M, Kepala PPATK.
b. Sosialisasi Internal
   Sosialisasi terkait dengan implementasi penerapan APU PPT & PPPSPM dilakukan ke grup-grup yang ada di Kantor Pusat dan Region. Pelaksanaan sosialisasi di tahun 2023 sebagai berikut:

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

No.	Nama Agenda	Jumlah	Jumlah Peserta
1	Implementasi APU PPPT & PPPSPM	2 Group	88
2	*Refreshment* Implementasi APU PPPT & PPPSPM Region I s/d X	45 Area	3.269
3	*Learning Hub* APU PPT RO Makassar	86 *Outlet*	218
4	*Learning Hub* APU PPT RO Palembang	107 *Outlet*	459
5	*Learning Hub* APU PPT RO Bandung	83 *Outlet*	175
6	Webinar APU PPT & PPPSPM Seri 1: "*Best Practice* CDD & EDD dalam penerapan APU PPT dan Pencegahan PPSPM"	Pegawai KP dan Region	3.205
7	Webinar APU PPT & PPPSPM Seri 2: "APU PPT Dalam Preventif Tahun Politik"	Pegawai KP dan Region	4.858
8	Webinar APU PPT & PPPSPM Seri 3: "Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)"	Pegawai KP dan Region	3.693
9	Webinar APU PPT & PPPSPM Seri 4: "Tahapan Pencucian Uang dan Kewajiban Pelaporan"	Pegawai KP dan Region	2.623
10	Pelatihan APU PPT & PPPSPM untuk Pegawai Bibit	Pegawai Bibit RO Jakarta 1 dan Jakarta 2	178

c. *Training For Trainer* (TFT)

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan penyebarluasan informasi, serta kebijakan terkait implementasi APU PPT & PPPSPM yang berpengaruh kepada tingkat kesehatan di seluruh jaringan BSI, maka dilakukan pelatihan TFT. Pelatihan tersebut diperuntukkan bagi pegawai di region maupun kantor pusat yang disiapkan untuk menjadi pelatih atau *trainer* dan meneruskan materi terkait APU PPT & PPPSPM kepada pegawai lain. Pelaksanaan Training for Trainer (TFT) tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Nama Agenda	Peserta	Jumlah Peserta
1	*Soft Skill Training for Trainer* AML Officer	AML *Officer* dan Pegawai AMG	24
2	*Training for Trainer Banking Operation Academy* dan APU PPT tahun 2023 – 2 batch	AOSM BOSM	139

Penguatan Penerapan Program APU PPT & PPPSPM Melalui *Awareness*

Dalam rangka penguatan penerapan program APU PPT juga dilakukan *awareness* berupa media komunikasi video dan komik yang dapat diakses melalui aplikasi internal BSI serta korespondensi. Tema awareness untu *Anti Money Laundering and Cuntering Financing of Terrorism* (AML/CFT) yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

a. Tindak Lanjut Hasil Uji Petik APU PPT oleh Regional AMLO Tahun 2022.
b. Penguatan Program APU PPT dalam Identifikasi Pemilik Manfaat/ *Beneficial Owner* (BO) Partai Politik.
c. *Enchanced Due Diligence* (EDD) Nasabah *Highrisk*.
d. Penerapan Single CIF.
e. Penyampaian Update Publikasi Daftar Negara Berisiko dan Yuridiksi Lain yang Dipantau oleh FATF.
f. Penguatan Program APU PPT dalam Identifikasi Modus Operandi Dana Kampanye pada Masa Pemilu.
g. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dalam rangka Pemilihan Umum.
h. Pengisian Data Nasabah Warga Negara Asing (WNA) pada saat Pembukaan Rekening.
i. Penguatan Program APU PPT dalam rangka Pemantauan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
j. Penerapan Profil Risiko dalam Pelaksanaan Hubungan Usaha dengan Nasabah.
k. Mitigasi Risiko Pencucian Uang terkait Industri Real Estate.
l. Pencegahan Transaksi *Ransomware* melalui Penerapan Program APU PPT dan PPSPM Berbasis Risiko.
m. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
n. Penolakan/Penutupan Hubungan Usaha dan Penolakan Transaksi.
o. Penyampaian Kembali *Awareness* APU PPT terkait Kewajiban untuk Identifikasi Pemilik Manfaat/BO Nasabah Perorangan dan Non Perorangan.
p. Penyampaian Kembali *Awareness* APU PPT terkait Kewajiban Pemantauan *Alert* Aplikasi BISA oleh Cabang.
q. Penguatan Program APU PPT dan PPPSPM dalam melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Penatausahaan Dokumen terkait Produk Pembiayaan Berbasis Emas.
r. Hasil Penilaian IRA TPPU dan TPPT Tahun 2023.
s. Kewajiban Penolakan terhadap Calon Nasabah dan Pemblokiran Serta Merta Terhadap Nasabah Terkait DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) & DPPSPM (Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal).
t. AML CFT *awareness* - Pendaftaran Nasabah dan Pihak Lain ke dalam Wacthlist Management System Aplikasi BISA.

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

Penilaian *Financial Integrity Rating* (FIR) BSI oleh PPATK

Nilai Financial Integrity Rating (FIR) menunjukkan tingkat komitmen, implementasi dan kepatuhan dari pihak pelapor terhadap rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Indonesia. Hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 (UU TPPU) dan UU No. 9 tahun 2013 (UU TPPT).

Pengukuran nilai FIR oleh PPATK dilakukan terhadap 3 (tiga) dimensi: komitmen pihak pelapor; implementasi tata kelola APU PPT; dan tingkat kepatuhan pihak pelapor terhadap kewajiban pelaporan APU PPT kepada PPATK.

Penilaian FIR BSI pada tahun 2023 adalah 9,28 dengan kategori **"Sangat Baik"**. Hasil tersebut di atas nilai FIR Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Bank Umum sebesar 8,37 dan di atas nilai FIR Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3, yaitu 8,77.

Penetapan Indonesia dalam Keanggotaan *Financial Action Task Force* (FATF)

Dalam rangka Indonesia menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF) dilakukan penilaian terkait terhadap penerapan APU PPT di sektor jasa keuangan. Dari sisi perbankan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk menjadi salah satu bank *sampling* untuk dilakukan penilaian oleh FATF.

Pada tanggal 27 Oktober 2023, FATF menyampaikan hasil *Plenary Meeting* terkait pembahasan keanggotaan Indonesia dan telah diputuskan bahwa Indonesia telah diterima menjadi *full member* FATF ke-40. Dengan status anggota penuh FATF, Indonesia dapat berkontribusi memberi warna kebijakan strategis global terkait APU PPT & PPPSPM sesuai dengan perspektif dan kepentingan negara.

Realisasi Pelaporan APU, PPT dan PPPSPM dan Pemenuhan Permintaan Data

Realisasi laporan APU PPT dan PPPSPM kepada PPATK dan Pemenuhan Permintaan Data/Informasi dari Regulator/Aparat Penegak Hukum Tahun 2023:

a. Realisasi pelaporan ke PPATK selama tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut: posisi 31 Desember 2023.

Jenis Laporan	Jumlah Laporan
LTKT / CTR: 1. Tarik: 27.940 2. Setor: 34.134	62.074
LTKM / STR	1.051
LTKL / IFTI Incoming	18.753
LTKL / IFTI Outgoing	21.695
LTKL / IFTI Non SWIFT Remittance	1.383.200
Sipesat	1.995.112
Penundaan Transaksi	394
Penghentian Sementara Transaksi	147

b. Pemenuhan permintaan data/informasi dari regulator/aparat penegak hukum selama tahun 2023: 31.220 surat.

c. Khusus untuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) periode Januari 2023 hingga 31 Desember 2023, jumlahnya mencapai 1.051 LTKM/STR yang didominasi oleh 5 (lima) indikasi tindak pidana asal (TPA): TPA Perjudian sebesar 38,82%, TPA Narkotika sebesar 18,65%, TPA Penipuan sebesar 18,36%, TPA Korupsi sebesar 8,66% dan TPA Penggelapan sebesar 5,80%.

Surveillance Sertifikasi ISO 37301:2021 – Sistem Manajemen Kepatuhan

- Sertifikasi SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan merupakan serangkaian proses untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan semua undang-undang dan kode etik yang berlaku. Pada tahun 2022 BSI telah mendapatkan sertifikasi tersebut dengan Ruang lingkup Penerapan APU PPT di BSI.
- Tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan pengawasan (*surveillance*) terhadap ISO 37301:2021, dengan tahapan pelaksanaan *surveillance* sebagai berikut:
  a. Persetujuan Direktur Compliance & Human Capital terkait dengan usulan Pelaksanaan surveillance ISO 37301.
  b. Penunjukan Tim surveillance ISO 37301.
  c. Pengumpulan Dokumen surveillance ISO.
  d. Diskusi Kertas Kerja.
  e. Reviu dan evaluasi Dokumentasi.
  f. Pemaparan Hasil Reviu dan Evaluasi dari Pengumpulan Dokumen.
  g. Training Internal Audit surveillance ISO 37301.
  h. pelaksanaan Audit Internal ISO 37301.
  i. Exit Audit Internal
  j. Tinjauan Manajemen Puncak ke Dewan Pengarah.
  k. Eksternal Audit oleh Chesna.
- Setelah melalui proses audit eksternal pada tanggal 6-7 November 2023 oleh Lembaga Sertifikasi (PT Chesna) secara *offline*, PT Bank Syariah Indonesia Tbk direkomendasikan: Sertifikat Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 dipertahankan.

CHESNA KAN

Surabaya, 29 Desember 2023

Nomor : SERT-284/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Surveillance

Kepada Yth.
Ibu Tribuana Tunggadewi
Directur Compliance & Human Capital / Manajemen Puncak
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
di tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Surat Keputusan Audit Pengawasan no. SERT-246.4/XI/2023 tanggal 13 November 2023 berikut kami informasikan bahwa :

1. Audit Pengawasan/Surveillance Tahun I SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan untuk PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. telah dilaksanakan pada tanggal 06-07 November 2023 dengan lingkup sertifikasi yaitu *Anti-Money Laundering* / Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris GROUP (AMG).
2. Berdasarkan kesimpulan keputusan audit surveillance menyatakan bahwa status sertifikasi **DAPAT DILANJUTKAN** sampai pelaksanaan audit pengawasan/*surveillance* berikutnya.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Chesna

Siti Enggar Paramudita
Manager Sertifikasi

Fungsi Kepatuhan

Bank Syariah Indonesia berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undangan lain, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank. Karena itu, setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko lainnya. Hal itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Upaya yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan adalah bersifat *ex-ante* yang sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Untuk menerapkan fungsi kepatuhan maka perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan Bank dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi Kepatuhan Bank Syariah Indonesia berlandaskan pada POJK No.46/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

DASAR HUKUM

POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN

BSI telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan dikepalai oleh Compliance Group Head yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Hingga 31 Desember 2023, jumlah personel Satuan Kerja Kepatuhan BSI adalah 40 orang, termasuk Compliance Group Head.

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

BSI telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang membawahi jajaran kepatuhan sesuai dengan POJK No.46/ POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini Direktur Kepatuhan dijabat oleh Tribuana Tunggadewi.

Direktur Kepatuhan telah lulus *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh OJK. Hal ini membuktikan bahwa independensinya telah terpenuhi. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Direktur Kepatuhan tidak membawahkan unit kerja operasional maupun layanan bisnis. Jajaran kepatuhan harus bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya. Jajaran kepatuhan harus bebas dari pengaruh atau tekanan unit kerja lain, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest)*, serta harus bertindak objektif dan profesional.

INDEPENDENSI SATUAN KERJA KEPATUHAN

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga Direktur Kepatuhan dengan Anggota Dewan Komisaris, dengan Dewan Pengawas Syariah dan antar anggota Direksi serta dengan Pemegang Saham Pengendali, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direktur Kepatuhan mampu bertindak secara independen.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;

3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2023

Sepanjang tahun buku 2023, Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dengan uraian sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Regulasi Baru
   a. Melakukan sosialisasi regulasi dengan menggunakan media seperti memo dan email Jika terdapat regulasi eksternal baru, maka regulasi tersebut akan diumumkan dan disosialisasikan ke seluruh unit kerja terkait.
   b. Melakukan analisis dan menyusun resume atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (dhi. BI, OJK, OJK-Pasar Modal, LPS atau Peraturan eksternal lainnya yang terkait dengan Perbankan) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head terkait.
   c. Melakukan sosialisasi regulasi secara online/ virtual terhadap unit kerja terkait jika terdapat regulasi/ketentuan yang baru.
   d. Menyampaikan opini kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan *Working Group Policy & Procedure* (WPP).
2. Produk dan Aktivitas Baru Bank
   Melaksanakan pendampingan/klinik atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB) Bank dengan Unit Kerja terkait yang termasuk dalam kriteria PAB ke dalam RBB.
3. *Compliance Testing*
   Melakukan analisa, evaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian, serta pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan Direksi yang terkait dengan pembiayaan maupun non pembiayaan, serta memberikan reviu, opini dan tanggapan kepatuhan terhadap kebijakan yang berjalan dan akad yang akan dipergunakan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.
4. *Compliance Monitoring*
   a. Melaksanakan pengkinian sistem *reminder* kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga, serta penguatan dan *enhancement* Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
   b. Unit Kerja Kepatuhan melakukan monitoring terhadap *prudential banking ratio* diantaranya rasio NPF, BMPD, GWM, PDN, dan KPMM;
   c. Unit Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan seluruh komitmen BSI atas hasil temuan OJK, BPK, Auditor Eksternal dan pihak regulator lainnya.
5. *Good Corporate Governance (GCG)*
   a. Melakukan pemenuhan terhadap ketentuan/ kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
   b. Pemenuhan *Governance Structure* dan GCG *policy* sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Penerapan GCG di BUS dan UUS, POJK 16 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah dan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum .
   c. GCG *Self Assessment* dan Pelaporan Pelaksanaan GCG sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009, POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
   d. Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* di BSI
6. *Syariah Compliance*
   a. Memastikan seluruh produk dan jasa Bank, Pedoman Operasional produk dan jasa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
   b. Melakukan asistensi terhadap penyusunan produk dan aktivitas baru.
   c. Melakukan asistensi terhadap pembiayaan dalam jumlah besar yang menjadi keputusan direksi.
   d. Melakukan pemastian terhadap usulan pengajuan kebijakan dan putusan Direksi terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah yang berlaku.
   e. Pemastian pelaksanaan prinsip syariah dalam tahapan *ex-post* (kerjasama dengan SKAI)

FUNGSI KEPATUHAN

f. Melakukan uji petik ke kantor cabang secara sampling untuk memastikan pelaksanaan aktivitas di kantor cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.

7. Melaksanakan *Compliance Assurance* terhadap aktifitas Operasional Bank. *Compliance assurance* dilaksanakan dalam upaya menjaga agar keputusan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   a. Pembiayaan
      (1) Melakukan reviu kepatuhan pembiayaan, pelaksanaan rapat teknis dan pemberian opini kepatuhan pembiayaan pada Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
      (2) Melakukan kaji ulang kepatuhan terhadap pembiayaan debitur besar yang telah cair dalam rangka memastikan kepatuhan proses pencairan dan pemenuhan perjanjian nasabah dengan Bank.
   b. Jaringan Kantor Bank
      (1) Memastikan persiapan operasional atas pembukaan, pemindahan alamat lokasi, peningkatan status kantor bank telah memenuhi persyaratan melalui penerbitan compliance *checklist* yang ditetapkan regulator
      (2) Memonitoring pemenuhan RBB terkait realisasi pengembangan jaringan kantor
   c. Pengendalian Biaya
      (1) Memastikan kepatuhan pengadaan barang dan jasa (*procurement*) melalui reviu dan opini pelaksanaan rencana pengadaan barang dan jasa
      (2) Memastikan pengeluaran biaya-biaya lain dalam operasional bank yang dapat meningkatkan pengendalian biaya yang efisien
      (3) Melaksanakan kaji ulang kepatuhan dalam rangka pengendalian biaya yang dilakukan melalui uji sampling
   d. Aktifitas Operasional Lain
      (1) Melakukan *compliance testing* terhadap pelaksanaan proses aktifitas operasinal
      (2) Memberikan opini kepatuhan terhadap kegiatan/aktifitas operasional yang memerlukan pendapat dari SKK.

      Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dan operasional bank telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seluruh komitmen kepada pihak lain telah dilaksanakan.

8. Penerapan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang bertujuan untuk menciptakan manajemen kepatuhan yang lebih efektif berdasarkan standar internasional. Sertifikasi ini dilaksanakan pada lingkup proses Anti Money Laundering Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Group (AMG).

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan, mitra kerja dan seluruh *stakeholders*. Kerja sama tersebut didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab.

Kerja sama yang terutama didasarkan pada etika tersebut, termasuk upaya dalam pengendalian gratifikasi. BSI memandang bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas.

Sebagai wujud komitmen terhadap pengendalian gratifikasi, BSI telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang diberi nama "Anti Bribery" dan telah memiliki ketentuan terkait pengendalian gratifikasi yaitu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. Anti Bribery memiliki program kerja untuk mensosialisasikan pemahaman anti gratifikasi guna meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi.

Dengan demikian, dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh *stakeholders* tetap berjalan dengan baik dan beretika. Namun, hubungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan baik internal maupun perundang-undangan.

Sebagai upaya mendukung pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Bank berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Ketentuan Internal dan Surat OJK No. S-11/PB.3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Implementasi Standar Nasional Indonesia (ISO) 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Bank.

Kebijakan tersebut menginstruksikan agar melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah melakukan inisiasi upaya sertifikasi antikorupsi melalui penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dalam Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditunjuk sebagai penanggung jawab. BSN juga melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian PAN dan RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyelesaikan Standar Internasional ISO 37001 tentang Anti-Bribery Management System untuk sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung tata kelola BUMN dan swasta.

Pada tahun 2021 BSI telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Bank juga telah menyusun Kebijakan Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dengan implementasi pengendalian gratifikasi, seluruh jajaran pegawai diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Anti Bribery.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Anti Bribery adalah:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi.
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor.
3. Melakukan *review* atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank Syariah Indonesia dan jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan internal.
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2023 Bank Syariah Indonesia tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2023, Bank Syariah Indonesia menghadapi perkara penting, baik berupa perdata, pidana maupun hubungan industrial. Beberapa di antaranya masih dalam proses penyelesaian dan sisanya sudah dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Rekapitulasi perkara penting yang dihadapi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	263	11	1
2	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/atau *inkracht*	148	6	1
	Jumlah	**411**	**17**	**2**
	TOTAL		430	

Informasi terkait kasus-kasus di pengadilan dengan nilai gugatan materiil atau putusan ≥ Rp10 miliar dan sanksi yang diterima serta pengaruhnya terhadap kelangsungan usaha Bank:

No.	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
1	Perkara gugatan No. 647/ Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara Othniel Wirata Purbowo selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat dan OJK selaku Turut Tergugat terkait dengan penyerahan cek senilai Rp 10 Miliar rupiah kepada Sdr. Oktavianti Budhi Nugroho yang menjabat sebagai kepala cabang BSI KCP Sultan Iskandar Muda namun nasabah belum menerima bukti bilyet deposito atas penempatan data tersebut. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp13.916.000.000 • Immateriil sebesar Rp10.000.000.000	PN menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta. Sampai dengan saat ini belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi terkait permohonan banding tersebut.	Risiko ganti rugi, namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.	BSI telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. Hingga saat ini masih proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.	Membayar ganti rugi.

No.	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
2	Perkara gugatan No. 360/ Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst antara Firhat Esfandiari selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan lelang yang akan dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik nasabah an PT Mitra Kosasih. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp31.645.822.960 • Immateriil sebesar Rp100.000.000.000	PN menyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta. Sampai dengan saat ini belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi terkait permohonan banding tersebut.	Risiko ganti rugi, namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI tidak mengajukan kontra memori Banding karena Penggugat tidak mengajukan Memori Banding. Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.	Membayar ganti rugi
3	Perkara gugatan No. 519/ Pdt.G/2023/PN.Bdg antara Sukmawati selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan perlawanan upaya fiat eksekusi pengadilan yang diajukan oleh BSI. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp350.000.000.000 • Immateriil sebesar Rp500.000.000.000	Masih proses di Pengadilan Negeri.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.		-

Selain perkara hukum di atas, BSI juga menghadapi perkara hubungan industrial yang rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
1	Perkara Hubungan Industrial No. 236/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn antara Hj. Zuraida Hanum (ex pegawai BSI / dahulu BSM) selaku Penggugat melawan Pimpinan Kepala Kantor Cabang Utama Medan PT BSI selaku Tergugat I dan Direktur PT BSI selaku Tergugat II. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp47.464.379 • Immateriil sebesar Rp50.000.000	PHI pada PN Medan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi. Sampai dengan saat ini belum ada putusan dari Mahkamah Agung terkait permohonan kasasi tersebut.	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.	Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi. Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.	Membayar ganti rugi

Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Uraian tentang sanksi administrasi dari otoritas yang dialami BSI selama tahun 2023 merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang laksanakan oleh Bank. Rinciannya disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Kesalahan Pelaporan		
1	Jenis Pelanggaran	Pengenaan Sanksi atas Hasil Pemantauan dan Pengawasan secara *Onsite* Kelompok Informasi (KI) Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	29 September 2023
	Nominal	Rp500.000.000
	Unit Kerja Terkait	-
	Keterangan	Hasil Pemantauan dan Pengawasan secara *Onsite* Kelompok Informasi (KI) Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) terhadap BSI diselenggarakan dalam rentang waktu antara 29 Maret 2023 sd 17 April 2023, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Ketidaksesuaian *logic*, *rules*, dan *mapping* pada Sistem Pelaporan LBUT 2. Kesalahan penginputan, dan 3. Perlunya penyempurnaan mekanisme pada metode Pelaporan LBUT *vide* Surat Bank Indonesia Nomor 25/4/DPKL/Srt/Rhs, 02 Oktober 2023
Jenis Saksi: Keterlambatan Pelaporan		
1	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Koreksi Laporan LBUT
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	10 Januari 2023
	Nominal	Rp18.100.000
	Unit Kerja Terkait	CFA
	Keterangan	Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan LBUT Bulanan Periode: 1. Data 31 Januari 2022 dan 28 Februari 2022 (Kelompok Informasi Sistem Pembayaran) sebanyak 160 (seratus enam puluh) *items* Total Denda Rp10 juta 2. Data 31 Maret 2022 (Kelompok Informasi Sistem Pembayaran) sebanyak 81 (delapan puluh satu) *items*. Total Denda Rp8.1 juta *vide* Surat Bank Indonesia Nomor 25/01/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs, 10 Januari 2023

2	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	11 Agustus 2023
	Nominal	Rp90.000
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek periode Maret 2023 1. Pada tanggal 21 Maret 2023, DJPPR Kemenkeu mengadakan Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sebagai *primary dealer* BSI memberikan fasilitas kepada korporasi untuk titip lelang di BSI 2. Hasil lelang disampaikan oleh trader fixed income pada pukul 13.45WIB, winner detail pukul 14.47-14.14WIB, selanjutnya treasury marketing melakukan input transaksi pada blotter, pembuatan *trade confirmation* dan input transaksi pada sistem OPIC, selesai pukul 17.05WIB 3. Seluruh aktivitas transaksi ini diketahui oleh seluruh Unit Terkait yang tergabung dalam WAG 4. Atas transaksi tersebut, BSI diwajibkan untuk melakukan pelaporan BI Antasena 5. Pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 08.30WIB reminder pelaporan CTP-PLTE telah dilakukan dan mendapat respon dari *Business Support*, namun terdapat keterlambatan penginputan pelaporan dikarenakan PIC pelaporan sedang cuti dan kurangnya koordinasi antar unit
		vide Surat OJK Nomor S-121/PM.12/2023, 11 Agustus 2023

Denda Lainnya		
1	Nominal	Peringatan Tertulis
	Unit Kerja Terkait	CCG
	Keterangan	Ketidaksesuaian Tanggapan Bank atas Pengaduan Nasabah yang dilakukan melalui APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen) periode tahun 2021 s.d. 2022 (dhi. Lampiran Surat OJK terdapat 36 (tiga puluh enam) tiket pengaduan) *vide* Surat OJK Nomor Nomor S-72/EP.121/2023, 10 Januari 2023
2	Jenis Pelanggaran	Ketidakcukupan Jumlah Agunan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga BSI di BI
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	15 Maret 2023
	Nominal	Rp60.042.354
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	Bank tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat setelmen PaSBI (dhi. ketidakcukupan jumlah agunan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga BSI di BI) sehingga menyebabkan batalnya transaksi PaSBI *vide* Surat BI Nomor 25/138/DPM/Srt/B, 15 Maret 2023

SANKSI ADMINISTRASI
OLEH OTORITAS TERKAIT

		Denda Lainnya
3	Jenis Pelanggaran	Ketidakcukupan Jumlah Agunan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga BSI di BI
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	16 Mei 2023
	Nominal	Rp67.013.800
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	Bank tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat setelmen PaSBI (dhi. ketidakcukupan jumlah agunan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga BSI di BI) sehingga menyebabkan batalnya transaksi PaSBI *vide* Surat BI Nomor 25/183/DPM/Srt/B, 16 Mei 2023
4	Jenis Pelanggaran	Tidak menyampaikan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	26 Mei 2023
	Nominal	Rp2.000.000
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	Bank tidak menyampaikan laporan LBUT kelompok informasi laporan risiko dan permodalan harian *vide* Surat BI Nomor 25/75/DPLK-GPLB-PLBP/Srt/B, 26 Mei 2023
5	Jenis Pelanggaran	Tidak menyampaikan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	7 Juli 2023
	Nominal	Rp2.000.000
	Unit Kerja Terkait	CFA
	Keterangan	Bank tidak menyampaikan laporan LBUT kelompok keuangan harian 1. Sistem otomasi LBUT harian yang biasa digunakan rusak dan tidak dapat diakses termasuk akses ke Bank Indonesia 2. Laporan baru dapat dikirim ke Bank Indonesia secara *offline* tanggal 9 Mei 2023 melewati batas waktu pelaporan *vide* Surat Bank Indonesia Nomor 25/124/DPLK-GPLB-PLBP/Srt/B, 07 Juli 2023
6	Jenis Pelanggaran	Tidak menyampaikan laporan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	25 Oktober 2023
	Nominal	Rp1.600.000.000
	Unit Kerja Terkait	-
	Keterangan	Kesalahan pelaporan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terhadap 23.307 debitur dan permintaan informasi debitur tanpa disertai underlying terhadap 31 (tiga puluh satu) informasi debitur *vide* Surat OJK No.S-36/PB.223/2023 Tgl. 25 Oktober 2023

Hubungan Investor

Bank Syariah Indonesia telah membentuk unit kerja *Investor Relation Group* dengan tugas: (i) menangani hubungan, baik dengan regulator maupun para pemegang saham (*Shareholder*) dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) di Perseroan; (ii) menyediakan informasi yang tepat mengenai Perseroan. Informasi yang disediakan terkait dengan strategi, kinerja operasional maupun kinerja keuangan yang disajikan secara reguler dan tersedia di *website* Bank. Kedua hal ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai gambaran penuh atas kinerja Perseroan yang berguna bagi pemegang saham *existing* maupun calon pemegang saham dalam berinvestasi di saham Perseroan maupun bagi para pemangku kepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Adapun tugas dan tanggung jawab *Investor Relation* dalam organisasi Bank meliputi:

1. Menjaga hubungan dengan regulator, pemegang saham serta entitas pasar modal yang di antaranya adalah *fund managers*, *buy-side* & *sell-side analyst*, *stock broker*, perusahaan asuransi, *rating agency* dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal.
2. Membangun strategi komunikasi dan informasi yang menghasilkan *positive awareness* kepada pemegang saham secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan dengan tujuan menjalin hubungan keuangan (*financial relation*) yang erat antara Perseroan dan pemegang saham.
3. Secara proaktif mengkomunikasikan strategi dan kinerja perusahaan guna membentuk valuasi jangka panjang saham Perseroan melalui beberapa kegiatan komunikasi seperti *Quarterly Earnings Call/ Analyst Meeting*, *one on one meetings*, *Annual Public Expose*, *Investor Conference*, *Roadshow* & *Non-Deal Roadshow* ataupun kegiatan komunikasi lainnya baik lokal maupun internasional.
4. Memenuhi kewajiban *feeding* informasi yang akurat serta valid kepada pihak investor dan pihak terkait lainnya dalam rangka menumbuhkan persepsi Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang memiliki reputasi baik, kredibel, dan menarik bagi investor.
5. Melakukan analisa terhadap kondisi pasar beserta pergerakan saham yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka memberikan *update* mengenai valuasi perusahaan terkini.
6. Menjaga pemenuhan seluruh ketentuan pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan & pemenuhan data/informasi yang dibutuhkan investor, regulator serta *stakeholder* lainnya.
7. Meningkatkan literasi/pemahaman mengenai pasar modal kepada seluruh pegawai Perseroan melalui *sharing session* dengan mengundang pembicara yang ahli di bidangnya.

SALURAN KOMUNIKASI

Perseroan telah menyediakan saluran komunikasi bagi investor dan entitas pasar modal untuk dapat terhubung dengan *Investor Relation* dengan detail sebagai berikut:

Investor Relation Group

Gd. The Tower Jl. Gatot Subroto No. 27
Kel. Karet Kuningan
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta 12930 Indonesia
Website Hubungan Investor: ir.bankbsi.co.id
E-mail: investor-relations@bankbsi.co.id

HUBUNGAN INVESTOR

REALISASI KEGIATAN TAHUN BUKU

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham/pemangku kepentingan Perseroan yang telah dilakukan oleh *Investor Relation Group* sepanjang tahun 2023 meliputi:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	*Quarterly Earnings Call*	4	Pemaparan laporan kinerja keuangan Perseroan secara triwulanan kepada investor institusi maupun *Research Analyst*.
2	*Public Expose*	1	Sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perusahaan Tbk., yaitu memberikan paparan mengenai kinerja keuangan Perseroan terkini min. 1x dalam setahun. Sebagaimana tahun sebelumnya, kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia.
3	*Institutional Investor Meeting & Conference*	193	Pengenalan tentang Perseroan dan memberikan *update* mengenai kinerja dan strategi Perseroan yang dilakukan melalui menghadiri Konferensi/*One on One meeting* secara *offline* ataupun *online* kepada eksisting investor dan calon investor potensial yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia.
4	*Retail Investor Engagement*	6	Pengenalan tentang Perseroan berupa *update* kinerja keuangan kepada investor retail dan edukasi kepada pegawai BSI mengenai pasar saham yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas.
5	*Annual Rating Review*	2	Pertemuan dengan *Credit Rating Agencies* untuk *update* peringkat perusahaan.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Bank Syariah Indonesia senantiasa menyampaikan informasi terkini secara akurat berkenaan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan Bank kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan merupakan hasil rangkuman dan pengolahan internal, yang kemudian menjadi sebuah laporan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti regulasi di pasar modal tentang keterbukaan informasi.

Transparansi informasi yang disampaikan oleh Bank berupa posisi, kondisi, kinerja, serta prospek keuangan yang tersedia laporan tahunan, laporan keuangan berkala, laporan interim hingga siaran pers dan pengungkapan informasi lainnya kepada publik. Para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan seluruh materi informasi tersebut untuk menganalisis kinerja Bank.

Seluruh informasi diperbarui secara berkala untuk selanjutnya disampaikan juga kepada Pemegang Saham dan otoritas pasar modal melalui beragam saluran komunikasi. Penyampaian informasi berkala ini merupakan bagian dari upaya menciptakan komunikasi yang efektif dan merata antara Bank dengan seluruh pemangku kepentingan.

SIARAN PERS

Berikut adalah siaran pers yang diterbitkan oleh BSI sepanjang tahun 2023.

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
1	2 Januari 2023	Perkuat Inklusi Keuangan Syariah, BSI Layani Tarik Tunai Tanpa Kartu di Alfamart
2	2 Januari 2023	Buka Tahun 2023, BSI Gelar Istighosah Kubro
3	4 Januari 2023	BSI Bersinergi dengan POLRI Terbitkan KTA Elektronik untuk Personel POLRI di seluruh Indonesia
4	12 Januari 2023	Apresiasi Nasabah Gadai Emas dan Cicil Emas, BSI Berikan Hadiah Program Hujan Emas
5	13 Januari 2023	Kuota Haji Naik, BSI Permudah Pelunasan Calon Jamaah Haji
6	18 Januari 2023	BSI Gandeng UNPAK, Tingkatkan Literasi di Perguruan Tinggi
7	19 Januari 2023	Dorong Islamic Ecosystem, Program Talenta Wirausaha BSI 2023 diperluas Hingga Pesantren
8	20 Januari 2023	BSI Bersinergi dengan TNI AL Perkuat Inklusi Keuangan Syariah
9	25 Januari 2023	BSI Dorong Akselerasi Perekenomian di Aceh dengan Kolaborasi & Sinergi Investasi
10	26 Januari 2023	BSI Berikan Bantuan 600 Juta untuk Korban Banjir di 6 Kabupaten Aceh
11	27 Januari 2023	Kolaborasi BSI & Bank KB Bukopin Syariah Layani Keuangan bagi Para Pensiunan
12	28 Januari 2023	Tingkatkan Literasi, ASBISINDO Optimis Industri Perbankan Syariah Tumbuh Dobel Digit
13	1 Februari-2023	Dua Tahun BSI, Laba Tumbuh Impresif 40,68% Capai 4,26 Triliun
14	3 Februari 2023	BSI Menyasar PBNU, Tingkatkan Literasi Produk Emas Sesuai Syariah
15	7 Februari 2023	Digitalisasi Bisnis Retail, BSI Luncurkan Fitur Pembiayaan via BSI Mobile
16	9 Februari 2023	Tumbuh Seimbang dan Berkelanjutan, BSI Buka Outlet Prioritas di Bintaro
17	10 Februari 2023	Dukung Ketahanan Pangan, Presiden Jokowi Luncurkan Kartu Tani Digital dan KUR BSI di Aceh
18	13 Februari 2023	BSI akan Gelar Global Islamic Finance Summit 2023
19	15 Februari 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Jakarta
20	15 Februari 2023	BSI Tingkatkan Literasi Ekonomi Syariah di Kemenbudristek
21	15 Februari 2023	GIFS 2023, Komitmen Kuat BSI Dorong Kemajuan Ekonomi Syariah di Indonesia
22	16 Februari 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Medan
23	16 Februari 2023	BSI Dorong Optimalisasi Pembiayaan Wholesale, Wamen BUMN Perbankan Syariah Cocok Untuk Pembiayaan Infrastruktur
24	17 Februari 2023	Biaya Dana Rendah, Peluang BSI Tetap Tumbuh & Perluas Pasar di Tengah Tantangan Ekonomi
25	17 Februari 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Yogyakarta
26	17 Februari 2023	BSI, BP Tapera dan UIN Seindonesia Kolaborasi Maksimalkan Penyaluran KPR di Indonesia
27	21 Februari 2023	Keren! BSI Melesat Jadi Bank Terbesar ke-6 di Indonesia
28	22 Februari 2023	BSI Kolaborasi dengan PUPR Dorong Proyek Strategis Nasional
29	23 Februari 2023	BSI akan gelar BSI Charity Concert usung Tema Perjalanan Mahakarya
30	26 Februari 2023	Sukseskan F1 Powerboat Danau Toba, BSI Beri Bantuan Mushola Portable
31	1 Maret 2023	Sukses Kolaborasikan Konser & Charity, BSI Pertegas Langkah Perjalanan Mahakarya
32	2 Maret 2023	Gelar Life With BSI di Medan, BSI Pacu Penyaluran KPR Syariah
33	3 Maret 2023	INACRAFT 2023, BSI Fasilitasi UMKM Naik Kelas
34	3 Maret 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Padang
35	7 Maret 2023	Kembangkan UMKM, BSI Akan Salurkan KUR Lebih dari Rp1 Triliun di Jawa Barat Pada 2023
36	8 Maret 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Makassar
37	8 Maret 2023	Awal Tahun, BSI Area Makassar Dorong Percepatan Bisnis Konsumer
38	8 Maret 2023	Dorong Penyaluran Rumah Subsidi 2023, BSI Hadir di Gema Tapera
39	10 Maret 2023	Jelang Ramadhan, BSI Genjot Pembiayaan Ritel
40	10 Maret 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Palembang

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
41	12 Maret 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Semarang
42	13 Maret 2023	Sahabat Pelajar BSI Maslahat Gelar Tryout Akbaar SNBT 2023 di UI
43	14 Maret 2023	BSI Maslahat dan BSI Salurkan Paket Makanan Untuk Korban Gempa Turki
44	18 Maret 2023	BSI Resmikan Masjid di Bakauheni, Perkuat Kontribusi untuk Pertumbuhan Ekonomi
45	21 Maret 2023	Tingkatkan Penetrasi Produk & Layanan, BSI Jalin Kerjasama dengan Lemhanas
46	27 Maret 2023	Menakar Prospek Saham BRIS, Bersiap Bullish & Cocok Diloleksi Jangka Panjang
47	28 Maret 2023	Perkuat Kontribusi Bagi Masyarakat dan Negara, BSI Salurkan Zakat Lebih dari 173 Miliar
48	29 Maret 2023	BSI dan 3 Bank Syariah Swasta Berkolaborasi Perkuat Inklusi Keuangan Syariah
49	30 Maret 2023	BSI Dorong Anak Muda Merdeka Finansial Lewat Produk Yang Mudah dan Menarik
50	4April 2023	Hadapi Mudik Lebaran, BSI Siapkan Uang Tunai Rp 37,6 Triliun
51	5April 2023	BSI Maslahat dan BSI Bagi Paket Berbuka dan Sahur di 6 Titik Jabodetabek
52	12April 2023	BSI,PP Muhamadiyah, BP Tapera dan Perumnas Berkolaborasi Maksmimalkan Penyaluran KPR Syariah
53	13April 2023	BSI Raih 8 Penghargaan dalam Ajang 12th Infobank Digital Brand Recognition
54	14April 2023	Maknai Ramadhan & Nuzulul Quran, BSI Bagi THR KE 2222 Anak Yatim
55	14April 2023	Selama Ramadhan, BSI Maslahat Menebar Kebaikan Ramadhan 1444 H Total 10 Miliar
56	15April 2023	BSI Dorong Masyarakat Bayar Zakat, Kian Mudah Dengan BSI Mobile
57	18April 2023	BSI Berangkatkan 619 Peserta Mudik Bareng BUMN, Ada khusus Disabilitas
58	27 April-2023	Pembiayaan Tumbuh Lebih dari 20%, Kinerja Keuangan BSI Semakin Solid
59	28April 2023	BSI Maslahat Salurkan Zakat Fitrah dan Paket Lebaran 1444 H untuk Dhuafa
60	3 Mei 2023	Selama Ramadhan, BSI Maslahat Menebar Kebaikan Total 7,9 Miliar
61	9 Mei 2023	Bertahap, Layanan Kantor Cabang dan ATM BSI Kembali Pulih
62	9 Mei 2023	Layanan ATM Antar Bank BSI Kembali Pulih
63	10 Mei 2023	Dirut BSI : Kami Mohon Maaf & Sedang Berusaha Pulihkan Layanan
64	11 Mei 2023	Layanan Cabang, ATM & BSI Mobile Banking BSI Sudah Kembali Normal
65	12 Mei 2023	Pelunasan Biaya 95% Calon Haji Sudah Aman, BSI Jemput Bola Selesaikan Sisa Pelunasan Hari ini
66	13 Mei 2023	Gangguan IT Pulih, BSI Senantiasa Lindungi Data & Dana Nasabah, Perkuat Sistem Keamanan Siber
67	14 Mei 2023	Beroperasi pada akhir pekan, BSI Terima Setoran Tunai Rp 30 Miliar
68	15 Mei 2023	BSI Beri Apresiasi Pengguna QRIS BSI
69	16 Mei 2023	BSI : Data dan Dana Aman, Nasabah Dapat Bertransaksi secara Aman
70	16 Mei 2023	Tangani Dugaan Serangan Siber, BSI dan BSSN Perkuat Sinergi
71	17 Mei -2023	BSI Kelola Penerimaan Pembayaran Digital Pupuk Iskandar Muda, Dorong Penguatan Qanun di Aceh
72	17 Mei 2023	Praktisi Hukum : Dugaan Peretasan BSI Langgar Sejumlah Pasal UU ITE
73	18 Mei 2023	BSI : Alhamdulillah Pelunasan Biaya Haji Sudah Mencapai 100%
74	19 Mei 2023	Pelayanan Terhadap Nasabah Jalan, Khidmat Terhadap Umat Juga Jalan
75	19 Mei 2023	Kepercayaan Nasabah BSI Meningkat, Transaksi DPK Harian BSI Terus Tumbuh
76	19 Mei 2023	BSI Gandeng Askrido Syariah Untuk Perkuat Layanan Kustodian Syariah
77	20 Mei 2023	BSI Gandeng Kemenag Gelar Manasik Akbar, Diikuti 165 Ribu Calon Jamaah Haji Indonesia
78	22 Mei 2023	RUPST BSI Sepakat Perkuat Transformasi Digital dan Culture

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
79	24 Mei 2023	BSI Dorong Pembiayaan Rumah Tumbuh 6,42% Pada Semester I/2023
80	25 Mei 2023	Pricing Lebih Murah, Asbisindo Yakin Bank Syariah Bisa Jadi Pemain Utama di Perbankan Indonesia
81	25 Mei 2023	BSI Gandeng 46 Ribu Masjid Dalam Islamic Ecosystem, DPK Tembus 1,2 Triliun
82	26 Mei 2023	BSI dan BSI Maslahat Resmikan Desa BSI Banten
83	27 Mei 2023	Transaksi Cashless Terus Meningkat, BSI terimakasih atas kepercayaan nasabah
84	29 Mei 2023	BSI Maslahat Lakukan Launching Rumah Tahfidz Bina Santri Indonesia di Semarang
85	30 Mei 2023	BSI,KONI dan PSSI Bersinergi Kembangkan Olahraga Indonesia
86	30 Mei 2023	Diminati Masyarakat, Pembiayaan BSI OTO Tumbuh 64%
87	31 Mei 2023	Mudahnya Berkurban ke BSI Maslahat, Secara Digital Melalui BSI Mobile
88	1 Juni 2023	Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Jateng, BSI Adakan Life With BSI Expo di Solo
89	1 Juni 2023	Kuartal 1/2023, BSI Salurkan Pembiayaan Korporasi 58,1 Triliun, Tumbuh 17,3%
90	2 Juni 2023	BSI Dipercaya Kemenag Salurkan Living Cost Jamaah Haji
91	4 Juni 2023	Life With BSI Expo Solo, BSI Dorong KPR Sejahtera FLPP untuk Amal Usaha Muhamadiyah
92	6 Juni 2023	Terbitkan EBA Syariah Pertama di RI, BSI Dorong Pendalaman Pasar Keuangan & Perkuat Pembiayaan Perumahan
93	7 Juni 2023	Sambut Idul Adha 1444 H, BSI Berikan Hewan Kurban Pada Nasabah Setia
94	7 Juni 2023	Dorong Pertumbuhan Dana Murah, BSI Kelola Payroll Pegawai Kementerian Perhubungan
95	12 Juni 2023	Apresiasi Pecinta Sepak Bola, PSSI Bersama BSI dan Pemkot Surabaya Hadirkan Timnas Indonesia dan Palestina di Tengah Ribuan Masyarakat
96	12 Juni 2023	Tumbuh di Atas Rata-Rata Industri Perbankan Syariah, Pencairan Pembiayaan Kendaraan bermotor BSI Tumbuh 68,7%
97	13 Juni 2023	BSI Dorong Pariwisata Lewat Sepakbola Indonesia x Palestina
98	13 Juni 2023	Dorong Inklusi Keuangan Syariah, BSI Gandeng Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
99	13 Juni 2023	Kinerja BSI Impresif di Jatim, Komitmen Perkuat Pembiayaan UMKM
100	13 Juni 2023	BSI Gandeng Developer Harvest City Untuk Dorong Pembiayaan Perumahan
101	14 Juni 2023	BSI Perkuat Ekosistem Islami di Lingkungan Kementerian Perdagangan
102	16 Juni 2023	BSI Gandeng Universitas Brawijaya, Dorong Literasi dan Inkulusi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi
103	17 Juni 2023	Dukung Gerakan Ekonomi Hijau, BSI Kampanyekan Zero Waste di Yogyakarta
104	18 Juni 2023	BSI Kumpulkan Lebih dari 5000 Sampah Botol Plastik di Jogmar 2023
105	19 Juni 2023	Pencatatan Perdana EBAS-SP di Bursa Efek, BSI : Ini Gebrakan Baru Tumbuhkan Ekonomi Syariah
106	20 Juni 2023	Dorong Kesejahteraan Guru, BSI Sediakan fasilitas FLPP untuk Kepemilikan Perumahan
107	20 Juni 2023	Perkuat Ekosistem Halal, BSI Gandeng 18 LAZNAS
108	22 Juni 2023	Tingkatkan Literasi Keuangan, BSI Gandeng RS Pelabuhan
109	23 Juni 2023	Desa Binaan, BSI Dukung Parabanoa Angkat Potensi Peternakan Sapi Potong
110	24 Juni 2023	Catat Kinerja Baik di Pasar Modal, BRIS Raih Penghargaan
111	26 Juni 2023	Jelang Idul Adha, BSI Gelar Customer Gathering Nasabah Prioritas
112	27 Juni 2023	Libur & Cuti Bersama Idul Adha,BSI Tetap Berikan layanan di 609 Cabang
113	28 Juni 2023	BSI Dorong Ekosistem Keuangan Islam yang Inklusif di Lingkungan Kampus
114	29 Juni 2023	BSI Salurkan 7.112 Hewan Kurban Sehat & Aman Konsumsi ke Seluruh Indonesia
115	7 Juli 2023	BSI Catatkan Kenaikan Transaksi Forex Selama Musim Haji Tahun 2023
116	7 Juli 2023	Transaksi cashlss tumbuh double digit, BSI : Terimakasih Atas Kepercayaan Seluruh Nasabah
117	8 Juli 2023	Kampanyekan Keuangan Berkelanjutan, BSI Luncurkan Gerakan BSI Sustainable Movement
118	10 Juli 2023	BSI Perkuat UMKM Centre, Dorong Kesuksesan Menuju Pasar Global
119	12 Juli 2023	BSI Gencarkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Anak Muda

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
120	13 Juli 2023	BSI Kolaborasi Bareng Putri Ariani, Campaign #LEVELUP Dukung Anak Muda
121	14 Juli 2023	Bisnis Cicil Emas BSI di Bali Tumbuh 280%
122	18 Juli 2023	Dorong Inklusi Keuangan Syariah, BSI Gandeng Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban Kepri
123	18 Juli 2023	Gandeng Pelindo Terminal Petikemas, BSI Dukung Digitalisasi Layanan di Sektor Maritim
124	19 Juli 2023	BSI Gandeng Garuda Indonesia Hadirkan Nilai Tambah Layanan Haji Indonesia
125	20 Juli 2023	BSI Optimalisasi Potensi Ekonomi& Layanan Keuangan di 18 Ribu Pesantren
126	21 Juli 2023	Dorong Pariwisata Religi, BSI Jadikan Masjid Pusat Kegiatan Ummat
127	23 Juli 2023	Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Jateng, BSI Adakan Fun Run Life With BSI
128	25 Juli 2023	BSI Pilih Surabaya sebagai Kota Pengembangan Talenta Wirausaha
129	26 Juli 2023	Jadi Mitra Investasi Wakaf Uang Pada Sukuk Negara, BSI Siap Pasarkan Seri SWR 004
130	27 Juli 2023	Workshop Talenta Wirausaha Di Surabaya, BSI Persiapkan Santri Untuk Jadi Muslimpreneur Masa Depan
131	27 Juli 2023	Peringati Hari Anak Nasional, BSI Maslahat dan BSI Dukung Pemeriksaan Karies Gigi di Tebet
132	29 Juli 2023	Dukung Anak Muda Wujudkan Mimpi, BSI dan Putri Ariani Kampanyekan #LEVELUP MIMPIMU di Kota Solo
133	30 Juli 2023	BSI Pilih Lokananta Solo, Untuk Kolaborasi Dengan Putri Ariani & Dukung Talenta Muda
134	2 Agustus 2023	BSI Dorong Ekspansi Pembiayaan Korporasi di Aceh bersama Toyota Astra Finance Syariah
135	3 Agustus 2023	Workshop Talenta Wirausaha di Palembang, BSI Siap Cetak Anak Muda Buka Lapangan Kerja Baru
136	5 Agustus 2023	Pimpin Layanan Haji dan Umrah di Indonesia, BSI Luncurkan Hajj dan Umrah Concierge Pertama di Indonesia
137	6 Agustus 2023	Peringati Milad Pertama, BSI Maslahat Selenggarakan Fun Walk di Jakarta
138	8 Agustus 2023	Gandeng DJKN, BSI Tawarkan Koleksi Asset Menarik untuk Masyarakat
139	8 Agustus 2023	BSI Masih Mengkaji Rencana Terkait UUS BTN
140	9 Agustus 2023	Dongkrak Bisnis UMKM, BSI Luncurkan Pembiayaan BSI Usaha Mikro
141	9 Agustus 2023	Dorong Optimalisasi Layanan di Aceh, BSI Luncurkan ATM VISA & Mastercard
142	9 Agustus 2023	Workshop Talenta Wirausaha di Makassar, BSI Siap Cetak Anak Muda Buka Lapangan Kerja Baru
143	10 Agustus 2023	Rangkul Gakeslab Indonesia, BSI Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah di Indonesia di Sektor Kesehatan
144	10 Agustus 2023	Peringati Milad ke-1, BSI Maslahat Bahagiakan 1111 Yatim Dhuafa
145	11 Agustus 2023	BSI Terus Perkuat Literasi Keuangan, Dekatkan Perbankan Syariah ke Mahasiswa
146	14 Agustus 2023	BSI Bersama Relawan Bakti BUMN Siap Tuntaskan Misi Sosial di Meunasah Asan Aceh Timur
147	15 Agustus 2023	BSI Mobile Makin Diminati, Hingga Mei Transaksi Capai 140 Juta
148	15 Agustus 2023	BSI Maslahat Bersama PKBM Madani Al Washiyyah Bekerjasama Jalankan Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dhuafa
149	16 Agustus 2023	BSI Gandeng JMTO, Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Dalam Negeri
150	16 Agustus 2023	BSI Sinergi dengan BWI dan KUA, Akselerasi Potensi Wakaf Tunai Pengantin dalam Ekosistem Keuangan Islam
151	17 Agustus 2023	BSI & Relawan Bakti BUMN Dorong Kualitas Pendidikan Hingga Ekonomi Masyarakat Aceh
152	18 Agustus 2023	Dorong Masyarakat Punya Rumah, BSI Telah Salurkan 57 Ribu Rumah Subsidi
153	20 Agustus 2023	BSI Kolaborasi dengan Putri Ariani, Ajak Masyarakat untuk Sehat Jasmani & Finansial di Car Free Day Bundaran HI

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
154	21 Agustus 2023	BSI Maslahat dan BSI Serahkan Bantuan Mobil Operasional ke Pesantren Cendekia Amanah
155	22 Agustus 2023	Optimalisasi Zakat Muqayyad Donatur, BSI Maslahat Salurkan Melalui Program Klaster Peternakan Domba Garut di Bandung
156	25 Agustus 2023	Terdepan di Sektor Bank Syariah, BSI Sabet Berbagai Penghargaan
157	27 Agustus 2023	BSI Gandeng PERSIS Tingkatkan Literasi dan Inklusi Ekosistem Keuangan Syariah
158	28 Agustus 2023	Dorong Pembiayaan Kendaraan, BSI Sasar 6 Kota Besar di Indonesia
159	29 Agsutus 2023	BSI Maslahat dan BSI Berbagi Kado Kemerdekaan Bersama Legiun Veteran Seluruh Indonesia
160	29 Agustus 2023	BSI Perkuat Penetrasi Produk Tabungan, Dorong Pertumbuhan Dana Murah
161	31 Agustus 2023	Inovasi Untuk Negeri Bawa BSI Raih Penghargaan
162	31 Agustus 2023	Gandeng FEB UI Perkuat Literasi Keuangan Syariah, BSI Targetkan 20 Juta Nasabah
163	1 September 2023	Bangun Ekonomi Desa di 10 Provinsi, BSI Raih Apresiasi Indonesia Award 2023
164	5 September 2023	Harpelnas 2023, BSI Berikan Ultimate Service & Kembangkan Digital Branch
165	6 September 2023	Wujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan, Perbankan Syariah Perkuat Implementasi GRC Terintegrasi
166	7 September 2023	BSI Perkuat Pertumbuhan & Pengembangan Bisnis Ekosistem Haji dan Umrah
167	13 September 2023	Sinergi BSI & BPJS Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Negara
168	14 September 2023	BSI dan Program Bakti Sosial BUMN Dukung Usaha Masyarakat Pedesaan di Yogyakarta
169	16 September 2023	Jembatani Kebutuhan Nasabah, BSI Buka Layanan Akhir Pekan Selama September
170	19 September 2023	Pembiayaan Terus Tumbuh, Laba BSI Melesat 32,41%
171	20 September 2023	BSI Dorong Literasi Syariah di Islamic Book Fair 2023
172	20 September 2023	BSI Perkuat Dana Murah, Tabungan BSI Masuk di Top 5 Nasional
173	20 September 2023	Pimpin Pertumbuhan Laba di Industri, BSI:Hasil Kinerja, Visi Tumbuh Sehat & Sustain
174	22 September 2023	BSI Perluas Sinergi untuk Dorong Pertumbuhan Ekosistem ZISWAF
175	22 September 2023	Buka Weekend Banking di 170 Cabang, BSI Tingkatkan Layanan Setoran Tunai
176	26 September 2023	Komitmen Dukung Ekonomi Hijau, BSI Duduki Peringkat 3 ESG Rating Global Islamic Bank
177	29 September 2023	BSI Maslahat dan BSI Lakukan Launching Desa BSI Klaster Pertanian di Desa Purwabakti Pamijahan Bogor
178	7 Oktober 2023	Sambut Bulan Inklusi Keuangan 2023, BSI Buka Weekend Banking di 342 Cabang
179	12 Oktober 2023	BSI Dukung Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Lewat Talenta Wirausaha BSI dan Aceh Muslimpreneur
180	13 Oktober 2023	BSI Maslahat dan BSI Adakan Sosialisasi Beasiswa BSI Scholarship
181	13 Oktober 2023	Dukung Ketahanan Pangan, BSI Salurkan Pembiayaan Sindikasi Rp 900 Miliar untuk proyek pabrik pusri IIIB
182	16 Oktober 2023	Raih The Indonesia Customer Experience of the year, BSI terus inovasi & perkuat layanan nasabah
183	17 Oktober 2023	BSI & IFG Berkolaborasi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
184	19 Oktober 2023	Tingkatkan Literasi Syariah, BSI Ajak Mahasiswa Jadikan Bank Syariah Sebagai Pilihan Dunia Kerja
185	20 Oktober 2023	BSI Dorong Kemajuan Industri Fesyen di Indonesia Lewat JMFW 2024
186	20 Oktober 2023	BSI Maslahat dan BSI Beri Bantuan Air Bersih Bagi Warga Tangerang Selatan
187	23 Oktober 2023	Berikan Layanan Terbaik Melalui Transformasi Digital, BSI Raih Penghargaan Internasional
188	24 Oktober 2023	Terus Pacu Inklusi Keuangan Syariah, BSI Sinergi dengan Semen Padang
189	25 Oktober 2023	Dukung Indonesia Bebas Emisi Karbon, BSI Fokus di 5 Sektor Utama
190	25 Oktober 2023	Dorong Inklusi Pasar modal syariah, BSI Luncurkan 6 Produk Reksa Dana Syariah
191	26 Oktober 2023	BSI Perluas Layanan Haji dan Umroh, Targetkan 200 Ribu Kartu Debit Mabrur
192	26 Oktober 2023	Hadapi Tantangan Era Digital, Komut BSI:Industri Keuangan Syariah Perlu Konsolidasi
193	27 Oktober 2023	Dukung Bulan Pembiayaan Syariah, BSI Optimalkan Sinergi Bersama 15 Lembaga Keuangan

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
194	28 Oktober 2023	Hujan Rezeki BSI Mobile, Tingkatkan Inklusi Keuangan Transaksi Syariah Berhadiah Mobil Sport
195	29 Oktober 2023	BSI Terus Inisiasi Langkah Hadapi Risiko- Risiko Baru di Era Digitalisasi
196	30 Oktober 2023	BSI Maslahat Galang Dana Untuk Solidaritas Kemanusiaan Palestina
197	31 Oktober 2023	Market Share Perbankan Syariah Terus Meningkat, Laba BSI Tumbuh 31%
198	2 November 2023	Indonesia Resmi Masuk Financial Action Task Force (FATF), BSI Terpilih Sebagai Perwakilan Tunggal Perbankan Syariah
199	4 November 2023	Berikan Layanan Prima, 462 Cabang BSI Siap Layani Nasabah di Akhir Pekan Sepanjang November
200	4 November 2023	Erick Thohir Perkuat Upaya UMKM Surabaya, Capai Pasar Global Dengan Pembiayaan UMKM
201	5 November 2023	Perkuat Ekosistem Ekonomi Islam, BSI Pacu Inklusi Keuangan Syariah
202	6 November 2023	Perkuat Inklusi Keuangan Syariah di Sulteng, BSI Buka KCP Palu RE Martadinata
203	8 November 2023	Dorong Anak-Anak Muda Punya Rumah, BSI Sasar Daerah Sub Urban
204	9 November 2023	BSI Tower, Usung Konsep Green Building dan Diproyeksikan Jadi Financial Centre di Indonesia
205	13 November 2023	BSI Maslahat Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Palestina
206	15 November 2023	BSI Sinergi dengan Pesantren, Perkuat Ekosistem Islam dan Pengembangan Ekonomi Syariah di Aceh
207	15 November 2023	Topping Off Green Building BSI di Aceh Rampung & Akan Diresmikan Awal Tahun 2024
208	16 November 2023	BSI Perkuat Ekosistem ZISWAF di Aceh, Sinergi dengan Baitul Mal Aceh
209	16 November 2023	BSI Dukung PERSIRAJA Untuk Promosi ke Divisi 1 Liga Indonesia Muslim Depan
210	17 November 2023	Gandeng Mabes TNI, BSI Terus Dorong Inklusi Keuangan Syariah di Tanah Air
211	17 November 2023	BSI Optimis Tumbuh Positif pada 2024, Faktor Fundamental Jadi Pendorong Utama
212	21 November 2023	BSI Pimpin Ekspansi Perbankan Syariah di Indonesia di Tengah Pertumbuhan Global
213	24 November 2023	BSI Gelar "Jumat Berkah" untuk Ummat, Masjid IPB Jadi Lokasi Pertama
214	25 November 2023	Dukung Indonesia Net Zero Emission, BSI Lakukan Gerakan Hijau Secara Menyeluruh
215	27 November 2023	Luncurkan Deposito Wakaf, BSI Gali Potensi Wakaf Uang di Indonesia
216	29 November 2023	BSI Dorong Pertumbuhan Bisnis di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
217	30 November 2023	BSI Peringati Hari Disabilitas International 2023 bersama 1000 Pelatih Al-Quran Braille
218	30 November 2023	BSI Optimalkan Kantor Cabang Dubai, Perkuat Kemitraan Strategis dengan Uni Emirat Arab
219	3 Desember 2023	BSI Tingkatkan Pembiayaan Hijau di Sektor Properti, Gandeng 3.300 Developer
220	4 Desember 2023	Gandeng Alfamidi, Nasabah BSI Kini Dapat Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM Lewat BSI Mobile
221	4 Desember 2023	Peringati Hari Disabilitas Internasional, BSI Perkuat Layanan Inklusif Lewat Cabang Ramah Disabilitas
222	7 Desember 2023	BSI Perkuat Bisnis Payroll
223	8 Desember 2023	BSI Bersinergi Meluaskan Maslahat Melalui Peresmian Kantor Baru BSI Maslahat
223	8 Desember 2023	BSI Bersinergi Meluaskan Maslahat Melalui Peresmian Kantor Baru BSI Maslahat
224	9 Desember 2023	BSI dan Garuda Indonesia Berkolaborasi di GUTF Memperkuat Ekosistem Haji dan Umrah
225	12 Desember 2023	Jalin Kemitraan dengan 221 Ribu Merchant QRIS, BSI Dorong Kemitraan Digitalisasi Pembayarn
226	13 Desember 2023	BSI Dorong Ekosistem Wealth Management Syariah, Raih Penghargaan Internasional
227	13 Desember 2023	BSI Jadi Bank Syariah Pertama Penyedia Layanan RDN Online
228	14 Desember 2023	Ramaikan Pasar Modal Syariah, Asset Under Custody BSI Melesat 75 Kali
229	15 Desember 2023	Komitmen Inklusi Keuangan, BSI Meraih 3 Penghargaan Bergengsi dari Kemenkeu

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
230	15 Desember 2023	BSI Dorong Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Layanan Perbankan di Labuan Bajo
231	18 Desember 2023	Tutup Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Subordinasi BSI Oversubscribed 1,75 Kali
232	18 Desember 2023	BSI Maslahat Selenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Pendamping UMKM Bagi Penyuluh KUA Menteng
233	19 Desember 2023	BSI Lakukan Optimalisasi Kantor Cabang Untuk Perkuat Layanan
234	20 Desember 2023	Sambut momen libur akhir tahun, BSI Siapkan Uang Tunai 12,2 Triliun
235	20 Desember 2023	BSI Maslahat dan BSI Selenggarakan Training Intensif Calon Khotib Muda Indonesia Batch 2
236	20 Desember 2023	BSI Tegaskan Komitmen Penerapan GCG Pada Tata Kelola Perusahaan
237	22 Desember 2023	BSI Maslahat Laksanakan Pelatihan Untuk Pelaku UMKM LKMS Bank Wakaf Mikro di Kalsel
238	28 Desember 2023	Akselerasi Digitalisasi di Pesantren, BSI dan PBNU Luncurkan Kamus Digital
239	28 Desember 2023	Pastikan Pelayanan Optimal, Top Manajemen BSI Tinjau Layanan Akhir Tahun dan Tahun Baru di Cabang
240	29 Desember 2023	Dukung Pembiayaan KPR Subsidi Bagi MBR, BSI Salurkan Pembiayaan Sebanyak 4360 unit rumah sepanjang tahun 2023
241	31 Desember 2023	Tutup tahun 2023 dan sambut tahun 2024, BSI gelar sujud syukur dan zikir bersama

ANALYST MEETING

No.	Nama Kegiatan	Waktu	Tempat	Topik Pembahasan
1	*Quarterly Earning Calls*	6 Februari 2023	Jakarta	Pemaparan Kinerja Tahun 2022
2	*Quarterly Earning Calls*	27 April 2023	Jakarta	Pemaparan Kinerja Triwulan I-2023
3	*Quarterly Earning Calls*	19 September 2023	Jakarta	Pemaparan Kinerja Triwulan II-2023
4	*Quarterly Earning Calls*	31 Oktober 2023	Jakarta	Pemaparan Kinerja Triwulan III-2023

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
1	10/01/23	03/021-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Desember 2022
2	10/01/23	03/022-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk
3	10/01/23	03/019-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Desember 2022
4	16/01/23	03/042-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
5	27/01/23	03/149-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Akuntan Independen Atas Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") PT Bank Syariah Indonesia Tbk
6	31/01/23	03/192-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Audit Perseroan
7	31/01/23	03/179-3/DIR-CFA	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2022 (Audited)
8	01/02/23	03/179-3/DIR-CFA	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Keuangan Audited Posisi 31 Desember 2022
9	02/02/23	02/098-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
10	02/02/23	03/097-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk
11	09/02/23	03/121-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Januari 2023
12	09/02/23	03/149-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Hasil Pemeringkatan Pemeringkatan Tahunan
13	09/02/23	03/122-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Januari 2023.
14	09/02/23	03/154-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Hery Gunardi)
15	09/02/23	03/155-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Ngatari)
16	09/02/23	03/156-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Ade Cahyo Nugroho)
17	09/02/23	03/157-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Achmad Syafii)
18	09/02/23	03/158-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Tiwul Widyastuti)
19	09/02/23	03/159-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Tribuana Tunggadewi)
20	09/02/23	03/160-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Suyanto)
21	09/02/23	03/161-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Masduki Baidlowi)
22	09/02/23	03/162-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Sutanto)
23	09/02/23	03/163-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Imam Budi Sarjito)
24	09/02/23	03/164-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Anton Sukarna)
25	08/03/23	03/236-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 28 Februari 2023
26	08/03/23	03/233-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 28 Februari 2023
27	05/04/23	03/336-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Maret 2023
28	05/04/23	03/335-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Maret 2023
29	05/04/23	03/609-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
30	13/04/23	03/374-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
31	17/04/23	03./374-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
33	28/04/23	03/684-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2022
34	28/04/23	03/689-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Laporan Berkelanjutan Tahun 2022

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
35	28/04/23	03/429-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
36	02/05/23	03/436-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
37	02/05/23	03/437-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
38	03/05/23	03/452-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
39	03/05/23	03/455-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & Bursa Efek Indonesia	Laporan Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
40	09/05/23	03/460-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 April 2023
41	09/05/23	03/461-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 30 April 2023.
42	10/05/23	03/451-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Press Release Dirut BSI : Kami Mohon Maaf dan Sedang Berusaha Pulihkan Layanan
43	10/05/23	03/450-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Press Release Bertahap, Layanan Kantor Cabang dan ATM BSI Kembali Pulih, dan Layanan ATM Antar Bank BSI Kembali Pulih
44	11/05/23	03/453-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Press Release Layanan Cabang, ATM & Mobile Banking BSI Sudah Kembali Normal
45	16/05/23	03/834-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penjelasan Atas Keterbukaan Informasi
46	17/05/23	03/456-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Sutanto)
47	17/05/23	03/455--3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
50	24/05/23	03/473a--3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai (KOREKSI) -24052023
51	24/05/23	03/473--3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 24052023
52	24/05/23	03/473-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
53	25/05/23	03/477-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
54	09/06/23	03/517-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Mei 2023
55	09/06/23	03/516-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Mei 2023
56	16/06/23	03/558-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
57	26/06/23	03/582-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa
58	10/07/23	03/628-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Hutang Valas
59	10/07/23	03/609-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 Juni 2023
60	17/07/23	03/1076-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
61	17/07/23	03/1072-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Audit
62	17/07/23	03/1072-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
63	21/07/23	03/676-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2023 yang Diaudit
64	09/08/23	03-733-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Juli 2023
65	09/08/23	03/736-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang /Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Juli 2023.
66	18/08/23	03/772-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Suyanto)
67	18/08/23	03/770-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Masduki Baidlowi)
68	18/08/23	03/778-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Imam Budi Sarjito)
69	18/08/23	03/775-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Sutanto)
70	18/08/23	03/776-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Hery Gunardi)
71	18/08/23	03/768-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Bob Tyasika Ananta)
72	18/08/23	03/773-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Ngatari)
73	18/08/23	03/769-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Zaidan Novari)
74	18/08/23	03/777-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Moh. Adib)
75	18/08/23	03/779-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Anton Sukarna)
76	18/08/23	03/771-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Tribuana Tunggadewi)
77	18/08/23	03/774-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Ade Cahyo Nugroho)
78	07/09/23	03/839-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa
79	08/09/23	03/836-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Agustus 2023
80	08/09/23	03/833-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 31 Agustus 2023
81	19/09/23	03/878-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim (Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 (Audited))
82	25/09/23	03/851-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk
83	10/10/23	03/923-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 30 September 2023
84	10/10/23	03/924-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 30 September 2023

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
85	25/10/23	03/955-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Kesiapan Dana Untuk Pelunasan Sukuk Mudharabah Subordinasi I Bank Syariah Indonesia (Dahulu Bank BRISyariah) Tahun 2016
86	01/11/23	03/1001-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Form Informasi Daftar Efek Syariah (DES)
87	01/11/23	03/999-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim (Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023)
88	08/11/23	03/1017-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Pengunduran Diri Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk
89	08/11/23	03/1013-3/CSG	Bursa Efek Indonesia cc. OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
90	08/11/23	03/1015-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Oktober 2023.
91	15/11/23	03/1038-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan
92	20/11/23	03/1044-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia	Pelunasan Sukuk Mudharabah Subordinasi I Bank Syariah Indonesia (Dahulu Bank BRISyariah) Tahun 2016
93	24/11/23	03/1058-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan
94	04/12/23	03/1088-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Hasil Public Expose Tahunan
95	08/12/23	03/1091-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
96	08/12/23	03/1097-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Hutang Valuta Asing per 30 November 2023.
97	14/12/23	03/1836-3/DIR-CFA	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Tanggapan Penelaahan Atas Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tengah Tahunan 2023
98	19/12/23	03/1177-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi dan Transaksi Afiliasi

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi

Sesuai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 20/2002, tindakan korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang/pihak lain melalui perbuatan melanggar hukum.

Gratifikasi merupakan salah satu tindakan yang dilarang yang dapat mengarahkan seseorang melakukan pelanggaran *fraud* dan korupsi. Untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut, BSI telah memiliki ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terus disosialisasikan di lingkungan organisasi Bank.

Dengan implementasi pengendalian gratifikasi, maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang berada di bawah koordinasi Unit Kerja Compliance.

PROSEDUR MENGATASI PRAKTIK KORUPSI

Prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa, *fraud* suap dan/atau gratifikasi, mencakup:
1. Jajaran Bank wajib melakukan penolakan atas gratifikasi pada kesempatan pertama yang terkait dengan jabatan penerima atau benturan kepentingan.
2. Apabila penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan kepada unit Anti Bribery.
3. Apabila gratifikasi tersebut dikembalikan kepada pemberi maka penerima wajib melaporkan pengembalian tersebut dan disertai dengan bukti otentik pengembalian gratifikasi, antara lain berita acara serah terima pengembalian barang gratifikasi yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/transfer jika penerimaan dalam bentuk uang.
4. Setiap penolakan/penerimaan Gratifikasi, maka penerima gratifikasi wajib mengisi formulir gratifikasi secara lengkap dan benar, serta melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi disertai formulir yang telah ditandatangani dan dokumen pendukung melalui *e-mail* dengan alamat antibribery@bankbsi.co.id dan subjek "Pelaporan Gratifikasi" atau melalui *whaatsapp* dengan nomor 08118451451.
5. Penyampaian pelaporan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pelapor.
6. Unit Pengendali Gratifikasi melakukan reviu atas pelaporan penerimaan gratifikasi dari Pelapor dan memutuskan jenis gratifikasi tersebut (menjadi kelolaan Bank atau dapat dimiliki oleh Pelapor) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan penerimaan gratifikasi dan dokumen pendukung lengkap diterima.
7. Pelapor wajib menyerahkan barang/uang yang telah ditetapkan menjadi milik Bank kepada Anti Bribery paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keluarnya Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi.

PROGRAM SOSIALISASI

Pelaksanaan sosialisasi Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman organisasi Bank terhadap Pengendalian Gratifikasi sehingga tercipta budaya *Awareness Anti Fraud* yang mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. Pada tahun 2023, program yang telah direalisasikan adalah:
1. Program *Risk Awareness* dan *Anti Fraud Campaign* kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi *online* dan *offline*, *e-mail blast*, desktop komputer, poster, info grafis, video, media sosial dan *monitoring onsite*. Rincian pelaksanaan kegiatannya adalah:
   a. Sosialisasi konten/poster anti gratifikasi bekerja sama dengan Corporate Secretary & Communication Group (CSG) melalui *e-mail blast*, *whatsapp blast*, media sosial dan *website* perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	Media
1	Poster *awareness* kepada seluruh pegawai BSI	18 Januari 2023	Email Blast
2	Poster *awareness* melalui "Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan	7 Maret 2023	Email Blast
3	Poster *awareness* "Rayakan Idul Fitri 1444H dengan Hati yang Suci dan Hindari Gratifikasi" yang disampaikan kepada Internal BSI melalui	14 April 2023	Email BSI, *broadcast message* WAG
4	Poster *awareness* "Larangan Pemberian Hadiah kepada seluruh Jajaran PT BSI Dalam rangka hari Raya Idul Fitri 1444H" kepada pihak eksternal	14 April 2023	Website official BSI, media sosial official BSI
5	Poster *awareness* terkait dengan Larangan Penerimaan danPemberiaan Graifikasi terkait Hari Raya Idul Adha 1444H kepada pihak internal BSI	29 Juni 2023	Desktop pegawai
6	Poster Larangan penerimaan dan pemberian gratifikasi dalam rangka Idul Adha 1444H kepada pihak eksternal	26 Juni 2023	media official BSI dhi. facebook, ig, twitter, website BSI
7	*Compliance Awareness* (CA) melalui Infografis terkait "Pemberian Kepada Pihak Eksternal agar Tidak Berpotensi Gratifikasi"	31 Agustus 2023	Email Blast
8	*Awareness* melalui Infografis Anti Bribery Sept 2023- Vol.03.09.awrs "Bolehkah Menerima Honor atas Tugas Kedinasan?";	19 September 2023	Email Blast
9	Poster *awareness* infografis Anti Bribery Okt 2023- Vol.03.09.awrs "Bolehkah Menerima Honor atas Tugas Kedinasan?"	17 OKtober 2023	Desktop pegawai
10	Poster *awareness* Infografis Anti Bribery Okt 2023- Vol.03.10. awrs01 "Pengumuman terkait Channel Pelaporan Gratifikasi" melalui tgl	23 Oktober 2023	Email Blast, Broadcast message Teams Group
11	Poster *awareness* Infografis Anti Bribery Okt 2023- Vol.03.10. awrs02 "Bolehkah Menerima Hadiah dari Perayaan"	27 Oktober 2023	Email Blast, Broadcast message Teams Group
12	Poster Awareness Anti Bribery Nov 2023- Vol.03.11.awrs.01 "Bolehkah Menerima Hadiah dari Rekan Kerja?"	22 November 2023	Email Blast, Broadcast message Teams Group
13	Poster Awareness dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2023; "Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju"	9 Desember 2023	Email Blast, Broadcast message Teams Group
14	Poster Imbauan Larangan Pemberian Hadiah/Parsel/ Bingkisan kepada Seluruh Jajaran PT bank Syariah Indonesia kepada pihak eksternal (nasabah/ stakeholders/ rekanan/ mitra kerja/pihak lainnya	22 Desember 2023	Media official BSI, dhi. website, media sosial (instagram, facebook, twitter)
15	Poster Awareness terkait Imbauan bagi Pegawai pada Hari Natal dan Tahun Baru 2024	22 Desember 2023	Email Blast, Broadcast message Teams Group

b. Sosialisasi konten anti gratifikasi melalui Nota, Surat dan Aplikasi pembelajaran *online* dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	Media
1	Pembelajaran Via digital learning materi "Temukan gratifikasi disekitarmu" melalui portal LMS (Learning Management System)	13 Maret 2023	Portal LMS (*Learning Management System*)
2	Surat Direktur CHC No. 03/658-3/DIR-CPG ke Regional Office I s.d X mengenai larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1444H	14 April 2023	Surat
3	Nota No. 03/082-2/DIR-CHC ke All Group mengenai larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1444H	14 April 2023	Nota
4	Nota No. 03/0113-2/DIR-CHC ke all Group perihal Larangan Penerimaan danPemberiaan Graifikasi terkait Hari Raya Idul Adha 1444H	12 Juni 2023	Nota

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI

No.	Kegiatan	Tanggal	Media
5	Surat No.03/949-3/DIR-CPG to all Region perihal Larangan Penerimaan danPemberiaan Graifikasi terkait Hari Raya Idul Adha 1444H	12 Juni 2023	Surat
6	Nota kepada seluruh Group dari Direktur Kepatuhan terkait Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Natal dan Tahun Baru 2024	18 Desember 2023	Penyampaian Nota Direktur
7	Surat kepada seluruh Region dari Direktur Kepatuhan terkait Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Natal dan Tahun Baru 2024	18 Desember 2023	Penyampaian Surat Direktur

2. Sosialisasi Anti Gratifikasi (*Laa Risywah*) kepada seluruh pegawai Bank untuk mengimplementasikan *Code of Conduct* dan komitmen *Good Corporate Governance* (GCG) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sosialisasi Gratifikasi melalui Tatap muka baik media *Offline* dan *Online*:
      1. Pihak Internal
         - Sosialisasi Anti Gratifikasi: Area Jakarta Thamrin
         - *Talkshow* dengan KPK: Sosialisasi Gratifikasi dan Penyerahan Penghargaan kepada Region atas Laporan Gratifikasi Terbanyak dan Terbesar
         - Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pegawai Regional Office V Jakarta II
         - *Knowledge Sharing* Forum (KSF): Pengendalian Gratifikasi bersama KPK kepada seluruh Pegawai BSI "Merdeka dari Gratifikasi"
         - Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi: *Customer Care Group* (CCG)
         - Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi:
           1) Priority Banking Manager
           2) Area Retail Funding & Transaction Manager
           3) Priority Banking Relationship Manager
           4) Priority Banking Representative
         - Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi ke SME & Micro Risk Group
      2. Pihak Eksternal
         - Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh Mitra Kerja dan/atau Rekanan BSI University.
         - *Partner Gathering* dengan seluruh rekanan Notaris, PPAT, KAP, KJPP dan Asuransi dibawah koordinasi unit kerja Policy and Prosedur Group dengan mengundang KPK sebagai narasumber
         - *Vendor Gathering* dengan seluruh rekanan dan vendor IT dan Non-IT dibawah koordinasi unit kerja Procurement and Fix Asset Group dengan mengundang KPK sebagai narasumber
         - Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Tenaga Pemasar Bancaasurance Syariah PT BNI Life
         - Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Sharia Leaders Bancaasurance Syariah PT AXA Mandiri Financial Services (AMFC)
         - Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Tenaga Pemasar Bancaasurance Syariah PT AXA Mandiri Financial Services (AMFC)
   b. Kunjungan (*Onsite*) ke Unit kerja dalam rangka monitoring atas sosialisasi yang dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:
      - Kunjungan Monitoring dan evaluasi ke Kantor Regional IV Jakarta I, dan Kantor Regional V Jakarta II
      - Kunjungan Monitoring dan Evaluasi ke Kantor Area Kelapa Gading dan Area Pondok Indah
      - Kunjungan Monitoring dan Evaluasi ke-10 Kantor Cabang BSI se-Jabodetabek
      - Kunjungan Monitoring dan Evaluasi ke-25 Kantor Cabang Pembantu se-Jabodetabek

REALISASI KEGIATAN TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, BSI telah melaksanakan sejumlah kegiatan berkenaan dengan penerapan kebijakan anti korupsi di lingkungan Bank. Rincian program/kegiatan serta realisasinya disajikan melalui tabel di bawah ini:

<table>
<tr><th>Program/Kegiatan</th><th>Realisasi/Hasil</th></tr>
<tr><td>Knowledge Sharing Forum (KSF) dengan tema “Merdeka dari Gratifikasi”</td><td>Sosialisasi disampaikan kepada seluruh jajaran Bank (Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, SEVP, Kepala Unit Kerja dan seluruh Pegawai) dengan mengundang KPK sebagai Narasumber pada tanggal 23 Agustus 2023</td></tr>
<tr><td>Sosialisasi Anti Gratifikasi kepada seluruh Vendor, Mitra kerja, rekanan dan Pihak ketiga lainnya (Notaris, Maskapai Asuransi, vendor, KJPP, KAP, Rekanan IT dan Non IT, Konsultan dan rekanan lainnya)</td><td>1. Sosialisasi disampaikan kepada seluruh Mitra Kerja dan/atau Rekanan BSI University pada tanggal 9 Februari 2023
2. Partner Gathering dengan seluruh rekanan Notaris, PPAT, KAP, KJPP dan Asuransi dibawah koordinasi unit kerja Policy and Prosedur Group dengan mengundang KPK sebagai narasumber pada tanggal 8 September 2023
3. Vendor Gathering dengan seluruh rekanan dan vendor IT dan Non-IT dibawah koordinasi unit kerja Procurement and Fix Asset Group dengan mengundang KPK sebagai narasumber pada tanggal 11 Oktober 2023
4. Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Tenaga Pemasar Bancaasurance Syariah PT BNI Life pada tanggal 1 November 2023
5. Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Sharia Leaders Bancaasurance Syariah PT AXA Mandiri Financial Services (AMFC) pada tanggal 14 November 2023
6. Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Tenaga Pemasar Bancaasurance Syariah PT AXA Mandiri Financial Services (AMFC) pada tanggal 22 Desember 2023</td></tr>
<tr><td>Audit Surveillance ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan</td><td>Audit Surveillance kedua ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah diimplementasikan pada ruang lingkup unit kerja Procurement Group Kantor Pusat dengan rincian sebagai berikut:
1. Procurement & Policy, Planning & Control (PPC)
2. Procurement Management 1
3. Procurement Management 2
4. Procurement Management 3</td></tr>
<tr><td>Penanganan atas Laporan Gratifikasi</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Penetapan oleh Unit Anti Bribery</td><td>22 Laporan</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penetapan oleh KPK</td><td>5 Laporan</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Tidak dapat ditindaklanjuti</td><td>1 Laporan</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>28 Laporan</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Kode Etik

Kode etik yang di lingkungan internal BSI disebut sebagai *Code of Conduct* merupakan pedoman internal Bank yang berisi tentang sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*. Kode etik menjadi standar etika dan perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran Bank yaitu Direktur, Dewan Komisaris, Senior Manajemen dan Pegawai dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta saat hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja.

Sasaran umum pedoman perilaku adalah menyusun suatu petunjuk agar setiap pelanggaran *code of conduct* dan etika bisnis oleh seluruh jajaran Bank dapat secara cepat terdeteksi. Industri perbankan merupakan bisnis yang berlandaskan asas saling percaya dan kepercayaan publik serta dijalankan secara beretika dan bertanggung jawab.

Perilaku dan etika bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan para nasabah, atau antara sesama jajaran Bank. Ketentuan mendorong terwujudnya *Good Corporate Governance* yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan reputasi Bank. Perusahaan memiliki proses implementasi dan monitoring kepatuhan terhadap *code of conduct*. Direktur/SEVP Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* tanpa kecuali oleh jajaran Bank.

CODE OF CONDUCT (PEDOMAN PERILAKU)

a. Tujuan
   Penyusunan *Code of Conduct* bertujuan untuk memberikan pedoman perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/ calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun *stakeholders* lainnya.
b. Fundamental BSI
   Dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*, jajaran Bank harus berlandaskan kepada fundamental Bank. Saat ini, fundamental dimaksud adalah The 7 (*Seven*) Fundamentals of BSI yang terdiri atas: *Spiritual Foundation*, *Vision*, *Mission*, *Shared Value*, *Employee Value Proposition*, *Leadership Characteristic*, *and Tagline* yang diatur dalam ketentuan internal BSI.
c. Budaya Perusahaan
   Budaya perusahaan merupakan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terwujudnya visi, misi, dan fondasi spiritual perusahaan. Nilai-nilai perusahaan dapat diartikan sebagai *shared values*, sedangkan perilaku dan tindakan adalah aktivitas dan interaksi dengan *stakeholders* yang sesuai dengan *shared values* tersebut.

Adapun hal-hal yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah:

1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
   Pelaksanaan terhadap benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
   a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang wajib dihindari.
   b. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/ bagi hasil khusus lainnya untuk:
      - dirinya sendiri;
      - keluarga/kerabat sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal;
      - perusahaan di mana yang bersangkutan dan/ atau keluarganya mempunyai kepentingan.
   c. Hubungan keluarga/kerabat dengan jajaran Bank sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal.
   d. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank termasuk keluarga/kerabat sampai dengan derajat kedua dengan Pejabat Eksekutif Bank, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan internal Bank.
   e. Jajaran Bank harus menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan/atau individu yang

memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.

f. Jajaran Bank tidak diperkenankan mengambil atau memanfaatkan Fasilitas Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga, ataupun kepentingan pihak luar lainnya.

g. Jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif, dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri di luar jam kerja apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari regulator, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Larangan *Risywah*
   Jajaran Bank harus mengambil langkah tegas atas setiap bentuk pemberian hadiah atau bingkisan dari nasabah, rekanan atau pihak ketiga lainnya.
3. Kerahasiaan
   Jajaran Bank harus menjaga kerahasiaan data Bank, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyalahgunaan Jabatan
   Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan informasi yang dimilikinya dari kegiatan bisnis Bank.
5. Perilaku *Insiders*
   Insiders yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau keluarganya atau pihak ketiga lainnya.
6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
   Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan (*highly regulated industry*) sehingga akurasi data yang disajikan sesuai.
7. Integritas Sistem Perbankan
   Jajaran Bank harus memastikan dirinya tidak terlibat tindakan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya yang dapat mengganggu sistem perbankan, seperti pembiayaan fiktif, penggelapan dana nasabah, penipuan transaksi, pemalsuan data dan sebagainya.
8. Pengelolaan Rekening Pegawai
   Bank harus memastikan seluruh rekening atas nama Jajaran Bank pada Bank wajar dan sesuai dengan segala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Bank. Unit Kerja Human Capital memastikan penggunaan rekening tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan Bank.
9. Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)
   Berkaitan dengan pelaksanaan Code of Conduct Bank, Jajaran Bank wajib membuat pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggung.
10. Pengawasan, Pelaksanaan dan Pemutakhiran
    Direktur/SEVP Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* tanpa kecuali oleh Jajaran Bank.
11. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
    Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Kode etik yang diberlakukan di lingkungan BSI, antara lain mengatur tentang:

1. Benturan Kepentingan
2. Larangan Risywah
3. Kerahasiaan
4. Penyalahgunaan Jabatan
5. Perilaku Insiders
6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
7. Integritas Sistem Perbankan
8. Pengelolaan Rekening Pegawai
9. Pernyataan Tahunan
10. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
11. Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Kode etik Bank telah diatur dan dituangkan dalam ketentuan internal, seperti Peraturan Perusahaan (PP) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2021-2023 (PP BSI) serta ketentuan turunannya. PP BSI dapat diakses oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank melalui jaringan intranet (sebagai salah satu upaya mengurangi penggunaan kertas dan dukungan atas program *sustainable finance*).

Penyebarluasan atau sosialisasi kode etik bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pegawai BSI serta pelaksanaannya. Dengan demikian, seluruh jajaran manajemen dan pegawai taat dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Sosialisasi dilaksanakan oleh manajemen dan unit kerja terkait.

Program sosialisasi yang telah berjalan secara berkala adalah "Taujih Pekanan". Program tersebut menjadi sarana bagi manajemen Bank dalam menyampaikan nilai-nilai perusahaan, yakni AKHLAK sebagai *core values* bagi pegawai BSI. Melalui kegiatan ini, pegawai BSI diharapkan selalu berada di koridor yang benar, sejalan dengan kode etik Bank. Kode etik juga disebarkan dalam bentuk lain, seperti infografis dan surat.

KODE ETIK

PERNYATAAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode etik BSI berlaku untuk seluruh organisasi Bank, dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, hingga seluruh karyawan. Sebagai wujud komitmen penerapan kode etik di Bank, terutama dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas secara tahunan. Penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat eksekutif Bank sebagai bentuk preventif atas upaya pengendalian gratifikasi dan/atau perbuatan yang melanggar kode etik BSI, dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pembinaan disiplin kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan/peraturan perusahaan, antara lain melalui sanksi yang berjenjang:

1. Sanksi jenis pelanggaran disiplin ringan:
   a. Surat Pembinaan Non-Sanksi (SPNS)
   b. Surat Teguran Satu (ST 1)
2. Sanksi jenis pelanggaran disiplin sedang:
   a. Surat Teguran Dua (ST 2)
   b. Surat Peringatan Pertama (SP 1)
   c. Surat Peringatan Dua (SP 2)
   d. Surat Peringatan Tiga (SP 3)
3. Sanksi jenis pelanggaran disiplin berat:
   a. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPT)
   b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Bank selalu menindaklanjuti peristiwa yang termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank, seperti pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tindak lanjut ditetapkan dari hasil investigasi yang merupakan peristiwa yang dilakukan oleh pegawai yang melanggar kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menindak pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank melakukannya secara tegas dan obyektif. Adapun jenis kasus atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai terdiri dari 2 (dua) jenis kasus, yaitu kasus audit dan kasus non-audit.

Adapun data pelanggaran kode etik baik dalam ketentuan internal Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sanksi	Kategori Sanksi	Jumlah Sanksi		
			2023	2022	2021
1	SPNS	Ringan	10	8	3
2	ST 1		57	37	7
3	ST 2	Sedang	34	17	29
4	SP 1		160	118	32
5	SP 1 Setara SP 2		71	27	0
6	SP 1 Setara SP 3		22	11	0
7	SP 2		0	2	25
8	SP 3		0	0	11
9	SPT	Berat	32	20	0
10	PHK		104	68	62
Total			490	308	169

Pengelolaan *Whistleblowing System*

Whistleblowing System (WBS) atau sistep pelaporan pelanggaran merupakan sistem pelaporan yang memungkinkan setiap pihak untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini tindakan penyimpangan di Bank. Kewajiban Bank dalam menerima dan menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan adalah:

1. Wajib menerima laporan dugaan tindakan penyimpangan dari pihak internal atau eksternal dan dari pelapor yang mencantumkan identitas maupun tidak.
2. Wajib menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan yang telah menyertakan bukti-bukti permulaan yang cukup.
3. Wajib menyediakan informasi status proses penyelesaian laporan dugaan tindakan penyimpangan pada aplikasi pelaporan tindakan penyimpangan atau *fraud*.

PRINSIP PELAPORAN

Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan informasi awal, yaitu:
   a. Bentuk penyimpangan/permasalahan yang dilaporkan;
   b. Pihak-pihak yang terlibat;
   c. Lokasi/Unit Kerja terjadinya penyimpangan;
   d. Perkiraan waktu terjadinya penyimpangan;
   e. Perkiraan nilai kerugian (jika ada); dan
   f. Kronologis penyimpangan.
2. Untuk mempercepat proses audit, Pelapor menyertakan bukti-bukti awal dugaan tindakan penyimpangan, yaitu:
   a. Bukti tertulis, antara lain dokumen pembiayaan, surat-surat, akta notariil.
   b. Keterangan tertulis saksi.
   c. Keterangan tertulis pelaku.
   d. Bukti petunjuk, antara lain dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, CCTV, rekaman suara, SMS, dll.
   e. Bukti-bukti dugaan tindakan penyimpangan yang diserahkan Pelapor tidak diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memudahkan komunikasi, Pelapor dapat memberikan informasi mengenai identitas diri, yaitu:
   a. Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
   b. Nomor telepon atau alamat e-mail yang dapat dihubungi.

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPORAN

1. Hak Pelapor
   a. Melaporkan dugaan tindakan penyimpangan atau *fraud* yang diketahui melalui sarana pelaporan yang disediakan.
   b. Memberikan informasi atau dokumen-dokumen tanpa tekanan.
   c. Mendapat jaminan atas kerahasiaan identitas pribadi.
   d. Memberikan kesaksian tanpa harus bertatap muka dengan Terlapor pada saat pemeriksaan perkara.
   e. Memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya melalui aplikasi pelaporan tindakan penyimpangan atau *fraud*.
2. Kewajiban Pelapor
   a. Menyampaikan informasi sesuai fakta.
   b. Beritikad baik.
   c. Kooperatif.
   d. Bertanggung jawab atas laporan yang tidak sesuai fakta atau bersifat fitnah.
3. Saluran Pelaporan
   Bank menyediakan beberapa saluran pelaporan penyimpangan yaitu:
   a. Whatsapp/telepon/SMS: 08119146146
   b. E-mail: pengaduan@bankbsi.co.id & antibribery@ bankbsi.co.id
   c. Aplikasi GRC Compas

Perlindungan Bank tidak berlaku bila laporan Pelapor berdasarkan audit terbukti tidak benar atau memfitnah atau Pelapor merupakan pihak yang terlibat dalam tindakan penyimpangan dan/atau *fraud* untuk permasalahan yang sama atau berbeda.

PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

LINGKUP TINDAKAN PENYIMPANGAN

Lingkup tindakan penyimpangan yang dilaporkan dalam *Whistleblowing System* adalah:

1. Tindakan penyimpangan yang tergolong *fraud*, antara lain:
   a. Kecurangan
   b. Penipuan
   c. Penggelapan aset
   d. Pembocoran informasi
   e. Tindak Pidana Perbankan
   f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
2. Tindakan pembiaran yang tergolong *fraud*, antara lain:
   a. Pegawai Bank sengaja memberikan tanda tangan atas laporan atau dokumen yang diketahui rekayasa.
   b. Pegawai Bank sengaja memberikan persetujuan pembiayaan yang diketahui merupakan fiktif.
   c. Pegawai Bank sengaja melakukan otorisasi atau *override* atas suatu transaksi atau pencarian yang diketahui fiktif.
3. Tindakan penyimpangan khusus antara lain:
   a. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain: penggunaan narkotika/zat adiktif/psikotropika, minuman keras, pencucian uang, judi.
   b. Tindakan asusila/amoral, seperti penyimpangan seksual, perselingkuhan, pelecehan seksual, dll.
   c. Pelanggaran *code of conduct* (benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, perilaku insiders).
   d. Pelanggaran norma sosial.
   e. Penyalahgunaan asset perusahaan.
   f. Tindakan lain yang dapat menimbulkan risiko materi maupun non materi.

SOSIALISASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Sosialisasi media pelaporan *whistleblowing system* dan Anti Gratifikasi kepada seluruh pegawai melalui *desktop computer* pegawai, *website* Bank, penyampaian pada kegiatan *training*, *sharing session*, dan Taujih Pekanan, serta pemberitahuan kepada nasabah, mitra/rekanan Bank dan masyarakat.

JUMLAH PENGADUAN

Pengaduan atas *Whistleblowing system* per 31 Desember 2023 sebanyak 577 pengaduan dengan komposisi pengaduan sebagai berikut:

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Pembiayaan	48
2	Operasional	521
3	*Code Of Conduct*	8
Total		**577**

SANKSI/TINDAK LANJUT PENGADUAN

Selama tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan dari *Whistleblowing system* yang diterima sampai dengan 30 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan	Status			
	Sudah Ditindaklanjuti	Sedang Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Layak Ditindaklanjuti
577	6	8	1	562

JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*) DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Internal fraud adalah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Bank Syariah Indonesia maupun pegawai tidak tetap (*outsourcing*) untuk kepentingan pribadi yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Sepanjang tahun 2023, jumlah internal fraud yang terjadi sebanyak 12 (duabelas) kasus.

Perkembangan penanganan *internal fraud* yang terjadi pada tahun 2023 diuraikan melalui tabel di bawah ini:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Total *fraud*	-	-	11	14	1	-
Telah diselesaikan	-	-	11	14	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	2	1	-

Adapun upaya penyelesaian kejadian *fraud* yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan segera memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk *recovery*. Untuk menimbulkan efek jera, Bank Syariah Indonesia juga telah memproses para pelaku ke jalur hukum. Mitigasi yang dilakukan Bank guna mencegah terulangnya kejadian fraud dengan perbaikan *design control* dan penguatan *internal control* agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

BSI memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor, menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta pelaksanaan penyelidikan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan. Tindak lanjut tersebut dilakukan setelah Bank melakukan verifikasi bahwa laporan yang masuk a terbukti benar dan didukung bukti memadai.

Tata Kelola Terintegrasi

Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama

Bank Syariah Indonesia mengirimkan perwakilan Komite TKT yaitu Mohamad Nasir dan KH. Dr. Mohammad Hidayat sebagai anggota Komite TKT sesuai dengan SK Nomor: 03/519-KEP/DIR tanggal 05 Desember 2023.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Adapun hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:

1. *Integrated Risk Committee* (IRC)
   IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
   a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC
      Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:
      - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
      - Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
      - Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.
   b. Rapat IRC
      Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.
2. *Board Forum*
   Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai *board* forum yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara Triwulan dan Semesteran.

PENILAIAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Aspek dan hasil penilaian Tata Kelola Terintegrasi BSI tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

No.	Aspek	Hasil	
		Semester I	Semester II
1	Direksi	1.33	1.22
2	Dewan Komisaris	1.50	1.50
3	Dewan Pengawas Syariah	1.00	1.00
4	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1.00	1.00
5	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)	1.25	1.50
6	Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT)	1.00	1.00
7	Penerapan Manajemen Risko Terintegrasi	1.60	1.40
8	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1.33	1.33
9	Benturan Kepentingan	1.00	1.00
10	Kebijakan Remunerasi	1.00	1.00
Total		1.20	1.20

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTERGASI

Semester 1 tahun 2023

Peringkat	Definisi Peringkat
1.20	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Faktor Positif	Area Pengembangan
Struktur Tata Kelola	
a. Jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan rangkap jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS; dan b. Jumlah, komposisi dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.	Pada posisi tanggal 30 Juni 2023 terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test)* di OJK
Proses Tata Kelola	
Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu : a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan; dan b. Seluruh organ dan infrastruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	Belum disahkannya *Risk Appetite Statement* (RAS)

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Faktor Positif	Area Pengembangan
Hasil Tata Kelola	
a. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu; b. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip Syariah; dan c. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik.	Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti

Semester 2 tahun 2023

Peringkat	Definisi Peringkat
1.20	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Faktor Positif	Area Pengembangan
Struktur Tata Kelola	
a. Seluruh Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan telah lulus *fit & proper test* OJK dan mendapatkan persetujuan dari DSN MUI, termasuk penerapan rangkap jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Jumlah dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.	Pada posisi tanggal 6 November 2023 terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen yang mengundurkan diri sehingga komposisi Komisaris Independen menjadi kurang dari 50% dari jumlah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris
Proses Tata Kelola	
Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu : a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan; dan b. Seluruh organ dan infrastruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	Belum disahkannya *Risk Appetite Statement* (RAS)
Hasil Tata Kelola	
a. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu; b. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan prinsip-prinsip syariah; dan c. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik.	Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti

Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya

Pelaporan terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Berikut laporan penggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebajikan Bank Syariah Indonesia tahun 2023.

Rekapitulasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Uraian	2023	2022	Perubahan	
			Rp	%
Sumber dana kebajikan	83.595	89.902	(6.307)	(7)
Infak dan sedekah	63.947	73.857	(9.910)	(13)
Denda	17.915	12.877	5.038	39
Pendapatan non-halal	1.733	3.168	(1.435)	(45)
Sumbangan/hibah	-	-	-	-
Penggunaan dana kebajikan				
Sumbangan	(80.736)	(108.831)	(28.095)	(26)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	2.859	(18.929)	21.788	(115)
Saldo awal dana kebajikan	7.048	25.977	(18.929)	(73)
Saldo akhir dana kebajikan	9.907	7.048	2.859	41

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang kepada Karyawan dan/atau Manajemen

BSI memiliki program *Employee Stock Option Program* (ESOP) yaitu program pemberian saham Bank kepada pegawai terpilih sebagai salah satu bentuk apresiasi serta program retensi kepada pegawai.

Untuk Manajemen, BSI memiliki program *Management Stock Option Plan* yaituskema kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen perusahaan yang umumnya digunakan sebagai apresiasi terhadap kinerja atau langkah untuk mendorong kinerja manajemen perusahaan.

Buyback Saham dan *Buyback* Obligasi

Pada tahun 2023, Bank Syariah Indonesia tidak melakukan *buy back* saham maupun obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank. Ketentuan terkait dengan *buy back* tersebut merujuk pada SE BI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan *buy back shares* dan *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Syariah Indonesia telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada *stakeholders* berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen BSI yang menimbulkan kerugian pada Bank. Sementara upaya yang dilakukan oleh Bank untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, antara lain melalui:

A. *e-Poster*
   Bank membuat poster elektronik (*e-poster*) yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan sebagai upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan.
B. Pakta Integritas
   Benturan kepentingan adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan dengan cara memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di kalangan pegawai maka seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank wajib mengisi pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pakta yang dinyatakan setiap tahun itu berkaitan erat dengan dokumen kepegawaian. Saat ini, penyelenggaraan *annual disclosure* dikelola oleh unit kerja Human Capital dan *annual disclosure* tersebut telah diintegrasikan dengan aplikasi sistem kepegawaian Bank.
C. *E-mail Blast*

Penilaian Penerapan GCG

Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSI telah secara rutin melaksanakan *self-assessment* pelaksanaan GCG. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kajian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan regulator.

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG di lingkungan BSI dilaksanakan setiap semester, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember. Hasil *self assessment* GCG dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori: Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5.

PELAKSANA PENILAIAN

Penilaian penerapan GCG dilaksanakan melalui *self assessment* yang dilaksanakan oleh Compliance Group.

KRITERIA PENILAIAN

Pelaksanaan *self assessment* terhadap penerapan GCG mengacu pada Surat Edaran OJK yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

HASIL PENILAIAN

Adapun nilai pelaksanaan *self assessment* GCG semester I tahun 2023 adalah 2 (“Baik”) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Faktor Positif	Area Pengembangan
Struktur Tata Kelola	
Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.	1. Pada posisi 30 Juni 2023 terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Mei 2023 yang masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) OJK, yaitu: a. Bpk. Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) b. Bpk. Abu Rokhmad (Komisaris) 2. Pada posisi tanggal 30 Juni 2023 masih terdapat pula 2 (dua) orang anggota Direksi yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Mei 2023 yang masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) OJK, yaitu: a. Bpk. Saladin D. Effendi (Direktur Information Technology) b. Bpk. Grandhis (Direktur Risk Management)

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Faktor Positif	Area Pengembangan
Proses Tata Kelola	
Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*.	Dari hasil *self assessment* terhadap *governance process*, masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang belum selaras dengan prinsip Syariah, meski seluruh Produk Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS, serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui Uji Petik terhadap implementasi prinsip syariah pada kantor cabang, penguatan aspek syariah melalui berbagai pelatihan, penyusunan dan pengkinian atas *sharia module digital*, pelaksanaan *sharia combined assurance* dan proses digitalisasinya serta terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi
Hasil Tata Kelola	
Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Juni 2023 pada tabel berikut :	Terdapat peningkatan sanksi denda dari regulator yang memerlukan perhatian dari manajemen untuk melaksanakan mitigasi agar tidak terjadi lagi pada periode selanjutnya.

(dalam miliar rupiah)

Pos	Juni 2023	Growth YoY	
		Nom	%
Laba Perusahaan	2.782	651	30,53%
Jumlah Aset	313.641	36.298	13,09%
OHC	4.688	193	4,30%
Pembiayaan	9.695	30.607	16,00%
Dana Pihak Ketiga	252.516	7.852	3,21%
a. Giro	40.414	1.545	3,98%
b. Tabungan	110.929	4.398	4,13%
c. Deposito	101.172	1.909	1,92%
CASA	151.343	5.943	4,09%

Sementara secara non finansial selama Semester I Tahun 2023 Bank mendapatkan total 61 (enam puluh satu) penghargaan di antaranya:

1) *Indonesia's Popular Digital Products Award* 2023
2) 3rd Indonesia *Syariah Awards* 2023
3) *CSR Excellence Awards 2023*
4) BAZNAS *Award* 2023
5) Indonesia *Best CEO Awards* 2023
6) *Top Digital Corporate Brand Award* 2023
7) *Indonesia Best Workplace for Women*
8) Indonesia *Financial Top Leader Awards* 2023
9) 20th Infobank-MRI *Banking Service Excellence Award* 2023
10) *Indonesia Top Digital Public Relations Award*

Sedangkan hasil penilaian GCG untuk semester II tahun 2023 mendapatkan skor 2 (Baik) stabil dibanding penilaian Semester I tahun 2023. Faktor positif yang mendukung serta peluang pengembangan ke depan, diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Faktor Positif	Area Pengembangan
Struktur Tata Kelola	
Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.	Pada tanggal 06 November 2023 terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri yaitu Bpk M. Arief Rosyid Hasan dan telah dilaporkan ke OJK melalui Surat No. 03/1706-3/DIR-CSG, tanggal 16 November 2023 perihal Informasi Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris. Pengunduran diri tersebut berakibat komposisi Komisaris Independen menjadi di bawah 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Atas kondisi tersebut Bank akan mengukuhkan pengunduran diri tersebut pada RUPS Tahunan mendatang sekaligus berencana mengangkat penggantinya
Proses Tata Kelola	
Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*.	Dari hasil *self assessment* terhadap *governance process*, masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang belum selaras dengan prinsip Syariah, meski seluruh Produk Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS, serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui Uji Petik terhadap implementasi prinsip syariah pada kantor cabang, penguatan aspek syariah melalui berbagai pelatihan, penyusunan dan pengkinian atas modul digital syariah, pelaksanaan *sharia combined assurance* dan proses digitalisasinya serta terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Faktor Positif	Area Pengembangan
Hasil Tata Kelola	
Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Desember 2023 (*unaudited*) pada tabel berikut:	Terdapat peningkatan sanksi denda yang cukup signifikan dibanding posisi Semester 1 2023 yang memerlukan perhatian dari manajemen. Saat ini Bank telah melakukan *root cause analysis identification* yang digunakan untuk menetapkan tindak lanjut dalam upaya memitigasi agar tidak terjadi denda yang sama pada periode selanjutnya

(dalam miliar rupiah)

Pos	Desember 2023 Nom	Growth YoY	
		Nom	%
Laba Perusahaan	5.704	1.444	33,88%
Jumlah Aset	353.624	47.897	15,67%
OHC	10.121	237	2,40%
Pembiayaan	240.316	32.611	15,70%
Dana Pihak Ketiga	293.776	32.285	12,35%
a. Giro	53.201	8.680	19,50%
b. Tabungan	124.726	8.242	7,08%
c. Deposito	115.848	15.362	15,29%
CASA	177.928	16.923	10,51%

Sementara secara non finansial selama Semester 2 Tahun 2023 Bank mendapatkan total 55 (lima puluh lima) penghargaan, di antaranya :

1. Indonesia *Best Bank* 2023 *for The Development of Islamic Ecosystems*
2. *The Most Outstanding Bank Syariah*
3. *Most Organised Investor Relations*
4. *Most Consistent Dividend Policy*
5. *Top Digital Corporate Brand Award* 2023
6. GIFA *Market Leadership Award*
7. *Very Good in Indonesia Most Reputable Companies* 2023
8. *Excellent Financial Performance SOE's Subsidiary in* 2022
9. Bank Pertumbuhan Laba Tertinggi
10. *The Most Trusted Company* – SWA

PENILAIAN PENERAPAN GCG OLEH PIHAK EKSTERNAL

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Pada tahun 2023, BSI mengikuti penilaian *Corporate Governance Perception* Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan penilaian kualitas *corporate governance* suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Program CGPI dilaksanakan dengan tujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam ekosistem bisnis, yang terdiri dari pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat bisnis dan pihak pendukung bisnis melakukan praktik terbaik GCG dalam dunia bisnis dan perekonomian. Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya memperhatikan proses penciptaan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Dengan demikian, program CGPI diharapkan mampu memotivasi dunia bisnis untuk melaksanakan konsep *Corporate Governance* (CG) dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas agar secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan dan menerapkan GCG. Selain itu, program CGPI juga bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas GCG melalui perbaikan yang berkesinambungan sehingga program CGPI dapat menjadi sarana yang strategis dalam menyusun *database*, melakukan pemetaan (*mapping*) kondisi CG di Indonesia, dan menjadi *benchmark* implementasi GCG pada perusahaan publik, BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia.

Perusahaan peserta program CGPI dapat memberikan manfaat, antara lain menjadi landasan dalam pengelolaan perusahaan melalui tinjauan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hasil CGPI menunjukkan perilaku kesungguhan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan peserta CGPI antara lain pada gambar berikut:

Menetapkan indikator atau standar kualitas penerapan GCG yang ingin dicapai
Mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan dengan praktik bisnis yang etikal dan bermartabat
Memperbaiki internal Perusahaan guna meningkatkan penerapan GCG
Memetakan masalah strategis Perusahaan guna meningkatkan kualitas penarapan GCG
Meningkatkan kepercayaan investor dan publik terhadap Perusahaan
Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap urgensi dan manfaat GCG

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Kriteria yang Digunakan

Dalam CGPI 2023 dengan tema Membangun Ketangkasan Perusahaan dalam Kerangka GCG menggunakan aspek penilaian sebagai berikut:

Aspek Struktur Tata Kelola, dimaknakan sebagai **Kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur** untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etika dan bermartabat.

Aspek Proses Tata Kelola, dimaknakan sebagai **Sistem dan Mekanisme operasional yang efektif dan efisien** untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Aspek Hasil Tata Kelola, dimaknakan sebagai Kualitas capaian dan manfaat yang berhasil guna dan berdaya guna untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Pihak yang Melakukan Penilaian
IICG – The Indonesian Institute for Corporate Governance

Hasil Penilaian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

91,50
(Sangat Terpercaya)

Struktur Tata Kelola (30,27)
Proses Tata Kelola (30,02)
Hasil Tata Kelola (31,21)

ASEAN *Corporate Governance Scorecard*
Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, Bank Syariah Indonesia melakukan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN Ca*pital Market Forum* (ACMF), yang disebut ASEAN *Corporate Governance* (CG) *Scorecard*.

Kriteria yang Digunakan
ASEAN CG *Scorecard* digunakan untuk menilai praktik Tata Kelola Perusahaan terbuka di negara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi publik yang tersedia antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited*, *Sustainability Report*, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Website Perusahaan serta informasi-informasi publik lainnya. Adapun komponen penilaian ASEAN CG *Scorecard* adalah sebagai berikut:
a. Hak-hak Pemegang Saham
b. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
c. Peran Pemangku Kepentingan
d. Pengungkapan dan Transparansi
e. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Pihak yang Melakukan Penilaian
Penilaian dilakukan oleh ACMF melalui Domestic Ranking Body (DRB) yang ditunjuk oleh regulator masing-masing negara sebagai perwakilan di setiap negara peserta. DRB melakukan penilaian di skala nasional, untuk selanjutnya dilakukan *peer review* oleh DRB negara anggota ASEAN yang lain. Sejak tahun 2016, OJK menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan (RSM) sebagai DRB untuk melakukan penilaian di Indonesia.

Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah rincian penerapannya di BSI:

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS, baik yang hadir secara fisik melalui sistem yang disediakan Biro Administrasi Efek Perseroan maupun yang hadir secara elektronik melalui melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023, mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan cara pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya, yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan. Pemungutan suara dilakukan pula secara elektronik (*e-voting*) bagi pemegang saham yang tidak hadir fisik atau yang memberikan kuasanya secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom. Dengan demikian independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga dalam proses pemungutan suara tersebut. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan Pemanggilan RUPS pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib dimaksud tersedia pula bagi Pemegang saham yang dapat diunduh saat RUPS melalui QR *code* yang disediakan dan pokok-pokok tata tertib RUPS tersebut juga dibacakan sebelum RUPS dimulai.	Terpenuhi (*comply*)
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023 seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BSI hadir.	Terpenuhi (*comply*)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan Risalah RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2023, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dan telah diunggah pada Situs Web BSI, Web BEI, dan eASY KSEI (Web KSEI)	Terpenuhi (*comply*)
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	BSI telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary* & *Communication* pada Bab V. Komunikasi yang dilakukan oleh BSI di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, Paparan Publik (*Public Expose*), Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, BSI juga menyediakan informasi yang dapat diakses melalui web BSI. Pada web tersebut terdapat pula informasi alamat kantor pusat dan kantor cabang BSI, alamat e-mail, akses media sosial serta contact center sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah.	
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	BSI senantiasa mengelola informasi dalam situs web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat memperoleh informasi terbaru terkait BSI.	Terpenuhi (*comply*)
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	BSI telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Per 31 Desember 2023 jumlah anggota Dewan Komisaris BSI berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris non Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BSI tidak melebihi jumlah anggota Direksi.	Terpenuhi (*comply*)
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Dewan Komisaris BSI memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis BSI. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris pada web Perseroan.	Terpenuhi (*comply*)

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment)* yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris.	Terpenuhi (*comply*)
	4.2 Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (*comply*)
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi (*comply*)
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Kebijakan suksesi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi BSI.	Terpenuhi (*comply*)
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	BSI telah memenuhi ketentuan pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2023, jumlah Direksi BSI sebanyak 10 (sepuluh) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BSI.	Terpenuhi (*comply*)
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Direksi BSI memiliki latar belakang keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi pada web Perseroan. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.	Terpenuhi (*comply*)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BSI adalah Direktur Finance & Strategy yaitu Bapak Ade Cahyo Nugroho dengan pendidikan, pengalaman dan kompetensi di bidang keuangan hal tersebut dapat dilihat pada profil beliau pada web Perseroan.	Terpenuhi (*comply*)
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme self-assessment untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi (*comply*)
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (*comply*)
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi (*comply*)
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan			
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	Untuk mencegah terjadinya insider trading, BSI telah memiliki kebijakan yang mengatur hal tersebut di dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary & Communication*.	Terpenuhi (*comply*)
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*.	BSI telah memiliki kebijakan anti *fraud*. Kebijakan anti *fraud* BSI merupakan landasan pokok penerapan strategi anti *fraud* melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud*, yaitu: 1. Pencegahan *Fraud*; 2. Deteksi *Fraud*; 3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi *Fraud*; dan 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut *Fraud*. Kebijakan Anti Fraud BSI dapat diakses pada web BSI. BSI juga memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.	Terpenuhi (*comply*)
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	BSI telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu SPO *Procurement* dan PTO *Procurement* pengadaan barang dan jasa.	Terpenuhi (*comply*)

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur, dan Manual Produk Bank Syariah Indonesia, dengan pokok-pokok sebagai berikut: Bank Syariah Indonesia berkomitmen memenuhi hak-hak Nasabah dan memastikan bahwa apa yang diperjanjikan Bank kepada Nasabah dapat terpenuhi. Transparansi informasi mengenai produk dan jasa diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan. Dalam setiap pemasaran produk dan jasa layanan Bank, Hak-hak Nasabah menjadi perhatian penting yang meliputi: 1. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Bank mengenai istilah, frasa, dan/atau kalimat yang mudah dimengerti mengenai produk dan layanan Bank. 2. Hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai produk dan jasa yang diterbitkan Bank maupun produk dan jasa pihak lain yang dipasarkan melalui Bank. 3. Hak untuk mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan, penambahan dan atau pengurangan yang dilakukan pada fitur produk dan jasa layanan Bank maupun pihak lain yang dipasarkan melalui Bank. 4. Hak untuk mengetahui karakteristik produk dan jasa Bank atau pihak lain secara memadai terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya serta perhitungan nisbah/bagi hasil yang melekat pada produk dan jasa tersebut; serta Hak untuk mengetahui jaminan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank.	Terpenuhi (*comply*)
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *system whistleblowing*	BSI telah memiliki kebijakan *whistleblowing system* yang merujuk pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan & SPO Internal Audit BSI dan telah diunggah dalam web BSI (www.bankbsi.co.id)	Terpenuhi (*comply*)
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	BSI telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi, yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dan kebijakan terkait remunerasi karyawan.	Terpenuhi (*comply*)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Aspek 5: Keterbukaan Informasi			
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	BSI selalu mengelola Web Perseroan seoptimal mungkin sehingga informasi yang diperoleh pemegang saham atau investor atau publik merupakan informasi yang terbaru dan akurat. Selain Situs web, BSI juga memanfaatkan teknologi seperti SMS Banking dan Mobile Banking. Memanfaatkan aplikasi media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter untuk media keterbukaan Informasi.	Terpenuhi (*comply*)
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	BSI telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (*comply*)

Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan Bank sebagai Perusahaan Terbuka yang patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yaitu memenuhi kewajiban Bank dengan mengacu pada ketentuan berlaku dan membentuk unit di *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab jawab atas pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang paar modal dengan penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Orang Dalam harus menerapkan nilai-nilai Kode Etik Perseroan/Bank antara lain:

a. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan/Bank;
b. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya; dan
c. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra Perseroan/Bank pada umumnya.

Adapun larangan Transaksi Orang Dalam meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/Bank; atau Efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan/Bank, selama Informasi Orang Dalam tersebut belum dipublikasikan/belum tersedia untuk umum.
b. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/Bank; atau memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/Bank.
c. Memiliki konflik kepentingan.
d. Melakukan penyalahgunaan posisi/jabatan.
e. Melakukan manipulasi pasar.
f. Melakukan kegiatan *Short Selling* atau *Margin Trading*.

Keterbukaan dalam Praktik
Bad Governance

Pengungkapan	Penjelasan
Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan & Laporan tahunan	
Tanggal penerbitan Laporan Keuangan Tahunan	30 Januari 2024 Perusahaan menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan tepat waktu seperti ditetapkan oleh regulasi.
Tanggal penerbitan Laporan Tahunan	25 April 2024 Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan selalu tepat waktu seperti ditetapkan oleh regulasi.
Opini auditor independen atas laporan keuangan perusahaan	30 Januari 2024 Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Apakah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	Tidak Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris/Direksi, Manajemen maupun karyawan tidak pernah terlibat kasus perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir?	Tidak Perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam transaksi dengan pihak berelasi.
Apakah telah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan	Tidak Perusahaan belum pernah melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan
Apakah perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (material event)?	Tidak Perusahaan selalu menyampaikan informasi material kepada regulator.
Apakah perusahaan memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apa pun selama tiga tahun terakhir	Tidak Perusahaan tidak pernah mengalami sengketa atau permasalahan pajak apa pun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan?	Tidak Perusahaan telah mematuhi seluruh peraturan termasuk di luar aturan pengungkapan Laporan Tahunan.

Pernyataan Pelaksanaan
Prinsip- Prinsip Tata Kelola yang Baik

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah beserta seluruh karyawan Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip syariah. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan GCG selaras dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan penuh kesadaran, seluruh Insan Bank Syariah Indonesia akan mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi pernyataan ini. Bank Syariah Indonesia yakin bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, Bank dapat mencapai kinerja organisasi yang lebih baik serta memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Muliaman D. Hadad
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen

Hery Gunardi
Direktur Utama

Halaman ini sengaja dikosongkan.

07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank") menyampaikan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam buku terpisah. Laporan TJSL tersebut telah mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Adapun yang ditampilkan pada bagian ini merupakan "Ikhtisar Keberlanjutan" yang dikutip dari buku "Laporan Keberlanjutan" yang dibuat terpisah.

Aspek Ekonomi

Rp5,07 triliun
Laba bersih tahun 2023, naik 19% dari tahun sebelumnya

Rp240,3 triliun
Total pembiayaan

Rp57,7 triliun
Pembiayaan untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan atau 24% dari total pembiayaan

21 juta
Total Nasabah

99%
Pemasok BSI adalah pemasok dalam negeri

Aspek Lingkungan

5.155.191 KWh
Total energi listrik

100 %
Lampu LED digunakan di seluruh kantor BSI

97.672 liter
Total pemakaian BBM

2.376,84 Kg
Total sampah botol plastik yang dikumpulkan *Collection Point* pada program kolaborasi dengan PlasticPay, membantu mereduksi jejak karbon sebesar 9,26 juta gram CO_2-eq

4.385,65 Ton CO_2-eq
Total emisi yang dihasilkan dari energi listrik dan BBM

33.500
Total penanaman pohon yang dilakukan tahun 2023 di berbagai lokasi

Aspek Sosial

3,77 %
Tingkat *turnover* karyawan

3.009
UMKM binaan

521.036
Peserta Pelatihan

147.556
Total penerima manfaat dari BSI Maslahat yang terdiri dari 145.962 penerima individu dan 1.594 penerima lembaga

Rp45,56 triliun
Penyaluran dana pembiayaan ke pelaku UMKM, atau19% dari total pembiayaan

Rp187,57 miliar
Total pencairan kepada penerima manfaat BSI Maslahat

08

LAPORAN KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.	Nama	: Hery Gunardi
	Alamat kantor	: Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
	Alamat rumah	: Jl. Taman Mpu Sendok no. 31 & 33, kel. Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
	Nomor telepon	: 021 - 3040 5999
	Jabatan	: Direktur Utama
2.	Nama	: Ade Cahyo Nugroho
	Alamat kantor	: Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
	Alamat rumah	: Jl. Madrasah Al Husna No. 37 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
	Nomor telepon	: 021 - 3040 5999
	Jabatan	: Direktur Keuangan dan Strategi

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

We, the undersigned:

	Name	: Hery Gunardi
	Office address	: Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
	Domiciled address	: Jl. Taman Mpu Sendok no. 31 & 33, kel. Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
	Telephone number	: 021 - 3040 5999
	Title	: *President Director*
	Name	: Ade Cahyo Nugroho
	Office address	: Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
	Domiciled address	: Jl. Madrasah Al Husna No. 37 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
	Telephone number	: 021 - 3040 5999
	Title	: *Finance and Strategy Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Bank");*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the Bank's financial statements have been fully and correctly disclosed;*
   b. *The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*
4. *We are responsible for the Bank's internal control systems.*

The statement has been made truthfully.

Jakarta, 30 Januari/*January* 2024

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of Board of Directors*,

METERAI TEMPEL

Hery Gunardi
Direktur Utama/
President Director

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Keuangan dan Strategi/
Finance and Strategy Director

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

1. **Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan**

   Lihat Catatan 2d (Ikhtisar Kebijakan akuntansi material - Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif), 3a (Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting - Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan), 9 (Piutang), 10 (Pinjaman *qardh*), 11 (Pembiayaan *mudharabah*), dan 12 (Pembiayaan *musyarakah*) atas laporan keuangan.

   Pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang (terdiri dari piutang *murabahah, istishna,* dan *ijarah*), pinjaman *qardh* dan pembiayaan (terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*) adalah sebesar Rp9.668 miliar. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan ditentukan oleh Bank berdasarkan kerangka sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku seperti yang dijelaskan pada Catatan 2d atas laporan keuangan.

   Kami memberikan fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat bruto atas piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan yang mewakili 67% dari jumlah aset Bank, dan nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan yang signifikan terhadap laporan keuangan Bank. Lebih lanjut, penentuan cadangan kerugian penurunan nilai melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan.

   Piutang murabahah yang secara individual tidak dianggap signifikan, Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif menggunakan model parameter risiko dengan menggunakan parameter-parameter utama yaitu *Probability of Default* ("PD") dan *Loss Given Default* ("LGD"). Untuk piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan, yang secara individual dianggap signifikan, Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows.

1. ***Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh and financing***

   Refer to Note 2d (Summary of material accounting policies - Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets), 3a (Use of critical accounting estimates and judgments - Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh and financing), 9 (Receivables), 10 (Funds of qardh), 11 (Mudharabah financing), and 12 (Musyarakah financing) to the financial statements.

   As at 31 December 2023, the allowance for impairment losses on receivables (which consists of murabahah, istishna, and ijarah receivables), funds of qardh and financing (which consists of mudharabah and musyarakah financing) of the Bank was Rp9,668 billion. The allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh and financing was determined by the Bank based on framework under applicable SFAS as described in Note 2d to the financial statements.

   We focused on this area due to the size of the gross carrying value of receivables, funds of qardh and financing, which represented 67% of the total assets of the Bank, and the significance of the amount of allowance for impairment losses provided against receivables, funds of qardh and financing to the Bank's financial statements. In addition, the determination of allowance for impairment losses involves significant management judgement.

   Murabahah receivables which are not considered individually significant are assessed using collective allowance for impairment losses by using the risk parameter modelling approach that incorporated key parameters such as Probability of Default ("PD") and Loss Given Default ("LGD"). For receivables, funds of qardh and financing, which are considered individually significant, the Bank assesses individual allowances for impairment losses by estimating the expected cash flows obtained from the receivables, funds of qardh and financing.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur audit berikut ini atas hal audit utama tersebut:

- Kami memperoleh pemahaman atas pendekatan manajemen dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan.
- Ketika bukti objektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Bank dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan melakukan pengecekan baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai dan mempertimbangkan bukti eksternal jika tersedia. Berdasarkan sampel, kami membandingkan jadwal pembayaran kembali dan tingkat pengembalian efektif yang digunakan pada perhitungan dengan informasi yang tertera pada perjanjian piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan.
- Kami menilai metodologi dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan model cadangan kerugian penurunan nilai. Kami menilai PD dan LGD terhadap persyaratan PSAK No. 102, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan sebagai basis untuk penentuan tingkat PD dan LGD, dengan melibatkan spesialis Teknologi Informasi ("TI") kami.
- Kami melakukan perhitungan matematis ulang atas cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kerugian penurunan nilai dengan melibatkan spesialis TI kami.
- Kami memeriksa keandalan rincian data piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai dengan menguji kelengkapan dan akurasi data.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- *We understood management's approach to calculate the allowance for impairment losses for receivables, funds of qardh and financing.*
- *When objective evidence of impairment was identified by the Bank and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of the impairment allowance by checking both the amount and timing of future cash flows used by the Bank in the impairment loss calculation and considering external evidence where available. On a sample basis, we compared the schedule of repayment and the effective rate of return used in the calculation with the information as stipulated in the agreements over the receivables, funds of qardh and financing.*
- *We assessed the methodology and significant assumptions used in determining the allowance for impairment losses model. We assessed the PD and LGD against the requirements of SFAS No. 102, which involved (i) evaluating the model and methodology used in quantitative calculation; and (ii) testing the completeness and accuracy of data used as the basis to determine the PD and LGD rates by involving our Information Technology ("IT") specialists.*
- *We performed independent mathematical recalculation of the collective allowance for impairment losses by involving our IT specialists.*
- *We checked the reliability of the receivables, funds of qardh and financing listing data used to calculate the allowance of impairment losses by testing the completeness and accuracy of data.*

2. **Pengoperasian dan pengendalian atas sistem teknologi informasi (TI) pelaporan keuangan**

Bank sangat bergantung pada infrastruktur, sistem dan pengendalian TI untuk kegiatan operasional sehari-hari dan proses pelaporan keuangan bisnis Bank. Lingkungan TI Bank dianggap kompleks karena banyaknya sistem pelaporan keuangan utama dan integrasi antar sistem.

Pengendalian umum TI, termasuk pengendalian keamanan siber, merupakan bagian penting dari kerangka pengendalian internal Bank. Berkaitan dengan insiden yang dijelaskan pada Catatan 47f pada laporan keuangan, Bank menerapkan tindakan untuk memulihkan pengendalian keamanan, memulihkan sistem dan data terkait pelaporan keuangan.

Oleh karena itu, kami menganggap pengoperasian dan pengendalian atas sistem TI pelaporan keuangan Bank sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama
Kami memperoleh pemahaman pengelolaan sistem TI serta pengendalian yang mendukung proses pelaporan keuangan. Kami menilai efektivitas desain, implementasi, dan pengoperasian pengendalian TI atas integritas sistem yang relevan. Mengingat sifat teknis TI yang kompleks pada bagian audit ini, spesialis TI dan spesialis keamanan siber dikutsertakan dalam tim audit kami.

Kami melakukan prosedur audit berikut ini atas hal audit utama tersebut:

- Kami mengevaluasi dan menilai hal-hal berikut:
  - Pengendalian manajemen perubahan: Proses dan pengendalian yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan melakukan otorisasi perubahan pada fungsionalitas dan konfigurasi dalam sistem;
  - Pengendalian atas keamanan akses pengguna: Pengendalian akses yang dirancang untuk memberlakukan pemisahan tugas, mengatur pengguna akun dengan hak akses istimewa dan data hanya diubah melalui mekanisme yang terotorisasi;
  - Pengendalian atas operasional TI: Pengendalian atas aktivitas operasi yang mengidentifikasi dan mengelola masalah operasi TI yang timbul; dan
  - Pengendalian pengembangan sistem: Pengendalian atas pengembangan, konfigurasi dan implementasi dari sistem baru atau yang sudah ada.

2. ***Operation and controls of financial reporting information technology (IT) systems***

The Bank is heavily reliant on its IT infrastructure, systems and controls for its daily operations and the financial reporting processes of its business. The IT environment of the Bank is considered complex due to the number of key financial reporting systems and the interfaces among the systems.

IT general controls, including cybersecurity controls, are an important part of the Bank's internal control framework. Following the incident described in Note 47f to the financial statements, the Bank implemented remediation actions over its security controls to recover its systems and data relating to financial reporting.

Given these factors, we consider the operation and controls of the financial reporting IT system of the Bank to be a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matter

We understood the IT systems and controls that supported the financial reporting process. We assessed the effectiveness of the design, implementation, and operation of the IT controls over the integrity of the relevant systems. Given the complex IT technical nature of this part of the audit, IT specialists and cyber security specialists were included in our audit team.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- *We evaluated and assessed the following:*
  - *Change management controls. The processes and controls used to develop, test and authorise changes to the functionality and configurations within systems;*
  - *User access security controls: The access controls designed to enforce segregation of duties, govern the use of high privileged accounts and the data is only changed through authorised means;*
  - *IT operation related controls: The controls over operations that identify and manage IT operation issues that arise; and*
  - *System development controls: The controls relating to the development, configuration and implementation of new or existing systems.*

- Kami menguji pengendalian utama yang bergantung pada TI yang mendukung proses pelaporan keuangan, seperti perhitungan otomatis di sistem, pemrosesan transaksi, pembuatan laporan oleh sistem, dan antarmuka data antar sistem. Kami melakukan inspeksi atas konfigurasi sistem yang relevan dan menguji hasil keluaran sistem berdasarkan sampel.

- Kami memperoleh pemahaman dan menilai:
  - respons Manajemen atas insiden dan dampak terhadap sistem yang berkaitan dengan pelaporan keuangan;
  - respons Manajemen untuk memulihkan sistem yang berhubungan dengan pelaporan keuangan termasuk tindakan yang diambil agar sistem TI berjalan sebagaimana mestinya;
  - pengendalian Bank atas pemulihan sistem dan data yang berkaitan dengan pelaporan keuangan; dan
  - keandalan data pelaporan keuangan dengan menguji kelengkapan dan keakuratan data yang dipulihkan.

- *We tested relevant IT dependent controls that supported the financial reporting process, such as system-automated calculations, transaction processing, generation of reports by systems and the data interfaces between systems. We inspected the relevant system configurations and tested system outputs on a sample basis.*

- *We understood and assessed:*
  - *Management's response to the incident and the impact to the systems relating to financial reporting;*
  - *Management's response to recover the systems relating to financial reporting including actions taken to return the IT systems to their operations as intended;*
  - *The Bank's controls over recovery of systems and data relating to the financial reporting; and*
  - *The reliability of the financial reporting data by testing the completeness and accuracy of recovered data.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
30 Januari/*January* 2024

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0222

LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1 - 4	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	5	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	6	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	7 - 8	*Statement of Cash Flows*
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	9	*Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing*
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	10	*Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds*
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	11	*Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
Catatan atas Laporan Keuangan	12 - 150	*Notes to the Financial Statements*

****

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022*)	
ASET				***ASSETS***
KAS	4	5,255,841	4,951,469	***CASH***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	5	32,440,778	31,778,458	***CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	6, 44			***CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS***
Pihak ketiga		2,219,233	2,340,977	*Third parties*
Pihak berelasi		105,240	150,515	*Related parties*
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain		2,324,473	2,491,492	*Total current accounts and placements with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(20,745)	(15,575)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		2,303,728	2,475,917	*Net*
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	7, 44			***INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES***
Pihak ketiga		25,738,013	9,343,718	*Third parties*
Pihak berelasi		45,563,513	48,508,187	*Related parties*
Jumlah investasi pada surat berharga		71,301,526	57,851,905	*Total investments in marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(132,506)	(10,634)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		71,169,020	57,841,271	*Net*
TAGIHAN AKSEPTASI	8, 44			***ACCEPTANCE RECEIVABLES***
Pihak ketiga		244,074	374,791	*Third parties*
Pihak berelasi		187,154	106,612	*Related parties*
Jumlah tagihan akseptasi		431,228	481,403	*Total acceptance receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4,312)	(4,814)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		426,916	476,589	*Net*
PIUTANG	9, 44			***RECEIVABLES***
Murabahah				*Murabahah*
Pihak ketiga		136,391,384	124,648,183	*Third parties*
Pihak berelasi		111,712	225,173	*Related parties*
Jumlah *murabahah*		136,503,096	124,873,356	*Total murabahah*
Istishna				*Istishna*
Pihak ketiga		30	132	*Third parties*
Ijarah				*Ijarah*
Pihak ketiga		217,241	13,278	*Third parties*
Pihak berelasi		1,159	-	*Related parties*
Jumlah *ijarah*		218,400	13,278	*Total ijarah*
Jumlah piutang		136,721,526	124,886,766	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4,361,368)	(4,184,787)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		132,360,158	120,701,979	*Net*
PINJAMAN *QARDH*	10, 44			***FUNDS OF QARDH***
Pihak ketiga		9,468,085	8,000,432	*Third parties*
Pihak berelasi		1,838,996	1,701,177	*Related parties*
Jumlah pinjaman *qardh*		11,307,081	9,701,609	*Total funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(817,917)	(834,596)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		10,489,164	8,867,013	*Net*
Dipindahkan		254,445,605	227,092,696	*Carried forward*

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 54

*) *Reclassified, see Note 54*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022*)	
ASET (lanjutan)				***ASSETS** (continued)*
Pindahan		254,445,605	227,092,696	*Brought forward*
PEMBIAYAAN				***FINANCING***
Mudharabah	11, 44			*Mudharabah*
Pihak ketiga		881,133	816,175	*Third parties*
Pihak berelasi		1,000,000	225,222	*Related parties*
Jumlah *mudharabah*		1,881,133	1,041,397	*Total mudharabah*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(49,481)	(39,440)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		1,831,652	1,001,957	*Net*
Musyarakah	12, 44			*Musyarakah*
Pihak ketiga		63,452,727	48,707,593	*Third parties*
Pihak berelasi		24,763,470	21,882,918	*Related parties*
Jumlah *musyarakah*		88,216,197	70,590,511	*Total musyarakah*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4,459,696)	(4,139,565)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		83,756,501	66,450,946	*Net*
Jumlah pembiayaan		90,097,330	71,631,908	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4,509,177)	(4,179,005)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		85,588,153	67,452,903	*Net*
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - BERSIH	13	2,190,107	1,484,573	***ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET***
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH	14	5,352,843	5,396,010	***FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET***
ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH	14	1,128,334	258,688	***INTANGIBLE ASSETS - NET***
ASET PAJAK TANGGUHAN	22c	1,665,694	1,675,103	***DEFERRED TAX ASSETS***
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	15	3,253,388	2,367,465	***OTHER ASSETS - NET***
JUMLAH ASET		353,624,124	305,727,438	***TOTAL ASSETS***

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 54

*) *Reclassified, see Note 54*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS SEGERA	16, 44			***OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY***
Pihak ketiga		1,144,847	885,175	*Third parties*
Pihak berelasi		171,220	124,327	*Related parties*
		1,316,067	1,009,502	
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	17	255,932	192,775	***UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING***
SIMPANAN *WADIAH*				***WADIAH DEPOSITS***
Giro *wadiah*	18, 44			*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		18,023,665	19,387,696	*Third parties*
Pihak berelasi		2,823,859	2,410,156	*Related parties*
Jumlah giro *wadiah*		20,847,524	21,797,852	*Total wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	19, 44			*Wadiah savings deposits*
Pihak ketiga		47,016,211	44,201,658	*Third parties*
Pihak berelasi		10,163	12,747	*Related parties*
Jumlah tabungan *wadiah*		47,026,374	44,214,405	*Total wadiah savings deposits*
Jumlah simpanan *wadiah*		67,873,898	66,012,257	*Total wadiah deposits*
SIMPANAN DARI BANK LAIN	20, 44			***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
Giro *wadiah*				*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		123,984	140,089	*Third parties*
Pihak berelasi		1,353	2,299	*Related parties*
Jumlah giro *wadiah*		125,337	142,388	*Total wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*				*Wadiah savings deposits*
Pihak ketiga		7,788	1,309	*Third parties*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")				*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Pihak ketiga		1,401,191	1,475,000	*Third parties*
Pihak berelasi		226,985	600,000	*Related parties*
Jumlah Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")		1,628,176	2,075,000	*Total Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Jumlah simpanan dari bank lain		1,761,301	2,218,697	*Total deposits from other banks*
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	21	11,900,055	-	***LIABILITIES TO BANK INDONESIA***
LIABILITAS AKSEPTASI	8, 44			***ACCEPTANCE LIABILITIES***
Pihak ketiga		287,323	401,061	*Third parties*
Pihak berelasi		143,905	80,342	*Related parties*
Jumlah liabilitas akseptasi		431,228	481,403	*Total acceptance liabilities*
UTANG PAJAK	22a	539,042	667,485	***TAXES PAYABLE***
LIABILITAS IMBALAN KERJA	42, 44	667,264	689,018	***EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES***
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	41d	32,017	28,873	***ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES***
LIABILITAS LAIN-LAIN	23	2,446,107	2,355,781	***OTHER LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		87,222,911	73,655,791	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY*** *(continued)*
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Giro *mudharabah*	24, 44			*Mudharabah demand deposits*
Pihak ketiga		14,835,449	9,012,699	*Third parties*
Pihak berelasi		17,581,811	13,742,269	*Related parties*
Jumlah giro *mudharabah*		32,417,260	22,754,968	*Total mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	25, 44			*Mudharabah savings deposits*
Pihak ketiga		78,088,518	72,811,278	*Third parties*
Pihak berelasi		191,667	86,074	*Related parties*
Jumlah tabungan *mudharabah*		78,280,185	72,897,352	*Total mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	26, 44			*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga		87,628,737	82,623,832	*Third parties*
Pihak berelasi		28,356,052	18,136,510	*Related parties*
Jumlah deposito *mudharabah*		115,984,789	100,760,342	*Total mudharabah time deposits*
Jumlah giro, tabungan dan deposito *mudharabah*		226,682,234	196,412,662	*Total mudharabah demand deposits, savings and time deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	27, 44			*Subordinated sukuk mudharabah*
Pihak ketiga		175,000	775,000	*Third parties*
Pihak berelasi		25,000	600,000	*Related parties*
Jumlah sukuk *mudharabah* subordinasi		200,000	1,375,000	*Total subordinated sukuk mudharabah*
Sukuk *mudharabah muqayyadah*	28	3,608	-	*Sukuk mudharabah muqayyadah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	29	776,250	778,375	*Mudharabah term financing*
JUMLAH DANA *SYIRKAH* TEMPORER		227,662,092	198,566,037	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham				*Share capital - Rp500 (full amount) par value per share*
Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham				*Authorised share capital - 80,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 46.129.260.138 saham	30	23,064,630	23,064,630	*Issued and fully paid-up capital - 46,129,260,138 shares*
Tambahan modal disetor	30	(3,929,100)	(3,929,100)	*Additional paid-in capital*
Keuntungan revaluasi aset tetap		444,530	444,530	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak		241,462	268,904	*Remeasurement of defined benefit plan - net of tax*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain		6,154	(55,477)	*Unrealised gain/(loss) on securities measured at fair value through other comprehensive income*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya		2,236,713	1,384,677	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		16,674,732	12,327,446	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS		38,739,121	33,505,610	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS		353,624,124	305,727,438	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI *MUDHARIB*				***INCOME FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB***
Pendapatan dari jual beli	31	12,627,780	11,354,885	*Income from sales and purchases*
Pendapatan dari bagi hasil	32	5,940,486	4,864,264	*Income from profit sharing*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	33	155,446	122,221	*Income from ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	34	3,528,031	3,281,495	*Other main operating income*
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	35	(5,993,168)	(4,032,169)	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		16,258,575	15,590,696	***BANK'S SHARE IN PROFIT***
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	36			***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan imbalan jasa perbankan		3,112,884	2,687,208	*Fee based income from banking services*
Pendapatan lainnya		1,091,582	1,013,903	*Other income*
Jumlah pendapatan usaha lainnya		4,204,466	3,701,111	*Total other operating income*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	37	(5,035,215)	(4,948,942)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	38	(5,169,938)	(4,856,436)	*General and administrative*
Bonus *wadiah*		(1,107)	(11,180)	*Wadiah bonus*
Lain-lain		(42,944)	(78,778)	*Others*
		(10,249,204)	(9,895,336)	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih	39	(2,622,479)	(3,748,797)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
LABA USAHA		7,591,358	5,647,674	***INCOME FROM OPERATION***
PENDAPATAN NONUSAHA - BERSIH		(2,156)	8,534	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK		7,589,202	5,656,208	***INCOME BEFORE ZAKAT AND TAX EXPENSE***
ZAKAT		(189,730)	(141,405)	***ZAKAT***
BEBAN PAJAK	22b	(1,695,729)	(1,254,621)	***TAX EXPENSES***
LABA BERSIH		5,703,743	4,260,182	***NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	42	(35,181)	164,914	*Remeasurement of employee benefit liabilities*
Pajak penghasilan terkait		7,739	(36,281)	*Related income tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		61,631	(77,740)	*Unrealised gain/(loss) on securities measured at fair value through other comprehensive income*
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak		34,189	50,893	*Total other comprehensive income net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		5,737,932	4,311,075	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	40	123.65	102.54	***BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Keuntungan revaluasi aset tetap/ *Gain on revaluation of fixed assets*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak/ *Remeasurement of employee benefit liabilities - net of tax*	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Unrealised gains/(losses) on marketable securities at fair value through other comprehensive income*	Saldo laba/*Retained earnings*		Ekuitas/ *Equity*	
							Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 1 Januari 2022		20,564,654	(6,366,776)	444,530	140,271	22,263	779,036	9,429,956	25,013,934	*Balance as at 1 January 2022*
Laba bersih		-	-	-	-	-	-	4,260,182	4,260,182	*Net income*
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain bersih setelah pajak		-	-	-	128,633	(77,740)	-	-	50,893	*Other comprehensive income/(loss) net of tax*
Penambahan modal saham	30	2,499,976	2,437,676	-	-	-	-	-	4,937,652	*Additional share capital*
Pembagian dividen		-	-	-	-	-	-	(757,051)	(757,051)	*Dividend payment*
Penambahan cadangan umum		-	-	-	-	-	605,641	(605,641)	-	*Additional to general reserve*
Saldo per 31 Desember 2022		23,064,630	(3,929,100)	444,530	268,904	(55,477)	1,384,677	12,327,446	33,505,610	***Balance as at 31 December 2022***
Dampak penerapan PSAK 107 (Revisi 2021)		-	-	-	-	-	-	(78,403)	(78,403)	*Impact of implementing SFAS 107 (Revised 2021)*
Saldo per 1 Januari 2023 (setelah penerapan PSAK 107 (Revisi 2021))		23,064,630	(3,929,100)	444,530	268,904	(55,477)	1,384,677	12,249,043	33,427,207	*Balance as at 1 January 2023 (after implementing SFAS 107 (Revised 2021))*
Laba bersih		-	-	-	-	-	-	5,703,743	5,703,743	*Net income*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(27,442)	61,631	-	-	34,189	*Other comprehensive income*
Pembagian dividen		-	-	-	-	-	-	(426,018)	(426,018)	*Dividend payment*
Penambahan cadangan umum		-	-	-	-	-	852,036	(852,036)	-	*Additional to general reserve*
Saldo per 31 Desember 2023		23,064,630	(3,929,100)	444,530	241,462	6,154	2,236,713	16,674,732	38,739,121	***Balance as at 31 December 2023***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan jual beli, bagi hasil, *ijarah* dan usaha utama lainnya		22,356,599	19,343,529	*Proceeds of margin, profit sharing, ijarah and other main operating*
Pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer		(5,930,162)	(3,997,872)	*Payment of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	9, 10, 11, 12, 36	1,703,364	1,377,882	*Receipts from recovery of financing and receivable written off*
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		3,115,816	2,723,083	*Receipt of other operating income*
Pembayaran tantiem		(91,574)	(75,784)	*Payment tantiem*
Pembayaran beban usaha		(12,698,368)	(11,781,973)	*Payment operating expenses*
Penerimaan atas pendapatan nonusaha - bersih		25,571	24,903	*Receipt from non-operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(1,855,197)	(1,446,720)	*Payment of corporate income tax*
Pembayaran zakat		(205,881)	(170,771)	*Payment of zakat*
Penyaluran dana kebajikan		(80,736)	(108,831)	*Distribution of qardhul hasan funds*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		6,339,432	5,887,446	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				*(Increase)/decrease in operating assets:*
Surat berharga - diukur pada nilai wajar		(3,972,560)	1,663,206	*Marketable securities - measured at fair value*
Surat berharga jangka pendek lainnya		(40,287)	45,529	*Other short-term securities*
Piutang		(11,834,760)	(23,099,277)	*Receivables*
Pinjaman *qardh*		(1,605,472)	(282,378)	*Funds of qardh*
Pembiayaan		(18,465,422)	(12,449,035)	*Financing*
Tagihan akseptasi		50,175	(319,908)	*Acceptance receivables*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*		(705,535)	(583,008)	*Assets acquired for ijarah*
Aset lain-lain		(2,886)	(208,881)	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				*Increase/(decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		322,716	430,314	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah		1,861,641	8,764,367	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain		(457,396)	2,102,759	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi		(50,175)	319,908	*Acceptance liabilities*
Utang pajak		48,173	89,446	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain		283,819	126,051	*Other liabilities*
Kenaikan dana *syirkah* temporer		30,269,572	19,398,991	*Increase in temporary syirkah funds*
Kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi		2,041,035	1,885,530	*Net cash generated by operating activities*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan/pelepasan investasi pada surat berharga		111,080,068	464,041,150	*Sale/disposal of investment in marketable securities*
Perolehan surat berharga		(120,672,073)	(456,004,645)	*Acquisition of marketable securities*
Hasil penjualan aset tetap		5,521	-	*Proceeds from sale of fixed assets*
Perolehan aset tetap	14	(826,243)	(1,897,082)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset tidak berwujud	14	(991,632)	(144,715)	*Acquisition of intangible assets*
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas investasi		(11,404,359)	5,994,708	*Net cash (used in)/provided by investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa		(134,742)	(124,192)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen		(426,018)	(757,051)	*Payments of dividend*
Pembayaran pembiayaan berjangka mudharabah		(781,307)	-	*Payments of mudharabah term financing*
Penerimaan pembiayaan berjangka *mudharabah*		776,250	742,500	*Receipts from mudharabah term financing*
Hasil penerbitan saham baru	30	-	4,999,952	*Proceeds from issuance of new shares*
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan		(1,375,000)	-	*Payments of securities issued*
Surat berharga yang diterbitkan		203,759	-	*Securities Issued*
Liabilitas kepada Bank Indonesia		11,900,055	-	*Liabilities from Bank indonesia*
Biaya emisi penerbitan saham	30	-	(62,300)	*Share issuance costs*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		10,162,997	4,798,909	*Net cash provided by financing activities*
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		799,673	12,679,147	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		39,221,419	26,542,272	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		40,021,092	39,221,419	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:*
Kas	4	5,255,841	4,951,469	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	32,440,778	31,778,458	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	6	2,324,473	2,491,492	*Current accounts and placements with other banks*
JUMLAH		40,021,092	39,221,419	***TOTAL***

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 54

**) Reclassified, see Note 54*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*	31, 32, 33, 34	22,251,743	19,622,865	*Revenue from fund management as mudharib*
Pengurangan				*Deduction*
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:				*Current year income in which its cash and cash equivalents have not been received:*
Pendapatan dari jual beli		(623,425)	(588,556)	*Income from sales and purchase*
Pendapatan bagi hasil		(44,429)	(25,972)	*Income from profit sharing*
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		(104,229)	(43,778)	*Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih		(29,685)	(20,093)	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya		(889,375)	(898,140)	*Other main operating income*
		(1,691,143)	(1,576,539)	
Penambahan				*Addition*
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan:				*Previous year income in which its cash and cash equivalent were received during current year:*
Pendapatan dari jual beli		588,556	493,885	*Income from sales and purchase*
Pendapatan bagi hasil		25,972	16,043	*Income from profit sharing*
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		43,778	242,077	*Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih		20,093	11,806	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya		898,140	665,978	*Other main operating income*
		1,576,539	1,429,789	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		22,137,139	19,476,115	*Available income for profit sharing*
Hak bagi hasil milik Bank		(16,143,971)	(15,443,946)	*Bank's share in profit sharing*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	35	5,993,168	4,032,169	*Third parties' share on return*
Dirinci atas:				*Details to:*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		5,737,236	3,839,394	*Fund owners' share on distributed profit sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	17	255,932	192,775	*Fund owners' share on undistributed profit sharing*
Jumlah		5,993,168	4,032,169	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
Sumber dana zakat				***Sources of zakat funds***
Internal bank		189,730	141,405	*Internal bank*
Eksternal bank				*External bank*
Pegawai		33,041	31,661	*Employees*
Nasabah dan umum		34,731	38,656	*Customers and public*
		257,502	211,722	
Penyaluran dana zakat				***Distribution of zakat funds***
Disalurkan ke lembaga lain		(205,881)	(170,771)	*Distributed to other institutions*
Penurunan dana zakat		51,621	40,951	*Decrease in zakat funds*
Saldo awal dana zakat		145,153	104,202	***Beginning balance of zakat funds***
Saldo akhir dana zakat	16	196,774	145,153	***Ending balance of zakat funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
Sumber dana kebajikan				***Sources of qardhul hasan funds***
Infaq dan *shadaqah*		63,947	73,857	*Infaq and shadaqah*
Denda		17,915	12,877	*Penalty*
Pendapatan nonhalal		1,733	3,168	*Non-halal income*
		83,595	89,902	
Penggunaan dana kebajikan				***Uses of qardhul hasan funds***
Sumbangan		(80,736)	(108,831)	*Donation*
Kenaikan/(penurunan) dana kebajikan		2,859	(18,929)	*Increase/(decrease) qardhul hasan funds*
Saldo awal dana kebajikan		7,048	25,977	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Saldo akhir dana kebajikan	23	9,907	7,048	***Ending balance of qardhul hasan funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank BRIsyariah Tbk ("Bank") berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta ("BJA") berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, S.H., notaris di Jakarta.

BJA berubah nama menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Pemegang Saham, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 16 Oktober 2008. Pada tahun 2009, BSBRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Pemegang Saham BSBRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

PT Bank BRISyariah berubah nama menjadi PT Bank BRIsyariah Tbk sesuai persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386. AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.

Pada bulan Januari 2021, telah terjadi penggabungan antara PT Bank BRIsyariah Tbk dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Dewan Komisaris OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

1. GENERAL

a. Bank establishment and general information

PT Bank BRIsyariah Tbk (the "Bank") is located in Jakarta, Indonesia, and initially established under the name of PT Bank Jasa Arta ("BJA") based on the Deed of Establishment No. 4 dated 3 April 1969 made before Liem Toeng Kie, S.H., notary in Jakarta.

BJA changed its name to PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") based on Shareholders' Decision Statement, as stated in the Deed No. 45 dated 22 April 2008 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta and obtained a license from Bank Indonesia to change its business activities, from a conventional bank into a commercial bank based on sharia principles effective from 16 October 2008. In 2009, BSBRI changed its name to PT Bank BRISyariah based on Shareholders' Decision Statement, as stated in Notarial Deed No. 18 dated 14 April 2009 made before Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta.

PT Bank BRISyariah changed its name to PT Bank BRIsyariah Tbk as approved, accepted and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02 Year 2018 dated 10 January 2018.

In January 2021, there was a merger of PT Bank BRIsyariah Tbk with PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah. The merger has received approval from Financial Services Authority ("OJK") of Capital Market through its letter No. S-289/D.04/2020 dated 11 December 2020 and OJK Board of Commissioners Number 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021 concerning the Granting of Permit to Merge PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah into PT Bank BRIsyariah Tbk and a Name Change Permit Using a Business License from PT Bank BRIsyariah Tbk to become a Business License on behalf of PT Bank Syariah Indonesia Tbk as the Merged Bank.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Pada bulan Juni 2022, terjadi perubahan klasifikasi saham pada anggaran dasar sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta sehubungan dengan:

- Penerapan klasifikasi saham pada Bank menjadi saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan saham biasa Seri B yang merupakan saham biasa atas nama.
- Reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Bank menjadi 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi saham biasa Seri B.

Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 tanggal 22 Juli 2022.

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir terkait penambahan modal disetor dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Bank establishment and general information** (continued)*

In June 2022, there was change in the shares classification in the Articles of Association as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendments to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 dated 24 June 2022 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, in connection with:

- *The implementation of the classification of shares in the Bank into Series A Dwiwarna share which is share with special rights and Series B common share which is ordinary share.*
- *Reclassification of 1 (one) share owned by the Republic of Indonesia in the Bank into 1 (one) Series A Dwiwarna share and all shares owned by other shareholders into Series B common shares.*

This change was accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 dated 22 July 2022.

The latest amendment to the Bank's Articles of Association in relation to the additional paid-up capital was stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendment to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 dated 29 December 2022 made before Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., as Substitute Notary of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. This change was accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 dated 29 December 2022.

According to Article 3 of the Bank's latest Articles of Association, the Bank's scope of business is to conduct banking activities based on Sharia principles.

The Bank's head office is located in The Tower Building, Gatot Subroto Street No. 27, Karet Semanggi Village, Setiabudi District, South Jakarta 12930.

As at 31 December 2023 and 2022, the Bank has business unit network with details as follows (unaudited):

	2023	2022	
Kantor Cabang	153	153	*Branch Offices*
Kantor Cabang Pembantu	886	1,019	*Sub-Branch Offices*
Layanan Syariah Bank Umum	3,065	3,065	*Commercial Bank Sharia Services*
Kantor Cabang Luar Negeri	1	-	*Overseas Branch Office*
Kantor Fungsional	91	96	*Functional Office*

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

b. Structure and management

The composition of the Board of Commissioners as at 31 Desember 2023 based on the Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 dated 4 October 2023 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2023	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Muliaman D. Hadad[1)]	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim[2)]	*Vice President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Suyanto	*Commissioner*
Komisaris	Masduki Baidlowi	*Commissioner*
Komisaris	Imam Budi Sarjito	*Commissioner*
Komisaris	Sutanto	*Commissioner*
Komisaris	Abu Rokhmad[1)]	*Commissioner*
Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan[3)]	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mohamad Nasir[4)]	*Independent Commissioner*

1) Diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Bank tanggal 22 Mei 2023 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-119/D.03/2023 tanggal 21 September 2023 dan No. KEPR-120/D.03/2023 tanggal 21 September 2023.
2) Diangkat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 22 Mei 2023.
3) Telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen tanggal 6 November 2023.
4) Telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-3/D.03/2023 tanggal 3 Januari 2023.

1) Appointed at the Bank's Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") on 22 May 2023 and has received approval from the Financial Services Authority ("OJK") in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-119/D.03/2023 dated 21 September 2023 and No. KEPR-120/D.03/2023 dated 21 September 2023.
2) Appointed at the Bank's Annual GMS on 22 May 2023.
3) Has submitted a resignation as Independent Commissioner on 6 November 2023.
4) Has obtained OJK approval in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-3/D.03/2023 dated 3 January 2023.

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners as at 31 December 2022 based on the Deed of Statement of Extraordinary Shareholders General Meeting PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 dated 23 September 2022 made before the Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2022	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Suyanto	*Commissioner*
Komisaris	Masduki Baidlowi	*Commissioner*
Komisaris	Imam Budi Sarjito	*Commissioner*
Komisaris	Sutanto	*Commissioner*
Komisaris	Nizar Ali[1)]	*Commissioner*
Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mohamad Nasir[1)]	*Independent Commissioner*

1) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

1) Effective after obtaining approval from OJK for a fit and proper test.

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Structure and management** (continued)*

The composition of the Board of Directors of the Bank as at 31 Desember 2023 based on the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 dated 4 October 2023 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2023	
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Hery Gunardi	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta	*Vice President Director*
Direktur	Ngatari	*Director*
Direktur	Zaidan Novari[1)]	*Director*
Direktur	Anton Sukarna	*Director*
Direktur	Saladin D. Effendi[2)]	*Director*
Direktur	Grandhis Helmi Harumansyah[2)]	*Director*
Direktur Kepatuhan	Tribuana Tunggadewi	*Compliance Director*
Direktur	Ade Cahyo Nugroho	*Director*
Direktur	Moh. Adib	*Director*

1) Telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-12/D.03/2023 tanggal 26 Januari 2023.
2) Diangkat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 22 Mei 2023 dan telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-121/D.03/2023 tanggal 21 September 2023 dan No. KEPR-122/D.03/2023 tanggal 21 September 2023

1) Has obtained OJK approval in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-12/D.03/2023 dated 26 Januari 2023.
2) Appointed at the Bank's Annual GMS on 22 May 2023 and has received approval from the OJK in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of the OJK No. KEPR-121/D.03/2023 dated 21 September 2023 and No. KEPR-122/D.03 /2023 dated 21 September 2023.

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors of the Bank as at 31 December 2022 based on the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 dated 23 September 2022 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2022	
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Hery Gunardi	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta[1)]	*Vice President Director*
Direktur	Ngatari	*Director*
Direktur	Zaidan Novari[2)]	*Director*
Direktur	Anton Sukarna	*Director*
Direktur	Achmad Syafii	*Director*
Direktur	Tiwul Widyastuti	*Director*
Direktur Kepatuhan	Tribuana Tunggadewi	*Compliance Director*
Direktur	Ade Cahyo Nugroho	*Director*
Direktur	Moh. Adib[1)]	*Director*

1) Telah mendapatkan persetujuan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 145/D.03/2022 dan No. 146/D.03/2022 tanggal 22 September 2022.
2) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)*.

1) Has obtained approval in accordance with the Decrees of the Board of Commissioners of the OJK No. 145/D.03/2022 and No. 146/D.03/2022 dated 22 September 2022.
2) Effective after obtaining approval from OJK for a fit and proper test.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Structure and management** (continued)*

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as at 31 December 2023 and 2022 based on the Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 dated 31 May 2021 which was made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2023 dan/*and* 2022	
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Hasanudin	*Chairman*
Anggota	Mohamad Hidayat	*Member*
Anggota	Oni Sahroni	*Member*
Anggota	Didin Hafidhuddin	*Member*

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep: 03/267-KEP/DIR tanggal 13 Juli 2023 dan Surat Dewan Komisaris No. 03/025-3/KOM tanggal 6 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee as at 31 December 2023 based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: 03/267-KEP/DIR dated 13 July 2023 and the Letter of the Board of Commissioners No. 03/025-3/KOM dated 6 July 2023 as follows:

	31 Desember/*December* 2023	
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Mohamad Nasir[1)]	*Chairman*
Anggota	Muliaman D. Hadad[2)]	*Member*
Anggota	Adiwarman Azwar Karim	*Member*
Anggota	M. Arief Rosyid Hasan[3)]	*Member*
Anggota	Komaruddin Hidayat	*Member*
Anggota	M. Zacky Thayib	*Member*
Anggota	M. Gunawan Yasni	*Member*

1) Telah mendapat persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-3/D.03/2023 tanggal 3 Januari 2023.
2) Telah mendapat persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-119/D.03/2023 tanggal 21 September 2023.
3) Telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen tanggal 6 November 2023.

1) Has received OJK approval as the Independent Commissioner in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-3/D.03/2023 dated 3 January 2023.
2) Has received OJK approval as the Independent Commissioner in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEPR-119/D.03/2023 dated 21 September 2023.
3) Has submitted a resignation as Independent Commissioner on 6 November 2023.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep: 02/351-KEP/DIR tanggal 19 Oktober 2022 dan Surat Dewan Komisaris No. 02/050-3/KOM tanggal 19 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee as at 31 December 2022 based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: 02/351-KEP/DIR dated 19 October 2022 and the Letter of the Board of Commissioners No. 02/050-3/KOM dated 19 October 2022 as follows:

	31 Desember/*December* 2022	
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Komaruddin Hidayat	*Chairman*
Anggota	Adiwarman Azwar Karim	*Member*
Anggota	M. Arief Rosyid Hasan	*Member*
Anggota	Mohamad Nasir[1)]	*Member*
Anggota	M. Zacky Thayib	*Member*
Anggota	M. Gunawan Yasni	*Member*

1) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

1) Effective after obtaining approval from OJK for a fit and proper test.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sekretaris Perusahaan Bank adalah Gunawan Arief Hartoyo.

Berdasarkan kebijakan Bank, manajemen kunci Bank mencakup anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp134.912 dan Rp100.303.

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 17.245 dan 17.636 orang (tidak diaudit).

c. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada bulan Mei 2018, Bank melakukan penawaran umum perdana saham meliputi 2.623.350.600 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp510 (nilai penuh) per lembar saham kepada masyarakat di Indonesia. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018.

d. Penawaran Umum Saham Terbatas

Pada bulan Desember 2022, Bank meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD" I), sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 23 September 2022. Dari PMHMETD I, Bank telah meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.999.952.795 lembar saham Seri B (nilai penuh) dengan nilai nominal per lembar saham Rp500 (nilai penuh), dari Rp20.564.654 menjadi Rp23.064.630, sebagaimana tercantum pada Akta no. 191 tanggal 29 Desember 2022, Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta.

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Structure and management** (continued)*

On 31 December 2023 and 2022, Corporate Secretary of the Bank is Gunawan Arief Hartoyo.

Based on the Bank's policies, key management of the Bank consists of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Salaries and other compensation paid to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the year ended 31 December 2023 and 2022 are Rp134,912 and Rp100,303.

As at 31 December 2023 and 2022, the Bank has 17,245 and 17,636 employees, respectively (unaudited).

c. Initial Public Offering (IPO)

In May 2018, the Bank undertook the initial public offering of PT Bank BRIsyariah Tbk shares included 2,623,350,600 new shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share at a selling price of Rp510 (full amount) per share to the public in Indonesia. The offered shares began to be listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on 9 May 2018.

d. Limited Public Offering

In December 2022, the Bank increased additional paid-in capital through Right Issue with Pre-Emptive Rights I ("PMHMETD" I), in accordance with the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholder ("EGMS") dated 23 September 2022. From PMHMETD I, the Bank has increased its share capital by 4,999,952,795 Series B shares (full amount) with a nominal value of Rp500 per share (full amount), from Rp20,564,654 to Rp23,064,630, as stated in Notarial Deed No. 191 dated 29 December 2022 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., in Jakarta.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan Bank diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 30 Januari 2024.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAK Syariah"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2019), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan perubahan ekuitas;
(iv) Laporan arus kas;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Bank are completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 30 January 2024.

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of financial statements

Presented below are the principal accounting policies applied in the preparation of the financial statements of the Bank in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Statements of Sharia Financial Accounting Standards ("SFAS Sharia"), Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant, Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013) and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAMLK")'s Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity, enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The regulation is now a regulation under Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

The financial statements are prepared in accordance with SFAS 101, "Presentation of Sharia Financial Statements". Based on SFAS 101 (Revised 2019), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) Statement of financial position;
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statement of changes in equity;
(iv) Statement of cash flows;
(v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing;
(vi) Statement of sources and distribution of zakat funds;
(vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and
(viii) Notes to the financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of preparation of financial statements *(continued)*

The statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flow and statement of changes in equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

The financial statements are presented on a historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except for statement of cash flow and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

The statement of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

The statement of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to fund owners under cash basis.

The statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

The statement of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds on a particular date.

The statement of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and the qardhul hasan funds balance on a particular date.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan baru, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Amendemen PSAK 107, "Akuntansi Ijarah".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of preparation of financial statements *(continued)*

Zakat is part of the wealth which must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq and shadaqah funds are derived from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah ("Rp") which is also the Bank's functional currency. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

b. Changes to statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

The following are new financial accounting standards, amendments and interpretations of financial accounting standards which become effective starting 1 January 2023:

- *Amendment of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";*
- *Amendment of SFAS 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and its explanations;*
- *Amendment of SFAS 16, "Fixed Assets" regarding proceeds before the intended use;*
- *Amendment of SFAS 46, "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS No. 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and*
- *Amendment of SFAS 107, "Accounting for Ijarah".*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 107, "Akuntansi *Ijarah*"

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 107, "Akuntansi *Ijarah*", Bank menerapkan secara retrospektif ketentuan akuntansi *ijarah* pada akad *ijarah* yang masih berlaku saat tanggal 1 Januari 2023. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas akad *ijarah* yang masih berlaku saat tanggal awal penerapan diakui pada saldo laba awal. Bank telah membukukan selisih metode pengakuan pendapatan pada PSAK 107 (2016) menjadi metode sesuai PSAK 107 (Revisi 2021) sebesar Rp(78.403) pada saldo laba awal pada 1 Januari 2023 dan akun liabilitas lain-lain sebesar Rp95.528, serta selisih antara pendapatan ijarah yang akan diterima yang dihitung dengan metode merata pada akun aset lain-lain sejumlah Rp1.830. Bank juga mereklasifikasi saldo pokok *ijarah* multijasa dari aset yang diperoleh untuk *ijarah* menjadi piutang *ijarah* sebesar Rp(220.544).

Berikut ringkasan dampak implementasi PSAK 107 (Revisi 2021):

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***b. Changes to statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards** (continued)*

Except for the changes as explained below, the implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the Bank's financial statements for current period of prior financial years.

SFAS 107, "Accounting for Ijarah"

In accordance with the transition requirements in SFAS 107, "Ijarah Accounting", the Bank retrospectively applies ijarah accounting treatment for ijarah contracts that are still in effect on 1 January 2023. The impact of the changes to previous accounting policies on ijarah contracts that are still in effect at the initial date of implementation is recognized in retained earnings beginning balance. The Bank has recorded the difference between the income recognition method in SFAS 107 (2016) to the method according to SFAS 107 (Revised 2021) amounting to Rp(78,403) in the beginning balance of retained earnings as at 1 January 2023 and other liabilities amounting to Rp95,528, and the difference of ijarah income receivables amounting using straight-line to Rp1,830. The Bank also reclassify the principal balance of multiservice ijarah from assets acquired for ijarah into the ijarah receivables amounting to Rp(220,544).

The following is a summary of the impact of implementation SFAS 107 (Revised 2021):

	31 Desember/ *December* 2022	Dampak PSAK 107 (Revisi 2021)/ *Impact of SFAS 107 (Revised 2021)*	1 Januari/ *January* 2023	
Piutang *Ijarah*	13,278	239,499	252,777	***Receivables** Ijarah*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - bersih	1,484,573	(220,544)	1,264,029	***Assets acquired for ijarah - net***
Aset lain-lain - bersih	2,367,465	(1,830)	2,365,635	***Other assets - net***
Liabilitas lain-lain	2,355,781	95,528	2,451,309	***Other liabilities***
Ekuitas				***Equity***
Saldo laba				*Retained earnings*
Belum ditentukan penggunaannya	12,327,446	(78,403)	12,249,043	*Unappropriated*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan "Bapepam-LK" No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

(1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
(2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
(3) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai *venturer*;
(4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
(5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
(6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
(7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS"), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

c. Transactions with related parties

The Bank enter into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS 7 (Revised 2015) regarding "Related Party Disclosures" and Regulation of "Bapepam-LK" No. KEP-347/BL/2012, dated 25 June 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies".

A party is considered as a related parties of the Bank if:

(1) directly or indirectly through one or more intermediaries, the party (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has an interest in the Bank that provides significant influence to the Bank, or (iii) has joint control over the Bank;

(2) it is a member of the same group as the Bank;
(3) it is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;
(4) it is a member of the key management personnel of the Bank;
(5) it is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);

(6) it is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in several entities, directly or indirectly, by the individuals described in point (4) or (5); and

(7) it is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or entities related to the Bank.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 44 of the financial statements.

d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Term Deposits and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS"), current accounts and placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)

Aset nonproduktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan rekening penampungan.

Sesuai dengan PSAK 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), Bank menghitung CKPN individual untuk piutang *murabahah* sesuai dengan ketentuan di ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*".

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

(1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
(3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
(4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
(5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
(6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;
(7) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
(8) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed collaterals and suspense accounts.

In accordance with SFAS 102 "Accounting for Murabahah" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with IFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivables".

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired at each statement of financial position date.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

(1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
(2) a breach of contract, such as a default or arrears on principal or margin payment in margin or principal payments;
(3) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;
(4) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
(5) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties;
(6) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio;
(7) adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and
(8) national or local economic conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(1) Piutang *murabahah* memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, dan memiliki saldo nilai piutang secara individual di atas atau sama dengan Rp10.000; dan
(2) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi atau pernah direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki saldo nilai piutang di atas Rp10.000.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(1) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
(2) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; dan
(3) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

The Bank first assesses whether an objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognised is excluded in the collective assessment of impairment.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

(1) Murabahah receivables which have collectibility status as substandard, doubtful and loss, and have an individual receivables balance of above or equal to Rp10,000; and
(2) Murabahah receivables that are restructured or have been restructured and which individually have a balance of receivables above or equal Rp10,000.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

(1) Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;
(2) Murabahah receivables which individually have insignificant value; and
(3) Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively, grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)

Bank menggunakan metode analisis migrasi yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis 5 (lima) tahun dalam menghitung *Probability of Default* ("PD") dan *Loss Given Default* ("LGD").

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan margin.

Aset produktif terdiri atas piutang, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku. Selain itu, Bank juga menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 7 Februari 2022.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan POJK adalah sebagai berikut:

1) Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

The Bank uses the migration analysis method which is a statistical model analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses 5 (five) years historical data to compute for the Probability of Default ("PD") and Loss Given Default ("LGD").

Impairment losses on financial assets recorded at amortised cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

Impairment losses are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortised cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operating income other than margin income.

Earning assets consist of receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees. The Bank provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from uncollectible amount earning assets as stipulated in the applicable SFAS. In addition, the Bank also implemented Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 dated 31 January 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective as at 7 February 2022.

The minimum allowance to be provided in accordance with POJK is as follows:

1) General reserve, shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed cash collateral.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan POJK adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
   a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
   b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
   c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
   d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan POJK.

Bank melakukan pengkajian kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif yang dibentuk berdasarkan POJK No. 02/POJK.03/2022 dan mempertimbangkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih.

Aset nonproduktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA"), rekening perantara, *temporary account*, dan properti terbengkalai.

AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA. Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA atas dasar nilai realisasi bersih:
a) Pada saat pengambilalihan agunan; dan
b) Pada masa-masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan agunan.

Penetapan nilai realisasi bersih wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000 atau lebih. Sementara untuk AYDA dengan nilai di bawah Rp5.000 dapat menggunakan penilai internal Bank.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

The minimum allowance to be provided in accordance with POJK is as follows: (continued)

2) Special reserves, shall be at least:

   a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
   b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
   c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
   d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on POJK.

The Bank conducts assessment upon the adequacy of the allowance for impairment losses on earning assets established based on POJK No. 02/POJK.03/2022 and consider the estimated loss of earning assets that is uncollectible.

Non-earning assets represent the Bank's assets other than earning assets which have potential loss such as foreclosed collaterals ("AYDA"), inter-branches account, temporary account and abandoned property .

AYDA is an asset acquired through auction or over the counter based on voluntary submission by collateral owner or based on the power of attorney to sell over the counter from collateral owner in the event of customer's failure in meeting their liabilities to the Bank.

The Bank is required to settle its AYDA and prepare documentation of its effort to settle the assets. The Bank is required to re-evaluate the AYDA to determine net realisable value:

a) At the time the collateral is foreclosed; and
b) In the subsequent period after the acquisition of foreclosed collaterals.

The determination of net realisable value is required to be carried out by an independent appraiser for AYDA in the amount equivalent or more than Rp5,000. Internal appraiser of the Bank may be used for AYDA below Rp5,000.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:
a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
b) Kurang Lancar, apabila dimiliki 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
c) Diragukan, apabila dimiliki 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
d) Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

AYDA sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun aset lain) diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

Rekening perantara adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Temporary account adalah akun yang digunakan dalam operasional perbankan sehari-hari yang bersifat sementara dan harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening perantara dan *temporary account*.

Kualitas rekening perantara dan *temporary account* ditetapkan sebagai berikut:
1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Properti terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

The Bank is required to use the lowest price if there are several values proposed by the independent or internal appraiser.

AYDA which completion efforts have been made is determined to have quality as follows:
a) Current, if owned within 1 (one) year.
b) Substandard, if owned 1 (one) year to 3 (three) years.
c) Doubtful, if owned 3 (three) years to 5 (five) years.
d) Loss, if owned more than 5 (five) years.

AYDA acquired in relation to settlement of financing (presented in other assets account) are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, AYDA are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

Inter-branch account is receivable or payable arising from inter-branch transactions that are unsettled after a certain period of time.

Temporary accounts is accounts used in daily banking operations that are temporary and must be settled immediately within a certain time period determined by the Bank.

The Bank is required to settle its inter-branch account and temporary account.

The quality of inter-branch account and temporary account are determined as:
1) Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
2) Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

Abandoned property is a fixed asset in the form of property owned by the Bank but not used for normal Bank business activities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian properti terbengkalai.

Kualitas properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:
a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
b) Kurang Lancar, apabila dimiliki 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
c) Diragukan, apabila dimiliki 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
d) Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

e. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dan Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia.

FASBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*. Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia merupakan penempatan berjangka di Bank Indonesia dengan prinsip *jualah*. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

f. Giro dan penempatan pada bank lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari Bank Umum Syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank nonsyariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank.

Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank nonsyariah dikategorikan sebagai dana nonhalal, sehingga Bank Syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan tersebut disalurkan, maka pencatatannya di sisi liabilitas.

g. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

The Bank is required to settle its abandoned property.

The quality of abandoned property are determined as:
a) Current, if owned within 1 (one) year.
b) Substandard, if owned 1 (one) year to 3 (three) years.
c) Doubtful, if owned 3 (three) years to 5 (five) years.
d) Loss, if owned more than 5 (five) years.

e. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS") and Bank Indonesia Sharia Term Deposits.

FASBIS are certificates issued by Bank Indonesia as evidence of short-term deposit of funds with the principles of wadiah. Bank Indonesia Sharia Term Deposits are term deposits in Bank Indonesia with the principles of jualah. Current accounts and placements with Bank Indonesia are presented at the outstanding balance.

f. Current accounts and placements with other banks

Current accounts with other Banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from Sharia Commercial Banks are recognised as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognised as the Bank's income.

The received current account service funds that come from non-sharia bank are categorised as non-halal funds, so Sharia Bank then distributed as qardhul hasan funds. Before the qardhul hasan funds are distributed, it is recorded in liabilities.

g. Investments in marketable securities

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi; dan
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi; dan

- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Investments in marketable securities *(continued)*

At initial recognition, the Bank determines the classification of investments in sukuk either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

a. Measured at amortised cost

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost; and*
- *The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognised in profit or loss.*

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost;*
- *The difference between acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the sukuk and is recognised in profit or loss; and*
- *Gain or loss from changes of fair value is recognised in other comprehensive income after considering unamortised difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has been previously recognised in other comprehensive income. When sukuk is derecognised, the accumulated gain or loss which has been previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as reclassification adjustment.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi; dan
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

h. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit* ("L/C") dan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri ("SKBDN") yang diterima oleh bank penerima.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasi sebagai kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

i. Piutang

Piutang terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, dan piutang *ijarah.*

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Investments in marketable securities *(continued)*

c. Measured at fair value through profit or loss

- *Sukuk acquisition cost excludes transaction cost; and*
- *The difference between fair value and the carrying value is recognised in profit or loss.*

h. Acceptance receivables and liabilities

Acceptance receivables and liabilities represent Letters of Credit ("L/C") and Domestic Documentary Letters of Credit ("SKBDN") transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptance receivables and liabilities are stated at amortised cost. Acceptances receivable are stated at net of allowance for impairment losses.

Acceptance receivables are classified as financing and receivables. Acceptance liabilities are classified as financial liabilities at amortised cost.

i. Receivables

Receivables consist of murabahah receivables, istishna receivables and ijarah receivables.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus directly attributable transaction costs which is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition, are measured at amortised cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Istishna is a sale and purchase contract between al-mustashni (buyer) and al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Piutang (lanjutan)

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Ijarah adalah akad sewa antara pihak yang menyewakan aset *ijarah (mu'jir)* dengan penyewa/penerima manfaat barang *(musta'jir)* atau antara penerima jasa *(musta'jir)* dengan pihak yang memberikan jasa *(ajir)* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat aset *ijarah* maupun jasa.

Piutang *ijarah* terdiri dari piutang *ijarah* atas aset dan piutang *ijarah* multijasa. Piutang *ijarah* atas aset adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Piutang *ijarah* multijasa adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *ijarah* atas aset dan dan piutang *ijarah* multijasa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *ijarah* atas aset dan piutang *ijarah* multijasa. Bank mencatat *ujrah ijarah* atas aset yang akan diterima dan *ijarah* multijasa yang akan diterima sebagai aset lainnya.

j. Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Akad *rahn* merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Receivables *(continued)*

Istishna receivables are stated at the amount billed to customer less allowance for impairment losses. Deferred istishna margin is presented as a contra account of istishna receivables.

Ijarah is the lease contract between the party who rents out the ijarah assets (mu'jir) and the lessee/beneficiary of the goods (musta'jir) or between the recipient of the service (musta'jir) and the party who provide the service (ajir) to exchange benefits and ujrah, both benefits of ijarah assets or services.

Ijarah receivables consist of ijarah of assets and multi-services ijarah receivables. Ijarah of assets receivables are the principal portion of unpaid rent income at maturity. Multi-services ijarah receivables are the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on ijarah of assets receivables and multi-services ijarah receivables are presented as a contra account of ijarah of assets receivables and multi-services ijarah receivables. The Bank records ujrah receivables of ijarah of assets and multi-services ijarah as other assets.

j. Funds of qardh

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh contract.

Qardh contract is a borrowing contract with the condition that the borrower should repay the loan at a specified period of time.

Funds of qardh includes hawalah and rahn financing contract. Hawalah is a transfer of debts from debtors to other party (Bank) which obligate to shoulder or pay. The Bank will obtain an ujrah (fee) from this transaction, which is recognised as income when received.

Rahn contract is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets ujrah (fee) in return which are recognised on an accrual basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Pembiayaan

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah *(predetermined ratio)* yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Financing

Funds of qardh are recognised at the same amount of funds lent when these occur. On the statement of financial position date, funds of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Financing with profit sharing scheme can be done in the form of mudharabah and musyarakah contract.

Mudharabah financing is a joint financing made between the Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (predetermined ratio). On the statement of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah financing is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position dates, musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the existing financing quality.

l. Aset yang diperoleh untuk *ijarah*

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2023

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

l. Assets acquired for ijarah

Policy applicable before 1 January 2023

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on leased term.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2023 (lanjutan)

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:
(i) hibah; atau
(ii) penjualan.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023

Ijarah atas aset adalah ijarah atas manfaat dari aset ijarah.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa atas aset dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* atas aset disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:
(i) hibah; atau
(ii) penjualan.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

I. Assets acquired for ijarah *(continued)*

Policy applicable before 1 January 2023 *(continued)*

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:
(i) a grant; or
(ii) sales.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

Policy applicable from 1 January 2023

Ijarah of assets is ijarah for the benefits of ijarah assets.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in ijarah of assets transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on leased term.

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:
(i) a grant; or
(ii) sales.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 (lanjutan)

Ijarah atas jasa (multijasa) adalah *ijarah* atas manfaat dari jasa. *Ijarah* multijasa secara tidak langsung yaitu *ijarah* atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada penyewa. *Ijarah* multijasa tidak langsung tidak mengakui aset yang diperoleh untuk *ijarah*. Bank mengakui saldo pokok *ijarah* multijasa yang belum dibayar sebagai piutang *ijarah* multijasa.

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud

Aset tetap

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dinilai dengan metode revaluasi. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala setiap tiga tahun untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah tidak disusutkan.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	*Buildings*
Instalasi, kendaraan bermotor, inventaris kantor dan renovasi atas aset sewa	5	*Installation, vehicles, office equipment and leasehold improvement*

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Assets acquired for ijarah *(continued)*

Policy applicable from 1 January 2023 *(continued)*

Ijarah of services (multiservice) is ijarah for the benefits of services. Indirect multiservice ijarah is an ijarah for services where another entity provides services to the lessee. Indirect multiservice ijarah does not recognise assets acquired for ijarah. The Bank recognise the unpaid principal balance of the multiservice ijarah as multiservice ijarah receivable.

m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets

Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation, except for land which is valued with revaluation method. The acquisition cost includes directly attributable cost for the acquisition of the asset. The land is stated at fair value, based on the assessment performed by external independent appraisers which are registered with OJK. Valuation are performed regularly every three years to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from its carrying amount. All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. Land is not depreciated.

Fixed assets, except land, are depreciated from the month of the usage of assets and computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada "selisih revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya.

Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "selisih revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap diakui pada "pendapatan dan beban nonusaha" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset hak guna

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Bank tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli; dan
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets** (continued)*

Costs after initial recognition are recognised as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only when the Bank is likely to benefit economically in the future with respect to these assets and the acquisition cost can be reliably measured. The carrying value of the replaced part are removed from the accounts. All other repairs and maintenance are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income in the financial period when these costs occur.

The increase in the carrying amount arising from revaluation of land is credited to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income.

The decrease in the carrying amount that offset previous increase of the same asset is charged to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income, other decrease is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

The net gains or losses arising from disposal of the fixed assets are determined by comparing the proceeds received from disposal with the carrying amount of the assets and recognised in "non-operating income and expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. When the revalued assets are sold, amounts recorded in equity are transferred to retained earnings.

Right-of-use assets

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

The Bank does not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option; and*
- *Leases of low value assets.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Aset hak guna (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
  2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets *(continued)*

Right-of-use assets *(continued)*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- *The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Bank has the right to direct the use of the identified asset. The Bank has the right when it has a relevant decision-making right on how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
  1. *The Bank has the right to operate the asset; and*
  2. *The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purposes it will be used.*

The Bank recognises a right-of-use assets and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use assets is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Aset hak guna (lanjutan)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak.

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

Biaya yg dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk perangkat lunak mencakup beban pekerja pengembang perangkat lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban, tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Perangkat lunak diamortisasi sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset yaitu 5 tahun.

n. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih akan diterima dan Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA").

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)*. Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets *(continued)*

Right-of-use assets *(continued)*

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the leases term.

Intangible assets

Intangible assets are recognised if, and only if the cost of the asset can be measured reliably and it is probable that the Bank will obtain future economic benefits from the assets. Intangible assets consist of software.

Software acquired by the Bank is recorded at cost less accumulated amortisation. The amortisation method, estimated useful life and residual value are reviewed at the end of each reporting year and adjusted if deemed appropriate.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Software are amortised from the month of the usage of assets and computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets, which is 5 years.

n. Other assets

Other assets among other consist of prepaid expense and income receivables and foreclosed collaterals ("AYDA").

Prepaid expenses are amortised over the useful life using the straight-line method. Foreclosed collaterals acquired in relation to settlement of financing are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, foreclosed collaterals are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

p. Simpanan dari nasabah dan bank lain

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

q. Liabilitas kepada Bank Indonesia

Liabilitas kepada Bank Indonesia (”PaSBI”) merupakan pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Bank sepakat melakukan akad *wakalah bil ististmar* untuk pengelolaan dana dengan agunan berupa surat berharga syariah. Dana yang diterima diakui sebagai liabilitas kepada Bank Indonesia. Bank melakukan pengelolaan dana untuk kegiatan investasi usaha secara keseluruhan *(mutlaqah)*, pengembalian dana kelolaan dan pembayaran hasil pengelolaan *(istitsmar)* dilakukan pada saat pelunasan. Liabilitas kepada Bank Indonesia dicatat sebesar nilai tunai yang diterima dari suatu instrumen intervensi surat berharga syariah dalam suatu operasi moneter reguler oleh Bank Indonesia.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

o. Obligations due immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

p. Deposits from customers and other banks

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits and wadiah savings deposits. Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments, available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors in the Bank.

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank which can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. Wadiah deposits are stated at the amount payable to customers.

q. Liabilities to Bank Indonesia

Liability to Bank Indonesia ("PaSBI") is liquidity management based on Bank Indonesia sharia principles. Bank Indonesia and the Bank agreed to enter into a wakalah bil ististmar agreement for managing funds with collateral in the form of sharia securities. Funds received are recognized as liabilities to Bank Indonesia. The Bank manages funds for overall business investment activities (mutlaqah), returns of managed funds and payment of management results (istitsmar) are made at the time of settlement. Liabilities to Bank Indonesia are stated at the issuance cash value received from sharia securities intervention instrument in a regular monetary operation by Bank Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqoh, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarokah*, dan akun lain yang sejenis, misalnya: giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment received by the Bank. The Bank has the rights to manage and invest the funds in accordance with either the Bank's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing. An example of temporary syirkah funds is the receipt of funds from a mudharabah muthlaqoh, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarokah and other similar accounts. For example: mudharabah demand deposits, mudharabah savings deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah savings deposits represent funds from other parties which receive predetermined and pre-agreed profit sharing (nisbah) based on income derived by the Bank from the use of such funds. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits are stated at nominal amount based on the agreement between the depositors and the Bank.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability. This is because the Bank does not have any liability to return the fund to the owners, except for losses due to the management's negligence or misrepresentation.

On the other hand, temporary syirkah funds cannot also be classified as equity, because of the existence of maturity period and the absence of similar rights of depositors as with shareholders, such as voting rights and the rights to realise gain from current assets and other non-investment assets.

Temporary syirkah funds represent one of the statement of financial position accounts which is in accordance with sharia principles that provide rights to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

s. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna,* pendapatan dari *ijarah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*.

Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Sebelum 1 Januari 2023, pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Setelah 1 Januari 2023, pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* ("IMBT") diakui selama masa akad secara merata sejak aset tersedia sampai akhir akad. Bank mengakui pendapatan *ijarah* multijasa porsi pokok sejak nasabah menerima jasa dari pihak penyedia jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan dan sejumlah biaya jasa yang harus dibayarkan Bank kepada pihak penyedia jasa. Bank mengakui pendapatan margin *ijarah* multijasa secara merata setelah selesainya pemberian jasa oleh pihak penyedia jasa selama masa akad *ijarah* antara Bank dan nasabah. Pendapatan IMBT dan *ijarah* multijasa disajikan secara neto setelah dikurangi beban terkait di laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Temporary syirkah funds *(continued)*

The owners of temporary syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion of fund from each parties. The profit distribution of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

s. Income from fund management as mudharib

Income from fund management as mudharib consists of income from murabahah receivables transactions, istishna receivables, income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and other main operating income.

Income from murabahah receivables is recognised using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables.

When calculating the effective margin, the Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Income from istishna is recognised at the date of transfer of assets.

Before 1 January 2023, income from Ijarah is recognised proportionately over the contract period.

After 1 January 2023, income from ijarah muntahiyah bittamlik ("IMBT") is recognised over the contract period evenly from the time the assets become available until the end of the contract. The Bank recognises the principal portion of income from multi-services ijarah from the time the customer receives services from the service provider based on the progress of the services provided and the amount of service fees that must be paid by the Bank to the service provider. The Bank recognises income from multi-services ijarah margin evenly after the completion of service by the service provider during the period of the ijarah contract between the Bank and the customer. Income from IMBT and multi-services ijarah are presented on a net basis after deducting the related expenses in profit or loss.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* (lanjutan)

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia, pendapatan dari FASBIS, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga.

t. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima *(cash basis)*.

Bagian laba Bank yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan yang telah diterima.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan kepada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya, sedangkan untuk nasabah giro dan tabungan dengan akad *wadiah* dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang didapatkan melalui penggunaan dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Income from fund management as mudharib *(continued)*

Musyarakah income which is distributed to active partners is recognised in accordance with the agreement, while musyarakah income which is distributed to passive partners is recognised as right of the passive partner to profit sharing and liability.

Income from mudharabah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed nisbah, while recognition based on projected income is not allowed. Loss incurred due to negligence on the part of fund manager is charged to the fund manager and shall not reduce the mudharabah investment.

Other main operating income consists of income derived from funds of qardh, Bank Indonesia Sharia Term Deposits, FASBIS, placements with other sharia banks and profit sharing from investment in marketable securities.

t. Third parties' share on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on return of temporary syirkah funds represents third parties' share on the income of the Bank derived from managing of such funds by the Bank under mudharabah mutlaqah principles. The profit sharing is distributed on the cash basis.

The profit sharing distributed to fund owners is calculated based on the revenue of the Bank.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners. The Bank computes proportionately based on the allocation of funds from owners and the Bank which was used in financing and other earning assets granted.

The total available margin and profit sharing are distributed to customers and depositors as shahibul maal and to the Bank as mudharib in accordance with a predetermined nisbah, while for customers of demand deposits and savings deposits under wadiah contract might be granted bonuses according to the Bank's policy.

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which are earned through the use of the Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based investments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pendapatan imbalan jasa perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan diakui pada periode akuntansi dimana jasa diberikan, dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dan dinilai berdasarkan jasa aktual yang telah diberikan sebagai proporsi atas total jasa yang harus diberikan.

v. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama tahun berjalan jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti besar diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2021.

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain terdiri atas:

(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial;
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset); dan
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

u. Fee based income from banking services

Fee based income from banking services is recognised in the accounting period in which the services are rendered, by reference to the stage of completion of the specific transaction and assessed on the basis of the actual service provided as a proportion of the total service to be provided.

v. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognised during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to the pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits and other long-term employee benefits such as grand leaves are recognised as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on Bank regulations and Labor Law No. 11 of 2020 dated 2 November 2021.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit method.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognised as other comprehensive income consist of:

(i) Actuarial gain and losses;
(ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets); and
(iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti - bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti bersih langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

w. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut. Jika perlu, manajemen akan membentuk provisi berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Employee benefits *(continued)*

Defined benefit plan and other long-term employee benefits *(continued)*

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognised as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit liabilities (assets) and re-measurement of liabilities (assets) is recognised immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognised as expense at the earlier date between the occurrence of the amendments or curtailment program occurs, and the recognition of the costs of restructuring or severance. Therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

w. Taxation

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable that those temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses will be utilised in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined. If needed, management will provide provisions based on the estimated amount which will be paid to tax authority.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi bersih tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

x. Transaksi dan saldo mata uang asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah Indonesia sebagai mata uang fungsional. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (nilai penuh):

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***w. Taxation** (continued)*

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realised or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement of financial position dates. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognised as "Income Tax Benefit/(Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

x. Transaction and balance in foreign currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah as the functional currency. Transactions in foreign currencies are recorded at the prevailing exchange rates in effect on the date of the transactions.

At statement of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time).

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

The exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (full amount):

	2023	2022	
1 Dolar Amerika Serikat	15,397.00	15,567.50	*1 United States Dollar*
1 Riyal Arab Saudi	4,106.00	4,139.00	*1 Saudi Arabian Riyal*
1 Euro Eropa	17,038.32	16,581.72	*1 European Euro*
1 Dolar Singapura	11,676.34	11,592.88	*1 Singapore Dollar*
1 Dolar Australia	10,520.77	10,557.88	*1 Australian Dollar*
1 Dolar Hong Kong	1,970.73	1,996.55	*1 Hong Kong Dollar*
1 Pound Sterling Inggris	19,626.56	18,786.09	*1 Great Britain Pound Sterling*
1 Yen Jepang	108.88	117.81	*1 Japan Yen*
1 Dolar Kanada	11,629.59	11,486.39	*1 Canadian Dollar*
1 Franc Swiss	18,299.27	16,827.00	*1 Swiss Franc*
1 Yuan China	2,170.06	2,234.50	*1 Chinese Yuan*
1 Dirham Uni Emirat Arab	4,192.50	-	*1 United Arab Emirates Dirham*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pembiayaan berjangka *mudharabah*

Pembiayaan berjangka *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dengan bank lain sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) selama jangka waktu tertentu. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas yang diterima. Pada tanggal laporan posisi keuangan, dana *syariah* temporer diukur dan disajikan sebesar nilai tercatat.

Hak pemilik dana atas bagi hasil usaha yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai liabilitas.

z. Sukuk *mudharabah*

Sukuk *mudharabah* diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana *syirkah* temporer.

aa. Laba per saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

ab. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

y. Mudharabah term financing

Mudharabah term financing is a joint financing made between the Bank as the business executor (mudharib) and the other bank as the owner of the funds (shahibul maal) during a certain period. The funds received from the fund owners are recognised as temporary syirkah funds amounting to the cash received. On the statement of financial position date, temporary sharia funds are measured and presented at the carrying amount.

The right of the fund owner to the profit sharing that has been calculated but has not yet been distributed to the fund owner is recognised as a liability.

z. Sukuk mudharabah

Sukuk mudharabah is initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using a straight-line method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium associated to the initial recognition and transaction cost. The funds received from the fund owners are recognised as temporary syirkah funds.

aa. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid-up shares during the related year.

ab. Provisions

Provisions are recognised when the Bank has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Sumber dana kebajikan

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Sumber Dana Kebajikan yang didapat berasal dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) apabila berasal dari:

1. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).
2. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya).
3. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
4. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

ad. Segmen operasi

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada Direksi sebagai pengambil keputusan operasional dan keuangan.

Di tahun 2022, Bank menerapkan perubahan terhadap penyajian segmen operasi yang digunakan dalam laporan kinerja manajemen internal. Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas kelompok *Corporate Banking, Commercial Banking,* Hubungan Kelembagaan, Ritel, dan *Treasury Banking* & Kantor Pusat.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

ac. Source of qardhul hasan funds

Based on Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, source of Qardhul Hasan Funds is acquired from Funds that are Prohibited to be Recognised as Revenue (TBDSP Funds), if the funds come from:

1. The transaction that is not accordance with sharia principle and cannot be avoided include interest revenue (riba).
2. The sharia transaction does not fulfilling the term and condition (principle and/or requirement.
3. Penalty funds (fines) because of not fulfilling the obligation on initial contract.
4. Unknown funds, the owner is known but was not found or the owner is known but return cost is higher than the stated amount.

ad. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the business unit that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

The Bank presents operating segment based on the Bank's internal report that is presented to the Board of Directors as the chief operating decision maker.

In 2022, the Bank implements some changes in presentation of its operational segments for the internal management performance report. The Bank has identified and disclosed financial information based on main business (business segment) classified into Corporate Banking, Commercial Banking, Institutional Relation, Retail and Treasury Banking & Head Office.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing

The Bank examines the quality of assets at statement of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised in the profit or loss, the Bank makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment.

The specific condition of impaired counterparty in calculating allowances for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing is evaluated individually based on management's best estimate of the present value of the expected cash in flows. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and/or the net realisable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian pembiayaan yang melekat dalam portofolio piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan segmentasi. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif (Catatan 2d, 9, 10, 11, 12, 45a).

b. Kewajiban imbalan kerja karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban imbalan kerja karyawan.

Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Bank mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

c. Perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba rugi.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

***a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing** (continued)*

Collectively assessed impairment allowances cover financing losses inherent in portfolios of receivables, funds of qardh, and financing with similar economic characteristics when there is objective evidence of impairment, yet the individual impaired items cannot be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as financing quality and product segmentation. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances (Note 2d, 9, 10, 11, 12, 45a).

b. Employee benefits liabilities

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost or income for employee benefits include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of employee benefits liabilities.

The Bank determines the appropriate discount rate at the reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liabilities.

For the rate of future salary increases, the Bank collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

c. Taxation

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit loss.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

d. Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

e. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Bank sebagai *lessee*

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah *lessee* cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

f. Penyisihan kerugian aset nonproduktif

Bank menelaah potensi kerugian aset nonproduktif pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat penyisihan penurunan nilai yang harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam menentukan apakah penyisihan penurunan nilai harus dibentuk, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan nilai dari aset nonproduktif. Estimasi tersebut didasarkan pada pertimbangan dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda (Catatan 15).

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

c. Taxation *(continued)*

Deferred tax assets are recognised for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

d. Fixed asset revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

e. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Bank as lessee

The Bank determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Bank has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Bank applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

f. Allowance for impairment losses on non-earning assets

The Bank evaluates the potential loss of non-earning assets at each reporting date to assess whether provision for impairment losses should be recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised, the Bank makes estimate on whether there is any indication of impairment of non-earning assets. These estimates are based on consideration of a number of factors and the end results may be different (Note 15).

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perlakuan penjualan aset pembiayaan

Penjualan aset syariah berupa pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* ("MMQ") griya dilakukan setelah memenuhi kondisi jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*), yang ditandai dengan berpindahnya kepemilikan aset pembiayaan MMQ yang diperjualbelikan, tidak ada kewajiban Bank untuk membeli kembali aset pembiayaan dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk instrumen investasi sekuritisasi efek beragun aset syariah surat partisipasi ("EBAS-SP").

Kontrak jual beli secara syariah harus dibuat dalam bentuk jelas dan final. Prinsip syariah mensyaratkan tidak boleh terdapat dua transaksi dalam satu kontrak. Sehingga Bank memperlakukan penjualan aset pembiayaan sebagai transaksi yang terpisah dari pembelian EBAS-SP kelas B.

Bank menerapkan kriteria jual beli sesungguhnya menggunakan PSAK 111, "Akuntansi *Wa'd*". Jual beli sesungguhnya ditandai dengan telah terjadi perpindahan dari Bank kepada penerbit atas:

a) hak dan kewajiban hukum aset syariah;
b) semua manfaat dan risiko dari aset syariah; dan
c) pengendalian atas aset syariah tersebut.

Sesuai dengan hal diatas, Bank menghentikan pengakuan pembiayaan MMQ secara menyeluruh (lihat Catatan 12g).

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

g. Treatment of sales of financing assets

The sale of sharia assets in the form of musyarakah mutanaqishah ("MMQ") financing is carried out after fulfilling the actual conditions of sale and purchase (al-bai' al-haqiqi), which is marked by the transfer of ownership of the MMQ financing assets being traded, there is no obligation of the Bank to buy back the financing assets in the form of financing or in the form of sharia asset-backed securities securitization investment instrument participation letter ("EBAS-SP").

Sharia sale and purchase contracts must be made in a clear and final form. Sharia principles require that there cannot be two transactions in one contract. So the Bank treats the sale of financing assets as a separate transaction from the purchase of class B EBAS-SP.

The Bank applies true sale criteria using SFAS 111, "Accounting of Wa'd". The true sale is marked by a transfer from the Bank to the issuer of:

a) legal rights and obligations of sharia assets;
b) all risks and rewards from sharia assets; and
c) control over the sharia assets.

Accordingly, the Bank derecognised the MMQ financing at its entirety (see Note 12g).

4. KAS / ***4. CASH***

	2023	2022	
Rupiah	4,912,435	4,809,425	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Riyal Arab Saudi	201,033	72,892	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Amerika Serikat	130,786	66,390	*United States Dollar*
Dolar Singapura	8,425	2,154	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	2,242	324	*Europe Euro*
Dolar Australia	793	274	*Australian Dollar*
Yen Jepang	127	10	*Japanese Yen*
	5,255,841	4,951,469	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo dalam mata uang Rupiah tersebut sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) masing-masing sebesar Rp804.958 dan Rp824.326.

As at 31 December 2023 and 2022, the Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) amounting to Rp804,958 and Rp824,326, respectively.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / *CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

a. Berdasarkan mata uang / *By currency*

	2023	2022	
Rupiah	21,401,613	27,898,748	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	11,039,165	3,879,710	*United States Dollar*
	32,440,778	31,778,458	

b. Berdasarkan jenis / *By type*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Giro pada Bank Indonesia	16,901,613	20,047,548	*Current accounts with Bank Indonesia*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	4,500,000	7,851,200	*Bank Indonesia Sharia Certificates Facilities ("FASBIS")*
	21,401,613	27,898,748	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	10,854,885	3,814,038	*Bank Indonesia Sharia Term Deposits*
Giro pada Bank Indonesia	184,280	65,672	*Current accounts with Bank Indonesia*
	11,039,165	3,879,710	
	32,440,778	31,778,458	

c. Berdasarkan jangka waktu / *By time period*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	21,401,613	27,898,748	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
	21,401,613	27,898,748	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	10,038,360	3,179,172	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	1,000,805	700,538	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
	11,039,165	3,879,710	
	32,440,778	31,778,458	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *By remaining period to maturity*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	21,401,613	27,898,748	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
	21,401,613	27,898,748	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	10,269,315	3,179,172	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	769,850	700,538	*> 1 - ≤ 3 months*
	11,039,165	3,879,710	
	32,440,778	31,778,458	

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA *(continued)*

e. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh giro dan penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan "Lancar".

e. By collectibility

As at 31 December 2023 and 2022, all current accounts and placements with Bank Indonesia is classified as "Current".

f. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM")

f. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") Ratio

	2023	2022	
Rasio GWM			*GWM Ratio*
Rupiah			*Rupiah*
Kewajiban Pemenuhan GWM:			*Fulfillment of GWM:*
GWM Harian	0.00%	0.00%	*GWM Daily*
GWM Rata-Rata	7.50%	7.50%	*GWM Average*
Insentif GWM	(2.90%)	(1.80%)	*GWM Incentives*
Disinsentif RIM	0.00%	0.08%	*RIM Disincentives*
Total Kewajiban Pemenuhan GWM	4.60%	5.78%	*Total of Fulfillment of GWM*
Realisasi Pemenuhan GWM	6.76%	8.30%	*Realisation Fulfillment of GWM*
Realisasi Pemenuhan GWM Rata-Rata	4.87%	6.06%	*Realisation Fulfillment of GWM Average*
Realisasi Pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM") (d/h GWM Sekunder)	21.35%	23.89%	*Realisation Fulfillment of Macroprudential Liquidity Buffer ("PLM") (previously GWM Secondary)*
Valuta asing			*Foreign currencies*
Kewajiban Pemenuhan GWM	1.00%	1.00%	*Fulfillment of GWM*
Realisasi Pemenuhan GWM	1.13%	1.18%	*Realisation Fulfillment of GWM*

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 2/PADG/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023 yang mana mewajibkan setiap bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari dana pihak ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan valuta asing.

The GWM ratio as at 31 December 2023 is calculated based on Member of the Board of Governors Regulation ("PADG") No. 2/PADG/2023 dated 24 March 2023 concerning "Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units" came into force on 1 April 2023, and regulates that each bank is required to maintain a GWM in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.5% and 1% of third party funds ("DPK") in Rupiah and foreign exchange.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan PADG No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 yang mana mewajibkan setiap bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari DPK dalam Rupiah dan valuta asing.

The GWM ratio as at 31 December 2022 is calculated based on PADG No. 24/8/PADG/2022 dated 30 June 2022 concerning "Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units" came into force on 1 July 2022, and regulates that each bank is required to maintain a GWM in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.5% and 1% of DPK in Rupiah and foreign exchange.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

f. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") (lanjutan)

Dalam perhitungan kewajiban pemenuhan GWM Rupiah, terdapat komponen insentif GWM sesuai PADG No. 24/12/PADG/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang "Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (Perubahan PADG Insentif, serta disinsentif RIM sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021 dan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 yang berlaku sejak 28 November 2019, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* ("FDR") menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM"). Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target Bank Indonesia sebesar 94%.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA *(continued)*

f. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") Ratio *(continued)*

In calculating the fulfillment of Rupiah statutory reserves, there is a GWM incentive component which is in accordance with the PADG No. 24/12/PADG/2022 dated 20 July 2022 concerning "Amendment to the Member of the Board of Governors Regulation Number 24/4/PADG/2022 concerning Regulations for Implementation of Incentives for Banks Providing Provision of Funds for Certain and Inclusive Economic Activities (Changes to PADG Incentives, as well as disincentives RIM according to Bank Indonesia Regulation Number 21/12/PBI/2019 dated 25 November 2019 concerning "Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit".

In addition, based on Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 which is effective from 1 May 2021 and Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 which is effective from 28 November 2019, there are changes in the calculation of GWM Financing to Deposit Ratios ("FDR") to the Macroprudential Intermediation Ratio ("RIM"). Bank must pay additional Statutory Reserves if the Bank's RIM is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the Bank Indonesia target of 94%.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the GWM of Bank Indonesia.

As at 31 December 2023 and 2022, the Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM with Bank Indonesia.

g. Rata-rata tingkat bonus tahunan / ***g. The average annual bonus rate***

	2023	2022	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	5.00% - 5.25%	2.75% - 4.75%	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")*
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	4.31% - 5.59%	0.04% - 4.72%	*Bank Indonesia Sharia Term Deposit*

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	2023	2022	
Rupiah	639,257	1,967,271	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	1,284,332	433,290	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	365,480	55,367	*Saudi Arabian Riyal*
Euro Eropa	14,795	13,900	*Europe Euro*
Dolar Singapura	10,468	16,136	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	4,364	1,689	*Australian Dollar*
Uni Emirat Arab	2,113	-	*United Arab Emirates*
Pound Sterling Inggris	2,073	951	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	1,338	2,632	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	253	256	*Hong Kong Dollar*
	1,685,216	524,221	
Jumlah	2,324,473	2,491,492	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20,745)	(15,575)	*Allowance for impairment losses*
	2,303,728	2,475,917	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Giro	317,627	212,995	*Current accounts*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank ("SIPA")	250,000	934,000	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")	-	690,000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	1,651,606	503,982	*Current accounts*
	2,219,233	2,340,977	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah			***Rupiah***
Giro	71,630	130,276	*Current accounts*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	33,610	20,239	*Current accounts*
	105,240	150,515	
Jumlah	2,324,473	2,491,492	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20,745)	(15,575)	*Allowance for impairment losses*
	2,303,728	2,475,917	

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan "Lancar".

c. By Bank Indonesia collectibility

All current accounts with other banks as at 31 December 2023 and 2022 are classified as "Current".

d. Berdasarkan jatuh tempo

Giro dan penempatan pada bank lain memiliki sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 (satu) bulan.

d. By maturity

Current accounts and placements with other banks have remaining period to maturity of less than 1 (one) month.

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro dan penempatan pada bank lain

e. The movements of allowance for losses on current accounts and placements with other banks

	2023	2022	
Saldo awal	15,575	17,238	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 39)	4,628	(2,662)	*Provision/(reversal) during the year (Note 39)*
Selisih kurs	542	999	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	20,745	15,575	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses from uncollectible current accounts with other banks.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat giro dan penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan.

As at 31 December 2023 and 2022, no current accounts and placements with other bank are pledged as collaterals.

Seluruh jasa giro yang diterima dari giro pada bank nonsyariah dicatat sebagai dana kebajikan (Catatan 23).

All income received from current accounts with non-sharia banks are recorded as qardhul hasan funds (Note 23).

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Nilai wajar melalui laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	1,835,552	1,847,602	909,966	921,324	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah ("SPNS")	895,000	878,000	-	-	*Sharia State Treasury Certificate ("SPNS")*
Sukuk Bank Indonesia	1,724,704	1,724,704	-	-	*Sukuk Bank Indonesia*
Reksa dana	400,000	405,089	-	-	*Mutual funds*
Efek Beragun Aset Syariah	27,301	31,787	-	-	*Sharia Asset Backed Securities*
	4,882,557	4,887,182	909,966	921,324	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	6,728	6,702	-	-	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Total nilai wajar melalui laba rugi	4,889,285	4,893,884	909,966	921,324	***Total fair value through profit or loss***

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	7,119,539	7,087,426	3,173,558	3,051,045	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Sukuk Bank Indonesia	20,693,578	20,744,693	-	-	*Sukuk Bank Indonesia*
Reksa dana	1,200,000	1,219,721	-	-	*Mutual funds*
Sukuk korporasi	120,000	120,890	-	-	*Corporate sukuk*
	29,133,117	29,172,730	3,173,558	3,051,045	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Sukuk Bank Indonesia	1,539,700	1,544,442	-	-	*Sukuk Bank Indonesia*
Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	30,672,817	30,717,172	3,173,558	3,051,045	***Total fair value through other comprehensive income***
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	33,952,697	34,092,672	43,362,582	43,717,378	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Sukuk Bank Indonesia	-	-	8,602,984	8,602,984	*Sukuk Bank Indonesia*
Sukuk korporasi	947,800	947,800	902,800	902,800	*Corporate sukuk*
Wesel ekspor	200,858	200,858	160,571	160,571	*Export bills*
	35,101,355	35,241,330	53,028,937	53,383,733	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	443,434	449,140	483,371	495,803	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Total biaya perolehan diamortisasi	35,544,789	35,690,470	53,512,308	53,879,536	***Total amortised cost***
Total investasi pada surat berharga		71,301,526		57,851,905	***Total investments in marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(132,506)		(10,634)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		71,169,020		57,841,271	*Net*

b. Berdasarkan penerbit

b. By issuer

Penerbit/*Issuer*	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Peringkat/ *Rating*		Nilai tercatat/ *Carrying value*	
		31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ ***Measured at fair value through profit or loss***					
Rupiah					
Bank Indonesia	6.63	-	-	1,724,704	-
Pemerintah/*Government*					
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	86,795	3,602
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	8,846	588
Seri SBSN PBS005	6.75	-	-	108,737	-
Seri SBSN PBS007	9.00	-	-	4,509	-
Seri SBSN PBS011	8.75	-	-	-	165,882
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	38,939	-
Seri SBSN PBS015	8.00	-	-	66,406	26,296
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	109,087	52,396
Seri SBSN PBS019	8.25	-	-	-	174,574
Seri SBSN PBS021	8.50	-	-	1,660	27,901
Seri SBSN PBS022	8.63	-	-	9,406	1,704
Seri SBSN PBS023	8.13	-	-	6,505	16,071
Seri SBSN PBS025	8.38	-	-	41,404	166
Seri SBSN PBS026	6.63	-	-	56,604	10,087
Seri SBSN PBS027	6.50	-	-	-	93,970
Seri SBSN PBS028	7.75	-	-	112,525	-
Seri SBSN PBS029	6.38	-	-	90,476	5,450
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	1,149	-
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	435,305	18,204
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	22,464	2,530
Seri SBSN PBS033	6.75	-	-	22,770	9,779
Seri SBSN PBS034	6.50	-	-	43,684	-
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	156,924	-
Seri SBSN PBS037	6.88	-	-	52,694	-
Seri SBSN PBS038	6.88	-	-	27,814	-
Seri SBSN SR012	6.30	-	-	-	197,103
Seri SBSN SR013	6.05	-	-	-	104,730
Seri SBSN SR014	5.47	-	-	223,102	2,279
Seri SBSN SR015	5.10	-	-	71,150	3,488
Seri SBSN SR016	4.95	-	-	22,503	4,444
Seri SBSN SR017	5.90	-	-	2,342	80
Seri SBSN SR018T3	6.25	-	-	21,230	-
Seri SBSN SR018T5	6.40	-	-	2,572	-
SPN-S 07052024TRD	-	-	-	410,755	-
SPN-S 09042024TRD	-	-	-	417,645	-
SPN-S 14022024TRD	-	-	-	49,600	-
Korporasi/*Corporation*					
Reksa Dana PT Bahana TCW Investment Management	-	-	-	254,418	-
Reksa Dana PT Trimegah Syariah	-	-	-	150,671	-
Efek Beragun Aset Syariah/*Sharia Asset Backed Securities*	-	-	-	31,787	-
				4,887,182	921,324

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan)

b. By issuer (continued)

Penerbit/*Issuer*	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Peringkat/ *Rating*		Nilai tercatat/ *Carrying value*	
		31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)/ ***Measured at fair value through profit or loss** (continued)*					
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*					
Pemerintah/*Government*					
Seri INDOIS27TRD	4.40	-	-	6,702	-
				4,893,884	921,324
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ ***Measured at fair value through other comprehensive income***					
Rupiah					
Bank Indonesia	6.48	-	-	20,744,693	-
Korporasi/*Corporation*					
Reksa Dana PT Eastspring Invesment Indonesia	-	-	-	256,717	-
Reksa Dana PT Bahana TCW Investment Management	-	-	-	508,975	-
Reksa Dana PT BNP Paribas Asset Management	-	-	-	201,184	-
Reksa Dana PT Trimegah Sekuritas Indonesia	-	-	-	252,845	-
Sukuk CIMB Niaga Tahun 2023 Seri A	6.25	AA+(idn)sy	-	19,981	-
SMDR 2023 SERI B	9.45	idA+(sy)	-	100,908	-
Pemerintah/*Government*					
Seri SBSN PBS001	6.63	-	-	376,008	-
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	827,094	144,853
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	-	180,948
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	370,150	-
Seri SBSN PBS029	6.83	-	-	515,711	-
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	594,982	615,901
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	965,562	947,419
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	973,873	825,050
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	594,430	336,874
Seri SBSN PBS037	6.88	-	-	1,869,617	-
				29,172,730	3,051,045
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*					
Bank Indonesia	5.68	-	-	1,544,442	-
				30,717,172	3,051,045
Diukur pada biaya perolehan/ ***Measured at acquisition cost***					
Rupiah					
Bank Indonesia	3.50	-	-	-	8,602,984
Korporasi/*Corporation*					
BPD Kalsel 2022	8.00	A(idn)sy	idA(sy)	35,000	35,000
CIMB Niaga Tahun 2023 Seri B	7.15	AA+(idn)sy	-	45,000	-
Inka Tahun Tahun 2020	10.59	idBBB+(sy)	idBBB+(sy)	75,000	75,000
ISAT Tahap I 2022	7.00	idAAA(sy)	idAAA(sy)	213,800	213,800
MPI Tahap I 22 Seri A	9.00	idA(sy)	idA(sy)	150,000	150,000
PTPN III Tahun 2018	11.25	idBBB+(sy)	idBBB+(sy)	85,000	85,000
PT Global Mediacom Tbk Tahun 2022	10.00	idA+(sy)	idA+(sy)	50,000	50,000
PT Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	8.60	idCCC(sy)	idA(sy)	99,000	99,000
PT XL Axiata I Tahun 2022 Seri A	6.75	AAA(idn)sy	idAAA(sy)	195,000	195,000
Pemerintah/*Government*					
Seri SBSN IFR0006	10.25	-	-	50,407	51,278
Seri SBSN IFR0010	10.00	-	-	99,774	101,166
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	1,923,235	1,357,981
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	710,589	708,790
Seri SBSN PBS005	6.75	-	-	156,558	156,374
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	168,951	-
Seri SBSN PBS011	8.75	-	-	-	2,609,033
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	7,619,962	7,649,749
Seri SBSN PBS019	8.25	-	-	-	3,513,940
Seri SBSN PBS021	8.50	-	-	108,697	111,723
Seri SBSN PBS026	6.63	-	-	7,859,178	7,928,534
Seri SBSN PBS027	6.50	-	-	-	4,639,620
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	3,356,547	3,359,089
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	3,067,898	3,065,272
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	6,623,442	6,621,368
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	296,272	48,893
Seri SBSN PBSG001	6.63	-	-	998,529	365,188
Seri SBSN SR012	6.30	-	-	-	5,452
Seri SBSN SR013	6.05	-	-	-	361,997
Seri SBSN SR014	5.47	-	-	501,295	508,147
Seri SBSN SR015	5.10	-	-	502,193	505,358
Seri SBSN SR016	4.95	-	-	49,145	48,426
Wesel Ekspor	5.53	-	-	200,858	160,571
				35,241,330	53,383,733

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan)

b. By issuer (continued)

Penerbit/*Issuer*	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Peringkat/ *Rating* 31 Desember/ *December* 2023	Peringkat/ *Rating* 31 Desember/ *December* 2022	Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December* 2023	Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December* 2022
Diukur pada biaya perolehan (lanjutan)/ ***Measured at acquisition cost*** *(continued)*					
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*					
Pemerintah/*Government*					
Seri INDOIS23	3.75	-	-	-	35,135
Seri INDOIS24	4.35	-	-	157,283	163,859
Seri INDOIS25	4.33	-	-	60,845	63,200
Seri INDOIS25 *NEW*	2.30	-	-	77,042	77,934
Seri INDOIS27	4.40	-	-	153,970	155,675
				449,140	495,803
				35,690,470	53,879,536
				71,301,526	57,851,905
Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*				(132,506)	(10,634)
				71,169,020	57,841,271

Jumlah nosional atas INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 *NEW,* INDOIS27, INDOIS27TRD, dan SUVBI dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD129.913.931 (nilai penuh).

The notional amount of INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 NEW, INDOIS27, INDOIS27TRD, and SUVBI which is denominated in United States Dollar as at 31 December 2023 amounted to USD129,913,931 (full amount).

Jumlah nosional atas INDOIS23, INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 *NEW* dan INDOIS27 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD31.848.585 (nilai penuh).

The notional amount of INDOIS23, INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 NEW and INDOIS27 which is denominated in United States Dollar as at 31 December 2022 amounted to USD31,848,585 (full amount).

Bank mengakui keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan "Diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain" masing-masing sebesar Rp61.631 dan Rp(77.740) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Bank recognised unrealised gain/(loss) on changes in the value of "Measured at fair value through other comprehensive income" securities amounting to Rp61,631 and Rp(77,740) for the year ended 31 December 2023 and 2022 which are recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By period

	2023	2022	
≤ 1 tahun	24,005,262	8,763,555	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 3 tahun	1,734,919	669,281	*> 1 - ≤ 3 years*
> 3 - ≤ 5 tahun	8,694,459	11,040,275	*> 3 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	36,866,886	37,378,794	*> 5 years*
	71,301,526	57,851,905	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(132,506)	(10,634)	*Allowance for impairment losses*
	71,169,020	57,841,271	

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *By remaining period to maturity*

	2023	2022	
≤ 1 bulan	17,162,511	8,052,606	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	3,050,078	957,995	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	19,328,749	11,828,390	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 tahun	31,760,188	37,012,914	*> 1 year*
	71,301,526	57,851,905	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(132,506)	(10,634)	*Allowance for impairment losses*
	71,169,020	57,841,271	

e. Berdasarkan keterkaitan / *By relationship*

	2023	2022	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	24,193,570	9,343,718	*Rupiah*
Mata uang asing	1,544,443	-	Foreign currencies
	25,738,013	9,343,718	
Pihak berelasi (Catatan 44)			*Related parties (Note 44)*
Rupiah	45,107,671	48,012,384	*Rupiah*
Mata uang asing	455,842	495,803	*Foreign currencies*
	45,563,513	48,508,187	
	71,301,526	57,851,905	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(132,506)	(10,634)	*Allowance for impairment losses*
	71,169,020	57,841,271	

f. Berdasarkan kolektibilitas / *By collectibility*

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	71,202,526	(33,506)	57,851,905	(10,634)	*Current*
Macet	99,000	(99,000)	-	-	*Loss*
	71,301,526	(132,506)	57,851,905	(10,634)	

g. Informasi penting lainnya / *Other significant information*

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai investasi surat berharga secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

The Bank assessed the impairment on investments in marketable securities individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses stated above is adequate.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Pemerintah dengan jumlah nominal sebesar Rp12.500.000 (31 Desember 2022: RpNihil) dijaminkan untuk fasilitas liabilitas kepada Bank Indonesia (Catatan 21).

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

***7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

***g. Other significant information** (continued)*

As of 31 December 2023, Government Bonds with total nominal amount of IDR12,500,000 (31 December 2022: RpNull) are being pledged as collateral for the facilities of liabilities to Bank Indonesia (Note 21).

The movements of allowance for losses on investments in marketable securities are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	10,634	18,075	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) tahun berjalan (Catatan 39)	121,872	(7,498)	*Provision/(reversal) during the year (Note 39)*
Selisih kurs	-	57	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	132,506	10,634	*Ending balance*

Berikut adalah perubahan efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (semua efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan "Lancar"). Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk untuk sukuk korporasi.

The following are changes in securities classified as fair value through other comprehensive income (all securities classified as fair value through other comprehensive income are classified as "Current"). Allowance for impairment losses are provided for corporate sukuk.

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Saldo awal tahun	3,051,045	-	2,812,974	-	*Beginning balance*
Efek-efek yang baru dibeli	60,357,389	13,406	3,099,322	-	*Newly purchased marketable securities*
Efek-efek yang jatuh tempo atau dijual	(32,770,121)	-	(2,795,598)	-	*Matured or sold marketable securities*
Amortisasi premium dan diskonto	17,228	-	12,087	-	*Amortisation of premium and discount*
Perubahan nilai wajar	61,631	-	(77,740)	-	*Changes in fair values*
	30,717,172	13,406	3,051,045	-	

Bank membeli investasi EBAS-SP kelas B pada bulan Juni 2023. EBAS-SP kelas B merupakan investasi kelas junior yang bersifat subordinasi dari EBAS-SP kelas A. Pembayaran imbal hasil kelas B akan dibayarkan setiap kuartal ketika imbal hasil kelas A telah terbayar. Pembayaran pokok kelas B akan dibayarkan ketika pokok kelas A telah terbayar penuh (ekspektasi di 2032).

The Bank purchased the EBAS-SP class B investment in June 2023. EBAS-SP class B is a junior class investment which is subordinate to EBAS-SP class A. Payment of class B profit sharing will be paid on quarterly basis when the class A profit sharing portion has been paid. Payment of class B principal will be paid only after all principal of class A are paid in full (expected in 2032).

8. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI / *8. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND LIABILITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	223,571	11,480	*Import L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	20,503	50,816	*Export L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak ketiga			*Third parties*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	-	312,495	*Import L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
	244,074	374,791	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 44)			*Related parties (Note 44)*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	124,856	41,924	*Import L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	62,298	64,688	*Export L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
	187,154	106,612	
	431,228	481,403	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,312)	(4,814)	*Allowance for impairment losses*
	426,916	476,589	

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By collectibility*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua tagihan akseptasi pada surat berharga diklasifikasikan "Lancar".

As at 31 December 2023 and 2022, all acceptance receivables are classified as "Current".

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity*

	2023	2022	
≤ 1 bulan	289,490	34,170	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	68,657	75,330	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	73,081	371,903	*> 3 - ≤ 12 months*
	431,228	481,403	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,312)	(4,814)	*Allowance for impairment losses*
	426,916	476,589	

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses from uncollectible acceptance receivables.

8. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

8. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND LIABILITIES *(continued)*

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan dan liabilitas akseptasi

d. The movements of allowance for losses on acceptance receivables and liabilities

	2023	2022	
Saldo awal	4,814	1,615	*Beginning balance*
(Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	(374)	3,199	*(Reversal)/provision during the year (Note 39)*
Selisih kurs	(128)	-	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	4,312	4,814	*Ending balance*

9. PIUTANG

9. RECEIVABLES

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas

a. By currency, type and collectibility

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *murabahah*			*Murabahah receivables*
Lancar	131,312,555	119,929,638	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,168,075	1,998,740	*Special mention*
Kurang lancar	845,358	826,383	*Substandard*
Diragukan	679,468	536,273	*Doubtful*
Macet	1,415,388	1,458,670	*Loss*
	136,420,844	124,749,704	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Piutang *murabahah*			*Murabahah receivables*
Lancar	82,252	-	*Current*
Dalam perhatian khusus	-	123,652	*Special mention*
Kurang lancar	-	-	*Substandard*
Diragukan	-	-	*Doubtful*
Macet	-	-	*Loss*
	82,252	123,652	
	136,503,096	124,873,356	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,348,133)	(4,173,161)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	132,154,963	120,700,195	*Net*
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *istishna*			*Istishna receivables*
Lancar	29	129	*Current*
Dalam perhatian khusus	-	3	*Special mention*
Kurang lancar	-	-	*Substandard*
Diragukan	-	-	*Doubtful*
Macet	1	-	*Loss*
	30	132	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	(1)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	28	131	*Net*

9. PIUTANG (lanjutan) / *9. RECEIVABLES (continued)*

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas (lanjutan) / *a. By currency, type and collectibility (continued)*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *ijarah*			*Ijarah receivables*
Ijarah atas aset			*Ijarah of assets*
Lancar	-	-	*Current*
Dalam perhatian khusus	423	504	*Special mention*
Kurang lancar	555	507	*Substandard*
Diragukan	927	748	*Doubtful*
Macet	9,175	9,862	*Loss*
	11,080	11,621	
Ijarah multijasa			*Multi-services ijarah*
Lancar	202,589	-	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,397	138	*Special mention*
Kurang lancar	590	186	*Substandard*
Diragukan	974	158	*Doubtful*
Macet	770	1,175	*Loss*
	207,320	1,657	
	218,400	13,278	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(13,233)	(11,625)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	205,167	1,653	*Net*
	132,360,158	120,701,979	

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas / *b. By currency, economic sector and collectibility*

	31 Desember/*December* 2023						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	1,979,239	39,391	26,552	14,954	566,449	2,626,585	*Manufacturing*
Jasa usaha	5,411,312	86,857	46,951	33,821	42,574	5,621,515	*Business services*
Konstruksi	255,647	43,352	5,848	7,037	7,414	319,298	*Construction*
Konsumer	100,850,518	1,538,848	553,139	436,045	576,003	103,954,553	*Consumer*
Listrik, gas dan air	50,864	792	1,129	269	3,214	56,268	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	747,248	20,523	4,763	5,553	5,274	783,361	*Transportation*
Perdagangan	12,264,130	277,925	170,810	137,814	120,332	12,971,011	*Trading*
Pertambangan	184,123	3,379	326	340	777	188,945	*Mining*
Pertanian	9,022,610	159,384	36,732	45,412	102,164	9,366,302	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	93,644	402	253	124	193	94,616	*Social/public*
Lainnya	655,838	42	-	-	940	656,820	*Others*
	131,515,173	2,170,895	846,503	681,369	1,425,334	136,639,274	
Mata uang asing							***Foreign currency***
Pengangkutan	82,252	-	-	-	-	82,252	*Transportation*
	82,252	-	-	-	-	82,252	
Jumlah piutang	131,597,425	2,170,895	846,503	681,369	1,425,334	136,721,526	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,008,862)	(326,784)	(342,221)	(349,871)	(1,333,630)	(4,361,368)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	129,588,563	1,844,111	504,282	331,498	91,704	132,360,158	*Net*

	31 Desember/*December* 2022						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	1,403,122	46,071	25,907	14,031	595,313	2,084,444	*Manufacturing*
Jasa usaha	4,515,442	90,207	76,551	29,385	48,481	4,760,066	*Business services*
Konstruksi	273,828	10,387	2,173	5,275	6,897	298,560	*Construction*
Konsumer	93,188,053	1,286,816	462,770	323,660	580,079	95,841,378	*Consumer*
Listrik, gas dan air	58,964	2,285	4,538	98	539	66,424	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	821,468	54,123	8,265	5,372	7,519	896,747	*Transportation*
Perdagangan	11,359,721	327,790	197,652	119,079	175,495	12,179,737	*Trading*
Pertambangan	54,493	1,069	606	2,240	6,870	65,278	*Mining*
Pertanian	7,330,563	180,297	47,457	37,951	47,966	7,644,234	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	45,320	341	342	88	263	46,354	*Social/public*
Lainnya	878,793	-	815	-	284	879,892	*Others*
	119,929,767	1,999,386	827,076	537,179	1,469,706	124,763,114	
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Pengangkutan	-	123,652	-	-	-	123,652	*Transportation*
	-	123,652	-	-	-	123,652	
Jumlah piutang	119,929,767	2,123,038	827,076	537,179	1,469,706	124,886,766	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,790,062)	(407,751)	(361,808)	(243,150)	(1,382,016)	(4,184,787)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	118,139,705	1,715,287	465,268	294,029	87,690	120,701,979	*Net*

9. PIUTANG (lanjutan) / ***9. RECEIVABLES** (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / ***c. By period***

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	219,096	287,642	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	1,137,206	1,266,989	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	20,590,042	19,211,176	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	114,692,930	103,997,307	*> 5 years*
	136,639,274	124,763,114	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	-	-	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	-	-	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	82,252	123,652	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	82,252	123,652	
Jumlah	136,721,526	124,886,766	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,361,368)	(4,184,787)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	132,360,158	120,701,979	*Net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***d. By remaining period to maturity***

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	187,326	215,567	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	215,094	220,941	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	2,726,139	2,565,000	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	43,042,542	36,526,036	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	90,468,173	85,235,570	*> 5 years*
	136,639,274	124,763,114	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 bulan	-	-	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	82,252	123,652	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	82,252	123,652	
Jumlah	136,721,526	124,886,766	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,361,368)	(4,184,787)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	132,360,158	120,701,979	*Net*

e. Berdasarkan keterkaitan / ***e. By relationship***

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	136,526,403	124,537,941	*Rupiah*
Mata uang asing	82,252	123,652	*Foreign currencies*
	136,608,655	124,661,593	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	112,871	225,173	*Rupiah*
Jumlah	136,721,526	124,886,766	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,361,368)	(4,184,787)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	132,360,158	120,701,979	*Net*

9. PIUTANG (lanjutan)

***9. RECEIVABLES** (continued)*

f. Berdasarkan kolektibilitas

f. By collectibility

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	131,597,425	2,008,862	119,929,767	1,790,062	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,170,895	326,784	2,123,038	407,751	*Special mention*
Kurang lancar	846,503	342,221	827,076	361,808	*Substandard*
Diragukan	681,369	349,871	537,179	243,150	*Doubtful*
Macet	1,425,334	1,333,630	1,469,706	1,382,016	*Loss*
	136,721,526	4,361,368	124,886,766	4,184,787	

g. Informasi penting lainnya

g. Other significant information

1) Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *murabahah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

1) Employee loans that used murabahah contract are loans to employees used for acquisition of houses, vehicles and other necessities with 1 (one) until 30 (thirty) years period and paid through monthly salary deductions.

2) Efektif *yield* margin piutang murabahah untuk Rupiah berkisar antara 9,74% sampai dengan 10,37% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 10,15% sampai dengan 11,58% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan untuk mata uang asing berkisar antara 1,04% sampai dengan 1,11% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 0,03% sampai dengan 2,14% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

2) Effective margin yield murabahah receivables for Rupiah ranges from 9.74% to 10.37% per annum for the year ended 31 December 2023 and 10.15% to 11.58% per annum for the year ended 31 December 2022 and for foreign currencies ranges from 1.04% to 1.11% per annum for the year ended 31 December 2023 and 0.03% to 2.14% per annum for the year ended 31 December 2022.

3) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

3) The movements of allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	4,184,787	3,450,506	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	1,536,234	1,880,435	*Provision during the year (Note 39)*
Penerimaan kembali hapus buku	451,408	255,382	*Recoveries of write-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(1,809,187)	(1,409,512)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	(1,874)	7,976	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	4,361,368	4,184,787	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses on murabahah receivables is adequate to cover potential losses from uncollectible receivables.

Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Receivables are collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

9. PIUTANG (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

4) Jumlah piutang yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.535.172 (2022: Rp10.970.744), termasuk piutang restrukturisasi terkait COVID-19 sebesar Rp3.703.357 (2022: Rp8.036.421). Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan dan penambahan fasilitas piutang bagi debitur.

Jumlah piutang yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Lancar	4,041,143	7,862,535	*Current*
Dalam perhatian khusus	683,014	1,143,149	*Special mention*
Kurang lancar	368,402	541,984	*Substandard*
Diragukan	398,071	355,426	*Doubtful*
Macet	1,044,542	1,067,650	*Loss*
	6,535,172	10,970,744	

5) Rasio *Non-Performing Financing* ("*NPF*") bruto dan neto atas jumlah piutang adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Jumlah piutang*)	136,721,476	124,886,633	*Total receivables**)
NPF - Bruto*)	2,953,206	2,833,961	*NPF - Gross**)
Persentase NPF - Bruto	2.16%	2.27%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto*)	927,484	846,987	*NPF - Net**)
Persentase NPF - Neto	0.68%	0.68%	*Percentage of NPF - Net*

*) Diluar piutang kepada bank lain

*) *Exclude receivables to other banks*

***9. RECEIVABLES** (continued)*

***g. Other significant information** (continued)*

4) Total restructured receivables as at 31 December 2023 amounting to Rp6,535,172 (2022: Rp10,970,744), including restructured receivables related to COVID-19 amounting to Rp3,703,357 (2022: Rp8,036,421). Receivables were restructured by extending the period, rescheduling and adding receivable facility for debtors.

The amount of receivables that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

5) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") on receivables are as follows:

10. PINJAMAN *QARDH*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Rahn	5,576,102	4,496,408	*Rahn*
Qardh	3,087,794	3,016,141	*Qardh*
Kartu Hasanah	684,463	545,098	*Hasanah Card*
	9,348,359	8,057,647	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Qardh	1,958,722	1,643,962	*Qardh*
Jumlah	11,307,081	9,701,609	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(817,917)	(834,596)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	10,489,164	8,867,013	*Net*

10. FUNDS OF QARDH

a. By type and currency

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (continued)*

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas / *b. By currency, economic sector and collectibility*

	31 Desember/*December* 2023						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	36,602	-	-	-	240,067	276,669	*Manufacturing*
Jasa usaha	321,043	-	-	-	-	321,043	*Business services*
Konstruksi	1,772,100	4,811	-	-	15,095	1,792,006	*Construction*
Konsumer	6,355,301	37,653	5,655	8,962	16,565	6,424,136	*Consumer*
Pengangkutan	4,840	-	-	-	6,013	10,853	*Transportation*
Perdagangan	301,588	13	-	-	900	302,501	*Trading*
Pertanian	176,674	-	-	-	-	176,674	*Agriculture*
Lainnya	44,477	-	-	-	-	44,477	*Others*
	9,012,625	42,477	5,655	8,962	278,640	9,348,359	
Mata uang asing							***Foreign currency***
Industri	1,921,819	-	-	-	-	1,921,819	*Manufacturing*
Pengangkutan	32,580	-	-	-	-	32,580	*Transportation*
Perdagangan	4,323	-	-	-	-	4,323	*Trading*
	1,958,722	-	-	-	-	1,958,722	
Jumlah pinjaman *qardh*	10,971,347	42,477	5,655	8,962	278,640	11,307,081	*Total funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(528,368)	(6,377)	(669)	(3,863)	(278,640)	(817,917)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	10,442,979	36,100	4,986	5,099	-	10,489,164	*Net*

	31 Desember/*December* 2022						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	3,077	7,955	-	1,297	230,816	243,145	*Manufacturing*
Jasa usaha	131,724	-	-	-	-	131,724	*Business services*
Konstruksi	1,891,949	23,102	-	15,566	24,344	1,954,961	*Construction*
Konsumer	5,203,596	30,239	7,417	6,504	9,306	5,257,062	*Consumer*
Pengangkutan	-	-	6,013	-	3,500	9,513	*Transportation*
Perdagangan	259,977	-	20	3,000	1,900	264,897	*Trading*
Pertanian	139,978	-	-	-	-	139,978	*Agriculture*
Lainnya	56,367	-	-	-	-	56,367	*Others*
	7,686,668	61,296	13,450	26,367	269,866	8,057,647	
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Industri	1,552,772	-	-	-	-	1,552,772	*Manufacturing*
Pengangkutan	16,626	-	-	-	-	16,626	*Transportation*
Perdagangan	15,639	-	-	-	-	15,639	*Trading*
Pertambangan	54,097	-	-	-	-	54,097	*Mining*
Pertanian	4,828	-	-	-	-	4,828	*Agriculture*
	1,643,962	-	-	-	-	1,643,962	
Jumlah pinjaman *qardh*	9,330,630	61,296	13,450	26,367	269,866	9,701,609	*Total funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(516,085)	(21,335)	(6,956)	(20,354)	(269,866)	(834,596)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	8,814,545	39,961	6,494	6,013	-	8,867,013	*Net*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	6,856,585	5,943,594	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	489,505	644,726	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	61,205	47,135	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	1,941,064	1,422,192	*> 5 years*
	9,348,359	8,057,647	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	1,951,208	1,621,449	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	7,514	22,513	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	-	-	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	1,958,722	1,643,962	
Jumlah	11,307,081	9,701,609	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(817,917)	(834,596)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	10,489,164	8,867,013	*Net*

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	1,741,674	1,067,343	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	2,934,831	2,834,400	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	2,789,229	2,299,952	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	695,668	1,071,676	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	1,186,957	784,276	*> 5 years*
	9,348,359	8,057,647	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 bulan	565,713	584,312	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	498,081	889,384	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	894,497	170,266	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	431	-	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	1,958,722	1,643,962	
Jumlah	11,307,081	9,701,609	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(817,917)	(834,596)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	10,489,164	8,867,013	*Net*

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	7,509,363	6,356,470	*Rupiah*
Mata uang asing	1,958,722	1,643,962	*Foreign currency*
	9,468,085	8,000,432	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	1,838,996	1,701,177	*Rupiah*
Jumlah	11,307,081	9,701,609	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(817,917)	(834,596)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	10,489,164	8,867,013	*Net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	10,971,347	528,368	9,330,630	516,085	*Current*
Dalam perhatian khusus	42,477	6,377	61,296	21,335	*Special mention*
Kurang lancar	5,655	669	13,450	6,956	*Substandard*
Diragukan	8,962	3,863	26,367	20,354	*Doubtful*
Macet	278,640	278,640	269,866	269,866	*Loss*
	11,307,081	817,917	9,701,609	834,596	

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / ***10. FUNDS OF QARDH*** *(continued)*

g. Informasi penting lainnya / ***g. Other significant information***

1) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

1) The movements of allowance for impairment losses on funds of qardh are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	834,596	337,831	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	80,586	576,774	*Provision during the year (Note 39)*
Penerimaan kembali hapus buku	21,920	2,293	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(119,043)	(83,813)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	(142)	1,511	*Exchange rate differences*
Saldo akhir	817,917	834,596	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh*.

Management believes that the allowance for impairment losses on funds of qardh is adequate to cover potential losses from uncollectible funds of qardh.

2) Pinjaman *qardh* dijamin agunan yang diikat dengan gadai, hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

2) Funds of qardh are collateralised by pawning, registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, or by other guarantees generally accepted by the Bank.

3) Jumlah pinjaman *qardh* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp745.605 (2022: Rp740.730), termasuk piutang restrukturisasi terkait COVID-19 sebesar Rp487.100 (2022: Rp703.675). Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan ulang dan penambahan fasilitas pinjaman *qardh* bagi debitur.

3) Total restructured funds of qardh as at 31 December 2023 amounting to Rp745,605 (2022: Rp740,730), including restructured receivables related to COVID-19 amounting to Rp487,100 (2022: Rp703,675). Receivables were restructured by extending the period, rescheduling and adding funds of qardh facility for debtors.

Jumlah pinjaman *qardh* yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The amount of funds of qardh that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Lancar	478,080	657,100	*Current*
Dalam perhatian khusus	7,577	32,384	*Special mention*
Kurang lancar	400	6,608	*Substandard*
Diragukan	811	15,815	*Doubtful*
Macet	258,737	28,823	*Loss*
	745,605	740,730	

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / ***10. FUNDS OF QARDH*** *(continued)*

g. Informasi penting lainnya (lanjutan) / ***g. Other significant information*** *(continued)*

4) Rasio *Non-Performing Financing* ("*NPF*") bruto dan neto atas jumlah pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

4) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") on funds of qardh are as follows:

	2023	2022	
Jumlah pinjaman *qardh*[*)]	11,307,081	9,701,609	*Total funds of qardh*[*)]
NPF - Bruto[*)]	293,257	309,683	*NPF - Gross*[*)]
Persentase NPF - Bruto	2.59%	3.19%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto[*)]	10,085	12,507	*NPF - Net*[*)]
Persentase NPF - Neto	0.09%	0.13%	*Percentage of NPF - Net*

[*)] Diluar pinjaman *qardh* kepada bank lain / *Exclude funds of qardh to other banks*

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* / ***11. MUDHARABAH FINANCING***

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / ***a. By type and currency***

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	1,870,347	1,028,305	*Working capital*
Investasi	10,786	13,092	*Investment*
Jumlah	1,881,133	1,041,397	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49,481)	(39,440)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,831,652	1,001,957	*Net*

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas / ***b. By currency, economic sector and collectibility***

	31 Desember/*December* 2023						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	7,382	-	-	-	128	7,510	*Manufacturing*
Jasa usaha	29,023	-	-	-	-	29,023	*Business services*
Konstruksi	5,733	-	-	-	-	5,733	*Construction*
Perdagangan	23,717	-	-	-	-	23,717	*Trading*
Pertanian	36,675	-	-	-	-	36,675	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	1,853	-	-	-	-	1,853	*Social/public*
Pertambangan	5,000	-	-	-	-	5,000	*Mining*
Lainnya	1,707,405	33,101	-	-	31,116	1,771,622	*Others*
Jumlah pembiayaan	1,816,788	33,101	-	-	31,244	1,881,133	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(16,472)	(1,765)	-	-	(31,244)	(49,481)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,800,316	31,336	-	-	-	1,831,652	*Net*

	31 Desember/*December* 2022						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	6,720	-	-	-	149	6,869	*Manufacturing*
Jasa usaha	16,116	-	-	-	-	16,116	*Business services*
Konstruksi	6,584	-	-	-	-	6,584	*Construction*
Perdagangan	19,929	-	-	-	-	19,929	*Trading*
Pertanian	1,803	-	-	-	-	1,803	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	1,516	-	-	-	-	1,516	*Social/public*
Lainnya	959,053	10,208	685	1,363	17,271	988,580	*Others*
Jumlah pembiayaan	1,011,721	10,208	685	1,363	17,420	1,041,397	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9,764)	(10,208)	(685)	(1,363)	(17,420)	(39,440)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,001,957	-	-	-	-	1,001,957	*Net*

c. Berdasarkan jangka waktu / ***c. By period***

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	1,000,980	93,706	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	78,581	183,177	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	287,296	287,915	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	514,276	476,599	*> 5 years*
Jumlah	1,881,133	1,041,397	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49,481)	(39,440)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,831,652	1,001,957	*Net*

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan) / *11. MUDHARABAH FINANCING (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	17,726	9,809	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	3,515	98,222	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	1,120,244	176,926	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	500,389	537,883	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	239,259	218,557	*> 5 years*
Jumlah	1,881,133	1,041,397	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49,481)	(39,440)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,831,652	1,001,957	*Net*

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	881,133	816,175	*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	1,000,000	225,222	*Rupiah*
Jumlah	1,881,133	1,041,397	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49,481)	(39,440)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,831,652	1,001,957	*Net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	1,816,788	16,472	1,011,721	9,764	*Current*
Dalam perhatian khusus	33,101	1,765	10,208	10,208	*Special mention*
Kurang lancar	-	-	685	685	*Substandard*
Diragukan	-	-	1,363	1,363	*Doubtful*
Macet	31,244	31,244	17,420	17,420	*Loss*
	1,881,133	49,481	1,041,397	39,440	

g. Informasi penting lainnya / *g. Other significant information*

1) Efektif *yield* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* untuk Rupiah berkisar antara 4,01% sampai dengan 9,98% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan berkisar antara 7,94% sampai dengan 10,59% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

1) Effective profit sharing yield mudharabah financing for Rupiah ranges from 4.01% to 9.98% per annum for the the year ended 31 December 2023 and ranges from 7.94% to 10.59% per annum for the year ended 31 December 2022.

2) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

2) The movements of allowance for impairment losses on mudharabah financing are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	39,440	36,123	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	11,962	9,043	*Provision during the year (Note 39)*
Penerimaan kembali hapus buku	-	2,845	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(1,921)	(8,571)	*Write-off during the year*
Saldo akhir	49,481	39,440	*Ending balance*

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

2) Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan mudharabah.

3) Pembiayaan *mudharabah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

4) Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.836 (2022: Rp47.116), termasuk restrukturisasi pembiayaan terkait COVID-19 sebesar Rp28.449 (2022: Rp42.075). Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan ulang dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.

Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

11. MUDHARABAH FINANCING *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

2) Management believes that the allowance for impairment losses on mudharabah financing is adequate to cover potential losses from uncollectible mudharabah financing.

3) Mudharabah financing is collateralised by registered mortgage or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

4) Total restructured mudharabah financing as at 31 December 2023 amounting to Rp39,836 (2022: Rp47,116), including restructured mudharabah financing related to COVID-19 amounting to Rp28,449 (2022: Rp42,075). Mudharabah financing were restructured by extending the period, rescheduling and adding facility for debtors.

The amount of mudharabah financing that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Lancar	10,490	20,801	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,463	10,208	*Special mention*
Kurang lancar	-	685	*Substandard*
Diragukan	-	1,363	*Doubtful*
Macet	27,882	14,059	*Loss*
	39,835	47,116	

5) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

5) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") on mudharabah financing are as follows:

	2023	2022	
Jumlah pembiayaan *mudharabah*[*)]	1,700,786	895,458	*Total mudharabah financing*[*)]
NPF - Bruto[*)]	29,467	17,682	*NPF - Gross*[*)]
Persentase NPF - Bruto	1.73%	1.97%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto[*)]	-	-	*NPF - Net*[*)]
Persentase NPF - Neto	0.00%	0.00%	*Percentage of NPF - Net*

*) Diluar pembiayaan *mudharabah* kepada bank lain

*) *Exclude mudharabah financing to other banks*

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* / *12. MUSYARAKAH FINANCING*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Investasi	35,500,247	28,603,520	*Investment*
Modal kerja	30,524,281	28,624,475	*Working capital*
Konsumsi	20,016,965	11,253,168	*Consumption*
	86,041,493	68,481,163	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Investasi	1,931,367	1,613,825	*Investment*
Modal kerja	243,337	495,523	*Working capital*
	2,174,704	2,109,348	
Jumlah	88,216,197	70,590,511	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,459,696)	(4,139,565)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	83,756,501	66,450,946	*Net*

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas / *b. By currency, economic sector and collectibility*

31 Desember/*December* 2023

	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	6,233,563	29,720	118,072	57,493	512,556	6,951,404	*Manufacturing*
Jasa usaha	12,082,992	16,619	20,321	24,274	17,818	12,162,024	*Business services*
Konstruksi	14,398,456	2,145,324	9,468	4,943	69,838	16,628,029	*Construction*
Konsumer	19,754,422	99,679	61,185	38,515	63,164	20,016,965	*Consumer*
Listrik, gas dan air	3,909,937	-	474	-	196	3,910,607	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	7,220,443	32,023	3,179	224	22,763	7,278,632	*Transportation*
Perdagangan	6,304,246	325,937	58,402	41,910	136,583	6,867,078	*Trading*
Pertambangan	256,915	-	-	-	6,737	263,652	*Mining*
Pertanian	8,197,582	23,587	22,541	5,464	46,798	8,295,972	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	269,690	663	-	-	-	270,353	*Social/public*
Lainnya	3,385,744	-	-	-	11,033	3,396,777	*Others*
	82,013,990	2,673,552	293,642	172,823	887,486	86,041,493	
Mata uang asing							***Foreign currency***
Industri	16,719	-	-	-	-	16,719	*Manufacturing*
Jasa usaha	122,321	-	-	-	-	122,321	*Business services*
Listrik, gas dan air	467,298	-	333,794	-	-	801,092	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	156,043	-	-	-	-	156,043	*Transportation*
Pertambangan	1,078,529	-	-	-	-	1,078,529	*Mining*
	1,840,910	-	333,794	-	-	2,174,704	
Jumlah pembiayaan	83,854,900	2,673,552	627,436	172,823	887,486	88,216,197	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,373,575)	(1,753,279)	(363,211)	(84,448)	(885,183)	(4,459,696)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	82,481,325	920,273	264,225	88,375	2,303	83,756,501	*Net*

31 Desember/*December* 2022

	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	6,117,878	13,721	179,318	17,395	536,111	6,864,423	*Manufacturing*
Jasa usaha	10,355,976	40,017	24,233	10,300	63,374	10,493,900	*Business services*
Konstruksi	13,435,953	474,656	62,651	12,150	47,047	14,032,457	*Construction*
Konsumer	11,086,276	70,698	51,531	19,406	25,257	11,253,168	*Consumer*
Listrik, gas, dan air	2,982,048	606	8,778	-	-	2,991,432	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	4,445,028	3,067	26,467	-	11,029	4,485,591	*Transportation*
Perdagangan	6,003,387	338,935	75,844	55,919	75,089	6,549,174	*Trading*
Pertambangan	1,860,700	5,840	4,244	-	3,730	1,874,514	*Mining*
Pertanian	6,345,769	46,907	60,108	13,259	23,886	6,489,929	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	281,320	-	-	-	-	281,320	*Social/public*
Lainnya	3,153,636	1,702	-	294	9,623	3,165,255	*Others*
	66,067,971	996,149	493,174	128,723	795,146	68,481,163	
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Industri	11,983	-	-	-	-	11,983	*Manufacturing*
Listrik, gas, dan air	587,571	-	388,533	-	-	976,104	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	60,652	-	-	-	-	60,652	*Transportation*
Perdagangan	10,679	-	-	-	-	10,679	*Trading*
Pertambangan	1,049,930	-	-	-	-	1,049,930	*Mining*
	1,720,815	-	388,533	-	-	2,109,348	
Jumlah pembiayaan	67,788,786	996,149	881,707	128,723	795,146	70,590,511	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,045,521)	(561,540)	(665,525)	(71,833)	(795,146)	(4,139,565)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	65,743,265	434,609	216,182	56,890	-	66,450,946	*Net*

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	9,168,106	6,549,788	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	5,114,278	7,004,338	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	10,001,175	11,338,883	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	61,757,934	43,588,154	*> 5 years*
	86,041,493	68,481,163	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	19,246	301,119	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	110,773	2,501	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	369,930	152,562	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	1,674,755	1,653,166	*> 5 years*
	2,174,704	2,109,348	
Jumlah	88,216,197	70,590,511	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,459,696)	(4,139,565)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	83,756,501	66,450,946	*Net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	2,780,961	2,925,305	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	4,182,168	4,041,830	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	10,834,266	8,126,567	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	18,601,545	18,682,558	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	49,642,553	34,704,903	*> 5 years*
	86,041,493	68,481,163	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
> 1 - ≤ 3 bulan	-	215,103	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	187,843	88,517	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	1,520,665	1,468,587	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	466,196	337,141	*> 5 years*
	2,174,704	2,109,348	
Jumlah	88,216,197	70,590,511	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,459,696)	(4,139,565)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	83,756,501	66,450,946	*Net*

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	61,278,023	46,598,245	*Rupiah*
Mata uang asing	2,174,704	2,109,348	*Foreign currencies*
	63,452,727	48,707,593	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	24,763,470	21,882,918	*Rupiah*
Jumlah	88,216,197	70,590,511	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,459,696)	(4,139,565)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	83,756,501	66,450,946	*Net*

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / ***12. MUSYARAKAH FINANCING*** *(continued)*

f. Berdasarkan kolektibilitas / ***f. By collectibility***

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	83,854,900	1,373,575	67,788,786	2,045,521	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,673,552	1,753,279	996,149	561,540	*Special mention*
Kurang lancar	627,436	363,211	881,707	665,525	*Substandard*
Diragukan	172,823	84,448	128,723	71,833	*Doubtful*
Macet	887,486	885,183	795,146	795,146	*Loss*
	88,216,197	4,459,696	70,590,511	4,139,565	

g. Informasi penting lainnya / ***g. Other significant information***

1) Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *musyarakah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan, dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

1) Employee loans that used musyarakah contract are loans to employees used for acquisition of houses, vehicles and other necessities with 1 (one) until 30 (thirty) years period and paid through monthly salary deductions.

2) Efektif *yield* bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk Rupiah berkisar antara 7,11% sampai dengan 7,94% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan berkisar antara 7,10% sampai dengan 8,08% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan untuk mata uang asing berkisar antara 2,12% sampai dengan 14,17% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan berkisar antara 2,10% sampai dengan 7,31% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

2) Effective profit sharing yield musyarakah financing for Rupiah ranges from 7.11% to 7.94% per annum for the year ended 31 December 2023 and ranges from 7.10% to 8.08% per annum for the year ended 31 December 2022 and for foreign currencies ranging from 2.12% to 14.17% per annum for the year ended 31 December 2023 and ranges from 2.10% to 7.31% per annum for the year ended 31 December 2022.

3) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

3) The movements of allowance for impairment losses on musyarakah financing are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	4,139,565	3,651,313	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	892,055	1,230,474	*Provision during the year (Note 39)*
Penerimaan kembali hapus buku	138,453	103,459	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(705,793)	(882,126)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	(4,584)	36,445	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	4,459,696	4,139,565	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah*.

Management believes that the allowance for impairment losses on musyarakah financing is adequate to cover potential losses from uncollectible musyarakah financing.

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

4) Pembiayaan *musyarakah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

5) Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.402.319 (2022: Rp11.471.188), termasuk restrukturisasi pembiayaan terkait COVID-19 sebesar Rp4.510.042 (2022: Rp5.841.847). Restrukturisasi pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.

Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

12. MUSYARAKAH FINANCING *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

4) Musyarakah financing is collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other collaterals generally acceptable by the Bank.

5) Total restructured musyarakah financing as at 31 December 2023 amounting to Rp11,402,319 (2022: Rp11,471,188), including restructured musyarakah financing related to COVID-19 amounting to Rp4,510,042 (2022: Rp5,841,847). Musyarakah financing were restructured by extending the period, rescheduling and adding facility for debtors.

The amount of musyarakah financing that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Lancar	7,476,674	8,988,007	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,522,407	877,781	*Special mention*
Kurang lancar	553,632	821,339	*Substandard*
Diragukan	125,188	79,321	*Doubtful*
Macet	724,418	704,740	*Loss*
	11,402,319	11,471,188	

6) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

6) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") on musyarakah financing are as follows:

	2023	2022	
Jumlah pembiayaan *musyarakah*[*)]	88,172,533	70,574,309	*Total musyarakah financing*[*)]
NPF - Bruto[*)]	1,687,745	1,805,576	*NPF - Gross*[*)]
Persentase NPF - Bruto	1.91%	2.56%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto[*)]	354,903	273,072	*NPF - Net*[*)]
Persentase NPF - Neto	0.40%	0.39%	*Percentage of NPF - Net*

*) Diluar pembiayaan *musyarakah* kepada bank lain

**) Exclude musyarakah financing to other banks*

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

7) Penjualan pembiayaan Griya untuk keperluan sekuritisasi Efek Beragun Aset Syariah - Surat Partisipasi (”EBAS - SP”).

Pada tanggal 3 April 2023, Bank menandatangani Perjanjian Jual Beli Tagihan Pembiayaan dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (”PT SMF”). Bank sepakat untuk menjual pembiayaan Griya dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (”MMQ”) kepada PT SMF yang terdiri dari 1.604 debitur dengan nilai pokok sebesar Rp325.000. Harga jual yang diterima Bank adalah sebesar nilai tercatat pembiayaan. Seluruh pembiayaan yang dijual memiliki kolektibilitas lancar dan rata-rata tingkat imbalan 11,61% dengan rata-rata jangka waktu 10 tahun.

Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada PT SMF. Transaksi ini telah mendapatkan opini Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk sesuai dengan surat No.35/BSI/DPS/OPINI/IX/2022 tanggal 16 September 2022.

Bank akan bertindak sebagai penyedia jasa pengumpul pembayaran pokok dan bagi hasil dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara periodik hasil penagihan pokok dan bagi hasil kepada PT SMF, dan mengurus keperluan administrasi debitur. Bank berhak mendapatkan imbalan jasa sebesar 5% dari hasil penagihan atas pokok dan bagi hasil. Bank mengakui imbalan jasa penagihan sebagai pendapatan imbalan jasa perbankan pada saat jasa telah diberikan.

Sebagai penyedia jasa, Bank memiliki opsi untuk membeli seluruh sisa pembiayaan MMQ yang belum dibayar nasabah jika saldo tersisa atas pembiayaan MMQ telah berkurang sampai menjadi 10% atau kurang, dari jumlah pembiayaan MMQ pada saat awal penjualan.

12. MUSYARAKAH FINANCING *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

7) The sales of Griya financing for the purposes of securitisation of Sharia Asset Backed Securities - Letter of Participation ("EBAS - SP").

On 3 April 2023, the Bank entered into a Financing Sale and Purchase Agreement with PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“PT SMF”). The Bank agreed to sell its Griya financing under the Musyarakah Mutanaqisah (”MMQ”) contract to PT SMF, which consists of 1,604 debtors with a principal value of Rp325,000. The selling price received by the Bank equal to the carrying value of the financing. All financing sold has current collectibility and the average margin rate is 11.61% with an average maturity of 10 years.

Subsequent to the sale and transfer of the collection of receivables, credit risks on the pool of financing were transferred from the Bank to PT SMF. This transaction has received the opinion of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Syariah Indonesia Tbk in accordance with letter No.35/BSI/DPS/OPINI/IX/2022 dated 16 September 2022.

The Bank will act as a service provider for collecting principal payments and profit sharing from debtors for each billing period, transferring periodically collection of principal and profit sharing to PT SMF and taking care of the debtor's administrative needs. The Bank is entitled to a service fee of 5% from the collection of principal and profit sharing. The bank recognise the servicing fee as fee based income when the service is renderred.

As a service provider, the Bank has the option to purchase the entire remaining MMQ financing that have not been paid by customers if the outstanding balance for MMQ financing has been reduced to 10% or less, of the total MMQ financing at the time of initial sale.

13. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - BERSIH

13. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET

Per 31 Desember 2023 sesuai PSAK 107 (Revisi 2021), akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ("IMBT"). Aset *ijarah* yang terkait multijasa yang sebelumnya dicatat sebagai bagian dari aset yang diperoleh untuk *ijarah* direklasifikasi menjadi piutang *ijarah* (lihat Catatan 2b dan 9).

As at 31 December 2023 based on SFAS 107 (Revised 2021) this account represents lease object transactions from Ijarah Muntahiyah Bittamlik ("IMBT"). Ijarah assets related to multi-services that were previously recorded as part of assets acquired for ijarah were reclassified into ijarah receivables (see Note 2b and 9).

Per 31 Desember 2022, akun ini merupakan objek sewa dari transaksi IMBT dan *ijarah* multijasa.

As at 31 December 2022, this account represents lease object transactions from IMBT and multi-services ijarah.

	2023	2022	
Properti	1,750,572	1,002,832	*Property*
Mesin dan instalasi	1,384,735	937,403	*Machinery and installations*
Alat transportasi	30,531	2,876	*Transportations*
Multijasa	-	117,351	*Multi-services*
Lainnya	8,309	192,872	*Others*
Jumlah	3,174,147	2,253,334	*Total*
Akumulasi penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai	(984,040)	(768,761)	*Accumulated depreciation, amortisation, and impairment*
Bersih	2,190,107	1,484,573	*Net*

Bank berhak menerima *ujrah* atas *ijarah* dan IMBT. *Ujrah* atas IMBT berdasarkan sisa jangka waktu hingga jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The Bank is entitled to receive ujrah for ijarah and IMBT. Ujrah for IMBT by remaining period to maturity are as follows:

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	23	52	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	229	306	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	2,629	4,015	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	155,505	135,018	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	459,120	160,166	*> 5 years*
	617,506	299,557	

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET

Aset tetap, aset hak guna dan aset tidak berwujud - bersih terdiri dari:

Fixed assets, right-of-use assets and intangible assets - net consist of:

	2023	2022*)	
Aset tetap - bersih	4,790,002	4,755,721	*Fixed assets - net*
Aset hak guna - bersih	562,841	640,289	*Right-of-use assets - net*
Aset tidak berwujud - bersih	1,128,334	258,688	*Intangible assets - net*
	6,481,177	5,654,698	

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 54

**) Reclassified, see Note 54*

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

Aset tetap / *Fixed assets*

	31 Desember/*December* 2023						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Penilaian kembali/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai revaluasi							***Revaluation amount***
Tanah	2,416,605	909	-	-	27,327	2,444,841	*Land*
Nilai perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan	857,407	4,096	(241,079)	-	21,856	642,280	*Buildings*
Instalasi	291,951	22,110	(1,108)	-	19,223	332,176	*Installation*
Kendaraan bermotor	74,015	501	(14,271)	-	-	60,245	*Vehicles*
Inventaris kantor	2,789,894	65,728	(55,275)	-	79,813	2,880,160	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	377,351	13,023	-	-	109,752	500,126	*Leasehold improvement*
Aset dalam penyelesaian	535,011	550,999	-	-	(257,971)	828,039	*Construction in progress*
	7,342,234	657,366	(311,733)	-	-	7,687,867	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	(144,289)	(31,129)	-	-	-	(175,418)	*Buildings*
Instalasi	(220,315)	(23,643)	1,108	-	-	(242,850)	*Installation*
Kendaraan bermotor	(64,494)	(3,014)	14,268	-	-	(53,240)	*Vehicles*
Inventaris kantor	(2,051,487)	(235,818)	55,253	-	-	(2,232,052)	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	(59,949)	(88,377)	-	-	-	(148,326)	*Leasehold improvement*
	(2,540,534)	(381,981)	70,629	-	-	(2,851,886)	
Akumulasi penurunan nilai							***Accumulated impairment***
Tanah	(45,979)	-	-	-	-	(45,979)	*Land*
Nilai buku	4,755,721					4,790,002	***Book value***

	31 Desember/*December* 2022*)						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Penilaian kembali/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai revaluasi							***Revaluation amount***
Tanah	1,691,932	724,673	-	-	-	2,416,605	*Land*
Nilai perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan	503,683	327,544	-	-	26,180	857,407	*Buildings*
Instalasi	246,173	22,062	-	-	23,716	291,951	*Installation*
Kendaraan bermotor	68,711	5,304	-	-	-	74,015	*Vehicles*
Inventaris kantor	2,395,172	115,772	-	-	278,950	2,789,894	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	106,628	27,861	-	-	242,862	377,351	*Leasehold improvement*
Aset dalam penyelesaian	432,853	673,866	-	-	(571,708)	535,011	*Construction in progress*
	5,445,152	1,897,082	-	-	-	7,342,234	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	(114,333)	(29,956)	-	-	-	(144,289)	*Buildings*
Instalasi	(206,781)	(13,534)	-	-	-	(220,315)	*Installation*
Kendaraan bermotor	(61,601)	(2,893)	-	-	-	(64,494)	*Vehicles*
Inventaris kantor	(1,839,719)	(211,768)	-	-	-	(2,051,487)	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	(20,787)	(39,162)	-	-	-	(59,949)	*Leasehold improvement*
	(2,243,221)	(297,313)	-	-	-	(2,540,534)	
Akumulasi penurunan nilai							***Accumulated impairment***
Tanah	(45,979)	-	-	-	-	(45,979)	*Land*
Nilai buku	3,155,952					4,755,721	***Book value***

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Construction in progress as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Bangunan	564,067	384,335	*Buildings*
Inventaris kantor	726,391	150,676	*Office equipment*
	1,290,458	535,011	

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 54

*) *Reclassified, see Note 54*

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah berkisar antara 5,00% - 95,00% dan 31 Desember 2022 adalah berkisar antara 10,00% - 95,00%. Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2024 sampai dengan 2025.

Jumlah beban penyusutan aset tetap dan aset hak guna dan beban amortisasi aset tidak berwujud yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah masing-masing sebesar Rp837.672 dan Rp701.792 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 38).

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, kecurian, dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah, PT Asuransi Tripakarta Unit Syariah, dan PT Zurich General Takaful Indonesia, keseluruhannya adalah pihak ketiga, PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah dan PT BRI Asuransi Indonesia, keseluruhannya adalah pihak berelasi, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp6.137.294 dan Rp6.095.006 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian atas aset tetap yang diasuransikan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp2.343.147 dan Rp2.203.639.

Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET *(continued)*

Fixed assets *(continued)*

The estimated percentage of completion of construction in progress as at 31 December 2023 is between 5.00% - 95.00% and 31 December 2022 is between 10.00% - 95.00%. Those construction in progress as at 31 December 2023 are estimated to be completed in 2024 until 2025.

Total depreciation expenses of fixed assets and right-of-use assets and amortisation expenses of intangible assets charged in the statement of profit or loss is amounting to Rp837,672 and Rp701,792 for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively (Note 38).

The Bank has insured the fixed assets (except land rights) to cover for losses against fire, theft and other risks to PT Asuransi Staco Mandiri Syariah Unit, PT Asuransi Tripakarta Unit Syariah and PT Zurich General Takaful Indonesia, all of which are third parties, PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah and PT BRI Asuransi Indonesia, all of which are related parties, with total insurance coverage amounting to Rp6,137,294 and Rp6,095,006 as at 31 December 2023 and 2022, respectively.

The Bank's management believes the amount is adequate to cover losses which may arise from the insured fixed assets.

As at 31 December 2023 and 2022, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp2,343,147 and Rp2,203,639 respectively.

Taxable value ("NJOP") of land rights and buildings owned by the Bank as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Tanah	1,441,663	985,156	*Land rights*
Bangunan	410,608	186,564	*Buildings*
	1,852,271	1,171,720	

Selain tanah dan bangunan tidak terdapat perbedaan material antara nilai wajar aset dan nilai tercatatnya.

Other than land and building, there is no material difference between the fair value of the asset and its carrying value.

Nilai tanah Bank berdasarkan model biaya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.870.333 dan Rp1.842.097.

The Bank's land value based on the cost model as at 31 December 2023 and 2022 is Rp1,870,333 and Rp1,842,097.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikator penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that there are no indicators of impairment of fixed assets as at 31 December 2023 and 2022.

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

Bangun, Guna dan Serah

Pada tanggal 28 April 2023, Bank dan PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan Bangun, Guna dan Serah ("BOT") atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta. Bank memberikan hak eksklusif kepada PT PP untuk memanfaatkan lahan, melakukan pembongkaran gedung eksisting dan melakukan pembangunan gedung baru. Bank berkomitmen untuk menyewa gedung baru selama 30 tahun dan pada akhir masa sewa, PT PP akan menyerahkan penguasaan lahan dan hak pengelolaan gedung kepada Bank.

Berdasarkan perjanjian BOT, Bank berhak menerima kompensasi atas penghancuran gedung lama dari PT PP sebesar Rp241.080 yang akan dibayarkan secara bertahap oleh PT PP selama 5 tahun. Kompensasi ini mengikat PT PP, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dikembalikan dalam keadaan apapun termasuk apabila Bank mengakhiri kontrak secara sepihak. Berdasarkan syarat-syarat dalam perjanjian, manajemen membuat pertimbangan signifikan bahwa kompensasi dianggap sebagai transaksi terpisah dengan perjanjian sewa gedung baru meskipun kedua unsur tersebut berada dalam satu kontrak yang sama, antara pihak yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Bank mengakui kompensasi yang diterima sebagai pendapatan lain-lain bersamaan dengan pengakuan kerugian atas pembongkaran gedung lama sebesar Rp241.080.

Per 31 Desember 2023, Bank telah menerima pembayaran sebesar Rp48.216 dan sisanya dicatat sebagai piutang dari PT PP sebesar Rp192.864 (Catatan 15).

Revaluasi aset tetap

Penilaian kembali atas aset tetap dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) Jenis dan hak yang melekat pada properti,
b) Kondisi pasar,
c) Lokasi,
d) Karakteristik fisik,
e) Karakteristik tanah.

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan hierarki dan input-input yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset nonkeuangan:

- Level 1: Input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset yang identik;
- Level 2: Input selain harga kuotasian pasar dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Level 3: Input yang tidak dapat diobservasi.

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET *(continued)*

Build, Operate and Transfer

On 28 April 2023, the Bank and PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") entered into an agreement in connection with the Build, Operate and Transfer ("BOT") of land and building located at Medan Merdeka Selatan Street No. 17 Jakarta. The Bank granted exclusive rights to PT PP to utilize the land, to demolish the existing building and construct a new building. The Bank commits to rent the building for 30 years and at the end of the lease period, PT PP will hand over the ownership rights of the land and the building to the Bank.

In accordance with the BOT agreement, the Bank is eligible to receive compensation for the demolition of the old building from PT PP amounting to Rp241,080 which will be paid in stages by PT PP over 5 years. This compensation is binding to PT PP, non-cancellable and non-refundable under any circumstances including if the Bank terminates the contract unilaterally. Considering the terms in the agreement, the management makes significant judgment that the compensation is accounted for as a separate transaction to the rental agreement of the new building even though the two elements are in the same contract, between the same parties and at the same time. The Bank recognised the compensation received as other income corresponding with the recognition of loss from demolition of old building amounting to Rp241,080.

As of 31 December 2023, the Bank had received payment of Rp48,216 and recorded the remaining as receivables from PT PP amounting to Rp192,864 (Note 15).

Revaluation of fixed assets

The revaluation of fixed assets are performed based on Indonesian Valuation Standards. The valuation methods used are market data approach and income approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets are among others are as follows:

a) Type and right on property,
b) Market condition,
c) Location,
d) Physical characteristic,
e) Land characteristic.

Fair value was determined by hierarchy and input used on technical valuation of non-financial assets:

- *Level 1: Input quoted (unadjusted) prices in active market for identical assets;*
- *Level 2: Input other than quoted market price in level 1 that are observable either directly or indirectly; and*
- *Level 3: Input that are not observable.*

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

Revaluasi aset tetap (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar tanah dikategorikan sebagai nilai wajar level 2 berdasarkan input dari teknik penilaian yang digunakan.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Berdasarkan surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CSC.CRE/508/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 dan persetujuan OJK melalui surat No. S-159/PB.31/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan penambahan penyertaan modal melalui *inbreng* Aset Tetap Tidak Bergerak ("ATTB") milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp152.997 yang terdiri dari tanah senilai Rp127.750 dan bangunan senilai Rp25.247 (tidak termasuk pajak). Revaluasi atas ATTB dengan nilai pasar sebesar Rp152.997 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Rizki Djunaedy & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, berdasarkan laporannya tertanggal 2 Maret 2020. Penambahan ATTB selama tahun 2020 sejumlah Rp175.876 terdiri dari tanah senilai Rp144.527 (termasuk pajak sejumlah Rp16.777) dan bangunan senilai Rp31.349 (termasuk pajak senilai Rp6.102) yang berasal dari *inbreng* ATTB terkait penambahan modal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS")

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BRIS melakukan penyesuaian kebijakan revaluasi aset tetap sesuai ketentuan dengan BSI atas pencatatan tanah dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi menggunakan model revaluasi. Secara total pada tahun 2021, kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp80.276 dan penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.892. Penilaian atas tanah dilakukan oleh independen eksternal yaitu KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BNIS melakukan penyesuaian kebijakan dengan BSI atas pencatatan bangunan dari sebelumnya menggunakan model revaluasi menjadi menggunakan model biaya. Atas hal ini, Bank melakukan pembalikan atas penilaian kembali bangunan yang sebelumnya sudah dicatat di "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp9.361.

***14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET** (continued)*

***Revaluation of fixed assets** (continued)*

The fair value measurement for the land is categorised as level 2 fair value based on the inputs of the valuation technique used.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Based on the letter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CSC.CRE/508/2020 dated 26 August 2020 and approval OJK by the letter No. S-159/PB.31/2020 dated 9 October 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has obtain additional share by inbreng Non-movable Fixed Assets ("ATTB") of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Bank Syariah Mandiri amounting Rp152,997 which consists of land amounting Rp127,750 and buildings amounting Rp25,247 (exclude tax). Revaluation of ATTB with market value amounting Rp152,997 was performed by Public Appraisal Service Office ("KJPP") Rizki Djunaedy & Partners, external independent appraisal registered in OJK, based on their report dated 2 March 2020. Addition of ATTB in 2020 amounting to Rp175,876 consists of land amounting to Rp144,527 (include tax amounting Rp16,777) and building amounting to Rp31,349 (include tax amounting to Rp6,102) from inbreng ATTB related to additional capital from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS")

On 31 January 2021, the ex-legacy BRIS made a policy adjustment of asset revaluation to be in line with BSI of land from cost model to revaluation model. In total in 2021, the increases in the carrying amount of land revaluation are recorded as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp80,276 and the decrease of carrying amount from revaluation is recorded as expenses in 2021 amounting to Rp12,892. The valuations of land was performed by KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan, an external independent appraisal.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

On 31 January 2021, ex-legacy BNIS made a policy adjustment to be in line with BSI of building from revaluation model to cost model. In this regard, the Bank reversed the revaluation of the building which had previously been recorded in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp9,361.

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET *(continued)*

Revaluasi atas tanah - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Revaluasi atas tanah dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp67.617, dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, dalam laporannya tertanggal 25 November 2021. Selisih lebih nilai revaluasi tanah tahun 2021 sebesar Rp113.596 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan pada pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah sebesar Rp45.979 diakui dalam laba rugi tahun 2021 sebagai beban usaha lainnya.

Revaluation on land - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Revaluation on land with carrying amount on revaluation amounting to Rp67,617, performed by KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, an external independent appraisal registered on OJK, on their report dated 25 November 2021. Difference on land revaluation in 2021 amounting to Rp113,596 was recorded as "Surplus on Revaluation of Fixed Asset" and expressed on other comprehensive income. Impairment of carrying value amounting to Rp45,979 was recognised in the profit or loss of the year 2021 as other operating expense.

Perubahan cadangan revaluasi aset bersih setelah pajak adalah sebagai berikut:

The movements in the asset revaluation reserve net of tax are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	444,530	444,530	*Beginning year balance*
Kenaikan nilai tanah	-	-	*Gain on land value*
Saldo akhir tahun	444,530	444,530	*Ending year balance*

Aset hak guna / ***Right-of-use assets***

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Bangunan kantor	1,140,654	256,257	(191,804)	1,205,107	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	132,876	-	-	132,876	*Vehicles and technology system*
	1,273,530	256,257	(191,804)	1,337,983	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan kantor	(564,957)	(291,873)	191,804	(665,026)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	(68,284)	(41,832)	-	(110,116)	*Vehicles and technology system*
	(633,241)	(333,705)	191,804	(775,142)	
Nilai buku	640,289			562,841	***Book value***

	31 Desember/*December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Bangunan kantor	1,104,110	258,740	(222,196)	1,140,654	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	188,061	-	(55,185)	132,876	*Vehicles and technology system*
	1,292,171	258,740	(277,381)	1,273,530	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan kantor	(506,910)	(280,243)	222,196	(564,957)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	(69,956)	(53,513)	55,185	(68,284)	*Vehicles and technology system*
	(576,866)	(333,756)	277,381	(633,241)	
Nilai buku	715,305			640,289	***Book value***

Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk semua sewa dengan kontrak jangka waktu tertentu, dibayar bulanan atau periodik. Terdapat pengecualian untuk sewa dengan jangka waktu pendek, yaitu kurang dari atau sama dengan 12 bulan serta tidak ada opsi beli dan opsi perpanjangan, dan memiliki aset pendasar bernilai rendah, yaitu lebih kecil atau sama dengan Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) dalam nilai penuh.

The Bank recognises the right-of-use assets and lease liabilities for all leases with time contracts, payable monthly or periodically. There are exceptions to the lease with a short term, which is less or equal to 12 months and there is no call option and extention option, and has a low value underlying asset, which is less than or equal to Rp70,000,000 (seventy million Rupiah) in full amount.

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

Aset tidak berwujud

Intangible assets

	31 Desember/*December* 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai perolehan						***Acquisition cost***
Perangkat lunak	750,007	276,241	-	252,971	1,279,219	*Software*
Aset dalam penyelesaian	-	715,391	-	(252,971)	462,420	*Construction in progress*
	750,007	991,632	-	-	1,741,639	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	(491,319)	(121,986)	-	-	(613,305)	*Software*
Nilai buku	258,688				1,128,334	***Book value***

	31 Desember/*December* 2022*)				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Perangkat lunak	605,292	144,715	-	750,007	*Software*
Akumulasi amortisasi					***Accumulated amorisation***
Perangkat lunak	(420,596)	(70,723)	-	(491,319)	*Software*
Nilai buku	184,696			258,688	***Book value***

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah berkisar antara 10,71% - 95,00%. Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2024 sampai dengan 2025.

The estimated percentage of completion of construction in progress as at 31 December 2023 is between 10.71% - 95.00%. Those assets in progress as at 31 December 2023 are estimated to be completed in 2024 until 2025.

15. ASET LAIN-LAIN - BERSIH

15. OTHER ASSETS - NET

Aset lain-lain terdiri dari:

Other assets consist of:

	2023	2022	
Biaya dibayar dimuka	1,194,999	759,473	*Prepaid expense*
Piutang pendapatan surat berharga	889,375	900,484	*Income receivables from securities*
Agunan yang diambil alih	825,759	859,007	*Foreclosed collaterals*
Tagihan ATM	317,824	194,189	*ATM receivables*
Tagihan SKBDN kepada nasabah	272,925	134,423	*SKBDN receivables to customers*
Pendapatan pembiayaan yang akan diterima	202,588	158,240	*Income receivables from financing*
Tagihan kepada pihak ketiga	192,864	-	*Receivables from third party*
Persediaan alat tulis kantor dan materai	75,659	95,180	*Office supplies and stamps*
Setoran jaminan	46,959	54,226	*Guarantee deposit*
Lainnya	315,996	343,543	*Others*
	4,334,948	3,498,765	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,081,560)	(1,131,300)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	3,253,388	2,367,465	*Net*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain yang dibentuk telah memadai.

Management believes that allowance for impairment losses on other assets is adequate.

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 54

) Reclassified, see Note 54

15. ASET LAIN-LAIN – BERSIH (lanjutan) / *OTHER ASSETS – NET (continued)*

Mutasi agunan yang diambil alih pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Movement of the foreclosed collaterals as at of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	859,007	875,376	*Beginning balance*
Penjualan	(33,248)	(16,369)	*Sales*
Saldo akhir	825,759	859,007	*Ending balance*

16. LIABILITAS SEGERA / *OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Liabilitas ATM Jalin	294,323	258,988	*Liabilities to ATM Jalin*
Zakat Bank	189,730	141,405	*Zakat of the Bank*
Liabilitas pihak ketiga	117,002	36,295	*Liabilities to third parties*
Liabilitas ATM Prima	82,680	60,539	*Liabilities to ATM Prima*
Titipan tagihan pembayaran	54,573	45,111	*Remittance of bills payment*
Titipan ATM	36,117	7,071	*ATM remittance*
Liabilitas ATM Bersama	34,535	30,185	*Liabilities to ATM Bersama*
Titipan dana nasabah	25,224	19,133	*Deposit of customer funds*
Zakat pegawai, nasabah dan umum	7,044	3,748	*Zakat of employees, customers and public*
Titipan lainnya	303,619	282,700	*Other remittances*
	1,144,847	885,175	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Titipan ATM	171,220	124,327	*ATM remittance*
	1,316,067	1,009,502	

Liabilitas *BI Fast* merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan Bank Indonesia oleh nasabah Bank untuk transfer dana ke bank lain.

Liabilities to BI Fast represent liabilities arising from the use of Bank Indonesia network by Bank customers to transfer funds to other banks.

Liabilitas ATM Jalin, ATM Prima dan ATM Bersama, merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan *Automated Teller Machine* ("ATM") Bank oleh nasabah bank lain yang menjadi anggota dari jaringan ATM Jalin, jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.

Liabilities to ATM Jalin, ATM Prima and ATM Bersama represent liabilities arising from using the Bank's network of Automated Teller Machine ("ATM") by customers of using ATM Jalin network, ATM Prima and ATM Bersama.

Titipan lainnya merupakan titipan *direct* terhadap mitra Bank, titipan bagi hasil deposito jatuh tempo dan lainnya.

Other remittances are direct remittances to the Bank's partners, remittances of time deposits profit sharing and others.

Zakat pegawai, nasabah, dan umum merupakan zakat yang dibayarkan secara individu melalui *platform E-Channel* Bank dan akan disalurkan ke lembaga pengelola zakat.

Zakat of employees, customers and publics are zakat paid individually through the Bank's E-Channel platform and will be distributed to zakat management institutions.

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING*

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada nasabah *(shahibul maal)* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah.*

This account represents the undistributed share of the customers (shahibul maal) on income generated by the Bank from managing mudharabah funds.

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN (lanjutan)

17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING (continued)

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The Bank's undistributed profit sharing as at 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	2023	2022	
Bukan Bank			***Non-Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito	191,504	128,247	*Time deposits*
Giro	43,929	36,280	*Demand deposits*
PaSBI	16,319	-	*PaSBI*
Subnotes	658	14,820	*Subnotes*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	556	-	*Mudharabah term financing*
	252,966	179,347	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Deposito	2,820	484	*Time deposits*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	-	12,655	*Mudharabah term financing*
	255,786	192,486	
Bank			***Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito	146	289	*Time deposits*
	255,932	192,775	

18. GIRO *WADIAH*

18. WADIAH DEMAND DEPOSITS

Giro *wadiah* terdiri dari:

Wadiah demand deposits consist of:

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	16,475,273	18,439,514	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,261,650	911,262	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	257,413	13,984	*Saudi Arabian Riyal*
Euro Eropa	15,081	12,432	*European Euro*
Dolar Singapura	14,248	10,504	*Singapore Dollar*
	18,023,665	19,387,696	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	2,818,082	2,404,787	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	5,777	5,369	*United States Dollar*
	2,823,859	2,410,156	
	20,847,524	21,797,852	

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad-dhamanah* yaitu titipan dana pihak ketiga yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah demand deposits represent wadiah yad-dhamanah in which the third party funds are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	2023	2022	
Rupiah	0.02% - 0.03%	0.01% - 0.03%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.00%	0.00%	*Foreign currencies*

19. TABUNGAN *WADIAH* / *19. WADIAH SAVINGS DEPOSITS*

Tabungan *wadiah* terdiri dari: / *Wadiah savings deposits consist of:*

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	45,708,696	42,804,765	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,307,515	1,396,893	*United States Dollar*
	47,016,211	44,201,658	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	9,350	11,970	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	813	777	*United States Dollar*
	10,163	12,747	
	47,026,374	44,214,405	

Kisaran bonus tabungan *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut: / *The range rate of bonus from wadiah savings deposits given by customers are as follows:*

	2023	2022	
Rupiah	0.00%	0.00%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.00%	0.00%	*Foreign currencies*

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")	1,505,000	2,075,000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Giro *wadiah*	125,292	142,352	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	7,788	1,309	*Wadiah savings deposits*
	1,638,080	2,218,661	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")	123,176	-	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Giro *wadiah*	45	36	*Wadiah demand deposits*
	123,221	36	
	1,761,301	2,218,697	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")	1,355,000	1,475,000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Giro *wadiah*	123,939	140,053	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	7,788	1,309	*Wadiah savings deposits*
	1,486,727	1,616,362	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")	46,191	-	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Giro *wadiah*	45	36	*Wadiah demand deposits*
	46,236	36	
	1,532,963	1,616,398	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")	150,000	600,000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Giro *wadiah*	1,353	2,299	*Wadiah demand deposits*
	151,353	602,299	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")	76,985	-	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
	1,761,301	2,218,697	

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut: / *The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:*

	2023	2022	
Rupiah	0.72% - 0.73%	0.72% - 0.75%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.00%	0.00%	*Foreign currencies*

21. LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA / *21. LIABILITIES TO BANK INDONESIA*

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	11,900,055	-	*Rupiah*

Liabilitas kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 berisi instrumen Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia ("PaSBI") yang merupakan fasilitas penyediaan dana dari Bank Indonesia untuk pengelolaan likuiditas Bank dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah dengan nilai nominal sebesar Rp12.500.000.

Liabilities to Bank Indonesia as at 31 December 2023 containing Liquidity Management based on Bank Indonesia Sharia Principles ("PaSBI") instrument, which is a funding facility from Bank Indonesia for managing the Bank's liquidity with collateral in the form of securities that comply with sharia principles with nominal value amounting to Rp12,500,000.

Pada akhir bulan Desember 2023, Bank mendapatkan fasilitas PaSBI sebesar Rp11.900.055 dengan persentase bagi hasil yang dibayar oleh Bank sebesar 6,25% dan 6,85% per tahun, serta jatuh tempo pada tanggal 4 dan 5 Januari 2024.

At the end of December 2023, the Bank obtained PaSBI facilites amounting to Rp11,900,055 with a percentage profit sharing paid by the Bank of 6.25% and 6.85% per annum, and mature on 4 and 5 January 2024.

22. PERPAJAKAN / *22. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Taxes payable*

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

The details of taxes payable are as follows:

	2023	2022	
Utang pajak penghasilan			*Income tax payables*
Pasal 29	224,467	401,083	*Article 29*
Utang pajak lainnya			*Other tax payables*
Pasal 4 (2)	83,157	59,775	*Article 4 (2)*
Pasal 21	173,449	160,807	*Article 21*
Pasal 22	1,466	293	*Article 22*
Pasal 23	7,141	6,256	*Article 23*
Pasal 26	683	709	*Article 26*
PPN dan PPh lainnya	48,679	38,562	*VAT and other income taxes*
	314,575	266,402	
	539,042	667,485	

b. Beban pajak / *b. Tax expense*

	2023	2022	
Beban pajak kini	1,678,581	1,520,681	*Current tax expense*
Beban/(manfaat) pajak tangguhan	17,148	(266,060)	*Deferred tax expense/(benefit)*
	1,695,729	1,254,621	

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

***22. TAXATION** (continued)*

***b. Tax expense** (continued)*

Reconciliation between income before income tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income are as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan	7,399,472	5,514,803	*Income before tax*
Beda temporer			*Temporary differences*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	223,334	1,136,606	*Allowance for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	(15,450)	(63,883)	*Provision for impairment losses on non-earning assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	3,144	11,679	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	(31,597)	(23,450)	*Provision for impairment losses on operational risk*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	(56,935)	17,441	*Provision for employee benefit liabilities*
Cadangan bonus	(40,502)	79,458	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	8,988	89,105	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	(139,671)	(37,593)	*Depreciation of fixed assets and right-of-use assets*
Liabilitas sewa	42,809	-	*Lease liabilities*
Jumlah beda temporer	(5,880)	1,209,363	*Total temporary differences*
Beda tetap			*Permanent differences*
Natura karyawan	-	74,615	*Benefit-in-kind*
Representasi dan sumbangan	60,517	9,555	*Representation and donation*
Keanggotaan nonasosiasi	934	880	*Non-association membership*
Biaya lainnya	174,871	102,970	*Others*
Total beda tetap	236,322	188,020	*Total permanent differences*
Total koreksi fiskal	230,442	1,397,383	*Total fiscal corrections*
Penghasilan kena pajak	7,629,914	6,912,186	*Taxable income*
Beban pajak penghasilan badan	1,678,581	1,520,681	*Corporate income tax expense*
Pajak dibayar dimuka - pasal 25	(1,453,654)	(1,119,055)	*Prepaid tax - article 25*
Pajak yang dipotong pihak lain - pasal 22	(460)	(543)	*Tax withheld by other party - article 22*
Utang pajak penghasilan - pasal 29	224,467	401,083	***Income tax payable - article 29***

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. *TAXATION* *(continued)*

b. Beban pajak (lanjutan)

b. *Tax expense* *(continued)*

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation of income tax expense by multiplying income before income tax to the applicable tax rate are as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan	7,399,472	5,514,803	*Income before tax*
Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan	1,627,884	1,213,257	*Income tax expense calculated from income before tax*
Pengaruh pajak atas beda permanen	67,845	41,364	*Tax impact of permanent differences*
Beban pajak	1,695,729	1,254,621	*Tax expense*

c. Aset pajak tangguhan

c. *Deferred tax assets*

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to statement of profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/*Credited/ (charged) to OCI***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	1,006,700	49,133	-	1,055,833	*Allowance for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	216,654	(3,399)	-	213,255	*Provision for impairment losses on non-earning assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	6,352	692	-	7,044	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	20,500	(6,951)	-	13,549	*Provision for impairment losses on operational risks*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	151,584	(12,526)	7,739	146,797	*Provision employee benefit liabilities*
Cadangan bonus	193,499	(8,910)	-	184,589	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	65,173	1,977	-	67,150	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	15,387	(10,062)	-	5,325	*Depreciation of fixed assets and right-of-use assets*
Liabilitas sewa	-	(27,102)	-	(27,102)	*Lease liabilities*
Lainnya	(746)	-	-	(746)	*Others*
	1,675,103	(17,148)	7,739	1,665,694	

	31 Desember/*December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to statement of profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/*Credited/ (charged) to OCI***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	756,647	250,053	-	1,006,700	*Allowance for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	230,708	(14,054)	-	216,654	*Provision for impairment losses on non-earning assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	3,783	2,569	-	6,352	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	25,659	(5,159)	-	20,500	*Provision for impairment losses on operational risks*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	184,028	3,837	(36,281)	151,584	*Provision employee benefit liabilities*
Cadangan bonus	176,018	17,481	-	193,499	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	45,570	19,603	-	65,173	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	23,657	(8,270)	-	15,387	*Depreciation of fixed assets and right-of-use assets*
Lainnya	(746)	-	-	(746)	*Others*
	1,445,324	266,060	(36,281)	1,675,103	

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

d. Surat ketetapan pajak

Penutupan NPWP - *ex-legacy* BSM dan BNIS

Sehubungan dengan penggabungan BSM, BNIS, dan BRIS pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi BSI, Bank telah mengajukan permohonan penutupan NPWP *ex-legacy* BSM dan BNIS. Sampai tanggal laporan keuangan ini, proses penutupan NPWP *ex-legacy* BSM telah selesai sedangkan proses penutupan NPWP *ex-legacy* BNIS masih berlanjut.

Pemeriksaan tahun pajak 2021 - BSI

Pada bulan Juli 2022, Bank menerima Surat Perintah Pemeriksaan atas Masa Pajak 31 Januari 2021 dan Tahun Pajak 2021 untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sampai tanggal laporan keuangan ini, proses pemeriksaan pajak masih berlanjut.

e. Informasi lain

Sehubungan dengan penggabungan BSM, BNIS dan BRIS pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi BSI, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Bank yang menggabungkan diri dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada bulan Agustus 2021, Bank menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-145/WPJ.10/2021 tentang persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha. Atas hal tersebut, Bank mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ("SKB") PPh Final atas pengalihan aset BSM dan BNIS ke BSI. Sampai tanggal laporan keuangan ini, proses pengajuan permohonan SKB *ex-legacy* BNIS telah selesai, sedangkan proses pengajuan permohonan SKB *ex-legacy* BSM masih berjalan.

***22. TAXATION** (continued)*

***c. Deferred tax assets** (continued)*

Management believes that it is most likely that future taxable income will be available against the temporary differences which create deferred tax assets.

d. Tax assessment letters

Revocation of the tax ID - ex-legacy BSM and BNIS

In connection with the merger of BSM, BNIS and BRIS on 1 February 2021 into BSI, the Bank has submitted the request for revocation of the tax ID ex-legacy BSM and BNIS. Until the date of this financial statements, the tax ID revocation process of ex-legacy BSM is completed while the tax ID revocation process of ex-legacy BNIS is still in progress.

Assessment for fiscal year 2021 - BSI

In July 2022, the Bank received an Inspection Order for the Tax Period 31 January 2021 and Fiscal Year 2021 addressed to PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Until the date of this financial statements, the tax audit is still in progress.

e. Other information

In connection with the merger of BSM, BNIS and BRIS on 1 February 2021 into BSI, based on the prevailing laws and regulations in Indonesia, the merging Banks may use the book value of the transfer of assets in the context of a business merger after obtaining approval from the Directorate General of Taxes.

In August 2021, the Bank received the Decree of the Director General of Taxes number Kep-145/WPJ.10/2021 concerning the approval of the use of book value for the transfer of assets in the context of merger. For this matter, the Bank has submitted the request for Exemption Certificate ("SKB") PPh Final for the transfer of BSM and BNIS assets to BSI. As at the date of these financial statements, the process of submitting the SKB application for ex-legacy BNIS has been completed, while the process of submitting the SKB application for ex-legacy BSM is still ongoing.

23. LIABILITAS LAIN-LAIN / *23. OTHER LIABILITIES*

	2023	2022	
Cadangan bonus dan tantiem	970,236	1,037,406	*Provision of bonus and tantiem*
Biaya yang masih harus dibayar	288,492	261,630	*Accrued expenses*
Biaya notaris	284,286	279,939	*Notary fees*
Pendapatan diterima dimuka	204,383	20,336	*Deferred income*
Cadangan THR dan kepegawaian lainnya	174,053	138,401	*Provision of THR and other employee expenses*
Liabilitas sewa	123,193	166,002	*Lease liabilities*
Setoran jaminan	19,818	20,755	*Guarantee deposits*
Pendapatan administrasi pembiayaan ditangguhkan	12,757	13,122	*Deferred financing administration income*
Dana kebajikan	9,907	7,048	*Qardhul hasan funds*
Lainnya	358,982	411,142	*Others*
	2,446,107	2,355,781	

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari cadangan yang dibentuk untuk jaringan, pemeliharaan ATM dan iuran OJK.

Accrued expenses consist of reserves on network, ATM maintenance fees and Financial Services Authority's contribution.

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari *ujrah* diterima dimuka atas *supply chain financing, buyer chain financing, ijarah* atas aset, dan *ijarah* multijasa.

Deferred income consists of deferred ujrah income of supply chain financing, buyer chain financing, ijarah of assets and multi-services ijarah.

Dana kebajikan terdiri dari dana sosial yang berasal dari denda/penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta *infaq* dan *shadaqah* yang berasal dari *E-Channel*. *Infaq* dan *shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Qardhul hasan funds consists of social funds originating from fines/penalties, transactions that are not in accordance with sharia principles and infaq and shadaqah originating from E-Channel. Infaq and shadaqah are assets that are given voluntarily by the owners, whether the use is limited (determined) or not.

Lainnya terdiri dari rekening penampungan angsuran pembiayaan, kewajiban kepada pihak ketiga, rekening administrasi, perantara hasil kliring dan lainnya.

Others consist of escrow account for financing installment, liability to third parties, administrative accounts, clearance intermediaries and others.

24. GIRO *MUDHARABAH* / *24. MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS*

	2023	2022	
Pihak ketiga - Bukan Bank			***Third parties - Non-Bank***
Rupiah	11,204,495	8,078,552	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3,412,905	902,267	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	154,655	-	*Saudi Arabian Riyal*
	14,772,055	8,980,819	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	8,336,606	12,496,418	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	9,245,205	1,245,851	*United States Dollar*
	17,581,811	13,742,269	
Pihak ketiga - Bank			***Third parties - Bank***
Rupiah	63,394	31,880	*Rupiah*
	32,417,260	22,754,968	

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bank garansi, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Mudharabah demand deposits is a current accounts product in which investor's fund can be withdrawn by check, bank guarantee and other payment instruction method.

24. GIRO *MUDHARABAH* (lanjutan) / *MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS (continued)*

Kisaran tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah demand deposits are as follows:

	2023	2022	
Rupiah	3.15% - 3.97%	1.95% - 3.40%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.13% - 5.64%	0.05% - 0.19%	*United States Dollar*

25. TABUNGAN *MUDHARABAH* / *MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*

	2023	2022	
Pihak ketiga - Bukan Bank			***Third parties - Non-Bank***
Rupiah	76,907,691	71,634,077	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	600,712	549,555	*United States Dollar*
	77,508,403	72,183,632	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	191,590	86,008	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	77	66	*United States Dollar*
	191,667	86,074	
Pihak ketiga - Bank			***Third parties - Bank***
Rupiah	580,115	627,646	*Rupiah*
	78,280,185	72,897,352	

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah savings deposits are as follows:

	2023	2022	
Rupiah	0.66% - 0.69%	0.68% - 0.91%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.23%	0.23% - 0.24%	*United States Dollar*

26. DEPOSITO *MUDHARABAH* / *MUDHARABAH TIME DEPOSITS*

a. Berdasarkan mata uang / *By currency*

	2023	2022	
Bukan Bank			***Non-Bank***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	85,358,012	80,018,589	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	2,134,032	2,324,983	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	-	5,848	*Saudi Arabian Riyal*
	87,492,044	82,349,420	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	27,472,220	18,014,180	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	883,832	122,330	*United States Dollar*
	28,356,052	18,136,510	
Bank			***Bank***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	136,693	274,412	*Rupiah*
	115,984,789	100,760,342	

26. DEPOSITO *MUDHARABAH* (lanjutan) / *MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)*

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By period*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
1 bulan	62,075,237	64,552,121	*1 month*
3 bulan	29,391,659	19,821,582	*3 months*
6 bulan	10,338,216	4,250,650	*6 months*
12 bulan	11,161,813	9,682,828	*12 months*
	112,966,925	98,307,181	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
1 bulan	1,736,093	1,898,216	*1 month*
3 bulan	647,482	256,852	*3 months*
6 bulan	102,252	97,899	*6 months*
12 bulan	532,037	194,346	*12 months*
	3,017,864	2,447,313	
Riyal Arab Saudi			***Saudi Arabian Riyal***
1 bulan	-	5,848	*1 month*
	115,984,789	100,760,342	

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	70,387,004	72,621,978	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	25,851,195	15,301,697	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	16,728,726	10,383,506	*> 3 - ≤ 12 months*
	112,966,925	98,307,181	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 bulan	2,254,257	1,954,750	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	265,355	300,290	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	498,252	192,273	*> 3 - ≤ 12 months*
	3,017,864	2,447,313	
Riyal Arab Saudi			***Saudi Arabian Riyal***
≤ 1 bulan	-	5,848	*≤ 1 month*
	115,984,789	100,760,342	

d. Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp1.369.418 dan Rp944.097, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 9, 10, 11, dan 12).

d. Mudharabah time deposits that are used as collateral for the Bank's receivables and financing amounted to Rp1,369,418 and Rp944,097, as at 31 December 2023 and 2022, respectively (Note 9, 10, 11, and 12).

e. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

e. Mudharabah time deposits represent third parties' investments which are entitled to receive a share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and previously approved nisbah.

f. Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

f. The range rate of profit sharing for mudharabah time deposits are as follows:

	2023	2022	
Rupiah	2.48% - 2.55%	2.51% - 3.23%	*Rupiah*
Valuta asing	0.23% - 0.30%	0.22% - 0.27%	*Foreign currencies*

27. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI

27. *SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga	175,000	775,000	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44)	25,000	600,000	*Related parties (Note 44)*
	200,000	1,375,000	

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi - PT Bank BRIsyariah Tbk

Pada tanggal 17 November 2016, PT Bank BRIsyariah Tbk menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dan diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan metode pendapatan bagi hasil pada Bursa Efek Indonesia. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,20% yang dihitung dari pendapatan kotor tunai, yang diindikasikan sebesar 11,85%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") atau lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I memperoleh peringkat A+(idn) dari *Fitch.*

Bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Pengeluaran sukuk atau MTN yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk *Mudharabah* Subordinasi.
- Perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Bank, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha.

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan tanpa memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal berikut:

- Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Bank kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar (melebihi 50%) dari seluruh aset tetap milik Bank berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.

Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank BRIsyariah Tbk

On 17 November 2016, PT Bank BRIsyariah Tbk issued Rp1,000,000 Subordinated Sukuk Mudharabah I Year 2016 which is issued at 100.00% of its nominal value using profit sharing method in Indonesia Stock Exchange. The amount of Sukuk holder's nisbah is 80.20% which was calculated from liquid gross revenue, which was indicated at 11.85%. Profit sharing will be paid quarterly and due on 16 November 2023.

The Subordinated Sukuk Mudharabah I is not guaranteed by special collateral nor guaranteed by the Republic of Indonesia or other third parties and is not included in the bank guarantee program implemented by the Deposit Insurance Agency ("LPS") or the other insurance corporation.

As at 31 December 2022, the Bank's Subordinated Sukuk Mudharabah I obtained a rating of A+(idn) from Fitch.

The trustee of this Subordinated Sukuk Mudharabah I is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The trustee agreement covers several covenants affecting the Bank and requires a written approval from the trustee before conducting the following:

- *Issuing another sukuk or MTN which has higher position and priority payment over Subordinated Sukuk Mudharabah.*
- *Changing the main business.*
- *Reducing authorised, issued and paid-in capital stock.*
- *Conducting merger, consolidation, acquisition with other parties which causes dissolution of the Bank, or would have negative impact on business continuity.*

The trustee agreement covers several covenants affecting the Bank and without requires a written approval from the trustee will not conducting the following:

- *Selling or transferring fixed assets of the Bank to other parties, either all or most of fixed assets (over 50%) based on the latest audited financial statements.*

27. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi - PT Bank BRIsyariah Tbk (lanjutan)

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan tanpa memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal berikut: (lanjutan)

- Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Bank atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Bank dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim.
- Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain.

Atas penggabungan usaha merger bank syariah dimana BRIS menjadi Bank yang menerima penggabungan, telah diinformasikan kepada wali amanat dengan surat No. S.B.06-MDB/01-2021 tanggal 6 Januari 2021, perihal "Informasi Mengenai Rencana Penggabungan Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri".

Manajemen Bank berpendapat bahwa semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Berdasarkan Surat No. SR-32/PB.13/2016 tertanggal 29 November 2016, telah disetujui permohonan Bank oleh OJK untuk memperhitungkan hasil penjualan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I sebesar Rp1.000.000 sebagai komponen modal pelengkap Bank (setinggi-tingginya 100% dari modal inti).

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal tanggal 22 Desember 2016, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Tahun 2016 sebesar Rp375.000 dan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 dan sebelum dilunasinya semua pokok dan bagi hasil, Bank berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio CAR *(Capital Adequacy Ratio)* tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2016 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 50 (lima puluh) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: laporan keuangan tahunan (*audited*) selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan triwulan selambat-lambatnya akhir bulan ke-1 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pendapatan bagi hasil, dan laporan penilaian tingkat kesehatan bank dan penilaian sendiri *(self assessment)* pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada OJK.

27. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank BRIsyariah Tbk *(continued)*

The trustee agreement covers several covenants affecting the Bank and without requires a written approval from the trustee will not conducting the following: (continued)

- *Conducting transactions with affiliated parties, unless either the transaction is performed under favourable terms or at least equal to the requirements obtained by the Bank from independent third parties in ordinary transactions.*
- *Providing financing or investment in stock shares to other parties.*

Regarding the merger of sharia bank where BRIS will become the surviving entity, the trustee has been informed by letter No. S.B.06-MDB/01-2021 dated 6 January 2021 about "Information Regarding the Planned Merger of PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah and PT Bank Syariah Mandiri".

Management of the Bank has complied with the above covenants contained on the trustee agreement.

Based on the letter No. SR-32/PB.13/2016 dated 29 November 2016, the Financial Service Authority ("OJK") has agreed with the Bank's request to make the proceeds of Subordinated Sukuk Mudharabah I amounting to Rp1,000,000 as a complementary capital component of the Bank (maximum 100% of core capital).

Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank Syariah Mandiri

On 22 December 2016, the Bank issued Sukuk Mudharabah Year 2016 amounting to Rp375,000 and due on 22 December 2023.

During the validity period of the 2016 BSM Subordinated Sukuk Mudharabah and prior to repayment of all principal and profit sharing, the Bank is obliged to: (i) maintain a CAR (Capital Adequacy Ratio) ratio of not less than 12% (twelve percent); (ii) ensure that the 2016 Subordinated Sukuk Mudharabah will not be owned by more than 50 (fifty) investors; (iii) submit to the monitoring agency as follows: annual financial statements (audited) not later than the end of the 4th month after the date of the reporting book, quarterly financial statements not later than the end of the 1st month after the date of the reporting book, financial statements used as the basis for calculating revenue sharing, and the bank's soundness level assessment report and self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance to OJK.

27. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri (lanjutan)

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut, akan dimanfaatkan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan.

Syarat dan ketentuan:
- Pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang *subnotes* Bank dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan Bank triwulan terakhir yang belum diaudit yang tersedia dan disahkan oleh Direksi Bank selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan.
- Pendapatan yang dibagihasilkan diperoleh dari pendapatan portofolio pembiayaan Rupiah (*blended*) Bank senilai 7 (tujuh) kali Dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Penerbit, yang diperoleh selama 1 (satu) triwulan sebagaimana dicantumkan dalam setiap laporan keuangan Bank yang belum diaudit.
- Nisbah yang diberikan kepada pemegang *subnotes* adalah sebesar 27,07% dari pendapatan yang dibagihasilkan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Subnotes ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga. Termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan ke dalam Program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014. *Subnotes* merupakan kewajiban Bank yang disubordinasi.

Bank tanpa persetujuan tertulis Agen Pemantau tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) mengurangi modal ditempatkan dan disetor; (ii) mengadakan perubahan bidang usaha; (iii) melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi, kecuali karena adanya ketentuan Pemerintah atau Bank Indonesia; (iv) mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya Bank.

27. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank Syariah Mandiri *(continued)*

The proceeds from the issuance of the Subordinated Sukuk Mudharabah I are intended to strengthen the capital structure in order to support business development activities such as financing expansion.

Terms and Conditions:
- *Profit sharing income is calculated based on the multiplication between the ratio of the Bank's subnotes holder and the revenue shared, which is the amount listed in the unaudited last quarter of the Bank's financial report, which is available and approved by the Bank's Board of Directors no later than 10 (ten) working days before the date of payment of the relevant revenue sharing.*
- *The income that is shared is obtained from the income of the Rupiah financing portfolio (blended) Bank amounting to 7 (seven) times the Subordinated Sukuk Mudharabah Fund in Rupiah currency owned by the Issuer, which is obtained for 1 (one) quarter as stated in each unaudited Bank financial report.*
- *The ratio given to subnotes holders is 27.07% of the shared revenue which is paid every 3 (three) months.*

These subnotes are not guaranteed by any special guarantees and are not guaranteed by third parties. Including not guaranteed by the Republic of Indonesia and not included in the Bank Guarantee Program which is carried out by the Deposit Insurance Corporation or its replacement in accordance with the applicable laws and regulations and following the provisions of Article 17 paragraph (1) letter f of OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014. Subnotes are subordinated obligations of the Bank.

Banks without written approval from the Monitoring Agent will not do the following: (i) reduce the issued and paid-up capital; (ii) make changes in business fields; (iii) carry out a merger or consolidation or reorganisation, except because of the provisions of the Government or Bank Indonesia; (iv) enter into mergers, consolidations, acquisitions with other entities which will result in the dissolution of the Bank.

27. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri (lanjutan)

DPS Bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan opini melalui surat No. 18/13/DPS/X/2016 tanggal 1 November 2016 menyatakan bahwa *subordinated notes* syariah *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN mengenai obligasi syariah dan obligasi syariah *mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 dan No. 33/DSN-MUI/IX/2002). Bagi hasil yang diberikan kepada pemegang *subordinated notes* diambil dari porsi Bank.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2022, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 memiliki peringkat idAA (*Double A Sharia*) dari agen pemeringkat efek PT Pefindo.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tanggal tanggal 15 Desember 2023, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 sebesar Rp200.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2028.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah Subordinasi BSI Tahun 2023 dan sebelum dilunasinya semua dana sukuk dan bagi hasil, Bank berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio CAR *(Capital Adequacy Ratio)* tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 49 (empat puluh sembilan) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: (a) Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK termasuk laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bank, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Agen Pemantau memandang perlu, berdasarkan permohonan Agen Pemantau secara tertulis, Bank wajib menyampaikan kepada Agen Pemantau dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (apabila ada) selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Bank; (b) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dan disampaikan kepada Agen Pemantau dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat permohonan dari Agen Pemantau

27. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank Syariah Mandiri *(continued)*

Bank Syariah Mandiri's Sharia Supervisory Board has issued an opinion by letter No. 18/13/DPS/X/2016 dated 1 November 2016 stated that the subordinated notes for sharia mudharabah are in accordance with the DSN fatwa regarding sharia bonds and sharia mudharabah bonds (Fatwa DSN-MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 and No. 33/DSN-MUI/IX/2002). Profit sharing given to holders of subordinated notes is taken from the Bank's portion.

Acting as trustee of the 2016 BSM Subordinated Sukuk Mudharabah is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Based on the last rating report published in November 2022, the 2016 BSM Subordinated Sukuk Mudharabah has an idAA (Double A Sharia) rating from the securities rating agency PT Pefindo.

Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

On 15 December 2023, the Bank issued Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 amounting to Rp200,000 and is due on 15 December 2028.

During the validity period of the BSI Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 and prior to repayment of all sukuk funds and profit sharing, the Bank is obliged to: (i) maintain a CAR (Capital Adequacy Ratio) ratio of not less than 12% (twelve percent); (ii) ensure that the 2023 Subordinated Sukuk Mudharabah will not be owned by more than 49 (fourty nine) investors; (iii) submit to the monitoring agency as follows: (a) A copy of the report submitted to OJK including the level assessment report the bank's health, no later than 5 (five) working days after the report handed over to the parties mentioned above. In case the Monitoring Agent views necessary, based on the written request of the Monitoring Agent, the Bank is obliged submit to the Monitoring Agent additional documents relating to the above report (if any) no later than 10 (ten) working days after the date the application letter is received by the Bank; (b) Annual financial reports that have been audited by a public accountant registered with the OJK and submitted to the Monitoring Agent within 5 (five) working days after receiving the application letter from the Monitoring Agent.

27. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

Seluruh dana hasil penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023, akan dipergunakan oleh Bank untuk kegiatan usaha Bank dalam rangka memperkuat struktur permodalan dengan memperhitungkan dana hasil penerbitan sebagai modal pelengkap dan meningkatkan aset produktif Bank.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 diterbitkan dengan peringkat idAA(sy) *(Double A Sharia)* yang diperoleh dari agen pemeringkat efek PT Pefindo pada tanggal 16 Oktober 2023. Pendapatan bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi, dimana besarnya nisbah adalah 88,55% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

27. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk *(continued)*

All funds from the issuance of Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 will be used by the Bank for the Bank's business activities in order to strengthen its capital structure by calculating the proceeds from the issuance as complementary capital and increasing the Bank's productive assets.

This Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is issued without script, except for the Subordinated Sukuk Mudharabah Jumbo Certificate which is issued in the name of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as proof of ownership of Sharia Securities for the benefit of the Subordinated Sukuk Mudharabah Holders. The Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is issued with idAA(sy) (Double A Sharia) rating which was obtained from the securities rating agency PT Pefindo on 16 October 2023. Profit sharing income is calculated based on the multiplication of the profit sharing nisbah of Subordinated Sukuk Mudharabah Holders, where the ratio is 88.55% of the revenue shared with an indication of profit sharing equivalent to 7.90% per year. The term of the Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is 5 (five) years from the issuance date. This Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is offered at a value of 100% of the amount of Subordinated Mudharabah Sukuk funds. Profit sharing income is paid every quarter, according to the payment date of profit sharing income.

Acting as trustee of the 2023 BSI Subordinated Sukuk Mudharabah is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

28. SUKUK *MUDHARABAH MUQAYYADAH*

28. SUKUK MUDHARABAH MUQAYYADAH

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga	3,608	-	*Third Parties*

Pada tanggal 26 Juni 2023, Bank telah menerbitkan Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap I ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp3.759 dengan maksimal plafon sebesar Rp100.000. Besarnya nisbah adalah sebesar 36,34% yang diindikasikan sebesar 0,55% per tahun. Dana sukuk dan bagi hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2035.

On 26 June 2023, the Bank issued Long Term Sukuk Mudharabah Muqayyadah which was made without going through the Public Offering I of PT Bank BSI Tbk Year 2023 Phase I ("Sukuk Mudharabah Muqayyadah I Phase I") with a nominal value of Rp3,759 with a maximum limit of Rp100,000. The size of the ratio is 36.34% which is indicated at 0.55% per year. Sukuk funds and profit sharing is paid every 3 (three) months and will be due on 26 December 2035.

28. SUKUK *MUDHARABAH MUQAYYADAH* (lanjutan)

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan dalam rangka kerjasama antara Bank dengan BP Tapera selaku investor tunggal dimana BSI ditunjuk sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah kepada peserta BP Tapera. Skema kerjasama tersebut diatur pada Undang-Undang No.4 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2020 perihal penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

28. SUKUK MUDHARABAH MUQAYYADAH *(continued)*

The issuance of the sukuk was carried out in the context of cooperation between the Bank and BP Tapera as the sole investor where BSI was appointed as the Bank that distributes Tapera Syariah KPR to BP Tapera participants. This cooperation scheme is regulated in Law No. 4 of 2016 and Government Regulation No. 25 of 2020 concerning the implementation of public housing savings.

29. PEMBIAYAAN BERJANGKA *MUDHARABAH*

29. MUDHARABAH TERM FINANCING

	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	776,250	-	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	778,375	*United States Dollar*
	776,250	778,375	

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Bank mendapatkan fasilitas *line* pembiayaan *mudharabah* sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Bank telah melakukan penarikan fasilitas sebesar USD50.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan nisbah bagi hasil sebesar 0,93% - 0,94% dan telah dilunasi pada tanggal 30 Agustus 2023. Pada tanggal 27 Desember 2023, Bank melakukan penarikan fasilitas sebesar Rp776.250 dengan nisbah bagi hasil sebesar 0,42% dan jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2024. Tidak terdapat agunan yang dijaminkan untuk fasilitas ini.

On 29 August 2022, the Bank obtained a mudharabah financing line facility of USD100,000,000 (full amount) from PT Bank Maybank Indonesia Tbk. The Bank has withdrawn the facility amounting to USD50,000,000 (full amount) on 30 August 2022 with profit sharing ratio of 0.93% - 0.94% and has been settled on 30 August 2023. On 27 December 2023, the Bank has withdrawn the facility amounting to Rp776,250 with a profit sharing ratio of 0.42% and was due on 26 January 2024. There is no collateral guaranteed for this facility.

30. EKUITAS

30. EQUITY

Modal Saham

Share Capital

Susunan pemegang saham Bank adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's shareholders are as follows:

Pemegang Saham	31 Desember/*December* 2023 Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (nilai penuh)/ *Amount of issued and fully-paid share capital (full amount)*	Persentase pemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah modal (nilai penuh)/ *Amount of capital (full amount)*	*Shareholders*
Modal Dasar				***Authorised Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.00%	500	*Series A Dwiwarna share*
Saham biasa Seri B	79,999,999,999	100.00%	39,999,999,999,500	*Series B common shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna				***Series A Dwiwarna share***
Negara Republik Indonesia	1	0.00%	500	*Republic of Indonesia*
Saham biasa Seri B				***Series B common shares***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,740,608,436	51.47%	11,870,304,218,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,720,230,418	23.24%	5,360,115,209,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	15.38%	3,546,380,827,500	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Dewan Komisaris:				*Board of Commissioners:*
Sutanto	1,010,100	0.00%	505,050,000	*Sutanto*
Suyanto	822,700	0.00%	411,350,000	*Suyanto*
Masduki Baidlowi	822,700	0.00%	411,350,000	*Masduki Baidlowi*
Imam Budi Sarjito	822,700	0.00%	411,350,000	*Imam Budi Sarjito*
Direksi:				*Board of Directors:*
Ngatari	18,621,200	0.04%	9,310,600,000	*Ngatari*
Hery Gunardi	2,210,600	0.00%	1,105,300,000	*Hery Gunardi*
Ade Cahyo Nugroho	1,726,600	0.00%	863,300,000	*Ade Cahyo Nugroho*
Anton Sukarna	1,726,600	0.00%	863,300,000	*Anton Sukarna*
Tribuana Tunggadewi	1,726,600	0.00%	863,300,000	*Tribuana Tunggadewi*
Bob Tyasika Ananta	548,400	0.00%	274,200,000	*Bob Tyasika Ananta*
Moh. Adib	527,400	0.00%	263,700,000	*Moh. Adib*
Zaidan Novari	517,900	0.00%	258,950,000	*Zaidan Novari*
Masyarakat	4,544,576,128	9.87%	2,272,288,064,000	*Public*
	46,129,260,138	100.00%	23,064,630,069,000	

30. EKUITAS (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Susunan pemegang saham Bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***30. EQUITY** (continued)*

***Share Capital** (continued)*

The composition of the Bank's shareholders are as follows: (continued)

Pemegang Saham / *Shareholders*	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (nilai penuh)/ *Amount of issued and fully-paid share capital (full amount)*	Persentase pemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah modal (nilai penuh)/ *Amount of capital (full amount)*
	31 Desember/*December* 2022		
Modal Dasar / ***Authorised Capital***			
Saham Seri A Dwiwarna / *Series A Dwiwarna share*	1	0.00%	500
Saham biasa Seri B / *Series B common shares*	79,999,999,999	100.00%	39,999,999,999,500
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / ***Issued and Fully Paid Capital***			
Saham Seri A Dwiwarna / ***Series A Dwiwarna share***			
Negara Republik Indonesia / *Republic of Indonesia*	1	0.00%	500
Saham biasa Seri B / ***Series B common shares***			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk / *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*	23,740,608,436	51.47%	11,870,304,218,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*	10,720,230,418	23.24%	5,360,115,209,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk / *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*	7,092,761,655	15.38%	3,546,380,827,500
Dewan Komisaris: / *Board of Commissioners:*			
Sutanto / *Sutanto*	1,687,400	0.00%	843,700,000
Direksi: / *Board of Directors:*			
Ngatari / *Ngatari*	16,823,500	0.04%	8,411,750,000
Moh. Adib / *Moh. Adib*	9,500	0.00%	4,750,000
Masyarakat / *Public*	4,557,139,228	9.87%	2,278,569,614,000
	46,129,260,138	100.00%	23,064,630,069,000

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan hak istimewa sebagai berikut:

- menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai perubahan Anggaran Dasar, perubahan permodalan, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, serta pengambilalihan Bank oleh perusahaan lain;
- menetapkan pedoman terkait pengembangan strategis Bank secara organik maupun nonorganik;
- mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mata acara RUPS; dan
- meminta dan mengakses data dan dokumen Bank.

Pelaksanaan hak-hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat dikuasakan kepada pemegang saham pengendali Seri B terbanyak, kecuali pelaksanaan hak terkait persetujuan atas penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran serta pengambilalihan Bank oleh perusahaan lain.

Saham biasa Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat. Pemegang Saham Seri B mempunyai hak memberikan suara dimana setiap satu saham berhak memberikan satu hak suara.

Series A Dwiwarna share is share that is specially owned by the Republic of Indonesia which grants the following special rights:

- *approve in the General Meeting of Shareholders ("GMS") regarding changes to the Articles of Association, changes in capital, mergers, consolidations, separations, dissolution and acquisitions of the Bank by other companies;*
- *establish guidelines related to the Bank's organic and non-organic strategic development;*
- *propose the arrangement of the GMS and agenda of the GMS; and*
- *request and access data and documents of the Bank.*

The exercise of the special rights of Series A Dwiwarna shareholders can be delegated to the majority controlling shareholder of Series B, except for the exercise of rights related to the approval for mergers, consolidations, separations, dissolution and acquisitions of the Bank by other companies.

Series B common shares are ordinary shares which can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public. Series B Shareholders have the right to vote in which each one share has the right to give one voting right.

30. EKUITAS (lanjutan)

***30. EQUITY** (continued)*

Modal Saham (lanjutan)

***Share Capital** (continued)*

Penerbitan saham baru

Issuance of new shares

Melalui PMHMETD I yang dilakukan pada bulan Desember 2022, Bank meningkatkan modal dan disetor penuh sebanyak 4.999.952.795 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp2.499.976, yang mengakibatkan kenaikan tambahan modal disetor sebesar Rp2.437.676 (setelah dikurangi oleh biaya emisi) (lihat Catatan 1d).

Through PMHMETD I which was exercised in December 2022, the Bank increased the issued and fully paid capital of 4,999,952,795 shares (full amount) or Rp2,499,976, which resulted in an increase in additional paid-in capital of Rp2,437,676 (after deducting issuance costs) (see Note 1d).

Cadangan Umum

General Reserve

Cadangan umum pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

The general reserves are originally provided in accordance with Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) on Limited Liability Company (later superseded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-in capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Tambahan Modal Disetor

Additional Paid-in Capital

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

The movements in additional paid-in capital are as follows:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	-	*Balance as at 1 January 2021*
Agio saham dari penggabungan usaha	3,237	*Agio shares from merger*
Imbalan bersih yang secara efektif dialihkan dalam akuisisi terbalik	(5,374,061)	*Net consideration effectively transferred in reverse acquisition*
Penyesuaian yang timbul dari akuisisi terbalik untuk mencerminkan modal menurut hukum	(995,952)	*Adjustment arising from reverse acquisition to reflect the Bank's legal capital*
Tambahan modal disetor per 31 Desember 2021	(6,366,776)	*Additional paid-in capital as at 31 December 2021*
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas pada tahun 2022	2,499,976	*Additional paid-in capital due to Limited Public Offering in 2022*
Biaya emisi penerbitan saham	(62,300)	*Share issuance costs*
Saldo akhir	(3,929,100)	*Ending balance*

31. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

31. INCOME FROM SALES AND PURCHASES

	2023	2022	
Murabahah	12,627,711	11,354,553	*Murabahah*
Istishna	69	332	*Istishna*
	12,627,780	11,354,885	

32. PENDAPATAN DARI BAGI HASIL / *32. INCOME FROM PROFIT SHARING*

	2023	2022	
Musyarakah	5,843,007	4,722,224	*Musyarakah*
Mudharabah	97,479	142,040	*Mudharabah*
	5,940,486	4,864,264	

33. PENDAPATAN DARI *IJARAH* - BERSIH / *33. INCOME FROM IJARAH - NET*

	2023	2022	
Ijarah muntahiyah bittamlik - bersih	43,574	25,338	*Ijarah muntahiyah bittamlik - net*
Ijarah multijasa - bersih	111,872	96,883	*Multi-services ijarah - net*
	155,446	122,221	

Sebelum 1 Januari 2023, pendapatan *ijarah* - bersih merupakan pendapatan pokok dan margin dari *ijarah muntahiyah bittamlik* ("IMBT") *dan ijarah* multijasa setelah dikurangi beban penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai aset *ijarah*.

Before 1 January 2023, income form ijarah - net represents the principal and margin income from ijarah muntahiyah bittamlik ("IMBT") and multi-services ijarah after deducting depreciation, amortisation expenses and impairment of ijarah assets.

Setelah 1 Januari 2023, pendapatan IMBT - bersih merupakan pendapatan pokok dan margin IMBT setelah dikurangi beban penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai aset *ijarah*. Pendapatan *ijarah* multijasa - bersih merupakan pendapatan *ijarah* tidak langsung atas margin dan pokok *ijarah* multijasa setelah dikurangi biaya yang dibayarkan kepada pemberi jasa awal.

After 1 January 2023, income from IMBT - net represents the principal and margin income from IMBT after deducting depreciation, amortisation expenses and impairment of ijarah assets. Multi-services ijarah income - net represents indirect ijarah income from the principal and margin of multi-services ijarah after deducting fees paid to the initial service provider.

34. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA / *34. OTHER MAIN OPERATING INCOME*

	2023	2022	
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	3,012,345	3,098,061	*Income from investments in marketable securities*
Pendapatan dari Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	319,541	7,311	*Income from Bank Indonesia Sharia Term Deposits*
Bonus dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS") dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	41,750	73,982	*Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS") and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")*
Bagi hasil penempatan pada bank lain	24,086	2,526	*Profit sharing from placements with other bank*
Lainnya	130,309	99,615	*Others*
	3,528,031	3,281,495	

35. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL / *35. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN*

	2023	2022	
Deposito *mudharabah*	4,148,029	2,874,964	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	791,764	367,948	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	466,655	564,411	*Mudharabah savings deposits*
PaSBI	221,325	-	*PaSBI*
Investasi terikat	119,316	59,848	*Restricted investment*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	115,849	129,791	*Subordinated sukuk mudharabah*
SIMA	74,464	3,083	*SIMA*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	32,710	12,604	*Mudharabah term financing*
Musyarakah-mudharabah musytarakah	21,003	19,459	*Musyarakah-mudharabah musytarakah*
Lainnya	2,053	61	*Others*
	5,993,168	4,032,169	

36. PENDAPATAN USAHA LAINNYA / *36. OTHER OPERATING INCOME*

Pendapatan usaha lainnya terdiri dari: / *Other operating income consists of:*

	2023	2022	
Pendapatan imbalan jasa perbankan			*Fee based income from banking services*
Pendapatan *rahn*	727,749	638,934	*Income from rahn*
Pendapatan administrasi tabungan dan giro	346,871	353,919	*Income from saving deposits and demand deposits administration*
Pendapatan administrasi pembiayaan	331,669	334,823	*Income from financing administration*
Pendapatan layanan *internet banking*	314,155	256,394	*Income from internet banking services*
Keuntungan pelepasan surat berharga	216,017	101,831	*Gain on sale of marketable securities*
Pendapatan transaksi ATM	173,310	202,503	*Income from ATM transactions*
Pendapatan komisi asuransi	157,705	117,738	*Income from insurance commission*
Pendapatan kartu Hasanah	143,621	96,225	*Income from Hasanah Card*
Pendapatan jasa pembayaran	135,742	112,536	*Income from payment services*
Pendapatan jasa ekspor impor	105,916	43,766	*Income from export import services*
Pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan	101,813	125,046	*Income from administration and commission other than financing*
Pendapatan pembiayaan sindikasi	84,903	64,737	*Syndicated financing fee*
Pendapatan transaksi mata uang asing - bersih	60,972	80,785	*Income from foreign exchange transaction - net*
Pendapatan ganti rugi restrukturisasi (*ta'widh*)	32,221	35,200	*Income from restructuring compensation (ta'widh)*
Pendapatan jasa penjualan sukuk dan reksa dana	31,570	26,117	*Income from service of sale of sukuk and mutual funds*
Pendapatan transaksi *remittance*	26,749	33,410	*Income from remittance transactions*
Kenaikan nilai surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	26,093	931	*Increase in marketable securities measured at fair value through profit or loss*
Lainnya	95,808	62,313	*Others*
	3,112,884	2,687,208	
Pendapatan lainnya			*Other income*
Penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	1,091,582	1,013,903	*Subsequent recoveries of receivables and financing written-off*
	4,204,466	3,701,111	

37. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *37. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES*

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari: / *Salaries and benefits consist of:*

	2023	2022	
Gaji dan upah	3,776,223	3,701,231	*Salaries and wages*
Tunjangan karyawan	976,738	952,961	*Employee allowances*
Pendidikan dan pelatihan	123,890	114,720	*Education and training*
Lainnya	158,364	180,030	*Others*
	5,035,215	4,948,942	

38. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *38. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Beban umum dan administrasi terdiri dari: / *General and administrative expenses consist of:*

	2023	2022	
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna dan amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 14)	837,672	701,792	*Depreciation of fixed assets and right-of-use assets and amortisation of intangible assets (Note 14)*
Beban *outsourcing*	730,416	804,945	*Outsourcing expenses*
Beban promosi	679,093	502,527	*Promotion expenses*
Beban penjaminan	530,276	502,466	*Underwriting expenses*
Beban sewa	310,255	308,771	*Rent expenses*
Beban komunikasi	301,509	299,260	*Communication expenses*
Beban transportasi	220,052	217,140	*Transportation expenses*
Beban pemeliharaan dan perbaikan	173,267	196,224	*Service and maintenance expenses*
Beban pungutan OJK	162,414	137,997	*OJK fees*
Beban jasa tenaga ahli	161,460	176,592	*Professional fees*
Beban perlengkapan	143,505	203,514	*Supplies expenses*
Beban barang dan jasa lain	125,900	124,985	*Other goods & services expenses*
Beban listrik, air dan gas	123,948	115,063	*Electricity, water and gas expenses*
Beban alat tulis kantor	103,813	102,300	*Office stationery expenses*
Ujrah administrasi	93,531	84,038	*Administrative ujrah*
Beban asuransi	91,006	27,316	*Insurance expenses*
Beban lisensi *software*	88,045	88,593	*Software license expenses*
Beban barang cetak	31,512	64,485	*Printing expenses*
Lainnya	262,264	198,428	*Others*
	5,169,938	4,856,436	

39. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NONPRODUKTIF - BERSIH / *39. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS - NET*

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih terdiri dari: / *Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net, consist of:*

	2023	2022	
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)	4,628	(2,662)	*Current accounts and placements with other banks (Note 6)*
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)	121,872	(7,498)	*Investments in marketable securities (Note 7)*
Tagihan akseptasi (Catatan 8)	(374)	3,199	*Acceptances receivables (Note 8)*
Piutang (Catatan 9)	1,536,234	1,880,435	*Receivables (Note 9)*
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)	80,586	576,774	*Funds of qardh (Note 10)*
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)	11,962	9,043	*Mudharabah financing (Note 11)*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)	892,055	1,230,474	*Musyarakah financing (Note 12)*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 41)	3,246	11,283	*Estimated losses on commitments and contingencies (Note 41)*
Aset nonproduktif	(29,681)	47,222	*Non-earning assets*
Aset lainnya	1,951	527	*Other assets*
	2,622,479	3,748,797	

40. LABA PER SAHAM / *40. EARNINGS PER SHARE*

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

The computation of earnings per share, are as follows:

	2023	2022	
Laba tahun berjalan	5,703,743	4,260,182	*Income for the year*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (nilai penuh)	46,129,260,138	41,545,970,076	*Weighted average number of shares outstanding (full amount)*
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	123.65	102.54	*Basic earnings per share (full Rupiah)*

41. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *41. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

a. The Bank's receivables and payables from commitments and contingencies are as follows:

	2023	2022	
Liabilitas komitmen			***Commitments payables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,775,974	1,662,836	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	267,737	115,163	*Irrevocable L/C*
Kewajiban subrogasi	137,094	129,443	*Subrogation payables*
Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	114,862	-	*Sales of foreign currency futures unresolved*
	2,295,667	1,907,442	
Pihak berelasi			***Related parties***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	117,375	198,972	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	98,238	67,068	*Irrevocable L/C*
	215,613	266,040	
Liabilitas komitmen	2,511,280	2,173,482	***Commitments payables***
Tagihan kontinjensi			***Contingencies receivables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Pendapatan dari pembiayaan bermasalah	335,215	288,960	*Income from non-performing financing*
Bank garansi (*kafalah*) yang diterima	234,419	237,015	*Bank guarantees (kafalah) received*
Lainnya	30,923	26,567	*Others*
	600,557	552,542	
Liabilitas kontinjensi			***Contingencies payables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Garansi yang diterbitkan	2,099,170	2,008,915	*Bank guarantees issued*
Pihak berelasi			***Related parties***
Garansi yang diterbitkan	738,668	699,873	*Bank guarantees issued*
	2,837,838	2,708,788	
Liabilitas kontinjensi - neto	2,237,281	2,156,246	***Contingencies payables - net***

41. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

41. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. The transactions of commitments and contingencies in the normal course of the Bank's activities that have financing risks are as follows:

	2023	2022	
Garansi yang diterbitkan	2,837,838	2,708,788	*Bank guarantees issued*
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,893,349	1,861,808	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	365,975	182,231	*Irrevocable L/C*
	5,097,162	4,752,827	

c. Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

c. The collectibility of commitments and contingencies with financing risk on administrative accounts are as follows:

	2023	2022	
Lancar	5,041,570	4,724,770	*Current*
Dalam perhatian khusus	31,313	2,777	*Special mention*
Kurang lancar	15,425	14,326	*Substandard*
Diragukan	-	132	*Doubtful*
Macet	8,854	10,822	*Loss*
	5,097,162	4,752,827	

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontijensi adalah sebagai berikut:

d. The movements of allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	28,873	17,194	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	3,246	11,283	*Provision during the year (Note 39)*
Selisih kurs	(102)	396	*Exchange rate difference*
Saldo akhir tahun	32,017	28,873	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan atas nilai estimasi komitmen dan kontijensi yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Management believes that the allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies is adequate and in compliance with OJK regulations.

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA

42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

	2023	2022	
Imbalan pasca kerja jangka panjang	463,243	510,868	*Long-term post-employment benefits*
Cuti besar	204,021	178,150	*Grand leaves*
	667,264	689,018	

Bank mempunyai Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang meliputi seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") sebagai berikut:

Bank has a defined contribution plan ("PPIP") for all permanent employees which managed by the pension funds ("DPLK") as follows:

1. DPLK BRI yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/NB.1/2022 tanggal 21 Maret 2022.

1. DPLK BRI which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-19/NB.1/2022 dated 21 March 2022.

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Bank mempunyai Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang meliputi seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") sebagai berikut: (lanjutan)

2. DPLK AXA Mandiri yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-29/NB.01/2022 tanggal 18 April 2022.
3. DPLK BNI yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-31/NB.01/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Jumlah iuran yang dibayarkan Bank sebesar Rp181.524 dan Rp171.920 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Selain itu, Bank memiliki Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon ("PPUKP") untuk pegawai *ex-legacy* BRIS yang dikelola oleh DPLK BRI.

Perhitungan aktuaria per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh KKA Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing tertanggal 15 Desember 2023 dan 9 Januari 2023.

Perhitungan aktuaria tersebut menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

Bank has a defined contribution plan ("PPIP") for all permanent employees which managed by the pension funds ("DPLK") as follows: (continued)

2. DPLK AXA Mandiri which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-29/NB.01/2022 dated 18 April 2022.

3. DPLK BNI which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-31/NB.01/2022 dated 13 May 2022.

The total contributions paid by the Bank amounting to Rp181,524 and Rp171,920 for the year ended 31 December 2023 and 2022.

In addition, the Bank has a defined benefit plan ("PPUKP") for ex-legacy BRIS employees which managed by DPLK BRI.

The actuarial calculations as at 31 December 2023 and 2022 were prepared by KKA Steven & Mourits, an independent actuary, in its reports dated 15 December 2023 and 9 January 2023, respectively.

The above actuarial calculations were using the Projected Unit Credit Method with the following key assumptions:

	2023	2022	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto	6.70%	7.00%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	7.00%	6.50%	*Rate of salary increases*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	36 - 56 tahun/*years*	36 - 56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat kematian	Modifikasi Tabel Mortalitas/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia TMI-IV-2019	Modifikasi Tabel Mortalitas/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia TMI-IV-2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	*Disability rate*

Imbalan pasca kerja jangka panjang

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun disajikan sebagai berikut:

Long-term post-employment benefit

A reconciliation of the funding status of the pension plan are as follows:

	2023	2022	
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	585,282	626,386	*Present value of funded defined benefit obligations*
Nilai wajar aset dana pensiun	(122,039)	(115,518)	*Fair value of pension plan assets*
Nilai bersih kewajiban	463,243	510,868	*Net liability*

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

Imbalan pasca kerja jangka panjang (lanjutan) / ***Long-term post-employment benefit*** *(continued)*

Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of funded defined benefit obligations for the year are as follows:

	2023	2022	
Pada awal tahun	626,386	757,010	*At the beginning of the year*
Biaya jasa kini	86,195	83,994	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(140,986)	-	*Past service cost*
Biaya bunga	42,951	44,016	*Interest cost*
Kerugian/(keuntungan) pengukuran kembali aktuarial	33,913	(170,248)	*Actuarial loss/(gain) on remeasurement*
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(36,002)	*Adjustment due to change in benefit attribution method*
	648,459	678,770	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(63,177)	(52,384)	*Payment of post-employment benefit during the year*
	585,282	626,386	

Rekonsiliasi atas mutasi liabilitas bersih selama tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movements of the net liabilities for the year ended 31 December 2023 and 2022 is as follows:

	2023	2022	
Kewajiban bersih pada awal tahun	510,868	644,221	*Net liabilities at the beginning of the year*
Beban tahun berjalan	29,623	107,719	*Current year expenses*
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya akibat:			*Remeasurement recognised as other comprehensive income due to:*
Perubahan asumsi ekonomis	32,719	(117,307)	*Changes in economic assumptions*
Perubahan dari penyesuaian historis	2,462	(47,607)	*Changes from experience adjustment*
	35,181	(164,914)	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(63,177)	(52,384)	*Payment of post-employment benefit during the year*
Kelebihan pembayaran imbalan	(49,252)	(23,774)	*Excess benefit payment*
Kewajiban bersih pada akhir tahun	463,243	510,868	*Net liabilities at the end of the year*

Mutasi nilai wajar aset program untuk tahun yang berakhir adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets for the year ended are as follows:

	2023	2022	
Pada awal tahun	115,518	112,789	*At the beginning of the year*
Hasil dari aset program	(1,267)	(5,333)	*Return on plan assets*
Keuntungan aktuarial	7,788	8,062	*Actuarial gains*
	122,039	115,518	

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pasca kerja jangka panjang (lanjutan)

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

Long-term post-employment benefit *(continued)*

Pension expenses recognised in the statement of profit or loss, are as follows:

	2023	2022	
Biaya jasa kini	86,195	83,994	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(140,986)	-	*Past service cost*
Bunga bersih	35,162	35,953	*Net Interest*
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(36,002)	*Adjustment due to change in benefit attribution method*
Kelebihan pembayaran imbalan	49,252	23,774	*Excess benefits payment*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	29,623	107,719	*Expense recognised in profit or loss*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	29,623	107,719	*Expense recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	35,181	(164,914)	*Remeasurement effect recognised in other comprehensive income*
Biaya imbalan pasti	64,804	(57,195)	*Defined benefit cost*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset program diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang syariah masing-masing sebesar Rp122.039 dan Rp115.518.

As at 31 December 2023 and 2022, plan assets invested to sharia money market each amounting to Rp122,039 and Rp115,518.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk tiap-tiap pasar.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected return available on the assets in accordance with the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the reporting date. Expected return on equity and property investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

Bank terekspos beberapa risiko atas program imbalan kerja seperti risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi di bawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun.

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans such as the exposed risks in the defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in benefit paid to pension fund.

Untuk memastikan bahwa posisi investasi telah sesuai dengan kerangka *Asset Liability Matching* ("ALMA"), Bank melakukan pemantauan terhadap investasi atas program pensiun (baik iuran pasti maupun manfaat pasti) dan memastikan tingkat investasi dimaksud mencapai tingkat diskonto yang digunakan. Selain itu, dilakukan implementasi kebijakan penyesuaian gaji sesuai dengan asumsi yang telah digunakan dalam perhitungan aktuaria untuk mengurangi selisih hasil perhitungan atas proyeksi imbalan kerja pasca kerja dengan realisasinya.

To ensure that the position of investments is consistent with the Asset Liability Management ("ALMA") framework, the Bank performs monitoring over the investment for the pension program (for both defined benefit and contribution plans) and performs action to ensure the return of investments will meet the applicable discount rate. Apart from that, implementation of salary adjustment policy has been performed in accordance to the assumptions used by actuarial calculation to reduce the gap on the calculation of projected post-employment benefit with its realisation.

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 8,89 tahun (31 Desember 2022: 8,27 tahun).

The average duration of the defined benefit obligations as at 31 December 2023 is 8.89 years (31 December 2022: 8.27 years).

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

42. *EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES* *(continued)*

Cuti besar

Grand leaves

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for grand leaves as at 31 December 2023 and 2022, respectively, are as follows:

	2023	2022	
Liabilitas pada awal tahun	178,150	192,270	*Liabilities at beginning of the year*
Beban cuti besar pada tahun berjalan	102,955	52,701	*Grand leaves expense during the year*
Pembayaran cuti besar selama tahun berjalan	(77,084)	(66,821)	*Payment of grand leaves during the year*
	204,021	178,150	

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

Grand leaves expense for the year ended 31 December 2023 and 2022 based on actuarial calculation are as follows:

	2023	2022	
Biaya jasa kini	65,008	63,642	*Current service cost*
Biaya bunga	10,609	11,213	*Interest cost*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	27,338	(21,187)	*Actuarial loss/(gain)*
Biaya jasa lalu	-	(967)	*Past service costs*
Jumlah	102,955	52,701	*Total*

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligations to changes in the actuarial assumptions is as follows:

	Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ *Impact on employee benefit liabilities*		
31 Desember 2023	**Perubahan asumsi/ *Change in assumption***	**(Kenaikan)/penurunan manfaat pasti/ *(Increase)/decrease benefit obligation***	***31 December 2023***
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(41,838)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	46,501	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	123,028	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(96,626)	

	Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ *Impact on employee benefit liabilities*		
31 Desember 2022	**Perubahan asumsi/ *Change in assumption***	**(Kenaikan)/penurunan manfaat pasti/ *(Increase)/decrease benefit obligation***	***31 December 2022***
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(39,262)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	43,378	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	107,817	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(85,544)	

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

***42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES** (continued)*

Expected maturity analysis of undiscounted pension is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2023					***31 December 2023***
Pensiun	67,173	313,056	1,720,505	2,100,734	*Pension*
Cuti besar	88,663	365,172	1,312,773	1,766,608	*Grand leaves*
Jumlah	155,836	678,228	3,033,278	3,867,342	*Total*
31 Desember 2022					***31 December 2022***
Pensiun	63,350	403,838	1,483,153	1,950,341	*Pension*
Cuti besar	73,138	331,853	1,269,728	1,674,719	*Grand leaves*
Jumlah	136,488	735,691	2,752,881	3,625,060	*Total*

Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Bank mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis UU Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021. Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material terhadap Bank, sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan pada tahun berjalan.

Regarding the DSAK IAI press release "Compensation Attribution in the Service Period" in April 2022, the Bank changed the policy related to the attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provisions in SFAS 24 for the general fact pattern of pension programs based on the UU Cipta Kerja No. 11/2020 and PP 35/2021. The impact of the change in calculation is immaterial to the Bank, therefore it is recorded entirety in the financial statements for the current year.

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan peraturan LPS No. 2 tanggal 22 September 2014 tentang perubahan peraturan lembaga penjamin simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang program penjaminan simpanan dimana simpanan yang dijamin meliputi giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan simpanan dari bank lain.

43. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004 effective on 22 September 2005, as amended by The Government Regulation of the Republic of Indonesia for Substitute of Law No. 3 dated 13 October 2008, the Government established the Deposit Insurance Institution ("LPS") to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the prevailing guarantee programs, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on LPS Regulation No. 2 dated 22 September 2014 regarding amendment of LPS Regulation No. 2/PLPS/2010 regarding the Deposit Guarantee Program, the deposits guaranteed included wadiah demand deposits, mudharabah demand deposits, wadiah savings deposits, mudharabah savings deposits, mudharabah time deposits and deposits from other banks.

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", maka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (nilai penuh) untuk per nasabah per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban penjaminan dana pihak ketiga yang dijaminkan kepada LPS adalah Rp530.162 dan Rp502.448 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

43. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS *(continued)*

Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008, regarding "the Amount of Public Deposits Guaranteed by the Government Established Deposit Insurance Institution", as at 31 December 2023 and 2022 the amount of deposits that are guaranteed by LPS amounted to Rp2,000,000,000 (full amount) for each customer of each bank.

As at 31 December 2023 and 2022, the Bank is a participant of the government guarantee program.

Insurance premium related to third party funds paid to LPS amounted to Rp530,162 and Rp502,448 for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively.

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

a. Jenis hubungan

Pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen:

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham pengendali
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BNI Life Insurance
PT Mandiri Sekuritas
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

a. Type of relationships

Related parties from the entity level and/or management are:

Related party relationship as the ultimate shareholder
The Government of Republic of Indonesia through the Ministry of Finance

Related party relationship as the controlling shareholder
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Related party relationship as the shareholder
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BNI Life Insurance
PT Mandiri Sekuritas
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Entitas dan lembaga pemerintah	***Government entities and institutions***
BPJS Kesehatan	*BPJS Kesehatan*
BPJS Ketenagakerjaan	*BPJS Ketenagakerjaan*
DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	*DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
Perum BULOG	*Perum BULOG*
Perum DAMRI	*Perum DAMRI*
Perum Jasa Tirta II	*Perum Jasa Tirta II*
Perum LPPNPI	*Perum LPPNPI*
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	*Perum Percetakan Negara Republik Indonesia*
Perum Perhutani	*Perum Perhutani*
Perum Perumnas	*Perum Perumnas*
Perum Peruri	*Perum Peruri*
Perum Produksi Film Negara	*Perum Produksi Film Negara*
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	*Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia*
PT Adhi Commuter Properti Tbk	*PT Adhi Commuter Properti Tbk*
PT Adhi Jalintim Riau	*PT Adhi Jalintim Riau*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Adhi Persada Beton	*PT Adhi Persada Beton*
PT Adhi Persada Gedung	*PT Adhi Persada Gedung*
PT Adhi Persada Properti	*PT Adhi Persada Properti*
PT Aero Globe Indonesia	*PT Aero Globe Indonesia*
PT Aerofood Indonesia	*PT Aerofood Indonesia*
PT Agro Medika Nusantara	*PT Agro Medika Nusantara*
PT Agro Sinergi Nusantara	*PT Agro Sinergi Nusantara*
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	*PT Alur Pelayaran Barat Surabaya*
PT Amarta Karya (Persero)	*PT Amarta Karya (Persero)*
PT Aneka Tambang Tbk	*PT Aneka Tambang Tbk*
PT Angkasa Pura Hotel	*PT Angkasa Pura Hotel*
PT Angkasa Pura I (Persero)	*PT Angkasa Pura I (Persero)*
PT Angkasa Pura II (Persero)	*PT Angkasa Pura II (Persero)*
PT Angkasa Pura Kargo	*PT Angkasa Pura Kargo*
PT Angkasa Pura Logistik	*PT Angkasa Pura Logistik*
PT Angkasa Pura Solusi	*PT Angkasa Pura Solusi*
PT Angkasa Pura Solusi Integra	*PT Angkasa Pura Solusi Integra*
PT Angkasa Pura Supports	*PT Angkasa Pura Supports*
PT Antam Resourcindo	*PT Antam Resourcindo*
PT ASABRI (Persero)	*PT ASABRI (Persero)*
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	*PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)*
PT Asuransi Asei Indonesia	*PT Asuransi Asei Indonesia*
PT Asuransi BRI Life	*PT Asuransi BRI Life*
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	*PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur*
PT Asuransi Jasa Indonesia	*PT Asuransi Jasa Indonesia*
PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah	*PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah*
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	*PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)*
PT Asuransi Jiwa IFG	*PT Asuransi Jiwa IFG*
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	*PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia*
PT Asuransi Jiwa Taspen	*PT Asuransi Jiwa Taspen*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	*PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT AXA Mandiri Financial Services	*PT AXA Mandiri Financial Services*
PT Bahana Artha Ventura	*PT Bahana Artha Ventura*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia*
PT Bahana TCW Investment Management	*PT Bahana TCW Investment Management*
PT Bakti Timah Medika	*PT Bakti Timah Medika*
PT Bank Mandiri Taspen	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Barata Indonesia (Persero)	*PT Barata Indonesia (Persero)*
PT Baturaja Multi Usaha	*PT Baturaja Multi Usaha*
PT Berdikari	*PT Berdikari*
PT Berdikari Logistik Indonesia	*PT Berdikari Logistik Indonesia*
PT Berkah Industri Mesin Angkat	*PT Berkah Industri Mesin Angkat*
PT Berkah Muti Cargo	*PT Berkah Muti Cargo*
PT Berlian Manyar Sejahtera	*PT Berlian Manyar Sejahtera*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	*PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)
PT Bina Karya (Persero)
PT Bintang Tirta Pratama
PT Bio Farma (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI Asset Management
PT BNI Sekuritas
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT BRI Asuransi Indonesia
PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Bukit Asam Medika
PT Bukit Asam Tbk
PT Bukit Prima Bahari
PT Bumi Sawindo Permai
PT Celebes Railway Indonesia
PT Cimanggis Cibitung Tollways
PT Citilink Indonesia
PT Citra Lautan Teduh
PT Cut Meutia Medika Nusantara
PT Danareksa (Persero)
PT Danareksa Investment Management
PT Dayamitra Telekomunikasi
PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Elnusa Petrofin
PT Elnusa Tbk
PT Emas Antam Indonesia
PT Energi Agro Nusantara
PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Equiport Inti Indonesia
PT Finnet Indonesia
PT Fintek Karya Nusantara
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia
PT Graha Investama Bersama
PT Graha Niaga Tata Utama
PT Graha Sarana Duta
PT Griyaton Indonesia
PT Hakaaston
PT HK Realtindo
PT Hutama Karya (Persero)
PT Indofarma Global Medika
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Indonesia Comnets Plus
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
PT Indonesia Power
PT Indopelita Aircraft Services
PT Indra Karya (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Inhutani IV
PT Inka Multi Solusi
PT Inka Multi Solusi Service
PT Inka Multi Solusi Trading
PT Inti Konten Indonesia
PT Istaka Karya (Persero)
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
PT Jalin Pembayaran Nusantara
PT Jalintim Adhi Abipraya
PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
PT Jamsostek (Persero)
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Jasa Prima Logistik Bulog

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*
PT Bina Karya (Persero)
PT Bintang Tirta Pratama
PT Bio Farma (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI Asset Management
PT BNI Sekuritas
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT BRI Asuransi Indonesia
PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Bukit Asam Medika
PT Bukit Asam Tbk
PT Bukit Prima Bahari
PT Bumi Sawindo Permai
PT Celebes Railway Indonesia
PT Cimanggis Cibitung Tollways
PT Citilink Indonesia
PT Citra Lautan Teduh
PT Cut Meutia Medika Nusantara
PT Danareksa (Persero)
PT Danareksa Investment Management
PT Dayamitra Telekomunikasi
PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
P*T Elnusa Petrofin*
PT Elnusa Tbk
PT Emas Antam Indonesia
PT Energi Agro Nusantara
PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Equiport Inti Indonesia
PT Finnet Indonesia
PT Fintek Karya Nusantara
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia
PT Graha Investama Bersama
PT Graha Niaga Tata Utama
PT Graha Sarana Duta
PT Griyaton Indonesia
PT Hakaaston
PT HK Realtindo
PT Hutama Karya (Persero)
PT Indofarma Global Medika
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Indonesia Comnets Plus
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
PT Indonesia Power
PT Indopelita Aircraft Services
PT Indra Karya (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Inhutani IV
PT Inka Multi Solusi
PT Inka Multi Solusi Service
PT Inka Multi Solusi Trading
PT Inti Konten Indonesia
PT Istaka Karya (Persero)
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
PT Jalin Pembayaran Nusantara
PT Jalintim Adhi Abipraya
PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
PT Jamsostek (Persero)
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Jasa Prima Logistik Bulog

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Jasa Raharja
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasamarga Tollroad Operator
PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Jasaraharja Putera
PT Jembatan Nusantara
PT Jasa Tirta Energi
PT KA Pariwisata
PT KA Properti Manajemen
PT Kalimantan Jawa Gas
PT Kaltim Daya Mandiri
PT Kaltim Industrial Estate
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Gresik
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT KBN Graha Medika
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kereta Commuter Indonesia
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kimia Farma Tbk
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Diagnostik
PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
PT Kodja Terramarin
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Jasa Logistik
PT Krakatau Medika
PT Krakatau National Resources
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan
PT Krakatau Pipe Industries
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Sarana Properti
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Wajatama
PT Laras Astra Kartika
PT Mandiri AXA General Insurance
PT Mandiri Capital Indonesia
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Utama Finance
PT Mega Eltra
PT Mitra Rakata
PT Mitra Transaksi Indonesia
PT Mitra Utama Madani
PT Multi Sentana Baja
PT Multi Terminal Indonesia
PT Nindya Karya (Persero)
PT Nusa Karya Arindo
PT Nusantara Medika Utama
PT Nusantara Regas
PT Nusantara Sebelas Medika
PT Nusantara Terminal Service

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT Jasa Raharja
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasamarga Tollroad Operator
PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Jasaraharja Putera
PT Jembatan Nusantara
PT Jasa Tirta Energi
PT KA Pariwisata
PT KA Properti Manajemen
PT Kalimantan Jawa Gas
PT Kaltim Daya Mandiri
PT Kaltim Industrial Estate
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Gresik
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT KBN Graha Medika
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kereta Commuter Indonesia
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kimia FarmaTbk
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Diagnostik
PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
PT Kodja Terramarin
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Jasa Logistik
PT Krakatau Medika
PT Krakatau National Resources
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan
PT Krakatau Pipe Industries
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Sarana Properti
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Wajatama
PT Laras Astra Kartika
PT Mandiri AXA General Insurance
PT Mandiri Capital Indonesia
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Utama Finance
PT Mega Eltra
PT Mitra Rakata
PT Mitra Transaksi Indonesia
PT Mitra Utama Madani
PT Multi Sentana Baja
PT Multi Terminal Indonesia
PT Nindya Karya (Persero)
PT Nusa Karya Arindo
PT Nusantara Medika Utama
PT Nusantara Regas
PT Nusantara Sebelas Medika
PT Nusantara Terminal Service

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Jenis hubungan (lanjutan)

a. Type of relationships *(continued)*

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
PT PAL Indonesia (Persero)
PT PAL Marine Service
PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)
PT Patra Badak Arun Solusi
PT Patra Drilling Contractor
PT Patra Logistik
PT Patra Nusa Data
PT Patra Trading
PT Pegadaian
PT Pegadaian Galeri Dua Empat
PT Pelabuhan Bukit Prima
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Marine Service
PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Properti Indonesia
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelita Air Service
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Pembangunan PP Tirta Riau
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengerukan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara V
PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Permata Graha Nusantara
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertagas Niaga
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Marine Solution
PT Pertamina Patra Niaga

Government entities and institutions *(continued)*

PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
PT PAL Indonesia (Persero)
PT PAL Marine Service
PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)
PT Patra Badak Arun Solusi
PT Patra Drilling Contractor
PT Patra Logistik
PT Patra Nusa Data
PT Patra Trading
PT Pegadaian
PT Pegadaian Galeri Dua Empat
PT Pelabuhan Bukit Prima
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Marine Service
PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Properti Indonesia
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelita Air Service
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Pembangunan PP Tirta Riau
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengerukan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara V
PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Permata Graha Nusantara
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertagas Niaga
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Marine Solution
PT Pertamina Patra Niaga

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)
PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Pesonna Indonesia Jaya
PT Pesonna Optima Jasa
PT Peteka Karya Tirta
PT Petrosida Gresik
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
PT Phapros Tbk
PT PIM Prima Medika
PT Pindad (Persero)
PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT Pindad International Logistic
PT Pindad Medika Utama
PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Presisi Tbk
PT PP Properti Tbk
PT PP Semarang Demak
PT PP Urban
PT Pratama Mitra Sejati
PT Prima Armada Raya
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Medica Nusantara
PT Prima Multi Terminal
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Rancang Semesta
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekaindo Global Jasa
PT Reska Multi Usaha
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rolas Nusantara Medika
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Saka Energi Indonesia
PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Sarana Bandar Nasional
PT Sarana Kaltim Ventura
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*
PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Pesonna Indonesia Jaya
PT Pesonna Optima Jasa
PT Peteka Karya Tirta
PT Petrosida Gresik
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
PT Phapros Tbk
PT PIM Prima Medika
PT Pindad (Persero)
PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT Pindad International Logistic
PT Pindad Medika Utama
PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Presisi Tbk
PT PP Properti Tbk
PT PP Semarang Demak
PT PP Urban
PT Pratama Mitra Sejati
PT Prima Armada Raya
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Medica Nusantara
PT Prima Multi Terminal
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Rancang Semesta
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekaindo Global Jasa
PT Reska Multi Usaha
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rolas Nusantara Medika
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Saka Energi Indonesia
PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Sarana Bandar Nasional
PT Sarana Kaltim Ventura
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Jenis hubungan (lanjutan)

a. Type of relationships *(continued)*

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)	***Government entities and institutions*** *(continued)*
PT Semen Indonesia Beton	*PT Semen Indonesia Beton*
PT Semen Padang (Persero)	*PT Semen Padang (Persero)*
PT Sigma Cipta Caraka	*PT Sigma Cipta Caraka*
PT Sigma Cipta Utama	*PT Sigma Cipta Utama*
PT Sinergi Gula Nusantara	*PT Sinergi Gula Nusantara*
PT Sinergi Mitra Investama	*PT Sinergi Mitra Investama*
PT Sinkona Indonesia Lestari	*PT Sinkona Indonesia Lestari*
PT Solusi Bangun Beton	*PT Solusi Bangun Beton*
PT Sri Pamela Medika Nusantara	*PT Sri Pamela Medika Nusantara*
PT Sucofindo	*PT Sucofindo*
PT Sucofindo Episi	*PT Sucofindo Episi*
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	*PT Surabaya Industrial Estate Rungkut*
PT Surveyor Indonesia (Persero)	*PT Surveyor Indonesia (Persero)*
PT Swadharma Sarana Informatika	*PT Swadharma Sarana Informatika*
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (Persero)	*PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (Persero)*
PT Taspen (Persero)	*PT Taspen (Persero)*
PT Taspen Abadi Sentosa	*PT Taspen Abadi Sentosa*
PT Telekomunikasi Selular	*PT Telekomunikasi Selular*
PT Telemedia Dinamika Sarana	*PT Telemedia Dinamika Sarana*
PT Telkom Akses	*PT Telkom Akses*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Telkom Satelit Indonesia	*PT Telkom Satelit Indonesia*
PT Telkomsel Ekosistem Digital	*PT Telkomsel Ekosistem Digital*
PT Telkomsel Mitra Inovasi	*PT Telkomsel Mitra Inovasi*
PT Terminal Petikemas Indonesia	*PT Terminal Petikemas Indonesia*
PT Terminal Petikemas Surabaya	*PT Terminal Petikemas Surabaya*
PT Terminal Teluk Lamong	*PT Terminal Teluk Lamong*
PT Timah Tbk	*PT Timah Tbk*
PT Tirta Tangsel Mandiri	*PT Tirta Tangsel Mandiri*
PT Tugu Pratama Interindo	*PT Tugu Pratama Interindo*
PT United Tractors Semen Gresik	*PT United Tractors Semen Gresik*
PT Varia Usaha Bahari	*PT Varia Usaha Bahari*
PT Varia Usaha Beton	*PT Varia Usaha Beton*
PT Varia Usaha Dharma Segara	*PT Varia Usaha Dharma Segara*
PT Varia Usaha Lintas Segara	*PT Varia Usaha Lintas Segara*
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	*PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)*
PT Waskita Beton Precast Tbk	*PT Waskita Beton Precast Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya Infrastruktur	*PT Waskita Karya Infrastruktur*
PT Widya Tirta Selaras	*PT Widya Tirta Selaras*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	*PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
PT Wijaya Karya Beton Tbk	*PT Wijaya Karya Beton Tbk*
PT Wijaya Karya Bitumen	*PT Wijaya Karya Bitumen*
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	*PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi*
PT Wijaya Karya Komponen Beton	*PT Wijaya Karya Komponen Beton*
PT Wijaya Karya Realty	*PT Wijaya Karya Realty*
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	*PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi*
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	*PT Wijaya Karya Serang Panimbang*

Pengendalian kegiatan Perusahaan	***Control on Company's activities***
Karyawan kunci	*Key employees*

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

b. Transactions with related parties

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows:

	2023	2022	
Aset			*Assets*
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)			*Current accounts and placements with other banks (Note 6)*
Pemegang saham pengendali	71,545	81,770	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	33,695	68,745	*Shareholders*
	105,240	150,515	
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)			*Investments in marketable securities (Note 7)*
Pemegang saham utama	44,361,541	48,185,551	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham pengendali	97,775	41,377	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	50,017	22,259	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,054,180	259,000	*Government entities and institutions*
	45,563,513	48,508,187	
Tagihan akseptasi (Catatan 8)			*Acceptance receivables (Note 8)*
Pemegang saham pengendali	30,910	51,741	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	30,700	12,946	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	125,544	41,925	*Government entities and institutions*
	187,154	106,612	
Piutang *murabahah* (Catatan 9)			*Murabahah receivables (Note 9)*
Entitas dan lembaga pemerintah	91,991	207,153	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	19,721	18,020	*Key employees*
	111,712	225,173	
Piutang *ijarah* (Catatan 9)			*Ijarah receivables (Note 9)*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,159	-	*Government entities and institutions*
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)			*Funds of qardh (Note 10)*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,837,225	1,699,879	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	1,771	1,298	*Key employees*
	1,838,996	1,701,177	
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)			*Mudharabah financing (Note 11)*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,000,000	225,222	*Government entities and institutions*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)			*Musyarakah financing (Note 12)*
Entitas dan lembaga pemerintah	24,702,709	21,854,092	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	60,761	28,826	*Key employees*
	24,763,470	21,882,918	
Jumlah aset dari pihak berelasi	73,571,244	72,799,804	***Total assets from related parties***
Jumlah aset	353,624,124	305,727,438	*Total assets*
Persentase jumlah aset dari pihak berelasi terhadap jumlah aset	20.80%	23.81%	***Percentage of total assets from related parties to total assets***

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaction with related parties *(continued)*

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows: (continued)

	2023	2022	
Liabilitas			*Liabilities*
Liabilitas segera (Catatan 16)			*Obligations due immediately (Note 16)*
Pemegang saham pengendali	171,220	124,327	*Controlling shareholders*
Simpanan *wadiah*			*Wadiah deposits*
Giro *wadiah* (Catatan 18)			*Wadiah demand deposits (Note 18)*
Pemegang saham utama	1,028,825	775,353	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham	317	164	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,794,526	1,634,538	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	191	101	*Key employees*
	2,823,859	2,410,156	
Tabungan *wadiah* (Catatan 19)			*Wadiah savings deposits (Note 19)*
Entitas dan lembaga pemerintah	360	1,572	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	9,803	11,175	*Key employees*
	10,163	12,747	
Jumlah simpanan *wadiah*	2,834,022	2,422,903	*Total wadiah deposits*
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)			*Deposits from other banks (Note 20)*
Giro *wadiah*			*Wadiah demand deposits*
Pemegang saham pengendali	-	22	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	73	7	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,280	2,270	*Government entities and institutions*
	1,353	2,299	
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")			*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Pemegang saham pengendali	50,000	200,000	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	176,985	400,000	*Shareholders*
	226,985	600,000	
Jumlah simpanan bank lain	228,338	602,299	*Total deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi			*Acceptance liabilities*
Pemegang saham pengendali	69,371	5,959	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	27,251	23,012	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	47,283	51,371	*Government entities and institutions*
	143,905	80,342	
Liabilitas imbalan kerja			*Employee benefit liabilities*
Karyawan kunci	38,846	20,596	*Key employees*
Jumlah liabilitas dari pihak berelasi	3,416,331	3,250,467	***Total liabilities from related parties***
Jumlah liabilitas	87,222,911	73,655,791	*Total liabilities*
Persentase jumlah liabilitas dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	3.92%	4.41%	***Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities***

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaction with related parties *(continued)*

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows: (continued)

	2023	2022	
Dana *syirkah* temporer			*Temporary syirkah funds*
Giro *mudharabah* (Catatan 24)			*Mudharabah demand deposits (Note 24)*
Pemegang saham utama	4,130,335	4,834,703	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham	19,594	43,064	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	13,431,882	8,864,502	*Government entities and institutions*
	17,581,811	13,742,269	
Tabungan *mudharabah* (Catatan 25)			*Mudharabah savings deposits (Note 25)*
Pemegang saham	3	75	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	161,403	57,174	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	30,261	28,825	*Key employees*
	191,667	86,074	
Deposito *mudharabah* (Catatan 26)			*Mudharabah time deposits (Note 26)*
Pemegang saham	36,450	123,150	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	28,280,905	17,960,128	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	38,697	53,232	*Key employees*
	28,356,052	18,136,510	
Sukuk *mudharabah* subordinasi (Catatan 27)			*Subordinated sukuk mudharabah (Note 27)*
Pemegang saham	-	56,000	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	25,000	544,000	*Government entities and institutions*
	25,000	600,000	
Jumlah dana *syirkah* temporer dari pihak berelasi	46,154,530	32,564,853	***Total temporary syirkah funds from related parties***
Jumlah dana *syirkah* temporer	227,662,092	198,566,037	*Total temporary syirkah funds*
Persentase jumlah dana *syirkah* temporer dari pihak berelasi terhadap jumlah dana *syirkah* temporer	20.27%	16.40%	***Percentage of total temporary syirkah funds from related parties to total temporary syirkah funds***

Gaji dan tunjangan, bonus dan tantiem, imbalan jangka panjang untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp152.251 dan Rp116.106 atau 1,49% dan 1,17% dari jumlah beban operasional.

Salaries and allowances, bonuses and tantiem, long-term benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors for the years ended 31 December 2023 and 2022 are Rp152,251 and Rp116,106 or 1.49% and 1.17% of total operating expenses.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal Bank juga menyebabkan risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, agar dapat beradaptasi dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang andal dan sistematis. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang semakin maju.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pengelolaan risiko kredit yang dilakukan Bank antara lain dengan meningkatkan keseimbangan antara ekspansi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan pembiayaan dengan memperhatikan prinsip prudensialitas agar terhindar dari penurunan kualitas pembiayaan. Selain itu, Bank juga berupaya untuk mengurangi eksposur risiko kredit, di antaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko kredit dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko kredit memungkinkan Bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas kredit.

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui:

a. Pembiayaan *Wholesale*
   1. Perencanaan Pembiayaan
      a) *Setting risk* koridor
      b) Fokus sektor industri
      c) *Targeted customer* dan *client tiering*
      d) Manajemen limit dan manajemen *pipeline*
      e) *Portfolio guideline*
   2. Proses Akuisisi
      a) Proses analisa nasabah yang komprehensif
      b) *Assessment* risiko nasabah pembiayaan *wholesale* melalui *rating*
      c) Proses keputusan dengan *four eyes principle*
      d) Pemahaman dan penguasaan proses bisnis
      e) *Risk mitigation* melalui *term & condition* dan *covenant*
   3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif
      a) *Monitoring portfolio mix*
      b) *Account mapping* dan klasifikasi risiko
      c) Reviu tahunan

45. RISK MANAGEMENT

In running its business, the Bank is always faced with various risks. Rapid developments in the Bank's external and internal environment have also caused the risks faced by the Bank to become increasingly complex. Therefore, in order to be able to adapt and be able to compete in the business environment, the Bank is required to be able to implement reliable and systematic risk management. The applied risk management principles must be able to support the Bank in being more prudent in line with the increasingly advanced developments in business activities and banking operations.

a. Credit risk

Credit risk is the risk due to the failure of customers or other parties to fulfill their obligations to the Bank in accordance with the agreed contract.

The credit risk management carried out by the Bank are by improving the balance between healthy financing expansion and financing management by taking into account the principle of prudentiality to avoid a decrease in the quality of financing. In addition, the Bank also seeks to reduce credit risk exposure through various credit risk mitigation by using a number of techniques, such as collateral and third party guarantees to reduce the impact of risk. Credit risk mitigation techniques allow the Bank to be protected from deteriorating financing quality.

The Bank manages credit risk by:

a. Wholesale Financing
   1. Financing Planning
      a) Setting risk corridor
      b) Industry sector focus
      c) Targeted customer and client tiering
      d) Limit and Pipeline Management
      e) Portfolio guideline
   2. Acquisition Process
      a) Comprehensive customer's due diligence
      b) Risk assessment for wholesale financing customers through ratings
      c) The four eyes principle implementation
      d) Understanding and mastery of business process
      e) Risk mitigation by term & condition and covenant
   3. Maintenance & Intensive Monitoring
      a) Portfolio mix monitoring
      b) Mapping account and risk classification
      c) Annual review

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui: (lanjutan)

a. Pembiayaan *Wholesale* (lanjutan)
   3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif (lanjutan)
      d) *Watchlist alert*
      e) Evaluasi *Financing Risk Rating*
      f) Evaluasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ("CKPN")
      g) Pemantauan pemenuhan *covenant*
      h) Pemantauan *second way out*
   4. *Optimal Collection & Recovery*
      a) Restrukturisasi
      b) Pemetaan nasabah sesuai kuadran dan penetapan strategi serta *action plan*
      c) Penyiapan infrastruktur & sistem *Collection & Recovery*
      d) Pemantauan *NPF* dan *Write Off*
      e) Program *Booster Collection & Recovery*

b. Pembiayaan Ritel
   1. Perencanaan Pembiayaan
      a) Fokus sektor, khusus untuk SME
      b) Fokus segmen & *targeted customer*
      c) Penetapan RAC & fitur produk
      d) Program produk
      e) *Portfolio Guideline*
   2. Proses Akuisisi
      a) Memastikan akuisisi nasabah sesuai target pasar, fitur produk dan RAC
      b) *Assessment* risiko nasabah pembiayaan ritel melalui *scoring*
      c) Implementasi *four eyes principle*
      d) Proses verifikasi*:* pendapatan*,* dokumen dan nasabah
      e) Implementasi *scoring model*
   3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif
      a) Pemantauan portofolio dan kualitas
      b) Reviu *Watchlist* dan reviu tahunan (batas SME > Rp5.000)
      c) Pemeliharaan *Scoring System*
      d) Pemantauan *post transaction*: *covenant, second way out, committed to payroll*, Perjanjian Kerjasama *Non-payroll*, hasil *welcoming call*
   4. *Optimal Collection & Recovery*
      a) Restrukturisasi
      b) *Mobile Collection*
      c) Peningkatan sistem *collection*
      d) Pemantauan NPF dan WO
      e) Program *Booster Collection & Recovery*
      f) Pemantauan Sistem Klaim & Subrogasi

45. RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Credit risk *(continued)*

The Bank manages credit risk by: (continued)

a. Wholesale Financing (continued)
   3. Maintenance & Intensive Monitoring (continued)
      d) Watchlist alert
      e) Financing Risk Rating Evaluation
      f) Allowance for Impairment Losses Evaluation ("CKPN")
      g) Covenant fulfillment monitoring
      h) Second way out monitoring
   4. Optimal Collection & Recovery
      a) Restructuring
      b) Customer mapping based on quadrants and setting strategy as well as action plan
      c) Preparation of Collection & Recovery infrastructure & systems
      d) NPF and Write Off monitoring
      e) Booster Collection & Recovery Program

b. Retail Financing
   1. Financing Planning
      a) Sector focus, especially for SME
      b) Segment focus & targeted customer
      c) RAC & product features setting
      d) Product program
      e) Portfolio Guideline
   2. Acquisition Process
      a) Ensuring customer acquisition based on target market, product features and RAC
      b) Risk assessment for retail financing customers through scoring
      c) The four eyes principle implementation
      d) Verification process: income, document and customer
      e) Scoring model implementation
   3. Maintenance & Intensive Monitoring
      a) Portfolio and quality monitoring
      b) Watchlist review and annual review (SME limit > Rp5,000)
      c) Scoring System Maintenance
      d) Post transaction monitoring: covenant, second way out, committed to payroll, Non-Payroll Cooperation Agreement, welcoming call result
   4. Optimal Collection & Recovery
      a) Restructuring
      b) Mobile Collection
      c) Enhancement collection system
      d) NPF and WO monitoring
      e) Booster Collection & Recovery program
      f) Claim & Subrogation Monitoring System

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

a. Risiko kredit (lanjutan)

***a. Credit risk** (continued)*

(i) Kualitas aset keuangan

(i) Financial assets quality

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

The following tables show the quality of financial assets by asset class for all financial assets exposed by credit risk (excluding allowance for impairment losses):

	31 Desember/*December* 2023					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32,440,778	-	-	-	32,440,778	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,324,473	-	-	-	2,324,473	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	71,301,526	-	-	-	71,301,526	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	431,228	-	-	-	431,228	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	127,357,014	4,037,793	2,168,075	2,940,214	136,503,096	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	29	-	-	1	30	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	199,239	3,350	2,820	12,991	218,400	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	10,493,267	478,080	42,477	293,257	11,307,081	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1,806,298	10,490	33,101	31,244	1,881,133	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	76,378,227	7,476,673	2,673,552	1,687,745	88,216,197	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	1,062,912	18,501	10,550	-	1,091,963	*Other assets*)
	323,794,991	12,024,887	4,930,575	4,965,452	345,715,905	

	31 Desember/*December* 2022					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,778,458	-	-	-	31,778,458	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,491,492	-	-	-	2,491,492	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	57,851,905	-	-	-	57,851,905	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	481,403	-	-	-	481,403	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	112,067,103	7,862,535	2,122,392	2,821,326	124,873,356	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	129	-	3	-	132	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	643	12,635	13,278	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	8,673,530	657,100	61,296	309,683	9,701,609	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	990,919	20,801	10,208	19,469	1,041,397	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	58,800,779	8,988,006	996,149	1,805,577	70,590,511	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	1,039,679	11,551	7,494	-	1,058,724	*Other assets*)
	274,175,397	17,539,993	3,198,185	4,968,690	299,882,265	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas aset keuangan didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

(a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, institusi Pemerintah Daerah, bank yang terdaftar di bursa serta transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) atau BBB+ (Fitch).
(c) Pembiayaan, piutang, dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu pembiayaan dan debitur dengan riwayat tidak pernah direstrukturisasi.
(d) Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.

Tingkat standar

(a) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar di bursa.
(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang termasuk dalam *non-investment grade* dengan rating minimal idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch).
(c) Pembiayaan, piutang, dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan debitur dengan riwayat pernah direstrukturisasi.

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(i) Financial assets quality** (continued)*

Financial assets quality are defined as follows:

High grade

(a) Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the Government institutions, Local Government institutions, banks listed on the stock exchange and transactions with reputable banks with low probability of default on liabilities.
(b) Investments in marketable securities are securities issued by Government, securities and bonds that are included in investment grade with rating at least idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) or BBB+ (Fitch).
(c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to debtors with excellent payments history and never being in arrears throughout the financing period and debtors whose accounts has never been restructured.
(d) Other assets are receivables from Government (including Bank Indonesia) or local government such as income receivables.

Standard grade

(a) Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with non-listed banks.
(b) Investments in marketable securities are non-investment grade securities with a minimum rating of idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) or BBB- (Fitch).
(c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to debtors with a good payment history and debtors whose accounts have been restructured.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas aset keuangan didefinisikan sebagai berikut: (lanjutan)

Tingkat standar (lanjutan)

(d) Aset lain-lain yaitu aset keuangan lainnya selain piutang pendapatan yang masih akan diterima kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti tagihan rupa-rupa kepada pihak ketiga lainnya.

Berdasarkan PSAK 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel di bawah menunjukkan *aging analysis* terhadap aset keuangan yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(i) Financial assets quality** (continued)*

Financial assets quality are defined as follows: (continued)

Standard grade (continued)

(d) Other assets are financial assets other than income receivables from Government or Local Government such as other receivables to third parties.

According to SFAS 60, past due financial assets are determined when the debtor fails to make payments on schedule. The table below shows aging analysis of past due but not impaired of financial assets:

	31 Desember/*December* 2023				
	≤ 30 hari/ *days*	31 - 60 hari/ *days*	61 - 90 hari/ *days*	Jumlah/ *Total*	
Piutang *murabahah*	1,001,039	583,144	583,892	2,168,075	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	903	600	1,317	2,820	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	29,839	10,807	1,831	42,477	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1,099	638	31,364	33,101	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	2,582,953	51,627	38,972	2,673,552	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	5,661	2,050	2,839	10,550	*Other assets*)
	3,621,494	648,866	660,215	4,930,575	

	31 Desember/*December* 2022				
	≤ 30 hari/ *days*	31 - 60 hari/ *days*	61 - 90 hari/ *days*	Jumlah/ *Total*	
Piutang *murabahah*	1,238,672	499,989	383,731	2,122,392	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	3	-	3	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	155	180	308	643	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	52,786	6,877	1,633	61,296	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	10,208	-	-	10,208	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	477,172	36,502	482,475	996,149	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	5,104	1,314	1,076	7,494	*Other assets*)
	1,784,097	544,865	869,223	3,198,185	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *45. RISK MANAGEMENT (continued)*

a. Risiko kredit (lanjutan) / *a. Credit risk (continued)*

(ii) Analisis konsentrasi risiko / *(ii) Risk concentration analysis*

(a) Sektor geografis / *(a) Geographical sectors*

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pengelompokan wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Bank yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

The following tables show the details of credit exposures categorised by geographical area as at 31 December 2023 and 2022. The geographical area grouping is based on the Bank's business operations which also illustrates the business potential of each region:

	31 Desember/*December* 2023							
	Jabodetabek	Jawa/*Java*[*)]	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Indonesia Timur dan Bali/ *East Indonesia and Bali*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Aset								***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32,440,778	-	-	-	-	-	32,440,778	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,322,303	2	13	74	2,081	-	2,324,473	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	71,195,560	61,872	44,094	-	-	-	71,301,526	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	356,695	71,495	3,038	-	-	-	431,228	*Acceptance receivables*
Piutang murabahah	37,811,118	30,959,995	41,321,128	11,954,658	14,456,197	-	136,503,096	*Murabahah receivables*
Piutang istishna	2	28	-	-	-	-	30	*Istishna receivables*
Piutang ijarah	29,265	53,075	61,278	7,835	66,947	-	218,400	*Ijarah financing*
Pinjaman qardh	5,569,913	2,151,760	1,428,816	609,006	1,547,586	-	11,307,081	*Funds of qardh*
Pembiayaan mudharabah	1,179,774	595,881	94,688	84	10,706	-	1,881,133	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	54,344,974	14,085,060	13,197,814	3,082,719	3,349,587	156,043	88,216,197	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain[**)]	952,061	48,854	33,252	11,293	46,503	-	1,091,963	*Other assets*[**)]
	206,202,443	48,028,022	56,184,121	15,665,669	19,479,607	156,043	345,715,905	
Cadangan kerugian penurunan nilai							(9,846,025)	*Allowance for impairment losses*
Neto							335,869,880	***Net***
Rekening administratif								***Administrative accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,639,164	140,823	91,820	17,154	4,388	-	1,893,349	*Unused financing facility*
Letter of Credit	325,605	40,370	-	-	-	-	365,975	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan	1,943,765	243,687	531,167	52,231	66,988	-	2,837,838	*Bank guarantees issued*
	3,908,534	424,880	622,987	69,385	71,376	-	5,097,162	

	31 Desember/*December* 2022						
	Jabodetabek	Jawa/*Java*[*)]	Sumatera	Kalimantan/ *Borneo*	Indonesia Timur dan Bali/ *East Indonesia and Bali*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,778,458	-	-	-	-	31,778,458	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,490,753	2	13	1	723	2,491,492	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	57,788,176	52,147	11,582	-	-	57,851,905	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	400,926	80,265	212	-	-	481,403	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	32,854,830	28,464,404	38,535,064	11,473,145	13,545,913	124,873,356	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	89	43	-	-	-	132	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	4,139	2,583	5,871	208	477	13,278	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	5,020,282	1,728,258	1,148,026	557,172	1,247,871	9,701,609	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	164,623	596,759	267,013	732	12,270	1,041,397	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	46,087,227	10,887,839	8,795,121	2,799,858	2,020,466	70,590,511	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain[**)]	940,830	39,425	26,441	9,490	42,538	1,058,724	*Other assets*[**)]
	177,530,333	41,851,725	48,789,343	14,840,606	16,870,258	299,882,265	
Cadangan kerugian penurunan nilai						(9,229,411)	*Allowance for impairment losses*
Neto						290,652,854	***Net***
Rekening Administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,534,261	121,925	182,605	19,391	3,626	1,861,808	*Unused financing facility*
Letter of Credit	157,620	24,611	-	-	-	182,231	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan	1,790,588	303,550	527,341	43,760	43,549	2,708,788	*Bank guarantees issued*
	3,482,469	450,086	709,946	63,151	47,175	4,752,827	

[*)] Pulau Jawa tidak termasuk area Jabodetabek
[**)] Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

[*)] *Java island excludes Jabodetabek area*
[**)] *Other assets consist of income receivables*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan)

(b) Sektor industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(ii) Risk concentration analysis** (continued)*

(b) Industrial sector

The following tables show the details of the credit exposure at the carrying amount categorised by industrial sector as at 31 December 2023 and 2022:

	31 Desember/*December* 2023					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***	**Perseorangan/ *Individuals***	**Jumlah/ *Total***	
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32,440,778	-	-	-	32,440,778	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	-	2,324,473	-	-	2,324,473	*Current accounts and placement with other banks*
Investasi pada surat berharga	68,666,168	1,925,650	709,708	-	71,301,526	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	-	82,801	348,427	-	431,228	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	43,301	101,798	8,575,481	127,782,516	136,503,096	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	-	30	30	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	1,285	217,115	218,400	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	1,434,965	-	3,440,996	6,431,120	11,307,081	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1,000,000	386,022	489,398	5,713	1,881,133	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	15,443,670	989,886	47,461,747	24,320,894	88,216,197	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	898,276	1,844	39,219	152,624	1,091,963	*Other assets*)
	119,927,158	5,812,474	61,066,261	158,910,012	345,715,905	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(9,846,025)	*Allowance for impairment losses*
Neto					335,869,880	***Net***
Rekening Administratif						***Administrative Accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	85,700	1,332,153	385,595	89,901	1,893,349	*Unused financing facility*
Letter of Credit	23,845	-	342,130	-	365,975	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan	571,247	88,393	2,153,323	24,875	2,837,838	*Bank guarantees issued*
	680,792	1,420,546	2,881,048	114,776	5,097,162	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk *(continued)*

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan)

(ii) Risk concentration analysis *(continued)*

(b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022: (lanjutan)

(b) Industrial sector (continued)

The following tables show the details of the credit exposure at the carrying amount categorised by industrial sector as at 31 December 2023 and 2022: (continued)

	31 Desember/*December* 2022					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***	**Perseorangan/ *Individuals***	**Jumlah/ *Total***	
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,778,458	-	-	-	31,778,458	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	-	2,491,492	-	-	2,491,492	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	55,423,534	1,819,571	608,800	-	57,851,905	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	-	115,504	365,899	-	481,403	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	84,992	16,304	8,657,193	116,114,867	124,873,356	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	-	132	132	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	381	12,897	13,278	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	1,398,963	-	2,996,207	5,306,439	9,701,609	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	225,222	405,198	404,132	6,845	1,041,397	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	15,610,929	756,815	38,560,120	15,662,647	70,590,511	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	896,690	2	22,843	139,189	1,058,724	*Other assets*)
	105,418,788	5,604,886	51,615,575	137,243,016	299,882,265	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(9,229,411)	*Allowance for impairment losses*
Neto					290,652,854	***Net***
Rekening Administratif						***Administrative Accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	162,774	50,956	386,327	1,261,751	1,861,808	*Unused financing facility*
Letter of Credit	-	-	182,231	-	182,231	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan	183,166	65,110	2,428,540	31,972	2,708,788	*Bank guarantees issued*
	345,940	116,066	2,997,098	1,293,723	4,752,827	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Analisis eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

1. *Secured financing*
2. *Partially secured financing*

Untuk *secured financing*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan adalah sebagai berikut:

a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kendaraan bermotor dan properti.

b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumer lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured financing* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis. Dengan demikian, tingkat risiko dari *partially secured financing* tidak sebesar nilai tercatat pembiayaannya.

Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

(iv) Manajemen risiko kredit pasca Pandemi COVID-19

Pasca Pandemi COVID-19, Bank mengadopsi kebijakan terkait pengelompokkan nasabah yang masih mendapat perlakukan khusus sesuai POJK No.19 tahun 2022 dan KDK No.34/KDK.03/2022 serta ketentuan internal Bank lainnya.

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

(iii) Analysis of maximum exposure to credit risk after considering the impact of collateral and other credit risk mitigation

1. Secured financing
2. Partially secured financing

For secured financing, the Bank determined the type and value of collateral according to the financing scheme. Types of collateral are as follows:

a. Physical collateral, such as land and buildings, proof of vehicle ownership ("BPKB") and properties.

b. Financial collateral, such as deposits (savings, current accounts, time deposits), securities and gold.

In case of default, the Bank will use the collateral as the last resort to recover counterparty obligations.

Partially secured financing consists of financing for fixed income employees, financing for retirees and other consumer financing. In their payment obligations, partially secured financing are generally made through automatic payroll deduction. Hence, the risk level of partially secured financing is not as big as the carrying value.

Financing risk mitigations for partially secured financing consists of employee recruitment decision letter and certificate of retirement.

(iv) Credit risk management after the COVID-19 Pandemic

After the COVID-19 Pandemic, the Bank adopted a policy regarding the grouping of customers who still receive special treatment in accordance with POJK No.19 of 2022 and KDK No.34/KDK.03/2022 as well as other internal Bank regulations.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko kredit pasca Pandemi COVID-19 (lanjutan)

Terhadap nasabah yang masih mendapat perlakuan khusus pasca pandemi COVID-19 maupun yang tidak mendapat perlakukan khusus lagi, Bank tetap melakukan *monitoring* pembiayaan melalui:

1. Analisis *watchlist* terhadap seluruh nasabah, terutama yang tidak mendapat perlakuan khusus sesuai POJK No. 19 tahun 2022 dan KDK No.34/KDK.03/2022 serta ketentuan internal Bank lainnya. Bank menetapkan *action plan* terhadap nasabah yang berpotensi mengalami penurunan sesuai hasil *watchlist*.

2. Pengembalian ke skema pembiayaan normal apabila kondisi membaik, restrukturisasi kembali sesuai dengan kondisi *cashflow* nasabah atau menetapkan langkah penyelamatan melalui penyelesaian pembiayaan, bagi nasabah yang tidak mendapat perlakukan khusus sesuai regulasi.

Bank senantiasa mereviu pengelolaan pembiayaan pasca pandemi COVID-19 sehingga penyesuaian dapat dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi perubahan regulasi eksternal.

Bank mereviu kecukupan CKPN atas pembiayaan yang masih mendapat perlakukan khusus pasca pandemi COVID-19 untuk mengantisipasi potensi risiko.

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko *benchmark* suku bunga.

Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui:
- Menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi *front office, middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan valuta asing.
- Menerapkan *segregation of duty* dalam pelaksanaan transaksi *treasury* antara *dealer* dan *supervisor*.

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(iv) Credit risk management after the COVID-19 Pandemic** (continued)*

For customers who still receive special treatment after the COVID-19 pandemic or who no longer receive special treatment, the Bank continues to monitoring financing through:

1. *Watchlist analysis of all customers, especially those who don't receive appropriate special treatment in accordance with POJK No. 19 of 2022 and KDK No.34/KDK.03/2022 and provisions other internal Bank. The Bank determines action plans for customers who have the potential to experience decline according to the watchlist results.*

2. *Returning to the normal financing scheme if conditions improve, restructuring again in accordance with customer cash flow conditions or determine rescue measures through financing settlements, for customers who do not receive special treatment according to regulations.*

The Bank always reviews it post-COVID-19 pandemic financing management so that adjustments can be made at the first opportunity when changes in external regulations occur.

The Bank reviews CKPN on financing who are still receiving special treatment after the COVID-19 pandemic to anticipate potential risks.

b. Market risk

Market risk is the risk due to changes in market prices, such as risks of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market risk consists of two types of risk: exchange rate risk and interest rate benchmark risk.

The Bank manages market risk through:

- *Applying the principle of segregation of duty by separating the functions of the front office, middle office, and back office in the carrying out securities and foreign exchange transactions.*
- *Applying segregation of duty in carrying out treasury transaction between dealer and supervisor.*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui: (lanjutan)

- Melakukan *cut loss* posisi terbuka sukuk apabila terdapat penurunan harga pasar.
- Melakukan reviu terhadap kebijakan dan standar prosedur operasi yang terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
- Menetapkan batas risiko pasar mencakup Posisi Devisa Neto ("PDN"), *Value at Risk* ("VaR"), Posisi Terbuka, *Stop Loss*, Transaksi *Treasury*, dan *Cut Loss*.
- Memantau pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar USD/IDR, *yield*, surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR"), dan informasi pasar terkini.
- Melakukan *mark to market* surat berharga dan revaluasi kurs secara harian.

Risiko *benchmark* suku bunga

Risiko *benchmark* suku bunga merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book*. Risiko benchmark suku bunga yang terdiri atas risiko spesifik dan risiko umum diperhitungkan dalam penilaian Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar.

Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya perbedaan posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam PDN baik secara individual maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Perhitungan PDN didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Market risk** (continued)*

The Bank manages market risk through: (continued)

- *Perform cut loss the sukuk open position if market price decline.*
- *Perform a review of policies and standard operating procedures related to market risk management.*
- *Setting market risk limits include Net Open Position ("NOP"), Value at Risk ("VaR"), Open Position, Stop Loss, Treasury Transactions, and Cut Loss.*
- *Monitoring the movement of external indicators including the USD/IDR exchange rate, yield, government securities, market yields, gold prices, Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") and the latest market information.*
- *Conducting mark to market toward marketable securities and daily foreign exchange rate revaluation.*

Benchmark rate risk

Benchmark rate risk is the risk due to changes in financial instrument prices from trading book positions. Benchmark rate risk which consists of specific risk and general risk is taken into account in the Risk Weighted Assets valuation for Market Risk.

Exchange rate risk

Exchange rate risk is the risk due to the gap of foreign exchange positions owned by the Bank which is reflected in the NOP either individually or as a whole. Included in the foreign exchange position are the trading book positions carried out with the aim of gaining short-term foreign exchange transaction benefits as well as banking book positions in the framework of NOP control.

The NOP is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated 1 July 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

b. Risiko pasar (lanjutan)

***b. Market risk** (continued)*

Risiko nilai tukar (lanjutan)

***Exchange rate risk** (continued)*

Berikut adalah PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

The NOP of Bank as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

Mata uang	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi devisa neto/ *Net open position*	*Currencies*
	31 Desember/*December* 2023			
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif				***Statement of Financial Position and Administrative Accounts***
Dolar Amerika Serikat	18,384,635	19,159,278	774,643	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	562,858	412,237	150,621	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	18,788	14,313	4,475	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	16,889	15,533	1,356	*European Euro*
Dolar Australia	5,114	29	5,085	*Australian Dollar*
United Arab Emirates Dirham	2,092	-	2,092	*United Arab Emirates Dirham*
Pound Sterling Inggris	2,052	-	2,052	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	1,452	157	1,295	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	251	-	251	*Hong Kong Dollar*
			941,870	
Modal (Catatan 47a)			38,115,228	*Capital (Note 47a)*
Rasio PDN			**2.47%**	***NOP Ratio***
	31 Desember/*December* 2022			
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif				***Statement of Financial Position and Administrative Accounts***
Dolar Amerika Serikat	8,659,320	8,593,063	66,257	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	127,706	20,025	107,681	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	18,130	10,577	7,553	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	14,085	12,479	1,606	*European Euro*
Dolar Australia	1,948	-	1,948	*Australian Dollar*
Pound Sterling Inggris	941	-	941	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	2,615	-	2,615	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	254	-	254	*Hong Kong Dollar*
			188,855	
Modal (Catatan 47a)			33,109,949	*Capital (Note 47a)*
Rasio PDN			**0.57%**	***NOP Ratio***

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan atas nilai tukar terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

The following tables show the sensitivity of the Bank's profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in exchange rate, assuming all other variables are constant for the years ended 31 December 2023 and 2022:

	Perubahan persentase/ *Change in percentage*	Dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ *Impact to profit or loss and other comprehensive income before tax*	
	31 Desember/*December* 2023		
Mata uang asing	+1%	9,419	*Foreign currencies*
	-1%	(9,419)	
	31 Desember/*December* 2022		
Mata uang asing	+1%	1,889	*Foreign currencies*
	-1%	(1,889)	

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, dampak atas perubahan nilai tukar dari mata uang selain Dolar Amerika Serikat tidak material.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama Bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan Bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbedaan antara ketersediaan sumber dana dan jatuh tempo piutang dan pembiayaan dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lainnya.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalisir risiko likuiditas antara lain sebagai berikut:

1) Pemisahan fungsi antara unit perbendaharaan sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit operasional sebagai *back office*.

2) Penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas.

3) Memelihara akses ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank.

4) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.

5) Pemantauan terhadap kondisi likuiditas Bank secara berkala melalui beberapa rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio* (“FDR”), rasio kewajiban antar bank, arus kas, dan perbedaan likuiditas.

6) Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum (“GWM”) dan *secondary reserve*.

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Market risk** (continued)*

***Exchange rate risk** (continued)*

For the year ended 31 December 2023 and 2022, the effect of fluctuations in exchange rates of currency other than the United States Dollar is not material.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk due to the Bank’s inability to meet its maturing obligations. Along with the development of the Bank’s business, liquidity risk is one of the risk that become the major concerns of the Bank. It may result from the growth of the Bank’s financing which is greater than the growth of third party funds. The difference between the availability of source of funds and the maturity of receivable and financing can lead to difficulty in fulfilling bank obligations to customers and other parties.

The actions taken by the Bank to minimise the liquidity risk include the following:

1) Separating the functions between the treasury unit as the front office, the risk management unit as the middle office, and the operations unit as the back office.

2) Placement funds in high quality liquid assets as liquidity reserves.

3) Maintaining access to the money market through placements and financing between banks.

4) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of liquidity risk.

5) Monitoring the liquidity conditions periodically through some liquidity ratios such Financing to Deposit Ratio (“FDR”), the ratio of inter-bank liabilities, cash flow and liquidity gaps.

6) Setting the liquidity risk limit such as limit of Statutory Reserve Requirement (“GWM”) and secondary reserve.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

Berikut adalah tabel analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

The following are the tables of assets and liabilities maturity analysis as at 31 December 2023 and 2022, based on the remaining time until the maturity date:

	31 Desember/*December* 2023						
Keterangan	**Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month***	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months***	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year***	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities***	**Jumlah/ *Total***	***Descriptions***
Aset							***Assets***
Kas	5,255,841	-	-	-	-	5,255,841	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,670,928	769,850	-	-	-	32,440,778	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,324,473	-	-	-	-	2,324,473	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	17,162,511	3,050,078	19,328,749	31,760,188	-	71,301,526	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	289,490	68,657	73,081	-	-	431,228	*Acceptance receivables*
Piutang - *murabahah, istihsna,* dan *ijarah*	187,326	215,094	2,726,139	133,592,967	-	136,721,526	*Receivables - murabahah, Isthishna and ijarah*
Pinjaman *qardh*	2,307,387	3,432,912	3,683,726	1,883,056	-	11,307,081	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	17,726	3,515	1,120,244	739,648	-	1,881,133	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	2,780,961	4,182,168	11,022,109	70,230,959	-	88,216,197	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain *)	77,248	76,689	250,554	687,472	-	1,091,963	*Other assets*)*
Jumlah aset	62,073,891	11,798,963	38,204,602	238,894,290	-	350,971,746	***Total asset***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	1,316,067	-	-	-	-	1,316,067	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	255,932	-	-	-	-	255,932	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan *wadiah*	67,873,898	-	-	-	-	67,873,898	*Wadiah deposits*
Liabilitas kepada Bank Indonesia	11,900,055	-	-	-	-	11,900,055	*Liabilities to Bank Indonesia*
Simpanan dari bank lain	1,761,301	-	-	-	-	1,761,301	*Deposits from other banks*
Kewajiban akseptasi	289,490	68,657	73,081	-	-	431,228	*Acceptance liabilities*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	-	-	-	667,264	-	667,264	*Estimated liabilities for employee benefits*
Liabilitas sewa	35	13,352	53,031	56,775	-	123,193	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain **)	646,909	-	-	-	-	646,909	*Other liabilities**)*
Jumlah liabilitas	84,043,687	82,009	126,112	724,039	-	84,975,847	***Total liabilities***
Dana *syirkah* temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah*	78,280,185	-	-	-	-	78,280,185	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	72,641,261	26,116,550	17,226,978	-	-	115,984,789	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	32,417,260	-	-	-	-	32,417,260	*Mudharabah demand deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	-	-	-	200,000	-	200,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Sukuk *mudharabah muqayyadah*	-	-	-	3,608	-	3,608	*Sukuk mudharabah muqayyadah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	776,250	-	-	-	-	776,250	*Mudharabah term financing*
Jumlah dana *syirkah* temporer	184,114,956	26,116,550	17,226,978	203,608	-	227,662,092	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	(206,084,752)	(14,399,596)	20,851,512	237,966,643	-	38,333,807	***Maturity gap***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

*) *Other assets consist of income receivables*
**) *Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium and temporary accounts*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

***c. Liquidity risk** (continued)*

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo: (lanjutan)

The following are the tables of assets and liabilities maturity analysis as at 31 December 2023 and 2022, based on the remaining time until the maturity date: (continued)

	31 Desember/*December* 2022						
Keterangan	**Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month***	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months***	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year***	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities***	**Jumlah/ *Total***	***Descriptions***
Aset							***Assets***
Kas	4,951,469	-	-	-	-	4,951,469	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,077,920	700,538	-	-	-	31,778,458	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,491,295	197	-	-	-	2,491,492	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	8,052,606	957,995	11,828,390	37,012,914	-	57,851,905	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	34,170	75,330	371,903	-	-	481,403	*Acceptance receivables*
Piutang - *murabahah, istishna,* dan *ijarah*	215,567	220,941	2,565,000	121,885,258	-	124,886,766	*Receivables - murabahah, istishna and ijarah*
Pinjaman *qardh*	1,651,654	3,723,784	2,470,218	1,855,953	-	9,701,609	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	9,809	98,222	176,926	756,440	-	1,041,397	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	2,925,305	4,256,933	8,215,084	55,193,189	-	70,590,511	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	54,018	56,016	236,725	711,965	-	1,058,724	*Other assets*)
Jumlah aset	51,463,813	10,089,956	25,864,246	217,415,719	-	304,833,734	***Total asset***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	1,009,502	-	-	-	-	1,009,502	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	192,775	-	-	-	-	192,775	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan *wadiah*	66,012,257	-	-	-	-	66,012,257	*Wadiah deposits*
Simpanan dari bank lain	2,218,697	-	-	-	-	2,218,697	*Deposits from other banks*
Kewajiban akseptasi	34,170	75,330	371,903	-	-	481,403	*Acceptance liabilities*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	-	-	-	689,018	-	689,018	*Estimated liabilities for employee benefits*
Liabilitas sewa	-	-	-	166,002	-	166,002	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain**)	651,902	-	-	-	-	651,902	*Other liabilities*)
Jumlah liabilitas	70,119,303	75,330	371,903	855,020	-	71,421,556	***Total liabilities***
Dana *syirkah* temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah*	72,897,352	-	-	-	-	72,897,352	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	74,582,576	15,601,987	10,575,779	-	-	100,760,342	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	22,754,968	-	-	-	-	22,754,968	*Mudharabah demand deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	-	-	1,375,000	-	-	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	-	-	778,375	-	-	778,375	*Mudharabah term financing*
Jumlah dana *syirkah* temporer	170,234,896	15,601,987	12,729,154	-	-	198,566,037	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	(188,890,386)	(5,587,361)	12,763,189	216,560,699	-	34,846,141	***Maturity gap***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

*) *Other assets consist of income receivables*
**) *Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium and temporary accounts*

Bank senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem operasi untuk memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dengan melakukan *monitoring* terhadap kondisi likuiditas bank melalui beberapa rasio likuiditas. Bank meyakini dana tetap tumbuh dan arus kas dari aktiva produktif dapat menjaga kecukupan likuiditas.

The Bank continually evaluates the effectiveness of the operating system to ensure that sufficient funds are available to meet all needs by monitoring the condition of the bank's liquidity through several liquidity ratios. The Bank believes that funds will continue to grow and cash flow from earning assets will be able to maintain sufficient liquidity.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian/insiden eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional selaras dengan pengembangan upaya pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan internal kontrol di cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan, dan pelaksanaan audit internal.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional di antaranya sebagai berikut:

1) Menyusun manual produk, kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis operasional sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas operasional Bank dan mensosialisasikannya secara memadai.

2) Membentuk *Senior Operasional Risk Head* ("SORH") yang mengkoordinir fungsi DCOR dan RBC dalam rangka pengelolaan risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan unit jaringan.

3) Menyiapkan *tools* yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko operasional, antara lain *Risk & Control Self Assessment, Key Risk Indicator, Loss Event Database*, Laporan Profil Risiko Operasional, dan *Control Testing.*

4) Melakukan kajian & analisis risiko operasional atas produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank.

5) Menerapkan *Business Continuity Management* ("BCM") untuk memastikan kelangsungan operasional Bank secara terus menerus meskipun terjadi gangguan (bencana) untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

d. Operational risk

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate internal processes, internal processes failures, human errors, system failures and/or external events/incidents that affect the Bank's operations.

Operational risk management is aligned with the development of internal control efforts. One of the efforts made is the implementation of internal control at the branch through the separation of duties and responsibilities, dual control mechanism in the implementation of the transaction function, deviation/ authorisation, restrictions on access to the system authority, increasing employee's competence and the implementation of internal audit.

The actions taken by the Bank to minimise operational risks include the following:

1) Prepare product manuals, policies, procedures and operational technical instructions as a guidance in carrying out the Bank operational activities and socialise them adequately.

2) Establish a Senior Operational Risk Head ("SORH") who coordinates DCOR and RBC functions in the framework of operational risk management in the Head Office work units and network units.

3) Preparing tools used in implementing operational risk management, including Risk & Control Self Assessment, Key Risk Indicators, Loss Event Database, Operational Risk Profile Reports and Control Testing.

4) Performing operational risk review & analysis for proposed new products or activities which will be launched by the Bank.

5) Applying a Business Continuity Management ("BCM") to ensure the continuity of operations of the Bank despite the disturbance (disaster) and to protect the interests of stakeholders.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko operasional (lanjutan)

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional di antaranya sebagai berikut: (lanjutan)

6) Menerapkan tata kelola IT secara baik dan memadai, antara lain melalui pembentukan IT *Steering Committee*, penerapan mekanisme *System Development Life Cycle,* penerapan standar keamanan IT dan manajemen akses, penerapan standar perangkat IT, dan penerapan *Disaster Recovery Plan.*

e. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank.

Risiko hukum yang timbul dapat berupa tuntutan kerugian materil ataupun immateril apabila Bank tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi tuntutan kerugian terhadap Bank dalam jumlah yang cukup material, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan di antaranya:

1) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.
3) Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4) Menentukan kebijakan cadangan perkara.

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***d. Operational risk** (continued)*

The actions taken by the Bank to minimise operational risks include the following: (continued)

6) Implement good and adequate IT governance, including through the establishment of an IT Steering Committee, implementation of the System Development Life Cycle mechanism, implementation of IT security standards and access management, implementation of standard IT tools and implementation of a Disaster Recovery Plan.

e. Legal risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses of juridical aspects. The emergence of legal risk can be caused by the absence of supporting laws and regulations or the weakness of the agreement, such as non-compliance with the legal terms of the contract or imperfect binding of collateral. As a company governed by the laws of the Republic of Indonesia, the Bank must comply with all applicable laws and regulations issued by Bank Indonesia/Financial Service Authority ("OJK") as a regulator in the banking industry in Indonesia as well as other regulations relating to business activities carried out by the Bank.

Legal risks that arise can be in the form of claims for material or immaterial losses if the Bank does not comply with the applicable rules and regulations. If there is a claim for losses against the Bank in a material amount, it can directly affect the Bank's financial performance.

In managing legal risk, the Bank performs actions such as:

1) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of legal risk in accordance with applicable regulations.
2) Developing a strong legal organisation.
3) Standardising contract and cooperation agreement in accordance with applicable regulations.
4) Determining the case provision policy.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Syariah. Dalam industri perbankan, Bank wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Syariah Nasional. Secara umum, risiko kepatuhan terkait erat dengan hukum yang berlaku dan peraturan, yang mengatur Bank, seperti:

1) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM");
2) Kualitas Aset Produktif;
3) Penyisihan Penghapusan Aset ("PPA");
4) Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
5) *Good Corporate Governance* ("GCG"); dan
6) Rencana Bisnis Bank ("RBB").

Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat mempengaruhi kelangsungan Bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank melakukan tindakan di antaranya:

1) Meningkatkan pemahaman tentang GCG dan kode etik.
2) Penguatan pelaksanaan GCG dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.
3) Menyusun dan menyampaikan laporan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4) Meningkatkan pelaksanaan *Know Your Customer* ("KYC"), Anti Pencucian Uang ("APU"), dan Pencegahan Pendanaan Teroris ("PPT").
5) Meningkatkan pelaksanaan *compliance certification*.
6) Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah.
7) Memberdayakan Kepatuhan Syariah untuk mereviu dan menganalisis kepatuhan dari produk Bank/kegiatan dengan prinsip syariah.

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

f. Compliance risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank failures in complying and/or applying applicable laws and regulations and Sharia principles. In the banking industry, the Bank is required to comply with regulations issued by the Government, Bank Indonesia, OJK and the National Sharia Boards. In general, this risk is closely related to compliance with applicable laws and regulations, which governs the Bank, such as:

1) Capital Adequacy Ratio ("CAR");
2) Quality of Earning Assets;
3) Allowance of Earning Assets ("PPA");
4) Legal Lending Limit;
5) Good Corporate Governance ("GCG"); and
6) Bank Business Plan ("RBB").

The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations related to banking activities may affect the continuity of the Bank.

In managing the compliance risks, the Bank performs actions such as:

1) Improving understanding of GCG and the code of conduct.
2) Strengthening GCG implementation and ensuring that all financing debtors meet all financing needs.
3) Preparing and submitting GCG to Financial Services Authority.
4) Increasing the implementation of the Know Your Customer ("KYC"), Anti Money Laundering ("APU") and the Prevention of Financing for Terrorism ("PPT").
5) Improving the implementation of compliance certification.
6) Working closely with the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance of the Bank with sharia principles.
7) Empowering Sharia Compliance to review and analyse the compliance of the Bank's products/activities with sharia principles.

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai dari aset dan liabilitas keuangan Bank memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut:

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarises the comparison between the carrying values before allowance for impairment losses and fair values of financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as at 31 December 2023 and 2022 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

As at 31 December 2023 and 2022, the carrying value before allowance for impairment losses of the Bank's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai/ *Carrying value before allowance for impairment losses*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai/ *Carrying value before allowance for impairment losses*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Investasi pada surat berharga	71,301,526	70,704,166	57,851,905	56,622,082	*Investments in marketable securities*

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
(ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
(iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

The tables below show the financial instruments recognised at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
(ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
(iii) Level 3: Fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for asset and liability that are not based on observable market data.

Nilai wajar tingkat 1 dinilai menggunakan data dari *Bloomberg*.

The fair value level 1 is valued by using data from Bloomberg.

Nilai wajar tingkat 2 dinilai menggunakan data dari *Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA")* dan *Net Asset Value report* dimana dihitung dengan model diskonto arus kas dengan kurva yield (diambil dari data pasar) terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

The fair value level 2 is valued by using data from Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA") and Net Asset Value report which is calculated using a discounted cash flow model based on current yield curve (derived from market data) appropriated with the remaining term of maturity.

	31 Desember/*December* 2023				
	Nilai wajar/ *Fair value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Investasi pada surat berharga	70,704,166	-	70,672,379	31,787	*Investments in marketable securities*

	31 Desember/*December* 2022				
	Nilai wajar/ *Fair value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Investasi pada surat berharga	56,622,082	-	56,622,082	-	*Investments in marketable securities*

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, piutang, dan pembiayaan yang diberikan dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

a. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain, tagihan akseptasi dan aset lain-lain.

Nilai tercatat dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

b. Investasi pada surat berharga

Nilai wajar untuk investasi pada surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik risiko kredit, jatuh tempo, dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian.

c. Liabilitas segera, simpanan *wadiah*, simpanan dari bank lain, liabilitas lain-lain, dan dana *syirkah* temporer.

Estimasi nilai wajar dari liabilitas segera, simpanan *mudharabah*, dan liabilitas lain-lain adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan *wadiah* dan simpanan dari bank lain dengan tingkat margin tetap dan liabilitas akseptasi ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin pasar uang dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

d. Piutang dan pembiayaan

Portofolio piutang dan pembiayaan Bank secara umum terdiri dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap. Piutang dan pembiayaan yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortised cost.*

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government sukuk classified as held to maturity, receivables and financing and marketable securities issued approximate their carrying values due to their short-term maturities.

a. Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks, acceptance receivables and other assets.

The carrying amount of current accounts and placements with Bank Indonesia and other banks, acceptance receivables and other assets are a reasonable approximations of fair value.

b. Investments in marketable securities

The fair value for amortised cost investments in marketable securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit risk, maturity and yield characteristics or using Internal valuation models.

c. Obligations due immediately, wadiah deposits, deposits from other banks, other liabilities and temporary syirkah funds.

The estimated fair value of obligations due immediately, mudharabah deposits and other liabilities are the amounts repayable on demand.

The estimated fair values of wadiah deposits and deposits from other banks with fixed rate margin and acceptance liabilities are determined based on discounted cash flows using money market margin rates for with similar remaining maturities.

d. Receivables and financing

Generally, the Bank's receivables and financing portfolio consists of receivables and financing with variable margin rate and short-term receivables and financing with fixed margin rate. Receivables and financing are stated at amortised cost.

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

d. Piutang dan pembiayaan (lanjutan)

Estimasi nilai wajar terhadap piutang dan pembiayaan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin yang berlaku untuk piutang dan pembiayaan dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan nilai tercatat atas piutang dengan tingkat margin tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Nilai wajar dari piutang dan pembiayaan yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan tingkat margin pasar saat ini. Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan nilai tercatat atas piutang dan pembiayaan jangka pendek dengan tingkat margin tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

d. Receivables and financing (continued)

The estimated fair values of receivables and financing are determined based on discounted cash flows using margin rates applied for receivables and financing with similar credit risk and remaining maturities.

The carrying amount of receivables and financing with variable margin rate and short-term receivables and financing with fixed margin rate are the reasonable approximations of their fair values.

The estimated fair value of loans represent the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates. The carrying amounts of variable rate receivables and financing and short-term fixed rate receivables and financing are the reasonable approximation of their fair values.

47. INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Bank dihitung berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 yang mencabut peraturan sebelumnya. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

47. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION

a. As at 31 December 2023 and 2022, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio ("CAR") are calculated based on OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014 dated 19 November 2014, as amended in previous regulation. The CARs are as follows:

	2023	2022	
Modal inti	36,095,427	31,232,293	*Core capital*
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	200,000	252,083	*Supplementary capital (maximum 100% over core capital)*
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	1,819,801	1,625,573	*General reserves of allowance for impairment losses on earning assets (maximum 1.25% of ATMR)*
	38,115,228	33,109,949	
Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR") Risiko Kredit	145,078,091	129,730,824	*Risk Weighted Assets ("RWA") for Financing Risk*
ATMR Risiko Pasar	1,640,536	306,184	*RWA for Market Risk*
ATMR Risiko Operasional	34,400,820	33,120,795	*RWA for Operational Risk*
	181,119,447	163,157,803	
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	21.24%	20.33%	*Bank's CAR for Credit Risk and Operational Risk*
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional	21.04%	20.29%	*Bank's CAR for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk*
Rasio KPMM yang diwajibkan	9.99%	9.95%	*Minimum CAR*

Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu *satisfactory*, maka KPMM minimum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Based on the risk profile as at 31 December 2023 and 2022, which is satisfactory, the minimum CAR as at 31 December 2023 and 2022, was determined at 9% to less than 10%.

47. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

a. Selain wajib membentuk modal inti dan modal pelengkap, Bank wajib untuk memenuhi *Countercyclical Buffer* yang ditetapkan dalam kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR sesuai dengan POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Hasil penilaian menunjukan bahwa Bank mampu untuk memenuhi KPMM sesuai dengan profil risiko dan mampu memenuhi ketentuan tambahan modal (*buffer*).

b. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan bersih masing-masing adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
NPF - Bruto	2.08%	2.42%	*NPF - Gross*
NPF - Bersih	0.55%	0.57%	*NPF - Net*

c. Rasio piutang, pembiayaan dan pinjaman usaha kecil terhadap jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman syariah yang diberikan Bank adalah sebesar 18,93% dan 20,19% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

d. Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing adalah sebesar Rp18.722.931 dan Rp23.229.777.

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat COVID-19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar:

	2023	2022	
Lancar	6,985,891	12,352,835	*Current*
Dalam perhatian khusus	517,334	834,982	*Special mention*
Kurang lancar	358,809	608,694	*Substandard*
Diragukan	359,437	357,398	*Doubtful*
Macet	507,478	470,109	*Loss*
Jumlah	8,728,949	14,624,018	*Total*

Skema restrukturisasi dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon pembiayaan bagi debitur.

e. Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar ("BMPD") kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat piutang, pembiayaan dan pinjaman pihak terkait yang melampaui ketentuan BMPD.

Pihak terkait dalam ketentuan BMPD adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

***47. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION** (continued)*

a. In addition to provide core capital and supplementary capital, the Bank is required to provide Countercyclical Buffer ranging from 0% to 2.5% of RWA based on POJK regulation No. 21/POJK.03/2014 regarding the Minimum Required Capital Adequacy Ratio of Sharia Bank.

The assessment result shows that the Bank has met the Minimum CAR in accordance with its risk profile and met additional capital buffer requirement.

b. As at 31 December 2023 and 2022, ratio of Non-Performing Financing ("NPF") gross and net, respectively, are as follows:

c. The ratio of small business receivables, financing and funds to total sharia receivables, financing and funds are 18.93% and 20.19% as at 31 December 2023 and 2022, respectively.

d. Receivables, financing and funds that have been restructured by the Bank 31 December 2023 and 2022 which are reported to the Financial Service Authority amounted to Rp18,722,931 and Rp23,229,777, respectively.

Total amount of restructured financing related COVID-19 based on OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 until 31 December 2023 and 2022 amounted to:

Restructuring scheme involves extension of receivables/financing maturity date, rescheduling and additional plafond of debtor's receivables/financing.

e. Based on the Maximum Limit for Distribution of Funds and Distribution of Large Funds ("BMPD") to the Financial Services Authority as at 31 December 2023 and 2022 there are no receivables, financing and funds related parties which exceeded the BMPD regulation.

Related parties in BMPD regulation are individuals or companies that have a controlling relationship with the Bank, either directly or indirectly, through ownership, management and/or financial relationships.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

f. Pada tanggal 8 Mei 2023, operasional Bank terdampak oleh insiden siber yang menyebabkan sistem Bank mengalami gangguan. Bank telah melakukan serangkaian tindakan perbaikan pada sistem, meningkatkan keamanan siber dan memastikan data-data keuangan lengkap dan akurat. Manajemen meyakini bahwa insiden telah berhasil ditangani tanpa dampak yang material terhadap performa keuangan Bank.

47. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION *(continued)*

f. On 8 May 2023, the Bank's operations were affected by a cyber incident which caused the Bank's system to experience disruption. The Bank has carried out a series of corrective actions on its systems, enhanced the cybersecurity and ensured that financial data is complete and accurate. Management believes that the incident has been successfully handled without a material impact on the Bank's financial performance.

48. INFORMASI SEGMEN

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, Bank menerapkan perubahan terhadap penyajian segmen operasi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif. Segmen operasi Bank dibagi berdasarkan beberapa segmen operasi sebagai berikut: *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, Ritel dan *Treasury Banking* & Kantor Pusat. Dalam menentukan hasil segmen operasi, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Komponen *Internal Transfer Pricing Model* diterapkan dalam perhitungan kinerja laba rugi masing-masing segmen.

Perubahan pada penyajian segmen operasi antara lain:
- Pemisahan segmen *Wholesale* menjadi segmen *Corporate Banking* dan *Commercial Banking*.
- Pengelolaan dana nasabah Kementerian, Lembaga Pemerintah, yayasan dan universitas dipindahkan ke segmen Hubungan Kelembagaan yang sebelumnya tercatat di segmen Lainnya dimigrasikan pada segmen Hubungan Kelembagaan.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank:

- *Corporate Banking*: melayani badan usaha seperti BUMN dan anak perusahaannya, lembaga negara, perusahaan multinasional, bank dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk modal ventura *non-linkage*), pembiayaan sindikasi, perusahaan terbuka, dan perusahaan sekuritas.

- *Commercial Banking*: melayani badan usaha seperti BUMD dan anak perusahaannya, pemerintah daerah, rumah sakit (kecuali diatur dalam produk khusus), perguruan tinggi negeri dan swasta (yayasan yang memiliki perguruan tinggi).

48. SEGMENT INFORMATION

As at the year ended 31 December 2022, the Bank implemented changes to the presentation of operating segments in order to provide more comprehensive information. The Bank's operating segment is divided based on the following operating segments: Corporate Banking, Commercial Banking, Institutional Relation, Retail and Treasury Banking & Head Office. In determining the results of operating segments, certain asset and liability accounts and revenues and expenses are attributed to each segment based on management's internal reporting policies. The components of Internal Transfer Pricing Model are applied in the calculation of profit or loss performance of each segments.

The changes in presentation of operating segments, including:
- *Separation of the Wholesale segment into Corporate Banking and Commercial Banking segments.*
- *The management of customer funds from Ministries, Government Institutions, foundations and universities was transferred to the Institutional Relations segment, which was previously listed in the Others segment, migrating to the Institutional Relation segment.*

The following summary describes the operations of each segment in the Bank's segment reporting:

- *Corporate Banking: serves business entities such as SOEs and their subsidiaries, state institutions, multinational companies, banks and non-bank financial institutions (including non-linkage venture capital), syndicated financing, public companies and securities companies.*

- *Commercial Banking: serves business entities such as BUMD and its subsidiaries, regional governments, hospitals (unless regulated in special products), state and private universities (foundations with tertiary institutions).*

48. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank: (lanjutan)

- Hubungan Kelembagaan: saat ini difokuskan untuk pengelolaan dana nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah lembaga pemerintah dan dana pensiun BUMN.

- Ritel: saat ini meliputi antara lain:
  - Ritel SME: melayani badan usaha swasta berbentuk badan hukum dan nonbadan hukum untuk tujuan produktif, pendidikan dasar & menengah, klinik, koperasi, pola *linkage*, inti plasma, dan perorangan.
  - Ritel Mikro: ditujukan untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk di dalamnya adalah penyaluran pembiayaan bersubsidi untuk mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat.
  - Ritel Konsumer: melayani perorangan untuk tujuan konsumtif/multiguna (antara lain produk Griya, Multiguna, Kendaraan, Pensiunan, Kartu Pembiayaan, Cicil emas dan Gadai Emas, pembiayaan program pemerintah).

- Lainnya: saat ini meliputi antara lain:
  - Treasuri: segmen *treasury* terkait dengan kegiatan *treasury* Bank termasuk transaksi valuta asing*, money market, fixed income*, bisnis perbankan internasional, pasar modal, supervisi Kantor Luar Negeri.
  - Kantor Pusat: terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa servis secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya.

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direviu oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

48. SEGMENT INFORMATION *(continued)*

The following summary describes the operations of each segment in the Bank's segment reporting: (continued)

- *Institutional Relation: currently focused on the management of customer funds and other transactions belonging to customers of government institutions and BUMN pension funds.*

- *Retail: currently includes, among others:*
  - *SME Retail: serving private business entities in the form of legal entities and non-legal entities for productive purposes, primary & secondary education, clinics, cooperatives, linkage patterns, plasma core and individuals.*
  - *Micro Retail: aimed at serving individual customers and micro entrepreneurs, including the distribution of subsidised financing to support government programs in empowering community businesses.*
  - *Consumer Retail: serving individuals for consumptive/multipurpose purposes (among others Griya products, Multipurpose, Vehicles, Pensioners, Financing Cards, Gold Installments and Pawn Gold, government program financing).*

- *Others: currently include, among others:*
  - *Treasury: treasury segment related to the Bank's treasury activities including foreign exchange transactions, money market, fixed income, international banking business, capital market, supervision of Foreign Office.*
  - *Head Office: related to the management of assets and liabilities other than those already managed by other operating segments, including receiving cost allocation for centralised service provision to other segments as well as revenues/costs that are not allocated to other segment reporting.*

Performance is measured based on segment profit before income tax, as reported in an internal management report reviewed by the Bank Management. Segment profit is used to measure performance where management believes that the information is most relevant in evaluating the results of the segment relative to other entities operating in the industry.

48. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *48. SEGMENT INFORMATION (continued)*

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi:

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows:

Keterangan / *Descriptions*	*Corporate Banking*	*Commercial Banking*	Hubungan Kelembagaan/ *Institutional Relation*	*Retail Banking*	*Treasury Banking* & Kantor Pusat/ *Treasury Banking & Head Office*	Penyesuaian & Eliminasi/ *Adjustment & Elimination**)	Jumlah/ *Total*
31 Desember/*December* 2023							
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib**) / *Revenue from fund management as mudharib**)	4,169,405	1,014,705	3,655,374	22,626,774	2,306,807	(11,521,322)	22,251,743
Hak pihak ketiga atas bagi hasil*) / *Third parties' share on return**)	(2,981,436)	(654,183)	(3,325,439)	(10,277,479)	(445,294)	11,690,663	(5,993,168)
Hak bagi hasil milik Bank / *Bank's share in profit sharing*	1,187,969	360,522	329,935	12,349,295	1,861,513	169,341	16,258,575
Pendapatan usaha lainnya / *Other operating income*	358,216	104,025	-	1,679,885	2,062,340	-	4,204,466
Beban usaha / *Operating expenses*	(134,737)	(153,841)	(84,689)	(5,495,768)	(4,380,169)	-	(10,249,204)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif bersih / *Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*	(336,193)	(133,567)	-	(2,155,440)	2,721	-	(2,622,479)
Total beban / *Total expenses*	(470,930)	(287,408)	(84,689)	(7,651,208)	(4,377,448)	-	(12,871,683)
Pendapatan nonoperasional / *Non-operating income*	-	-	-	-	(2,156)	-	(2,156)
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan / *Income before zakat and income tax expenses*	1,075,255	177,139	245,246	6,377,972	(455,751)	169,341	7,589,202
Zakat / *Zakat*	(25,822)	(4,254)	(5,889)	(153,165)	(600)	-	(189,730)
Beban pajak / *Tax expense*	(228,650)	(37,668)	(52,151)	(1,356,260)	(21,000)	-	(1,695,729)
Laba bersih / *Net income*	820,783	135,217	187,206	4,868,547	(477,351)	169,341	5,703,743
Aset segmen / ***Segment of assets***							
Pembiayaan *wholesale* / *Wholesale financing*	54,541,919	12,969,097	-	-	-	-	67,511,016
Pembiayaan ritel / *Retail financing*							
SME / *SME*	-	-	-	19,345,720	-	-	19,345,720
Mikro / *Micro*	-	-	-	22,912,195	-	-	22,912,195
Konsumer***) / *Consumer****)	-	-	-	130,547,113	-	-	130,547,113
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan / *Provision for impairment losses for financing*	(4,042,106)	(1,105,624)	-	(4,540,732)	-	-	(9,688,462)
Nonpembiayaan - bersih / *Non-financing - net*	920,109	-	-	-	122,076,433	-	122,996,542
	51,419,922	11,863,473	-	168,264,296	122,076,433	-	353,624,124
Liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas segmen / ***Segment of liabilities, temporary syirkah funds and equity***							
Pendanaan / *Funding*	22,354,117	6,990,589	79,770,650	185,573,903	14,508,087	-	309,197,346
Nonpendanaan / *Non-funding*	-	-	-	-	44,426,778	-	44,426,778
	22,354,117	6,990,589	79,770,650	185,573,903	58,934,865	-	353,624,124

Keterangan / *Descriptions*	*Corporate Banking*	*Commercial Banking*	Hubungan Kelembagaan/ *Institutional Relation*	*Retail Banking*	*Treasury Banking* & Kantor Pusat/ *Treasury Banking & Head Office*	Penyesuaian & Eliminasi/ *Adjustment & Elimination**)	Jumlah/ *Total*
31 Desember/*December* 2022							
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib**) / *Revenue from fund management as mudharib**)	3,028,731	995,601	2,770,467	19,841,444	2,180,414	(9,193,792)	19,622,865
Hak pihak ketiga atas bagi hasil*) / *Third parties' share on return**)	(1,929,202)	(575,465)	(2,272,436)	(8,899,486)	(134,359)	9,778,779	(4,032,169)
Hak bagi hasil milik Bank / *Bank's share in profit sharing*	1,099,529	420,136	498,031	10,941,958	2,046,055	584,987	15,590,696
Pendapatan usaha lainnya / *Other operating income*	235,198	25,350	-	686,723	2,753,840	-	3,701,111
Beban usaha / *Operating expenses*	(96,186)	(106,097)	(67,091)	(4,606,877)	(5,019,085)	-	(9,895,336)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif bersih / *Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*	(500,333)	(407,703)	-	(2,112,972)	(727,789)	-	(3,748,797)
Total beban / *Total expenses*	(596,519)	(513,800)	(67,091)	(6,719,849)	(5,746,874)	-	(13,644,133)
Pendapatan nonoperasional / *Non-operating income*	-	-	-	-	8,534	-	8,534
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan / *Income before zakat and income tax expenses*	738,208	(68,314)	430,940	4,908,832	(938,445)	584,987	5,656,208
Zakat / *Zakat*	(17,175)	-	(10,026)	(114,204)	-	-	(141,405)
Beban pajak / *Tax expense*	(152,381)	-	(88,955)	(1,013,285)	-	-	(1,254,621)
Laba bersih / *Net income*	568,652	(68,314)	331,959	3,781,343	(938,445)	584,987	4,260,182
Aset segmen / ***Segment of assets***							
Pembiayaan *wholesale* / *Wholesale financing*	46,139,198	11,044,987	-	-	-	-	57,184,185
Pembiayaan ritel / *Retail financing*							
SME / *SME*	-	-	-	18,904,947	-	-	18,904,947
Mikro / *Micro*	-	-	-	18,740,411	-	-	18,740,411
Konsumer***) / *Consumer****)	-	-	-	112,875,313	-	-	112,875,313
Cadangan kerugian penurunan Nilai pembiayaan / *Provision for impairment losses for financing*	(4,060,934)	(1,064,139)	-	(4,226,235)	152,920	-	(9,198,388)
Nonpembiayaan - bersih / *Non-financing - net*	859,122	-	-	-	106,361,848	-	107,220,970
	42,937,386	9,980,848	-	146,294,436	106,514,768	-	305,727,438
Liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas segmen / ***Segment of liabilities, temporary syirkah funds and equity***							
Pendanaan / *Funding*	10,197,506	4,543,448	77,370,904	170,456,759	4,228,374	-	266,796,991
Nonpendanaan / *Non-funding*	-	-	-	-	38,930,447	-	38,930,447
	10,197,506	4,543,448	77,370,904	170,456,759	43,158,821	-	305,727,438

*) Termasuk komponen *internal transfer pricing* antar segmen operasi / *Include component of internal transfer pricing among operating segments*
**) Termasuk eliminasi komponen *internal transfer pricing* / *Include elimination of internal transfer pricing components*
***) Termasuk segmen *pawning* dan hasanah *card* / *Include pawning and hasanah card segment*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

Liabilitas kontinjensi

Dalam menjalankan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum yang terkadang mengandung tuntutan ganti rugi dimana Bank berposisi sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan para pihak terhadap perjanjian/kontrak.

Walaupun terdapat perkara yang masih berproses, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan posisi hukum Bank, tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maupun yang masih dalam proses masing-masing sebesar Rp2.988 dan Rp2.928. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk telah memadai untuk menutup kerugian akibat hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Contingent liabilities

In conducting the business, the Bank faces various legal cases which sometimes involve claims for compensation in which the Bank is positioned as a defendant, especially in relation to the parties' compliance with agreements/contracts.

Although there are cases that are still in process, the Bank believes that based on information currently available and the Bank's legal position, these legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of the Bank.

As at 31 December 2023 and 2022, the Bank has established a provision (included in "Other Liabilities") for a number of legal claims which have permanent legal force (inkracht) and which are still in process amounting to Rp2,988 and *Rp2,928*, *respectively. Management believes that the provision is adequate to cover losses due to the legal risks.*

50. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

50. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

Keterangan	1 Januari/ *1 January 2023*	Aktivitas nonkas/ *Non-cash activity*	Arus kas/ *Cash flow*	Selisih kurs/ *Foreign exchange difference*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	*Descriptions*
			31 Desember/*December* 2023				
Sukuk *mudharabah* subordinasi	1,375,000	-	(1,175,000)	-	-	200,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	778,375	-	(5,057)	2,932	-	776,250	*Mudharabah term financing*
Sukuk *mudharabah muqayyadah*	-	(151)	3,759	-	-	3,608	*Sukuk mudharabah muqayyadah*
Liabilitas sewa	166,002	91,933	(134,742)	-	-	123,193	*Lease liabilities*
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	11,900,055	-	-	11,900,055	*Liabilities to Bank Indonesia*
			31 Desember/*December* 2022				
Keterangan	1 Januari/ *1 January 2022*	Aktivitas nonkas/ *Non-cash activity*	Arus kas/ *Cash flow*	Selisih kurs/ *Foreign exchange difference*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	*Descriptions*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	1,375,000	-	-	-	-	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	-	-	742,500	35,875	-	778,375	*Mudharabah term financing*
Liabilitas sewa	289,101	1,093	(124,192)	-	-	166,002	*Lease liabilities*

51. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 01/BSI/DPS/OPINI/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, Dewan Pengawas Syariah ("DPS") PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"), serta opini syariah dari DPS.

51. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letter No. 01/BSI/DPS/OPINI/I/2024 dated 16 January 2024, the Sharia Supervisory Board ("DPS") of PT Bank Syariah Indonesia Tbk expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the year ended 31 December 2023, have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council ("DSN-MUI"), and sharia opinion of DPS.

51. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (lanjutan)

Berdasarkan surat No. 03/BSI/DPS/OPINI/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, DPS PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta opini syariah dari DPS.

51. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD *(continued)*

Based on letter No. 03/BSI/DPS/OPINI/I/2023 dated 18 January 2023, the DPS of PT Bank Syariah Indonesia Tbk expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the year ended 31 December 2022, have complied with fatwa and sharia regulations issued by DSN-MUI, and sharia opinion of DPS.

52. RENCANA BARANG MODAL

Bank memiliki komitmen barang modal terkait dengan renovasi bangunan, pengadaan kendaraan dinas, perlengkapan komputer, ATM dan jasa lisensi sistem adalah sebesar Rp2.018.556 dan Rp576.702, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

52. CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS

The Bank has capital expenditure plans in relation to the building renovations, procurement of office vehicles, computer equipments, ATMs and system license services amounting to Rp2,018,556 and Rp576,702 as at 31 December 2023 and 2022, respectively.

53. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh DSAK-IAI.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

53. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2023 are as follows:

- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" insurance contract regarding long-term liabilities with the covenant;*
- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current; and*
- *Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.*

The above standards will be effective on 1 January 2024 and early adoption is permitted.

- *SFAS 74: "Insurance Contract"; and*
- *Amendment of SFAS 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.*

The above standards will be effective on 1 January 2025.

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFAS and ISAKs will be changed as published by DSAK-IAI.

As at the authorisation date of financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

54. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN SEBELUMNYA

Bank melakukan reklasifikasi atas penyajian aset tidak berwujud yang menjadi bagian dari aset tetap pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Pengaruh reklasifikasi tersebut pada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

54. RECLASSIFICATIONS OF THE PRIOR YEAR FINANCIAL STATEMENTS

The Bank reclassified the presentation of intangible assets which were part of fixed assets in the prior year financial statements. The effect of the reclassification on the statement of financial position and statement of cash flows for the year ended 31 December 2022 are as follows:

	2022			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah reklasifikasi/ *After reclassification*	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
ASET				***ASSETS***
Aset tetap dan aset hak guna - bersih	5,654,698	(258,688)	5,396,010	*Fixed assets and right-of-use assets - net*
Aset tidak berwujud - bersih	-	258,688	258,688	*Intangible assets - net*
LAPORAN ARUS KAS				***STATEMENT OF CASH FLOWS***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(2,041,797)	144,715	(1,897,082)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset tidak berwujud	-	(144,715)	(144,715)	*Acquisition of intangible assets*

Jika Bank menyajikan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, saldo aset tetap dan aset hak guna - bersih serta aset tidak berwujud - bersih masing-masing sebesar Rp3.871.257 dan Rp184.696 pada 1 Januari 2022; arus kas perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud masing-masing sebesar Rp698.897 dan Rp88.607 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Tidak ada perubahan lain pada laporan posisi keuangan pada 1 Januari 2022 yang diperlukan, dan oleh karena itu Bank tidak menyajikan laporan tambahan posisi keuangan pada awal periode komparatif.

If the Bank were to present the statement of financial position at the beginning of comparative period, fixed assets and right-of-use assets - net and intangible assets - net balance of Rp3,871,257 and Rp184,696, respectively; the cash flows from acquisition of fixed assets and intangible assets of Rp698,897 and Rp88,607, respectively for the year ended 31 December 2021. No other changes to the statement of financial position as at 1 January 2022 would have been required, and therefore the Bank does not present the additional statement of financial position at the beginning of the comparative period.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Lampiran

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/ SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah Indonesia dan Unit Usaha Syariah

Keterangan	Halaman
PERIODE TAHUNAN	
I. Ruang Lingkup	
a. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUS tahunan meliputi:	√
1. Informasi umum;	√
2. Informasi kinerja keuangan;	√
3. Eksposur risiko dan permodalan;	√
4. Tata kelola;	√
5. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	√
6. Informasi terkait dengan kelompok usaha BUS.	
b. Uraian masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:	
1. Informasi Umum	
Informasi umum dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan BUS paling sedikit meliputi:	
a) Ikhtisar Data Keuangan Penting	12
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) Tahun Buku atau sejak BUS melakukan kegiatan usaha, bagi BUS yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 2 (dua) tahun. Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit meliputi:	12
(1) net pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus;	13
(2) Laba/rugi operasional;	13
(3) Laba/rugi sebelum pajak;	13
(4) Laba/rugi bersih;	14
(5) Total laba/rugi komprehensif;	14
(6) Laba bersih per saham;	14
(7) Jumlah aset;	12
(8) Jumlah liabilitas;	12-13
(9) Jumlah ekuitas;	13
(10) Aset produktif;	175
(11) Dana pihak ketiga;	155; 184
(12) Pembiayaan yang diterima;	13
(13) Rasio keuangan, paling sedikit meliputi:	
i. Rasio KPPM;	15
ii. Rasio ROA;	15
iii. Rasio ROE;	15
iv. Rasio BOPO;	15
v. Rasio CIR;	15
vi. Persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD;	15
vii. GWM;	15
viii. Rasio PDN;	15

Keterangan					Halaman
			ix.	Rasio MPF gross dan net, dan	15
			x.	Rasio laba/rugi terhadap pendapatan; dan	15
		(14)		informasi lain yang relevan	15
	b)	Profil BUS			
		Profil BUS paling sedikit meliputi:			
		(1)		nama BUS termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada Tahun Buku;	67
		(2)		informasi mengenai kantor pusat BUS yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai BUS meliputi:	
			i.	Alamat;	68
			ii.	Nomor telepon;	68
			iii.	Nomor facsimile;	68
			iv.	Alamat surat elektronik; dan	68
			v.	Alamat situs web.	68
		(3)		Riwayat singkat BUS;	70-71
		(4)		Visi dan misi BUS	74-75
		(5)		kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada Tahun Buku, serta jenis produk dan aktivitas;	76-86
		(6)		struktur organisasi BUS, paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah direksi yang disertai dengan nama dan jabatan;	100-101
		(7)		susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham, termasuk:	
			I.	pemegang saham yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham BUS;	138
			ii.	anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham BUS;	139-142
			iii.	kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing- masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham BUS (jika ada); dan	138
			iv.	informasi mengenai pemegang saham pengendali BUS sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	143
		(8)		profil direksi, dewan komisaris, dan DPS, paling sedikit meliputi:	
			i.	susunan direksi, dewan komisaris, dan DPS, serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.	103-126
				Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS yang terjadi setelah Tahun Buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan direksi, dewan komisaris, dan/ atau DPS sebelum dan setelah perubahan;	-
			ii.	Foto terbaru;	103-126
			iii.	usia	103-126
			iv.	Kewarganegaraan;	103-126
			v.	Riwayat pendidikan;	103-126
			vi.	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
				a. nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS;	103-126

Keterangan					Halaman
				b. rangkap jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS (jika ada); dan	103-126
				c. pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS;	103-126
			vii.	pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS selama Tahun Buku (jika ada); dan	338-352; 362-366; 380-390
			viii.	hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (jika ada) dan nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali tersebut;	103-126; 327-328; 371
		(9)		profil singkat pejabat eksekutif, yang meliputi susunan, jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;	131-133
		(10)		jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia pegawai dalam Tahun Buku;	236-137
		(11)		nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	146-147; 151
				Dalam hal terdapat lembaga dan/ atau profesi penunjang yang memberikan jasa secara berkala kepada BUS, misalnya kantor akuntan publik dan notaris, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	146-147
		(12)		penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima BUS, baik yang berskala nasional maupun internasional dalam Tahun Buku terakhir (jika ada), yang meliputi:	25
			i.	nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	25
			ii.	badan atau lembaga yang memberikan penghargaan dan/ atau sertifikasi; dan	25
			iii	masa berlaku penghargaandan/ atau sertifikasi (jika ada).	25
	c)	Laporan Direksi			
		Laporan direksi paling sedikit meliputi uraian singkat mengenai kinerja BUS yang terdiri atas:			
		(1)		strategi dan kebijakan yang ditetapkan;	49
		(2)		perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;	50
		(3)		kendala yang dihadapi BUS;	50-51
		(4)		gambaran tentang prospek usaha;	51-52
		(5)		penerapan tata kelola BUS;	52-53
		(6)		perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	54-55
		(7)		aktivitas utama;	76-86; 192-202
		(8)		teknologi informasi;	53; 222-232
		(9)		penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM;	50
		(10)		persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana;	50
		(11)		perkembangan perekonomian dan target pasar;	48-49
		(12)		jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	87-99
		(13)		jumlah, jenis, dan lokasi jaringan kantor BUS;	87
		(14)		kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;	139-142
		(15)		perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;	-
		(16)		hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan	52
		(17)		sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	136-137; 210-221

Keterangan				Halaman
	d)	Laporan Dewan Komisaris		36
		Laporan dewan komisaris paling sedikit meliputi:		
		(1)	penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan BUS;	38-39
		(2)	hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS;	39-40
		(3)	tanggapan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi;	41
		(4)	tanggapan atas penerapan tata kelola BUS;	42
		(5)	perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	42-43
		(6)	frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi.	41-42
2	Informasi Kinerja Keuangan			
	Informasi kinerja keuangan meliputi analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lain dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, yang paling sedikit meliputi:			
	a)	tinjauan kinerja per segmen usaha antara lain segmen konsumer, segmen ritel, atau segmen korporasi paling sedikit mengenai:		156-167
		(1)	Pendapatan; dan	156-167
		(2)	Profitabilitas;	156-167
	b)	tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit meliputi:		
		(1)	penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset;	168-170
		(2)	dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;	184
		(3)	ekuitas;	172-173
		(4)	pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan total laba/rugi komprehensif; dan	173-174
		(5)	arus kas;	174
	c)	analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan;		175
	d)	struktur permodalan;		181-182
	e)	informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada);		183
	f)	aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;		185-189
	g)	uraian mengenai dividen selama 2 (dua) Tahun Buku terakhir (jika ada), paling sedikit:		
		(1)	kebijakan dividen;	189
		(2)	tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen nonkas;	189
		(3)	jumlah dividen per saham, baik berupa kas maupun nonkas;	189
		(4)	jumlah pembayaran dividen per tahun;	189
	h)	perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berpengaruh signifikan terhadap BUS dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan		205-206
	i)	perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);		207
	j)	Laporan distribusi bagi hasil;		175-176
	k)	Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan		176-177
	l)	Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.		177

Keterangan					Halaman
3)	Eskposur Risiko dan Permodalan				
	Ruang lingkup eksposur risiko dan permodalan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.				243; 252-293
4)	Tata Kelola				
	a)	Informasi tata kelola			296
		Dalam hal BUS mengungkapkan informasi tata kelola sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup informasi tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.			296-527
	b)	Laporan Keberlanjutan			530
		(1)	Laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.		
			Dalam hal BUS menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.		
		(2)	Laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:		
			(a)	Lingkungan hidup;	-
			(b)	Praktik ketenagakerjaan;	-
			(c)	Praktik kegiatan institusi yang sehat;	-
			(d)	Konsumen; dan	-
			(e)	Pengembangan masyarakat.	-
				Dalam hal BUS menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), BUS dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.	
5)	Laporan Keuangan yang Telah Diaudit				533 (Lampiran)
	Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:				533 (Lampiran)
	(a)	Laporan posisi keuangan;			533 (Lampiran)
	(b)	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;			533 (Lampiran)
	(c)	Laporan perubahan ekuitas;			533 (Lampiran)
	(d)	Laporan arus kas; dan			533 (Lampiran)
	(e)	catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.			533 (Lampiran)

Keterangan						Halaman
	6)	Informasi Terkait dengan Kelompok Usaha BUS				
		Bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, menambahkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan dengan:				
		a)	Struktur kelompok usaha BUS yang meliputi:			143
			(1)	Struktur kelompok usaha BUS, yang antara lain terdiri dari BUS, Entitas Anak, perusahaan terelasi, Entitas Induk sampai dengan ultimate shareholder;		-
			(2)	struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS; dan		-
			(3)	pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (shareholders acting in concert).		-
				Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;		-
		b)	transaksi antara BUS dengan pihak berelasi dalam kelompok usaha BUS, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:			193-204
			(1)	informasi transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;		193-204
			(2)	pihak berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;		193-204
			(3)	jenis transaksi dengan pihak berelasi, antara lain:		
				(a)	kepemilikan silang (cross shareholding);	√
				(b)	transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha lain;	√
				(c)	pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;	√
				(d)	penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;	√
				(e)	eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan	√
				(f)	pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement (repo);	√
		c)	transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;			193-204
		d)	penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/ atau pihak yang telah memperoleh penyaluran dana dari BUS;			-
		e)	adanya larangan, batasan, dan/ atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas (regulatory capital) antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha; dan			-
		f)	nama dan alamat Entitas Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi BUS tersebut (jika ada).			-
	c)	BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.				√

Referensi SEOJK

Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik

Keterangan	Halaman
I. Ketentuan Umum	
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	√
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik.	√
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	√
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	√
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	√
e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	√
f. Direksi	√
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut.	√
g. Dewan Komisaris:	√
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut.	√
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:	√
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	√
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	√
2. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	√
3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	√
4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	√

Keterangan		Halaman
II.	**Bentuk Laporan Tahunan**	
1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√
2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√
3.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	√
4.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√
III.	**Isi Laporan Tahunan**	
1.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:	
a.	Ikhtisar data keuangan penting;	√
b.	Informasi saham (jika ada);	√
c.	Laporan Direksi;	√
d.	Laporan Dewan Komisaris;	√
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	√
f.	Analisis dan pembahasan manajemen;	√
g.	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	√
h.	Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	√
i.	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	√
j.	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	√
2.	Uraian Isi Laporan Tahunan	
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	12
1)	pendapatan/penjualan;	13
2)	laba bruto;	13
3)	laba (rugi);	14
4)	jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	14
5)	total laba (rugi) komprehensif;	14
6)	jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	14
7)	laba (rugi) per saham;	14
8)	jumlah aset;	12
9)	jumlah liabilitas;	12-13
10)	jumlah ekuitas;	12-13
11)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	-
12)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	-
13)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	15
14)	rasio lancar;	-
15)	rasio liabilitas terhadap ekuitas;	-
16)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	-
17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	15
b.	Informasi Saham Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	16

Keterangan	Halaman
1) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	16
a) Jumlah saham yang beredar;	16
b) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	16
c) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	16
d) Volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	16
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;	16
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;	16
2) Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	18
a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	-
b) Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham	-
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	-
d) Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	-
e) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	-
3) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	18
4) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut;	-
c. Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat:	46
1) Uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	49
a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	49
b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	49
c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	49-50
d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	50
e) Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	50-51
2) Gambaran tentang prospek usaha;	51-52
3) Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	52-53
4) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	-
d. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	36
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	38-39
2) Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	39-40
3) Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	41
4) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	42
5) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	-
6) Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	-
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	67

Keterangan		Halaman
1)	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	68
2)	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	69
	a) Alamat;	69
	b) Nomor telepon;	69
	c) Nomor faksimile;	69
	d) Alamat surat elektronik; dan	69
	e) Alamat Situs Web;	69
3)	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	70-71
4)	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	74-75
5)	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	76-86
6)	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik;	87-99
7)	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	100-101
8)	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	102
9)	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	117-127
	a) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	117-127
	b) Foto terbaru;	117-127
	c) Usia;	117-127
	d) Kewarganegaraan;	117-127
	e) Riwayat pendidikan;	117-127
	f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	117-127
	(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	117-127
	(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	117-127
	g) Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;	117-127; 371
	h) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	54-55
10)	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	103-112
	a) Nama;	103-112
	b) Foto terbaru;	103-112
	c) Usia;	103-112
	d) Kewarganegaraan;	103-112
	e) Riwayat pendidikan;	103-112
	f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	103-112
	(2) Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	103-112
	(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	103-112

Keterangan	Halaman
(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	103-112
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafilias	103-112; 327-328
h) Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	331-332
i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	42-43
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	-
12) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;	136-137
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	138
a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	138
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	139-142
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik;	138
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	139-142
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	138-139
a) Kepemilikan institusi lokal;	138-139
b) Kepemilikan institusi asing;	138-139
c) Kepemilikan individu lokal; dan	138-139
d) Kepemilikan individu asing;	138-139
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	143
17) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama di mana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada); Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	
18) Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek di mana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	144
19) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	145
20) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya meliputi:	145
a) Nama dan alamat;	145
b) Periode penugasan;	145
c) Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	145
d) Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	145
e) Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan	145
21) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP;	146-147

Keterangan	Halaman
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	151
1) Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	156
a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	156-167
b) Pendapatan/penjualan; dan	156-167
c) Profitabilitas;	156-167
2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	168
a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	168-170
b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	170-172
c) Ekuitas;	172-173
d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	173-174
e) Arus kas	174
3) Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	178-179
4) Tingkat Kolektibilitas Piutang Emiten Atau Perusahaan Publik Dengan Menyajikan Perhitungan Rasio Yang Relevan;	179-181
5) Struktur Modal (Capital Structure) Dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal (Capital Structure) Tersebut Disertai Dasar Penentuan Kebijakan Dimaksud;	181-182
6) Bahasan Mengenai Ikatan Yang Material Untuk Investasi Barang Modal Dengan Penjelasan Paling Sedikit Meliputi:	183
a) Tujuan Dari Ikatan Tersebut;	-
b) Sumber Dana Yang Diharapkan Untuk Memenuhi Ikatan Tersebut;	-
c) Mata Uang Yang Menjadi Denominasi; Dan	-
d) Langkah Yang Direncanakan Emiten Atau Perusahaan Publik Untuk Melindungi Risiko Dari Posisi Mata Uang Asing Yang Terkait;	-
7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	183
a) Jenis Investasi Barang Modal;	183
b) Tujuan Investasi Barang Modal; Dan	183
c) Nilai Investasi Barang Modal Yang Dikeluarkan;	183
8) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	183
9) Prospek Usaha Dari Emiten Atau Perusahaan Publik Dikaitkan Dengan Kondisi Industri, Ekonomi Secara Umum Dan Pasar Internasional Disertai Data Pendukung Kuantitatif Dari Sumber Data Yang Layak Dipercaya;	183-184
10) Perbandingan Antara Target/Proyeksi Pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil Yang Dicapai (Realisasi), Mengenai:	184
a) Pendapatan/penjualan;	184
b) Laba (rugi);	184
c) Struktur modal (capital structure);	184
d) Kebijakan dividen; atau	184
e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	184
11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	184-185
a) Pendapatan/penjualan;	184-185
b) Laba (rugi);	184-185

Keterangan	Halaman
c) Struktur modal (capital structure);	184-185
d) Kebijakan dividen; atau	184-185
e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	184-185
12) Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	185-189
13) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	189
a) Kebijakan dividen;	189
b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	189
c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	189
d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	189
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	-
14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	191
a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	191
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	-
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	191-192
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	191-192; 194-203
b) Nama pihak yang melakukan transaksi;	194-203
c) Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	194-203
d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	203
e) Pemenuhan ketentuan terkait;	204
f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	193
(1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara laindilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle); dan	204
(2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle);	204
g) Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	204
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	-
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	-
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	205-206
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	207
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	294
1) RUPS, paling sedikit memuat:	302

Keterangan			Halaman
	a)	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	305-
		(1) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	308-311; 312-320
		(2) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	-
	b)	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	307
2)	Direksi, mencakup antara lain:		367
	a)	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	367; 369
	b)	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	367
	c)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;	373-379
	d)	Delatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	380
		(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	380; 370
		(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	380-390
	e)	Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	392
		(1) Prosedur penilaian kinerja; dan	392
		(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	392-393
	f)	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	-
3)	Dewan Komisaris, mencakup antara lain:		321
	a)	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	322-323
	b)	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	321
	c)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;;	332-334
	d)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	
		(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	338-339; 326
		(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	340-352
	e)	Penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit memuat:	391-392; 353-354
		(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	391-392; 353-354
		(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	391-392; 353-354
		(3) Pihak yang melakukan penilaian;	391-392; 353-354
	f)	Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	354
		(1) Prosedur penilaian kinerja; dan	354
		(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	354
4)	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		399
	a)	Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan	399

Keterangan	Halaman
b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	400
(1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	400
(2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	400
(3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	401
5) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	355
a) Nama;	355
b) Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	355
c) Periode penugasan dewan pengawas syariah;	355
d) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	355
e) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	61; 356-362
6) Komite Audit, mencakup antara lain:	402
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	406-407
b) Usia;	406-407
c) Kewarganegaraan;	406-407
d) Riwayat pendidikan;	406-407
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	406-407
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	406-407
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	406-407
f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	407
g) Pernyataan independensi Komite Audit;	408-409
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	412-413
i) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	409-412
j) Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	413
7) Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	414
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	416-417
b) Usia;	416-417
c) Kewarganegaraan;	416-417
d) Riwayat pendidikan;	416-417
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	416-417
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	416-417
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	416-417
f) Periode dan masa jabatan anggota komite;	415
g) independensi komite;	417
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	419-420
i) Uraian tugas dan tanggung jawab;	414-415
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	415

Keterangan			Halaman
	k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	418-419
	l)	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	420
	m)	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	-
		(1) Alasan tidak dibentuknya komite; dan	-
		(2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	-
8)		Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	421; 432-448
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	422-423
	b)	Usia;	422-423
	c)	Kewarganegaraan;	422-423
	d)	Riwayat pendidikan;	422-423
	e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	422-423
		(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	422-423
		(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	422-423
	f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;	422
	g)	Pernyataan independensi komite;	425
	h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	430-431
	i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	421
	j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	422
	k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	427-430
	l)	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	431
9)		Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	432
	a)	Nama;	432
	b)	Domisili;	432
	c)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	432
		(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	432
	d)	Riwayat pendidikan;	432
	e)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	435
	f)	Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	434
10)		Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	449
	a)	Nama kepala Unit Audit Internal;	450
	b)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal; dan	450
		(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	450
	c)	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	452-453
	d)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	454
	e)	Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	449

Keterangan	Halaman
f) Uraian tugas dan tanggung jawab;	451
g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	450
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	455
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	456
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	456
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	457
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	457
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	233
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	233; 239-242
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	250-293
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	241
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	242
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	478
a) Pokok perkara/gugatan;	478-479
b) Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	478-479
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	478-479
14) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	480-482
15) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	500
a) Pokok-pokok kode etik;	501
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	501
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	502
16) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	509
a) Jumlah saham dan/atau opsi;	-
b) Jangka waktu pelaksanaan;	-
c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	-
d) Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	-
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	329
a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	329-330; 372-373
b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	329-330; 372-373
18) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	503
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran;	503; 504
b) Perlindungan bagi pelapor;	505
c) Penanganan pengaduan;	504-505

Keterangan	Halaman
d) Pihak yang mengelola pengaduan; dan	503
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	
(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	504
(2) Tindak lanjut pengaduan;	504
19) Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	496
a) Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	496
b) Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	496-498
20) Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	518-523
a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	518-523
b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	-
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	530
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	-
a) Penjelasan strategi keberlanjutan;	-
b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	-
c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	-
d) Penjelasan Direksi;	-
e) Tata kelola keberlanjutan;	-
f) Kinerja keberlanjutan;	-
g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	-
h) Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan	-
i) Anggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	-
2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	-
3) Informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:	-
a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/ atau	-
b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	-
4) Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	-
5) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	-
a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	-
b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	-

	Keterangan	Halaman
	6) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab social dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	-
	7) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	-
i.	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	533 (Lampiran)
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sector Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	533 (Lampiran)
j.	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	64-65
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	64-65

Halaman ini sengaja dikosongkan.

LAPORAN TAHUNAN 2023

EKSPANSI DAN AKSELERASI BISNIS UNTUK PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Silahkan memindai Kode QR berikut untuk mengunduh Laporan Tahunan ini

www.bankbsi.co.id
BSI Call 14040

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Kantor Pusat
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930

Bank Syariah Indonesia @banksyariahindonesia Bank Syariah Indonesia bankbsi_id